



**“Dengan PII,
Infrastruktur Jadi Teratur”**
PII, for a Well-Structured Infrastructure

“Dengan PII, Infrastruktur Jadi Teratur”

PII, for a Well-Structured Infrastructure

Pemerintah telah menetapkan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan dan kesinambungan kinerja ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan sosial. Mengingat bahwa infrastruktur merupakan proyek strategis yang memiliki karakteristik jangka panjang dan investasi yang tidak sedikit, Pemerintah melakukan inovasi berbagai skema pembiayaan dalam membangun infrastruktur, salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Skema KPBU ini merupakan solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan fiskal Pemerintah. Dalam konteks inilah penjaminan atas proyek berskema KPBU yang diberikan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) menjadi sangat penting demi keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2018, PT PII dengan telah dilaksanakannya mandat baru untuk memberikan penjaminan pada proyek non-KPBU, serta melakukan kegiatan dalam penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, PT PII secara lengkap dapat mengawal proses pembangunan proyek-proyek infrastruktur dari tahap awal, yakni penyiapan proyek, hingga akhir pemantauan operasional proyek.

Seluruh mandat tersebut memberikan peran bagi PT PII untuk membantu Pemerintah dalam menciptakan proyek infrastruktur agar menjadi lebih teratur. Teratur dari sisi disiplin proses, alokasi risiko, asas kemanfaatan, akuntabilitas, dan kesinambungan proyek di masa mendatang.

The government has established infrastructure development as a development priority to support the improvement and sustainability of national economic performance as well as improving social welfare. Considering that infrastructure is a strategic project with long-term characteristics and significant amounts of investments, the Government implements a number of innovative funding schemes for infrastructure development, including among others, the Public Private Partnership (PPP) scheme.

The PPP scheme is a strategic solution in overcoming the government's fiscal limitations. In this context, the presence of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) that provides guarantee facilities for PPP projects, become essential for the sustainability of infrastructure development.

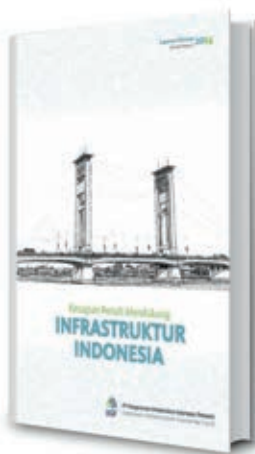
In 2018, with the implementation of new mandate for PT PII to also provide guarantee facilities for non-PPP projects, as well as activities in project preparation and transaction advisory, PT PII has been able to safeguard the entire process of infrastructure project development, from the initial phase or project preparation, up to the operational monitoring of completed projects.

These mandates provides PT PII with significant opportunities to support the Government in establishing well-structured infrastructure projects, in terms of a disciplined process, risk allocation, benefit principle, accountability, and future project sustainability.



Kesinambungan Tema

Continuity of Themes



2014

Kesiapan Penuh Mendukung Infrastruktur Indonesia

PT PII siap mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui penyediaan program penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur yang dikembangkan melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Keberadaan Penjaminan PT PII dapat menarik partisipasi swasta dalam proyek infrastruktur nasional sehingga menjembatani kesenjangan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur

Full Readiness to Support Indonesian Infrastructure

PT PII is ready to support national infrastructure development through the provision of guarantee programs for infrastructure projects developed through the Public Private Partnership (PPP) scheme. The existence of PT PII Guarantee will attract the participation of the private sector for national infrastructure projects to bridge the funding gap for infrastructure development



2015

Memacu Investasi, Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

Peran dan kehadiran PT PII yang memiliki kredibilitas tinggi bagi penjaminan keamanan investasi di bidang pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting di tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan pada saat itu, baik secara internasional maupun nasional. PT PII mampu memberikan kepercayaan dan minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor infrastruktur.

Encouraging Investment, Accelerating Infrastructure Development

The role and presence of highly credible PT PII for investment security guarantees in infrastructure development become very important in the challenging economic conditions at that time, both nationally and internationally. PT PII is able to provide investors with the confidence and interest to invest in the infrastructure sector.



2016

Dukungan Berkelanjutan terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia

PT PII berkomitmen untuk fokus mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia dengan memberikan penjaminan atas proyek-proyek yang berkualitas melalui kerangka evaluasi, strukturisasi dan pengelolaan mitigasi risiko dalam tahapan pemantauan guna memastikan keberlanjutan dari pembangunan proyek yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di persaingan ekonomi dunia.

Continuously Supporting Infrastructure Development in Indonesia

PT PII is committed to focus on supporting infrastructure development in Indonesia by providing guarantee on qualified projects through a framework of evaluation, structuring and risk mitigation management. This monitoring process helps ensure a continuity of project development that will provide benefit for all Indonesians as well as increase the competitiveness of Indonesia in the global economic competition.



2017

Infrastruktur Mempersatukan Bangsa melalui Penjaminan

Memberikan kontribusi pada pembangunan infrastruktur, sesuai dengan nawacita Pemerintah yang menginginkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Melalui kontribusi PT PII sebagai lembaga penjamin dalam pembangunan infrastruktur ini, diharapkan mampu menyatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Infrastructure Unifies Nation through Guarantee

Provided contribution to infrastructure development in accordance with the government's nine priority agenda (Nawacita) for equitable development all across Indonesia. Through its contribution, the Company as a guarantor institution in infrastructure development is expected to unite the nation from Sabang to Merauke.



2018

Dengan PII, Infrastruktur Jadi Teratur

Dengan alokasi risiko yang adil dan berimbang, penjaminan yang diberikan Perseroan terhadap proyek infrastruktur akan memberikan kepastian pihak swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan. Begitu juga kepastian bagi lembaga-lembaga penyedia pendanaan. Dengan demikian, peran PT PII menjadi sangat penting, yaitu membuat pembangunan infrastruktur menjadi lebih teratur.

PII, for a Well-Structured Infrastructure

By having fair and balanced risk allocation, guarantee provided by the Company on infrastructure projects will give an assurance for the private sector to be involved in development stages. As well as assurance for the funding institutions. Thus, the role of PT PII is very important, namely to propel infrastructure developments into better arrangement.



Kilas Kinerja

Performance Highlights

Proyek Project



Pada tahun 2018, PT PII telah menandatangani 2 proyek penjaminan KPBU dan 1 proyek Non KPBU, melakukan penyiapan 3 proyek PDF, menerbitkan 12 CTP, dan melakukan kegiatan *guidance & consultation* untuk 16 proyek.

In 2018, PT PII has signed 2 PPP guarantee projects and 1 Non-PPP project, prepared 3 PDF projects, issued 12 CTPs, and conducted guidance & consultation activities for 16 projects.



Skor Penerapan GCG GCG Implementation Score



PT PII dengan bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan *assessment* terhadap penerapan GCG tahun 2018, dengan hasil skor 86,7 dan kategori "Sangat Baik", meningkat dibandingkan dengan hasil tahun sebelumnya yaitu 80,5 dengan kategori "Baik".

PT PII with the assistance of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) has completed the assessment on the 2018 GCG implementation with the result: score of 86.7 and "Very Good" category, improved from the previous year's results of 80.5 with the category "Good".



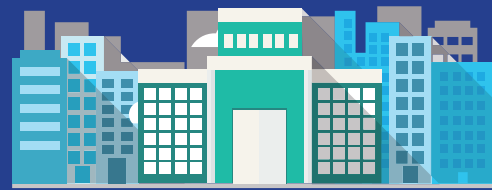


Aset Perusahaan The Company's Assets



2,51%

PT PII berhasil membukukan aset sebesar Rp10.620,92 miliar, tumbuh 2,51% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.360,65 miliar.



PT PII posted total assets of Rp10,620.92 billion, a growth of 2.51% compared to the previous year, which amounted to Rp10,360.65 billion.

8,92%

PT PII membukukan pendapatan Rp834,25 miliar, tumbuh 8,92% dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp765,96 miliar, dikarenakan aktivitas bisnis baru yakni penjaminan Non-KPBU serta penyiapan proyek dan pendampingan transaksi.

PT PII posted total revenues of Rp834.25 billion, a growth of 8.92% compared to 2017 at Rp765.96 billion, due to new business activities, namely Non-PPP guarantee, project preparation and transaction assistance.

5,60%

Laba sebelum pajak penghasilan yang dibukukan mencapai Rp477,46 miliar, meningkat 5,60% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp452,14 miliar

Profit before income tax was posted at Rp477.46 billion, increasing by 5.60% compared to 2017, which amounted to Rp452.14 billion

2,24%

Posisi ekuitas PT PII mencapai Rp10.480,67 miliar, tumbuh 2,24% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp10.251,44 miliar.

The equity position of PT PII amounted to Rp10,480.67 billion, increasing by 2.24% compared to 2017 at Rp10,251.44 billion.

17,75%

Posisi kas dan setara kas PT PII pada akhir tahun buku 2018 mencapai Rp1.699,18 miliar, tumbuh 17,75% dibandingkan tahun 2017.

The position of cash and cash equivalents of PT PII at the end of the 2018 fiscal year amounted to Rp1,699.18 billion, increasing by 17.75% compared to 2017.

Daftar Isi

TABLE OF CONTENTS



- 2 **Kesinambungan Tema**
Continuity of Themes
- 4 **Kilas Kinerja**
Performance Highlights

8 **IKHTISAR KINERJA KEUANGAN** Financial Performance Highlights

- 10 **Ikhtisar Keuangan Penting**
Overview of Financial Data Highlights
- 13 **Rasio-Rasio Keuangan**
Financial Ratios
- 14 **Ikhtisar Saham**
Shares Highlights
- 14 **Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)**
Suspension of Share Trading and/or Shares Delisting
- 15 **Aksi Korporasi**
Corporate Action
- 15 **Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi**
Bonds, Sukuk or Convertible Bonds Highlights

16 **LAPORAN MANAJEMEN** Management Report

- 18 **Laporan Dewan Komisaris**
Report of the Board of Commissioners
- 32 **Laporan Direksi**
Report of the Board of Directors
- 52 **Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018**
Statement of Accountability for the 2018 Annual Report

54 **PROFIL PERUSAHAAN** Company Profile

- 56 **Identitas Perusahaan**
Corporate Identity
- 57 **Riwayat Singkat Perusahaan**
Brief History of the Company
- 60 **Jejak Langkah Perusahaan**
Milestones
- 66 **Bidang Usaha**
Line of Business
- 68 **Struktur Organisasi**
Organizational Structure
- 70 **Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan**
The Company's Vision, Mission and Culture
- 73 **Profil Dewan Komisaris**
Profile of the Board of Commissioners
- 76 **Profil Direksi**
Profile of the Board of Directors
- 79 **Profil Pejabat Eksekutif**
Profile of Executive Officers
- 80 **Komposisi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi Serta Biayanya**
Employee Composition and Competency Development and its Costs
- 83 **Komposisi Pemegang Saham**
Shareholder Composition
- 84 **Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi**
List of Subsidiaries and/or Associates
- 85 **Struktur Grup Perusahaan**
Corporate Group Structure
- 85 **Kronologi Penerbitan Saham**
Chronology on Share Listing
- 85 **Kronologi Penerbitan/Pencatatan Efek Lainnya**
Chronology of Other Securities Listing/Issuance

- 86 **Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal**
Name and Address of Capital Market Supporting Institutions and/or Professions
- 87 **Penghargaan dan/atau Sertifikasi**
Awards and/or Certifications
- 88 **Peristiwa Penting**
Significant Events
- 93 **Informasi pada *Website* Perusahaan**
Information on the Company's Website
- 94 **Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal**
Competence Development Program for BoC, BoD, Committees, Corporate Secretary and Internal Audit Unit

98 **TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS** Business Support Overview

- 100 **Sumber Daya Manusia**
Human Capital
- 116 **Teknologi Informasi**
Information Technology

122 **ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN** Management Discussion and Analysis

- 124 **Tinjauan Ekonomi dan Bisnis**
Economic and Business Review
- 132 **Tinjauan Operasi per Segmen Usaha**
Performance Review per Business Segment
- 168 **Tinjauan Kinerja Keuangan**
Financial Performance Review
- 180 **Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya**
Other Financial Information Review



194	TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance
196	Pendahuluan Introduction
212	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders
220	Dewan Komisaris Board of Commissioners
232	Komisaris Independen Independent Commissioner
233	Direksi Board of Directors
239	Penilaian terhadap Dewan Komisaris dan Direksi Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors
245	Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors
246	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors
256	Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi Affiliation of the Board of Commissioners and the Board of Directors
257	Informasi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Information on Concurrent Position of the Board of Commissioners and Board of Directors
259	Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Policy on Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors
261	Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs of the Board of Commissioners
262	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary to the Board of Commissioners

265	Komite Audit Audit Committee
279	Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Function of Nomination and Remuneration Committee
279	Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee
287	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
291	Internal Audit Internal Audit
296	Akuntan Publik Public Accountant
298	Manajemen Risiko Risk Management
316	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
323	Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan Significant Cases Faced by the Company
324	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Corporate Information and Data
325	Benturan Kepentingan Conflict of Interest
325	Kode Etik Code of Conduct
328	Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan Statement of Corporate Culture
330	Komitmen GCG dalam Pengendalian Gratifikasi GCG Commitment in Gratuity Control
333	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Report of State Officials Assets
334	Whistleblowing System Whistleblowing System
339	Praktik Bad Corporate Governance Bad Corporate Governance Practices

340	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Corporate Social Responsibility
342	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
346	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Lingkungan Hidup Corporate Social Responsibility to the Environment
348	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Corporate Social Responsibility in Employment, Occupational Health and Safety
352	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Bidang Sosial Kemasyarakatan Corporate Social Responsibility In Community Social Development
353	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen Corporate Social Responsibility To Customers

355	INFORMASI KEUANGAN AUDITED Audited Financial Information

01

Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights

10 Ikhtisar Keuangan Penting
Overview of Financial Data Highlights

13 Rasio-Rasio Keuangan
Financial Ratios

14 Ikhtisar Saham
Shares Highlights

14 Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)
Suspension of Share Trading and/or Shares Delisting

15 Aksi Korporasi
Corporate Action

15 Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi
Bonds, Sukuk or Convertible Bonds Highlights





Ikhtisar Keuangan Penting

Overview of Financial Data Highlights

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Statement of Income and Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah) | (in IDR million)

Uraian Description	2018	2017	2016	2015	2014
Pendapatan Usaha Operating Revenues	834.252	765.959	821.107	533.065	529.992
Beban Usaha Operating Expenses	(356.787)	(313.824)	(315.946)	(213.974)	(207.383)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	477.465	452.135	505.161	319.091	322.609
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	471.080	470.469	502.447	339.455	346.043
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	330.378	528.230	536.751	335.548	303.574
LABA TAHUN BERJALAN PROFIT FOR THE YEAR	471.080	470.469	502.447	339.455	346.043
Diatribusikan kepada pemilik entitas induk Attributable to owner of parent entity; and	-	-	-	-	-
Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali Attributable to non-controlling interest	-	-	-	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN * COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR *	330.378	528.230	536.751	335.548	303.574
Diatribusikan kepada pemilik entitas induk Attributable to owner of parent entity; and	-	-	-	-	-
Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali Attributable to non-controlling interest	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) per saham Earnings per Share (IDR)	-	-	-	-	-
DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM DIVIDEND TO SHAREHOLDERS	101.15	100.65	-	-	-

*: PT PII merupakan perusahaan dengan kepemilikan saham 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia dan bukan perusahaan terbuka, sehingga tidak terdapat laba yang diatribusikan baik kepada pemilik entitas induk maupun kepentingan non pengendali.
PT PII is a company with 100% shares owned by the Government of the Republic of Indonesia and is not a listed company, hence, there has been no profits attributable both to owner of parent entity and non-controlling interest.

2,51%
Aset | Assets

Pada tahun 2018, aset Perseroan tumbuh 2,51%, dari Rp10,36 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp10,62 triliun.

In 2018, the Company's assets grew by 2.51%, from Rp10.36 trillion in 2017 to Rp10.62 trillion.

Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah) | (in IDR million)

Uraian Description	2018	2017	2016	2015	2014
ASET ASSET					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	1.699.179	1.443.048	2.895.545	1.616.841	806.052
Investasi Investments	8.673.174	8.672.826	5.785.731	5.522.139	4.554.803
Piutang Usaha Account Receivables	79.986	74.836	68.689	72.248	24.095
Piutang Lainnya Other Receivables	8.978	6.979	3.936	981	620
Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka Prepaid Expenses and Advance	2.448	2.423	4.685	8.317	3.423
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	368	-	-	-	11.619
Aset Tetap Fixed Assets	18.776	16.267	20.650	1.913	1.781
Aset Tak Berwujud Intangible Assets	1.195	992	1.690	2.376	2.748
Beban Tangguhan Accrued Expense	43.360	41.665	57.941	74.593	55.883
Beban <i>Front End</i> Front End Fee	-	763	763	763	763
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	88.106	95.501	77.010	79.350	58.788
Uang Jaminan yang Dapat Dikembalikan Refundable Deposits	5.346	5.346	7.789	1.887	1.236
Jumlah Aset Total Assets	10.620.916	10.360.646	8.924.429	7.381.408	5.521.811
LIABILITAS LIABILITIES					
Utang Usaha Account Payables	7.481	3.342	4.960	9.510	6.889
Utang Pajak Taxes Payables	4.816	3.484	2.483	3.053	2.748
Biaya yang Masih Harus Dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-lain Accrued Expenses, Provisions and Other Payables	42.913	28.722	37.597	27.993	20.356
Pendapatan Tangguhan Unearned Revenue	8.510	8.085	5.385	22.313	22.313
Pinjaman Penerusan Two-Step Loans	55.127	45.276	35.805	21.981	9.686
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Obligation	21.398	20.293	14.335	9.445	8.254
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	140.245	109.202	100.565	94.295	70.246
EKUITAS EQUITY					
Modal Saham Share Capital	8.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000	4.500.000
Rugi Belum Direalisasi atas Kepemilikan Aset Keuangan Unrealized Loss on Available-for-sale Financial Assets	(111.375)	32.356	(25.878)	(61.303)	(57.989)
Rugi Aktuarial Actuarial Loss	843	(2.186)	(1.714)	(593)	-
Saldo Laba Retained Earnings					
- Ditetapkan Penggunaannya Appropriated	116.446	92.922	67.800	50.800	33.300
- Tidak Ditetapkan Penggunaannya Unappropriated	2.474.757	2.128.352	1.783.656	1.298.209	976.254
Jumlah Ekuitas Total Equity	10.480.671	10.251.444	8.823.864	7.287.113	5.451.565
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS TOTAL LIABILITIES & EQUITY	10.620.916	10.360.646	8.924.429	7.381.408	5.521.811



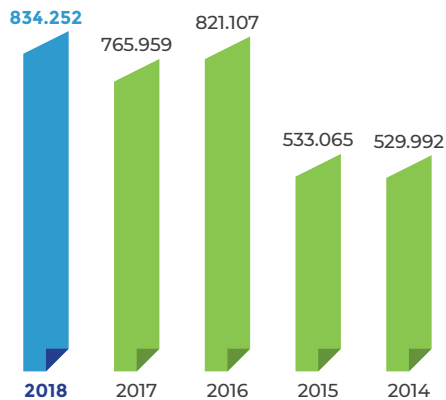
Ikhtisar Keuangan Penting

Overview Of Financial Data Highlights

Pendapatan Usaha

Operating Revenues

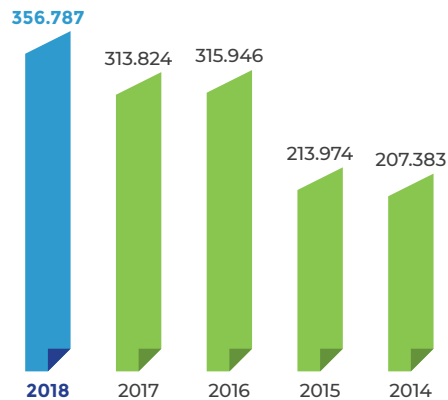
(dalam jutaan Rupiah) | (in IDR million)



Beban Usaha

Operating Expenses

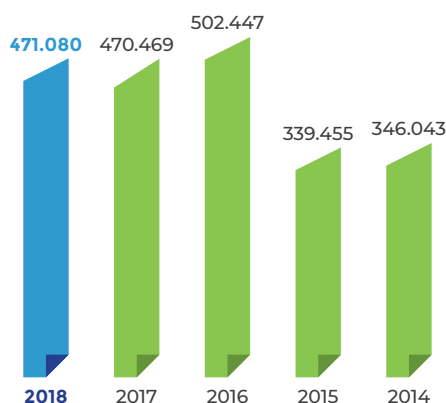
(dalam jutaan Rupiah) | (in IDR million)



Laba Tahun Berjalan

Profit for the Year

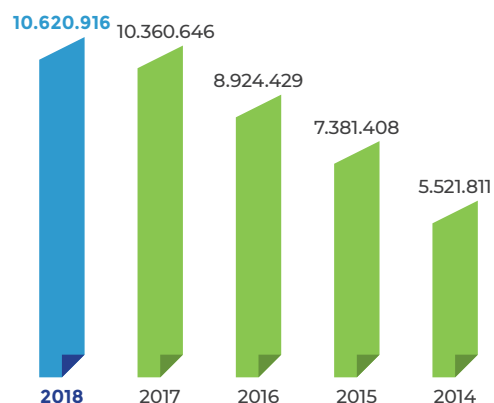
(dalam jutaan Rupiah) | (in IDR million)



Aset

Assets

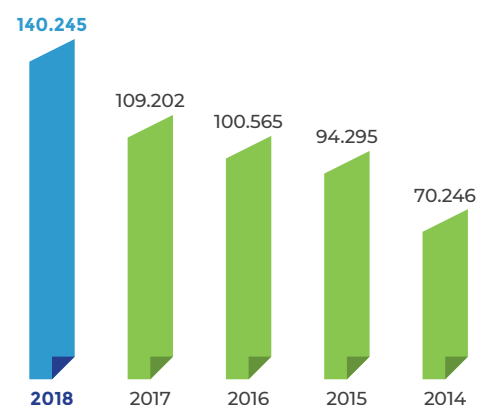
(dalam jutaan Rupiah) | (in IDR million)



Liabilitas

Liabilities

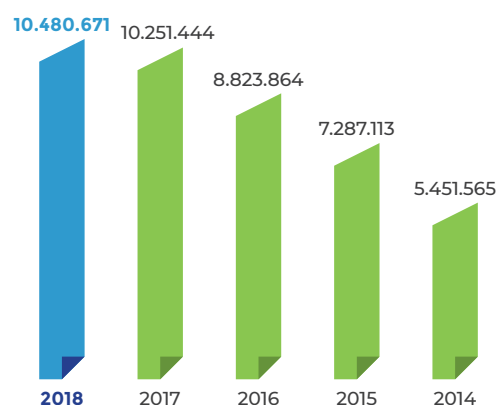
(dalam jutaan Rupiah) | (in IDR million)



Ekuitas

Equity

(dalam jutaan Rupiah) | (in IDR million)



Rasio-Rasio Keuangan

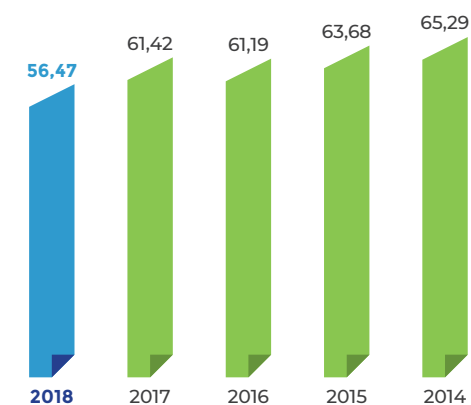
Financial Ratios

(dalam persentase) | (in percentage)

Uraian Description	2018	2017	2016	2015	2014
Marjin Laba Operasional Net Operating Margin	57,23	59,03	61,52	59,96	60,87
Marjin Laba Bersih Net Income Margin	56,47	61,42	61,19	63,68	65,29
ROE Return on Equity	4,55	5,14	6,53	5,99	6,51
BOPO Operating Expense to Operating Income	26,00	23,16	23,02	20,95	20,20

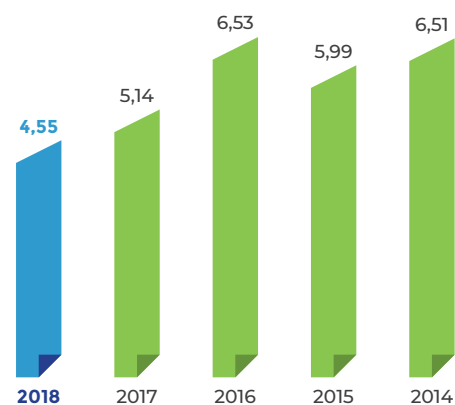
Margin Laba Bersih Net Income Margin

(dalam persentase) | (in percentage)



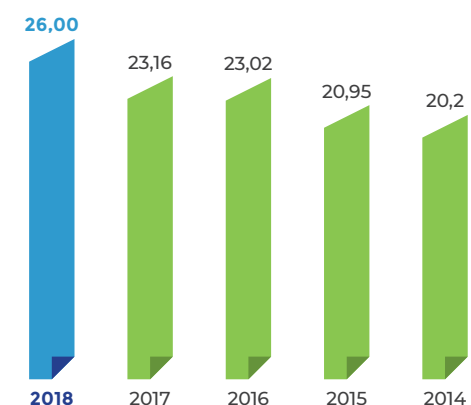
ROE Return On Equity

(dalam persentase) | (in percentage)



BOPO Operating Expense to Operating Income

(dalam persentase) | (in percentage)





Ikhtisar Saham

Shares Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2018, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) belum melakukan aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga tidak terdapat informasi yang memuat tentang:

1. Jumlah saham yang beredar;
2. Kapitalisasi pasar;
3. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan
4. Volume perdagangan.

As of the end of 2018, the Company has not traded any shares at the Indonesia Stock Exchange, hence there has been no information containing the following:

1. Total shares outstanding;
2. Market capitalization;
3. Highest, lowest, and closing share price; and
4. Share trading volume.

Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Suspension of Share Trading and/or Shares Delisting

Mengingat PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) belum mencatatkan sahamnya di bursa saham, maka Perseroan tidak mengalami peristiwa penghentian sementara perdagangan saham atau pun penghapusan pencatatan saham.

As the Company's shares are not listed in the stock exchange, there are no suspension in share trading or delisting of the Company's shares.



Aksi Korporasi

Corporate Action

Sepanjang tahun 2018, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tidak melakukan aksi korporasi seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham mengingat Perseroan belum mencatatkan sahamnya di bursa saham. Perseroan juga tidak melakukan aksi korporasi lain, seperti akuisisi atau lainnya.

Throughout 2018, the Company did not undertake any corporate actions such as stock split, reverse stock, share dividend, bonus shares, and change in par value of shares, as the Company does not list its shares in the stock exchange. The Company also did not undertake other corporate actions such as acquisition or others.

Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi

Bonds, Sukuk or Convertible Bonds Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2018, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tidak menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, sehingga tidak terdapat informasi yang memuat tentang:

1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*);
2. Tingkat bunga/imbalan;
3. Tanggal jatuh tempo; dan
4. Peringkat obligasi/sukuk.

As of the end of 2018, the Company has not issued any bonds, sukuk or convertible bonds, hence there has been no information containing the following:

1. Total outstanding bonds/sukuk/convertible bonds;
2. Interest rate;
3. Maturity date; and
4. Bonds/sukuk rating.



02

Laporan Manajemen Management Report

- 18 **Laporan Dewan Komisaris**
Report of the Board of Commissioners
- 32 **Laporan Direksi**
Report of the Board of Directors
- 52 **Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018**
Statement of Accountability for the 2018 Annual Report





Ayu Sukorini
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Dewan Komisaris

Report of The Board of Commissioners

Sesuai dengan RJPP 2018-2022, pada tahun 2018 Direksi menjalankan strategi bisnis yang kian ekspansif, berupa perluasan sektor usaha yang dijamin maupun rintisan bisnis baru.

In accordance with RJPP 2018-2022, the Board of Directors in 2018 implemented a more expansive business strategy, adding to industry sectors that could be guaranteed as well as venturing into new business activities.

PEMEGANG SAHAM YANG KAMI HORMATI, Distinguished Shareholders,

Tahun 2018 merupakan tahun penting di dalam pengelolaan dan pengembangan PT PII, sebagai awal dari implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2018-2022. Sesuai dengan RJPP, tahapan pengembangan perusahaan diarahkan untuk lebih memantapkan pengembangan Perseroan secara menyeluruh, yaitu tidak hanya pada bidang usaha penjaminan KPBU namun kegiatan usaha di berbagai bidang lainnya, mencakup (i) penjaminan non KPBU; (ii) *capacity building*; dan (iii) dukungan/pendampingan. Upaya Perseroan di dalam mewujudkan tiga kegiatan baru ini menjadi salah satu kegiatan yang sangat mewarnai pelaksanaan tugas Dewan Komisaris di dalam pengawasan atas pelaksanaan maupun pertanggungjawaban RKAP tahun 2018.

2018 was an important year in the management and development of PT PII, as the beginning of the 2018-2022 Company Long Term Plan implementation. In accordance with the RJPP, the Company has embarked up a strengthening of the Company as a whole, that is not only in the PPP business guarantee sector, but also business in (i) non-PPP guarantees; (ii) capacity building; and (iii) support/assistance. The Company's dynamic efforts in realizing these three new activities comprise part of the Board of Commissioners' duties in the supervision of the implementation and accountability of the 2018 RKAP.



Laporan Dewan Komisaris

Report of The Board Of Commissioners

Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, Dewan Komisaris selalu aktif memberikan arahan dan masukan kepada Direksi melalui rapat-rapat reguler yang diadakan minimal sebulan sekali. Selain itu, pertemuan Dewan Komisaris dengan Direksi juga dilakukan pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan, diluar rapat rutin bulanan, dalam hal Perusahaan menghadapi isu-isu krusial yang perlu segera diambil keputusan.

Dewan Komisaris juga memberikan arahan dan masukan kepada Direksi dalam bentuk surat tertulis, jika melalui rapat tidak memungkinkan, atau Dewan Komisaris memandang pemberian nasihat dengan surat tertulis lebih efektif. Dewan Komisaris juga memberdayakan Komite-Komite di bawahnya, untuk menindaklanjuti arahan dan masukan kepada Direksi. Apabila dipandang perlu, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris melakukan penelaahan dan pembahasan dengan tim teknis di bawah Direksi untuk tindak lanjutnya. Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan Direksi dan jajarannya untuk selalu menjaga integritas dan menjaga tata kelola yang baik dalam pengelolaan Perusahaan.

Sesuai dengan RJPP 2018-2022, pada tahun 2018 Direksi menjalankan strategi bisnis yang makin ekspansif, berupa perluasan sektor usaha yang dijamin maupun rintisan bisnis baru. Perluasan sektor usaha yang dijamin mencakup penjaminan KPBU pada sektor kesehatan, pengelolaan sampah, pendidikan, dan penjaminan non-KPBU. Adapun bisnis baru dilakukan melalui upaya mendapatkan perluasan mandat untuk penyiapan proyek dan pendampingan transaksi.

Untuk penjaminan non KPBU, kegiatan ini sudah dirintis sejak tahun 2016, dimana kegiatan penjaminan yang dilakukan oleh PT PII diharapkan juga mencakup penjaminan atas pinjaman BUMN yang menggunakan fasilitas pinjaman langsung dari Lembaga Keuangan Internasional. Beberapa tantangan yang dihadapi pada saat itu di antaranya: kesiapan regulasi dan pandangan legal dari pihak Lembaga Keuangan Internasional terkait kedudukan PT PII sebagai tingkat *sovereign* dalam memberikan jaminan. Di tahun 2018 ini, kegiatan penjaminan non KPBU ini dapat dilakukan. Dewan Komisaris sangat menghargai pencapaian ini. Hal ini menunjukkan kerja keras oleh PT PII yang dengan dukungan dari seluruh *stakeholder* dapat mengatasi berbagai tantangan yang telah dihadapi sebelumnya.

In performing its oversight function, the Board of Commissioners actively provides direction and input to the Board of Directors through regular meetings held at least once a month. In addition, joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors are also held at certain times as needed, in the event that the Company faces crucial issues that need to be acted upon immediately.

The Board of Commissioners also provides guidance and input to the Board of Directors in the form of written letters, if it is not possible through a meeting, or in the event the Board of Commissioners considers giving advice through written letters to be more effective. The Board of Commissioners also empowers its Committees to follow up on suggestions and input to the Board of Directors. If deemed necessary, Committees under the Board of Commissioners conduct reviews and discussions with technical teams under the Board of Directors for the follow-up. The Board of Commissioners consistently encourages the Board of Directors and staff to maintain integrity and good governance in the management of the Company.

In accordance with the 2018-2022 RJPP, the Board of Directors carried out an increasingly expansive business strategy in 2018, through expansion of business guarantee sector as well as pioneering new businesses. Expansion of the business guarantee sector includes guaranteeing PPPs in the health, waste management, and education fields as well as in other non-PPP guarantee sectors. New business is carried out through efforts to gain an expanded mandate for the project development facility.

For non-PPP guarantees, this activity was initiated in 2016, in which guarantee activities conducted by PT PII are expected to cover guarantees for SOE loans that use direct loan facilities from International Financial Institutions. Some of the challenges faced at the time included: the readiness of regulations and the legal view of the International Financial Institution regarding the position of PT PII at a sovereign level in providing guarantees. In 2018, non-PPP guarantee activities can be carried out. The Board of Commissioners highly appreciates this achievement. This demonstrates the hard work by PT PII, which with the support of all stakeholders is able to overcome various challenges that have been faced.

Adapun untuk bisnis baru penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, manajemen melakukan langkah proaktif dengan memulainya pada tahun 2018, walaupun dalam RJPP tahun 2018-2022 bisnis baru tersebut semula direncanakan akan dimulai pada tahun 2020. Untuk merealisasikan hal ini, langkah awal yang dilakukan adalah Perusahaan mengajukan penyesuaian RKAP 2018 untuk mengakomodir kegiatan usaha dukungan/pendampingan transaksi yang belum tertampung. Beberapa proyek yang dapat diselesaikan kegiatan pendampingan, antara lain Proyek Kereta Api Makasar Pare-Pare dan Proyek Jalan Lintas Timur ruas Sumatera Selatan. Sedangkan proyek lain yang sudah mulai diinisiasi, antara lain proyek RS Kanker Dharmais dan Proyek Jalan Lintas Timur ruas Riau. Dewan Komisaris sangat mendukung dan mengapresiasi inisiasi kegiatan ini oleh Direksi, karena di samping memberikan manfaat berupa pendapatan *fee*, kegiatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi juga memberikan manfaat strategis lain dalam bentuk penyiapan *pipeline* bagi penjaminan KPB. U.

Pemegang Saham yang Kami Hormati,

Dalam pengawasan pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAP 2018, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Sekretaris Dewan Komisaris. Untuk pengawasan aspek keuangan, sesuai dengan hasil dari proses pengadaan yang telah dilakukan, kami telah mengusulkan kepada RUPS Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ditunjuk untuk melakukan audit keuangan atas Laporan Keuangan PT PII tahun 2018. Berdasarkan hasil pengadaan tersebut, KAP yang ditunjuk adalah KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT PII tahun 2018 serta capaian Indikator Kinerja Utama Korporasi, Dewan Komisaris, dan Direksi tahun 2018. Audit tersebut telah diselesaikan pada tanggal 28 Februari 2019 dengan opini atas Laporan Keuangan "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".

Sesuai dengan hasil audit tersebut, sampai dengan akhir tahun 2018, kinerja operasional yang berhasil dicapai oleh PT PII yang tercermin dari jumlah perjanjian penjaminan yang telah ditandatangani, yaitu sebanyak 18 (delapan belas) proyek infrastruktur. Jumlah ini termasuk penjaminan atas pinjaman Proyek Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Atas penjaminan tersebut 13 proyek di antaranya telah efektif dijamin.

As for the new businesses of project preparation and transaction assistance, management took the proactive measure by commencing these in 2018, although the 2018-2022 RJPP stated that the new business was originally planned to commence in 2020. To realize this, the initial steps conducted by the Company were to propose adjustments to the 2018 RKAP to accommodate business support/transaction assistance activities that had not been accommodated. Capacity building programs have been completed with regard to, among others, the Makasar-Pare-pare Railway Project and The East Trans Sumatera Road Project in South Sumatera, while others have been initiated such as the Dharmais Cancer Hospital Project and The East Trans Sumatera Road Project in Riau. The Board of Commissioners strongly supports and appreciates the initiation of this activity by the Board of Directors, because in addition to providing benefits in the form of fee income, project preparation activities and transaction assistance also provide other strategic benefits in the form of preparing the pipeline for PPP guarantees.

Distinguished Shareholders,

In monitoring the implementation and accountability of the 2018 RKAP, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Secretary to the Board of Commissioners. With regard to the supervision of financial aspect, and in accordance with the results of the selection process carried out, we have submitted to the GMS the proposed Public Accounting Firm (KAP) to be appointed to conduct the financial audit of the 2018 Financial Statements of PT PII. Based on the selection process, the KAP appointed was KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) to conduct an audit on the 2018 Financial Statements of PT PII and the achievements of Corporate, Board of Commissioners and Board of Directors KPIs for 2018. The audit was completed on 28 February 2019 with an unqualified (WTP) opinion.

In accordance with the audit results, as of the end of 2018, the operational performance that was successfully achieved by PT PII was reflected in the 18 (eighteen) guarantee agreements signed for infrastructure projects. This total includes loan guarantees for the Mandalika Special Economic Zone Tourism Infrastructure Facility Development Project. For the guarantees, 13 projects have been effectively guaranteed. Of the 13 projects with effective guarantees,



Laporan Dewan Komisaris

Report of The Board Of Commissioners

Dari 13 proyek yang penjaminannya telah efektif, 3 (tiga) proyek sudah memasuki masa operasi, yaitu: Proyek Palapa Ring Barat, Proyek Palapa Ring Tengah dan Proyek Jalan Tol Batang- Semarang.

Estimasi total nilai investasi dari ke-18 proyek tersebut telah mencapai Rp189 triliun, dengan demikian pemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) telah mencapai 23,6 kali. Sementara itu, dari aspek kapasitas penjaminan, dengan nilai ekuitas mencapai Rp10,5 triliun, *gearing ratio* PT PII telah mencapai 3,7 kali berdasarkan jumlah eksposur maksimum atas proyek yang dijamin sebesar Rp38,9 triliun.

Selama tahun 2018, terdapat tambahan 3 proyek yang dapat diselesaikan proses penjaminannya adalah 2 proyek KPBU, yaitu yaitu: Proyek SPAM Lampung, SPAM Semarang Barat dan 1 proyek Non KPBU, yaitu pinjaman Proyek Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Khusus Penjaminan KPBU, pencapaian ini belum seperti yang diharapkan dalam target RKAP dan tidak sebaik capaian tahun 2017. Dinamika pada Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) masih menjadi tantangan utama yang dihadapi Perseroan di dalam mencapai target penjaminan.

Sehubungan dengan pencapaian penjaminan ini, Dewan Komisaris telah memberikan arahan, di antaranya: meminta Direksi berkoordinasi secara erat dengan PJPK dan meminta Direksi untuk lebih mempertajam aspek perencanaan/pemilihan proyek-proyek yang ditargetkan di RKAP, dengan menggunakan *knowledge*/pengalaman yang diperoleh dari proses penjaminan yang telah dilakukan sebelumnya, terutama di dalam penentuan siklus proyek (mulai dari penetapan CTP/*Confirmation to Proceed* sampai GA Signed). Dengan demikian, deviasi antara rencana dengan realisasi diharapkan dapat makin berkurang di tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, kegiatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi sebagai kegiatan bisnis baru PT PII pada tahun 2018, juga menunjukkan kinerja cukup baik. Hingga akhir tahun 2018, PT PII telah menerima penugasan untuk 5 proyek, yaitu Proyek Jalan Lintas Timur ruas Sumatera Selatan, Proyek Jalan Lintas Timur ruas Riau, Proyek Kereta Api Makasar Pare-Pare, Proyek Rumah Sakit Kanker Dharmais, serta Proyek Rumah Sakit Umum Daerah Zaenal Abidin. Untuk Proyek Kereta Api Makasar Pare-pare sampai akhir tahun 2018 berada dalam tahap akhir lelang, yakni penetapan pemenang lelang.

3 (three) projects have entered the operating period, namely: the West Palapa Ring Project, the Central Palapa Ring Project, and the Batang-Semarang Toll Road Project.

The estimated total investment value of all 18 projects amounts to Rp189 trillion, thus the utilization of the Government Investment (PMN) has reached 23.6 times. Meanwhile, from the aspect of guarantee capacity, with an equity value of Rp10.5 trillion, PT PII's *gearing ratio* has reached 3.7 times based on the maximum exposure of the guaranteed projects in the amount of Rp38.9 trillion.

During 2018, 3 additional projects were completed under the guarantee process, consisting of 2 PPP projects, namely: Lampung SPAM Project, West Semarang SPAM Project, and 1 Non-PPP Project, namely the Mandalika Special Economic Zone Tourism Infrastructure Development Project loan. Specifically for the PPP Guarantee, the achievement is lower than the RKAP target as well as the achievement in 2017. The dynamics of the Contracting Agency (CA) are still the main challenges faced by the Company in achieving the guarantee target.

In connection with the achievement of these guarantees, the Board of Commissioners has provided input, including requesting the Board of Directors coordinate closely with the CA and requesting the Board of Directors to further sharpen the planning/selection of projects targeted in the RKAP, using the knowledge/ experience from previous guarantee processes that have been completed, especially in determining the project cycle, starting from the determination of CTP/*Continue to Proceed* up to signed GA. Thus, the deviation between the plans and realization is expected to decrease in the following years.

Meanwhile, project development facility activities as one of PT PII's new business activities in 2018 presented encouraging performance. By the end of 2018, PT PII had received assignments for 5 projects, namely the East Trans Sumatera Road Project in South Sumatera, East Trans Sumatera Road Project in Riau, Makassar Pare-Pare Railway Project, Dharmais Cancer Hospital Project, and the Regional General Zaenal Abidin Hospital Project. The Makassar Pare-Pare Railway Project is in the final auction phase as of the end of 2018, namely the determination of the auction winner.

Untuk mengoptimalkan peran dua kegiatan usaha baru, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa arahan, sebagai berikut: Direksi agar berkoordinasi lebih erat dengan PJPK maupun Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Dengan koordinasi yang lebih erat diharapkan dapat memberikan tingkat kepastian yang cukup tinggi bagi pendapatan perusahaan. Sementara itu, khusus untuk kegiatan Penyiapan dan Pendampingan transaksi, beberapa faktor seperti permasalahan lahan, tingkat kesulitan pelaksanaan proyek dan teknologi yang dipilih serta permasalahan keamanan dan faktor non teknis seperti komitmen PJPK diharapkan dapat menjadi pertimbangan di dalam penyediaan fasilitas ini.

Berdasarkan angka-angka realisasi atas pelaksanaan RKAP tahun 2018 yang telah diaudit, secara keseluruhan target kinerja keuangan, sebagaimana tercermin dari angka BOPO dan Margin Laba Bersih, dapat dicapai bahkan lebih baik dari target yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci dapat kami sampaikan realisasi angka-angka pendapatan, beban maupun laba, sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan pada tahun 2018 mencapai Rp834,25 miliar mengalami peningkatan sebesar 9% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp765,96 miliar. Kenaikan ini terutama berasal dari kenaikan Pendapatan Pengelolaan Dana yang mencapai 7%, serta adanya sumber pendapatan baru yang berasal dari pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi sebesar Rp32,7 miliar.
2. Realisasi Beban Usaha pada tahun 2018 sebesar Rp356,79 miliar, mengalami kenaikan sebesar 13,69% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp313,82 miliar. Termasuk dalam realisasi Beban Usaha ini adalah pembayaran Beban Pajak Final tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp139,89 miliar dan Rp136,42 miliar.
3. Laba setelah pajak tahun 2018 mencapai Rp471,08 miliar, mengalami kenaikan sebesar 0,13% dibandingkan tahun lalu, yaitu dari sebesar Rp470,47 miliar.
4. Dengan demikian, Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) mencapai 26%, mengalami peningkatan sebesar 13%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 23%. Sementara itu, Margin Laba Usaha mencapai 56%, mengalami penurunan sebesar 8% dari tahun sebelumnya yang mencapai 61%.

To optimize its role in the two new business activities, the Board of Commissioners has provided advice that the Board of Directors should coordinate more closely with the CA and the Ministry of Finance c.q. Directorate General of Financing and Risk Management. Through closer coordination, a high level of certainty for the Company's income is expected. Meanwhile, specifically for Transaction Preparation and Assistance activities, several factors such as land issues, difficulty levels of project implementation and technology selection, and security issues as well as non-technical factors such as the CA's commitment should be considered in the provision of this facility.

Based on the realization figures in the audited 2018 RKAP, the overall financial performance target, as reflected in the BOPO and Net Profit Margin figures, may exceed the established targets. In more detail, we can convey the realization of income, expense, and profit figures, as follows:

1. Revenues in 2018 amounted to Rp834.25 billion, an increase of 9% compared to the previous year at Rp765.96 billion. The increase was mainly derived from the increase in Fund Management, which reached 7%, as well as of new income sources, deriving from project development revenues in the amount of Rp32.7 billion.
2. Operating expenses in 2018 amounted to Rp356.79 billion, an increase of 13.69% compared to the same period last year at Rp313.82 billion. Included in Operating Expenses are payments of Final Tax Expenses for 2018 and 2017, at Rp139.89 billion and Rp136.42 billion, respectively.
3. In 2018, profit after tax amounted to Rp471.08 billion, an increase of 0.13% compared to the previous year at Rp.470.47 billion.
4. Thus, the Operating Expense to Operating Income (BOPO) reached 26%, an increase of 13% compared to the previous year which reached 23%. Meanwhile, Operating Profit Margin reached 56%, a decrease of 8% compared to the previous year at 61%.



Laporan Dewan Komisaris

Report of The Board Of Commissioners

Sejalan dengan kinerja operasional dan kinerja keuangan di atas, nilai Indeks Kinerja Utama (IKU) berdasarkan hasil audit yang dilakukan KAP, mencapai sebesar 95%. Berdasarkan hal tersebut, secara total, Dewan Komisaris berpandangan Direksi masih cukup baik di dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh RUPS. Namun ke depan Dewan Komisaris meminta Direksi untuk dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi. Beberapa area yang diharapkan dapat terus diperbaiki adalah peningkatan jumlah pendapatan penjaminan, melalui peningkatan proyek proyek yang dapat ditandatangani penjaminannya. Di samping pendapatan, Dewan Komisaris juga mendorong agar efisiensi atas beberapa komponen biaya, seperti penggunaan konsultan serta *workshop*, dapat terus dilakukan. Untuk mendapatkan informasi profitabilitas yang akurat dari masing-masing proyek, Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi untuk melakukan *cost analysis* dengan memperhitungkan biaya langsung dan mengalokasikan biaya tidak langsung pada setiap proyek.

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015, Dewan Komisaris juga telah mempunyai IKU berdasarkan penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). IKU ini merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas & tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. Adapun untuk pencapaian Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris semua target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Sesuai ketentuan, realisasi IKU Dewan Komisaris juga telah direview oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) dan di laporkan kepada RUPS. Berdasarkan hasil *review* tersebut nilai IKU Dewan Komisaris mencapai 106%.

Pada tahun 2018 Perusahaan mempunyai 2 (dua) Komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris menilai kinerja 2 Komite tersebut sangat baik. Seluruh Komite selalu terlibat aktif untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dari hasil *review*/telaahan sesuai bidang tugasnya. Komite aktif menjalin komunikasi dengan organ Direksi untuk melakukan pembahasan level teknis terkait seluruh aspek kegiatan Perusahaan.

In line with the abovementioned operational performance and financial performance, the Key Performance Indicators (KPI) as referred to in the audit results conducted by the Public Accountant Firm, was 95%. Based on this, in total, the Board of Commissioners viewed that the Board of Directors is adequate in achieving the targets set by the GMS. However, in the future, the Board of Commissioners asks the Board of Directors to improve their performance even better. Some areas of improvement include to increase guarantee revenues, through an increase in projects that can be guaranteed. In addition to revenues, the Board of Commissioners also encourages continuing efficiency in cost components, such as the use of consultants and workshops. To obtain accurate profitability information from each project, the Board of Commissioners has urged the Board of Directors to conduct cost analysis by calculating the direct costs and allocating indirect costs on each project.

Meanwhile, in order to implement the mandate of Article 24 of the Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015, the Board of Commissioners also has established KPI based on the determination of the General Meeting of Shareholders (GMS). KPI is an assessment of the successful implementation of the duties and responsibilities of oversight and provision of advice of the Board of Commissioners. As for the achievement of the Performance Contract (KPI) of the Board of Commissioners, all established targets have been achieved. In accordance with the provisions, the realization of the Board of Commissioners' KPI has also been reviewed by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) and reported to the GMS. Based on the review results, the Board of Commissioners' KPI score reached 106%.

In 2018, the Company has 2 (two) Committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee. The Board of Commissioners considers the performance of the two Committees very good. All Committees are active in providing input to the Board of Commissioners from reviews in their fields of work. The Committees actively establish communication with the organs of the Board of Directors to conduct technical discussions related to all aspects of the Company's activities.

Pada setiap rapat rutin bulanan Komite selalu aktif memberikan masukan bahan kepada Dewan Komisaris berupa bahan-bahan yang perlu dibahas atau diberikan arahan kepada Direksi. Demikian pula dalam setiap rapat yang diagendakan secara khusus dan permohonan persetujuan tertulis dari Direksi kepada Dewan Komisaris, Komite-komite aktif memberikan hasil telaahan dan masukan kepada Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris dapat memutuskan dengan tepat atas permohonan yang diajukan oleh Direksi.

Pemegang Saham yang Kami Hormati,

Di samping pengawasan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAP 2018 sebagaimana disebutkan di atas, beberapa kegiatan yang menjadi fokus pengawasan Dewan Komisaris, mencakup antara lain: penerapan manajemen risiko serta peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Di dalam implementasi manajemen risiko pada PT PII, Dewan Komisaris memandang perusahaan telah menerapkan praktik-praktik manajemen risiko yang lazim diterapkan. Hal ini tercermin di dalam kerangka pengelolaan risiko yang telah mengacu kepada standar-standar internasional, yaitu *COSO Enterprise Risk Management Framework* dan *ISO 31000:2009*.

Sementara itu di dalam pelaksanaan GCG, Dewan Komisaris berpandangan peningkatan kualitas penerapan GCG merupakan wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya. Pada tahun 2018 PT PII, dengan bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan penilaian implementasi GCG. *Score* GCG yang dapat dicapai adalah sebesar 86,7% atau kategori Sangat Baik. *Score* ini lebih tinggi dibandingkan dengan *score* yang diperoleh pada tahun 2017, yaitu sebesar 80,6%.

Untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG setiap tahunnya, Dewan Komisaris telah memberikan arahan untuk mencermati dan memperhatikan beberapa area yang direkomendasikan untuk dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Sehingga diharapkan implementasi GCG dapat semakin membaik setiap tahunnya. Penerapan GCG yang semakin baik ini, juga diharapkan dapat makin meningkatkan kinerja dan kiprah PT PII di dalam pembangunan infrastruktur.

At each regular monthly meeting, the Committees provide input to the Board of Commissioners in the form of materials that need to be discussed or provided insight to the Board of Directors. Similarly, in every specifically scheduled meeting and written approval request from the Board of Directors to the Board of Commissioners, the Committees actively provide review results and input to the Board of Commissioners, enabling the Board of Commissioners to make the appropriate decisions on applications submitted by the Board of Directors.

Distinguished Shareholders,

In addition to the supervision on the 2018 RKAP implementation and accountability as mentioned above, focus of supervision of the Board of Commissioners includes the application of risk management and improvement in the quality of good corporate governance. In the application of risk management at PT PII, the Board of Commissioners considers the Company to have implemented the commonly applied risk management practices. This is reflected in the risk management framework that refers to international standards, namely *COSO Enterprise Risk Management Framework* and *ISO 31000: 2009*.

Within the area of corporate governance, the Board of Commissioners believes that improving the quality of corporate governance is a manifestation of the Company's commitment to increase business success and accountability. In 2018, PT PII, with the assistance of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), assessed the implementation of GCG. The achieved GCG score was 86.7% or in the category of Very Good. This score is higher than the score obtained in 2017, which was 80.6%.

To continue to improve the quality of GCG every year, the Board of Commissioners has provided areas to examine and observe several recommended areas for enhancement and improvement. Therefore, GCG is expected to improve every year. The improvement in GCG is also expected to further enhance the performance and progress of PT PII in infrastructure development.



Laporan Dewan Komisaris

Report of The Board Of Commissioners

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas implementasi GCG, pada tahun 2018 Perusahaan telah menyusun, menyosialisasikan serta mengimplementasikan Pedoman *Whistle Blowing System* (WBS). Sesuai dengan Pedoman tersebut Perusahaan juga telah menyiapkan saluran pengaduan yang langsung dan terjamin kerahasiaan Pelapor. Perusahaan juga telah mendedikasikan Tim Kerja yang khusus untuk mengelola pengaduan yang diterima. Dewan Komisaris secara aktif terlibat dalam penyiapan infrastruktur WBS tersebut baik secara langsung maupun melalui Komite Audit. Sesuai Pedoman, Dewan Komisaris juga akan terlibat aktif untuk menangani pengaduan bila informasi pelanggaran yang disampaikan menyangkut anggota Direksi atau Komite dan Anggota Dewan Komisaris. Sampai dengan akhir tahun 2018 Perusahaan belum menerima pengaduan sehingga belum ada informasi dari WBS yang bisa ditindaklanjuti.

Aspek penting lain yang menjadi fokus pengawasan Dewan Komisaris adalah pelaksanaan *monitoring* proyek-proyek dan manajemen klaim atas proyek telah dijamin PT PII, dengan fokus utama potensi terjadinya klaim, rencana mitigasi risiko serta proses regres. Dari aspek ini, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2018, yaitu: penetapan SOP Klaim dan SOP Regres, untuk memastikan terlaksananya tata kelola penjaminan yang sehat oleh PT PII. Secara reguler PT PII juga melakukan kunjungan lapangan dan terlibat aktif dalam forum *Joint Monitoring Committee* (JMC) bersama para pemangku kepentingan seperti PJPK, Kementerian Keuangan dan Badan Usaha serta lembaga lain. Di dalam beberapa kesempatan, Dewan Komisaris juga turut serta di dalam melakukan kunjungan lapangan, khususnya proyek-proyek yang mendapat perhatian khusus dari Dewan Komisaris.

Di samping ketiga hal tersebut, PT PII juga melakukan inovasi dengan menyiapkan sistem *monitoring* dan klaim dalam bentuk aplikasi. Dewan Komisaris mengapresiasi hal ini, sebagai pencapaian yang baik untuk penerapan sistem teknologi informasi di perusahaan. Ke depan Dewan Komisaris telah meminta Direksi untuk terus memperbaiki sistem *monitoring* berbasis IT ini, di antaranya melalui integrasi dengan sistem-sistem lain terkait dengan proses penjaminan.

In line with efforts to improve the quality of GCG, in 2018 the Company compiled, disseminated, and implemented *Whistle Blowing System* (WBS) Guidelines. In accordance with the Guidelines, the Company has also prepared direct complaints channels as well as assuring the confidentiality of the Whistleblower. The Company has also dedicated a Work Team specifically for managing complaints that have been received. The Board of Commissioners is actively involved in preparing the WBS infrastructure directly through the Audit Committee. In accordance with the Guidelines, the Board of Commissioners will also be actively involved in handling complaints in the event the submitted information on violations concerns members of the Board of Directors, or Committees, or members of the Board of Commissioners. As of the end of 2018 the Company has not received complaints, therefore there is no information from the WBS to be followed up.

Another important matter as focus of supervision by the Board of Commissioners is the implementation of project monitoring and claim management on projects guaranteed by PT PII, with the main focus being the potential occurrence of claims, risk mitigation plans and regress processes. From this, there were several activities carried out in 2018, namely: the determination of Claim SOP and Regres SOP, to ensure the implementation of sound guarantee governance by PT PII. Regularly, PT PII also conducts field visits and is actively involved in the *Joint Monitoring Committee* (JMC) forum with stakeholders such as the CA, the Ministry of Finance and other business entities and institutions. On several occasions, the Board of Commissioners also participated in conducting field visits, especially projects that received special attention from the Board of Commissioners.

In addition to these three matters, PT PII also innovates by preparing the monitoring and claims system, in the form of applications. The Board of Commissioners appreciates this as a good achievement via the Company's information technology system. In the future, the Board of Commissioners has asked the Board of Directors to continue to improve this IT-based monitoring system, among others through integration with other systems related to the guarantee process.



Dalam hal persiapan terhadap adanya klaim penjaminan, PT PII telah mempersiapkan proses dengan matang, termasuk dengan melakukan simulasi klaim untuk memastikan semua SOP dan peraturan-peraturan pendukung dapat dieksekusi dengan baik. Dengan demikian, Dewan Komisaris memandang manajemen risiko atas potensi terjadi klaim telah dilakukan dengan baik, sehingga ekspansi usaha yang dilakukan tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Selain *monitoring* proyek-proyek dan manajemen klaim, aspek penempatan dana merupakan hal yang krusial. Dewan Komisaris terus mengawasi Direksi agar penempatan dana dilakukan pada investasi yang aman dan likuid yang memberikan hasil yang optimal sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 95/PMK.08/2017 tentang Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Pemegang Saham yang Kami Hormati,

Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya prospek usaha untuk tahun 2019 yang telah dirumuskan oleh Direksi. Prospek usaha sesuai dengan ketentuan, dituangkan secara formal di dalam RKAP 2019, yang berisi antara lain rencana aksi korporasi, target laba dan aset, target operasional, dan lainnya. Dukungan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu (i) Penyusunan RKAP 2019 telah disusun sesuai dengan masukan/arahan Dewan Komisaris, (ii) kesesuaian dengan arahan Pemegang Saham, dimana pertumbuhan pendapatan usaha diperkirakan dapat meningkat sebesar 15% dan pertumbuhan laba bersih sebesar 6%, (iii) kesesuaian dengan Arah Strategis Pengembangan Jangka Panjang PT PII yang dituangkan di dalam RJPP 2018 – 2022.

In terms of preparation for guarantee claims, PT PII has thoroughly prepared processes, including by conducting claim simulations to ensure that all SOPs and the supporting regulations can be executed properly. Thus, the Board of Commissioners considers that risk management for potential of claims have been carried out properly, ensuring that business expansions performed remain within the prudential principle.

In addition to monitoring projects and claims management, the fund placement is a crucial matter. The Board of Commissioners continues to oversee the Board of Directors to ensure that fund placements are carried out on safe and liquid investments that provide optimal results in accordance with the provisions of PMK No. 95/PMK.08/2017 on the Scope and Procedures for Providing Government Guarantees in Infrastructure by Infrastructure Guarantee Business Entities.

Distinguished Shareholders,

The Board of Commissioners fully supports the business prospects for 2019 as have been formulated by the Board of Directors. The business prospects are in accordance with the provisions formally outlined in the 2019 RKAP, which includes corporate action plans, profit and asset targets, operational targets, and others. This support is based on several considerations, namely (i) The preparation of the 2019 RKAP has been prepared in accordance with the input/advice of the Board of Commissioners, (ii) conformity with the decision of the Shareholder, where growth in business revenues is expected to increase by 15% and growth in net profit by 6%, (iii) conformity with the directives of the Strategic Direction of PII Long-Term Development as outlined in the 2018-2022 RJPP.



Laporan Dewan Komisaris

Report of The Board Of Commissioners

Pandangan atas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* – CSR) telah mengacu pada sejumlah peraturan yang ada, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dari aturan yang dikeluarkan oleh regulator, manajemen telah meratifikasinya dengan melahirkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK: SK-004/BOD/CSR/2015 tentang Besaran Dana Penyaluran *Sponsorship*, Donasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Landasan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan CSR Perseroan di bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan serta kesehatan dan keselamatan kerja, sosial kemasyarakatan dan terhadap konsumen. Karena itu, Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan CSR oleh Perseroan telah berada di jalur yang tepat.

Begitu pun dengan pelaksanaannya, terkait dengan lingkungan hidup misalnya, manajemen senantiasa mengimbau untuk melakukan penghematan listrik dengan melakukan sosialisasi dan anjuran untuk mematikan lampu dan listrik apabila tidak terpakai, serta selalu melakukan penghematan dalam pemakaian air.

Dalam penerapan kebijakan CSR terhadap karyawan Perseroan berupaya memastikan terjalinnya hubungan yang saling menghormati dan mampu menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Hal tersebut dilakukan melalui komunikasi intensif dan keterlibatan antara PT PII dan karyawan dalam mencapai target Perseroan.

Perseroan mendayagunakan hubungan konstruktif dengan karyawan dengan menyelenggarakan pertemuan berkala guna mensosialisasikan kebijakan dan program manajemen serta untuk membahas permasalahan hubungan industrial maupun penyelesaian keluhan karyawan.

Perspective on the Implementation of Corporate Social Responsibility

The implementation of corporate social responsibility (CSR) refer regulation including Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibilities of Limited Liability Companies. From the regulations issued, management has ratified an approach by establishing a Board of Directors Decision No. SK: SK-004/BOD/CSR/2015 on the Fund Distribution Amount for Sponsorship, Donations, Corporate Social and Environmental Responsibility.

This foundation is the basis for the CSR implementation of the Company in the field of environment, employment, occupational health and safety, socio-community, and consumers. Therefore, the Board of Commissioners views that the implementation of CSR by the Company is on the right track.

Similarly with CSR implementation as regarding the environment, management has continuously urged to save electricity by conducting dissemination and recommendation to turn off lights and electricity if not in use, as well as conducting water usage savings.

In implementing CSR policies for employees, the Company strives to ensure a relationship that is mutually respectful and able to create a balance between fulfilling rights and implementing obligations. This is conducted through intensive communication and involvement between PT PII and employees in achieving the Company's targets.

The Company utilizes constructive relationships with employees by organizing periodic meetings to disseminate management policies and programs as well as to discuss industrial relations issues and follow up on employee complaint resolution.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar PT PII, Dewan Komisaris ditetapkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. Pada tahun 2018, terjadi dua kali perubahan susunan anggota Dewan Komisaris. Pada bulan Juni 2018, terjadi perubahan susunan anggota Dewan Komisaris yakni pengangkatan Bpk. Langgeng Subur (Alm.) sebagai anggota Dewan Komisaris menggantikan Bpk. Iskandar, sesuai dengan KMK No. 407/KMK.06/2018 tanggal 23 Mei 2018. Perubahan komposisi Dewan Komisaris dikarenakan pertimbangan dari Pemegang Saham untuk memperkuat bisnis PT PII

Kemudian, pada bulan Desember 2018, Ibu Mariatul Aini diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris menggantikan Bpk. Langgeng Subur, sesuai dengan KMK No. 861/KMK.06/2018 tanggal 21 Desember 2018. Alasan pergantian anggota Dewan Komisaris dikarenakan Bpk. Langgeng Subur meninggal dunia.

Dewan Komisaris menyampaikan selamat bergabung kepada anggota Dewan Komisaris yang baru, yaitu Ibu Mariatul Aini, kami yakin bahwa dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki Ibu Aini dapat membawa PT PII ke arah lebih baik lagi. Kepada Bpk. Iskandar, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih atas pengabdianya selama bergabung di PT PII. Untuk Bpk. Langgeng Subur (Alm.), Dewan Komisaris memunajatkan doa, semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Changes to the Composition of the Board of Commissioners

Pursuant to the Articles of Association of PT PII, the Board of Commissioners is determined at a maximum of 3 (three) people. In 2018, there were two changes to the composition of members of the Board of Commissioners. In June 2018, there was a change in the composition of the Board of Commissioners, namely the appointment of Mr. Langgeng Subur as a Commissioner, replacing Mr. Iskandar, in accordance with KMK No. 407/KMK.06/2018 dated 23 May 2018. The changes to the composition of the Board of Commissioners is due to the consideration of the Shareholder to strengthen the business of PT PII.

In December 2018, Ms. Mariatul Aini was appointed as a Commissioner to replace Mr. Langgeng Subur, in accordance with KMK No. 861/KMK.06/2018 dated 21 December 2018. The reason for the change is due to Mr. Langgeng Subur passing away.

The Board of Commissioners would like to welcome Ms. Aini to the Board of Commissioners and we are confident that the experience and capabilities she brings will bring PT PII to a better direction. To Mr. Iskandar, the Board of Commissioners expresses gratitude for his service while with PT PII. For the late Mr. Langgeng Subur, the Board of Commissioners wishes prayers, and may his deeds be accepted by the Almighty God.

Accordingly, the composition of the Board of Commissioners as of 31 December 2018 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	Nomor KMK KMK No.	Diangkat Appointed	Berakhir End of Term
Ayu Sukorini	Komisaris Utama President Commissioner	Jakarta	KMK Nomor 402/KMK.06/2017	2017	2019
M. Rahman Ritza	Komisaris Commissioner	Jakarta	KMK Nomor 402/KMK.06/2017	2017	2019
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	Jakarta	KMK Nomor 861/KMK.06/2018	2018	2019



Laporan Dewan Komisaris

Report of The Board Of Commissioners

Akhir kata, mewakili Dewan Komisaris, sekali lagi kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Direksi, manajemen dan seluruh jajaran karyawan PT PII atas kerja keras, dedikasi dan inovasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2018. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham serta semua pemangku kepentingan di sektor publik maupun swasta, atas kepercayaan, dukungan dan kerja sama yang terus diberikan kepada PT PII dalam mewujudkan misi yang diamanatkan.

Lastly, on behalf of the Board of Commissioners, we would give our highest appreciation to the Board of Directors, management and all employees of the Company for their hard work, dedication and achievements throughout 2018. We also would like to express our gratitude to the Shareholder and all stakeholders in the public and private sector for the confidence, support, and cooperation provided for the Company to realize its mission.

Jakarta, Maret | March 2019

Ayu Sukorini

Komisaris Utama
President Commissioner



M. Rahman Ritza
Komisaris
Commissioner

Ayu Sukorini
Komisaris Utama
President Commissioner

Mariatul Aini
Komisaris
Commissioner



Armand Hermawan
Direktur Utama
President Director

Laporan Direksi

Report of The Board of Directors

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, tahun 2018 telah dilalui dengan penuh tekad, tenaga dan pikiran untuk mencapai target dan menjawab tantangan percepatan pembangunan infrastruktur. Atas nama seluruh manajemen PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII melalui Laporan Tahunan 2018 ini akan disampaikan rangkuman buah karya kinerja dan pencapaian kami sepanjang 2018.

With praise and gratitude to the blessings of Allah SWT, we have journeyed through 2018 dedicating our commitment, efforts and thoughts to achieve the target and rise above the challenges of expediting the national infrastructure development. On behalf of the entire management of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). or PT PII, we are pleased to present in this Annual Report a summary report of our performance and achievements throughout the year 2018.

PEMEGANG SAHAM YANG KAMI HORMATI, Distinguished shareholders,

Tahun 2018 dapat dikatakan sebagai tonggak baru yang sangat penting dalam perkembangan fungsi PT PII di Indonesia, karena sejak tahun 2018 Perseroan telah berhasil melaksanakan dua mandat baru sehingga aktivitas bisnis PT PII tidak lagi terbatas pada penjaminan proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

2018 can be said to be an important milestone year in terms of the development of PT PII's function in Indonesia, considering that since 2018 the Company has acquired two new mandates, hence the business segment of PT PII is no longer limited to infrastructure project guarantee under the Public Private Partnership (PPP) scheme.



Laporan Direksi

Report of The Board of Directors

Aktivitas bisnis yang pertama adalah memperluas fungsi PT PII untuk dapat memberikan penjaminan tidak hanya untuk proyek KPBU, tetapi juga penjaminan atas pinjaman untuk mendanai proyek infrastruktur. Perluasan tugas tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 101/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur.

Aktivitas bisnis kedua adalah fungsi untuk melakukan penyiapan dan pendampingan transaksi atau *Project Development Facility* (PDF) untuk proyek KPBU melalui penugasan Kementerian Keuangan.

Kedua mandat baru yang diterima tersebut melengkapi tugas dan fungsi yang telah ada, sehingga membuat Perseroan semakin memiliki peluang besar untuk ikut membantu pengembangan infrastruktur dan menjadikannya lebih teratur. Perseroan kini dapat terlibat sejak tahap awal perencanaan proyek infrastruktur, hingga tahap pelaksanaan berupa *monitoring* dan evaluasi proyek sampai masa konsesi selesai.

Sepanjang tahun buku 2018, PT PII telah melaksanakan mandat yang diberikan, dengan memproses penjaminan untuk 7 proyek KPBU dan 1 proyek non KPBU. Disisi lain PT PII juga telah melaksanakan mandat baru dalam melakukan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi untuk 4 proyek KPBU melalui penugasan dari Kementerian Keuangan.

Sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan, Perseroan melaksanakan tugas dan fungsinya menggunakan mekanisme layanan satu pelaksana (*single window*) dalam mengevaluasi, menyusun struktur penjaminan serta pemberian jaminan bagi proyek infrastruktur berskema KPBU. Melalui perluasan mandat usaha dan pelaksanaan tugas dari fungsi-fungsi tersebut, Perseroan berperan aktif mendukung rencana strategis Pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui percepatan penyediaan infrastruktur untuk masyarakat.

The first new mandate expanded the function of PT PII to provide guarantees to not only PPP projects, but also for loans or bond issuance conducted by State Owned Enterprises (SOEs) to carry out infrastructure projects. The expanded duty was established through Minister of Finance Regulation No. 101/2018 on the Procedures for Granting and Implementation of Government Guarantees Collectively or through an Infrastructure Underwriting Business Entity for Risk of Default of State-Owned Enterprises that Take Loans and/or Issuance of Bonds to Finance Provision of Infrastructure.

The second mandate is the function to provide project preparation and transaction advisory services, or Project Development facility (PDF), for PPP projects assigned by the Minister of Finance.

The two newly received mandates complemented the existing tasks and functions, enabling the Company to have a greater opportunity to assist in the development of infrastructure as well as to be more organized. The Company can now be involved from the initial stage of the infrastructure project planning, up to the implementation phase in the form of project monitoring and evaluation to the completion of the concession period.

During the 2018 fiscal year, PT PII has conducted its mandates by processing 7 PPP project guarantee and 1 non-PPP project guarantee. On the other hand, PT PII has also conducted the new mandate by carrying out project development facilities for 4 PPP projects through assignment from the Ministry of Finance.

As an SOE under the Ministry of Finance, the Company implements its duties and functions through the single window mechanism in evaluating, preparing the guarantee structure, and provision of guarantee for infrastructure projects under the PPP scheme. Through the expansion of the business mandates and the implementation of the tasks from these functions, the Company has an active role in supporting the strategic plan of the Government in encouraging national economic development by accelerating the provision of public infrastructure.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Pada tahun 2018 kebijakan Pemerintah untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur didasari oleh kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional, efisiensi logistik dan transportasi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas infrastruktur dasar. Hingga saat ini masih terdapat *gap* antara kebutuhan infrastruktur nasional dengan kemampuan Pemerintah melalui APBN untuk membiayainya. Untuk periode 2015-2019, kebutuhan pembiayaan Infrastruktur Indonesia adalah sebesar Rp4.796,2 triliun sementara kemampuan APBN dan APBD hanya sebesar Rp1.978,6 triliun atau 41,3% dari total kebutuhan. Dengan demikian, Gap tersebut diharapkan dapat ditutup dengan sumber pembiayaan lain di luar APBN.

Untuk itulah Pemerintah Indonesia terus mendorong partisipasi swasta untuk berinvestasi pada infrastruktur nasional melalui skema KPBU. Berbagai kebijakan dan dukungan fiskal diberikan oleh Pemerintah untuk mendorong skema KPBU tersebut, salah satunya melalui penjaminan PT PII.

Berdasarkan pertimbangan kondisi yang disampaikan di atas, Manajemen menyusun sebuah kebijakan strategis guna merealisasikan komitmen Pemerintah dalam membangun infrastruktur seperti tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Di dalam RPJMN disebutkan bahwa ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi sangat terbatas dan harus dapat ditingkatkan. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang dalam peningkatan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik.

Strategi penting yang diperankan oleh Perseroan adalah menjadi institusi yang dapat memberikan berbagai solusi bagi Pemerintah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk mengembangkan berbagai infrastruktur pusat maupun daerah yang siap dikerjasamakan dengan pihak swasta. PT PII melihat kebutuhan PJPK untuk memiliki kapasitas dalam merencanakan, menyiapkan dan mengembangkan proyek infrastruktur. Untuk itu PT PII memberikan *capacity building* bagi PJPK dalam hal skema, tahapan, dukungan pemerintah dan transaksi KPBU mempersiapkan PJPK untuk merencanakan, menyiapkan, dan mengembangkan proyek infrastruktur.

STRATEGIC POLICY

In 2018, the Government's policy to accelerate infrastructure development was based on an urgent need to increase national economic growth and competitiveness, logistical and transportation efficiency, and to meet community needs for basic infrastructure. At present, there is still a gap between the national infrastructure needs and the ability of the Government to finance those needs through the State Budget (APBN). For the 2015-2019 period, the financing needs of Indonesian Infrastructure development amounted to Rp4,796.2 trillion, while the ability of the APBN and Regional Government Budget (APBD) was only Rp1,978.6 trillion, or 41.3% of the total need. This gap is expected to be met with other funding sources outside the State Budget.

For this reason, the Indonesian Government continues to encourage private sector participation in national infrastructure development through the PPP scheme. Various policies and fiscal support were provided by the Government to encourage the PPP scheme, including through the guarantee facility provided by PT PII.

Based on the consideration of the above mentioned conditions, the Management has prepared a strategic policy to realize the government's commitment in infrastructure development as stated in the 2015-2019 Medium Term Development Plan (RPJMN). The RPJMN states that infrastructure to support economic advancement is limited and shall be improved. The limited infrastructure has been a main obstacle in realizing opportunities for increased investments as well as the reason for high logistics costs.

The role of the Company for this important strategy is to be the institution able to provide solutions for Government as the Contracting Agency (CA) to assist in the development of central and regional infrastructure projects ready for a collaboration with the private sector. PT PII recognizes the needs of CAs to have the capacity in planning, preparing, and developing infrastructure projects. To that end, PT PII provides capacity building for CAs in terms of schemes, phases, government support, and PPP transactions, to prepare the CAs in terms of infrastructure project planning, preparation, and development.



Laporan Direksi

Report of The Board of Directors

Pemegang Saham yang Kami Hormati,

PT PII terus berupaya memperkuat fungsi *Appraisal* dalam mengevaluasi berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan proyek. Dengan demikian, risiko proyek dapat lebih terukur, sementara biaya juga dapat ditekan melalui efisiensi penggunaan konsultan independen.

Untuk meningkatkan keteraturan dan kelancaran pelaksanaan proyek infrastruktur, Perseroan juga terus mempererat hubungan dengan pemangku kepentingan kunci, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan. Terkait dengan hal itu, PT PII bersifat proaktif untuk merekomendasikan proyek prioritas untuk direalisasikan serta skema pembiayaan yang akan digunakan.

Selain itu, PT PII secara aktif terlibat di dalam Kantor Bersama KPBU/*Public Private Partnership (PPP) Joint Office*, yang terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga pemerintah yang terkait dalam siklus proses KPBU yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan PT PII.

PT PII juga secara aktif berkoordinasi dengan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan untuk mendapatkan penugasan terkait penyiapan dan pendampingan transaksi proyek KPBU melalui *Project Development Facility (PDF)*.

Pada tahun 2018 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.101/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan mandat baru PT PII untuk penyediaan penjaminan atas pinjaman atau penerbitan obligasi BUMN untuk pembiayaan infrastruktur nasional.

Lahirnya kebijakan-kebijakan tersebut di atas menjadi landasan strategis bagi Perseroan untuk semakin mengintegrasikan ruang gerak usahanya sehingga optimal membantu pemerintah dalam merealisasikan proyek infrastruktur agar menjadi lebih teratur.

Distinguished Shareholders,

In this regard, PT PII continues to optimize the *Appraisal* function in evaluating all relevant aspects of the project development undertaking. This result in more measurable project risks, as well as reduced expenses from more efficient utilization of third party consultants.

To improve the regularity and smooth implementation of the infrastructure project, the Company continues to strengthen its relations with key stakeholders, such as the National Development Planning Agency (Bappenas) and the Ministry of Finance. Related to this, PT PII is proactive in recommending priority projects to be realized as well as the financing scheme to be used.

In addition, PT PII is actively involved in the Public Private Partnership (PPP) Joint Office, comprising of representatives from Ministries/Government Institutions involved in the PPP process cycle, namely Bappenas, Ministry of Finance, Coordinating Ministry for Economic Affairs, Investment Coordinating Board (BKPM), Government Goods and Services Procurement Policy Institution (LKPP), and PT PII.

PT PII also actively coordinates with the Ministry of Finance's Director General of Financing and Risk Management to get assignments related to preparation and assistance for PPP project transactions through the *Project Development Facility (PDF)*.

2018 saw the issuance of Minister of Finance Regulation No. 101/2018 on the Procedures for Granting and Implementation of Government Guarantees Collectively or through an Infrastructure Underwriting Business Entity for Risk of Default of State-Owned Enterprises that Take Loans and/or Issuance of Bonds to Finance Provision of Infrastructure. The issuance of the Minister of Finance Regulation provides the basis for the implementation of PT PII's new mandate to provide guarantee facility for loans taken or bonds issued by SOEs to finance the development of national infrastructure projects.

The establishment of the above mentioned policies became a strategic foundation for the Company to further integrate its line of business and optimally assist the government in realizing infrastructure projects to be more organized.



Pencapaian Hasil Usaha terhadap Target

Melalui berbagai kebijakan strategis tersebut, PT PII berupaya memenuhi mandat yang telah diamanatkan oleh pemerintah, sekaligus mewujudkan kinerja yang positif dalam kapasitas Perseroan sebagai badan usaha. Indikator pencapaian kinerja dimaksud mengacu pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) yang ditetapkan pada awal tahun 2018. Perseroan menargetkan tahun 2018 sebagai momentum untuk menambah jumlah proyek dari beragam sektor infrastruktur yang dijamin.

Kebijakan strategis berkelanjutan yang telah diterapkan PT PII memberikan hasil yang baik, tercermin dari penambahan proyek yang telah dijamin setiap tahunnya. Sampai dengan akhir tahun 2018, PT PII telah menjamin 17 proyek KPBU, 1 proyek non KPBU, serta penyiapan dan pendampingan transaksi untuk 4 proyek KPBU. Selain itu, di tahun 2018 PT PII juga telah mendorong pengembangan kapasitas dan potensi *pipeline* proyek-proyek infrastruktur KPBU di beberapa sektor di Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Perhubungan (Ditjen KA, Perhubungan Udara, Perhubungan Darat & Perhubungan Laut), Kementerian PUPR (Ditjen Bina Marga), Kementerian Kesehatan, dan beberapa Pemerintah Daerah seperti Pemprov Aceh, Pemprov Gorontalo, Pemprov DKI, Pemko Medan, dan lainnya.

Dari proyek-proyek PT PII sepanjang tahun 2018 tersebut, secara umum perkembangan prosesnya adalah:

- Total Proyek Dijamin: 17 Proyek KPBU dan 1 Proyek Non-KPBU
- Proyek dengan status *Confirmation to Proceed* (CTP): 12 Proyek
- *Project Development Facility* (PDF): 4 Proyek

Selain kuantitas yang meningkat, dari sisi sektor juga telah terjadi perluasan. Pada tahun 2018 terdapat sektor baru yang dijamin melalui skema penjaminan pinjaman BUMN yaitu untuk proyek di bidang infrastruktur sektor pariwisata, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nilai proyek pengembangan kawasan pariwisata ini adalah sebesar USD 300 juta. Perjanjian Penjaminan atas pinjaman proyek tersebut telah ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2018.

Achievement of Business Results to Targets

Through the various strategic policies, PT PII seeks to fulfill the mandates granted by the government, as well as realizing a positive performance in the Company's capacity as a business entity. Performance achievement indicators refer to the Company's work plan and budget (RKAP) that was established at the beginning of 2018. The Company intends to make 2018 into a momentum year to expand on the number of projects from the various infrastructure sectors eligible for guarantee facility.

The sustainable strategic policy that has been implemented by PT PII generated good results, reflected in the annually growing number of projects that have been guaranteed. As of the end of 2018, PT PII had guaranteed 17 PPP projects, 1 non-PPP project, as well as provide project development facilities for 4 PPP projects. In addition, in 2018 PT PII also encouraged capacity and potential development of PPP infrastructure project pipelines in several sectors at ministries and agencies, namely the Ministry of Transportation (Directorate General of Railways, Air Transportation, Land Transportation & Sea Transportation), Ministry of PUPR (Directorate General of Bina Marga), Ministry of Health, and several Local Governments such as the Aceh Provincial Government, Gorontalo Provincial Government, DKI Provincial Government, City Government of Medan, and others.

Project undertakings by PT PII during the year 2018 can be summarized as follow:

- Total Guaranteed Project: 17 PPP Projects and 1 Non-PPP Project
- Projects with Confirmation to Proceed (CTP) status: 12 Projects
- Project Development Facility (PDF): 4 Projects

In addition to the increase in quantity, there has also been an expansion in sectors. In 2018, there is a new guaranteed sector through the SOE loan guarantee scheme, namely for the projects in the tourism sector, namely the Mandalika Special Economic Zone in Lombok, West Nusa Tenggara Province. The value of this tourism area development project amounted to USD300 million. The Guarantee Agreement for the project loan was signed on 31 December 2018.



Laporan Direksi

Report of The Board of Directors

Proyek ini dilaksanakan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yaitu BUMN yang memiliki tugas untuk membangun dan mengembangkan kawasan pariwisata. Penjaminan yang diberikan PT PII bersama Kementerian Keuangan adalah untuk menjamin pinjaman ITDC.

Untuk proyek KPBU, di tahun 2018 PT PII telah memproses penjaminan proyek KPBU untuk 4 (empat) sektor baru yaitu 2 sektor transportasi yang dikembangkan oleh PJPK Kementerian Perhubungan yaitu sektor jalan kereta api (proyek KA Makassar Pare-pare) dan sektor bandara udara (proyek Bandara Labuan Bajo), 1 sektor transportasi jalan nasional non tol (2 proyek jalan nasional non tol yaitu Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera Selatan dan Riau) oleh PJPK Kementerian PUPR, dan 1 sektor kesehatan oleh PJPK Kementerian Kesehatan yaitu RS Kanker Dharmais. Dari proyek tersebut di atas, PT PII ditugaskan oleh Kementerian Keuangan untuk melaksanakan dukungan penyiapan dan pendampingan transaksi kepada PJPK atas 4 proyek tersebut yaitu KA Makassar Pare-pare, Jalintim Sumatera Selatan, Jalintim Riau, dan RS Kanker Dharmais.

PT PII juga telah menetapkan target terhadap sejumlah proyeknya untuk mencapai tahapan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan (GA *Signed*). Pada tahun 2018, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan Proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung pada 14 Februari 2018 dan SPAM Semarang Barat pada 23 November 2018. Total nilai proyek kedua SPAM tersebut mencapai Rp1.167 miliar dan diharapkan dapat melayani kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat di daerahnya masing-masing.

Pemegang Saham yang Kami Hormati,

Dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, pencapaian tahun 2018 tumbuh positif. Pada tahun 2017, total pendapatan yang diperoleh Perseroan adalah sebesar Rp766,0 miliar, dengan demikian, telah terjadi peningkatan sebesar 8,92%.

Tantangan pada target pendapatan penjaminan yang telah ditetapkan dalam RKAP tersebut, antara lain adanya pergeseran *milestone* proyek yang disasar pada tahun 2018. Pada tahun 2018 terdapat beberapa proyek yang telah melalui proses penilaian dan strukturisasi namun masih memerlukan waktu penyelesaian lebih lama dari yang ditargetkan akibat

This project is carried out by PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) or the Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), which is a SOE engaged in the business of building and developing tourism areas in Indonesia. PTT PII provide a joint guarantee with the Ministry of Finance on loans taken by ITDC.

As regards PPP projects, in 2018 PT PII processed the guarantees for PPP projects in 4 (four) new sectors, namely the projects in two transportation sectors developed the Ministry of Transportation as CA, respectively the railway sector (the Makassar-Pare-pare railway project) and airport sector (Labuan Bajo Airport project). 1 national non-toll road sector (2 projects of non-toll national roads namely the East Link Sumatera Selatan and East Link Riau) with the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) as CA, and the Dharmais Cancer Hospital in the health sector with the Ministry of Health as CA. From the above projects, PT PII was assigned by the Ministry of Finance to provide project development facilities to CAs in these four large projects, namely the Makassar Pare-pare Railway, East Link South Sumatra, East Link Riau, and Dharmais Cancer Hospital.

PT PII has also set the targets for a number of projects to reach the stage of Guarantee Agreement Signed (GA *Signed*). 2018 saw the signing of the Guarantee Agreement for the Bandar Lampung Drinking Water Supply System PPP Project on 14 February 2018, and the West Semarang Drinking Water Supply System PPP Project on 23 November 2018. The total value of these two Drinking Water Supply projects amounted to Rp1,167 billion, and is expected to serve the needs for clean and drinking water of communities in the respective areas.

Distinguished Shareholders,

The achievement in 2018 represented a positive growth over performance in the previous year. In 2017, the Company recorded total revenues of Rp766.0 billion. Thus, there was an increase of 8.92% in revenues.

Among challenges in meeting the target for revenues from guarantee facility as sets out in the RKAP is the shift in project milestone previously targeted for 2018. During 2018, there were a number of projects that have already passed the project assessment and structuring stage, but required longer than expected time until completion as planned due to a variety of external

beberapa faktor eksternal, di antaranya adalah adanya pergantian personil kunci di PJPK, proses koordinasi lintas lembaga yang memakan waktu, serta tingkat pemahaman pihak-pihak terkait yang masih belum merata.

Terhadap tantangan yang dihadapi tersebut, PT PII senantiasa berperan aktif mendorong dan memberikan masukan yang membangun demi percepatan penyelesaian proyek yang diperkirakan membutuhkan waktu tambahan hingga tahun 2019 untuk diselesaikan. Berdasarkan pengalaman tersebut, beberapa upaya pembelajaran telah diterapkan pada salah satu proyek dan dengan didukung oleh komitmen tinggi dari PJPK, dapat menghantarkan Proyek Perketeraapihan Umum Makassar-Parepare hingga selesai proses lelang Badan Usaha dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Hal ini merupakan salah satu wujud kontribusi nyata PT PII dalam percepatan pembangunan Infrastruktur Indonesia.

Pendapatan pengelolaan dana mengalami pencapaian yang positif terhadap target anggaran. Dari target yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun 2018 sebesar Rp754,1 miliar, realisasinya mencapai Rp754,91 miliar. Dengan demikian, prosentase pencapaiannya adalah sebesar 100,13%, lebih tinggi dari target anggaran.

Dari sisi pembebanan, terdapat efisiensi dan aktivitas yang tidak dapat dilaksanakan akibat proyek-proyek yang tertunda maupun mengalami perubahan jadwal atau bahkan tidak dapat dilanjutkan. Selain itu terdapat optimalisasi inisiatif Kantor Bersama KPBK yang dapat mendorong kemajuan proyek tanpa harus banyak mengeluarkan biaya terkait *workshop* dan pelatihan bagi PJPK. Dengan demikian, pencapaian rasio antara Beban Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) menjadi lebih baik yaitu sebesar 26%, walaupun target awalnya adalah 35%.

Kondisi-kondisi tersebut di atas turut memengaruhi perolehan laba tahun berjalan. Pada tahun 2018, laba yang dicatatkan oleh Perseroan mencapai sebesar Rp471,08 miliar atau 89% dari target yang telah ditetapkan. Namun demikian, laba tahun berjalan tersebut meningkat sebesar 0,13% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp470,47 miliar.

Pemegang Saham yang Kami hormati,

Untuk memastikan pelaksanaan proyek KPBK berjalan lancar dan sesuai jadwal, diperlukan langkah-langkah pemantauan proyek yang berkoordinasi dengan

factors. These include the replacement of key personnel at the CAs, inter-agency coordination process taking a longer time, and the unequal level of understanding among parties involved.

In the face of such challenges, PT PII has always played an active role in encouraging and providing constructive input to accelerate the completion of projects which are expected to require additional time until 2019 to be completed. Based on experience, a number of lesson learned have been implemented in one of these projects and, supported with the full commitment of the respective CA, have been successful in delivering the Makassar-Parepare Public Railway project to the completion of Business Entity tender process in less than 1 (one) year. This is one manifestation of PT PII's real contribution in accelerating the development of Indonesian infrastructure.

Revenues from funds investment showed a positive achievement against the budgeted target. From the target set out in the 2018 RKAP of Rp754.1 billion, actual revenues amounted to Rp754.91 billion. This represented an achievement rate of 100.13% against the budgeted target.

In terms of expenses, there were efficiencies from unrealized activities due to projects that were postponed, rescheduled, or even cancelled out altogether. In addition, the optimization of initiatives through the PPP Joint Office has also resulted in promoting progress in projects without undue expenses related to the provision of workshops and training for CAs. Subsequently, the ratio between Operating Expenses and Operating Income (BOPO) has improved to 26%, against the initial target at 35%.

The above mentioned conditions have also impacted on profits for the year. In 2018, the Company posted profit for the year of Rp471.08 billion or 89% of the established target. However, the amount of profit for the year increased by 0.13% compared to the previous year at Rp470.47 billion.

Distinguished Shareholders,

To ensure smooth and on-time implementation of PPP projects, project monitoring steps are necessary in coordination with all relevant stakeholders, for the



Laporan Direksi

Report of The Board of Directors

segenap *stakeholder* atau pemangku kepentingan, hingga berakhirnya masa konsesi kerjasama. Perseroan mengambil langkah strategis dengan membentuk Tim Pemantauan Bersama atau *Joint Monitoring Committee* (JMC) yang beranggotakan PJPK, Badan Usaha dan *stakeholder* terkait lainnya untuk setiap proyek yang telah mendapatkan penjaminan dari PT PII. Dengan adanya JMC ini, PT PII dapat berperan aktif dalam membantu PJPK dan *stakeholder* terkait untuk melakukan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi secara optimal atas potensi risiko dan kendala yang muncul selama masa konsesi proyek, termasuk upaya merencanakan dan upaya mitigasi risiko yang tepat.

Melalui upaya-upaya bersama secara berkesinambungan tersebut, proyek infrastruktur dapat dikelola dan dikawal secara teratur dan intensif selama dikelola oleh Badan Usaha, hingga penyerahan kembali proyek kepada Pemerintah pada akhir masa konsesi.

INFORMASI KINERJA PENDUKUNG BISNIS

Upaya PT PII untuk memenuhi mandat yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pada saat bersamaan juga berupaya mencapai kinerja usaha yang positif, tidak dapat dilepaskan dari kinerja pendukung bisnis, yaitu sumber daya manusia dan teknologi informasi.

Bidang Sumber Daya Manusia

PT PII memandang bahwa peran sumber daya manusia (SDM) yang profesional secara signifikan dirasakan dalam mencapai keberhasilan organisasi. Dengan demikian, pengembangan dan retensi sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dan dipertahankan guna menghadirkan karyawan yang inovatif, kreatif dan unggul terdepan dalam keahlian di bidangnya.

Pada tahun 2018, terdapat dua hal penting yang menjadi fokus Perseroan dalam pengelolaan SDM. Pertama, PII memfokuskan pelatihan-pelatihan berbasis *leadership* dalam pengembangan karyawan, terutama para karyawan di level *Senior Leader*.

Kedua, PII juga melakukan revitalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang sudah ada untuk memastikan kesesuaian nilai-nilai tersebut dalam mendukung pencapaian-pencapaian Perseroan dalam jangka panjang. Proses revitalisasi nilai-nilai budaya organisasi

duration of the concession period of the partnership projects. The Company took a strategic measure with the establishment of a Joint Monitoring Committee (JMC), consisting of the CA, Business Entity, and other relevant stakeholders, for each project that has received guarantee from PT PII. With the Joint Monitoring Committee, PT PII will be able to optimize its role in assisting the CAs and related stakeholders in the effective management, monitoring and evaluation of potential risks and constraints that may arise during the project concession period, including in efforts to plan and implement the proper risk mitigation measures.

Through these continuous joint efforts, infrastructure projects can be managed and maintained in a regular and intensive manner during its management by the Business Entity, until the project hand over to the Government at the end of the concession period.

INFORMATION ON BUSINESS SUPPORT PERFORMANCE

PT PII's efforts to fulfill the mandate set by the government and at the same time also strive to achieve positive business performance, cannot be separated from the performance of business support functions, namely human resources and information technology.

Human Resources

PT PII considers the role of professional human resources (HR) is significant to achieve organizational success. Thus, the development and retention of human resources is one of the important factors that must be considered and maintained in order to generate innovative, creative, and leading employees who are experts in their fields.

In 2018, there were two important areas that became the focus of the Company in managing HR. First, PT PII focused on leadership-based training in employee development, particularly for employees at the Senior Leader level.

Second, PT PII also revitalizes the existing organizational cultural values to ensure the conformity of these values to support achievement of the Company's long-term goals. The revitalizing process of these organizational cultural values involves the Board of Directors and



tersebut melibatkan Direksi dan *Senior Leader* serta difasilitasi oleh konsultan. Keluaran dari revitalisasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan program-program budaya yang melibatkan karyawan terpilih dari level staf sampai *Executive Vice President* (EVP).

Sepanjang tahun 2018, PII juga menghadapi beragam tantangan dalam pengelolaan SDM. Tantangan tersebut disebabkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi, salah satunya perubahan Struktur Organisasi untuk menjawab dinamika kebutuhan usaha dan perluasan mandat Perseroan tahun 2018. Perubahan tersebut berdampak terhadap perubahan tugas dan tanggung jawab serta rekrutmen karyawan untuk unit organisasi yang mendukung pelaksanaan mandat Perseroan untuk penjaminan non KPBU serta penyiapan proyek dan pendampingan transaksi proyek.

Untuk mengatasi hal tersebut, Perseroan mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD), penyesuaian dokumen *job description*, serta melakukan proses mutasi dan promosi internal untuk mengisi posisi kosong yang dibutuhkan secara cepat dengan pemahaman konten yang sudah baik.

Pada tahun 2018, PT PII telah merekrut 31 orang karyawan pilihan baru, sehingga jumlah total saat ini menjadi 128 orang.

Untuk meningkatkan kompetensi karyawan, sepanjang tahun 2018 Perseroan telah mengikutsertakan 118 orang untuk mengikuti pelatihan, baik untuk kategori *in-house training*, *knowledge sharing*, maupun *public sharing*. Untuk kegiatan tersebut, dana yang direalisasikan mencapai Rp2,6 miliar.

Bidang Teknologi Informasi (TI)

Dalam era digitalisasi dan teknologi serta perkembangan kebutuhan Perusahaan saat ini, kebutuhan terhadap teknologi informasi yang mampu mendukung bisnis Perseroan dirasakan semakin mendesak. Karena itu, PT PII pada tahun 2018 telah menyusun IT *Master Plan* (ITMP) 2019-2023, yang mulai dijalankan pada tahun depan.

Pada tahun 2018, sejumlah program TI telah direalisasikan untuk menjamin keandalan TI dalam rangka mendukung kinerja Perseroan. Salah satu yang telah direalisasikan adalah pengimplementasian *Disaster Recovery Center* (DRC). Hal ini merupakan sistem dan infrastruktur untuk memitigasi risiko jika terjadi bencana yang dapat memengaruhi kegiatan bisnis perusahaan.

Senior Leaders, and was facilitated by external consultants. The revitalization outputs were followed up with the preparation of cultural programs involving selected employees from the level of staff to Executive Vice President (EVP).

During 2018, PII also encountered various challenges in HR management. The challenges were due to changes that have occurred, one of which is the change in the Organizational Structure in response to the dynamics of business needs and the expansion of the Company's mandate in 2018. These changes have an impact on changes to the duties and responsibilities as well as employee recruitment for organizational units that support the implementation of the Company's mandate to provide non-PPP guarantee facility as well as project development facility.

To overcome this, the Company organized Focus Group Discussions (FGDs), adjusted the job description documents, as well as conducted internal transfer and promotion processes to fill vacant positions that are needed quickly with good content understanding.

In 2018, PT PII has recruited 31 new employees, bringing the total number of employees to 128 people.

To improve employee competency, throughout 2018 the Company has included 118 employees to attend training programs, in the category of in-house training, knowledge sharing, or public sharing. For these activities, the Company expended funds amounted to Rp2.6 billion.

Information Technology (IT)

In the digital and technology age, as well as the development of the Company's current needs, the need for information technology that is able to support the Company's business is increasingly urgent. Therefore, in 2018, PT PII has drafted the 2019-2023 IT Master Plan (ITMP), which will begin to be implemented next year.

In 2018, a number of IT programs have been realized to ensure IT reliability in order to support the performance of the Company. One of the programs that has been realized is the implementation of the Disaster Recovery Center (DRC). This is a system and infrastructure to mitigate risks in the event a disaster occurs that may affect the Company's business activities.



Laporan Direksi

Report of The Board of Directors

Untuk mendukung kegiatan bisnis penjaminan, PT PII telah menerapkan beberapa program TI yaitu *Claim Management System* dan *Land Monitoring System*. *Claim Management System* merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan *monitoring* proyek-proyek yang telah ditandatangani perjanjian penjaminannya.

Selanjutnya adalah *Land Monitoring System*. Program ini merupakan sistem yang digunakan oleh Divisi Environmental and Social untuk melakukan *monitoring* kesiapan lahan pada suatu Proyek.

Selain rangkaian penguatan dan pengembangan, hingga tahun 2018 pengelola TI juga telah merancang aplikasi-aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung operasional dan kinerja perusahaan. Di antaranya adalah IIGF Portal, yaitu aplikasi untuk menampilkan informasi terkait sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh karyawan Perseroan.

Sebagai wujud komitmen dalam pengembangan TI, sepanjang tahun 2018 Perseroan telah menginvestasikan dana lebih dari Rp2 miliar untuk pengembangan teknologi informasi. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan ITMP senilai Rp400 juta, infrastruktur dan sistem DRC senilai Rp850 juta serta penambahan peralatan pendukung area kerja baru senilai Rp1 miliar.

ANALISIS PROSPEK USAHA 2019

Dalam menyusun prospek usaha, Perseroan menggunakan sejumlah asumsi sebagai dasar pertimbangan. Asumsi makro ekonomi dan keuangan yang relevan pada operasi PT PII berkisar pada nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga dan inflasi.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR, asumsi kurs rupiah adalah Rp15.000 per dolar AS. Sedangkan suku bunga 5,3% dan inflasi 3,5%.

Dari sisi internal, PT PII menyusun asumsi dasar dari sisi proyek maupun pendanaannya. Dari sisi pendapatan usaha, Perseroan akan memiliki 3 jenis pendapatan yang bersumber dari kegiatan penjaminan proyek

In direct support of its guarantee business activities, PT PII has implemented a number of IT programs, namely the Claim Management System and Land Monitoring System. The Claim management System is a system used by the Project Monitoring and Claim Management division to monitor projects with the guarantee agreements that have been signed.

Next is the Land Monitoring System. This program is a system used by the Environmental and Social division to monitor the land readiness of a Project.

In addition to strengthening and development efforts, up to 2018, the IT management have also designed information technology-based applications to support the Company's operations and performance. Among others is the IIGF Portal, which is an application to display information related to human resources that can be utilized by all Company employees.

As a form of commitment in IT development, the Company has invested more than Rp2 billion in funds for the development of information technology during 2018. The funds are used for the development of ITMP amounting to Rp400 million, infrastructure and DRC system amounting to Rp850 million and the addition of equipment to support new work areas amounting to Rp1 billion.

2019 BUSINESS PROSPECT ANALYSIS

In preparing the business prospects, the Company uses a number of assumptions as a basis for consideration. Relevant macroeconomic and financial assumptions in PT PII's operations revolve around currency exchange rates, interest rates, and inflation.

Based on the 2019 State Budget (APBN) established by the government and the Parliament, the assumption of the Rupiah exchange rate is Rp15,000 per US dollar. While the interest rate is 5.3% and inflation at 3.5%.

Internally, PT PII constructs the basic assumptions in terms of projects and their financing. In terms of operating revenues, the Company has 3 types of revenues derived from infrastructure project guarantee

infrastruktur, pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, serta pendapatan pengelolaan dana.

Melanjutkan pemrosesan penjaminan proyek dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 diharapkan terdapat dua proyek baru dan empat proyek lanjutan yang dapat mencapai tahapan penandatanganan perjanjian penjaminan dan pengakuan pendapatan *Upfront fee* di tahun yang sama. Dari enam proyek tersebut, diproyeksikan lima di antaranya telah mencapai efektif penjaminan, sehingga *Recurring fee* penjaminan juga telah dapat diakui, sedangkan satu sisanya baru mencapai tahapan efektif penjaminan di tahun 2020.

Terkait dengan penjaminan Non-KPBU penjaminan *Direct Lending* BUMN, diharapkan terdapat setidaknya satu proyek yang dapat diproses dan diproyeksikan mencapai tahapan penandatanganan perjanjian penjaminan. Adapun untuk penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, terdapat empat proyek yang merupakan kelanjutan pemrosesan penjaminan dari tahun sebelumnya, dan diharapkan akan ada 4 proyek baru yang diterima penugasannya.

Sedangkan target pendapatan pengelolaan dana dengan tetap mengedepankan pengelolaan risikonya, dapat mencapai tingkat pengembalian rata-rata sebesar 200 bps di atas BI 7-day *repo rate* yang diasumsikan tetap dikisaran 6% di tahun 2019. Perseroan juga akan mempertahankan komposisi portofolio dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan pasar obligasi, serta tetap mempertimbangkan kebutuhan likuiditas. Besaran penempatan obligasi akan dipertahankan sekitar 30% atau setara dengan posisi di tahun 2018. Prosedur atau proses penempatan yang berintegritas namun dapat mengoptimalkan pasar diperlukan di tahun 2019.

Berdasarkan realisasi 2018, proyeksi keuangan untuk 2019 adalah sebagai berikut:

activities, project development facility revenues, as well as fund management income.

Continuing with the processing of the guarantee projects from the previous year, in 2019 it is expected that there will be two new projects and four on-going projects that can reach the guarantee agreement signing stage and therefore recognition of up-front fee revenues in the same year. From these six projects, it is projected that five of them will have achieved effective guarantees, allowing the recurring guarantee fee to be recognized as well, while the remaining one will reach the effective stage of guarantee in 2020.

With regard to Non-PPP SOE Direct Lending guarantee, it is expected that there will be one project that can be processed and projected to reach the guarantee agreement signing stage. As for the project development facility, there are four projects that are in processing continuation as guarantee projects from the previous year, and it is expected that there will be 4 new project assignments to be received.

Meanwhile, fund management revenue target while still emphasizing proper risk management, is expected to be able to reach an average rate of return of 200 bps above the assumed BI 7-day repo rate of 6.00% in 2019. The Company will also maintain the portfolio composition by taking into account the conditions of bond market availability, while also taking liquidity requirements into consideration. The amount of bond placement will be maintained at around 30% or equivalent to the position in 2018. In 2019, there is a need for prudent fund placement procedures or process that are also aligned with market optimization.

Based on the 2018 realization, the following is the 2019 financial projections:

Uraian Description	Proyeksi 2019 2019 Projection	Realisasi 2018 (dalam juta Rp) 2018 Realization (in million Rp)
Aset Assets	10.958,68	10.620,92
Pendapatan Revenues	1.040,62	834,25
Beban Usaha Operating Expenses	516,47	356,79
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	524,15	477,46
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	504,78	471,08
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	469,95	330,38



Laporan Direksi

Report of The Board of Directors

Untuk proyeksi rasio keuangan, rasio yang relevan untuk bisnis penjaminan menggunakan Margin Laba Bersih dan BOPO. Adapun target yang dituju adalah Margin Laba Bersih 49% dan BOPO 35%. PT PII juga mengalokasikan pembagian dividen kepada pemegang saham, maksimum 20% dari estimasi Laba Bersih Tahun Buku 2018 atau senilai maksimal Rp95.160.000.000 pada tahun 2019.

Target yang telah ditetapkan tersebut akan dicapai melalui sejumlah strategi. Dasar yang dijadikan pedoman oleh Perseroan adalah kembali kepada mandat dan dua fungsi PT PII sebagai *fiscal tools* Kementerian Keuangan dan BUMN.

Mandat dan fungsi utama ini mendorong PT PII untuk fokus pada penguatan bisnis penjaminan, baik KPBU maupun Non KPBU, serta membangun skema penjaminan yang kredibel demi mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Selain itu, upaya memastikan adanya kesinambungan *pipeline* proyek juga menjadi fokus utama di tahun 2019, antara lain melalui peran yang lebih aktif dalam penyiapan proyek dan pendampingan transaksi.

Dengan makin meningkatnya aktivitas pembangunan proyek serta penambahan jumlah proyek yang dijamin maka pada tahun 2019, kegiatan pemantauan proyek yang dijamin PT PII akan diintensifkan. Kegiatan pemantauan tersebut juga membuka kemungkinan akan adanya amandemen atas perjanjian penjaminan guna menyesuaikan perubahan Perjanjian KPBU. Mekanisme penyiapan Amandemen tersebut akan menjadi salah satu kegiatan dalam proses *monitoring* proyek Perseroan selain upaya dalam memperkuat pemrosesan penjaminan.

Secara total, pada tahun 2019 akan terdapat 26 proyek KPBU yang menjadi obyek pemantauan. Dalam melanjutkan peran PT PII sebagai pengelola risiko pemerintah, Perseroan akan terus membangun sistem pemantauan risiko penjaminan yang kuat (*monitoring and enhancement*), utamanya melalui penggunaan IPromS (*Interactive Project Monitoring System*). Sistem ini telah dikembangkan pada tahun 2018 dengan salah satu fiturnya adalah *Early Warning System* bagi pemantauan *Key Risk Indicators* dari proyek. Di samping itu Perseroan juga akan senantiasa aktif dalam membina hubungan yang erat dengan para pemangku kepentingan.

In terms of financial ratio projections, the relevant ratios for the guarantee business are the Net Profit Margin and BOPO. The set target are 49% for Net Profit Margin and 35% for BOPO. PT PII also allocates dividend distribution to the shareholders, a maximum of 20% of the of the estimated Net Income for the 2018 Fiscal Year, or a maximum of Rp95,160,000,000 in 2019.

The established targets will be achieved through a number of strategies. The basis used as the guideline by the Company is to return to the mandate and two functions of PT PII as a fiscal tools of the Ministry of Finance and SOEs.

This primary mandate and function encourages PT PII to focus on strengthening the guarantee business, both PPP and Non-PPP, as well as establishing credible guarantee schemes to support Indonesia's infrastructure development. In addition, efforts to ensure the continuity of the project pipeline will also be the main focus in 2019, including through more active roles in project development facility activities.

With the increase in both project constructions activities and the number of projects guaranteed, in 2019 PT PII intend to intensify the monitoring activities of projects guaranteed by PT PII. The monitoring activity also opens up the possibility for amendments to the guarantee agreement to adjust to changes in the PPP Agreement. The amendment preparation mechanism will be one of the activities in the monitoring process of the Company's project in addition to efforts to strengthen guarantee processing.

In total, there will be 26 PPP projects that are the object of monitoring in 2019. In continuing the role of PT PII as the manager of government's risk, the Company will continue to build a strong guarantee risk monitoring system (*monitoring and enhancement*), mainly through the use of IPromS (*Interactive Project Monitoring System*). This system has been developed in 2018 with one of its features being the early warning system for the monitoring of Key Risk Indicators of a project. In addition, the Company will always be active in developing close relations with infrastructure stakeholders.



Fungsi utama dari proses pemantauan adalah untuk melakukan mitigasi risiko atas sebuah proyek dan memastikan agar proyek tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, termasuk perubahan dan penyesuaian perjanjian-perjanjiannya. Pada hakikatnya, PJPK bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan proyek, namun dengan dibentuknya JMC (*Joint Monitoring Committee*) yang terdiri dari perwakilan PJPK, PT PII, Badan Usaha Pelaksana (BUP), serta *stakeholder* terkait, diharapkan proses pemantauan proyek akan lebih baik dan intensif sehingga mitigasi risiko dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Perseroan juga akan memberdayakan IIGF Institute sebagai unit kerja Perseroan untuk mendukung bisnis Perseroan melalui *Journal and Scholars Engagement*, serta pengembangan pengetahuan PJPK dan *stakeholder* terkait atas ekosistem KPBU dan penjaminan pemerintah oleh PT PII. IIGF Institute, sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, akan diposisikan memiliki peran yang lebih sentral dan strategis dalam akuisisi proyek untuk PT PII melalui upaya peningkatan *capacity building* bagi para pemangku kepentingan seperti halnya PJPK.

Dengan ditunjuknya IIGF Institute sebagai pelaksana kegiatan *capacity building* Kantor Bersama KPBU (PPP Joint Office), serta semakin meningkatnya permintaan penyelenggaraan kelas *capacity building* oleh PJPK, maka IIGF Institute di tahun 2019 akan melaksanakan 3 program unggulan.

Pertama, mendorong proyek KPBU dengan target penyelenggaraan 35 *capacity building*, utamanya bagi pemerintah daerah. Kedua, menjalankan riset berbasis sektor KPBU. Ketiga, memanfaatkan sistem *E-learning* untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, efektivitas, efisiensi biaya dan fleksibilitas, serta mengembangkan standar kompetensi KPBU.

Manfaat utama yang diperoleh dengan *E-learning* adalah dalam hal fleksibilitasnya. Melalui *E-learning*, materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, di samping itu materi dapat diperkaya dengan berbagai sumber belajar termasuk multimedia, serta dengan cepat dapat diperbaharui oleh pengajar.

Dari sisi sumber daya manusia, Perseroan berencana menambah 27 karyawan yang tersebar di berbagai tingkatan dan divisi. Penambahan jumlah pegawai ini untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan,

The main function of the monitoring process is to mitigate the risks of a project and ensure that the project is implemented in accordance with the predetermined plan, including changes and adjustments to the agreements. In essence, the CA is responsible for the smooth implementation of the project, however, with the establishment of the JMC (*Joint Monitoring Committee*) consisting of representatives of the CA, PT PII, Project Company ("BUP"), and the related stakeholders, the project monitoring process is expected to be better, enabling risk mitigation to be conducted in an effective and efficient manner.

The Company will also empower the IIGF Institute as a work unit of the Company to support the Company's business through *Journal and Scholars Engagement*, as well as the knowledge development of the CA and the related stakeholders regarding the PPP ecosystem and government guarantees by PT PII. IIGF Institute, in accordance with the Company's Long Term Plan, will have a more central and strategic role in the acquisition of projects for PT PII through capacity building improvement efforts for the stakeholders similar to the CA.

With the appointment of the IIGF Institute as the executor of the Joint PPP Office capacity building activities, as well as the increasing demand for the instructor, implementation of capacity building classes by the CA, in 2019, the IIGF Institute will implement 3 featured programs.

First, encouraging PPP projects with the target of implementing 35 capacity building projects, mainly for local governments. Second, conducting research based on the PPP sectors. Third, utilizing e-Learning systems to improve speed, convenience, effectiveness, cost efficiency and flexibility, as well as to develop PPP competency standards.

The main benefit obtained through e-Learning is in terms of flexibility in that learning materials can be accessed at anytime and anywhere, in addition, the materials can be enriched with various learning sources, including multimedia, and can be quickly updated by the instructor.

In terms of human resources, the Company plans to acquire 27 additional employees spread across various levels and divisions. The addition is to support the Company's operational activities, in line with



Laporan Direksi

Report of The Board of Directors

seiring peningkatan jumlah proyek yang dijamin dan sudah mulai masuk dalam tahapan pemantauan, peningkatan target penyiapan proyek dan pendampingan transaksi serta upaya memperkuat model bisnis baru yang juga telah mulai dirintis di tahun 2018, yaitu penjaminan Non KPBU dan penyiapan dan pendampingan transaksi proyek.

Bersamaan dengan itu, dukungan teknologi informasi juga akan sangat strategis. Karena itulah, Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan IT *Master Plan* yang telah disusun. Pembangunan teknologi informasi yang terintegrasi dengan proses bisnis dalam mendukung pelaksanaan mandat dan operasional Perusahaan yang lebih efisien dan efektif akan menjadi salah satu fokus utama PT PII di tahun 2019.

Dengan strategi dan melihat perkembangan kinerja tahun 2018, prospek usaha PT PII pada tahun 2019 akan lebih optimistis. Karena itu, Manajemen berkomitmen untuk mewujudkan rencana strategi yang telah ditetapkan pada tahun 2018 tersebut.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perseroan memandang bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* - GCG) merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya. Penerapan GCG jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja dan penciptaan citra perusahaan yang baik.

Terkait dengan hal tersebut dan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015, di awal tahun 2018 PT PII dengan bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan *assessment* terhadap penerapan GCG tahun 2018, dengan hasil 86,7 dengan penilaian kategori "Sangat Baik".

Selain itu, di bulan Juli 2018, Perseroan kembali menerima Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara sampai dengan Semester I Tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, dengan hasil sebagai berikut:

1. Tidak terdapat kerugian negara terhadap bendahara yang dilaporkan.

an increase in the number of guaranteed projects that have entered into the monitoring phase, and an increase in project development facility, as well as efforts to strengthen new business models that were initiated in 2018, namely Non-PPP guarantees and project development facilities.

At the same time, the support of information technology will also be very strategic. For this reason, the Company is committed to implement the IT Master Plan that has been prepared. The development of information technology is integrated with business processes to support the implementation of more efficient and effective Company operations and will be one of PT PII's main focuses in 2019.

With the strategy and observing the progress of performance in 2018, the business prospects of PT PII in 2019 will be more optimistic. Therefore, Management is committed to realizing the strategic plan established in 2018.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Company considers that the implementation of good corporate governance (GCG) is a manifestation of the commitment to improve business success and accountability. Long-term GCG implementation is expected to increase the value of the Company in the form of improved performance and the creation of a good corporate image.

Related to this and as an implementation of the Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015, at the beginning of 2018, PT PII with the assistance of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) completed an assessment on the implementation of GCG in 2018, with a score of 86.7, in the "Excellent" category.

In addition, in July 2018, the Company received the Monitoring Report on the Settlement of State Loss Results until the First Semester of 2018 from the State Audit Board (BPK) of the Republic of Indonesia, with the following results:

1. There were no state losses to the treasurer reported.



2. Tidak terdapat kerugian negara terhadap pegawai non bendahara yang dilaporkan.
3. Tidak terdapat kerugian negara terhadap pihak ketiga yang dilaporkan.

Perseroan juga berhasil memperoleh predikat Perusahaan Terpercaya dalam Corporate Governance Perception Index yang diterbitkan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance pada bulan Desember tahun 2018. PT PII dinilai berhasil menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang transparan dan akuntabel.

Selain itu PT PII juga berhasil memenangkan penghargaan ASEAN Risk Awards 2018 dengan kategori Public Initiatives. Melalui penghargaan ini PT PII dianggap sukses dalam menciptakan solusi kreatif dalam pelayanan kepentingan publik.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Kebijakan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PT PII memandang bahwa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*-CSR) merupakan bentuk kepedulian secara berkelanjutan terhadap lingkungan hidup, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kewajiban untuk menyediakan tempat yang nyaman dan hubungan kerja yang baik dengan karyawan, mengutamakan terjaganya kesehatan dan keselamatan kerja dan ikut serta mengembangkan ekonomi dan komunitas lokal.

Sepanjang tahun 2018, Perseroan telah merealisasikan anggaran kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sebesar Rp1,2 miliar yang disalurkan pada tempat utamanya dimana proyek-proyek dan lokasi usaha Perseroan berada. Implementasi program CSR mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor SK-003/BOD/CSC/0518 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Mengacu pada pedoman dimaksud, perencanaan program dan penyaluran anggaran dana CSR agar mempertimbangkan 3 prinsip dasar. Pertama, unsur kedekatan, yaitu program CSR dilaksanakan mendekati domisili Perusahaan maupun di sekitar wilayah Perusahaan melaksanakan aktivitas usahanya.

2. There were no state losses to non-treasurer employees reported.
3. There were no state losses to third parties reported.

The Company also succeeded in obtaining the title of Trusted Company in the Corporate Governance Perception Index issued by the Indonesian Institute for Corporate Governance in December 2018. PT PII was considered successful in implementing transparent and accountable good corporate governance principles.

In addition, PT PII also received the award in ASEAN Risk Awards 2018 in the Public Initiatives category. This award recognizes PT PII as successful in creating innovative solutions in serving the public interests.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Corporate Social Responsibility Policy

PT PII considers Corporate Social Responsibility (CSR) activities as a form of continuous concern for the environment, respect for human rights, obligation to provide a comfortable work place and good working relationships with employees, prioritizing occupational health and safety, as well as participating in the development of the economy and local community.

During 2018, the Company has realized a budget of Rp1.2 billion for corporate social responsibility activities, which are channelled to the main places where the Company's projects and business are located. The implementation of the CSR program refers to the Board of Directors Decision No. SK-003/BOD/CSC/0518 on the Guidelines for Corporate Social and Environmental Responsibility Implementation of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

With reference to the abovementioned guidelines, program planning and the distribution of CSR funds are to consider 3 basic principles. First, the element of proximity, that is, the CSR program is implemented close to the Company's domicile and in the vicinity of the Company's business activities.



Laporan Direksi

Report of The Board of Directors

Kedua, unsur keterikatan, yaitu Program CSR tersebut mendukung aktivitas bisnis Perusahaan, meningkatkan *brand awereness* dan sebagai upaya mitigasi risiko Perusahaan terhadap aktivitas bisnisnya yang memberi manfaat pada lingkungan dan sosial. Sedangkan ketiga adalah unsur manfaat, yaitu Program CSR dapat memberikan efek positif kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan Kegiatan

Di bidang lingkungan hidup, program-program yang direalisasikan antara lain adalah, mengurangi intensitas penggunaan kertas dengan memaksimalkan penggunaan *e-mail (soft copy)* dalam setiap bentuk komunikasi antar unit kerja di lingkungan Perseroan. Dengan program ini, diharapkan tercipta budaya *paperless* di lingkungan Perseroan.

Di bidang ketenagakerjaan, Perseroan telah menerapkan kesetaraan gender. Hal itu, antara lain tercermin dari komposisi karyawan. Dari 128 orang karyawan, 69 orang merupakan karyawan laki-laki, dan sebanyak 59 orang karyawan perempuan. Demografi karyawan berdasarkan gender tersebut menunjukkan bahwa sistem rekrutmen yang diselenggarakan telah menjunjung tinggi asas kesetaraan dan kesempatan kerja dengan tidak membedakan pria dan wanita.

Perseroan juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan termasuk hak untuk memperoleh promosi pengembangan karir, pendidikan dan hak-hak karyawan lainnya yang tercantum dalam perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pun dengan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan.

Di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan berkomitmen untuk melakukan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang difokuskan untuk mencapai tingkat kecelakaan nihil atau *zero accident*. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT PII mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Second, the element of engagement, that is, the CSR Program supports the Company's business activities, increase brand awareness, and as the Company's risk mitigation effort on its business activities that provide environmental and social benefits. The third is the element of benefit, that is, the CSR Program has positive impacts on the community and the stakeholders.

Implementation of Activities

In the environmental field, realized programs were, among others, reducing the intensity of paper use by maximizing the use of *e-mail (soft copy)* in any form of communication between work units within the Company. This program is expected to create a *paperless* culture within the Company.

In the employment field, the Company has applied gender equality. This is among others, reflected in the employee composition. Out of 128 employees, 69 were male employees, and 59 were female employees. The demographics of employee by gender demonstrates that the recruitment system implemented has upheld the principle of equality and employment opportunities without gender discrimination.

The Company also provides equal opportunities for all employees, including the right to obtain career development promotions, education, and other employee rights, as stated in the collective labor agreement document and the applicable laws and regulations. The same also applies in the implementation of training and development.

In the field of occupational health and safety, the Company is committed to manage occupational health and safety (K3), which is focused on achieving zero accident. The application of Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) at PT PII refers to the Minister of Manpower Regulation No. 5 of 1996 on the Occupational Health and Safety Management System that has been enhanced by Government Regulation No. 50 of 2012 on Occupational Health and Safety Management System (OHSMS).

Di bidang sosial kemasyarakatan, Perseroan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan CSR yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat. PII merealisasikan pengembangan sosial dan kemasyarakatan melalui pelaksanaan Program CSR yang berfokus pada 5 kegiatan, yakni bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan masyarakat, keagamaan dan bantuan korban bencana alam.

Sedangkan untuk tanggung jawab sosial terhadap konsumen, secara rutin PT PII melaksanakan survey kepada pemangku kepentingan, yaitu PJPK, Badan Usaha dan Instansi terkait untuk mengetahui masukan dalam perbaikan dan pelayanan pengelolaan hubungan. PT PII juga menyelenggarakan capacity building dan publikasi untuk meningkatkan awareness dan pemahaman masyarakat tentang bisnis PT PII.

In the field of social affairs, the Company provides particular attention to social and community development, which is manifested in various CSR activities related to the social culture of the community. PT PII realizes social and community development through the implementation of a CSR Program that focuses on 5 activity areas, namely in the area of education, economy, public health, religion, and assistance for victims of natural disasters.

As for social responsibility towards the consumers, PT PII regularly conduct surveys on the stakeholders, namely the CAs, Business Entities, and related Institutions/Agencies, to get input on improvement and services related relationship management. PT PII is also active in organizing capacity building and publication activities to improve the public awareness and understanding regarding the business of PT PII.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Per 31 Desember 2018, jumlah anggota Direksi PT PII adalah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur utama dan 2 (dua) Direktur. Seluruh anggota Direksi PT PII telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan. Masa jabatan anggota Direksi dalam 1 periode adalah 5 (lima) tahun.

Pada tahun 2018 tidak ada perubahan komposisi Direksi, sehingga komposisinya adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Nomor SK Decree Number
Armand Hermawan	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885/KMK.06/2017 Minister of Finance Decree Number 885/KMK.06/2017
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Director	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885/KMK.06/2017 Minister of Finance Decree Number 885/KMK.06/2017
Salusra Satria	Direktur Director	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885/KMK.06/2017 Minister of Finance Decree Number 885/KMK.06/2017

CHANGES TO THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

As of 31 December 2018, PT PII's Board of Directors consisted of 3 (three) people, namely 1 (one) President Director and 2 (two) Directors. All members of the Board of Directors of PT PII have passed the Fit and Proper Test and have obtained approval from the Ministry of Finance. The term of office of members of the Board of Directors for 1 period is 5 (five) years.

In 2018, there was no change in the composition of the Board of Directors, so the composition was as follows:



Laporan Direksi

Report of The Board of Directors

APRESIASI

Manajemen menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemegang Saham untuk mengelola PT PII. Begitu juga dengan Dewan Komisaris yang secara bersama-sama dengan manajemen ikut terlibat dalam pengelolaan Perseroan. Kepercayaan tersebut merupakan dukungan yang sangat berharga bagi manajemen dalam melakukan inovasi yang tak terbatas, sehingga kinerja usaha Perseroan tetap solid serta mampu memberikan dukungan maksimal kepada program pemerintah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

Pencapaian kinerja usaha yang baik ini, tentu tidak dapat dipisahkan pula dari peran maksimal jajaran manajemen dan karyawan. Semuanya, saling bahu-membahu dan bekerja keras melahirkan segala inovasi dengan dedikasi guna mewujudkan visi dan misi Perseroan.

Dukungan dari segenap pemangku kepentingan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian kinerja usaha Perseroan. Karena itulah, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan yang telah diberikan. Semoga kami dapat senantiasa terus berkarya dan berinovasi menyediakan solusi terbaik bagi Pemerintah untuk penyediaan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

APPRECIATION

The Management expresses its gratitude for the confidence provided by the Shareholder to manage PT PII. Likewise to the Board of Commissioners, who worked together with the Management in the management of the Company. This confidence is a valuable support for the management in carrying out innovations, allowing the performance of the Company to remain solid as well as able to provide maximum support to the government's programs, particularly in infrastructure development.

The encouraging business performance achievement cannot be separated from the maximum roles of the management and employees. All of these, through mutual cooperation and hard work were able to accomplish innovations with the dedication to realize the Company's vision and mission.

The support from all stakeholders is an integral part of the Company's business performance achievements. For this reason, we would like to express our highest appreciation for their support. We hope that we can continue to work and innovate to provide the best solution for the government to provide infrastructure that benefits the people of Indonesia.

Jakarta, Maret | March 2019

Armand Hermawan

Direktur Utama
President Director



M. Wahid Sutopo

Direktur Eksekutif Bisnis
Business Executive Director

Armand Hermawan

Direktur Utama
President Director

Salusra Satria

Direktur Eksekutif Keuangan dan
Penilaian Proyek
Finance and Project Assessment
Executive Director



Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018

Statement of Accountability for the 2018 Annual Report

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Jakarta, Maret 2019

DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners

Ayu Sukorini

Komisaris Utama
President Commissioner

M. Rahman Ritza

Komisaris
Commissioner

Mariatul Aini

Komisaris
Commissioner



Statement of Accountability of the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2018 Annual Report of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in the 2018 Annual Report of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) has been presented in full and shall be fully accountable for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Jakarta, March 2019

DIREKSI

Board of Directors

Armand Hermawan

Direktur Utama
President Director

M. Wahid Sutopo

Direktur Eksekutif Bisnis
Business Executive Director

Salusra Satria

Direktur Eksekutif Keuangan dan
Penilaian Proyek
Finance and Project Assessment
Executive Director

03

Profil Perusahaan Company Profile

56	Identitas Perusahaan Corporate Identity	84	Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi List of Subsidiaries and/or Associates
57	Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company	85	Struktur Grup Perusahaan Corporate Group Structure
60	Jejak Langkah Perusahaan Milestones	85	Kronologi Penerbitan Saham Chronology on Share Listing
66	Bidang Usaha Line of Business	85	Kronologi Penerbitan/Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Listing/ Issuance
68	Struktur Organisasi Organizational Structure	86	Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal Name and Address of Capital Market Supporting Institutions and/or Professions
70	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan The Company's Vision, Mission and Culture	87	Penghargaan dan/atau Sertifikasi Awards and/or Certifications
73	Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners	88	Peristiwa Penting Significant Events
76	Profil Direksi Profile of the Board of Directors	93	Informasi pada Website Perusahaan Information on the Company's Website
79	Profil Pejabat Eksekutif Profile of Executive Officers	94	Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal Competence Development Program for BoC, BoD, Committees, Corporate Secretary and Internal Audit Unit
80	Komposisi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi serta Biayanya Employee Composition and Competency Development and its Costs		
83	Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition		





Identitas Perusahaan

Corporate Identity



Nama Perusahaan | Company Name

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)



Nama Panggilan | Short Name

PT PII



Perubahan Nama | Name Change

Hingga berakhirnya tahun buku 2018, Perseroan tidak mengalami perubahan nama.
As of the end of fiscal year 2018, the Company made no changes to its legal entity name.



Bidang Usaha | Line of Business

Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur
Provision of Government Guarantees in Infrastructure



Tanggal Pendirian | Date of Establishment

30 Desember 2009
December 30th, 2009



Anggaran Dasar dan Perubahan

Articles of Association and Amendment

- Akta Pendirian oleh Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH. LLM No. 29 tanggal 30 Desember 2009.
Deed of Establishment by Notary Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH. LLM No. 29 dated 30 December 2009.
- Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah dengan Akta No. 38 tanggal 29 Juni 2018 oleh Notaris Zulkifli Harahap, S.H.
The Company's Articles of Association have been amended several times, with the last amendment by Deed Number 38 dated 29 June 2018 made before Notary Zulkifli Harahap, S.H.



Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Composition

100% milik Negara Republik Indonesia, dengan demikian PT PII:

- Tidak menerbitkan warkat saham
- Tidak memiliki kebijakan ESOP

100% owned by the Republic of Indonesia, thus:

- PT PII is not issuing any shares
- PT PII has no ESOP policy



Situs dan Email Perusahaan

The Company's Website and Email

www.ptpii.co.id & info@iigf.co.id



Status Perusahaan | Status of the Company

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
State Owned Enterprise (SOE/BUMN)



Modal Dasar | Authorized Capital

Rp9.000.000.000.000, terdiri dari 9.000.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per lembar saham
Rp9,000,000,000,000, made up of 9,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 per share



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Issued and Paid-up Capital
Rp8.000.000.000.000, terdiri dari 8.000.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per lembar saham
Rp.8,000,000,000,000, made up of 8,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 per share



Aset 2018

Assets in 2018

Rp 10.620.915.509



Alamat Kantor Pusat | Head Office Address

Capital Place, Lt 7 & 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710 - Indonesia
Telp. 021-5795 0550, Fax. 021-5795 0040
Capital Place, 7th and 8th floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710 - Indonesia
Phone 021-5795 0550, Fax. 021-5795 0040



Website Perusahaan

Corporate Website

www.ptpii.co.id



Menu Website Perusahaan

Corporate Website Menu

Berisikan antara lain:

- Profil Perusahaan
- Profil Dewan Komisaris dan Direksi
- Model Bisnis dan Layanan Perusahaan
- Struktur Pemegang Saham
- Laporan Tahunan 5 Tahun Terakhir
- Dokumen *Good Corporate Governance*

The website discloses among others:

- Company profile
- Profile of the Board of Commissioners and Directors
- Business Model and Company Services
- Shareholding Structure
- Annual Report for the past 5 years
- Good Corporate Governance documents



Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company



Mulai tahun 2018, mandat PT PII semakin luas, karena dapat menjamin proyek non-KPBU. Perseroan juga dapat melakukan pendampingan proyek sebagai bagian dari tambahan mandat tersebut.

Starting in 2018, PT PII has a greater mandate, because it can guarantee non-PPP projects. The Company can also carry out project assistance as part of the additional mandate.

Meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah keterbatasan anggaran Pemerintah, mendorong partisipasi swasta dalam pengembangan infrastruktur nasional melalui dukungan kebijakan, instrumen dan kerangka fiskal pemerintah.

The increasingly needed requirement for national infrastructure development to support Indonesia's economic growth amid the Government's budget constraint has encouraged private sector participation in national infrastructure development through support in government policy, instruments and the fiscal framework.



Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company

Sebagai bentuk dukungan tersebut, pada tanggal 30 Desember 2009, Pemerintah Indonesia telah membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Kementerian Keuangan. Pada awal pendiriannya, PT PII hanya bertugas untuk memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

PT PII juga bekerjasama dengan lembaga multilateral internasional untuk meningkatkan kapasitas penjaminan untuk menjamin proyek-proyek infrastruktur nasional berskala besar. Sebagai dasar pelaksanaan KPBU, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur. Penerapan KPBU dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu, serta menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.

Penjaminan infrastruktur sebagai bentuk dukungan fiskal dari Kementerian Keuangan, dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada swasta terkait komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam perjanjian KPBU.

Kehadiran PT PII diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas, transparansi serta konsistensi dalam pemberian jaminan dan pemrosesan klaim, guna meningkatkan kepercayaan investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, namun dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah.

As a form of support, on December 30, 2009 the Government of Indonesia established Indonesia Infrastructure Guarantee Fund or PT PII, as a State-Owned Enterprise (SOE/BUMN) under the Ministry of Finance. At the beginning of its establishment, PT PII was only assigned to provide guarantees for government infrastructure projects developed under the scheme of *Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha* (KPBU).

PT PII also collaborates with international multilateral institutions to increase the capacity to guarantee for large-scale national infrastructure projects. As a basis for implementing KPBU, the Government has issued Presidential Regulation No. 38 of 2015 concerning Government Cooperation with Business Entities in Infrastructure Provision (KPBU). KPBU is designed to meet the financing needs on an ongoing basis for the purpose of providing infrastructure through the deployment of private funds, the provision of quality, effective, efficient, targeted and timely infrastructure, and the creation of an investment climate that encourages the participation of business entities in providing infrastructure based on sound business principles.

Infrastructure guarantee which serves as fiscal support from the Ministry of Finance, is intended to provide assurance to the private sector regarding the commitment of the *Penanggung Jawab Proyek Kerjasama* (PJPK) in meeting its financial liabilities in the KPBU agreement.

PT PII existence is expected to manifest the accountability, transparency and consistency in providing guarantees and processing claims, in order to improve investor confidence in participating in infrastructure projects in Indonesia, yet still maintaining the interests of the Government, particularly those related to contingent liabilities that may arise for the Government.



Untuk menjalankan fungsi penjaminan sebagai bidang usaha utama, hingga saat ini, Pemerintah telah melakukan penyertaan modal dari APBN ke PT PII sebesar Rp8 triliun. PT PII secara bertahap akan mengurangi ketergantungan pada APBN dan akan meningkatkan kapasitas penjaminannya melalui kerja sama dengan berbagai institusi keuangan, baik institusi multilateral (Bank Dunia, ADB, IDB, MIGA), institusi bilateral, dan lainnya.

Sejak tahun 2018, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009, PT PII mendapatkan perluasan mandat untuk dapat memberikan penjaminan atas proyek Non KPBU. Perluasan mandat tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur.

Selain itu, pada tahun 2018 PT PII juga mendapatkan penugasan dari Kementerian Keuangan dalam melakukan pendampingan atas penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan tidak lagi terbatas pada penjaminan, tetapi juga melakukan pendampingan, baik dari tahap penyiapan hingga pelaksanaan transaksi.

To engage in the guarantee activities as its core business, to date, the Government has made investment taken from State Budget in PT PII amounting to Rp8 trillion. PT PII will gradually reduce its dependence on State Budget and will increase its guarantee capacity through cooperation with various financial institutions, both multilateral institutions (World Bank, ADB, IDB, MIGA), bilateral institutions, and others.

Since 2018, based on Government Regulation No. 50 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation No. 35 of 2009, PT PII mandate has been expanded to provide guarantees for Non-KPBU projects. The expansion of the mandate was followed up with the issuance of Ministry of Finance Regulation No. 101 of 2018 concerning Procedures for Providing and Implementing Government Guarantees with or through Infrastructure Guarantee Entities against the Risk of Default arising from Loans Made and/or Bonds Issued by State-Owned Enterprises for Infrastructure Financing Purpose.

In addition, in 2018 PT PII has also been mandated by Ministry of Finance to assist in the preparation and implementation of infrastructure project transactions under KPBU scheme. Thus, the scope of the Company's business activities is no longer limited to providing guarantees, but also providing guidance, starting from the preparation stage to the transaction stage.



Jejak Langkah Perusahaan

Milestones

2009



Pembentukan PT PII

Pada tanggal 30 Desember 2009, Pemerintah Indonesia mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia sebesar Rp1 triliun sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

Establishment of PT PII

On December 30, 2009, the Government of Indonesia established PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) as a State-Owned Enterprise (SOE/BUMN) through Republic of Indonesia Investment amounting to Rp1 trillion in accordance with Government Regulation No. 35 of 2009 concerning State Investment for the Establishment of a Company Engaged in Infrastructure Guarantee.

2010



Peresmian Operasional PT PII

Pada tanggal 11 Mei 2010, PT PII secara resmi mulai beroperasi sesuai mandatnya untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur berskema KPBU sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Official Commencement of PT PII Operations

On May 11, 2010, PT PII officially commenced its operation based on its mandate to provide guarantees for infrastructure projects under KPBU schemes as one of the efforts to accelerate infrastructure development in Indonesia.

Perpres No. 78/2010 dan PMK 260/2010

Terbitnya Perpres No. 78/2010 tgl 21 Desember 2010 dan PMK No. 260/2010 tanggal 31 Desember 2010 menjadi Pedoman PT PII selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) untuk menjamin proyek infrastruktur.

Presidential Regulation No. 78/2010 and PMK 260/2010

Issuance of Presidential Regulation No. 78/2010 December 21, 2010 and PMK No. 260/2010 dated December 31, 2010 which serves as a guideline for PT PII as BUPI to provide guarantee for infrastructure projects.

Penambahan Modal Disetor

Pada akhir Desember 2010, Pemerintah RI menambah PMN di PT PII sebesar Rp1 triliun merujuk pada PP No. 88/2010 sehingga total PMN Perusahaan menjadi Rp2 triliun.

Additional Paid-in Capital

At the end of December 2010, the Government of Indonesia made additional investment amounting to Rp1 trillion in PT PII with due observance to PP No. 88/2010 resulting to total state investment in the Company amounting to Rp2 trillion.



2011



Acuan Alokasi Risiko

Maret 2011, PT PII menerbitkan dokumen Acuan Alokasi Risiko yang berisi kategori dan distribusi risiko infrastruktur yang akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam skema KPBU untuk proyek infrastruktur.

Penandatanganan Penjaminan Proyek PLTU Jawa Tengah

Tanggal 6 Oktober 2011, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah 2 x 1.000 MW dengan nilai investasi +/- US \$4 miliar.

Penambahan Modal Disetor

Pada akhir Desember 2011, Pemerintah RI menambah PMN di PT PII sebesar Rp1,5 triliun merujuk pada PP No. 55/2011 sehingga total PMN Perusahaan menjadi Rp3,5 triliun.

Risk Allocation Reference

In March 2011, PT PII issued Risk Allocation Reference document which defines the category and distribution of infrastructure risks which would serve as a reference for parties involved in KPBU schemes for infrastructure projects.

Signing of Guarantee Agreement of Central Java Power Plant

On October 6, 2011, PT PII signed a Guarantee Agreement for the 2 x 1,000 MW Central Java Power Plant project with an investment of +/- US \$ 4 billion.

Additional Paid-in Capital

At the end of December 2011, the Government of Indonesia made additional investment amounting to Rp1.5 trillion in PT PII with due observance to PP No. 55/2011 resulting to total state investment in the Company amounting to Rp3.5 trillion.

2012



Penambahan Modal Disetor

Perusahaan telah menerima PMN sebesar Rp1 triliun pada tanggal 17 Desember 2012 sehingga total kapasitas penjaminan PT PII menjadi Rp4,5 triliun.

Dukungan Pinjaman Bank Dunia

Stand-by loan facility dari World Bank efektif pada tanggal 19 November 2012 sejumlah US\$29,6 juta untuk mendukung kapasitas penjaminan PT PII.

Additional Paid-in Capital

The Company has received Rp1 trillion in the form of State Investment on December 17, 2012, resulting to a total of Rp4.5 trillion in PT PII guarantee capacity.

World Bank Loan

Stand-by loan facility from World Bank effective November 19, 2012 totaling US\$29.6 million to support guarantee of PT PII.

2013



Peringkat Kredit PT PII Mencapai BBB oleh Fitch Ratings

PT PII memperoleh peringkat kredit BBB dari Fitch Ratings sebagai kredibilitas tambahan bagi PT PII di mata investor dan kreditor.

PT PII Rated BBB by Fitch Ratings

PT PII obtained a BBB credit rating from Fitch Ratings which serves as additional point of credibility for PT PII in the eyes of investors and creditors.



Jejak Langkah Perusahaan Milestones

2014



Penerbitan Surat Dukungan PT PII untuk Penjaminan Proyek SPAM Umbulan Jawa Timur

PT PII menerbitkan Surat Dukungan (*Letter of Intent*) atas penjaminan proyek SPAM Umbulan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK).

Penerbitan Buku Optimisme KPBUI

PT PII meluncurkan Buku Optimisme KPBUI di Indonesia yang membahas mengenai infrastruktur di Indonesia, implementasi KPBUI dan peranan PT PII di dalam pembangunan infrastruktur.

Kerja sama dengan Universitas Sriwijaya dan Hasanuddin

PT PII melalui IIGF Institute menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Sriwijaya (18 Agustus 2014) dan Universitas Hasanuddin (17 Oktober 2014) untuk kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, peningkatan kapasitas serta kemitraan dalam bina lingkungan, sosial dan masyarakat.

Issuance of Letter of Intent for Guarantee of Umbulan Water Project East Java

PT PII issued a Letter of Intent to guarantee Umbulan SPAM project to East Java Provincial Government as the *Penanggung Jawab Proyek Kerjasama* (PJPK).

Launching of Optimism for PPP in Indonesia

PT PII launched PPP Book of Optimism in Indonesia which discusses infrastructure in Indonesia, the implementation of PPP and the role of PT PII in infrastructure development.

Cooperation with the University Sriwijaya and Hasanuddin

PT PII through IIGF Institute entered into a Memorandum of Understanding with Sriwijaya University (August 18, 2014) and Hasanuddin University (October 17, 2014) for cooperation in education, research, community service, capacity building and partnerships in community, social and community development.

2015



Terbitnya Perpres No. 38/2015

Terbitnya Perpres No. 38/2015 tentang Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur memperluas sektor proyek infrastruktur berskema KPBUI yang dapat dijamin PT PII menjadi 19 sektor termasuk sektor infrastruktur sosial.

Construction Kick Off PLTU Jawa Tengah (CJPP)

Pada tanggal 28 Agustus 2015 telah dilakukan *Construction Kick Off* Proyek PLTU Jawa Tengah yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Proyek ini merupakan proyek KPBUI pertama di Indonesia yang mendapatkan penjaminan PT PII.

Penerbitan Pernyataan Kesediaan Penjaminan untuk Proyek Palapa Ring

PT PII menerbitkan Pernyataan Kesediaan Penjaminan/*In Principle Approval* (IPA) untuk proyek telekomunikasi Palapa Ring yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo pada 20 November 2015.

Pembentukan UNIID

PT PII melalui IIGF Institute memfasilitasi pembentukan University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID) pada 16 Desember 2015 beranggotakan Universitas Nasional untuk berpartisipasi mendorong pengembangan infrastruktur nasional.

Peluncuran Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII)

Tanggal 17 Desember 2015, PT PII bersama para ahli di bidang infrastruktur meresmikan "Masyarakat Infrastruktur Indonesia/MII" sebagai suatu lembaga profesional untuk membahas berbagai hal terkait infrastruktur di Indonesia.

Issuance of Presidential Regulation No. 38/2015

The issuance of Presidential Regulation No. 38/2015 concerning Government Cooperation with Business Entities in Infrastructure has expanded 19 sectors of KPBUI infrastructure project sector that PT PII can provide guarantee for, including social infrastructure sector.

Construction Kick Off Central Java PLTU (CJPP)

On August 28, 2015, Central Java PLTU Construction Kick Off Project was held, attended by President Republic of Indonesia Joko Widodo. The project is the first PPP project in Indonesia to receive PT PII guarantee.

Issuance of In Principle Approval for Palapa Ring Project

PT PII issued In Principle Approval (IPA) of Guarantee for Palapa Ring telecommunications project developed by the Ministry of Communication and Information on November 20, 2015.

Establishment of UNIID

PT PII through IIGF Institute facilitated the establishment of the University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID) on 16 December 2015 comprising National Universities to participate in encouraging the development of national infrastructure.

Launch of Indonesian Infrastructure Society (MII)

On December 17, 2015, PT PII together with experts in infrastructure launched the "Indonesian Infrastructure Society/MII" as a professional institution to discuss various matters related to infrastructure in Indonesia.



2016



Penandatanganan Perjanjian Penjaminan untuk 4 Jalan Tol

PT PII di tahun 2016 telah menandatangani perjanjian penjaminan sebanyak 4 proyek di Sektor Jalan Tol (Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang, Manado-Bitung).

Financial Close PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW

Pada tanggal 6 Juni 2016, telah dicapai tahap *financial close* untuk proyek PLTU Batang Jawa Tengah berkapasitas 2 x 1.000 MW dengan nilai investasi sekitar US\$4 miliar (~Rp52 triliun). Proyek ini telah mendapatkan penjaminan pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama dengan PT PII.

Penandatanganan MoU dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

PT PII menandatangani kesepakatan bersama dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada tanggal 2 Agustus 2016 untuk saling bersinergi dalam memberikan pendampingan hukum demi mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan

PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Meta Adhya Tirta dan Perjanjian Regres dengan Gubernur Jawa Timur untuk Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Proyek ini merupakan proyek air dan proyek daerah pertama yang diberikan penjaminan pemerintah melalui PT PII.

Financial Close Proyek Palapa Ring Barat

Pada tanggal 25 Juli 2016, telah dilaksanakan *financial close* proyek Palapa Ring Barat yang merupakan proyek KPBU pertama dengan skema pembayaran *Availability Payment* (AP) dan memperoleh penjaminan PT PII.

Financial Close Proyek Palapa Ring Tengah

Pada tanggal 29 September 2016, telah dilaksanakan *financial close* proyek Palapa Ring Tengah yang memperoleh penjaminan pemerintah melalui PT PII.

Perluasan Mandat PT PII

Terbitnya PP No.50 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur memperluas mandat PT PII untuk dapat pula menjamin proyek-proyek infrastruktur di luar proyek KPBU.

Signing of Guarantee Agreement for 4 Toll Road Projects

PT PII in 2016 has signed the guarantee agreement for 4 Toll Road projects (Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang, Manado-Bitung).

Financial Close of Central Java 2 x 1,000 MW PLTU

On June 6, 2016, the 2 x 1,000 MW Central Java Power Plant project reached the financial close stage with an investment of approximately US\$4 billion (~ Rp52 trillion). The project has received government guarantees through the Ministry of Finance together with PT PII.

Signing of MoU with the Deputy Attorney for Civil and State Administration

PT PII entered into an agreement with the Deputy Attorney for Civil and State Administration (Jamdatun) on 2 August 2016 to create a synergy in providing legal assistance to accelerate infrastructure development in Indonesia.

Signing of Guarantee Agreement

PT PII has signed Guarantee Agreement with PT Meta Adhya Tirta and Regres Agreement with Governor of East Java for Umbulan Water Supply System Project (SPAM). This project was the first water project and the first local project provided with government guarantee through the Company.

Financial Close of West Palapa Ring Project

On July 25, 2016, West Palapa Ring project reached the financial close stage, which was the first PPP project with the Availability Payment (AP) scheme and PT PII guarantee.

Financial Close of the Middle Palapa Ring Project

On September 29, 2016, Middle Palapa Ring project reached the financial close stage which received government guarantees through PT PII.

Expansion of PT PII's Mandate

Issuance of PP No. 50 of 2016 represents an amendment to Government Regulation No. 35 of 2009 concerning the State Investment in the Establishment of a Limited Liability Company in Infrastructure Guarantee to expand PT PII's mandate to provide guarantee for infrastructure projects outside KPBU project.



Jejak Langkah Perusahaan

Milestones

2017



Penambahan Modal Disetor

Pada tahun 2017, pemerintah menambah modal disetor kepada PT PII sebesar Rp1 triliun untuk meningkatkan kapasitas penjaminan PT PII.

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan

Sepanjang tahun 2017 PT PII menandatangani perjanjian penjaminan sejumlah 6 proyek Jalan Tol (1). Cileunyi-Sumedang-Dawuan (2). Serang-Panimbang (3). Jakarta-Cikampek II Elevated (4). Krian-Legundi-Bunder-Manyar. Keempatnya ditandatangani pada tanggal 22 Februari 2017, dan 2 Proyek Tol lainnya yang ditandatangani pada bulan Desember 2017 yaitu (5). Probolinggo-Banyuwangi dan (6). Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan.

ASEAN Risk Award

PT PII memenangkan ASEAN Risk Award – Public Initiative Category yang diselenggarakan oleh CRMS.

Penilaian Penerapan GCG

Pelaksanaan Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) tahun 2016 oleh BPKP dengan nilai Baik.

Penghargaan BUMN Terbaik

PT PII mendapat penghargaan BUMN terbaik di bawah Kementerian Keuangan dari Majalah Investor.

Additional Paid-In Capital

In 2017, the Government conducted an additional paid-in capital injection of Rp1 trillion to increase PT PII future guarantee capacity.

Signing of Guarantee Agreement

During 2017, PT PII signed the guarantee agreements for 6 tollroad project, including (1). Cileunyi-Sumedang-Dawuan (2). Serang-Panimbang (3). Jakarta-Cikampek II Elevated (4). Krian-Legundi-Bunder-Manyar. The agreements for these four projects were signed on 22 February 2017, while another two tollroad projects were signed in December 2017, namely (5). Probolinggo-Banyuwangi, and (6). Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan.

ASEAN Risk Award

PT PII was recognized as Winner ASEAN Risk Award – Public Initiative Category in an event organized by CRMS.

Assessment of GCG Implementation

Assessment of GCG Implementation for 2016 conducted by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) with Good Assessment.

Best SOE Award

PT PII was recognized as Best SOE under the Ministry of Finance from Investor Magazine.



2018

Penandatanganan Penjaminan Proyek SPAM Bandar Lampung

PT PII menandatangani penjaminan proyek yang pertama di tahun 2018, yaitu untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung.

Proyek Palapa Ring Resmi Beroperasi

Proyek Palapa Ring Barat yang merupakan proyek pertama yang pembiayaannya menggunakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) telah selesai dan resmi beroperasi.

Penandatanganan Penugasan PDF dari Kementerian Keuangan Kepada PT PII

PT PII mendapatkan penugasan dari Kementerian Keuangan untuk melaksanakan fasilitas dalam rangka Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBU, 1) Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan, 2) Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan, 3) Jalan Lintas Timur Riau yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR, dan 4) Rumah Sakit Kanker Dharmais yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.

Penghargaan Penerapan GCG

PT PII meraih penghargaan Indonesia Most Trusted Companies pada Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2018.

Signing of Guarantee for Bandar Lampung Drinking Water Supply System Project

PT PII signed the first guarantee project in 2018, namely the Bandar Lampung Drinking Water Supply System project.

Palapa Ring Project Officially in Operations

The Palapa Ring West project, the first project to be funded using the PPP scheme, was completed and officially in operations.

Signing of PDF Assignment from the Ministry of Finance to PT PII

PT PII received an assignment from the Ministry of Finance to provide Project Preparation and Transaction Advisory facilities related to the PPP Project of 1) Makassar-Parepare Public Railway to be developed by the Ministry of Transportation, 2) South Sumatera East Link, 3) Riau East Link, developed by the Ministry of Public Works and Public Housing, and 4) Dharmais Cancer Hospital developed by the Ministry of Health.

Award for GCG Implementation

PT PII was awarded as Indonesia Most Trusted Companies in the 2018 Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award.



Bidang Usaha

Line of Business



KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR

Sesuai Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk memberikan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan:

1. Pemberian penjaminan terhadap kewajiban finansial Pemerintah dalam perjanjian kerja sama Pemerintah dan badan usaha dalam proyek-proyek infrastruktur yang mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan kewajiban kontinjensi Pemerintah dan meningkatkan kelayakan kredit (*credit worthiness*) proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha di bidang infrastruktur.
2. Pemberian penjaminan terhadap kewajiban pembayaran Badan Usaha Milik Negara dan/atau afiliasinya terkait penyediaan infrastruktur, yang timbul sebagai akibat dari:

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with the Articles of Association, the vision and mission of the Company is to provide Government guarantees in infrastructure sector. To achieve those mentioned above, the Company can perform the following:

1. Provision of guarantees for Government financial liabilities related to Government and business entity cooperation agreements in infrastructure projects to create accountability in managing Government contingent liabilities and improving credit worthiness in Government cooperation projects with business entities in the infrastructure sector.
2. Provision of guarantees for the payment of liabilities of State-Owned Enterprises and/or affiliates related to the provision of infrastructure, which arise from:



- a. Pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan;
- b. Penerbitan obligasi dan/atau instrumen keuangan lainnya;
3. Pemberian penjaminan terhadap kewajiban finansial dari pihak lain, selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan b dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberian dukungan fasilitasi penyiapan proyek infrastruktur, penilaian kelayakan, dan pemantauan risiko serta hal-hal lain terkait penyediaan penjaminan Pemerintah.
5. Kerjasama dengan pihak lain termasuk lembaga keuangan multilateral dalam rangka pelaksanaan pemberian penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, huruf b, dan huruf c dalam Pasal ini.
6. Usaha patungan atau penyertaan modal pada badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sejenis dengan maksud dan tujuan Perseroan.
7. Pemberian jasa konsultasi dan penyediaan informasi untuk meningkatkan kualitas alokasi risiko dan struktur pembiayaan proyek dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
8. Kegiatan lainnya untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Bidang Usaha yang dijalankan oleh PT PII adalah sesuai dengan Bidang Usaha yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Produk/Jasa yang Dihasilkan

Penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur untuk proyek kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan untuk pinjaman dan penerbitan obligasi BUMN (Non-KPBU), serta penyiapan proyek dan pendampingan transaksi.

- a. Loan agreements with financial institutions;
- b. Issuance of bonds and/or other financial instruments;
3. Provision of guarantees for financial liabilities to other parties, in addition to those being referred to in paragraph 2 point a and b which can be conducted in accordance with the rules and regulations.
4. Provision of facilitation support for the preparation of infrastructure projects, feasibility assessments and risk monitoring and other matters related to the provision of Government guarantees.
5. Collaboration with other parties including multilateral financial institutions for the delivery of the guarantee as referred to in paragraph 2 letter a, letter b, and letter c in this Article.
6. Joint ventures or investment in other legal entities whose vision and mission are similar to the Company's vision and mission.
7. Provision of consulting services and information to improve the quality of risk allocation and project financing structures in order to achieve the Company's vision and mission.
8. Other activities to achieve the Company's vision and mission in accordance with rules and regulations.

Business Activities being Engaged in

Business Activities in which PT PII is engaged are in accordance with those set forth in the Articles of Association.

Products/Services Provided

Government guarantee in infrastructure development for Public Private Partnership (KPBU) and for SOE loan and bond issued (Non-PPP) projects, as well as assistance in project preparation and transaction advisory.

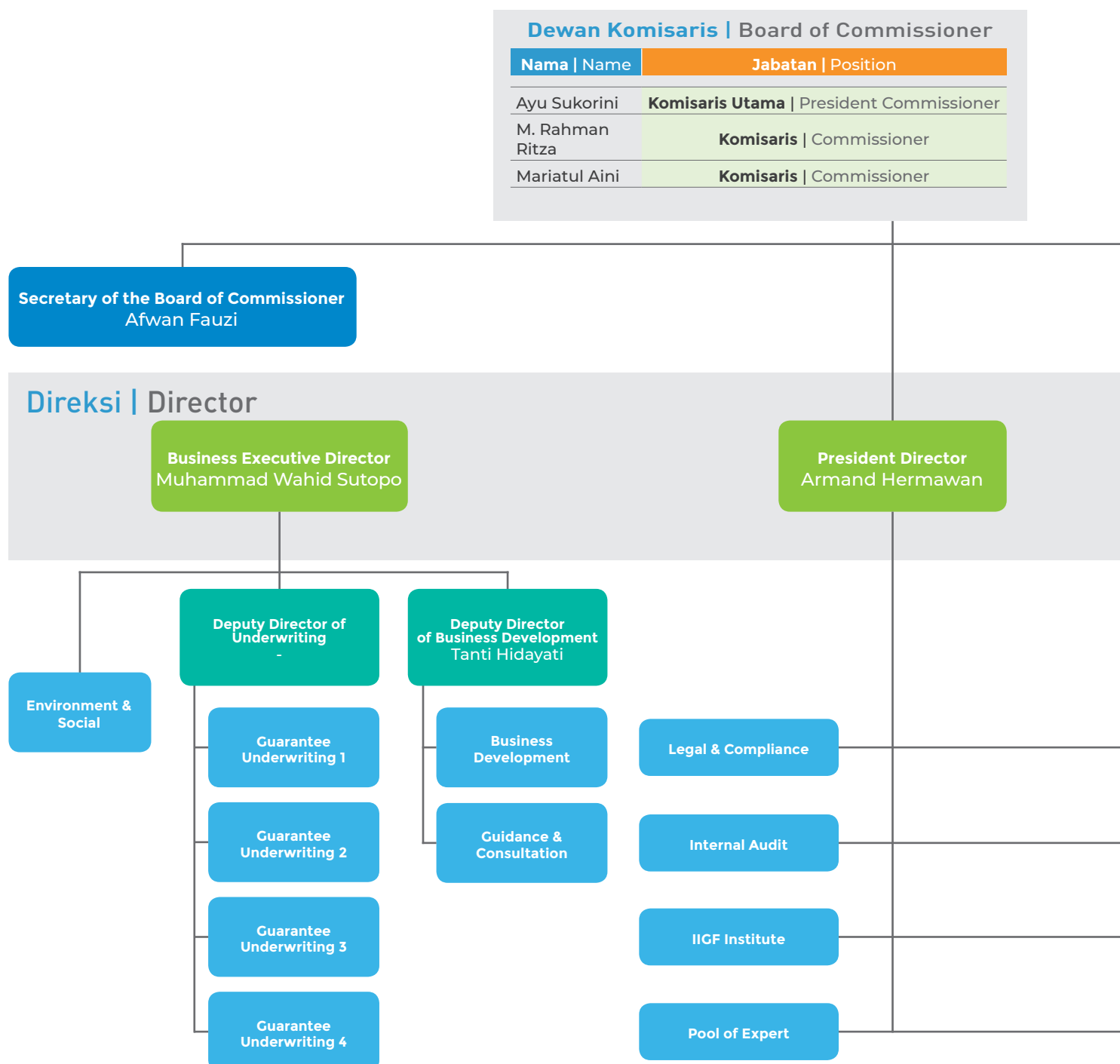


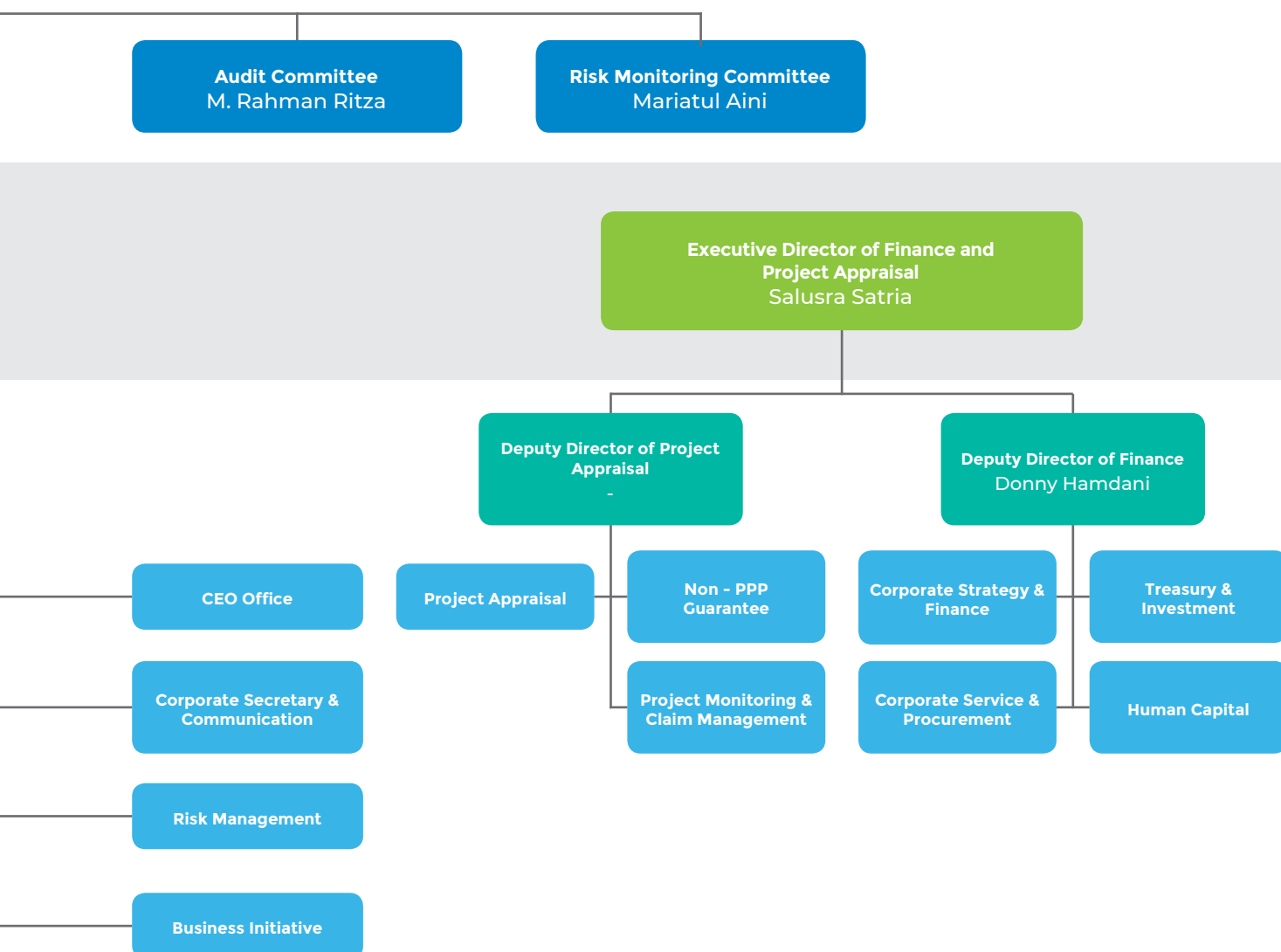
Struktur Organisasi

Organizational Structure

Struktur organisasi PT PII pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

The organizational structure of PT PII in 2018 is as follows:





A photograph of a water treatment plant at sunset. Large blue pipes and metal structures are visible against a sky with orange and yellow clouds. In the background, a city skyline with a tall building is visible.

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

The Company's Vision, Mission, and Culture

Visi

Vision

Menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Become an active main driver of SOE in accelerating a sustainable infrastructure development for improving the living quality of the Indonesian people.



Misi

Mission

Memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur yang:

- **Memiliki dampak kemanfaatan yang paling besar kepada masyarakat Indonesia.**
- **Melindungi kepentingan Pemerintah dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur melalui proses yang transparan dan akuntabel.**
- **Meningkatkan kepercayaan dari pihak investor dengan memberikan kenyamanan berinvestasi dan kepastian pembayaran atas klaim risiko kerugian suatu proyek infrastruktur yang dikerjasamakan.**

Ensure the acceleration of a sustainable infrastructure development by providing guarantee and added value for infrastructure development which:

- **Has the highest beneficial impact for the Indonesian people.**
- **Protects the Government's interest in fulfilling infrastructure development needs through a transparent and accountable process.**
- **Increase the trust of investors by providing investing convenience as well as payment assurance of risk claim on the loss suffered in infrastructure project partnership.**

Pengesahan Visi dan Misi

Visi dan Misi PT PII telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rencana Jangka Panjang Perusahaan periode 2018-2022 pada tanggal 27 Desember 2017.

Ratification of Vision and Mission

PT PII's vision and mission have been determined at the General Meeting of Shareholders (GMS). Company Long Term Plan for the period 2018-2022 on December 27, 2017.



Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan The Company's Vision, Mission and Culture

BUDAYA PERUSAHAAN

PT PII meyakini pentingnya pemahaman dan keseragaman prinsip yang harus dianut oleh seluruh karyawan demi terwujudnya suatu hubungan yang solid dan terciptanya lingkungan pekerjaan yang nyaman. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Perusahaan senantiasa memegang teguh tata nilai budaya "In Time", yakni Integrity, Team Work, Think Big, Mutual Trust, dan Excellence.

Integrity

- ✓ Menjaga komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas
- ✓ Taat terhadap aturan Perusahaan
- ✓ Bertanggung jawab atas setiap perbuatan, perkataan dan keputusan

Team Work

- ✓ Memberikan kontribusi keterampilan dan pengetahuan
- ✓ Mengutamakan kepentingan tim untuk mencapai tujuan Perusahaan

Think Big

- ✓ Memiliki pemikiran luas dan mutakhir
- ✓ Senantiasa meningkatkan pengetahuan, terbuka terhadap perkembangan

Mutual Trust

- ✓ Pemenuhan standar layanan yang ada
- ✓ Saling percaya dan saling hormati

Excellence

- ✓ Memberikan yang terbaik dalam melaksanakan semua tugas
- ✓ Berupaya untuk melakukan perbaikan berkesinambungan

CORPORATE CULTURE

PT PII believes in the importance of understanding and uniformity of principles that all employees must hold in order to create a solid relationship and a comfortable work environment. For this reason, the Company always holds the cultural values of "In Time", which stands for Integrity, Team Work, Think Big, Mutual Trust, and Excellence.

Integrity

- ✓ Maintain high commitment in performing tasks
- ✓ Comply with Company rules
- ✓ Be responsible for every action, word and decision

Team Work

- ✓ Contribute skills and knowledge
- ✓ Prioritize the interests of the team to achieve the Company's goals

Think Big

- ✓ Possess broad and up-to-date thinking
- ✓ Always improve knowledge, be open to development

Mutual Trust

- ✓ Comply with existing service standards
- ✓ Trust each other and respect each other

Excellence

- ✓ Give the best in performing all tasks
- ✓ Try to make continuous improvements

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners



Ayu Sukorini

Komisaris Utama

President Commissioner

51 tahun, Warga Negara Indonesia

51 years old, Indonesian Citizen

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Sarjana Ekonomi, Universitas Satya Wacana, Salatiga (1990)
- Master of Arts (MA) dalam bidang ekonomi dari Universitas Colorado, Denver, Amerika Serikat (1998)
- Bachelor degree in Economics, University of Satya Wacana, Salatiga (1990)
- Master of Arts (MA) in Economics from University of Colorado, Denver, United States (1998)

Riwayat Jabatan Career Background

- Dasar Hukum Pengangkatan Pertama kali menjabat sebagai Komisaris pada 2009 dengan dasar penunjukan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.06/2009 tentang Pengangkatan Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
- Kemudian diangkat kembali pada 29 Mei 2017 sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 402/KMK.06/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
- Appointment Letter First served as Commissioner in 2009 based on the appointment letter from Ministry of Finance No. 522/KMK.06/2009 concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
- Then reappointed on 29 May 2017 as President Commissioner based on the Decision Letter of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 402/KMK.06/2017 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Pengalaman Kerja Work Experience

- Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017-sekarang)
- Direktur Pinjaman dan Hibah di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015-2017).
- Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jendral Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012-2015)
- Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2009-2017)
- Direktur Strategi dan Portfolio Utang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2008-2012)
- Head of the Center of Financial Sector Policy, Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2017-present)
- Director of Loans and Grants at the Directorate General of Financing and Risk Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2015-2017).
- Director of Loans and Grants, Directorate General of Debt Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2012-2015)
- Commissioner of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2009-2017)
- Director of Strategy and Debt Portfolio, Directorate General of Debt Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2008-2012)

Rangkap Jabatan Dual Position

Penjelasan disampaikan pada bagian GCG

Disclosure is available under GCG section

Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship

Penjelasan disampaikan pada bagian GCG

Disclosure is available under GCG section

Pendidikan/Pelatihan Education/Training

Informasi tentang pendidikan/pelatihan disajikan pada bagian tersendiri di bab ini

Information pertaining to Education/Training is presented under separate section in this chapter



Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners



M. Rahman Ritza

Komisaris
Commissioner

59 tahun, Warga Negara Indonesia
59 years old, Indonesian Citizen

Riwayat Pendidikan

Educational Background

- Sarjana Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1985)
- Magister Jurusan Business Administration, Drake University (1993)
- Bachelor degree in Accounting, University of Padjadjaran (1985)
- Magister in Business Administration, Drake University (1993)

Riwayat Jabatan

Career Background

- Dasar Hukum Pengangkatan Pertama kali menjabat sebagai Komisaris pada 29 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 402/KMK.06/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
- Appointment Letter First served as Commissioner on May 29, 2017 based on the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 402/KMK.06/2017 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Pengalaman Kerja

Work Experience

- Inspektur Bidang Investigasi, Kementerian Keuangan (2011-sekarang)
- Inspektur VII, Kementerian Keuangan (2008-2011)
- Inspektur Bidang VI, Kementerian Keuangan (2007-2008)
- Inspector in Investigation, Ministry of Finance (2011-present)
- Inspector VII, Ministry of Finance (2008-2011)
- Inspector in Area VI, Ministry of Finance (2007-2008)

Rangkap Jabatan

Dual Position

Penjelasan disampaikan pada bagian GCG

Disclosure is available under GCG section

Hubungan Afiliasi

Affiliated Relationship

Penjelasan disampaikan pada bagian GCG

Disclosure is available under GCG section

Pendidikan/Pelatihan

Education/Training

Informasi tentang pendidikan/pelatihan disajikan pada bagian tersendiri di bab ini

Information pertaining to Education/Training is presented under separate section in this chapter



Mariatul Aini

Komisaris
Commissioner

55 tahun, Warga Negara Indonesia
55 years old, Indonesian Citizen

Riwayat Pendidikan Educational Background	- Insinyur di bidang Ilmu Tanah Institut Pertanian Bogor (1987) - Master of Business Administration The University of Wisconsin, Amerika Serikat (1994)	- Engineer in Agronomy, Institut Pertanian Bogor (1987) - Master of Business Administration from The University of Wisconsin, United States (1994)
Riwayat Jabatan Career Background	Dasar Hukum Pengangkatan Pertama kali menjabat sebagai Komisaris pada 21 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 861/KMK.06/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.	Appointment Letter First served as Commissioner on December 21, 2018 based on Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 861/KMK.06/2018 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
Pengalaman Kerja Work Experience	- Sekretaris Ditjen Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (2018-sekarang) - Komisaris pada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2017-2018) - Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (2016-2018) - Sekretaris Ditjen Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (2014-2016) - Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (2011-2014) - Komite Remunerasi PT Pertamina Gas (2009 – 2011)	- Secretary of the Directorate General of Budget, Directorate General of Budget, Ministry of Finance (2018-present) - Commissioner in PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2017-2018) - Director of Non-Tax State Revenue, Directorate General of Budget, Ministry of Finance (2016-2018) - Secretary of Directorate General of Budget, Directorate General of Budget, Ministry of Finance (2014-2016) - Director of Synchronization of Budgeting Regulations, Directorate General of Budget, Ministry of Finance (2011-2014) - Remuneration Committee of PT Pertamina Gas (2009 – 2011)
Rangkap Jabatan Dual Position	Penjelasan disampaikan pada bagian GCG	Disclosure is available under GCG section
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Penjelasan disampaikan pada bagian GCG	Disclosure is available under GCG section
Pendidikan/Pelatihan Education/Training	Informasi tentang pendidikan/pelatihan disajikan pada bagian tersendiri di bab ini	Information pertaining to Education/Training is presented under separate section in this chapter



Profil Direksi

Profile of the Board of Directors



Armand Hermawan

Direktur Utama
President Director

50 tahun, Warga Negara Indonesia
50 years old, Indonesian Citizen

Riwayat Pendidikan Educational Background	- Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran (1991) - Master of Commerce and Management dari University of Lincoln, Selandia Baru (1999) - Doktor di Bidang Keuangan dari Universitas Newcastle, NSW, Australia (2002)	- Bachelor's Degree in Economics from the University of Padjadjaran (1991) - Master of Commerce and Management from the University of Lincoln, New Zealand (1999) - Doktoral Degree in Finance from the University of Newcastle, NSW, Australia (2002)
Riwayat Jabatan Career Background	Dasar Hukum Pengangkatan Pertama kali diangkat melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 885/KMK.06/2017 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.	Appointment Letter First appointed through the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 885/KMK.06/2017 concerning the Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
Pengalaman Kerja Work Experience	- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PII (2010-2017) - Chief of Controller PT Indosat Tbk (2008-2009) - Investor Relation (Global VP) PT Indosat Tbk. (2006-2007) - Corporate Strategy and Planning (VP) PT Indosat Tbk (2003-2006)	- Director of Finance and Risk Management of PT PII (2010-2017) - Chief of Controller of PT Indosat Tbk (2008-2009) - Investor Relations (Global VP) of PT Indosat Tbk. (2006-2007) - Corporate Strategy and Planning (VP) of PT Indosat Tbk (2003-2006)
Rangkap Jabatan Dual Position	Penjelasan disampaikan pada bagian GCG	Disclosure is available under GCG section
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Penjelasan disampaikan pada bagian GCG	Disclosure is available under GCG section
Pendidikan/Pelatihan Education/Training	Informasi tentang pendidikan/pelatihan disajikan pada bagian tersendiri di bab ini	Information pertaining to Education/Training is presented under separate section in this chapter



Muhammad Wahid Sutopo

Direktur Eksekutif Bisnis
Business Executive Director

49 tahun, Warga Negara Indonesia
49 years old, Indonesian Citizen

Riwayat Pendidikan Educational Background	- Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (1993) - Magister Manajemen dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) (2002)	- Bachelor degree in Engineering from Institut Teknologi Bandung (1993) - Magister Management from Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) (2002)
Riwayat Jabatan Career Background	Dasar Hukum Pengangkatan Pertama kali diangkat melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 885/KMK.06/2017 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.	Appointment Letter First appointed through the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 885/KMK.06/2017 concerning the Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
Pengalaman Kerja Work Experience	- Direktur Strategy & Business Development PT Perusahaan Gas Negara (Persero) (2016-2017) - Komisaris Utama PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (2011-2017) - Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (2011-2016) - Group Head Perencanaan dan Kepala Divisi Hubungan Investor dan Pengendalian Korporat PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (2010-2011) - Corporate Secretary PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (2008-2011) - Group Head, Revenue Assurance di PT Indosat, Tbk (2006-2008) - Vice President, Hubungan Investor di PT Indosat, Tbk (2001-2006)	- Director of Strategy & Business Development of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) (2016-2017) - President Commissioner of PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (2011-2017) - Director of Investment Planning and Risk Management of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (2011-2016) - Group Head of Planning and Division Head of Investor Relations and Corporate Control of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (2010-2011) - Corporate Secretary of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (2008-2011) - Group Head of Revenue Assurance of PT Indosat, Tbk (2006-2008) - Vice President of Investor Relation PT Indosat, Tbk (2001-2006)
Rangkap Jabatan Dual Position	Penjelasan disampaikan pada bagian GCG	Disclosure is available under GCG section
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Penjelasan disampaikan pada bagian GCG	Disclosure is available under GCG section
Pendidikan/Pelatihan Education/Training	Informasi tentang pendidikan/pelatihan disajikan pada bagian tersendiri di bab ini	Information pertaining to Education/Training is presented under separate section in this chapter



Profil Direksi

Profile of the Board of Directors



Salusra Satria

Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek
Executive Director of Finance and Project Appraisal

53 tahun, Warga Negara Indonesia
53 years old, Indonesian Citizen

Riwayat Pendidikan

Educational Background

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1990)
- Master di Bidang Keuangan dari Macquarie University, Sidney, Australia (1993)
- Program Diploma di Bidang Strategi Bisnis dan Kepemimpinan dari Rotterdam School of Management, Erasmus University, Belanda (2016)
- Bachelor degree in Economics from University of Indonesia (1990)
- Master in Finance from Macquarie University, Sidney, Australia (1993)
- Diploma Program in Business Strategy and Leadership from Rotterdam School of Management, Erasmus University, Netherlands (2016)

Riwayat Jabatan

Career Background

- Dasar Hukum Pengangkatan Pertama kali diangkat melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 885/KMK.06/2017 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
- Appointment Letter First appointed through the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 885/KMK.06/2017 concerning the Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Pengalaman Kerja

Work Experience

- Direktur Eksekutif Penjaminan & Manajemen Risiko, Lembaga Penjamin Simpanan (2013-2016)
- Direktur Eksekutif Klaim & Resolusi Bank, Lembaga Penjamin Simpanan (2010-2013)
- Kepala Sub Direktorat pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan RI (2000-2005)
- Executive Director of Guarantee and Risk Management, Lembaga Penjamin Simpanan (2013-2016)
- Executive Director of Bank Claim & Resolutions, Deposit Insurance Corporation (LPS) (2010-2013)
- Head of Sub Directorate in Directorate General of Financial Institution, Ministry of Finance (2000-2005)

Rangkap Jabatan

Dual Position

Penjelasan disampaikan pada bagian GCG

Disclosure is available under GCG section

Hubungan Afiliasi

Affiliated Relationship

Penjelasan disampaikan pada bagian GCG

Disclosure is available under GCG section

Pendidikan/Pelatihan

Education/Training

Informasi tentang pendidikan/pelatihan disajikan pada bagian tersendiri di bab ini

Information pertaining to Education/Training is presented under separate section in this chapter



Profil Pejabat Eksekutif

Profile of Executive Officers



Donny Hamdani

Deputi Direktur Keuangan
Deputy Director of Finance

39 tahun, Warga Negara Indonesia
39 years old, Indonesian Citizen

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (2000)

Bachelor degree in Accounting from the University of Indonesia (2000)

Pengalaman Kerja Work Experience

EVP CFO Office, Plt. EVP Corporate Strategy & Finance
(1 Januari 2017-31 Desember 2017)

EVP CFO Office, Acting. EVP Corporate Strategy & Finance
(1 Januari 2017-31 Desember 2017)



Tanti Hidayati

Deputi Direktur Pengembangan Bisnis
Deputy Director of Business Development

46 tahun, Warga Negara Indonesia
46 years old, Indonesian Citizen

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sosial Ekonomi Pertanian di Institut Pertanian Bogor;
Jurusan: Agribisnis

Social Economic of Agriculture in Bogor Agriculture
Institute; Major: Agribusiness

Pengalaman Kerja Work Experience

- 2011-2016: SVP Project and Guarantee Consultation
- 2017-2018: EVP Project Guarantee & Consultation
- 2018 - saat ini: Deputi Direktur Pengembangan Bisnis

- 2011-2016: SVP Project and Guarantee Consultation
- 2017-2018: EVP Project Guarantee & Consultation
- 2018 - present: Deputy Director of Business Development



Komposisi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi serta Biayanya

Employee Composition and Competency Development and its Costs

Hingga berakhirnya tahun buku 2018, jumlah karyawan PT PII adalah sebanyak 128 orang, yang terbagi menjadi 100 orang karyawan tetap dan 28 karyawan tidak tetap. Dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebanyak 107 orang, jumlah karyawan tahun 2018 telah mengalami peningkatan sebesar 20%. Rincian jumlah karyawan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

As of the end of 2018 fiscal year, PT PII has 128 employees, categorized into 100 permanent employees and 28 non-permanent employees. Compared to 107 people in 2017, the number of employees in 2018 has increased by 20%. Details of the number of employees are depicted in the table below.

Jumlah Karyawan Berdasarkan Work Level

Total Number of Employees by Work Level

Jabatan Position	2018	2017	2016
Deputy Director	2	-	-
Executive Leader	3	4	-
Senior Leader	27	26	30
Middle Level	46	34	20
Staff	50	43	41
Total	128	107	91

Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

Total Number of Employees by Position Level

Jabatan Position	2018	2017	2016
EVP	5	4	0
VP SVP	27	26	30
DSM AVP	27	21	17
AM-M	36	28	21
Staf	33	28	23
Total	128	107	91

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Total Number of Employees by Employment Status

Status Karyawan Employment Status	2018	2017	2016
Tetap Permanent	100	84	74
Tidak Tetap Non Permanent	28	23	17
Total	128	107	91



Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Total Number of Employees by Gender

Jenis Kelamin Gender	2018	2017	2016
Laki-laki Male	69	54	44
Perempuan Female	59	53	47
Total	128	107	91

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

Total Number of Employees by Age

Usia (Tahun) Age (Years Old)	2018	2017	2016
41-56	27	23	18
31-40	54	36	35
20-30	47	48	38
Total	128	107	91

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Total Number of Employees by Educational Level

Tingkat Pendidikan Educational Level	2018	2017	2016
Doktoral Doctoral Degree	4	4	4
Pasca Sarjana Master Degree	52	38	31
Sarjana Bachelor Degree	68	61	52
Diploma Diploma	4	4	4
Total	128	107	91



Komposisi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi Serta Biayanya

Employee Composition and Competency Development and its Costs

Data Pengembangan Kompetensi Karyawan

Selama tahun 2018, seluruh karyawan PT PII dari berbagai level jabatan telah mengikuti beragam pelatihan, baik yang diselenggarakan secara *inhouse* maupun *public training* sebagaimana data berikut:

2018 (Orang) 2018 (Personnel)	2017 (Orang) 2017 (Personnel)	2016 (Orang) 2016 (Personnel)	2015 (Orang) 2015 (Personnel)
118	115	97	84

Tabel Jumlah *Inhouse* dan *Public Training*

Dari sisi jumlah *training*, selama tahun 2018 telah diselenggarakan pelatihan dalam bentuk *inhouse*, *knowledge sharing* dan *public training* sebagai berikut:

Jenis <i>Training</i> Type of Training	Jumlah <i>Training</i> Total Number of Training	Total Peserta (orang) Total Participants (personnel)	Rata-Rata Peserta (orang) Average of Participants (personnel)
Inhouse Training	8	170	21
Knowledge Sharing	12	571	42
Public Training	92	141	2

Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari upaya PT PII melakukan investasi pada sumber daya manusia yang merupakan aset penting Perseroan. Pada tahun 2018, total biaya yang dikeluarkan untuk program tersebut mencapai Rp2,6 miliar.

Employee Competence Development Data

In 2018, all PT PII employees from various levels of positions have participated in various trainings, both in inhouse and public training as follows:

Table of Inhouse and Public Training

In terms of the total number of trainings, the details of inhouse training, knowledge sharing and public training in 2018 are as follows:

Education and Training Expenses

Education and training serve as a part of PT PII efforts to invest in human resources which represent the important assets of the Company. In 2018, the total costs incurred for the program amounting to Rp2.6 billion.

Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Composition



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Kepemilikan saham yang Mencapai 5% atau Lebih

Kepemilikan Saham PT PII 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, oleh karena itu hanya terdapat 1 (satu) pemegang saham yang memiliki saham yang mencapai 5% atau lebih, yakni Negara Republik Indonesia.

Shareholding above 5% or Higher

PT PII is 100% wholly owned by the Republic of Indonesia, accordingly there is only 1 (one) shareholder with shareholding percentage of 5% or higher, namely the Republic of Indonesia.

Nama Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Percentage
Negara Republik Indonesia The Republic of Indonesia	8.000.000 lembar 8,000,000 shares	100%

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Saham PT PII sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sehingga tidak terdapat kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PII di Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi juga tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

Share Ownership by BOC and BOD

PT PII's shares are wholly owned by the Republic of Indonesia, accordingly the Board of Commissioners and Directors have no share ownership in PT PII. The Board of Commissioners and Directors have no shares either in other companies.



Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Composition

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Table of Share Ownership by BOC

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Lembar Saham Share Ownership		
		Pada PT PII In PT PII	Di Luar PT PII Other than PT PII	Jumlah Lembar Saham Total Shares
Ayu Sukorini	Komisaris Utama President Commissioner	x	x	x
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	x	x	x
M. Rahman Ritza	Komisaris Commissioner	x	x	x

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

Table of Share Ownership by BOD

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Lembar Saham Share Ownership		
		Pada PT PII In PT PII	Di Luar PT PII Other than PT PII	Jumlah Lembar Saham Total Shares
Armand Hermawan	Direktur Utama President Director	x	x	x
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Eksekutif Bisnis Business Executive Director	x	x	x
Salusra Satria	Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek Executive Director of Finance and Project Appraisal	x	x	x

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

List of Subsidiaries and/or Associates

Hingga akhir tahun 2018, PT PII tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle Company*.

As of the end of 2018, PT PII has no Subsidiaries, Associates, Joint Ventures and Special Purpose Vehicle Companies.



Struktur Grup Perusahaan

Corporate Group Structure

Hingga 31 Desember 2018, PT PII tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle Company*, sehingga tidak ada hal yang dapat dilaporkan terkait Struktur Grup Perusahaan.

As of December 31, 2018, the Company did not have either Subsidiary, Associates, Joint Venture or Special Purpose Vehicle Company. Therefore, no information can be reported on Corporate Group Structure.

Kronologi Penerbitan Saham

Chronology on Share Listing

Pada akhir 2018, saham Perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia dan tidak pernah terdaftar di bursa saham mana pun, sehingga tidak ada informasi yang diberikan mengenai kronologis penerbitan saham (termasuk penempatan pribadi) dan/atau daftar saham dari awal hingga akhir tahun fiskal.

As of the end of 2018, the Company's shares are fully owned by the Republic of Indonesia and have never been listed on any stock exchange, resulting to no information to be provided regarding the chronological share issuance (including private placements) and/or listing of shares from the beginning until the end of the fiscal year.

Kronologi Penerbitan/Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Other Securities Listing/Issuance

Hingga 31 Desember 2018, Perseroan belum pernah menerbitkan efek dalam bentuk apapun yang diperdagangkan di bursa manapun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku.

As of December 31, 2018, the Company has never issued any securities that are traded on any exchange, resulting to no information to be provided concerning the chronology of the issuance and/or listing of other debt securities from the beginning to the end of the financial year.



Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal

Name and Address of Capital Market Supporting Institutions and/or Professions

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Professions and Institutions	Nama Kantor Name of Institution	Alamat Address	Periode Assignment Period	Biaya Fees
Biro Administrasi Efek dan Pemeringkatan Efek	Hingga saat ini, PT PII bukan merupakan perusahaan publik dan emiten yang menerbitkan saham dan obigasi sehingga tidak menggunakan jasa biro administrasi efek dan pemeringkat efek.			
Share Registrar and Rating Agency	Up to present, PT PII is neither a public company nor an issuer that issues shares and resulting to no avail of service being provided by Share Registrar and Rating Agency.			
Kantor Akuntan Publik	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Plaza 89 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 – Indonesia, P.O. Box 2473 JKP 10001	Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2018.	Rp 800.000.000
Public Accountant	Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Plaza 89 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 – Indonesia, P.O. Box 2473 JKP 10001	General Audit on Financial Statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) for Fiskal 2018	
Perusahaan Penilai	Hingga 31 Desember 2018, PT PII tidak memiliki rekanan Perusahaan Penilai.			
Appraiser	As of December 31, 2018, PT PII has no Appraiser.			
Notaris	Notaris Arry Supratno, S.H.	Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur Nomor 89, Jakarta Pusat 10210	Resolusi RUPS Tahunan untuk Tahun Anggaran 2017 dan Resolusi RUPS untuk Perubahan RKAP Tahun Anggaran 2018 (1 bulan)	Rp25.000.000,00
Notary	Notaris Arry Supratno, S.H.	Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur Nomor 89, Jakarta Pusat 10210	Annual GMS Resolution for Fiscal Year 2017 and GMS Resolution for the Amendment of RKAP Fiscal Year 2018 (1 month)	
	Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn	Jl. Biak Raya Nomor 7 D, Jakarta Pusat	Resolusi RUPS Tahunan untuk RKAP Tahun Anggaran 2019 (2 bulan)	Rp15.000.000,00
	Notary Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn	Jl. Biak Raya No. 7 D, Central Jakarta	GMS Resolution for RKAP Fiscal Year 2019 (2 months)	
Aktuaris	Hingga 31 Desember 2018, PT PII tidak memiliki rekanan Aktuaris			
	As of December 31, 2018, PT PII has no Actuary			



Penghargaan dan/atau Sertifikasi

Awards and/or Certifications

PENGHARGAAN

Pada tahun 2018, Perusahaan menerima beberapa penghargaan, sebagai berikut:

No.	Tanggal Date	Penghargaan Award	Ajang Event	Penyelenggara Organizer
1	6 Desember 2018 6 December 2018	Public Initiative of The Year	ASEAN Risk Awards 2018	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
2	19 Desember 2018 19 December 2018	Indonesia Most Trusted Companies	Corporate Governance Perception Index (CGPI) Awarding 2018	The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)

AWARDS

In 2018, the Company received a number of awards, as follow:

SERTIFIKASI

Pada tahun 2018, Perusahaan tidak menerima sertifikasi, karena belum ada kegiatan atau inisiatif yang didaftarkan.

CERTIFICATIONS

In 2018, the Company did not receive any certification, as no activities or initiatives have been registered.



Peristiwa Penting

Significant Events

14 Februari
February



Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Regres Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung

PT PII menandatangani Perjanjian penjaminan dan regres proyek yang pertama di tahun 2018, yaitu untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung. Proyek ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) antara PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan PT Adhya Tirta Lampung selaku Badan Usaha Pelaksana.

Signing of the Guarantee Agreement of SPAM Bandar Lampung PPP Project

PT PII signed the first project guarantee in 2018, namely for the Bandar Lampung Drinking Water Supply System (SPAM) project. This project uses the Public Private Partnership (PPP) scheme between Way Rilau PDAM of Bandar Lampung City as the Contracting Agency (PJPK) and PT Adhya Tirta Lampung as the Project Company.

15 Maret
March



Proyek KPBU Palapa Ring Resmi Beroperasi

Proyek Palapa Ring Barat yang merupakan proyek pertama yang pembiayaannya menggunakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) telah selesai dan resmi beroperasi. Proyek itu terlaksana atas kerja sama berbagai pihak, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan PT PII.

Palapa Ring PPP Project Officially in Operations

The West Palapa Ring project, which is the first project funded using the PPP scheme, has been completed and has commenced operation. The project was carried out with the cooperation of various parties, namely the National Development Planning Agency, Ministry of Finance, Ministry of Communication and Information, and PT PII.

17 April
April



Peresmian Program CSR "Perpustakaan Anak"

PT PII meresmikan program Corporate Social Responsibility (CSR) 'Perpustakaan Anak' di SDN Panosogan Kabupaten Serang, Banten. Acara dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang serta Kepala Sekolah SD Negeri Panosogan 1. Program ini diselenggarakan untuk mewujudkan Gerakan Literasi Sekolah dalam rangka mendukung ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana serta bahan bacaan.

Inauguration of "Perpustakaan Anak" CSR Program

PT PII officially launched a Corporate Social Responsibility (CSR) program, 'Children Library', at the State Elementary School (SDN) Panosogan in Serang Regency, Banten. The event was attended by the Head of Education and Culture Office, Serang Regency and the Principal of the SDN Panosogan 1. This program was held to realize the School Literacy Movement in order to support the availability of school facilities and infrastructure as well as reading materials.



21 Mei
May



**Penandatanganan Perjanjian
Penugasan dan Perjanjian
Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU
Jalan Lintas Timur Sumatera Riau**

Penandatanganan Perjanjian Penugasan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Jalan Lintas Timur untuk Sumatera dan Riau antara Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (PPR) Kementerian Keuangan dengan Direktur Utama PT PII. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU Jalan Lintas Timur Sumatera tersebut antara Direktur Utama PT PII dengan Direktur Jenderal Bina Marga.

Signing of Assignment Agreement and Executing Agreement for Sumatera Riau East Link PPP Project

Signing of the Agreement on the Assignment of the Public Private Partnership (PPP) Project East Link for Sumatera and Riau between the Director General of Budget Financing and Risk Management the Ministry of Finance and the President Director of PT PII, followed by the signing of the East Link Sumatera PPP Project Facility Agreement between the President Director of PT PII and the Director General of Bina Marga.

23 Mei
May



**Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PII diselenggarakan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan agenda persetujuan atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2017.

Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholder

The Annual General Meeting of Shareholders of PT PII was held at the Directorate General of State Asset with the agenda of approval of the Annual Report for Fiscal 2017.

Selain itu pada hari yang sama juga dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda persetujuan atas Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan dan perubahan Kontrak Kinerja Direksi Tahun Buku 2018. RUPSLB tersebut merupakan bagian dari proses perluasan mandat PT PII terkait kegiatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi.

On the same day, the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) was held with the agenda of approval for Revision of the Company's Work Plan and Budget and the Performance Contract of the Board of Directors for fiscal 2018. The EGMS is part of the mandate expansion of PT PII concerning Project Preparation and Transaction Assistance.

28 Mei
May



**Penugasan Penyiapan Proyek KA
Makassar-Parepare**

PT PII mendapatkan penugasan dari Kementerian Keuangan untuk melaksanakan fasilitas dalam rangka Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBU Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare.

Assignment for Makassar-Parepare Railway Project Preparation

PT PII received an assignment from the Ministry of Finance to provide Project Preparation and Transaction Advisory facilities to the Makassar-Parepare Railway PPP Project.



Peristiwa Penting Significant Events



Forum Lenders dan Investor

PT PII sebagai satu-satunya BUPI pelaksana *single window policy* penyediaan penjaminan pemerintah, menggelar "Investment Opportunity through Public Private Partnership in Indonesia" Bankers & Investor Forum. Forum ini berisi pemaparan mengenai KPBU, Proses Pelaksanaan KPBU, *Project List* yang sedang dijalankan oleh Perseroan serta pemaparan mengenai proyek-proyek yang akan dilelang.

Lenders and Investor Forum

PT PII as the sole BUPI for implementing the single window policy for providing government guarantees, held an "Investment Opportunity through the Public Private Partnership in Indonesia" Bankers & Investor Forum. This forum contains an explanation of the PPP, the PPP Implementation Process, the current Project List handled by the Company, and presentation of projects to be auctioned.



Peresmian Jaringan Tulang Punggung Nasional Fiber Optik Palapa Ring Barat

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melaksanakan kegiatan Peresmian Jaringan Tulang Punggung Nasional Fiber Optik Palapa Ring Barat. Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kominfo Rudiantara serta Direktur Utama PT PII Armand Hermawan. Acara tersebut diselenggarakan di Natuna.

Inauguration of West Palapa Ring Fiber Optics Backbone Network

The Ministry of Communication and Information Technology (Kemenkominfo) conducts the inauguration of the Palapa Ring West Fiber Optic Backbone Network. The event was attended by President Joko Widodo, Minister of Finance Sri Mulyani, Minister of Communication and Information Rudiantara and President Director of PT PII Armand Hermawan. The event was held in Natuna.



Serah Terima Perjanjian Penugasan dan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU RSK Dharmais

Serah terima dokumen Perjanjian Penugasan Fasilitas Penyediaan dan Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rumah Sakit Kanker Dharmais oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan, Freddy Saragih dengan Direktur Utama PT PII Armand Hermawan.

Handover of the Facility Assignment and Facility Executing Agreements for Dharmais Cancer Hospital PPP Project

Handover of the Agreement for the Assignment and Assistance Facility Assignment of the Public-Private Partnership (PPP) Project for Dharmais Cancer Hospital by the Director General of Risk Management and Financing (PPR Director General) of the Ministry of Finance, Luky Alfirman, with PT PII President Director, Armand Hermawan.



Simposium Infrastruktur

Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia (JPPI) melaksanakan simposium infrastruktur sebagai sarana peningkatan pemahaman dan implementasi skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), wadah publikasi dan pertukaran informasi terkait pembangunan infrastruktur terkini dan kajian proyek dan riset yang dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Kegiatan ini didukung oleh PT PII.

Infrastructure Symposium

The Indonesian University Network for Infrastructure Development (PII) implements infrastructure symposium as a means to increase understanding and implementation of the Public-Private Partnership (PPP) scheme, a forum for publication and exchange of information related to the latest infrastructure development and project studies and research that can support the acceleration of infrastructure development. This activity is supported by PT PII.



8 Oktober
October



Forum Media

PT PII bersama BUMN di bawah Kementerian Keuangan menggelar Media Forum bertemakan Creative and Innovative Financing: Showcasing Indonesia Model di Nusa Dua, Bali. Dalam acara tersebut, dilakukan penandatanganan *Head of Agreement* proyek KPBU SPAM Semarang Barat antara Direktur Utama PT PII Armand Hermawan, Pjs Direktur Utama PDAM Tirta Moedal Muhammad Farchan dan Direktur Utama PT Air Semarang Barat Immanuel Ria Swarna.

Media Forum

PT PII and SOEs under the Ministry of Finance held a Media Forum with the theme 'Creative and Innovative Financing: Showcasing the Indonesia Model' in Nusa Dua, Bali. In the event, the Head of Agreement for the West Semarang SPAM PPP project was signed between PT PII President Director Armand Hermawan, Acting Director of Tirta Moedal PDAM Muhammad Farchan, and PT Air Semarang Barat Managing Director Immanuel Ria Swarna.

19 November
November



Kunjungan Menteri Komunikasi dan Informatika

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengunjungi PT PII dan memaparkan kisah sukses proyek Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur. Proyek Palapa Ring merupakan salah satu proyek pengembangan jaringan *backbone* yang dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Komunikasi Kabel Laut dan Sistem Komunikasi Serat Optik ke 57 kota/kabupaten yang belum terlayani. Proyek tersebut mendapatkan dukungan PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPi).

Visit of the Minister of Communication and Informatics

The Minister of Communication and Information (Menkominfo) Rudiantara visited PT PII and presented the success stories of the Palapa Ring West, Central and East Packages. The Palapa Ring project is one of the backbone network development projects designed and implemented using the Marine Cable Communication System and Fiber Optic Communication System to 57 underserved cities/districts. The project received PT PII's support as guarantor.

23 November
November



Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Proyek KPBU SPAM Semarang Barat

PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Air Semarang Barat dan Perjanjian Regres dengan PDAM Tirta Moedal untuk Proyek SPAM Semarang Barat.

Signing of Guarantee Agreement for West Semarang Clean Water Supply System PPP Project

PT PII have signed the Guarantee Agreement with PT Air Semarang Barat and Recourse Agreement with PDAM Tirta Moedal for the West Semarang Clean Water Supply System project.



Peristiwa Penting Significant Events

6 Desember
December



ASEAN Risk Award 2018

PT PII meraih penghargaan dalam ajang ASEAN Risk Award 2018 dari Enterprise Risk Management Academy (ERMA) untuk kategori Public Initiatives. Penghargaan ini merupakan yang kedua kalinya diraih PT PII, setelah pada tahun 2017 PT PII meraih penghargaan dengan kategori yang sama.

ASEAN Risk Award 2018

PT PII received an award in ASEAN Risk Award 2018 from Enterprise Risk Management Academy (ERMA) in the Public Initiatives category. This is the second such award received by PT PII, following the award in the same category given to PT PII in 2017.

19 Desember
December



Penganugerahan Penghargaan CGPI 2018

PT PII meraih penghargaan Indonesia Most Trusted Companies pada Corporate Governance Perception Index (CGPI) Awarding 2018. CGPI adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Perseroan dianggap telah berhasil menerapkan prinsip GCG yang transparan dan akuntabel, sehingga memiliki kinerja yang gemilang.

CGPI Award 2018

PT PII won the Indonesia Most Trusted Companies award in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2018 event. CGPI is a research program and ranking of GCG implementation in companies in Indonesia. The Company is considered to have succeeded in applying the principles of GCG that are transparent and accountable, so that it has a brilliant performance.

20 Desember
December



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PII diselenggarakan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan agenda persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2019.

Annual General Meeting of Shareholders

The Annual General Meeting of Shareholders of PT PII was held at the Directorate General of State Treasury with the agenda of approval of the Work Plan and Budget for Fiscal 2019.

28 Desember
December



Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan Pinjaman Proyek KEK Mandalika

PT PII menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) sehubungan dengan Penjaminan Pinjaman Proyek Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok.

Signing of the Guarantee Implementation Agreement for KEK Mandalika Project

PT PII signed the Guarantee Implementation Agreement with PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) related to the Loan Guarantee for the Development of Tourism Infrastructure Facility at Mandalika Special Economic Zone (KEK), Lombok.

Informasi pada *Website* Perusahaan

Information on the Company's Website

Untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan, PT PII berupaya menyajikan informasi secara transparan dan terbuka, salah satunya melalui website. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) memiliki *corporate website* dengan alamat www.ptpii.co.id, yang dapat diakses sejak tahun 2010. PT PII selalu berupaya menyempurnakan *corporate website* PT PII secara berkala agar menjadi semakin informatif dan mudah untuk diakses. *Website* ini memiliki dua versi bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

To adopt the principle of transparency in the management of the Company, PT PII seeks to present information in a transparent and open manner, one of which is through the website. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) maintains a corporate website with the address at www.ptpii.co.id, which can be accessed since 2010. PT PII always strives to refine PT PII's corporate website on a regular basis to become more informative and easier to access. The website provides two language versions, namely Indonesian and English.

Tabel Kesesuaian *Website* dengan Kriteria ARA

Table of Conformity between PII Website and ARA Criteria

Kriteria ARA ARA Criteria	Kesesuaian dengan Website PII IIGF Website Conformity
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Shareholder information up to the individual owner	Ada Terdapat pada menu "Tentang PT PII" Available Under the menu of "About PT PII"
Isi Kode Etik Contents of Code of Conduct	Ada Terdapat pada menu "Tentang PT PII" Available Under the menu of "About PT PII"
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) Separate annual financial statements (last 5 years)	Ada Terdapat pada menu "Berita dan Publikasi" Available Under the menu of "News and Publication"
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and Directors	Ada Terdapat pada menu "Tentang PT PII" Available Under the menu of "About PT PII"
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Charter of the Board of Commissioners, Directors, Committees, and Internal Audit Unit	Ada Available
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan. Information concerning the General Meeting of Shareholders (GMS) includes at least the agenda discussed in the GMS, resolutions of the GMS, and information on important dates, namely the date of the GMS announcement, the date of the GMS, the date of the GMS resolution.	Belum ada Not available yet



Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Competence Development Program for BoC, BoD, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Program Pengembangan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi merupakan pihak yang posisinya sangat signifikan dalam menentukan sukses tidaknya Perusahaan dikelola dengan baik, serta penerapan GCG yang konsisten dalam mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap anggota Dewan Komisaris diharapkan mempunyai kemampuan dan keahlian (*skill*) yang terus-menerus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan melalui pendidikan informal antara lain Seminar, *Workshop*, dan Studi Banding. Program pengembangan tersebut harus sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan, dan membuat laporan pelaksanaan program pengembangan kepada Pemegang Saham.

Program pengembangan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BOC and BOD Development Program

The Board of Commissioners and Directors are those whose positions play a very significant role in determining whether or not the Company is managed successfully, as well as whether GCG has been implemented consistently in achieving a number of targets that have been established. Accordingly, each member of the Board of Commissioners is expected to possess the skills and expertise that are constantly tailored to the Company's business needs.

Those skills and expertise can be developed by improving the knowledge and skills through informal education such as Seminars, Workshops, Comparative Studies. The development program must be made in accordance with the Company's work plan and budget, and reported to the Shareholders.

The development programs attended by members of the Board of Commissioners in 2018 are as follows:

Nama Name	Program Pengembangan Development Program	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location	Tanggal Date
Ayu Sukorini	Regional Seminar on Financial Crisis Management: How to Detect The Crisis.	Asian Development Bank dan Bank Indonesia (Under The APEC Financial Regulators Training Initiative)	Bali, Indonesia	26-29 November 2018 26-29 November 2018
M. Rahman Ritza	- The 18th International Anti-Corruption Conference (IACC) - The Insitute of Internal Auditors Internasional Conference	- The Minister for Development Cooperation, Denmark - The IIA Global	- Copenhagen - Dubai, UEA	22 Oktober 2018 22 October 2018 6-9 Mei 2018 6-9 May 2018

Nama Name	Program Pengembangan Development Program	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location	Tanggal Date
Mariatul Aini	Pemahaman Tentang Gratifikasi dan Cara Pelaporannya	Ministry of Finance RI	Jakarta	26 September 2018 26 September 2018
	Inovasi Tiada Henti	Ministry of Finance RI	Jakarta	1-4 November 2018 1-4 November 2018
	Lika-Liku Assessment Center	Ministry of Finance RI	Jakarta	14 Desember 2018 14 December 2018
	Penguatan Interaksi Pemerintah dengan DPR dalam Perencanaan Penganggaran	Ministry of Finance RI	Jakarta	18 Desember 2018 18 December 2018
	Pengenalan Proses Peradilan Gugatan pada PTUN	Ministry of Finance RI	Jakarta	Desember 2018 December 2018

Program pengembangan yang diikuti oleh anggota Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

The development programs attended by members of the Board of Directors during 2018 are as follows:

Nama Name	Program Pengembangan Development Program	Lokasi Location	Tanggal Date
Armand Hermawan President Director	The Springs Meetings of the Boards of Governors of IMF and WBG	Washington, United States	18-20 April 2018 18-20 April 2018
	Comparative Study of Best Practice in Cancer Hospital and Cancer Radiotherapy Technology	Manchester and London, England	29 Juli - 1 Agustus 2018 29 July - 1 August 2018
	Market Sounding of Potential Train Projects in South Korea	South Korea	25-28 November 2018 25-28 November 2018
Muhammad Wahid Sutopo Business Executive Director	Indonesia Infrastructure Investment Forum	London, England	14-16 Maret 2018 14-16 March 2018
	1st Working Group Indonesia	Seoul, South Korea	26-27 April 2018 26-27 April 2018
Salusra Satria Finance and Project Assessment Executive Director	Training of Senior Executive Program - Infrastructure Project & Finance	London, England	18-22 Juni 2018 18-22 June 2018
	Market Sounding & Investment Dialogue for Infrastructure Projects in China	Shanghai, China	30 Juli - 03 Agustus 2018 30 July - 03 August 2018

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Competence Development Program for the Audit Committee

Nama Name	Program Pengembangan Development Program	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location	Tanggal Date
M. Rahman Ritza	The Insititute of Internal Auditors Internasional Conference	The IIA Global	Dubai, UEA	6-9 Mei 2018 6-9 May 2018
Ahmad Ghufon	The Insititute of Internal Auditors Internasional Conference	The IIA Global	Dubai, UEA	6-9 Mei 2018 6-9 May 2018
Ferry Irawan	Madrid European Conference for Super Internal Auditors	ECIIA	Madrid, Spanyol	3-5 Oktober 2018 3-5 October 2018



Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Competence Development Program for BoC, BoD, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Program Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Competence Development Program for the Risk Monitoring Committee

Nama Name	Program Pengembangan Development Program	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location	Tanggal Date
Mariatul Aini	Pemahaman Tentang Gratifikasi dan Cara Pelaporannya	Ministry of Finance RI	Jakarta	26 September 2018 26 September 2018
	Inovasi Tiada Henti	Ministry of Finance RI	Jakarta	1-4 November 2018 1-4 November 2018
	Lika-Liku Assessment Center	Ministry of Finance RI	Jakarta	14 Desember 2018 14 December 2018
	Penguatan Interaksi Pemerintah dengan DPR dalam Perencanaan Penganggaran	Ministry of Finance RI	Jakarta	18 Desember 2018 18 December 2018
	Pengenalan Proses Peradilan Gugatan pada PTUN	Ministry of Finance RI	Jakarta	Desember 2018 December 2018
Imam Wahyudi	Optimalisasi Barang Milik Negara	Kementrian Keuangan	Jakarta	12-16 November 2018 12-16 November 2018

Program Pengembangan Sekretaris Perusahaan

Program pendidikan dan pelatihan Sekretaris Perusahaan dalam rangka pengembangan kompetensi adalah sebagai berikut:

Corporate Secretary Development Program

The Corporate Secretary's education and training programs for the purpose of developing competencies are as follows:

No	Jenis Type	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location	Tanggal Date
1	Public Training	Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital	Markplus.inc	Bali	22 Maret 2018 22 March 2018
2	Public Training	Public Private Partnership (PPP) Financing, Projects & Contracts	Infocus International	Singapore	10-12 April 2018 10-12 April 2018
3	Sharing Knowledge	Keuangan Negara	Kepala Kasubdit Pembendaharaan dan Anggaran, Kemenkeu	Jakarta	12 Juli 2018 12 July 2018
4	Sharing Knowledge	Sosialisasi Good Corporate Governance	PT PII	Jakarta	10 Juli 2018 10 July 2018
5	Sharing Knowledge	Half-day Seminar Risk Management	CRMS	Jakarta	16 Agustus 2018 16 August 2018
6	Sharing Knowledge	Workshop Risiko Hukum Direksi BUMN	PT PII	Jakarta	18 September 2018 18 September 2018
7	Public Training	Shifting the power of stretegic communication in the Era of Digital Economy	International PR Summit	Bali	4-6 November 2018 4-6 November 2018



Program Pengembangan Unit Audit Internal

Program pendidikan dan pelatihan Unit Audit Internal dalam rangka pengembangan kompetensi adalah sebagai berikut:

Audit Internal Unit Development Program

The Internal Audit Unit's education and training programs for the purpose of developing competencies are as follows:

Nama Name	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Topics	Penyelenggara Organizer	Lokasi Date	Tanggal Location
Harlina Hunaida	Corporate Governance Leadership Training Program	IICD	Jakarta	25 – 26 Juli 2018 25 – 26 July 2018
	ERMCP (Sertifikasi)	ERMA Academy	Yogyakarta	6 Juli 2018 6 July 2018
	2018 Annual Technical Update - Financial Services Accounting and Tax Seminar	PwC	Jakarta	28 November 2018 28 November 2018



04

Tinjauan Pendukung Bisnis Business Support Overview

- 100 Sumber Daya Manusia
Human Capital
- 116 Teknologi Informasi
Information Technology





Sumber Daya Manusia

Human Capital

Pada tahun 2018, PT PII fokus pada pelatihan karyawan berbasis *leadership* dan melakukan revitalisasi nilai-nilai budaya organisasi.

In 2018, PT PII was focused on leadership-based training and revitalizing the values of the corporate culture.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PT PII meyakini bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan mumpuni akan mampu memberikan kontribusi penting bagi kinerja dan kesinambungan Perseroan. Kehadiran SDM yang baik dan kompeten akan membuat Perseroan mampu mewujudkan visi dan misi serta rencana kerja berkelanjutan yang telah ditetapkan.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

PT PII believes that reliable and capable Human Resources (HR) will be able to generate important contributions to the Company's performance and sustainability. The presence of a good and competent HR will enable the Company to actualize the vision and mission as well as the established ongoing work plan.





Karena itulah, Perseroan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM, yang dimulai sejak rekrutmen, pengembangan individu dan perencanaan jenjang karir.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM

PT PII memandang bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset strategis yang sangat penting dalam menjaga kesinambungan usaha Perseroan. SDM yang berkualitas dan berkomitmen, upaya pencapaian target usaha yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Perseroan juga dapat tercapai.

Dengan pertimbangan seperti itulah, Perseroan memperlakukan SDM secara adil dan menghargai setiap kontribusi yang diberikan tanpa memandang perbedaan gender maupun ras. Pengelolaan SDM di lingkungan Perseroan, terutama mengacu pada ketentuan regulasi yang ada, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Komitmen pengembangan SDM di PT PII telah dilaksanakan sejak Perseroan berdiri. Manajemen telah menetapkan dan melaksanakan kebijakan pengembangan SDM sebagai penerapan atas pengembangan organisasi untuk mendukung dan mengakselerasi kinerja bisnis. Sejak tahun 2015, pengembangan SDM lebih dipertajam lagi dengan tujuan untuk mendukung penuh pencapaian visi dan misi Perseroan.

Pengelolaan SDM di lingkungan PT PII berada di bawah Divisi Human Capital. Divisi ini melakukan penyempurnaan kebijakan secara berkala dan optimalisasi pelaksanaan praktik ketenagakerjaan sepanjang siklus kepegawaian. Kesadaran tersebut dilandasi atas pemahaman Perseroan bahwa kualitas, kompetensi dan profesionalisme SDM akan menentukan masa depan Perseroan.

Therefore, the Company has given a tremendous attention to the management and development of HR competencies, which has been established since recruitment, individual development, and career planning.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT POLICY

PT PII considers that Human Resources (HR) is a strategic asset that is very valuable in maintaining the Company's business sustainability. Qualified and committed human resources, efforts to achieve business targets, which are the elaboration of the Company's vision and mission can also be achieved.

Through such consideration, the Company treats Human Capital in a fair manner and respects any contribution given regardless the difference in gender and race. Human Capital management within the Company's environment mainly refers to the existing regulatory provisions, including Law No. 13 of 2003 on Manpower.

The commitment for Human Capital development in PT PII has been implemented since the Company was established. The management has established and implemented an Human Capital development policy as an implementation of organizational development to support and accelerate business performance. Since 2015, Human Capital development has been further refined with the objective to fully support the achievement of the Company's vision and mission.

Human Capital management within PT PII is under the Human Capital Division. This division periodically improves policies and optimizes the implementation of labor practices throughout the employment cycle. The awareness is based on the Company's understanding that quality, competency, and professionalism of its Human Capital will determine the future of the Company.



Sumber Daya Manusia

Human Capital

Tugas dan tanggung jawab Divisi Human Capital, antara lain:

1. Berkontribusi dalam meningkatkan optimalisasi dan produktivitas unit kerja.
2. Memastikan pemenuhan kebutuhan SDM Perusahaan melalui proses seleksi dan rekrutmen SDM yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
3. Memastikan efektivitas pelaksanaan program pengembangan berdasarkan arahan strategis organisasi sehingga program pengembangan kompetensi memenuhi kebutuhan perusahaan maupun individu karyawan.
4. Memastikan terselenggaranya sistem penilaian kinerja yang terstruktur, objektif dan adil di seluruh unit kerja dalam organisasi.
5. Memastikan terselenggaranya sistem kompensasi dan benefit yang berlandaskan prinsip *internally fair & externally competitive*.
6. Berkontribusi dalam mencapai sasaran unit kerja yang telah ditetapkan serta melakukan pengembangan.

Duties and responsibilities of the Human Capital Division includes:

1. Contributing in the improvement of working unit optimization and productivity.
2. Ensuring the fulfillment of the Company's human resources requirement through employee recruitment and selection process based on the stipulated procedure.
3. Ensuring the effectiveness of development program implementation based on organization strategic direction, so that competency development program can fulfill the requirements of the Company as well as individual employee.
4. Ensuring the implementation of a transparent, objective, and fair performance assessment system in all working units within the organization.
5. Ensuring the implementation of compensation and benefit system based on the internally fair and externally competitive principles.
6. Contributing in the achievement of the established working unit target as well as conducting development.

ROADMAP PENGELOLAAN SDM

PT PII telah memiliki *roadmap* pengembangan SDM sebagai acuan program pengembangan. Penetapan *roadmap* ini terintegrasi dan merupakan bagian penting dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Roadmap ini menjadi acuan bagi program-program pengembangan SDM, sehingga lebih optimal dan tepat sasaran. Selain itu, program pengembangan juga menjadi lebih terarah, sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Perseroan. *Roadmap* pengelolaan SDM tersebut digambarkan sebagai berikut:

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT ROADMAP

PT PII has established a Human Capital development roadmap as a reference for development programs. The establishment of this roadmap is integrated and is an important part of the Company's Long Term Plan (RJPP) as well as the Corporate Work Plan and Budget (RKAP).

This roadmap is a reference for Human Capital development programs, which allows them to be more optimal and accurate. In addition, the development program has also become more focused, in line with the targets set by the Company. The Human Capital management roadmap is described as follows:



Visi, Misi dan Nilai Budaya Vision, Mission and Corporate Culture

Jangka Panjang Long-Term

- Produktivitas Tinggi
- Operasional Efektif dan Efisien
- Tingkat Kesehatan Tinggi
- Komunikasi Terintegrasi (*Integrated Communication*)
- High Productivity
- Effective and Efficient Operation
- High Health Level
- Balance Responsibility
- Integrated Communication

Tujuan Bisnis Business Target

Jangka Panjang Long-Term

- Pertumbuhan berkelanjutan
- Unggul/Kontemporer
- Sustainable Development
- Excellence/Competitive

- Kapabilitas teknis yang baik
- Kapasitas Manajerial dan kepemimpinan Baik
- Kerjasama tim dan Komunikasi Efektif
- Manajemen Proyek Baik
- Menjalani Nilai-nilai budaya Perusahaan

- Good Technical Capability
- Good Managerial and Leadership Capability Operation
- Effective Team work and Communication
- Good Project Management
- Manifestation of Corporate Culture Value

Kebutuhan SDM Human Resources Requirement

- Berorientasi untuk Selalu Unggul
- Kepemimpinan Strategis yang kuat
- Superior-Oriented
- Strong Strategic Leadership

Kompetensi

- Inti
- Kepemimpinan
- Keluarga Jabatan
- Teknis

Competency

- Core
- Leadership
- Position Cluster
- Technical



Sumber Daya Manusia

Human Capital

Pencapaian dari Roadmap

Rencana yang tercantum dalam *roadmap* telah dilaksanakan pada tahun 2018. Realisasinya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman teknis kompetensi telah dilakukan untuk seluruh karyawan melalui program pelatihan *in-house*.
2. Manajerial dan Kepemimpinan menjadi bagian penting dalam pengembangan karyawan dan menjadi faktor penting dalam proses promosi.
3. Revitalisasi budaya perusahaan telah melibatkan sebagian karyawan.

ORGANISASI PENGELOLAAN SDM

Perseroan telah memiliki organisasi pengelolaan sumber daya manusia. Hingga tahun 2018, organisasi dimaksud dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. HR Operation

Fungsi dari HR Operation di antaranya meliputi fungsi administratif dan *employee relation management*. Fungsi administratif yang dilakukan, yaitu pengelolaan data karyawan, mempersiapkan dokumen kontrak karyawan serta mengelola sistem HRIS yang ada di perusahaan. Fungsi *employee relation* ini bertanggung jawab untuk menciptakan suasana lingkungan kerja yang positif.

2. Payroll

Payroll berperan besar dalam remunerasi karyawan serta benefit kesejahteraan karyawan lainnya, yang meliputi Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) serta asuransi.

3. Rekrutmen

Fungsi rekrutmen dalam divisi Human Capital berperan besar dan terus menjadi fokus utama di Perusahaan seiring dengan semakin meningkatnya Bisnis PT PII serta perubahannya. Tantangan besar dalam fungsi ini adalah mendapatkan SDM yang tepat, akurat dan cepat

4. Strategy & Culture

Pada fungsi ini Human Capital berperan penting untuk menyelaraskan perkembangan bisnis Perusahaan dengan pengembangan SDM, baik melalui pelatihan, rotasi, mutasi serta pengembangan karir SDM Perusahaan. Pada fungsi

Achievement from the Roadmap

The plans listed in the roadmap have been implemented in 2018. The realization is as follows:

1. Improved understanding of technical competencies has been carried out for all employees through in-house training programs.
2. Management and Leadership became important parts in employee development and became important factors for promotion process.
3. The revitalization of corporate culture has involved some employees.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT ORGANIZATION

The Company has established its Human Capital management organization. Up to 2018, the organization is divided into 4 sections, namely:

1. HR Operation

The function of HR Operation includes administrative and employee relation management functions. The implementation of the administrative functions includes the management of employee data, preparing employee contract documents, as well as managing the HRIS system in the company. The employee relations function is responsible for creating a positive work environment.

2. Payroll

Payroll plays a big role in employee remuneration as well as other employee welfare benefits, which include the Health and Employment Management Agency (BPJS), Financial Institution Pension Fund (DPLK), as well as insurance.

3. Recruitment

The recruitment function in the Human Capital division plays a major role and continues to be the main focus in the Company along with the increasing PT PII Business and its changes. The major challenge in this function is to acquire the suitable, accurate, and fast future employee

4. Strategy & Culture

In this function, Human Capital has an important role to harmonize the development of the Company's business with Human Capital development, both through training, rotation, transfer, and career development of the Company's Human Capital. In

ini, Human Capital juga bertanggung jawab dalam hal penilaian kinerja, pengembangan dan *job grading* serta budaya perusahaan.

FOKUS 2018

Pada tahun 2018, ada dua hal penting yang menjadi fokus Perseroan dalam pengelolaan SDM. Pertama, PT PII memfokuskan pelatihan-pelatihan berbasis *leadership* dalam pengembangan karyawan, terutama para karyawan di level *Senior Leader*.

Kedua, PT PII juga melakukan revitalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang sudah ada untuk memastikan kesesuaian nilai-nilai tersebut dalam mendukung pencapaian-pencapaian Perseroan dalam jangka panjang. Proses revitalisasi nilai-nilai budaya organisasi tersebut melibatkan Direksi dan *Senior Leader* serta difasilitasi oleh konsultan. Keluaran dari revitalisasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan program-program budaya yang melibatkan karyawan terpilih dari level staf sampai *Executive Vice President* (EVP).

Sepanjang tahun 2018, PT PII juga menghadapi beragam tantangan dalam pengelolaan SDM. Tantangan tersebut disebabkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi, salah satunya perubahan Struktur Organisasi di awal tahun 2018. Perubahan tersebut berdampak terhadap perubahan tugas dan tanggung jawab serta rekrutmen karyawan yang cukup banyak.

Untuk mengatasi hal tersebut, Perseroan mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD), penyesuaian dokumen *job description*, serta melakukan proses mutasi dan promosi internal untuk mengisi posisi kosong yang dibutuhkan secara cepat dengan pemahaman konten yang sudah baik.

SISTEM MANAJEMEN KINERJA

Sistem Manajemen Kinerja merupakan alat evaluasi pencapaian target dan tujuan yang harus dicapai oleh seluruh karyawan maupun satuan kerja. Sistem ini disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan jangka panjang perusahaan serta Kontrak Manajemen PT PII. Penilaian kinerja masing-masing individu karyawan dilaksanakan secara objektif, berjenjang, periodik dan transparan.

this function, Human Capital is also responsible for performance assessment, development and job grading, as well as the corporate culture.

2018 FOCUS

In 2018, there were two important issues that became the focus of the Company in Human Capital management. First, PT PII focuses on leadership-based training in employee development, particularly for employees at the level of Senior Leader.

Second, PT PII is also revitalizing the existing organizational cultural values to ensure the conformity of these values in supporting the Company's long-term achievements. The revitalizing process of these organizational cultural values involves the Board of Directors and Senior Leaders and is facilitated by consultants. The output of the revitalization was followed up with the preparation of cultural programs that involved selected employees from the level of staff up to the Executive Vice President (EVP).

Throughout 2018, PT PII also faced various challenges in Human Capital management. The challenge was due to changes that occurred, one of which was a change in the Organizational Structure at the beginning of 2018. The change had an impact on changes in duties and responsibilities as well as considerable employee recruitment.

To address this issue, the Company held Focus Group Discussions (FGDs), adjusted the job description document, as well as carried out internal transfer and promotion processes to immediately fill the required vacant positions with proper understanding of the content.

PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

The Performance Management System is a tool to evaluate the achievement of targets and goals that must be achieved by all employees and work units based on the vision, mission and long-term objectives of the Company as well as the Management Contract of PT PII. The performance assessment of each employee is implemented in an objective, tiered, periodical, and transparent manner.



Sumber Daya Manusia

Human Capital

Proses evaluasi kinerja dilakukan secara berkala menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) berbasis *Balanced Score Card* (BSC) atau lebih dikenal dengan istilah BSC KPI. Selain itu, Perseroan juga melakukan *assessment* bagi karyawan di tingkat middle dan senior (tingkat M - AVP dan VP - EVP) dengan menggunakan jasa konsultan *assessment* yang kompeten di bidangnya. Tindak lanjut penilaian kinerja dan kompetensi adalah perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan, rotasi, mutasi dan promosi bagi karyawan bersangkutan.

PRINSIP PERSAMAAN HAK

Perseroan senantiasa menjunjung tinggi persamaan hak para karyawan. Setiap karyawan, tanpa memandang perbedaan gender, suku, agama, serta perbedaan lainnya, mendapatkan hak yang sama dalam pengembangan karir serta kesempatan lainnya di lingkungan Perseroan.

SISTEM REKRUTMEN

PT PII menerapkan asas kesamaan kesempatan dan keterbukaan dalam proses rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan usaha Perseroan. Selama tahun 2018, Perseroan telah merekrut 31 karyawan baru, baik yang berstatus *pro-hire* maupun sarjana baru. Karyawan-karyawan baru dari berbagai posisi tersebut ditempatkan di sejumlah divisi Perseroan.

Proses rekrutmen atau pencarian kandidat dilakukan melalui sumber internal dan sumber eksternal. Untuk sumber internal dilakukan melalui program pengembangan internal karyawan. Sedangkan sumber eksternal diperoleh melalui kerja sama dengan situs lowongan kerja, sosial media, dan *Employee Referral*. Selain itu, strategi pencarian kandidat juga dilakukan melalui keikutsertaan secara rutin dalam kegiatan *job fair*.

Untuk mendapatkan kandidat yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, Perseroan menggunakan beberapa metode seleksi, di antaranya *assessment*, wawancara dan tes kesehatan. Pada proses seleksi, Perseroan tidak hanya menekankan pada kompetensi atau keterampilan teknis kandidat, namun juga pada kepribadian dan perilaku.

The performance evaluation process is carried out periodically by using Key Performance Indicator (KPI) based on Balanced Score Card (BSC) or known as BSC KPI. In addition, the Company also conducts assessment for employees at the middle and senior level (M - AVP and VP - EVP levels) by using competent assessment consultant. The follow-up of the performance and competency assessment is the planning and implementation of the development, rotation, transfer, and promotion programs for the particular employees.

EQUAL RIGHTS PRINCIPLE

The Company consistently upholds the equal rights of its employees. Every employee, regardless of gender, ethnicity, religion, and other differences, has the same rights in career development and other opportunities within the Company.

RECRUITMENT SYSTEM

PT PII applies the principle of equality of opportunity and transparency in the recruitment and selection process. The recruitment and selection process is carried out by considering the needs and development of the Company's business. During 2018, the Company recruited 31 new employees, both *pro-hire* and fresh graduates. New employees from various positions are placed in a number of the Company's divisions.

The candidate recruitment or search process is carried out through internal sources and external sources. Internal sources are carried out through internal employee development programs. While external sources are obtained through collaborations with job vacancy websites, social media, and *Employee Referrals*. In addition, the strategy for candidate search is also conducted through regular participation in *job fair* activities.

To acquire the appropriate candidates that are in conformity with the needs, the Company uses several selection methods, including assessment, interviews, and medical tests. In the selection process, the Company not only emphasizes on competency or technical skills, but also on personality and behavior of the candidates.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pengembangan potensi karyawan merupakan bagian dari strategi dan upaya untuk mencapai target usaha yang telah ditetapkan oleh PT PII. Untuk itulah, pemberian fasilitas pendidikan dan pelatihan secara konsisten dan berkesinambungan menjadi sangat penting dan terus dilakukan oleh Perseroan.

Proses pembelajaran tersebut dilakukan melalui beragam cara, misalnya melalui pendidikan, pelatihan dan *workshop*, baik secara internal maupun secara eksternal bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Pendidikan dan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja, pengelolaan risiko, budaya perusahaan serta profesionalitas.

Komitmen Pemberian Kesempatan yang Sama kepada Seluruh Karyawan

Perseroan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan. Program pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan individu untuk menunjang keberhasilan kinerja dan karir SDM, serta diselaraskan dengan kebutuhan Perseroan dan mengacu pada strategi bisnis yang diterapkan.

PT PII menjamin tidak terjadi tindakan diskriminasi dalam memperlakukan karyawan sehingga tercipta perlakuan yang adil dan jujur sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing untuk mencapai kinerja yang *excellence*.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

Jumlah karyawan yang mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan mengalami peningkatan setiap tahun. Jika pada tahun 2017 ada 115 orang, maka pada tahun 2018 mencapai 118 orang.

2016 (orang people)	2017 (orang people)	2018 (orang people)
97	115	118

Sebanyak 118 orang SDM di lingkungan Perseroan tersebut mengikuti beragam pendidikan dan pelatihan, yang secara umum dikelompokkan menjadi 3: *in-house training*, *knowledge sharing* dan *public training*. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

COMPETENCY TRAINING AND DEVELOPMENT

The development of employee potential is part of the strategy and efforts to achieve the business targets set by PT PII. For this reason, the provision of education and training facilities in a consistent and sustainable manner is very important and continues to be carried out by the Company.

The learning process is conducted through various methods, for example through education, training and workshops, both internally and externally in collaboration with educational institutions. These education and trainings are expected to improve the knowledge and skills of employees to increase their work productivity, risk management, corporate culture, and professionalism.

Commitment to Equal Opportunities for All Employees

The Company provides equal opportunities for all employees to participate in education and training programs. Training programs are structured based on individual development needs to support Human Capital performance and career success, as well as aligned with the Company's needs and refers to the implemented business strategies.

The Company guarantees there shall be no discriminatory action against the employees to enable the creation of fair and honest treatment in accordance with the respective potential, ability, experience, and expertise in order to achieve excellence performance.

Table of Employee Education and Training

The number of employees who gain the opportunity to attend education and training continue to increase every year. If in 2017 there are 115 people, in 2018 it has reached 118 people.

A total of 118 people in the Company's environment participated in various education and training, which were generally classified into 3: *in-house training*, *knowledge sharing*, and *public training*. The details can be viewed in the following table.



Sumber Daya Manusia

Human Capital

Jenis Pelatihan Type of Training	Jumlah Training Number of Trainings	Total Peserta (orang) Total Participant (people)	Rata-Rata Peserta (orang) Average Participant (people)
<i>Inhouse Training</i> Inhouse Training	8	170	21
<i>Knowledge Sharing</i> Knowledge Sharing	12	571	42
<i>Public Training</i> Public Training	92	141	2

In-house Training

Sepanjang tahun 2018, pelaksanaan *in-house training* telah diselenggarakan sebanyak 8 kali dengan jumlah peserta 170 orang. Dengan demikian, ada karyawan yang mengikuti lebih dari satu kegiatan pelatihan mengingat materi yang diberikan beragam. Misalnya, dari masalah kompetensi kepemimpinan, *basic finansial model*, hingga *credit analysis course*. Rinciannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

In-house Training

Throughout 2018, in-house training has been implemented 8 times with a total of 170 participants. On that account, there are employees who participate in more than one training activity, considering the material provided varies. For example, from leadership competency issues, basic financial models, up to credit analysis courses. The details are explained in the following table.

Judul Pelatihan <i>Inhouse Training</i> Title Of Inhouse Training	Jumlah Peserta Number Of Participants
<i>Inhouse Training</i> Kompetensi Inti <i>Teamwork and Collaboration</i> dan <i>Stakeholder Management</i> Inhouse Training on Core Competencies of Teamwork and Collaboration and Stakeholder Management	33
<i>Inhouse Training</i> Kompetensi Kepemimpinan untuk <i>Middle Level</i> Inhouse Training in Leadership Competency for Middle Level	26
<i>Inhouse Training</i> Training Kompetensi Kepemimpinan untuk <i>Senior Leader</i> Inhouse Training on Leadership Competency Training for Senior Leaders	18
<i>The PPP Certification Foundation Training</i>	14
<i>Professional Presentation Skill</i>	9
<i>Basic Financial Model</i>	60
<i>Advanced Presentation Skill - Practice</i>	4
<i>Credit Analysis Course</i>	6
Total	170

Knowledge Sharing

Untuk pelatihan dengan kategori *knowledge sharing*, Perseroan telah merealisasikan 12 materi pelatihan yang totalnya diikuti oleh 571 karyawan. Dengan demikian, ada karyawan yang mengikuti lebih dari satu materi pelatihan, mengingat materinya yang beragam, misalnya terkait dengan *Internal Control Practices and Awareness*, Keuangan Negara, hingga *Half-day Seminar Risk Management*. Rinciannya disampaikan pada tabel di bawah ini.

Knowledge Sharing

For training in the knowledge sharing category, the Company has realized 12 training materials, with a total of 571 employees participated. Thus, there are employees who participated in more than one training material, considering the material provided varies, for example related to Internal Control Practices and Awareness, State Finance, up to Half-day Risk Management Seminar. The details are presented in the following table.

Judul Pelatihan <i>Knowledge Sharing</i> Title Of Knowledge Sharing Training	Jumlah Peserta Number Of Participants
<i>Internal Control Practices and Awareness</i>	58
Sosialisasi <i>Update</i> Kebijakan Uang Muka Socialization of Advance Payment Policy Update	65
Sosialisasi <i>Update</i> <i>Procurement Policy</i> Socialization of Procurement Policy Update	73
Konsinyering Persiapan <i>Certified PPP Professional Program</i> Consignment Preparation for Certified PPP Professional Program	55



Judul Pelatihan <i>Knowledge Sharing</i> Title Of Knowledge Sharing Training	Jumlah Peserta Number Of Participants
Kuangan Negara State Finance	78
Sosialisasi <i>Good Corporate Governance</i> Socialization of Good Corporate Governance	25
<i>Half-day Seminar Risk Management</i> Half-day Risk Management Seminar	68
<i>Workshop</i> Risiko Hukum Direksi BUMN Legal Risk of the Board of Directors of SOE Workshop	17
The PPP Certification Foundation Training	14
<i>Sharing Session</i> Rencana Pembangunan Perumahan Rakyat dengan Skema KPBU Public Housing Development Plan with PPP Scheme Sharing Session	11
<i>Capacity Building</i> Sektor Persampahan Capacity Building on the Waste Sector	25
Sosialisasi <i>Update</i> Kebijakan Uang Muka Socialization of Advance Payment Policy Update	63
FGD Potensi Proyek KPBU untuk Kawasan Pemukiman Kumuh FGD on Potential PPP Projects for Slum Settlement Areas	19
Total	571

Public Training

Untuk kategori *public training*, pada tahun 2018 ada 141 karyawan yang mengikuti kegiatan tersebut. Materi yang diikuti, dari *Certified Ethical Hacker, Cyber Security Auditing in an Unsecure World*, hingga *Third Party Funding from a Legal Perspective*. Rinciannya disampaikan pada tabel di bawah ini.

Public Training

In the public training category, 141 employees participated in the activities in 2018. The materials attended include, Certified Ethical Hackers, Cyber Security Auditing and Unsecure World, up to the Third Party Funding from a Legal Perspective. The details are presented in the following table.

Judul Pelatihan <i>Public Training</i> Title Of Public Training	Jumlah Peserta Number Of Participants
<i>New Investment Rules for Remarkable Indonesia</i>	2
<i>COBIT Foundation</i>	1
<i>Certified Ethical Hacker</i>	1
<i>The Next Level of Availability with Veeam and HPE Nimble Storage</i>	2
<i>Developing ASP.NET MVC Web Application</i>	1
<i>Training Crystal Report</i>	1
<i>4th Indonesia Tax Summit 2018</i>	1
<i>Third Party Funding from a legal perspective</i>	1
<i>Strategic Data-Driven Marketing for Decision Makers</i>	2
<i>Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital</i>	1
<i>Cyber Security Auditing in an Unsecure World</i>	1
<i>Managing Risks and Costs when a Cross-Border Dispute Occurs</i>	1
<i>Construction Contract</i>	1
<i>Public Private Partnership (PPP) Financing, Projects & Contracts</i>	4
<i>Due Diligence in Renewable Energy Project</i>	1
<i>Inhouse Training</i> Kompetensi Kepemimpinan Leadership Competency Inhouse Training	1
PSAK 73 : Leases SFAS 73 : Leases	1
<i>Internal Control Practices and Awareness</i>	1
Manajemen Risiko Hukum dan Kepatuhan Management of Legal and Compliance Risk	1
<i>Project Quality Management Workshop</i>	2
<i>How to improve maturity level of BUMN's internal audit function using Internal Audit Capacity Model (IACM)</i>	1
Permodelan Dinamik di Bidang Lingkungan untuk Menentukan Besaran Dampak dalam Kajian Amdal Dynamic Modeling in the Field of Environment to Determine the Magnitude of Impact in the Environmental Impact Assessment	1



Sumber Daya Manusia

Human Capital

Judul Pelatihan <i>Public Training</i> Title Of Public Training	Jumlah Peserta Number Of Participants
<i>Professional Project Management</i>	2
<i>Understanding International Project Finance</i>	1
<i>Asia Pacific Satellite Conference 2018</i>	9
Konsinyering Persiapan <i>Certified PPP Professional Program</i> Consignment Preparation for Certified PPP Professional Program	1
Keuangan Negara State Finance	1
<i>Becoming an Effective Leader and Manager</i>	1
<i>ASEAN Corporate Governance Scorecard</i>	6
<i>Finance for non Finance - Understanding Financial Statement</i>	2
<i>The 7th Habits of Highly Effective People</i>	1
<i>Filing Management</i>	1
<i>Certified Professional Talent Management</i>	1
<i>Project Risk Management</i>	2
<i>ASEAN CG Scorecard</i>	1
Tindak Pidana Korporasi Tanggung Jawab Hukum Direksi dan Komisaris Corporate Criminal Acts and Legal Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners	1
ERMCP (Sertifikasi) ERMCP (Certification)	1
<i>Financial Statement Analysis</i>	1
<i>Professional Presentation Skill</i>	1
<i>CIA Review</i>	1
Mewaspada dan memahami dengan bijak PPN dari PPN Keluaran/PPN Masukan dan pernak-pernik e-faktur Be aware and wisely understand VAT from VAT Output/VAT Input and small prints of e-invoice	1
<i>Process and SOP Excellence Through Business Process Mapping and SOP Development</i>	1
<i>One Day Public Training Excellent Public Speaking Skills</i>	2
<i>Competitors Intelligence in Digital Era</i>	1
<i>Legal and Compliance Risk Management</i>	1
<i>Corporate Governance Master Class</i>	1
Membangun Relasi Dengan Media Bagi BUMN Establishing Relations with the Media for SOEs	1
<i>Finance for non Finance Professional</i>	1
Pelatihan Pengadaan BarangJasa dan Ujian Sertifikasi Pepres no. 16 Tahun 2018 Service Procurement Training and Certification Examination of Perpres No. 16 of 2018	3
Studi Banding RS Dharmais dengan Kementerian Kesehatan Comparative Study of Dharmais Hospital with the Ministry of Health	3
<i>Advance Secretary Program</i>	1
<i>Ms. Excel for Accountant</i>	1
<i>IMF - World Bank Annual Meeting 2018</i>	10
<i>Corporate Culture and Leadership Journey</i>	2
<i>Bilingual Contract Drafting</i>	1
<i>Corporate Governance Leadsip Program</i>	1
<i>Evaluating Training Program</i>	2
Pelatihan Lanjutan Penilaian Tingkat 1 Level 1 Advanced Assessment Training	2
<i>Comparison of Corporate Governance Methodology</i>	2
<i>Basic Financial Model</i>	3
<i>Shifting the power of stretegic communication in the Era of Digital Economy</i>	1
<i>Managing Project Teams</i>	2
<i>Legal Audit dan Legal Opinion</i>	1



Judul Pelatihan <i>Public Training</i> Title Of Public Training	Jumlah Peserta Number Of Participants
<i>Financial Aspects on Feasibility Study</i>	1
<i>Sharpen your Negotiation Skills</i>	2
Seminar Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Penyuntingan Jurnal Ilmiah National Workshop Seminar on the Management and Editing of Scientific Journals	1
<i>Advanced Presentation Skill - Practice</i>	1
<i>Advanced Financial Modelling</i>	3
<i>Fundamental ERM</i>	1
<i>International Conference on ERM, Integrated GRC in a new digital world</i>	1
<i>Certified Risk Management Officer</i>	1
EMS ISO 14001:2015 <i>Interpretation, Audit Internal & Documented Information</i> (Audit Lingkungan) EMS ISO 14001:2015 Interpretation, Internal Audit & Documented Information (Environmental Audit)	1
<i>Public Private Partnership</i>	2
Seminar Pengelolaan Aset Negara State Asset Management Seminar	1
Humas 4.0 : Tantangan Kebangsaan dan Reputasi Indonesia Public Relations 4.0: Indonesian Nationality and Reputation Challenge	1
<i>Organization Assesment & Execution Capability Audit</i>	1
<i>Healthcare case study and proton therapy</i>	2
<i>Receivable and Payable Management</i>	2
Workshop Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali untuk Proyek Infrastruktur Workshop on Land Procurement and Resettlement for Infrastructure Projects	2
Sosialisasi Aplikasi e-Bupot 23/26 Socialization of the e-Bupot 23/26 Application	1
Penyusunan Proposal dan Anggaran Preparation of Proposals and Budgets	1
<i>Feasibility Study</i>	1
<i>ESF World Bank</i>	1
<i>2018 Annual Technical Update - Financial Services Accounting and Tax Seminar</i>	2
Capacity Building Pemrov DKI DKI Provincial Government Capacity Building	1
Sharing Session Rencana Pembangunan Perumahan Rakyat dengan Skema KPBU Sharing Session on Public Housing Development Plan with the PPP Scheme	1
<i>IPFA Asia Jakarta Modernising PPP Procurement in Indonesia</i>	1
<i>InfraSAP Summary Presentation to Financial Sector</i>	1
Total	141

Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari upaya PT PII melakukan investasi pada sumber daya manusia yang merupakan aset penting Perseroan. Pada tahun 2018, total biaya yang dikeluarkan untuk program tersebut mencapai Rp2,6 miliar.

Cost of Education and Training

Education and training are part of the efforts of PT PII to invest in human capital, which are valuable assets of the Company. In 2018, the total costs incurred for the programs reached Rp2.6 billion.

PENGEMBANGAN KARIR

Dalam mendukung pengembangan karir karyawan, PT PII telah menyiapkan jalur karir untuk setiap jabatan berdasarkan kepada kelompok jabatan yang telah dibentuk. Adapun kelompok yang dimaksud, meliputi: *business development, project, risk, legal, finance* dan *business support*.

CAREER DEVELOPMENT

In supporting the career development of employees, PT PII has prepared a career path for each position based on the group of positions that have been established. The groups include: *business development, project, risk, legal, finance, and business support*.



Sumber Daya Manusia

Human Capital

Proses jalur karir akan didukung oleh data-data yang terstruktur dan komprehensif agar perkembangan SDM dapat dipetakan lebih obyektif. Dalam implementasinya, pengembangan karir yang kerap dilakukan di PT PII melalui mutasi dan promosi sesuai dengan kondisi Perseroan.

STRATEGI REMUNERASI

Kebijakan penerapan remunerasi di lingkungan Perseroan didasarkan atas kinerja PT PII dan karyawan, yang disesuaikan dengan strategi perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Remunerasi juga disusun dengan mempertimbangkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku seperti ketenagakerjaan, maupun melakukan *benchmark* dengan organisasi sejenis lainnya.

Dalam penentuan remunerasi ini, Perseroan juga melakukan survei pada industri yang sama. Melalui strategi ini, Perseroan berharap dapat mempertahankan karyawan terbaik dengan remunerasi yang kompetitif di pasar tenaga kerja.

Pada tahun 2018, Perseroan melakukan beberapa penyesuaian terkait struktur remunerasi. Struktur ini difokuskan kepada unsur kompetitif dengan eksternal dan unsur *fairness* dalam penerimaan pendapatan karyawan sesuai dengan masing-masing level dan kinerja selama ini.

Dengan demikian, komponen remunerasi di PT PII yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Gaji pokok
2. Tunjangan Jabatan
3. Tunjangan Perumahan
4. Tunjangan Komunikasi
5. Tunjangan Transportasi

PROGRAM KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan serta mempertahankan karyawan, Perseroan senantiasa berupaya terus meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui berbagai aspek. Hingga saat ini, selain seperti tertuang dalam sistem remunerasi, karyawan juga mendapatkan fasilitas, antara lain:

1. Pemberian dan perbaikan remunerasi dan benefit, kepesertaan jaminan sosial BPJS Kesehatan, kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas kesehatan serta asuransi.

The career path process will be supported by a structured and comprehensive data, allowing more objective mapping of Human Capital development. In its implementation, career development often conducted at PT PII is through transfers and promotions in accordance with the conditions of the Company.

REMUNERATION STRATEGY

The remuneration implementation policy in the Company is based on the performance of PT PII and employees, which are tailored to the company's strategy in the short term and in long term. Remuneration is also prepared by taking into account the applicable laws and regulations, such as employment, as well as benchmarking with other similar organizations.

In determining this remuneration, the Company also conducts surveys in the same industry. Through this strategy, the Company hopes to maintain the best employees with a remuneration that is competitive in the labor market.

In 2018, the Company made a number of adjustments related to the remuneration structure. The structure is focused on the element of being externally competitive and the fairness elements in the receipt of employee income in accordance with each level and performance.

Thus, the applicable components of remuneration at PT PII are as follows:

1. Basic salary
2. Positional Allowance
3. Housing Allowance
4. Communication Allowance
5. Transportation Allowance

EMPLOYEE WELFARE PROGRAM

In order to carry out the mandate of the Manpower Act and to retain its employees, the Company always strives to continuously improve employee welfare through various aspects. At present, in addition to remuneration, employees also get the following facilities:

1. Provision and improvement of remuneration and benefits, BPJS Health social security participation, membership in BPJS Employment, health facilities, and insurance.

2. Program pengembangan karyawan seperti program peningkatan jenjang pendidikan, dukungan pada kebutuhan karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanaan kegiatan keagamaan.
3. Dukungan pada kebutuhan karyawan untuk melaksanakan kegiatan olah raga dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanaan kegiatan olah raga.
4. Bantuan bagi karyawan yang mengalami duka cita.
5. Dan lain-lain.

MANFAAT PASKA KERJA

Pemberian jaminan hari tua atau pensiun merupakan salah satu bentuk penghargaan Perseroan atas loyalitas dan kontribusi karyawan selama aktif bekerja. Jaminan ini juga memberi ketenangan bagi seluruh karyawan yang bekerja di PT PII. Dengan demikian, mereka lebih termotivasi dalam berkarya.

Pensiun karyawan PII ditetapkan pada usia 56 tahun. Bagi karyawan yang telah berusia 55 tahun dapat mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP). Dalam masa itu, PII memberikan pelatihan wirausaha dan pelatihan purnabakti, sehingga diharapkan para karyawan dapat mempersiapkan diri di masa mendatang.

Karyawan yang telah memasuki usia purnabakti (56 tahun), diberikan kompensasi sesuai peraturan. Sedangkan karyawan tetap yang diikutsertakan dalam Program Hari Tua mendapatkan Kompensasi Jaminan Hari Tua sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

TINGKAT TURN OVER KARYAWAN

Angka *turn over* karyawan PT PII untuk 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

2016		2017		2018	
Jumlah (orang) Total (people)	Persentase Percentage	Jumlah (orang) Total (people)	Persentase Percentage	Jumlah (orang) Total (people)	Persentase Percentage
10	12%	7	7%	10	8,5%

2. Employee development programs, such as education level improvement programs, support for the needs of employees to conduct worships according to religion and belief by providing facilities and infrastructure as well as the budget for implementing religious activities.
3. Support for the needs of employees for sports activities by providing facilities and infrastructure as well as the budget for implementing sports activities.
4. Assistance for employees experiencing grief.
5. And others.

POST EMPLOYMENT BENEFIT

The provision of old age insurance or retirement is one of the forms of the Company's appreciation for employee's loyalty and contribution during the years of service. This guarantee also provides peace to all employees working at PT PII. Subsequently, they are more motivated in their work.

The retirement period for employee is set at the age of 56 years old in the Company. Employees who are 55 years old may take the Retirement Preparation Period (MPP). In the Retirement Preparation Period, the Company provides entrepreneurial training and retirement training, hence, it is expected that the employees can prepare themselves in the future.

Employees who have entered the retirement age (56 years), are compensated in accordance with the regulations. While permanent employees who are included in the Retirement Program acquire the Retirement Compensation in accordance with the applicable Law on Employment.

EMPLOYEE TURN OVER RATE

The turnover rate of PT PII employees for the last 3 (three) years can be viewed in the following table.



Sumber Daya Manusia

Human Capital

SURVEI KEPUASAN KARYAWAN

Perseroan menilai bahwa pegawai memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, karena perkembangan diri pegawai akan berpengaruh terhadap perkembangan bisnis perusahaan. Oleh sebab itu, penting bagi Perseroan untuk mengetahui tingkat kepuasan pegawai secara personal terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Keterlibatan dan antusiasme pegawai terhadap pekerjaan dan perusahaan bekerja dapat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja pegawai sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan perusahaan dengan lebih efektif, efisien dan kompetitif.

Untuk itu, PT PII senantiasa melakukan survei kepuasan karyawan untuk mengetahui tingkat keterikatan karyawan serta memastikan aspek-aspek SDM yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan karyawan.

Pada tahun 2018, survei dilaksanakan pada 18 Januari 2019 oleh PT Binar Consulting (BRIGHT) dengan hasil sebagaimana berikut:

Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa rata-rata tingkat kepentingan dari tiap aspek adalah 4,51. Hal ini berarti aspek-aspek yang diukur dalam survei tersebut dianggap penting oleh partisipan. Untuk rata-rata tingkat kepuasan dari tiap aspek adalah 3,99. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, diperoleh data sebesar 3,68 sebagai sebagai tingkat kepuasan karyawan. Sehingga terjadi kenaikan sebesar 7,77% jika dibandingkan dengan hasil tahun lalu.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

PT PII selalu berupaya menciptakan suasana kerja yang terbuka, positif dan progresif untuk menciptakan hubungan industrial yang sehat dan harmonis. Beberapa pendekatan yang dilakukan adalah dengan kegiatan-kegiatan dalam bentuk *townhall meeting* yang melibatkan seluruh karyawan atau *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan *Senior Leaders*. Dalam kegiatan tersebut terjadi penyampaian-penyampaian pesan Perusahaan kepada karyawan dan dalam diskusi tersebut, karyawan menyampaikan aspirasi-aspirasinya terhadap Perseroan.

EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY

The Company considers that employees have a very crucial role for the survival of the company, because the self development of employee will have influence on the development of the company's business. Therefore, it is important for the Company to know the level of employee satisfaction on a personal level towards the company where they work. The involvement and enthusiasm of employees towards work and the company can have an influence on the improvement in employee work productivity, enabling it to support the achievement of the corporate goals in a more effective, efficient, and competitive manner.

To that end, PT PII regularly conducts employee satisfaction surveys to determine the level of employee engagement as well as ensuring that Human Capital that have been conducted are in accordance with the needs and interests of the employees.

For 2018, the survey was conducted on 18 January 2019 by PT Binar Consulting (BRIGHT) with the following results:

Based on the survey results, it is discovered that the average level of importance of each aspect is 4.51. This means that the aspects measured in the survey are considered important by the participants. The average level of satisfaction from each aspect is 3.99. Compared with the results in the previous year, the data obtained as the level of employee satisfaction was 3.68. Therefore, there was an increase of 7.77% compared to the results in the previous year.

INDUSTRIAL RELATIONS

PT PII continuously strives to create an open, positive, and progressive working atmosphere to create sound and harmonious industrial relations. Several approaches are carried out with activities in the form of townhall meetings that involve all employees or focus group discussions (FGD) that involve Senior Leaders. In these activities, the Company's messages are conveyed to the employees, and in these discussions, the employees convey their aspirations to the Company.

BUDAYA KERJA

Perseroan telah memiliki budaya kerja yang dikenal dengan INTIME (*Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust* dan *Excellence*). Pada tahun 2018, PT PII melakukan revitalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang sudah ada untuk memastikan kesesuaian nilai-nilai tersebut dalam mendukung pencapaian-pencapaian Perseroan dalam jangka panjang. Keluaran dari revitalisasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan program-program budaya yang melibatkan karyawan terpilih dari level staf sampai *Executive Vice President* (EVP).

RENCANA PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2019

Di tahun 2019 Perseroan masih fokus terhadap *talent management*. Aspek-aspek yang masih menjadi fokus SDM adalah rekrutmen, pelatihan *soft skill*, terutama *leadership* dan komunikasi.

Program-program tersebut, yang dimulai dari rekrutmen hingga pemenuhan kemampuan teknis serta kepemimpinan, dikembangkan dengan tujuan agar SDM di lingkungan Perseroan memiliki kualitas "*future leader*". Dengan demikian, akan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pencapaian tujuan usaha PT PII.

Rincian program pengembangan pada tahun depan disampaikan dalam tabel di bawah ini:

No	Level	Item	Tahapan Pengembangan Development Stage	Implementasi Implementation	Monitor/Evaluasi Monitor/Evaluation
1	EVP	Training	Strategic Management Visionary Leadership	Q2	- KPI - KPI - Soft Competency Assessment - Soft Competency Assessment - Observasi 2 Direksi - Observation by 2 Directors - Penilaian 360° 360° Assessment
		Coaching	External	Q3	
		Assessment	Soft Competency	Q4	
2	SVP	Training	Strategic, Advance & Basic Management	Q2	- Penilaian 360° 360° Assessment
		Coaching	External	Q3	
		Assessment	Soft Competency	Q4	

WORK CULTURE

The Company has established a work culture known as INTIME (*Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust* and *Excellence*). In 2018, PT PII revitalized the existing organizational cultural values to ensure the conformity of these values to support the Company's long-term achievements. The output of the revitalization was followed up with the preparation of cultural programs involving selected employees from the levels of staff up to the Executive Vice President (EVP).

2019 HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PLAN

In 2019, the Company will still focus on talent management. The aspects that are still the focus of Human Capital include recruitment, soft skills training, particularly leadership and communication.

These programs, starting from recruitment to the fulfillment of technical and leadership capabilities, were developed with the objective to enable the Human Capital within the Company to have the quality of "*future leader*". Thus, able to provide optimum contributions for the achievement of PT PII's business objectives.

Details of the development program for next year are presented in the following table:

Teknologi Informasi

Information Technology

PT PII telah menyelesaikan Information Technology Master Plan 2019-2023 yang menjadi acuan pengembangan Teknologi Informasi Perseroan.

PT PII has completed the Information Technology Master Plan 2019-2023 which will be the reference for the Company's Information Technology development plan.

Kebijakan di Bidang Teknologi Informasi

Dalam menjalankan pengelolaan TI, Perseroan menggunakan IT Policy yang telah disahkan pada tahun 2018. Secara struktur organisasi, Perseroan menetapkan Komite Pengarah TI dengan Direktur Eksekutif Bisnis sebagai team leader Komite Pengarah TI.

Policies in Information Technology

In carrying out its IT management, the Company refers to the IT Policy adopted in 2018. Structurally, the Company established an IT Steering Committee with the Executive Director of Business as the team leader of the IT Steering Committee.



Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI tersebut antara lain diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Duties and Responsibilities of the IT Steering Committee

The duties and responsibilities of the Committee are described below:

No	Jabatan Position	Deskripsi Pekerjaan Job Description
1.	Team Leader	- Menyetujui prosedur dan kebijakan pemantauan <i>Master Plan</i> TI. - Bertanggung jawab atas penyelesaian rencana kegiatan yang tercantum dalam <i>Road Map</i> TI. - Menyampaikan keterbukaan informasi atas nama Komite Pengarah TI.
2.	Team Member	- Melakukan <i>review</i> untuk memastikan investasi dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan kebutuhan dan prioritas bisnis yang tertuang dalam <i>Master Plan</i> TI. - Memonitor dan mengevaluasi efektivitas penerapan Kebijakan TI di lingkungan Perseroan. - Melakukan <i>review</i> terhadap kinerja Tata Kelola TI secara periodik. - Memberikan persetujuan terhadap inisiatif dan rencana investasi TI untuk mendukung layanan TI kepada <i>user</i> dan <i>customer</i>. - Mengidentifikasi perwakilan yang akan ditugaskan di Komite Pengarah TI serta pihak berwenang bila ada eskalasi masalah terkait Proyek TI. - Memberikan data/informasi terkait <i>trend</i> TI ke depan; - Menyampaikan masalah utama terkait proyek TI maupun kemampuan para pihak dalam Proyek dalam memenuhi kewajiban kontraknya. - Menganalisis dan mengajukan kebutuhan untuk menggunakan jasa konsultan atau ahli terkait dengan Proyek TI. - Membuat anggaran tahunan Komite Pengarah TI. - Memfasilitasi penyelesaian masalah dengan pihak terkait TI.

Sebagai tambahan selain tugas dan tanggung jawab di atas, Komite Pengarah TI juga diharapkan untuk dapat menjadi penghubung TI dengan *user* dan manajemen.

Peran dan Fungsi Teknologi Informasi

Hingga saat ini, beberapa proses bisnis di lingkungan Perseroan masih dilakukan secara manual. Melalui pengembangan peran TI berdasarkan *Information Technology Master Plan* (ITMP), ke depan TI akan memiliki peran yang lebih besar dalam mendukung kegiatan operasional, bukan hanya sebagai *support*, namun berkembang menjadi *enablers* bahkan menjadi *business transformer*.

In addition to the above tasks and responsibilities, the IT Steering Committee is also expected to be a bridge between IT and users and management.

Role and Function of Information Technology

To date, some of the business processes at the Company are still conducted manually. Going forward, however, following the expanded role of IT based on the Information Technology Master Plan (ITMP), IT will play a greater role, not only as a support for operational activities but also as a business enabler and even further as a business transformer.

Teknologi Informasi

Information Technology

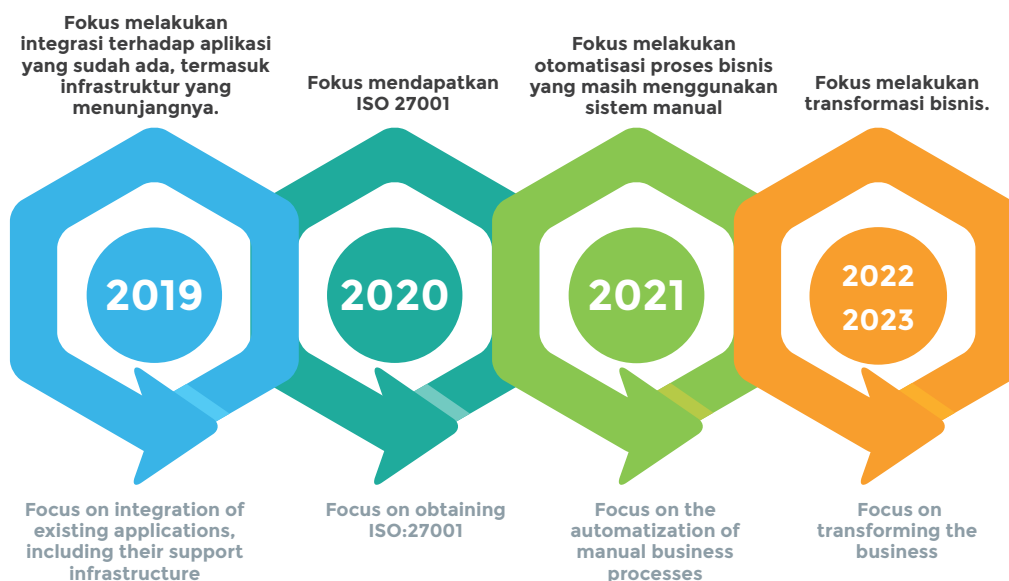
Board Charter/Manual Teknologi Informasi

PII menetapkan IT Policy, SOP dan Instruksi Kerja TI. Manual-manual tersebut berisi, antara lain mengenai kebijakan dan prosedur tentang perencanaan dan operasional TI.

Roadmap Pengelolaan Teknologi Informasi

Dalam mengelola Teknologi Informasi, tantangan yang ada, antara lain belum adanya acuan (*roadmap*, *masterplan*) yang sesuai dengan bisnis perusahaan dalam pelaksanaan tata kelola TI. karena itu, Perseroan menyusun *Information Technology Master Plan* (ITMP) sebagai acuan pengembangan TI.

ITMP yang dijadikan acuan dalam pengembangan teknologi informasi diresmikan pada tahun 2018, namun untuk diimplementasikan pada periode 2019-2023. Tahapannya adalah sebagai berikut:



Struktur Organisasi Pengelolaan Teknologi Informasi

Secara organisasi, pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Perseroan berada di Divisi Corporate Service & Procurement. Dalam Pengelolaan TI bekerja sama dengan Komite Pengarah TI dalam rangka implementasi ITMP.

Dalam pengelolaan TI terdapat bagian-bagian yang bertanggung jawab atas berjalannya tata kelola teknologi informasi, bagian itu adalah: Perencanaan TI, Pengembangan TI, Operasional TI serta bagian sarana dan pendukung.

Information Technology Charter/Manual

PT PII has established IT Policy, SOP and Work Instruction. These manuals comprise, among others, the policies and procedures on IT planning and operation.

Information Technology Management Roadmap

Challenges in the management of Information Technology include, among others, the absence of a roadmap/masterplan of IT governance aligned with the Company's business. Thus, the formulation of the Information Technology Master Plan (ITMP) as a reference for IT development.

The ITMP as the reference for IT development was officially introduced in 2018, for implementation in the 2019-2023 period. The masterplan consists of several phases, as follow:

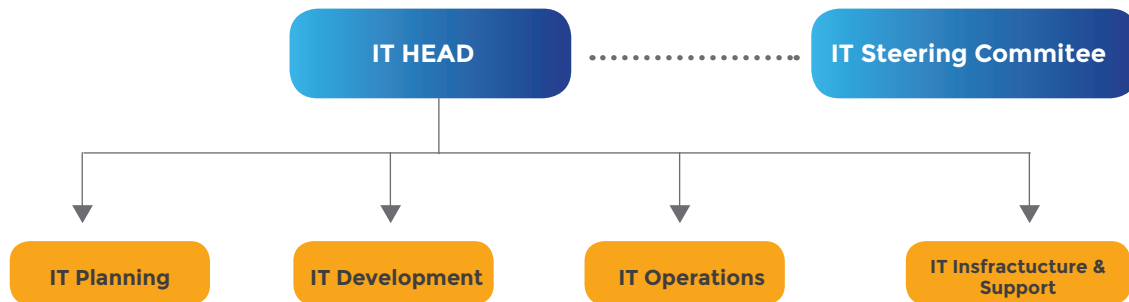
Structure of Information Technology Management

Structurally, the management of information technology within the Company is handled under the Corporate Service & Procurement Division, IT management cooperates with the IT Steering Committee in the implementation of ITMP.

Within IT management, a number of units or sections are responsible for implementation of IT governance, namely IT Planning, IT Development, IT Operations, as well as IT Infrastructure & Support.

IT Organization Unit

IT Organization Unit



Pimpinan Divisi Division Head	Staf Staff	IT Steering Committee IT Steering Committee
Deki S. Wibowo	- Febrian Dwiputra - Redo Pratama - Outsource	M. Wahid Sutopo - Donny Hamdani - Renova Visky - Deki S. Wibowo - Roedy Purwanto

Profil Pimpinan Divisi

Deki S. Wibowo

Vice President Corporate Service

Warga negara Indonesia, saat ini berdomisili di Jakarta. Pertama kali diangkat melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-028/DRK/HC/0118 pada 17 Januari 2018.

Riwayat Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (1999)

Riwayat Pekerjaan

Bergabung dengan PT PII mulai tahun 2015. Sebelumnya adalah Dewan Pengurus Dana Pensiun Semen Cibinong (2015), Indonesia ICS Compliance Head PT Holcim Indonesia (2007-2015), Assistant Manager – Corporate Finance PT Motorola Indonesia (2006-2007), Senior Auditor PricewaterhouseCoopers (2000-2006), Auditor KAP Presetio Utomo (1999-2000).

Sertifikasi SDM di Bidang Teknologi Informasi

Pada 2018, sertifikasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi adalah:

1. CAI (*Certified Audit Internal*)
2. CCNA (*Certified Cisco Network Administrator*)
3. CEH (*Certified Ethical Hacker*)
4. CRMP (*Certified Risk Management Professional*)
5. IT Project Management

Profile of Division Head

Deki S. Wibowo

VP Corporate Service

Indonesian citizen, currently domiciled in Jakarta. First appointed to the position by virtue of Board of Director Decree SK-028/DRK/HC/0118 dated January 17, 2018.

Education Background

Bachelor's degree in Accounting from Universitas Indonesia (1999).

Professional Background

Joined PT PII in 2015. Previously was a member of the Management Council of Pension Fund Semen Cibinong (2015), Indonesia ICS Compliance Head PT Holcim Indonesia (2007-2015), Assistant Manager – Corporate Finance PT Motorola Indonesia (2006-2007), Senior Auditor PricewaterhouseCoopers (2000-2006), Auditor KAP Prasetio Utomo (1999-2000).

Professional Certification of IT Personnel

In 2018, the Company's personnel in IT management possess the following professional certifications:

1. CIA (*Certified Internal Audit*)
2. CCNA (*Certified Cisco Network Administrator*)
3. CEH (*Certified Ethical Hacker*)
4. CRMP (*Certified Risk Management Professional*)
5. IT Project Management



Teknologi Informasi

Information Technology

6. COBIT (*Control Objectives for Information and related Technologies*)
7. VMWare certification related (*Virtual Machine*)
8. Visual studio certification related
9. CERG (*Certified in Enterprise Risk Governance*)
10. CPA (*Certified Public Accountant*)

Pelaksanaan Kegiatan 2018

Pada 2018, pengembangan TI dilakukan melalui sejumlah program, yaitu:

1. Pembuatan ITMP 2019-2023
2. Implementasi DRC (*Disaster Recovery Center*), yakni sistem dan Infrastruktur untuk memitigasi risiko jika terjadi bencana yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis perusahaan.
3. *Claim Management System*, yakni sistem yang digunakan oleh divisi Project Monitoring and Claim Management untuk melakukan *monitoring* proyek-proyek yang telah ditandatangani Perjanjian Penjaminannya.
4. *Land Monitoring System*, yakni sistem yang digunakan oleh divisi Environmental and Social untuk melakukan *monitoring* kesiapan lahan pada suatu Proyek.
5. Penambahan kelengkapan area kerja kantor.

Selain rangkaian penguatan dan pengembangan, hingga tahun 2018 pengelola TI juga telah merancang aplikasi-aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung operasional dan kinerja perusahaan. Adapun daftar aplikasi itu adalah sebagai berikut:

No.	Nama Aplikasi Application	Penjelasan Description	User
1	Letterman	Digunakan untuk administrasi surat menyurat Application used in the administration of correspondences	Sekretaris Secretaries
2	E-Procurement	Digunakan oleh Divisi Procurement untuk melakukan proses pengadaan Application used for procurement processes by Procurement Division	Procurement
3	HRIS	Aplikasi untuk menampilkan informasi HR masing-masing karyawan Application to deliver HR information of individual employees	Human Capital
4	IIGF Portal	Digunakan untuk menampilkan informasi harian di lingkup seputar perusahaan Application to deliver information regarding daily developments at the Company	IT/Corporate Secretary and Communication
5	IIGF Website	Website perusahaan The official company website	Corporate Secretary and Communication
6	Ms. Dynamic Axapta	Aplikasi yang menghubungkan beberapa divisi dalam pertukaran informasi suatu aktivitas/kegiatan operasional perusahaan Application for the exchange of information on operational activities among several work divisions.	Corporate Strategy and Finance
7	iRisk	Aplikasi untuk melakukan proses analisa risiko perusahaan (<i>Corporate Risk Monitoring System</i>) Application for enterprise risk analysis process (Corporate Risk Monitoring System)	Risk Management
9	COO Dashboard	Aplikasi untuk menampilkan <i>Log Activity</i> Divisi Operasi terkait proyek Application for the display of Log Activity of Operational Division related to projects	IT/Direktorat Operasi IT/Director of Operation

6. COBIT (*Control Objectives for Information and related Technologies*)
7. VMWare certification related (*Virtual Machine*)
8. Visual studio certification related
9. CERG (*Certified in Enterprise Risk Governance*)
10. CPA (*Certified Public Accountant*)

Activities in 2018

Activity programs related to IT development in 2018 include the following:

1. Formulation of ITMP 2019-2023
2. Implementation of the Disaster Recovery Center (DRC), a risk mitigation system and infrastructure in the event of a disaster impacting the Company's business activities.
3. Claim Management System, a system used by the Project Monitoring & Claim Management Division in the monitoring of projects covered by a guarantee agreement.
4. Land Monitoring System, a system used by the Environmental & Social Division to monitor the preparations of land in a project.
5. Additions to equipment in office work areas.

In addition to a series of enhancement and development initiatives, IT management in 2018 also designed a number of information technology-based applications in support of the Company's operations and performance. These include:



No.	Nama Aplikasi Application	Penjelasan Description	User
11	Media Monitoring	Aplikasi untuk mendapatkan informasi terkait proyek dari beberapa sumber Application to obtain project-related information from a variety of sources	Corporate Secretary and Communication
12	360 Feedback	Aplikasi penilaian karyawan Application for employee assessment	Human Capital
13	SiPena	Aplikasi untuk menilai kelayakan suatu proyek dari sisi ENS Application to assess project feasibility in terms of ENS	Environment and Social
14	Claim Management System	Aplikasi untuk <i>monitoring</i> proyek pasca <i>signing</i> Application to monitor a project post-signing	Project Monitoring and Claim Management
15	Risk Based Capital System	Aplikasi untuk pengukuran kemampuan kapasitas perusahaan terhadap proyek yang akan dijamin Application to assess the Company's capacity to guarantee a potential project	Corporate Strategy and Finance
16	SiPeta	Aplikasi untuk monitor lahan proyek Application to monitor land use at projects	Environment and Social

Investasi di Bidang Teknologi Informasi

Sepanjang tahun 2018, Perseroan telah menginvestasikan dana lebih dari Rp2 miliar untuk pengembangan teknologi informasi. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan ITMP senilai Rp400 juta, infrastruktur dan sistem DRC senilai Rp850 juta serta penambahan peralatan pendukung area kerja baru senilai Rp1 miliar.

Hasil Evaluasi Teknologi Informasi

Pada tahun 2018, Perseroan melakukan IT *Maturity Assessment* dengan pendekatan metode COBIT. Dari hasil evaluasi tersebut, diketahui bahwa beberapa aspek harus ditingkatkan terutama karena belum adanya ITMP yang sesuai dengan proses bisnis.

Rencana Strategi 2019

Pada tahun 2019, pengelolaan TI akan fokus melakukan integrasi terhadap aplikasi yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan sesuai konsep *System Oriented Architecture* (SOA), termasuk infrastruktur yang menunjangnya. Perencanaan untuk kegiatan tersebut telah disiapkan sejak tahun 2018.

Beberapa aplikasi yang akan dibangun di tahun 2019 antara lain:

1. IT Service Management/Portal

Portal Intranet sebagai alat untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan operasional karyawan secara umum melalui implementasi aplikasi IT Service Management.

2. IIGF Institute E-Learning

Aplikasi untuk meningkatkan pemahaman dan informasi tentang KPBU kepada publik secara *online*.

Investments in the Area of Information Technology

Throughout 2018, the Company has invested funds totalling more than Rp2 billion for the development of information technology. Funding for the development of ITMP amounted to Rp400 million, while Rp850 million was allocated for the DRC system and infrastructure and Rp1 billion for additional equipment in work areas.

Information Technology Evaluation Results

In 2018, the Company conducted an IT Maturity Assessment using the COBIT method. Results of the evaluation indicate a number of areas in need of improvement, and particularly due to the absence of an ITMP that is fully aligned with the business processes.

Strategic Plans for 2019

In 2019, IT management will focus on the integration of existing applications as well as those under development within the System Oriented Architecture (SOA) concept, including the support infrastructure. Planning for these initiatives has already begun in 2018.

Among applications to be developed in 2019 are:

1. IT Service Management/Portal

An intranet portal to facilitate the fulfillment of various operational needs by Company employees through the IT Service Management application.

2. IIGF Institute E-Learning

An online application to disseminate knowledge and information on KPBU to the general public.

05

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion And Analysis

- 124 **Tinjauan Ekonomi dan Bisnis**
Economic and Business Review
- 132 **Tinjauan Operasi per Segmen Usaha**
Performance Review per Business Segment
- 168 **Tinjauan Kinerja Keuangan**
Financial Performance Review
- 180 **Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya**
Other Financial Information Review





Tinjauan Ekonomi dan Bisnis

Economic and Business Review

Pada tahun 2018, perekonomian nasional tumbuh positif, walaupun diwarnai tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

In 2018, the national economy grew positively, despite the pressure on the rupiah exchange rate.

KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL

Selama tahun 2018, perekonomian global dihadapkan pada gejolak ketidakpastian yang ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia, yang secara umum moderat, seperti yang tergambar pada data pertumbuhan ekonomi, aktivitas perdagangan dan investasi yang terjadi di berbagai negara. Menurut laporan *flagship* Grup Bank Dunia, pertumbuhan ekonomiglobalyangmoderatpadatahun2018terutama

GLOBAL ECONOMIC CONDITIONS

During 2018, the global economy was faced with turmoil of uncertainty, which also affected the growth of the world economy, which was generally moderate, as illustrated by the data on economic growth, trade, and investment activities that occurred in various countries. According to the World Bank Group flagship report, the moderate global economic growth in 2018 was mainly due to tensions in trade relations that





disebabkan ketegangan hubungan perdagangan yang tetap tinggi antara negara-negara ekonomi utama, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok.

Di sisi lain, perekonomian di negara-negara berkembang dihadapkan pada kenaikan biaya pinjaman dan investasi yang disebabkan normalisasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral di negara-negara maju. Dampaknya adalah penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang negara-negara berkembang serta meningkatnya volatilitas pasar keuangan global, yang berpotensi meningkatkan premi risiko.

Bahkan dinamika di pasar keuangan juga mendorong keluarnya modal dari negara-negara berkembang. Melemahnya harga komoditas global juga turut memengaruhi kinerja ekspor komoditas utama negara-negara berkembang. Kondisi tersebut berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi beberapa negara berkembang.

Perekonomian AS tahun 2018 diperkirakan tetap tumbuh positif ditopang oleh stimulus kebijakan fiskal dan belanja pemerintah yang ekspansif akibat didorong oleh adanya pemotongan personel *income tax*. Perekonomian Jepang juga tumbuh moderat ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan konsumsi dan investasi serta membaiknya kinerja net ekspor. Namun, aktivitas perekonomian di Eropa justru mengalami perlambatan dari yang diharapkan disebabkan penurunan kinerja ekspor dan konsumsi.

Sementara, negara-negara pasar berkembang diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 yang disebabkan penurunan kinerja perekonomian Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan melambat dipicu penurunan kinerja ekspornya akibat perang dagang dengan AS. Meski demikian, beberapa negara berkembang seperti Brasil, Thailand, India termasuk Indonesia diperkirakan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia juga mengeluarkan laporan serupa. Seperti tertuang dalam Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2018, Bank Sentral menyebutkan bahwa di

remain high between the major economies, especially the United States and China.

On the other hand, the economy in developing countries is faced with increases in borrowing and investment costs due to the normalization of monetary policy carried out by central banks in developed countries. The impact is the strengthening of the US dollar exchange rate against the currencies of developing countries as well as increased volatility in the global financial market, which has the potential to increase the risk premium.

Even the dynamics in the financial markets also encourage capital outflows from developing countries. The weakening of global commodity prices also affected the performance of major commodity exports in developing countries. These conditions have an effect on the slowdown in economic growth in a number of developing countries.

The US economy in 2018 was expected to continue to grow in a positive direction supported by expansive fiscal policy and government spending as a result of cuts in personal income tax. The Japanese economy also grew moderately supported by increased consumption and investment growth, as well as improvement in net export performance. However, economic activity in Europe actually experienced a slowdown than expected due to a decrease in the performance of export and consumption.

Meanwhile, developing market countries are predicted to experience a slowdown in economic growth in 2018 due to a decline in China's economic performance. China's economic growth is predicted to slow down due to a decline in its export performance due to trade wars with the US. However, several developing countries, such as Brazil, Thailand, and India, including Indonesia are predicted to experience an increase in economic growth.

Bank Indonesia also issued a similar report. As stated in the December 2018 Monetary Policy Review, the Central Bank stated that amid the sloping world



Tinjauan Ekonomi dan Bisnis

Economic and Business Review

tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai, ketidakpastian pasar keuangan masih tinggi. Kondisi pasar keuangan tersebut, antara lain dipengaruhi oleh kenaikan *Fed Fund Rate*, serta masih tingginya ketegangan hubungan dagang AS dengan Tiongkok.

KONDISI PEREKONOMIAN NASIONAL

Kondisi-kondisi yang terjadi di pasar global tersebut sedikit banyak ikut mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia. Meskipun begitu, perekonomian Indonesia secara umum masih bergerak positif dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi tahun 2018 mencapai 5,17% (y-o-y), lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 5,07%.

Membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, antara lain dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan memperbaiki berbagai indikator seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, konsistensi pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur juga berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut di antaranya ditopang oleh pertumbuhan pengeluaran konsumsi lembaga non-profit (LNPR), ekspor dan investasi. Komponen pengeluaran konsumsi LNPR tumbuh tertinggi sebesar 9,08%, yang antara lain didorong oleh pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.

Komponen Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 6,48% (y-o-y). Nilai ekspor Indonesia secara kumulatif Januari–Desember 2018 mencapai USD180,06 miliar. Dari sisi komoditas nonmigas, Indonesia berhasil mengekspor sebesar USD162,65 miliar atau tumbuh 6,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Perdagangan nonmigas Indonesia yang meningkat didorong oleh kinerja komoditas ekspor, seperti timah, perhiasan/permata dan bubur kayu/*pulp*.

Kinerja investasi, yang dapat dilihat dari Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), tumbuh sebesar 6,67% (y-o-y). Pertumbuhan tersebut, antara lain didorong kenaikan investasi bangunan sejalan berlanjutnya pembangunan infrastruktur, terutama di sektor transportasi dan komunikasi dan sektor listrik, air dan gas.

economic growth, financial market uncertainty is still high. The financial market conditions, among others, were influenced by the increase in the *Fed Fund Rate*, as well as the still high tension of US trade relations with China.

NATIONAL ECONOMIC CONDITIONS

Conditions in the global market more or less influence the performance of the Indonesian economy. Nevertheless, the Indonesian economy is still moving in a positive direction compared to the previous year in general. According to the Central Statistics Agency (BPS) data, economic growth in 2018 reached 5.17% (y-o-y), better than the previous year, which stood at 5.07%.

The improvement in the national economy was partly due to the ability of the government to control inflation and improve the various indicators, such as job creation and reduction in poverty. In addition, the consistency of the government in supporting infrastructure development also plays a major role in economic growth.

In terms of expenditure, the growth was partly supported by the growth in non-profit consumption (LNPR), export, and investment expenditures. The LNPR consumption expenditure grew the highest by 9.08%, which was partly driven by the implementation of the democratic party in Indonesia.

The component of Export of Goods and Services grew by 6.48% (y-o-y). The cumulative value of Indonesian export from January to December 2018 reached USD180.06 billion. In terms of non-oil and gas commodities, Indonesia successfully exported USD162.65 billion, or a growth of 6.25% compared to the previous year. The increase in Indonesia's trade of non-oil and gas was driven by the performance of export commodities, such as tin, jewellery/gems, and pulp.

Investment performance, which can be indicated from the Gross Fixed Capital Formation (PMTB), grew by 6.67% (y-o-y). The growth was partly due to the increase in construction investment, in line with the ongoing infrastructure development, particularly in the transportation and communication sectors, as well as in the utilities sector.



Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2018 didorong oleh kinerja Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 8,99%, diikuti Jasa Perusahaan sebesar 8,64% dan Jasa Kesehatan sebesar 7,13%.

Pertumbuhan ekonomi yang membaik juga didukung oleh inflasi yang terjaga. Pada tahun 2018, inflasi mencapai 3,13%, di bawah tahun 2017 yang sebesar 3,61%.

Perbaikan kinerja ekonomi nasional juga ditopang oleh kinerja kebijakan fiskal yang membaik. Hingga akhir 2018, penerimaan pendapatan negara dan hibah telah terealisasi sebesar Rp1.924,3 triliun atau mencapai 102,5% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2018. Sementara, realisasi belanja negara sampai dengan akhir November 2018 mencapai Rp1.942,93 triliun atau 87,49% dari pagu APBN 2018. Realisasi belanja pemerintah pusat sendiri mencapai Rp1.225,86 triliun atau tumbuh sebesar 16,78% jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, perekonomian Indonesia sempat goyah akibat nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang melemah tajam hingga menembus Rp15.000 per dolar, melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2018. Pelemahan tersebut disebabkan adanya tekanan penguatan dolar AS yang terjadi secara luas yang didorong semakin tegangnya hubungan dagang AS dengan Tiongkok, tekanan yang dialami pasar keuangan Turki dan Argentina serta menguatnya ekspektasi percepatan normalisasi kebijakan moneter di AS.

TINJAUAN SEKTOR INFRASTRUKTUR

Untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah melihat ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu kunci meningkatkan daya saing nasional dan mempercepat gerak roda ekonomi nasional yang berujung pada kesejahteraan rakyat yang merata. Sebagai sebuah negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang sangat besar dengan penyebaran ekonomi yang tak merata, merupakan tantangan berat dan kompleks yang harus dihadapi Pemerintah untuk dapat memangkas waktu distribusi dan biaya logistik, meningkatkan aksesibilitas transportasi dan mobilitas, dan memastikan pemerataan layanan infrastruktur dasar pada rakyat utamanya pada daerah-daerah

In terms of business, Indonesia's economic growth in the third quarter of 2018 was driven by the performance of Other Services, which grew by 8.99%, followed by Corporate Services by 8.64%, and Health Services by 7.13%.

Improving economic growth was also supported by controlled inflation. In 2018, the inflation rate reached 3.13%, below the inflation in 2017, which stood at 3.61%.

Improvement in the national economic performance was also supported by better fiscal policy performance. Up to the end of 2018, state revenues and grants have been realized in the amount of Rp1,924.3 trillion, or reaching 102.5% of the established 2018 State Budget target. Meanwhile, the realization for state expenditure up to November 2018 reached Rp1,942.93 trillion, or 87.49% of the 2018 State Budget target. The realization of the central government expenditure reached Rp1,225.86 trillion, growing by 16.78%, compared to the realization in the previous period.

However, the Indonesian economy was faltered as a result of the sharply weakening of the Rupiah against the US dollar, reaching Rp15,000 per dollar, exceeding the target set in the 2018 State Budget. The weakening was due to the widespread pressure of the US dollar driven by increasingly tense trade relations between the US and China, the pressure experienced by the Turkish and Argentinian financial markets as well as the strengthening expectations of the monetary policy normalization acceleration in the US.

INFRASTRUCTURE SECTOR REVIEW

To realize the 2015-2019 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), the government considers the availability of infrastructure as one of the keys to increase national competitiveness and accelerate the national economy, ultimately leading to evenly distributed welfare of the people. As an archipelago with a very large population with uneven economic distribution, the government faces a difficult and complex challenge to be able to cut distribution time and logistical costs, improve access for transportation and mobility, and ensure equal distribution of basic infrastructure services to communities, particularly in remote and undeveloped areas. The availability of Indonesian infrastructure is still lagging behind other



Tinjauan Ekonomi dan Bisnis

Economic and Business Review

yang terpencil dan belum tumbuh. Ketersediaan infrastruktur Indonesia pun masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain yang setara untuk dapat memastikan daya saing Indonesia ditengah persaingan ekonomi global.

Untuk itu untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur nasional tersebut, Pemerintah telah merencanakan program pengembangan dan perbaikan infrastruktur dalam RPJMN yang menasar wilayah yang penyediaan infrastrukturnya masih kurang seperti wilayah Indonesia Timur. Fokus pertama adalah mentargetkan pada pembangunan dan penguatan infrastruktur dasar untuk mempermudah aksesibilitas transportasi beberapa wilayah melalui proyek-proyek jalan baik jalan nasional dan jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Berikutnya, sesuai komitmen *Sustainable Development Goal*, pemerintah juga merencanakan pengembangan infrastruktur sosial (*social infrastructure*) untuk layanan air minum, kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya kepada masyarakat khususnya untuk daerah-daerah yang masih minim layanan air minum, kesehatan, pendidikan dan sosial. Pemenuhan penyediaan infrastruktur sosial ini menjadi fokus tugas pemerintah khususnya pemerintah-pemerintah daerah.

Kebutuhan akan penyediaan infrastruktur yang masif ini memerlukan ketersediaan dana yang tidak sedikit, sementara APBN dan APBD Pemerintah sangat terbatas untuk mendanai sehingga Pemerintah berupaya untuk mengembangkan alternatif pembiayaan infrastruktur salah satunya dengan menarik partisipasi investasi swasta dan pembiayaan kreditur. Namun besarnya nilai investasi, panjangnya waktu pengembalian investasi, tingkat pengembalian yang relatif rendah dibandingkan persepsi risiko yang dihadapi membuat investasi di infrastruktur nasional dimata investor dan perbankan kurang menarik.

Menyiasati kondisi tersebut, Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan lain secara aktif mengembangkan strategi, skema pembiayaan berikut kebijakan yang kondusif salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/ *Public Private Partnership* (PPP).

countries Thus this infrastructure expansion is being conducted to ensure Indonesia's competitiveness amid global economic competition.

Therefore, to encourage the acceleration of national infrastructure provision, the government has planned the infrastructure development and improvement programs in the RPJMN, targeting areas where the infrastructure is still lacking, such as Eastern Indonesia. The first focus is to target the construction and strengthening of basic infrastructure to facilitate access for transportation in several regions through road projects, both national roads and toll roads, airports, and ports. Next, in accordance with the Sustainable Development Goal commitments, the government also plans to develop social infrastructure, such as drinking water, health, education, and other social services to the community, especially for areas that still lack drinking water, health, educational, and social services. The fulfillment of the provision of social infrastructure is the focus of the government's task, particularly regional governments.

The need for massive infrastructure provision requires the availability of funds that are not small, while the State Budget and Regional Budget are very limited in terms of funding, requiring the government to seek and develop alternative infrastructure financing, one of which is by attracting private investment and creditor financing. However, the magnitude of the investments, the length of return on investments, the relatively low rate of return compared to the perceived risk faced makes investment in national infrastructure less attractive for investors and banks.

To address these conditions, the government with all other stakeholders are actively developing strategies, financing schemes and favorable policies, one of which is through the Public Private Partnership (PPP) scheme.



Beberapa target utama yang telah ditetapkan terkait peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU yaitu:

1. Implementasi KPBU sebagai pendekatan pembangunan infrastruktur.
2. Ketersediaan dukungan keuangan dalam memenuhi target infrastruktur melalui penyediaan pembiayaan infrastruktur alternatif di luar pendanaan pemerintah melalui skema KPBU dan pembiayaan kreatif lainnya.
3. Efisiensi manajemen infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah atau oleh perusahaan.
4. Percepatan proses pengambilan keputusan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Untuk mencapai target tersebut, dibentuklah tim dan program kerja KPBU di tingkat Kementerian sektor yaitu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Kementerian Perhubungan menyiapkan proyek-proyek yang siap untuk dikembangkan dengan KPBU berkoordinasi dengan Bappenas. Kementerian Keuangan memberikan berbagai kebijakan dukungan fiskal melalui *Viability Gap Fund* (VGF) & skema *Availability Payment* (AP) dan membantu PJPB untuk meningkatkan kesiapan proyeknya melalui fasilitas Project Development Facility (PDF). Kementerian Keuangan juga menyiapkan BUMN-BUMN di bawah Kementerian Keuangan salah satunya PT PII sebagai instrumen fiskal Kementerian Keuangan untuk memberikan solusi bagi PJPB dan menjawab kendala swasta dan perbankan untuk aktif berpartisipasi pada proyek infrastruktur nasional. BUMN lainnya yaitu PT SMI dibentuk untuk memberikan solusi dan skema pembiayaan untuk proyek infrastruktur.

Sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan, PT PII memiliki mandat utama untuk memberikan penjaminan Pemerintah untuk proyek-proyek dengan skema KPBU. Ketersediaan penjaminan PT PII dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi pihak swasta atas risiko-risiko atas pemenuhan kewajiban Pemerintah yang dapat berpotensi mengganggu pengembalian investasi swasta dari proyek tersebut selama masa konsesi. Kehadiran penjaminan PT PII sepanjang masa konsesi juga meningkatkan *bankability* proyek di mata perbankan sehingga dapat menurunkan biaya bunga yang ditanggung

Some of the main targets that have been established in relation to increasing the effectiveness and efficiency of financing infrastructure under the PPP schemes are:

1. Implementation of PPP as an approach to infrastructure development.
2. Availability of financial support in meeting infrastructure targets through the provision of alternative infrastructure financing outside of government funding through PPP schemes and other creative financing.
3. Efficiency of infrastructure management and improvement on the quality of infrastructure services provided by the government or by the companies.
4. Accelerating the decision making process and improving the capacity of human resources.

To achieve these targets, a PPP team and work program was established at the Ministry level, among others in the Ministry of Public Works and Public Housing (KemenPUPR) and the Ministry of Transportation to prepare projects that are ready to be developed under the PPP scheme in coordination with Bappenas. The Ministry of Finance provides various fiscal support policies through the Viability Gap Fund (VGF) & Availability Payment (AP) schemes and assists the CA to improve project readiness through the Project Development Facility (PDF). The Ministry of Finance has also prepared SOEs under the Ministry of Finance, one of which is PT PII as the Ministry of Finance's fiscal instrument to provide solutions for the CA and to address private and banking constraints to actively participate in national infrastructure projects. Another SOE, namely PT SMI was established to provide financing solutions and schemes for infrastructure projects.

As an SOE under the Ministry of Finance, PT PII has a main mandate to provide government guarantees for projects under the PPP scheme. The availability of PT PII guarantee is intended to provide certainty for the private sector on the risks of fulfilling government obligations that might potentially disrupt the return of private investment from the project during the concession period. The guarantee of PT PII throughout the concession period also increased the bankability of the project in the perspectives of banks, subsequently reducing the interest costs borne by investors. In



Tinjauan Ekonomi dan Bisnis

Economic and Business Review

investor. Dalam memberikan penjaminan, PT PII dapat melakukan *co-guarantee* bersama dengan Lembaga Multilateral dan Kementerian Keuangan untuk menjamin proyek berskala besar.

PT PII dari awal turut aktif membantu meningkatkan kesiapan dan kapasitas PJPK dalam screening dan perencanaan proyek untuk skema KPBU khususnya di Kementerian teknis dan Pemerintah Daerah. Sejak tahun 2018, PT PII juga melaksanakan mandat baru untuk penyiapan proyek dan pendampingan transaksi PJPK untuk proyek berskema KPBU melalui penugasan PDF Kementerian Keuangan. Melalui PDF tersebut, PJPK dapat secara optimal menyiapkan dan memastikan proyek-proyek siap ditawarkan kepada investor dan perbankan. Pemerintah juga telah membentuk Kantor Bersama KPBU (*PPP Joint Office*) yang beranggotakan lintas instansi strategis yaitu Bappenas, Kemenkeu, Kemenkoekonomi, Kemendagri, LKPP, BKPM, dan PT PII, untuk menjawab masalah *bottleneck* dari proses KPBU proyek-proyek yang sedang dalam proses.

Selain mendorong pembiayaan melalui skema KPBU, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga menyiapkan instrumen kebijakan untuk memfasilitasi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur khusus yang dikembangkan melalui penugasan kepada BUMN. Hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi adanya akses pembiayaan BUMN dari lembaga-lembaga multilateral menurunkan biaya dana pembiayaan proyek. Melalui kebijakan tersebut, PT PII melaksanakan mandat baru untuk memberikan penjaminan bersama Kementerian Keuangan atas pinjaman BUMN kepada lembaga multilateral. Melalui instrumen penjaminan Kementerian Keuangan dan PT PII tersebut, pinjaman BUMN tersebut dikenakan suku bunga pembiayaan yang mendekati dengan suku bunga *sovereign* Pemerintah Indonesia sehingga secara signifikan mengurangi biaya investasi infrastruktur.

providing guarantees, PT PII allowed to do co-guarantee together with Multilateral Institutions and the Ministry of Finance to guarantee large-scale projects.

From the beginning, PT PII actively assists to improve the readiness and capacity of the CA in screening and planning projects under the PPP scheme, especially in technical ministries and regional governments. Since 2018, PT PII has also carried out a new mandate to assist CA in project preparation and transaction advisory for projects under the PPP scheme through PDF assignments from the Ministry of Finance. Through the PDF, the CA is able to optimally prepare and ensure that the projects are ready to be offered to investors and banks. The government has also established a PPP Joint Office with members across strategic agencies, namely Bappenas, Ministry of Finance, Ministry of Economic Coordinator, Ministry of Home Affairs, National Procurment Agency (LKPP), Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM), and PT PII, to answer the bottleneck issues of PPP projects in process.

In addition to encouraging financing through the PPP scheme, the government through the Ministry of Finance also prepares policy instruments to facilitate the financing of special infrastructure projects developed through assignments to SOEs. This is intended to facilitate access to state-owned financing from multilateral institutions to reduce the cost of project funding. Through this policy, PT PII implemented a new mandate to provide a joint guarantee with the Ministry of Finance for SOE loans to multilateral institutions. Through the Ministry of Finance and PT PII guarantee instrument, the SOE loans are subject to financing interest rates that are close to the Indonesian government's sovereign interest rate, significantly reducing the infrastructure investment costs.



Melalui berbagai pendekatan instrumen dan kebijakan yang diterapkan Pemerintah tersebut, Pemerintah secara aktif dapat mengembangkan proyek-proyek infrastruktur yang tidak hanya memiliki nilai komersial tinggi seperti jalan tol, tapi juga proyek-proyek dengan resiko tinggi dan nilai kelayakan yang marginal seperti proyek penyediaan air minum, pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya yang banyak dikembangkan oleh Pemerintah Daerah melalui kombinasi dukungan fiskal Pemerintah Pusat, penjaminan Pemerintah dan skema KPBU. Adapun untuk proyek-proyek yang memiliki nilai kelayakan yang kurang namun memiliki manfaat sosial ekonomi yang besar seperti di daerah Papua dan lainnya, akan ditanggung oleh program APBN.

Penerapan alternatif skema pembiayaan untuk infrastruktur tersebut dapat mengurangi beban APBN untuk lebih optimal dialokasikan untuk membiayai kebutuhan proyek di pinggiran Indonesia seperti di Indonesia Timur dan Papua, dan untuk pelaksanaan program Pemerintah memperluas sebaran jaring program kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Through a variety of instrument approaches and policies implemented by the government, the government can actively develop infrastructure projects that not only have high commercial value such as toll roads, but also projects with high risk and marginal feasibility values, such as drinking water supply, education, hospitals and other projects that have been developed by regional governments through a combination of Central Government fiscal support, government guarantees and PPP schemes. While projects that have low feasibility values with large socio-economic benefits, such as in Papua and others will be borne by the State Budget program.

The implementation of alternative financing schemes for these infrastructure developments will reduce the burden on the State Budget to be more optimally allocated to finance the needs of projects on the outskirts of Indonesia, such as in East Indonesia and Papua, and for the implementation of the government program to expand the distribution of health, education, and community welfare programs.



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Performance Review per Business Segment

Pelaksanaan mandat baru PT PII, yaitu penjaminan terhadap proyek infrastruktur non KPBU serta pendampingan dan penyiapan transaksi proyek KPBU telah terlaksana dengan baik sepanjang tahun 2018.

The implementation of a new mandate for PT PII, namely the guarantee of non-PPP infrastructure projects as well as assistance and preparation of PPP project transactions has been well implemented throughout 2018.





PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) didirikan pemerintah dengan tujuan untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur dalam skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan melakukan dua kegiatan utama, yaitu segmen usaha penjaminan dan segmen usaha pengelolaan dana.

Sejak tahun 2018, Perseroan mendapatkan mandat baru terkait dengan penjaminan – segmen usaha yang telah dijalankan, yaitu penjaminan atas pinjaman Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut penjaminan Non-KPBU. Hal itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 101/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur. Dengan mandat tersebut, Perseroan dapat melakukan penjaminan untuk proyek yang dilaksanakan sendiri oleh BUMN.

Penugasan lain yang terbit pada tahun 2018 adalah pendampingan dan penyiapan transaksi untuk proyek KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Mandat tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) was established by the government with the objective to provide guarantees for infrastructure projects through the Private Public Partnerships (PPP) scheme as an effort to accelerate infrastructure development. To achieve this goal, the Company conducts two main activities, namely the business guarantee segment and the fund management business segment.

Since 2018, the Company has obtained a new mandate related to guarantees - business segments that have been implemented, namely guarantees of loans for State-Owned Enterprises (SOEs) called Non-PPP guarantees. This was stipulated through the Minister of Finance Regulation No. 101/2018 on the Procedure and Implementation of Joint Government Guarantee or Through an Infrastructure Guarantee Business Entity on Risk of Default by the State-Owned Enterprises Conducting Loans and/or Issuance of Bonds to Fund the Provision of Infrastructure. With this mandate, the Company is able to guarantee projects carried out by SOEs themselves.

Another assignment that was issued in 2018 is the assistance and preparation of transactions for PPP projects in the provision of infrastructure. The mandate was stipulated through Minister of Finance Regulation No. 73/PMK.08/2018.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Performance Review per Business Segment

SEGMENT USAHA UTAMA

Segmen Usaha Penjaminan

Pada awal berdiri, segmen usaha PT PII di bidang penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema KPBU yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, ada 19 sektor proyek infrastruktur yang dapat diberikan penjaminan oleh Perseroan.

MAIN BUSINESS SEGMENT

Guarantee Business Segment

At the beginning of its establishment, PT PII's business segment in the field of guarantee for government infrastructure projects developed with the PPP scheme that in accordance with Presidential Regulation No. 38 of 2015 on Government and Business Entity Cooperation in Infrastructure Provision. Based on the Presidential Regulation, there are 19 infrastructure project sectors that can be granted by the Company.

Air Minum Clean Water	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Central Waste Water System	Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Local Waste Water System	Minyak dan Gas Bumi dan Energy Terbarukan Oil and Gas, and Renewable Energy
Konservasi Energi Energy Conservation	Fasilitas Perkotaan Urban Facilities	Pariwisata Tourism	Kesehatan Health Care
Lembaga Pemasyarakatan Correctional Facilities	Perumahan Rakyat Public Housing	Transportasi Transportation	Jalan Roads
Sumber Daya Air dan Irigasi Water Resources and Irrigation	Sistem Pengelolaan Persampahan Waste Management System	Ketenagalistrikan Electricity	Telekomunikasi dan Informatika Telecommunications and Information
Fasilitas Pendidikan Educational Facilities	Sarana dan Prasarana Olahraga Serta Kesenian Sport and Arts Facilities	Kawasan Region	



Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009, PT PII mendapatkan perluasan mandat untuk dapat memberikan penjaminan atas proyek Non KPBU. Perluasan mandat tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur yang mulai berlaku di tahun 2018.

Penugasan tersebut menunjukkan bahwa PT PII berperan dalam menjalankan kebijakan satu pelaksana bagi pemerintah dalam mengevaluasi proyek infrastruktur, menstruktur penjaminan, dan memproses klaim. Kebijakan satu pelaksana adalah kebijakan pemerintah yang menugaskan PT PII sebagai BUPI yang beroperasi sebagai suatu entitas "*single window*" dalam melakukan proses penilaian (*appraisal*), dan penyusunan struktur (*structuring*) untuk semua penjaminan yang diberikan Pemerintah Indonesia pada proyek infrastruktur yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan konsistensi dalam proses pemberian penjaminan serta pengelolaan klaim. Dengan demikian, kepercayaan investor akan meningkat sehingga turut terlibat dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Keberhasilan dari usaha penjaminan adalah upaya Perseroan untuk memfasilitasi serta mendorong keberhasilan transaksi bagi PJPK dalam hal ini Kementerian, BUMN dan Pemerintah Daerah melalui penyediaan penjaminan untuk proyek KPBU yang baik. Perseroan dapat meningkatkan kepastian keberhasilan transaksi dengan pihak investor yang berujung pada kepastian pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan efisien.

Furthermore, based on Government Regulation No. 50 of 2016 on the Amendment to Government Regulation No. 35 of 2009, PT PII has an expansion of mandate to be able to provide guarantees for Non-PPP projects. The expansion of the mandate was followed up with the issuance of the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 101 of 2018 on the Procedure and Implementation of Joint Government Guarantee or Through an Infrastructure Guarantee Business Entity on Risk of Default by the State-Owned Enterprises Conducting Loans and/or Issuance of Bonds to Fund the Provision of Infrastructure, which came into force in 2018.

The assignment demonstrates that PT PII has a role in conducting Single Window Policy for the Government in evaluating infrastructure projects, structuring the guarantees, and processing claims. Single Window Policy is the government policy that assigns PT PII as BUPI, which operates as a "single window" entity in conducting appraisal processes, and structuring for all guarantees provided by the Indonesian Government on infrastructure projects submitted by the Contracting Agency (CA). The policy aims to realize transparency and consistency in the process of guarantee provision and claims management. Thus, investor confidence will increase, subsequently making them involved in the construction of infrastructure projects in Indonesia.

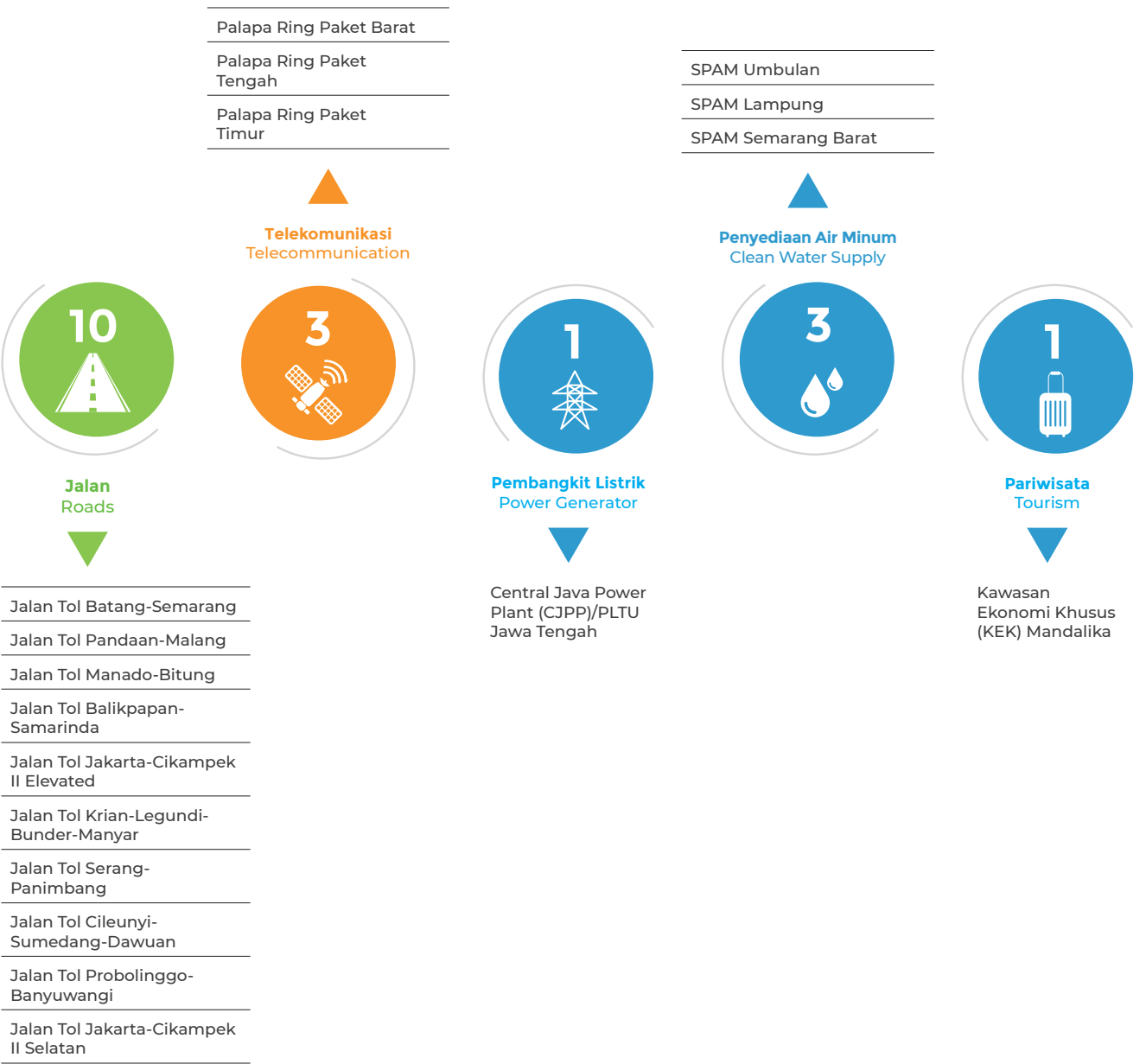
The success of the guarantee business is the Company's efforts to facilitate and encourage the success of transactions for CA's in this case Ministries, SOEs, and Local Governments through the provision of guarantees for good PPP projects. The Company is able to increase the certainty of successful transaction with investors that lead to the certainty of quality and efficient infrastructure development.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Performance Review per Business Segment

Sampai akhir tahun 2018, PT PII telah menjamin 18 proyek pembangunan infrastruktur yaitu: 10 proyek sektor jalan, 3 proyek sektor telekomunikasi, 1 proyek sektor ketenagalistrikan, 3 proyek sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan 1 proyek sektor pariwisata. Rincian proyek-proyek tersebut dijelaskan di bawah ini.

Up to the end of 2018, PT PII has guaranteed 18 infrastructure development projects, namely: 10 road sector projects, 3 telecommunication sector projects, 1 electricity sector project, 3 projects in the Clean Water Supply System (SPAM) sector, and 1 tourism sector project. Details of the projects are described below.





Kapasitas Penjaminan

PT PII menyadari bahwa kemampuan modal sangat menentukan kapasitas untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek KPBU infrastruktur. Kecukupan atas kapasitas penjaminan menjadi prioritas bagi pemerintah, karena berpengaruh terhadap kredibilitas PT PII di mata investor potensial dalam pengembangan proyek infrastruktur.

Kapasitas PT PII untuk melakukan penjaminan proyek-proyek infrastruktur masih sepenuhnya mengandalkan ekuitas perusahaan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disetor penuh ke dalam modal saham Perseroan. PT PII dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga multilateral untuk memberikan penjaminan bersama.

Hingga akhir tahun 2018, perkiraan nilai investasi 18 proyek yang dijamin oleh PT PII mencapai Rp188,1 triliun. Sedangkan nilai penjaminannya Rp38,9 triliun. Dengan ekuitas PT PII sebesar Rp10,5 triliun, maka rasio penjaminan terhadap ekuitas (*gearing ratio*) adalah sebesar 3,7x.

Guarantee Capacity

PT PII recognizes that capital capability dominantly determines its capacity to provide guarantees for PPP infrastructure projects. The adequacy of guarantee capacity is a priority for the Government as it affects the credibility of PT PII in the perspectives of potential investors for the development of infrastructure projects.

The capacity of PT PII to guarantee infrastructure projects still fully relies on its equity in the form of Government Investment (PMN) derived from the State Budget (APBN), which was fully paid into the share capital of the Company. PT PII can also cooperate with the Government of Indonesia as well as with multilateral institutions in the provision of joint guarantee facilities.

Up to the end of 2018, the estimated investment value of 18 projects guaranteed by PT PII reached Rp188.1 trillion. While the guarantee value amounted to Rp38.9 trillion. With PT PII's equity of Rp10.5 trillion, the gearing ratio is 3.7x.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Performance Review per Business Segment

Portofolio Penjaminan

Nilai Proyek





JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA

Balikpapan-Samarinda
Toll Road

99,3 Km

Rp 9,9 triliun

PALAPA RING PAKET TENGAH
Palapa Ring Central Package

1.797 Km Kabel Laut

1.289 Km Kabel Darat

7 Tower

Rp 1,1 triliun

JALAN TOL MANADO-BITUNG

Manado-Bitung Toll Road

39,9 Km

Rp 5,1 triliun

PALAPA RING PAKET TIMUR
Palapa Ring East Package

4.508 Km Kabel Laut

2.379 Km Kabel Darat

52 Tower

Rp 5,1 triliun

TOTAL NILAI PROYEK
Total Project Value

Rp 188,1 triliun

SPAM SEMARANG BARAT
Semarang Barat Clean
Water Supply System

1.050 Lt/Second

Rp 417 miliar

SPAM UMBULAN
Umbulan Clean Water
Supply System

4000 Lt/Second

Rp 2,1 triliun

JALAN TOL KRIAN-LEGUNDI-BUNDER-MANYAR

Krian-Legundi-Bunder-
Manyar Toll Road

38,3 Km

Rp 12,2 triliun

JALAN TOL PROBOLINGGO-BANYUWANGI

Probolinggo-Banyuwangi Toll Road

172,9 Km

Rp 23,4 triliun



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Performance Review per Business Segment

Ringkasan Status Penjaminan

Summary of Guarantee Status

No	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek Project Value (Rp Miliar Billion)	Durasi Penjaminan (Setelah Commercial Operation Date- COD) Guarantee Period (Following COD)	Efektif Penjaminan Effective Date of Guarantee	Tahapan Proyek Project Status	Financial Close
INFRASTRUKTUR JALAN ROAD INFRASTRUCTURE							
1	Jalan Tol Batang-Semarang	Terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan panjang 74,9 Km	11.046	15 Tahun	20 Juni 2016	Konstruksi	Mencapai Financial Close
	Batang – Semarang Toll Road	Located in Central Java Province with 74.9 km in length		15 Years	June 20, 2016	Construction	Financial Close
2	Jalan Tol Pandaan-Malang	Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan panjang 37,6 Km	5.970	15 Tahun	3 Oktober 2016	Konstruksi	Mencapai Financial Close
	Pandaan – Malang Toll Road	Located in East Java Province with 37.6 km in length		15 Years	October 3, 2016	Construction	Financial Close
3	Jalan Tol Manado-Bitung	Terletak di Provinsi Sulawesi Utara dengan panjang 39,9Km	5.123	15 Tahun	6 Oktober 2016	Konstruksi	Mencapai Financial Close
	Manado – Bitung Toll Road	Located in North Sulawesi Province with 39.9 km in length		15 Years	October 6, 2016	Construction	Financial Close
4	Jalan Tol Balikpapan-Samarinda	Terletak di Provinsi Kalimantan Timur dengan panjang total 99,35 Km	9.973	15 Tahun	2 Desember 2016	Konstruksi	Mencapai Financial Close
	Balikpapan – Samarinda Toll Road	Located in East Kalimantan with 99.35 km in length		15 Years	December 2, 2016	Construction	Financial Close
5	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated	Terletak di Provinsi Jawa Barat dengan total panjang 36,4 Km	16.233	15 Tahun	8 Mei 2017	Konstruksi	Turnkey/ CPF
	Jakarta – Cikampek II Elevated Toll Road	Located in West Java Province with 36.4 km in length		15 Years	May 8, 2017	Construction	
6	Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar	Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan total panjang 38,3 Km	12.224	15 Tahun	11 Desember 2017	Konstruksi	Turnkey/ CPF
	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder-Manyar Toll Road	Located in East Java Province with 38.3 km in length		15 Years	December 11, 2017	Construction	
7	Jalan Tol Serang-Panimbang	Terletak di Provinsi Banten dengan total 83,7 Km	5.330	15 Tahun	17 November 2017	Konstruksi	-
	Serang – Panimbang Toll Road	Located in Banten Province with 83.7 km in length		15 Years	November 17, 2017	Construction	
8	Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan	Terletak di Provinsi Jawa Barat dengan total panjang 60,1 Km	8.409	15 Tahun	-	Konstruksi	Turnkey/ CPF
	Cileunyi – Sumedang – Dawuan Toll Road	Located in West Java Province with 60.1 km in length		15 Years		Construction	

**Ringkasan Status Penjaminan**
Summary of Guarantee Status

No	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek Project Value (Rp Miliar Billion)	Durasi Penjaminan (Setelah Commercial Operation Date- COD) Guarantee Period (Following COD)	Efektif Penjaminan Effective Date of Guarantee	Tahapan Proyek Project Status	Financial Close
9	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan panjang ruas jalan sekitar 172,9 Km	23.391	15 Tahun	-	Pra Konstruksi	-
	Probolinggo – Banyuwangi Toll Road	Located in East Java Province with 172.9 km in length		15 Years		Pre Construction	
10	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan	Terletak di Provinsi Jawa Barat sepanjang 64 Km	14.691	15 Tahun	-	Pra Konstruksi	-
	Jakarta – Cikampek II Selatan Toll Road	Located in West Java Province with 64 km in length		15 Years		Pre Construction	
INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE							
11	Palapa Ring Paket Barat	Proyek telekomunikasi dengan sistem serat optik kabel darat dan laut di daerah bagian barat Indonesia yang berada di 5 Kabupaten/Kota dengan panjang kabel laut 1.711 Km dan kabel darat 427 Km	1.229	12 Tahun	10 November 2016	Operasi	Mencapai Financial Close
	Palapa Ring West Package	Telecommunication project with land and sea cabling fiber optic system in the western part of Indonesia, located in 5 Districts/Cities with 1,711 km of sea cable and 427 km of land cable		12 Years	November 10, 2016	Operation	Financial Close
12	Palapa Ring Paket Tengah	Proyek telekomunikasi dengan sistem serat optik kabel darat dan laut di daerah bagian tengah Indonesia yang berada di 17 kabupaten/kota dengan panjang kabel laut 1.797 Km, kabel darat 1.289 Km dan 7 Tower	1.093	12 Tahun	30 Desember 2016	Operasi	Mencapai Financial Close
	Palapa Ring Central Package	Telecommunication project with land and sea cabling fiber optic system in the central part of Indonesia, located in 17 Districts/Cities with 1,797 km of sea cable, 1,289 km of land cable and 7 towers		12 Years	December 30, 2016	Operation	Financial Close
13	Palapa Ring Paket Timur	Proyek telekomunikasi dengan sistem serat optik kabel darat dan laut di daerah bagian timur Indonesia yang berada di 35 Kabupaten/Kota dengan panjang kabel laut 4.508 Km, kabel darat 2.379 Km dan 52 Tower	5.088	12 Tahun	29 Maret 2017	Konstruksi	Mencapai Financial Close
	Palapa Ring East Package	Telecommunication project with land and sea cabling fiber optic system in the eastern part of Indonesia, located in 35 Districts/Cities with 4,508 km of sea cable, 2,379 km of land cable and 57 towers		12 Years	March 29, 2017	Construction	Financial Close



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Performance Review per Business Segment

Ringkasan Status Penjaminan

Summary of Guarantee Status

No	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek Project Value (Rp Miliar Billion)	Durasi Penjaminan (Setelah Commercial Operation Date- COD) Guarantee Period (Following COD)	Efektif Penjaminan Effective Date of Guarantee	Tahapan Proyek Project Status	Financial Close
INFRASTRUKTUR PEMBANGKIT LISTRIK POWER PLANT INFRASTRUCTURE							
14	Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Jawa Tengah	Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara dengan kapasitas 2x1000 MW yang terletak di Desa Ujungnegoro, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	61.456	21 Tahun	6 Juni 2016	Konstruksi	sudah
	Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Jawa Tengah	Coal-fired Power Plant with 2x1000 MW capacity located in Desa Ujungnegoro, Batang Regency, Central Java Province		21 Years	June 6, 2016	Construction	completed
INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN AIR MINUM CLEAN WATER SUPPLY INFRASTRUCTURE							
15	SPAM Umbulan	Proyek penyediaan air minum dengan kapasitas air 4000 l/detik dan panjang pipa transmisi 92,3 km dari Umbulan ke kota Surabaya, Gresik, Sidoharjo, dan Pasuruan	2.057	15 Tahun	10 Februari 2017	Konstruksi	sudah
	SPAM Umbulan	Drinking water supply system with capacity of 4,000 l/ second and transmission pipe length of 92.3 km from Umbulan to Surabaya, Gresik, Sidoharjo, and Pasuruan		15 Years	February 10, 2017	Construction	completed
16	SPAM Lampung	Proyek penyediaan air minum dengan kapasitas air 750 l/detik dan panjang pipa transmisi 22 km.	750	15 Tahun	14 Agustus 2018	Konstruksi	sudah
	SPAM Lampung	Drinking water supply project with 750 l/sec capacity and 22 km pipe length.		15 Years	August 14, 2018	Construction	completed
17	SPAM Semarang Barat	Proyek penyediaan air minum dengan kapasitas 1050 l/detik.	417	15 Tahun	-	Pra Konstruksi	-
	SPAM West Semarang	Drinking water supply project with 1050 l/sec capacity.		15 Years		Pre Construction	
INFRASTRUKTUR PARIWISATA TOURISM INFRASTRUCTURE							
18	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika	Pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika – ITDC	USD316,5 Juta (nilai penuh) Ekuivalen Rp4.583	35 Tahun	-	Pra Konstruksi	-
	Mandalika Special Economy Zone (KEK)	Development of Mandalika - ITDC Tourism Zone	USD316.5 million (full amount) Equivalent Rp4,583	35 Years		Pre Construction	



SEGMENT USAHA PENJAMINAN KPBU

Infrastruktur Jalan

PPP GUARANTEE BUSINESS SEGMENT

Road Infrastructure



Pada infrastruktur jalan, PT PII memberikan penjaminan terhadap proyek infrastruktur jalan tol. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk proyek-proyek jalan tol tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Sampai dengan akhir tahun 2018, terdapat 10 proyek pembangunan infrastruktur jalan tol yang telah mendapatkan penjaminan dari PT PII.

Proyek Jalan Tol Batang - Semarang

Pada tahun 2018, perkembangan terakhir dari proyek jalan tol Batang-Semarang adalah telah dikeluarkannya Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk proyek pada 19 Desember 2018. Dengan dikeluarkannya SLO ini, maka tol dijadwalkan akan beroperasi pada Januari 2019.

Proyek yang dikerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini merupakan proyek tol pertama yang diberikan penjaminan oleh pemerintah melalui PT PII. Proyek tersebut juga salah satu Proyek Infrastruktur Strategis Nasional yang tercantum dalam Perpres No. 56 Tahun 2018.

Investasi proyek jalan tol Batang-Semarang sejauh 74,9 km mencapai Rp11,0 triliun. Jalan tersebut

For road infrastructure, PT PII has provided guarantees for toll road infrastructure projects. Contracting Agency (CA) for the toll road projects are the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). As of the end of 2018, there are 10 Toll Road infrastructure development projects that have received guarantee from PT PII.

Batang - Semarang Toll Road Project

In 2018, the latest development of the Batang - Semarang toll road project is the issuance of an Operational Acceptance Certificate (SLO) for the project on 19 December 2018. With the issuance of the SLO, the toll road is scheduled to be operational in January 2019.

The project conducted under the Public Private Partnership (PPP) scheme is the first toll road project granted by the government through PT PII. The project is also one of the National Strategic Infrastructure Projects listed in Presidential Regulation No. 56 of 2018.

The Batang - Semarang toll road project with the length of 74,9 km required an investment of Rp11.0 trillion. The



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Performance Review per Business Segment

merupakan bagian dari jalan tol Trans-Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

Penandatanganan proyek dilaksanakan di Kantor Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April 2016 antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Jasamarga Semarang Batang. Pada saat bersamaan, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT Jasamarga Semarang Batang dan PT PII serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR.

toll road is part of the Trans-Java Toll Road, which will connect Merak, Banten to Banyuwangi, East Java.

The signing of this project was carried out at the Ministry of Finance office on 27 April 2016 between the Ministry of PUPR as the PJPK and PT Jasamarga Semarang Batang as the Project Company ("BUP"). At the same time, the signing of Guarantee Agreement between PT Jasamarga Semarang Batang and PT PII, and Recourse Agreement between PT PII and Ministry of PUPR, were also conducted.

Lokasi Location	Provinsi Jawa Tengah Central Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp11,0 Triliun Trillion
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Contracting Agency	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Public Housing
Badan Usaha Executing Agency	PT Jasamarga Semarang Batang

Jalan Tol Pandaan - Malang

Jalan tol ini merupakan bagian dari rencana koridor jalan utara-selatan di Provinsi Jawa Timur sebagai kelanjutan dari ruas jalan tol Gempol-Pandaan yaitu sepanjang 37,6 km. Ruas jalan tol ini akan melalui tiga daerah penting di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kota Malang.

Ruas jalan tol ini diprediksi menjadi arteri utama dari banyak alternatif ruas jalan non-tol yang menghubungkan kawasan utara dengan kawasan selatan wilayah Jawa Timur. Sepanjang ruas tol tersebut direncanakan terdapat 5 (lima) *interchange*, yaitu: Madyopuro, Pakis I, Pakis II, Lawang dan Purwodadi.

Ruas jalan tol Pandaan-Malang diharapkan ikut memperlancar lalu lintas, baik transportasi penumpang maupun barang dan jasa dari wilayah Pandaan dan Malang yang terkoneksi langsung dengan Kota Surabaya dan sebaliknya. Selain itu, diharapkan dengan adanya ruas jalan tol Pandaan-Malang tingkat perekonomian masyarakat di wilayah tersebut dapat meningkat dan juga dapat meningkatkan volume pengunjung ke daerah tujuan wisata di Kota Malang.

Pandaan - Malang Toll Road

This toll road section is part of north-south road corridor plan in East Java Province as a sequence of the Gempol – Pandaan toll road along 37,6 Km. The toll road section will pass three major areas in East Java, namely Pasuruan Regency, Malang Regency, and Malang City.

This toll road is projected to be the main arterial road from other non-toll road alternatives that connect the northern area with the southern area of East Java. This toll road is planned to have 5 (five) interchanges, namely: Madyopuro, Pakis I, Pakis II, Lawang, and Purwodadi.

The Pandaan – Malang toll road section is expected to accelerate both passenger and industrial transportation traffic from the Pandaan and Malang region, which is directly connected with Surabaya and vice versa. In addition, the Pandaan – Malang toll road is expected to improve the economic level of people in the surrounding area and increase the volume of visitors to tourist destinations in Malang.

Lokasi Location	Provinsi Jawa Timur East Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp5,9 Triliun Trillion
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Contracting Agency	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Public Housing
Badan Usaha Executing Agency	PT Jasamarga Pandaan Malang



Jalan Tol Manado - Bitung

Jalan tol yang terletak di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Perpres No. 56 Tahun 2018. Berdasarkan Perpres No. 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Pelabuhan Bitung akan dikembangkan menjadi pelabuhan yang melayani kegiatan ekspor impor dari wilayah dan ke wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Selain itu, jalan yang menghubungkan Kota Manado dengan Kota Bitung tergolong sudah sangat padat dan tidak memiliki alternatif langsung sehingga menyebabkan peningkatan waktu tempuh perjalanan dan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana penghubung untuk mendorong pergerakan penumpang, barang dan jasa dari Kota Manado sebagai pusat kegiatan perekonomian di Sulawesi Utara ke Kota Bitung.

Pembangunan jalan tol Manado Bitung dengan panjang 39,9 km ini memiliki nilai investasi mencapai Rp5,1 triliun dengan masa konsesi 40 tahun.

Lokasi Location	Provinsi Sulawesi Utara North Sulawesi Province
Nilai Proyek Project Value	Rp5,1 Triliun Trillion
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Contracting Agency	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Public Housing
Badan Usaha Executing Agency	PT Jasamarga Manado Bitung

Jalan Tol Balikpapan - Samarinda

Proyek jalan tol ini terletak di wilayah administratif Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Kota Samarinda dan Balikpapan adalah dua kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kota Samarinda adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan dan Kota Balikpapan adalah merupakan pusat perdagangan yang menjadi pintu masuk utama ke Kalimantan Timur.

Ruas tol tersebut merupakan salah satu koridor penting bagi lalu lintas pergerakan orang dan barang di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, merupakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) jalan tol yang masuk ke dalam rencana sistem transportasi Provinsi Kalimantan Timur.

Tol sepanjang 99,35 km ini terdiri dari 2 (dua) paket pembangunan. Paket 1 adalah pembangunan Seksi 1 (Balikpapan-Samboja) sepanjang 22,03 km dan Seksi 5 (Balikpapan-Sepinggian) sepanjang 11,09 km. Paket 2

Manado - Bitung Toll Road

The toll road that is located in the region of the North Minahasa Regency and Bitung City is one of the National Strategic Projects (PSN) listed in Presidential Regulation No. 56 of 2018. Based on Presidential Regulation No. 32 of 2011 on the Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development 2011-2025, the Port of Bitung will be developed into a port that serves export import activities to and from territorial regions of the North Sulawesi Province.

In addition, the road that connects Manado City and Bitung City is considered very crowded today without direct alternative that caused longer travelling time and higher accident risk. Therefore, a connecting facility is required to support the mobility of passenger and commodities from Manado City as center of economic activity in North Sulawesi to Bitung City.

The construction of the Manado - Bitung toll road with a length of 39.9 km has an investment value of Rp5.1 trillion with a concession period of 40 years.

Balikpapan - Samarinda Toll Road

This toll road project is located in the administrative area of Balikpapan City, Kutai Kartanegara District and Samarinda City. The city of Samarinda and Balikpapan are two cities with high population density. Samarinda City is the Capital of East Kalimantan Province as the center of government and Balikpapan City is the center of commerce and main entrance to East Kalimantan.

The toll road section is one of the most important corridors for the transportation of people and commodities in the East Kalimantan Province. In addition, it is 1 (one) of the 7 (seven) toll roads in the transportation systems plan of the East Kalimantan Province.

The 99.35 km long toll road consists of 2 (two) development packages, the 1st Package is the development of 1st Section (Balikpapan - Samboja) along 22.03 km and 5th Section (Balikpapan - Sepinggian)



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Performance Review per Business Segment

adalah Seksi 2 (Semboja-Muarajawa) sepanjang 30,98 km, Seksi 3 (Muarajawa-Palaran) sepanjang 17,30 km serta Seksi 4 (Palaran-Jembatan Mahkota Samarinda) sepanjang 17,95 km. Konstruksi paket 1 merupakan tanggung jawab pemerintah, sedangkan konstruksi paket 2 merupakan tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana (PT Jasamarga Balikpapan Samarinda). PT Jasamarga Balikpapan Samarinda juga bertanggung jawab dalam pengoperasian dan pemeliharaan paket 1 dan paket 2.

Ruas tol Balikpapan-Samarinda dapat menjadi alternatif menyelesaikan permasalahan jalur lalu lintas yang padat dan meningkatkan efisiensi waktu perjalanan. Pembangunannya juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur serta meningkatkan layanan/akses mobilisasi bagi warga Kalimantan Timur.

Lokasi Location	Provinsi Kalimantan Timur East Kalimantan Province
Nilai Proyek Project Value	Rp10,0 Triliun Trillion
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Contracting Agency	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Public Housing
Badan Usaha Executing Agency	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda

Proyek Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Elevated

Proyek tol ini memiliki total panjang mencapai 36,4 km dengan investasi senilai Rp16,2 triliun. Penandatanganan Perjanjian Kerja sama proyek ini dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2016. Sedangkan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek dan Perjanjian Regres antara Kementerian PUPR dengan PT PII secara bersamaan ditandatangani pada 22 Februari 2017.

Lokasi Location	Provinsi Jawa Barat West Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp16,2 Triliun Trillion
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Contracting Agency	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Public Housing
Badan Usaha Executing Agency	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek

Proyek Ruas Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar

Panjang proyek jalan tol di Provinsi Jawa Timur ini mencapai 38,3 km dengan investasi Rp12,2 triliun. Penandatanganan Perjanjian Kerja sama proyek ini dilaksanakan pada 5 Desember 2016. Sedangkan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan

along 11.09 km. The 2nd Package includes the 2nd Section (Samboja – Muarajawa) along 30.98 km, the 3rd Section (Muarajawa – Palaran) along 17.30 km, and 4th Section (Palaran – Jembatan Mahkota Samarinda) along 17.95 km. The construction of 1st package is the responsibility of the government, while construction of the 2nd Package is the responsibility of the Project Company (PT Jasamarga Balikpapan Samarinda). PT Jasamarga Balikpapan Samarinda is also responsible for the operation and maintenance of package 1 and package 2.

The Balikpapan – Samarinda toll road section is an alternative to solve the traffic congestion issue as well as to reduce travel time. The construction of this toll road is also expected to increase social and economic growth in East Kalimantan area as well as to improve transportation service/access for the people of East Kalimantan.

Jakarta Cikampek II Elevated Toll Road Section Project

The Jakarta Cikampek II Elevated toll road section project is 36.4 km long with an estimated investment value of Rp16.2 trillion. The signing of the Project Cooperation Agreement was conducted on 5 December 2016. The guarantee agreement between PT PII and PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek and Recourse Agreement between the Ministry of PUPR and PT PII were signed at the same time on 22 February 2017.

Krian - Legundi - Bunder - Manyar Toll Road Section Project

The length of the toll road in the East Java Province reached 38,3 km with an investment value of Rp12.2 trillion. The signing of the Project Cooperation Agreement was conducted on 5 December 2016. The guarantee agreement between the Company and



PT Waskita Bumi Wira dan Perjanjian Regres antara Kementerian PUPR dengan PT PII secara bersamaan ditandatangani pada 22 Februari 2017.

PT Waskita Bumi Wira and Recourse Agreement between the Ministry of PUPR and PT PII were simultaneously signed on 22 February 2017.

Lokasi Location	Provinsi Jawa Timur East Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp12,2 Triliun Trillion
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Contracting Agency	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Public Housing
Badan Usaha Executing Agency	PT Waskita Bumi Wira

Proyek Ruas Jalan Tol Serang - Panimbang

Proyek ruas jalan tol Serang - Panimbang ini terletak di Provinsi Banten sepanjang 83,7 km dengan nilai investasi Rp5,3 triliun. Perjanjian Kerja sama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres ditandatangani pada tanggal 22 Februari 2017. Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 56 Tahun 2018, yang dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional.

Serang - Panimbang Toll Road Section Project

The Serang - Panimbang toll road section project is located in the Banten province with a length of 83.7 km and an investment of Rp5.3 trillion. The Cooperation Agreement, Guarantee Agreement, and Recourse Agreement were signed on 22 February 2017. This project is one of the National Strategic Projects as stated in the Presidential Regulation No. 56 of 2018, which is categorized as a National Priority Project.

Lokasi Location	Provinsi Banten Banten Province
Nilai Proyek Project Value	Rp5,33 Triliun Trillion
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Contracting Agency	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Public Housing
Badan Usaha Executing Agency	PT Wijaya Karya Serang Panimbang

Proyek Ruas Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan

Panjang proyek jalan tol di Provinsi Jawa Barat sepanjang 60,1 km dengan nilai investasi sebesar Rp8,4 triliun. Perjanjian Kerja sama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres proyek ini ditandatangani pada tanggal 22 Februari 2017. Proyek ini merupakan salah satu Proyek Infrastruktur Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 56 Tahun 2018. Selain itu, proyek ini juga termasuk dalam kategori Proyek Prioritas Nasional.

Cileunyi - Sumedang - Dawuan Toll Road Section Project

The length of the toll road project in West Java Province is 60.1 km with an investment value of Rp8.4 trillion. The Cooperation Agreement, Guarantee Agreement, and the Recourse Agreement for this project were signed on 22 February 2017. This project is one of the National Strategic Infrastructure Projects as stated in the Presidential Regulation No. 56 of 2018. In addition, this project is also included in the category of National Priority Projects.

Lokasi Location	Provinsi Jawa Barat West Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp8,4 Triliun Trillion
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Contracting Agency	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Public Housing
Badan Usaha Executing Agency	PT Citra Karya Jabar Tol

Proyek Ruas Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi

Hingga akhir 2018, penetapan lokasi untuk proyek ruas jalan tol Probolinggo - Banyuwangi telah diperoleh untuk Seksi I. Sedangkan Seksi II dan III masih dalam perubahan desain.

Probolinggo - Banyuwangi Toll Road Section Project

Up to the end of 2018, the location for the Probolinggo-Banyuwangi toll road project has been determined for Section I. While Section II and III are still in design changes.



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Performance Review per Business Segment

Panjang proyek jalan tol yang melewati 3 Kabupaten: Kabupaten Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi ini sekitar 172,9 km. Nilai investasi proyek ini mencapai Rp23,39 triliun. Adapun masa penjaminan yang telah disepakati selama 15 tahun setelah Commercial Operation Date (COD).

The length of the toll road project that passes through 3 regencies: Probolinggo, Situbondo, and Banyuwangi is approximately 172.9 km. The investment value of this project reached Rp 23.39 trillion. The guarantee period has been agreed for 15 years after the Commercial Operation Date (COD).

Lokasi Location	Provinsi Jawa Timur East Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp23,39 Triliun Trillion
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Contracting Agency	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Public Housing
Badan Usaha Executing Agency	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi

Proyek Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan

Penetapan lokasi untuk proyek ruas jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan telah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 30 November 2018. Proyek ini berawal di sekitar *interchange* Jatiasih, masuk ke wilayah kota Bekasi dan berakhir di sekitar *interchange* Sadang, Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Panjang jalan tol tersebut mencapai 64 km.

Jakarta - Cikampek II Selatan Toll Road Section Project

The Governor of West Java has signed the location determination for the Jakarta - Cikampek II Selatan toll road project on 30 November 2018. This project starts around the Jatiasih interchange, enters the city of Bekasi, and ends around the Sadang interchange, Purwakarta Regency, West Java Province. The length of the toll road reaches 64 km.

Nilai investasi pembangunan infrastruktur jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan diperkirakan mencapai Rp14,691 triliun. Adapun masa penjaminan yang disepakati selama 15 tahun setelah Commercial Operation Date (COD).

The investment value for the construction of the Jakarta-Cikampek II Selatan toll road infrastructure is estimated to reach Rp14.691 trillion. The guarantee period was agreed to for 15 years after the Commercial Operation Date (COD).

Lokasi Location	Provinsi Jawa Barat West Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp14,691 Triliun Trillion
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Contracting Agency	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Public Housing
Badan Usaha Executing Agency	PT Jasamarga Japek Selatan



Infrastruktur Telekomunikasi

Telecommunication Infrastructure



Proyek Palapa Ring

Proyek Palapa Ring adalah salah satu Proyek Infrastruktur Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 56 Tahun 2018, dan juga termasuk Proyek Prioritas Nasional. Proyek ini merupakan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional. Proyek pengembangan jaringan backbone tersebut dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Komunikasi Kabel Laut dan Sistem Komunikasi Serat Optik ke 57 kota/kabupaten yang belum terlayani.

Proses pelaksanaannya dibagi menjadi tiga paket: Paket Barat, Paket Tengah dan Paket Timur dengan estimasi panjang kabel sepanjang 8.871 km. Proyek ini ditargetkan mampu mendistribusikan jaringan *broadband* dengan kecepatan 10 Mbps di daerah pedesaan dan 20 Mbps di daerah perkotaan.

Proyek tersebut menjadi acuan karena merupakan proyek pertama pada sektor telekomunikasi yang memakai skema Availability Payment (AP) yang ditawarkan oleh pemerintah dengan skema KPBU. Berdasarkan skema tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mulai membayar kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) saat proyek sudah beroperasi.

Palapa Ring Project

The Palapa Ring Project is one of the National Strategic Infrastructure Projects as stated in the Presidential Regulation (Perpres) No. 56 of 2018, and also included in the National Priority Project. This project is the development of a national optical fiber backbone network. The backbone network development project was designed and implemented using Sea Cable Communication Systems and Fiber Optics Communication Systems to 57 underserved cities/regencies.

The implementation process of the Project is divided into three packages, namely West Package, Central Package, and East Package with an estimated cable length of 8,871 km. This project is expected to provide broadband network with the speed of 10 Mbps in rural areas and 20 Mbps in urban areas.

This project becomes a reference because this is the first project in the telecommunications sector that uses the Availability Payment (AP) facility offered by the Government under PPP scheme. Under the scheme, the government through the Ministry of Communication and Information Technology (Kemenkominfo) start paying to the Project Company when the project is in operations.



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Performance Review per Business Segment

Skema ketersediaan layanan yang digunakan untuk proyek ini berbeda dengan skema *Viability Gap Fund* (VGF). Jika VGF menggunakan dana tunai pada masa konstruksi, maka skema ketersediaan layanan dibayar berdasarkan kinerja BUP selama masa pengoperasian dan pemeliharaan. Oleh karena itu, dana pembangunan proyek sepenuhnya ditanggung oleh BUP. Dari sisi pemerintah, pelaksanaan pembayaran ketersediaan dilakukan melalui BLU Kemenkominfo, Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) yang mendapat *Universal Service Obligation* (USO). Nilai proyek pembangunan Palapa Ring ditaksir mencapai USD452 juta (*initial EPC capex*).

Proyek Palapa Ring Paket Barat

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama proyek Palapa Ring Paket Barat dilaksanakan di kantor Kementerian Keuangan pada tanggal 29 Februari 2016. Selain itu juga ditandatangani Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Palapa Ring Barat selaku BUP dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kemenkominfo. Pada 25 Juli 2016, Proyek Palapa Ring Paket Barat mencapai *financial close*, di mana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku *lender* menyalurkan kredit senilai Rp875 miliar kepada PT Palapa Ring Barat.

Mengingat proyek ini telah beroperasi komersial sejak 2 Maret 2018, pemerintah telah mulai membayar ketersediaan layanan kepada PT Palapa Ring Barat yang menjadi penyelenggara proyek. PJPK Proyek Palapa Ring Paket Barat adalah Kemenkominfo dengan dukungan Penjaminan Pemerintah melalui PT PII. Proyek ini ditargetkan mampu mendistribusikan jaringan *broadband* dengan kecepatan 10 Mbps di daerah pedesaan dan 20 Mbps di daerah perkotaan.

Proyek tersebut menjadi pelopor proyek di sektor telekomunikasi yang memakai skema ketersediaan layanan yang ditawarkan oleh pemerintah dengan skema KPBU. Berdasarkan skema ketersediaan layanan, Pemerintah melalui Kemenkominfo mulai membayar kepada pemenang *tender* saat proyek sudah beroperasi.

The availability payment scheme that is used for this project is different from the Viability Gap Fund (VGF) scheme. If VGF disbursed cash during the construction period, the availability payment scheme is paid based on performance of the Project Company during the operation and maintenance period. Therefore, the project development fund is fully borne by the Project Company. From the government side, the availability payment is conducted by the BLU of the Ministry of Communication and Informatics, the Telecommunications and Informatics Financing Provider and Management Center (BAKTI) that acquires the Universal Service Obligation (USO). The value of the Palapa Ring development project is estimated at USD452 million (*initial EPC capex*).

Palapa Ring West Package Project

The signing of Corporate Agreement of Palapa Ring West Package project was conducted at the Ministry of Finance Office on 29 February 2016. In addition, the Guarantee Agreement between PT PII and PT Palapa Ring Barat as the Project Company as well as Recourse Agreement between PT PII and the Ministry of Communication and Information were also signed. On July 25, 2016, the West Palapa Ring Project reached financial close, which PT Bank Mandiri (Persero) Tbk acted as the lender, distributing loans of Rp875 billion to PT Palapa Ring Barat.

Since this project has been commercially operated from 2 March 2018, the government has begun the availability payment to PT Palapa Ring Barat as the Project Company. The Contracting Agency (PJPK) for the Palapa Ring West Package Project is the Ministry of Communication and Information with the support of Government Guarantee through PT PII. This project is targeted to be able to distribute broadband networks with speeds of 10 Mbps in rural areas and 20 Mbps in urban areas.

This project becomes the pilot project in the telecommunication sector using Availability Payment (AP) facility that is offered by the Government under the PPP scheme. Based on the availability payment scheme, through Ministry of Communication and Information Technology, the Government started payment to the bid winner when the project has started operations.



Lokasi Location	Provinsi Riau dan Kep. Riau
Nilai Proyek Project Value	Rp1,2 Triliun Trillion
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Contracting Agency	Kementerian Komunikasi dan Informatika Ministry of Communication and Information Technology
Badan Usaha Executing Agency	PT Palapa Ring Barat

Proyek Palapa Ring Paket Tengah

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama paket ini telah dilakukan pada 4 Maret 2016 antara Menteri Komunikasi dan Informatika selaku PJPK dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia selaku BUP. Pada kesempatan yang sama, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Paket Tengah. Proyek Palapa Ring Paket Tengah telah beroperasi pada tanggal 21 Desember 2018.

Nilai investasi proyek Palapa Ring Paket Tengah tersebut mencapai Rp1,1 triliun. Proyek ini adalah Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 56 Tahun 2018, yang juga dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional.

Palapa Ring Central Package Project

The signing of the Cooperation Agreement was carried out on 4 March 2016 between the Minister of Communication and Information Technology as the Contracting Agency and PT Len Telekomunikasi Indonesia as the Project Company. On the same occasion, PT PII signed a Guarantee Agreement and Recourse Agreement for the Palapa Ring Central Package project. The Palapa Ring Central Package Project is in operations on 21 December 2018.

The investment value of the Palapa Ring Central Package project reached Rp1.1 trillion. This project is a National Strategic Projects as stated in the Presidential Regulation No. 56 of 2018, which is also categorized as a National Priority Project.

Lokasi Location	Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi, Provinsi Maluku , Provinsi NTT, Provinsi Papua Barat
Nilai Proyek Project Value	Rp1,1 Triliun Trillion
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Contracting Agency	Kementerian Komunikasi dan Informatika Ministry of Communication and Information Technology
Badan Usaha Executing Agency	PT Len Telekomunikasi Indonesia

Proyek Palapa Ring Paket Timur

Kerja sama proyek ini pertama kali ditandatangani pada 29 September 2016 di Istana Negara, disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dilakukan antara PT PII dengan PT Palapa Timur Telematika selaku BUP dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kemenkominfo selaku PJPK.

Di saat bersamaan, dilakukan juga *financial close* Proyek Palapa Ring Paket Tengah. Presiden Joko Widodo berharap proyek Palapa Ring akan rampung di tahun 2019. Proyek ini adalah proyek Infrastruktur Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 56 Tahun 2018, yang juga dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional.

Palapa Ring East Package Project

The project cooperation was first signed on 29 September 2016 at the State Palace, witnessed by President Joko Widodo, Coordinating Minister for Economic Affairs Darmin Nasution, and Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Wiranto. The signing of the Guarantee Agreement was carried out between PT PII and PT Palapa Timur Telematika as the Project Company and the Recourse Agreement between PT PII and the Ministry of Communication and Information as the Contracting Agency.

At the same time, the financial close of the Palapa Ring Central Package Project was also conducted. President Joko Widodo hopes that the Palapa Ring project will be completed in 2019. This project is a National Strategic Infrastructure project as stated in the Presidential Regulation No. 56 of 2018, which is also categorized as a National Priority Project.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Performance Review per Business Segment

Setelah penandatanganan tersebut, pada 29 Maret 2017 bertempat di Kantor Kemenkominfo, telah dilaksanakan *financial close* Proyek Palapa Ring Paket Timur dan juga penyerahan Surat Efektif Penjaminan oleh PT PII kepada PT Palapa Timur Telematika.

After the signing, on 29 March 2017 at the Ministry of Communication and Information Office, a financial close of the Palapa Ring East Package Project as well as the submission of the Effective Guarantee Letter by PT PII to PT Palapa Timur Telematika was held.

Lokasi Location	Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat
Nilai Proyek Project Value	Rp5,1 Triliun Trillion
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Contracting Agency	Kementerian Komunikasi dan Informatika Ministry of Communication and Information Technology
Badan Usaha Executing Agency	PT Palapa Timur Telematika

Infrastruktur Pembangkit Listrik

Power Plant Infrastructure



Pada sektor kelistrikan, PT PII turut berpartisipasi dalam penjaminan penyediaan infrastruktur pembangkit listrik. Atas proyek pembangunan infrastruktur listrik tersebut, PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT PLN (Persero) selaku PJPK untuk pengembangan proyek-proyek kelistrikan nasional.

Peran serta PT PII merupakan upaya untuk membantu pemerintah dalam memenuhi peningkatan kebutuhan listrik nasional, seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan proyek-proyek yang dijamin PT PII disampaikan pada paparan di bawah ini.

In the electricity sector, PT PII also participates in providing guarantee for electricity infrastructure. For electricity infrastructure development project, PT PII has signed Guarantee Agreement with PT PLN (Persero) as the Contracting Agency (CA) for the development of national electricity projects.

The participation of PT PII is an effort to assist the government in meeting the increase in national electricity demand, along with economic growth. The development of projects guaranteed by PT PII is presented in the following explanation.



PLTU Jawa Tengah (Batang)

Proyek ini merupakan proyek infrastruktur skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pertama sesuai Perpres 67/2005 di mana pada saat itu masih disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Proyek tersebut berhasil diwujudkan dengan memperoleh penjaminan bersama.

Proyek PLTU Jawa Tengah merupakan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 2 x 1.000 MW berlokasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. PLTU senilai Rp61,5 triliun tersebut sedang dibangun oleh konsorsium PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) dengan skema Build-Operate-Transfer dengan masa konsesi 25 tahun. PLTU Jawa Tengah merupakan proyek infrastruktur skema KPBU pertama yang berhasil diwujudkan dengan memperoleh fasilitas penjaminan bersama oleh PT PII dan Pemerintah RI (Kementerian Keuangan) sesuai Perpres 78/2010.

Sebagaimana ketentuan pemerintah dan mengacu pada Power Purchase Agreement (PPA), PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan BPI pada tanggal 6 Oktober 2011. Pada saat bersamaan, ditandatangani juga perjanjian regres antara PT PII dengan PT PLN (Persero) sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Dalam kenyataannya kemudian, terjadi keterlambatan dalam penerbitan beberapa perizinan yang diperlukan, penyelesaian proses AMDAL, serta penuntasan pembebasan lahan untuk proyek. PT PII kemudian secara proaktif membentuk Joint Monitoring Committee (JMC) bersama perwakilan dari BPI dan PT PLN (Persero), untuk memantau upaya-upaya penyelesaian masalah-masalah tersebut. Namun, sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, proses *financial close* belum dapat tercapai, sehingga diperlukan amandemen perjanjian kerjasama antara BPI dan PT PLN (Persero).

Pada akhirnya, *financial close* proyek ini dilaksanakan di Istana Negara pada tanggal 9 Juni 2016 yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Proyek ini merupakan langkah Pemerintah untuk menyediakan kebutuhan listrik yang dibutuhkan masyarakat.

Central Java (Batang) Steam Power Plant (PLTU)

This project is the first infrastructure project under the Private Public Partnership (PPP) scheme in accordance with the Presidential Regulation 67/2005 where at that time it was still referred to as Public and Private Cooperation. The project was successfully realized by obtaining joint guarantees.

The Central Java Steam Power Plan (PLTU) project is a 2x1,000 MW coal-fired power plant project located in Batang, Central Java. The PLTU, valued at USD4 billion or more than Rp61.5 trillion, would be built by a consortium of PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) with Build-Operate-Transfer scheme during 25-year concession period. The Central Java PLTU was the first infrastructure project under the PPP scheme to be realized by obtaining joint guarantee facility from PT PII and the Government of the Republic of Indonesia (Ministry of Finance) in accordance with Presidential Regulation No. 78/2010.

As stipulated by government regulation and referring to the Power Purchase Agreement (PPA), PT PII has signed a Guarantee Agreement with BPI on 6 October 2011. At the same time, a Recourse Agreement was also signed between PT PII and PT PLN (Persero) as the PJPK.

However, in fact, there have been delays in the issuance of the required permits, completion of Environmental Impact Analysis (AMDAL) process, and completion of land acquisition for the project. PT PII then proactively established a Joint Monitoring Committee (JMC) with representatives from BPI and PT PLN (Persero) in order to monitor the efforts to resolve the issues. However, up to the specified deadline, the Financial Close process was still not yet reached, which requires amendments to the cooperation agreement between BPI and PT PLN (Persero).

In the end, the Financial close of the project was conducted at the State Palace on 9 June 2016, witnessed by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, Coordinating Minister for Economic Affairs as Chairman of the Priority Infrastructure Provision Acceleration Committee (KPPIP), Minister for National Development Planning, Minister of Finance, and Minister of Energy and Mineral Resources, Minister of State-Owned Enterprises and The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning. This project was the Government's measure to provide electricity needed by the people.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Performance Review per Business Segment

PLTU Batang dengan kapasitas 2x1.000 megawatt ini mendapatkan kucuran dana dari Japan Bank for International Cooperation dan beberapa sindikasi perbankan komersial internasional kepada BPI selaku Badan Usaha. Dengan tercapainya *financial close* ini maka proyek PLTU telah dapat dimulai konstruksinya untuk mencapai target penyelesaian.

The Batang Steam Power Plant (PLTU) 2x1,000 Megawatt (MW) received funding from Japan Bank for International Cooperation (JBIC) and several international commercial banking syndicates to PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) as the Project Company. With the achievement of the Financial Close, the PLTU project could immediately continue the development to achieve the completion target.

Lokasi Location	Kab. Batang – Provinsi Jawa Tengah Central Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp61,5 Triliun Trillion
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Contracting Agency	PT PLN (Persero)
Badan Usaha Executing Agency	PT Bhimasena Power Indonesia

Infrastruktur Penyediaan Air Minum

Clean Water Supply Infrastructure



Pada sektor air minum, PT PII telah memberikan penjaminan dalam penyediaan proyek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hingga tahun 2018 terdapat 3 (tiga) proyek pembangunan infrastruktur SPAM yang telah mendapatkan penjaminan dari PT PII yakni proyek SPAM Umbulan (Jawa Timur), SPAM Kota Bandar Lampung dan SPAM Semarang Barat.

In the drinking water sector, PT PII has provided guarantee in the provision of infrastructure projects of Drinking Water Supply System (SPAM). Until 2018 there were SPAM infrastructure development projects that had received guarantees from PT PII, namely the Umbulan SPAM (East Java), Bandar Lampung City SPAM, and West Semarang SPAM projects.



Proyek SPAM Umbulan – Jawa Timur

Proyek SPAM Umbulan dimaksudkan untuk mengatasi potensi krisis air dan memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat Jawa Timur. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha mencari jalan keluar melalui pemanfaatan mata air Umbulan yang terdapat di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Mata air Umbulan dipilih karena dapat memproduksi 4.000 liter/detik dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk 1,8 juta jiwa. Pasokan air minum untuk beberapa kota utama di Jawa Timur, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan dan sekitarnya.

Selama ini, ada keterbatasan pasokan air minum untuk beberapa kota utama di Jawa Timur, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Hal itu membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur menginisiasi proyek transmisi penyediaan air bersih dari mata air Umbulan di Kabupaten Pasuruan menuju 16 titik offtake milik PDAM dan PDAB yang terletak di Kabupaten-Kabupaten dan Kota-Kota tersebut.

Proyek SPAM Umbulan berkapasitas 4.000 liter/detik dibangun berdasarkan skema KPBU antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku PJPK dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan selaku Badan Usaha. Nilai proyek SPAM Umbulan mencapai Rp2,057 triliun dan memperoleh dukungan kelayakan Rp818 miliar dari Kementerian Keuangan.

Pada tanggal 21 Juli 2016, PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan dan Perjanjian Regres dengan Gubernur Jawa Timur untuk Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Proyek ini merupakan proyek sektor air dan proyek daerah pertama yang diberikan penjaminan pemerintah melalui PT PII.

Financial close proyek ini dilaksanakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan dilanjutkan dengan penyampaian pernyataan efektif penjaminan oleh PT PII kepada PT Meta Adhya Tirta Umbulan dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri PPN dan Menteri PUPERA pada 10 Februari 2017.

Umbulan – East Java SPAM Project

The Umbulan SPAM project is intended to overcome the potential of water crisis and meeting the increasing needs of the East Java community. For this purpose, the East Java Provincial Government tried to find a way out through the utilization of the Umbulan spring in the Umbulan Village, Winongan District, Pasuruan Regency. The Umbulan spring was selected because it can produce 4,000 liters/second and able to fulfill the clean water needs for 1.8 million people. Drinking water supply for several main cities in East Java, namely Surabaya City, Sidoarjo Regency, Gresik Regency, Pasuruan Regency, and Pasuruan City and the surrounding areas.

So far, there have been limited drinking water supplies for several major cities in East Java, namely Surabaya City, Sidoarjo Regency, Gresik Regency, Pasuruan Regency, and Pasuruan City. This prompted the East Java provincial government to initiate a clean water supply transmission project from the Umbulan spring in the Pasuruan Regency to 16 Municipal Drinking Water Company (PDAM) and Municipal Clean Water Company (PDAB) offtake points that are located in the Regencies and Cities.

The SPAM Umbulan project with a capacity of 4,000 liters/second was built under the PPP scheme between the Government of East Java Province as the Contracting Agency and PT Meta Adhya Tirta Umbulan as the Project Company. The value of the Umbulan SPAM amounted to Rp2.057 trillion and received Rp818 billion of feasibility support from the Ministry of Finance.

On 21 July 2016, PT PII has signed a Guarantee Agreement with PT Meta Adhya Tirta Umbulan and Recourse Agreement with the Governor of East Java for the Umbulan Water Supply System Project (SPAM). This project was the first water project and the first local project provided with government guarantee through PT PII.

The financial close was conducted at the office of the Coordinating Ministry for Economic Affairs and followed with the submission of guarantee agreement between PT PII and PT Meta Adhya Tirta Umbulan, witnessed by the Coordinating Minister of Economic Affairs, Minister of Finance, Minister of PPN, and Minister of PUPERA on 10 February 2017.



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Performance Review per Business Segment

Lokasi Location	Provinsi Jawa Timur East Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp2,1 Triliun Trillion
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Contracting Agency	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Badan Usaha Executing Agency	PT Meta Adhya Tirta Umbulan

Proyek SPAM Kota Bandar Lampung

Proyek SPAM Lampung diinisiasi karena Kota Bandar Lampung memerlukan peningkatan dan penyediaan air minum. PDAM Way Rilau baru melayani sekitar 20% dari total penduduk kota Bandar Lampung yang berjumlah 193.290 penduduk. Selain rendahnya tingkat pelayanan PDAM Way Rilau, kendala kontur pada Kota Bandar Lampung yang berbukit-bukit juga mengakibatkan pendistribusian air minum belum merata.

Pada tanggal 14 Februari 2018, PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan dan PT Adhya Tirta Lampung Perjanjian Regres dengan PDAM Way Rilau untuk SPAM Lampung. Sedangkan *financial close* proyek ini dapat dicapai pada 15 Agustus 2018.

Lokasi Location	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Nilai Proyek Project Value	Rp750 Miliar Billion
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Contracting Agency	PDAM Way Rilau
Badan Usaha Executing Agency	PT Adhya Tirta Lampung

Proyek SPAM Semarang Barat

Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan memperluas cakupan sambungan perpipaan air minum dengan penambahan Sambungan Rumah (SR) kurang lebih 37.000 SR, sehingga total SR yang dapat dilayani mencapai sekitar 71.500 SR pada tahun 2030. Banyaknya SR yang saat ini belum terlayani dikarenakan keterbatasan dana dan sumber air baku yang tersedia di dalam Kota Semarang.

Proyek SPAM Semarang Barat berkapasitas 1.050 liter/detik dibangun berdasarkan skema KPBU antara PDAM Tirta Moedal – PDAM Kota Semarang Barat selaku PJPK dengan PT Air Semarang Barat selaku Badan Usaha. Nilai proyek SPAM Semarang Barat sebesar Rp417 miliar tanpa menggunakan dukungan kelayakan dari Kementerian Keuangan.

Area pelayanan SPAM Semarang Barat ditargetkan untuk melayani 3 (tiga) Kecamatan yang terbagi dalam 5 (lima) zona wilayah layanan, yaitu Kecamatan Tugu

Bandar Lampung SPAM Project

The Lampung SPAM project was initiated due to the needs of Bandar Lampung City for an increase and supply of drinking water. The new Way Rilau PDAM serves only around 20% of the total Bandar Lampung city population, which has 193,290 residents. In addition to the low Way Rilau PDAM level of service, contour constraints in the hilly city of Bandar Lampung also causes the distribution of drinking water to be uneven.

On 14 February 2018, PT PII has signed a Guarantee Agreement with PT Adhya Tirta Lampung and the Recourse Agreement with PDAM Way Rilau for the Lampung SPAM. While the financial close of this project can be achieved on 15 August 2018.

West Semarang SPAM Project

The West Semarang Drinking Water Supply System (SPAM) project intends to improve the service performance and expand the coverage of piped drinking water connections by adding Home Connection (SR) of approximately 37,000 SR, reaching a total of approximately 71,500 SRs in 2030. The number of SRs that are currently not in services is due to limited funds and availability of raw water sources in Semarang City.

The West Semarang SPAM project has a capacity of 1,050 liters/second that was developed based on the Private Public Partnership scheme between PDAM Tirta Moedal – PDAM of West Semarang City as the Contracting Agency with PT Air Semarang Barat as the Project Company. The value of the West Semarang SPAM project is Rp417 billion without feasibility support from the Ministry of Finance.

The West Semarang SPAM service area is targeted to serve 3 (three) Districts, which are divided into 5 (five) service area zones, namely the Tugu District (zone



(zona 1), sebagian Kecamatan Ngalian (Zona 2 dan 3), serta Kecamatan Semarang Barat (zona 4 dan 5).

Pada tanggal 23 November 2018, PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Air Semarang Barat dan Perjanjian Regres dengan PDAM Tirta Moedal untuk Proyek SPAM Semarang Barat.

1), part of Ngalian District (Zones 2 and 3), and West Semarang District (zone 4 and 5).

On 23 November 2018, PT PII signed a Guarantee Agreement with PT Air Semarang Barat and Recourse Agreement with PDAM Tirta Moedal for the West Semarang Drinking Water Supply System (SPAM) Project.

Lokasi Location	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nilai Proyek Project Value	Rp417 Miliar Billion
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Contracting Agency	PDAM Tirta Moedal Kota Semarang
Badan Usaha Executing Agency	PT Air Semarang Barat

SEGMENT USAHA PENJAMINAN NON-KPBU

Infrastruktur Pariwisata



Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

Terletak di bagian selatan Pulau Lombok, Mandalika diharapkan dapat menjadi tujuan wisata kelas dunia berikutnya di Indonesia yang akan dibuat dan dikembangkan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC. Dengan luas sekitar 1.175 hektar dan menghadap ke Samudra Hindia, Mandalika menawarkan wisata bahari dengan pesona bawah laut yang menjadi daya tarik utama.

NON-PPP GUARANTEE BUSINESS SEGMENT

Tourism Infrastructure

Mandalika Special Economic Zone (SEZ)

Located in the southern part of the Lombok Island, Mandalika is expected to become the next world-class tourist destination in Indonesia to be created and developed by PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC. With an area of around 1,175 hectares and overlooking the Indian Ocean, Mandalika offers maritime tourism with underwater charm, which is its main attraction.



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Performance Review per Business Segment

Pembangunan dan pengembangan Mandalika akan menerapkan konsep *eco-green* dan *event based destination*. Dengan konsep *green eco-tourism*, fasilitas yang terdapat dalam kawasan ini harus ramah lingkungan agar meningkatkan nilai jual dari area tersebut. Pasokan air bersih akan disediakan melalui proses desalinasi air atau lebih dikenal sebagai sistem SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) dan pasokan listrik (selain dari PT PLN) akan disediakan dengan pembangkit listrik tenaga surya. Sedangkan konsep destinasi *event-based* akan menonjolkan pariwisata dengan menyediakan fasilitas non-akomodasi berstandar internasional yang akan menjadi daya tarik wisata sembari menikmati keindahan Mandalika. Fasilitas pariwisata yang akan dibangun dan dikembangkan antara lain hotel, vila, apartemen, *resort*, unit perumahan, lapangan golf, fasilitas rekreasi, pusat medis dan kesehatan, tempat pelatihan, desa seni, dan lainnya.

Proyek Pengembangan Kawasan Pariwisata KEK Mandalika merupakan salah satu bagian dari program pengembangan pariwisata Indonesia. Program ini meliputi pengembangan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) antara lain: jaringan jalan, jaringan air bersih, normalisasi sungai, pengolahan air limbah, tempat pembuangan sampah, jaringan dan fasilitas listrik, dan jaringan dan fasilitas gas. Proyek ini terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencakup lahan seluas 1.175 Ha.

Dalam Master Plan KEK Mandalika, direncanakan pengembangan infrastruktur dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2026. Estimasi nilai investasi untuk Proyek ini adalah sebesar kurang lebih USD316,5 juta (Rp4,5 triliun) dengan rencana pembiayaan: (i) Sovereign Loan dari Asian Infrastructure Investment Bank sebesar USD 248,4 juta (78,5%); dan (ii) Pemerintah Indonesia/ITDC/Pendanaan NIA-LPEI sebesar USD 68,1 juta (21,5%).

The construction and development of Mandalika will implement the eco-green and event-based destination concept. With the green eco-tourism concept, facilities in this area must be environmentally friendly in order to increase the selling value of the area. Clean water supply will be provided through a water desalination process, widely known as the SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) system and power supply (other than PT PLN) will be provided with solar power plants. While the event-based destination concept will highlight tourism by providing international standard non-accommodation facilities that will become a tourist attraction while enjoying the beauty of Mandalika. Tourism facilities to be built and developed include hotels, villas, apartments, resorts, housing units, golf courses, recreational facilities, medical and health centers, training centers, art villages and more.

The Mandalika SEZ Tourism Development Project is one of Indonesia's tourism development programs. The program includes the development of basic infrastructure, among others: road networks, clean water networks, river dredging, waste water treatment, landfills, electricity networks and facilities, and gas networks and facilities. This project is located in the Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province (NTB) which covers an area of 1,175 Ha.

In the Mandalika SEZ Master Plan, infrastructure development is planned to be gradually conducted from 2016 to 2026. The estimated investment value for this Project is approximately USD316.5 million (Rp4.5 trillion) with the following financing plans: (i) Sovereign Loan from Asian Infrastructure Investment Bank in the amount of USD 248.4 million (78.5%); and (ii) Indonesian Government/ITDC/NIA-LPEI Funding in the amount of USD 68.1 million (21.5%).

Lokasi Location	Mandalika, Lombok
Nilai Proyek Project Value	USD 316.500.000
Nilai Pinjaman AIIB	USD 248.390.000
Badan Usaha Milik Negara (Program Project Company)/debitur	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)
Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/kreditur	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

Kinerja Keuangan Segmen Usaha Penjaminan

Hingga berakhirnya tahun buku 2018, PT PII telah mengeluarkan beban operasi untuk segmen usaha penjaminan mencapai Rp60,04 miliar. Dibandingkan

Financial Performance Of The Guarantee Business Segment

Up to the end of year 2018 fiscal year, PT PII has issued operating expenses for the guarantee business segment reaching Rp60.04 billion. Compared to the



dengan tahun sebelumnya sebesar Rp74,68 miliar, terjadi penurunan sebesar 19,6%.

Penurunan biaya tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah proyek yang mencapai penandatanganan maupun efektivitas penjaminan seiring dengan penurunan pendapatan penjaminan KPBU, walaupun sudah ada penambahan biaya terkait penjaminan Non-KPBU di tahun 2018.

Hingga akhir tahun 2018, segmen usaha penjaminan membukukan pendapatan yang berasal dari penjaminan KPBU dan Non-KPBU sebesar Rp46,62 miliar atau 76,77% dari capaian tahun 2017 sebesar Rp60,73 miliar. Hal tersebut disebabkan menurunnya jumlah proyek yang mencapai penandatanganan maupun proyek yang penjaminannya dinyatakan efektif.

Dalam segmen usaha penjaminan, pendapatan penjaminan PT PII terutama berasal dari pendapatan provisi dan komisi berupa *Upfront fee* dan pendapatan premi berupa *Recurring fee* penjaminan.

Segmen Usaha Penyiapan Proyek Dan Pendampingan Transaksi/*Project Development Facility* (PDF)

Sejak tahun 2018, PT PII mendapatkan mandat baru, di samping memberikan jaminan pada proyek infrastruktur, tetapi juga terlibat dalam penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Mandat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dalam proses pembangunan infrastruktur yang merupakan proyek strategis pemerintah, kontribusi PT PII sangat besar. Melalui mandat baru tersebut, Perseroan terlibat sejak perencanaan dan pendampingan transaksi sebelum proyek dilaksanakan. Dari sisi pembiayaan, Perseroan ikut menyiapkan mulai penyiapan transaksi hingga memberikan jaminan. Proyek bukan hanya menjadi *bankable*, tetapi juga meningkatkan kepastian keberhasilan transaksi dengan pihak investor yang berujung pada kepastian pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan efisien.

Di saat proyek mulai berjalan, PT PII membentuk *joint monitoring committee* setelah proyek mulai berjalan hingga akhir masa konsesi atau masa investasi. Tujuan komite bersama ini untuk memastikan bahwa proyek berjalan dengan lancar dan semua masalah dapat diselesaikan bersama secara cepat.

previous year, which amounted to Rp74.68 billion, there was a decrease of 19.6%.

The decrease in costs was mainly due to the decrease in the number of projects that reached the signing and guarantees effectiveness along with the decrease in PPP guarantee income, even though there were additional costs related to Non-PPP guarantees in 2018.

Up to the end of 2018, the guarantee business segment posted revenues from PPP and Non-PPP guarantees in the amount of Rp46.62 billion, or 76.77% of the achievement in 2017, which reached Rp60.73 billion. This is due to a decline in the number of projects that have reached the agreement signing as well as those declared effective for guarantee.

In the guarantee business segment, PT PII's guarantee revenues mainly derived from provision and commissions in the form of Upfront fees and premium income in the form of Recurring fees of guarantee.

Project Development Facility (PDF) Business Segment

Since 2018, PT PII has received a new mandate, in addition to providing guarantees for infrastructure projects, it is also involved in the project preparation and transaction assistance. This mandate is stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 73/PMK.08/2018 on Facilities for the Preparation and Implementation of Transactions of Government Cooperation Projects with Business Entities in the Provision of Infrastructure.

PT PII contributed greatly to infrastructure development, which is the government's strategic project. Based on the new mandate, the Company has been involved since the planning and transaction assistance prior to the commencing of the project. In terms of financing, the Company also helps preparing the transaction and providing guarantees. In addition to making projects become bankable, the Company also increases the certainty of the success of transactions with investors, leading to certainty in quality and efficient infrastructure development.

Upon the commencement of the project, PT PII establishes a joint monitoring committee, serving from the beginning of the project until the end of the concession or investment period. This joint committee is established to ensure that the project runs smoothly and any problem arising in this stage can be resolved



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Performance Review per Business Segment

Dengan demikian, investor mendapatkan kepastian bahwa proyek dijalankan sesuai dengan dengan rencana awal. Dengan demikian, peran penting PT PII dalam pembangunan proyek infrastruktur ini adalah merekatkan kerjasama antara badan usaha, pemerintah, pengembang proyek dan investor. Selain itu, Perseroan melakukan *monitoring* pelaksanaannya dengan harapan agar seluruhnya berjalan lancar, yaitu dari penyiapan hingga pembiayaan dan pengelolaan proyek sesuai yang direncanakan.

Kegiatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi yang dikenal PDF merupakan salah satu potensi pengembangan aktivitas kegiatan Perseroan yang dikembangkan sesuai dengan rencana arah pengembangan Perusahaan dalam 5 tahun ke depan.

Proyek-proyek yang dapat menerima fasilitas dalam mandat baru PT PII tersebut adalah proyek KPBU Prioritas, lalu proyek KPBU pembangunan dan/atau pengembangan kilang minyak di dalam negeri.

Sampai dengan tahun buku 2018, PT PII telah menerima penugasan untuk pelaksanaan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi untuk 4 proyek, yaitu:

1. Proyek Jalan Lintas Timur ruas Sumatera Selatan,
2. Proyek Jalan Lintas Timur ruas Riau,
3. Proyek Kereta Api Makassar-Parepare di Makassar,
4. Proyek Rumah Sakit Kanker Dharmais di Jakarta, dan

Kinerja Keuangan Segmen Usaha Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi

Kinerja keuangan untuk segmen usaha penyiapan proyek dan pendampingan transaksi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengingat penugasan ini pertama kali diberikan di tahun 2018. Pada tahun buku tersebut, total beban usaha yang dikeluarkan oleh Perseroan mencapai Rp33,27 miliar.

Beban tersebut terutama berasal dari beban karyawan dan beban konsultan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi dengan total sebesar Rp 30,81 miliar yang mewakili 92,60% dari total beban penyiapan proyek dan pendampingan transaksi.

Pada tahun 2018, pendapatan yang diperoleh segmen usaha penyiapan proyek dan pendampingan transaksi sebesar Rp32,72 miliar dengan *opportunity return* (*margin*) sebesar 8,17%.

promptly. Consequently, investors will be assured that the project is carried out in accordance with the original plan. And thus, the essential role of PT PII in the infrastructure development project is to strengthen the cooperation between business entities, governments, project developers and investors. In addition, by monitoring its implementation, the Company expects that everything will run smoothly, from the preparation to financing and management of project as previously planned.

The project preparation and transaction assistance activities known as PDF is one of the potentials of the Company's development activities that are developed in accordance with the plan for the Company's development direction in the next 5 years.

Projects that may receive facilities in the PII's new mandate are Priority PPP projects, then PPP development projects and/or development of domestic oil refineries.

As of the year 2018, PT PII has received assignments for the implementation of project preparation and transaction assistance for 4 projects, namely:

1. The East Link Sumatera Road Project in South Sumatera,
2. The East Link Sumatera Road Project in Riau,
3. The Makassar-Parepare Railroad Project in Makassar,
4. The Dharmais Cancer Hospital Project in Jakarta, and

Financial Performance of the Project Preparation and Transaction Assistance Business Segment

Financial performance for the project preparation and transaction assistance business segment cannot be compared to the previous year, considering that this assignment was first given in 2018. In that fiscal year, total operating expenses incurred by the Company reached Rp33.27 billion.

The expenditures were mainly derived from employee expenses and project preparation and transaction assistance consultant expenses with a total of Rp 30.81 billion, representing 92.60% of the total project preparation and transaction assistance expenditures.

In 2018, revenues obtained by the project preparation and transaction assistance business segment amounted to Rp32.72 billion with an opportunity return (*margin*) of 8.17%.



Segmen Usaha Pengelolaan Dana

Perseroan telah memiliki manual di bidang operasional terkait dengan pengelolaan dana yang menjadi pedoman dalam kegiatan. Selain itu, PT PII juga menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan pengelolaan dana, misalnya melalui prinsip keadilan (*fair*) dan transparan yang diselenggarakan melalui mekanisme tender.

Strategi Pengelolaan Dana

Perseroan menempatkan dana pada sejumlah instrumen keuangan yang bervariasi berupa instrumen investasi di pasar keuangan, obligasi dan reksa dana. Komposisi dana yang ditempatkan pada instrumen-instrumen tersebut senantiasa disesuaikan sejalan dengan perkembangan kondisi pasar keuangan dengan tujuan agar tercipta manajemen risiko yang baik dan memperoleh pengembalian yang optimum.

Pada tahun 2018, realisasi dari strategi pengelolaan dana dalam bentuk investasi adalah:

1. Porsi Alokasi Dana Investasi

Perseroan mengalokasikan penempatan dana pada instrumen pasar uang dan pasar modal sebagai berikut:

Instrumen Investasi Investment Instruments	Target Alokasi Penempatan (% dari Dana Kelolaan)* Target Allocation of Placement (% of managed fund) *)
Penempatan Pasar Uang/Deposito dan Sejenisnya Placement in money market/time deposit, etc.	0-100% dari dana kelolaan of managed fund
Penempatan pada Pasar Modal: Surat Utang, Surat Berharga dan Sejenisnya Placement in capital market: Securities, bonds, etc.	0-60% dari dana kelolaan of managed fund
Penempatan pada Pasar Modal: Reksa dana Placement in capital market: Mutual funds	0-10% dari dana kelolaan of managed fund

*) Strategi penempatan tetap mempertimbangkan ketentuan sesuai PMK No.95/PMK.08/2017
Placement strategy still considers the provision stipulated in Minister of Finance Regulation No. 95/PMK.08/2017

2. Strategi dan Pengelolaan Dana Investasi

- Mengoptimalkan penempatan pada perbankan sesuai dengan kebijakan dan batas yang telah ditetapkan, dengan terus memperhatikan kecenderungan pergerakan tingkat suku bunga.
- Menempatkan dana pada instrumen obligasi yang meliputi obligasi pemerintah atau BUMN dan obligasi korporasi swasta dengan minimum rating sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam PMK No. 95/PMK.08/2017 (berlaku sejak tanggal 19 Juli 2017).

Fund Management Business Segment

The Company has established a manual in the operational field related to fund management, which is a guideline in the activities. In addition, PT PII also applies good corporate governance in fund management activities, for example through the principle of fairness and transparency that is held through the bidding mechanism.

Fund Management Strategy

The Company places funds in a variety of financial instruments in the form of investment instruments in the financial markets, bonds, and mutual funds. The composition of funds placed in these instruments is constantly adjusted in line with the development of financial market conditions with the objective of creating good risk management and obtaining optimum returns.

In 2018, the realization of the fund management strategy in the form of investment is

1. Portion of Investment Fund Allocation

The company allocates fund placements in the following money market and capital market instruments:

2. Investment Fund Strategy and Management

- Optimize placements in the Bank in accordance with established policies and limits with continuous attention to the direction of interest rate movements
- Optimize placement with bonds instruments, including Government or SOE bonds, and private corporate bonds with minimum rating as required in Minister of Finance Regulation No. 95/PMK.08/2017 (effective as of July 19, 2017)



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Performance Review per Business Segment

Perusahaan telah menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 95/PMK.08/2017 mengenai Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh BUPI yang berlaku sejak tanggal 19 Juli 2017. Peraturan tersebut, antara lain mengenai penempatan kekayaan BUPI dalam bentuk investasi. Sesuai dengan ketentuan peralihan pada Pasal 19, penempatan kekayaan BUPI dalam bentuk investasi yang telah berjalan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku masih tetap dilaksanakan sampai dengan investasi tersebut jatuh tempo.

Dari total pengelolaan dana sebesar Rp10,32 triliun, portofolio investasi Perseroan hingga akhir Desember 2018 terdiri dari investasi atas deposito berjangka sebesar 70,93%, investasi atas pendapatan tetap (obligasi) sebesar 29,04%, dan investasi atas reksa dana sebesar 0,03%.

Berikut adalah rincian penempatan dana/kekayaan dalam bentuk investasi Perusahaan:

1. Investasi pada Deposito Berjangka

Total Investasi Deposito per Kategori Rating Total Deposit Investment by Rating Category	Jumlah (Angka Penuh) Nominal (Full Amount)
I. Peringkat Rating AAA	2.514.423.184.207
1. Bank Pemerintah State-Owned Banks	-
2. Bank Swasta Private Banks	2.514.423.184.207
II. Peringkat Rating AA+	3.011.430.000.000
1. Bank Pemerintah State-Owned Banks	2.583.000.000.000
2. Bank Swasta Private Banks	428.430.000.000
III. Peringkat Rating AA	1.794.960.000.000
1. Bank Pemerintah State-Owned Banks	-
2. Bank Swasta Private Banks	1.794.960.000.000
Total	7.320.813.184.207

Total Investasi Deposito per Kategori Buku Bank Total Deposit Investment by BUKU Category	Jumlah (Angka Penuh) Nominal (Full Amount)
I. Buku IV	57.500.000.000
1. Bank Pemerintah State-Owned Banks	-
2. Bank Swasta Private Banks	57.500.000.000
II. Buku III	5.039.923.184.207
1. Bank Pemerintah State-Owned Banks	2.583.000.000.000
2. Bank Swasta Private Banks	2.456.923.184.207
III. Buku II	2.223.390.000.000
1. Bank Pemerintah State-Owned Banks	-
2. Bank Swasta Private Banks	2.223.390.000.000
Total	7.320.813.184.207

The Company has implemented the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 95/PMK.08/2017 regarding the Scope and Procedures for Granting Government Infrastructure Guarantee by BUPI, which took effect on 19 July 2017, which regulates the placement of BUPI's assets in the form of investment. In accordance with the transitional provisions in Article 19, the placement of BUPI's assets in the form of investments that have been carried out prior to the Minister of Finance Regulation shall continue to be executed until such investment matures.

From the total fund management of Rp10.32 trillion, the Company's investment portfolio as of the end of December 2018 consisted of investments in time deposits by 70.93%, investments in fixed income (bonds) by 29.04%, and investments in mutual funds by 0.03%.

The following are details of funds/assets placement in the form of Company investments:

1. Investment in Time Deposits



2. Investasi pada Pendapatan Tetap

2. Investment in Fixed Income

Penerbit Obligasi Bonds Issuer	Peringkat Rating	Posisi 31 Desember 2018 Position as at 31 December 2018
		Nilai Obligasi (Market Value - AFS)/(Carrying Value - HTM) Bonds Value (Market Value - AFS)/(Carrying Value - HTM)
Pemerintah - Government	-	1.215.982.959.826
	AAA	1.341.330.942.448
	AA+	114.255.000.000
BUMN - State-Owned Enterprise	AA	223.064.073.225
	A	58.265.200.000
	AA+	0
Swasta - Private Corporations	AA	43.893.065.334
Total		2.996.791.240.831

3. Investasi pada Reksa Dana

3. Investment in Mutual Funds

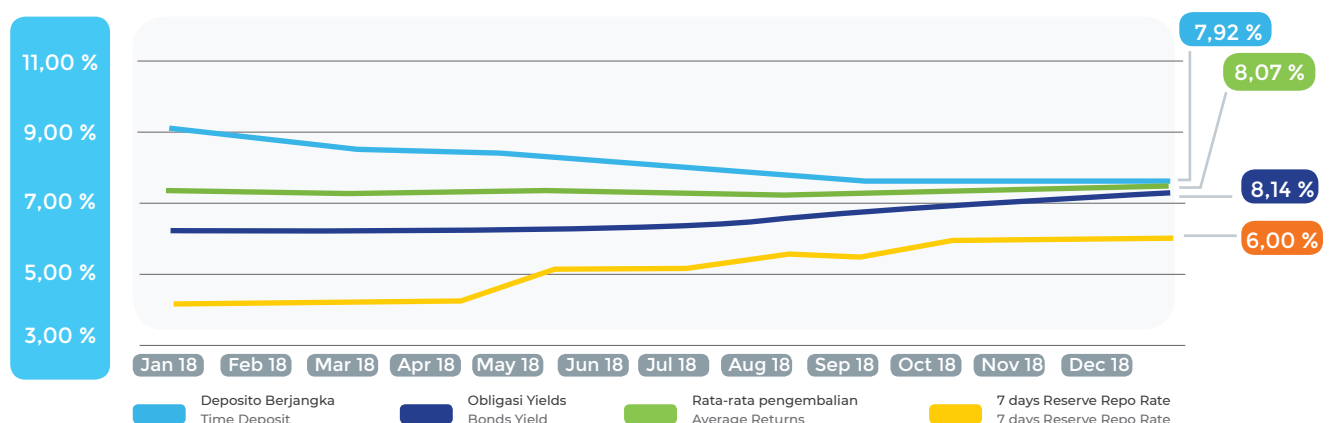
No	Manajer Investasi Investment Manager	Produk Reksa Dana Mutual Fund Product	Jenis* Type*	Mata Uang Currency	Jumlah Total
1	PT Mandiri Manajemen Investasi	Reksa Dana Mandiri Investa Equity Dynamo Factor	S	IDR	250.633.909
	Total				250.633.909
2	PT Danareksa Investment Management	Reksadana Danareksa Mawar Fokus 10	S	IDR	249.305.263
		Danareksa Gebyar Indonesia II	PT	IDR	1.249.235.697
	Total				1.498.540.960
3	PT Bahana TCW Investment Management	Reksadana Kehati Lestari	PT	IDR	1.250.068.478
	Total				1.250.068.478
	TOTAL INVESTASI DI REKSA DANA				2.999.243.347

* S : Saham | Equity

PT : Pendapatan Tetap | Fixed Income

Pada tahun 2018, Perseroan memperoleh pendapatan pengelolaan dana sebesar Rp754,91 miliar dengan rata-rata tingkat pengembalian bunga pada Desember 2018 sebesar 8,07%. Perolehan ini lebih tinggi 207 basis poin dibandingkan suku bunga acuan Bank Indonesia, yaitu BI 7D Repo Rate yang sebesar 6,00%.

In 2018, the Company obtained fund management revenues of Rp754.91 billion with an average interest rate of 8.07% in December 2018. This achievement is higher by 207 basis points compared to Bank Indonesia benchmark interest rate, namely BI 7D Repo Rate, which stood at 6.00%.





Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Performance Review per Business Segment

Sepanjang tahun 2018, capaian pendapatan segmen pengelolaan dana sebesar Rp754,91 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp705,23 miliar. Peningkatan ini disebabkan peningkatan tingkat bunga atas penempatan di investasi Perseroan tahun berjalan.

During 2018, the revenues for the fund management segment amounted to Rp754.91 billion, an increase compared to 2017, which reached Rp705.23 billion. The increase was due to an increase in interest rates on placements in the Company's investment for the year.

KEGIATAN PENDUKUNG USAHA

Kegiatan *Capacity Building Stakeholder*

Kapasitas pemahaman Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dan pemangku kepentingan utama sangat penting bagi keberlanjutan proyek infrastruktur yang dikembangkan melalui skema KPBU. Karena itulah, Perseroan memandang penting untuk menjadikan kegiatan peningkatan kapasitas tersebut sebagai agenda prioritas di bidang operasional.

Dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas PJPK dan para pemangku kepentingan utama tersebut, Perseroan menjalin mitra kerja sama dengan mitra akademik nasional maupun daerah terkait dengan proyek yang sedang dalam proses. Selain itu, PT PII juga mendorong pengembangan kapasitas dari para pemangku kepentingan atas pemahaman perencanaan dan pelaksanaan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) melalui keberadaan IIGF Institute.

Pelaksanaan *capacity building* dilakukan oleh IIGF Institute secara berkala melalui program *General Active Learning Program* (GALP). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar penyediaan infrastruktur dan meningkatkan pemahaman tentang penyediaan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sepanjang tahun 2018, pelaksanaan program GALP dalam rangka *capacity building* dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

No.	Mitra/Pemangku Kepentingan Partner/Stakeholder	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
1	Pemerintah Provinsi Yogyakarta Yogyakarta Provincial Government	Februari 2018 February 2018
2	Pemerintah Kota Balikpapan Balikpapan City Government	Maret 2018 March 2018
3	Pemerintah Kota Depok Depok City Government	Maret 2018 March 2018

BUSINESS SUPPORT ACTIVITIES

Stakeholder *Capacity Building Activity*

The understanding capacity of the Contracting Agency (CA) and the major stakeholders is very important for the sustainability of infrastructure projects developed under the PPP scheme. For this reason, the Company considers the importance of organizing capacity building activities as priority agenda in the operational field.

In carrying out the Contracting Agency and major stakeholders capacity building activities, the Company has established partnerships with national and regional academic partners related to projects that are in process. In addition, PT PII also encourages capacity development from the stakeholders to understand the planning and implementation of Public Private Partnership projects through the existence of IIGF Institute.

The implementation of capacity building is carried out by the IIGF Institute on a regular basis through the General Active Learning Program (GALP). This program aims to increase the knowledge regarding the basic principles of infrastructure provision and improve the understanding on the provision of infrastructure under the Public Private Partnership (PPP) scheme.

During 2018, the implementation of the GALP program in the context of capacity building is described in the following table:



No.	Mitra/Pemangku Kepentingan Partner/Stakeholder	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika Ministry of Communication and Information Technology	Maret 2018 March 2018
5	Direktorat BMN – DJKN Directorate of BMN – DJKN	Maret 2018 March 2018
6	Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Directorate General of Budget of the Ministry of Finance	21 Maret 2018. 21 March 2018
7	Pemerintah Kota Bitung Bitung City Government	Maret 2018 March 2018
8	DJPR Kementerian Keuangan DPJR of the Ministry of Finance	April 2018 April 2018
9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Perusahaan Gas Negara Ministry of Energy and Mineral Resources and PT Perusahaan Gas Negara	April 2018 April 2018
10	Kementerian Pariwisata Ministry of Tourism	April 2018 April 2018
11	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	Mei 2018 May 2018
12	Kementerian Sosial Ministry of Social Affairs	Juni 2018 June 2018
13	Kementerian Keuangan dan Bappenas Ministry of Finance and Bappenas	Juni 2018 June 2018
14	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Public Housing	Agustus 2018 August 2018
15	Kementerian Kesehatan Ministry of Health	Agustus 2018 August 2018
16	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	Agustus 2018 August 2018
17	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta Provincial Government	Oktober 2018 October 2018
18	Universitas Padjadjaran University of Padjajaran	Oktober 2018 October 2018
19	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Surabaya-Madura Area Development Agency	Oktober 2018 October 2018
20	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	Oktober 2018 October 2018
21	Pemerintah Provinsi Tangerang Selatan South Tangerang Provincial Government	November 2018 November 2018
22	Media Media	November 2018 November 2018
23	Pemerintah Kota Dumai Dumai City Government	November 2018 November 2018
24	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Indonesian Institute of Sciences	Desember 2018 December 2018
25	Kementerian ESDM Ministry of ESDM	Desember 2018 December 2018
26	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan South Sumatra Provincial Government	Desember 2018 December 2018

Corporate Event

Kegiatan operasional lain yang diselenggarakan secara rutin oleh Perseroan dikemas dalam bentuk *corporate event*. PT PII menjalankan kegiatan perusahaan ini dengan cara menyelenggarakan sendiri atau pun terlibat dalam kegiatan yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan lain.

Corporate Event

Other operational activities regularly organized by the Company are packaged in the form of corporate events. PT PII organizes this company activities by organizing it itself or through participation in activities organized by other stakeholders.



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Performance Review per Business Segment

Berikut ini kegiatan diikuti yang mendukung kinerja segmen usaha Perseroan sepanjang tahun 2018.

The following are activities attended that support the performance of the Company's business segments throughout 2018.

No.	Uraian Kegiatan Description of Activity	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
1	Focus Group Discussion (FGD) Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan Non KPBU, Focus Group Discussion (FGD) Provision and Implementation of Non PPP Guarantee,	Februari 2018 February 2018
2	Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Regres, dan Perjanjian Penjaminan pada Proyek SPAM Lampung Signing of the Cooperation Agreement, Regres Agreement, and Guarantee Agreement on the Lampung SPAM Project	Februari 2018 February 2018
3	Stakeholder Gathering dengan Sekretariat Kementerian Keuangan Stakeholder Gathering with the Secretariate of the Ministry of Finance	Maret 2018 March 2018
4	Penandatanganan Perjanjian Penugasan dan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU AP Jalan Lintas Timur Sumatera Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan Signing of the Assignment Agreement and Implementation Agreement of the AP PPP Project of the Eastern Sumatra Link Road in the Riau Province and South Sumatra Province	Mei 2018 May 2018
5	Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi PT PII dengan Stakeholders Breaking the Fast Together and Gathering of PT PII with Stakeholders	Mei 2018 May 2018
6	Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Badan Usaha dan Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Breaking the Fast Together and Gathering of Business Entities and Institutions under the coordination of the Ministry of Finance	Mei 2018 May 2018
7	Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Terapi Proton, Studi Kasus & Lesson Learned bersama Rumah Sakit Kanker Dharmais Focus Group Discussion (FGD) on the Implementation of the Proton Therapy, Case Study & Lesson Learned with the Dharmais Cancer Hospital	Juni 2018 June 2018
8	Serah Terima Penugasan dan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan, dan Pendampingan Transaksi Proyek KPBU Rumah Sakit Kanker Dharmais Handover of Assignment and Agreement of Preparation Facilities and Transaction Assistance Implementation of the Dharmais Cancer Hospital PPP Project	Agustus 2018 August 2018
9	Media Forum: Creative & Innovative Financing bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Perekonomian dan Informatika (Kemenkominfo), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Media Forum: Creative & Innovative Financing with the Ministry of Finance, Ministry of Public Works and Public Housing, Ministry of Economy and Information Technology, and Ministry of Transportation	Oktober 2018 October 2018
10	2018 International Monetary Fund-World Bank Annual Meeting 2018 International Monetary Fund-World Bank Annual Meeting	Oktober 2018 October 2018
11	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Penjaminan dan Regres Proyek KPBU SPAM Semarang Barat Signing of the Cooperation, Guarantee and Regres Agreements of the West Semarang SPAM PPP Project	November 2018 November 2018
12	Market Sounding Proyek KPBU Jalan Trans Papua Market Sounding of the Trans Papua Road PPP Project	November 2018 November 2018
13	Peresmian Proyek KPBU SPAM Semarang Barat oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR Inauguration of the West Semarang SPAM PPP Project by the Ministry of Finance and the Ministry of PUPR	Desember 2018 December 2018



Stakeholder Relations

Membina hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan eksternal juga menjadi prioritas kegiatan operasional Perseroan. Kegiatan ini penting demi menjaga keberlanjutan proyek dalam lingkungan kegiatan usaha Perseroan.

Berikut ini kegiatan pengelolaan hubungan dengan para pemangku kepentingan yang mendukung kinerja segmen usaha Perseroan sepanjang tahun 2018.

Stakeholder Relations

Building good relationships with external stakeholders is also a priority of the Company's operational activities. This activity is important for maintaining project sustainability in the Company's business activities.

The following are stakeholders relation activities that support the performance of the Company's business segments throughout 2018.

No.	Uraian Kegiatan Description of Activity	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
1	Partisipasi pada acara LMAN Sport Day Participation in the LMAN Sport Day event	Januari 2018 January 2018
2	Malam Apresiasi bersama Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan Appreciation Night with the Minister of PUPR and Minister of Transportation	Februari 2018 February 2018
3	Partisipasi PT PII pada HUT Seabad ITB Participation of PT PII in ITB Centennial Anniversary	April 2018 April 2018
4	Media Briefing dan Media Gathering PT PII Media Briefing and Media Gathering of PT PII	April 2018 April 2018
5	Partisipasi PT PII pada Workshop PINA KPBU dengan Bappenas Participation of PT PII in the PPP PINA Workshop with Bappenas	April 2018 April 2018
6	Partisipasi PT PII pada Indonesia Project Bound Roundtable Participation of PT PII in the Indonesia Project Bound Roundtable	April 2018 April 2018
7	Bazar dan Tarhib Ramadhan Kementerian Keuangan Ramadhan Bazaar and Exhibition of the Ministry of Finance	Mei 2018 May 2018
8	Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Badan Usaha dan Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Breaking the Fast Together and Gathering of Business Entities and Institutions under the Coordination of the Ministry of Finance	Mei 2018 May 2018
9	Buka Puasa Bersama Media dan Media Briefing PT PII Breaking the Fast Together with the Media and Media Briefing of PT PII	Juni 2018 June 2018
10	Partisipasi Pertandingan Persahabatan PT Geo Dipa Energi (Persero) Participation in the Friendly Match of PT Geo Dipa Energi (Persero)	Agustus 2018 August 2018
11	Workshop Risiko Direksi BUMN Kementerian Keuangan Workshop on Risks of the Board of Directors of SOEs of the Ministry of Finance	Agustus 2018 August 2018
12	Partisipasi dalam Hari Oeang ke-72 Participation in the 72 nd Hari Oeang (Money Day)	Oktober 2018 October 2018
13	Peringatan Hari Sumpah Pemuda bersama RS Kanker Dharmais Commemoration of Youth Day with Dharmais Cancer Hospital	Oktober 2018 October 2018
14	Partisipasi dalam HUT DJKN yang ke-12 Participation in the 12 th Anniversary of DJKN	November 2018 November 2018
15	Media Enhancement Trip: Kunjungan Proyek Jalan Tol Batang-Semarang Media Enhancement Trip: Visit to the Batang-Semarang Toll Road Project	November 2018 November 2018
16	Forum Perhubungan: Pembiayaan Kreatif Pembangunan Infrastruktur Transportasi Indonesia Transportation Forum: Creative Financing of Indonesia's Transportation Infrastructure Development	November 2018 November 2018
17	Bincang Santai Menkominfo dan Media Casual Talk with the Minister of Communication and Information and the Media	November 2018 November 2018



Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Review

Laba tahun berjalan PT PII pada tahun 2018 tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya, karena didukung oleh kenaikan pendapatan dari pengelolaan dana serta pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi.

Uraian mengenai kinerja keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia. Analisis tinjauan keuangan ini dijabarkan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - Member firm PriceWaterhouseCoopers dengan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

The current year's profit of PT PII increased compared to the previous year, due to increases in revenue from fund management and project preparation income and transaction assistance.

The description of financial performance of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) for the year ended on 31 December 2018 was prepared in accordance with the Statements of Financial Accounting Standard (SFAS) generally applied in Indonesia. This financial analysis is based on the Company's financial statements, which has been audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners - Member Firm of PricewaterhouseCoopers, which the presented financial statements received fair opinion in all material aspects.





Karena itulah, tinjauan keuangan yang disampaikan ini telah memperhatikan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini. Bahasan serta analisis tentang kondisi keuangan ini disajikan dalam tiga bagian sebagai berikut:

1. Kinerja Posisi Keuangan
2. Kinerja Laba Rugi Komprehensif
3. Kinerja Arus Kas

KINERJA POSISI KEUANGAN

Hingga berakhirnya tahun buku 2018, PT PII berhasil membukukan aset sebesar Rp10.620,92 miliar, tumbuh 2,51% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp10.360,65 miliar. Sedangkan jumlah liabilitas selama tahun berjalan mencapai Rp140,25 miliar, naik 28,42% dan ekuitas mencapai Rp10.480,67 miliar atau tumbuh sebesar 2,24%.

Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya Perseroan untuk senantiasa menjaga keuntungan dan kesinambungan pertumbuhan kinerja bisnis secara berkelanjutan. Pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan menjadi modal penting bagi PT PII untuk terus berperan aktif sebagai BUPI yang bertujuan untuk mendukung program Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur nasional melalui penyediaan penjaminan di bidang infrastruktur. Dengan prinsip tersebut, Perseroan terus berupaya meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan melalui optimalisasi pendapatan penjaminan dan pengelolaan dana dengan tetap memperhatikan tingkat risiko yang dapat diterima.

Therefore, the submitted financial review has taken into account the notes to Financial Statements as an integral part of this Annual Report. The discussion and analysis on the financial conditions are presented in the following three parts:

1. Statement of Financial Position
2. Statement of Comprehensive Income
3. Statement of Cash Flows

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Up to the end of the year 2018, PT PII managed to post total assets of Rp10,620.92 billion, growing by 2.51% compared to the previous year, which reached Rp10,360.65 billion. While the total liabilities for the year reached Rp140.25 billion, an increase of 28.42% and equity reached Rp10,480.67 billion or an increase of 2.24%.

This achievement is the result of the Company's efforts to maintain a sustainable profit as well as business growth. Sustainable performance growth is an important resource for PT PII to continue performing an effective role as an Infrastructure Guarantee Institution (BUPI) with the objective to provide Government guarantee in infrastructure through the efforts to support the Government's program to accelerate the development of national infrastructure. With this principle, the Company continuously strives to improve its financial performance growth through the optimization of investments while maintaining an acceptable level of risk.

Tabel Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position Table

(dalam Rp Miliar) | (in Rp Billion)

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Aset Assets	10.620,92	10.360,65	260,27	2,51
Liabilitas Liabilities	140,25	109,21	31,04	28,42
Ekuitas Equity	10.480,67	10.251,44	229,23	2,24



Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Review

ASET

Hingga berakhirnya tahun buku 2018, aset Perseroan tercatat sebesar Rp10.620,92 miliar, meningkat 2,51% dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar Rp10.360,65 miliar. Secara umum peningkatan total aset Perseroan dipengaruhi oleh tingginya pendapatan dari hasil pengelolaan dana.

Secara komposisi, portofolio investasi merupakan komponen terbesar dalam aset, yaitu mencapai 81,66%. Kas dan setara kas merupakan komponen terbesar kedua dengan porsi 16,00% dari total aset.

Sementara dari sisi pertumbuhan, komponen piutang lainnya mengalami pertumbuhan yang tertinggi dibandingkan seluruh komponen aset, dengan kenaikan 28,65% dibandingkan tahun 2017 yang diikuti oleh pertumbuhan aset dalam bentuk Aset tak berwujud antara lain pengembangan piranti lunak.

ASSETS

Up to the end of the year 2018 financial year, the Company's assets amounted to Rp10,620.92 billion, an increase of 2.51% compared to 2017, which amounted to Rp10,360.65 billion. In general, the increase in the Company's total assets was influenced by the high rate of return from investments.

In composition, the investment portfolio is the largest component in assets, which reached 81.66%. Cash and cash equivalents is the second largest component with a portion of 16.00% of total assets.

While in terms of growth, the component of other receivables had the highest growth compared to all assets components, with an increase of 28.65% compared to 2017, followed by the growth of assets in the form of intangible assets, including software development.



**Tabel Aset**

Table of Assets

(dalam Rp Miliar) | (in Rp Billion)

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	1.699,18	1.443,05	256,13	17,75
Investasi Investment	8.673,17	8.672,83	0,34	0,00
Piutang usaha Account receivables	79,98	74,84	5,14	6,87
Piutang lainnya Other receivables	8,98	6,98	2,00	28,65
Biaya dibayar dimuka dan uang muka Prepaid expenses and advances	2,45	2,42	0,03	1,24
Pajak dibayar di muka Prepaid tax	0,37	-	0,37	-
Aset tetap Fixed assets	18,78	16,27	2,51	15,43
Aset tak berwujud Intangible assets	1,20	0,99	0,21	21,21
Beban tangguhan Deferred expenses	43,36	41,66	1,70	4,08
Beban <i>front-end</i> Front-end expenses	-	0,76	(0,76)	(100,00)
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	88,10	95,50	(7,40)	(7,75)
Uang jaminan yang dapat dikembalikan Refundable deposits	5,35	5,35	-	-
Jumlah Aset Total Assets	10.620,92	10.360,65	260,27	2,51

Kas dan Setara Kas

Hingga berakhirnya tahun buku 2018, posisi kas dan setara kas mencapai Rp1.699,18 miliar, tumbuh 17,75% dibandingkan tahun 2017. Porsi komponen kas dan setara kas dalam aset mencapai 16,00%.

Pertumbuhan komponen kas dan setara kas ini dipengaruhi oleh penerimaan pendapatan bunga atas investasi deposito, obligasi dan imbal jasa penjaminan serta imbal jasa penyiapan proyek.

Investasi

Portofolio investasi Perseroan hingga akhir tahun buku 2018 mencapai Rp8.673,17 miliar, tidak jauh berbeda dengan posisi tahun sebelumnya yang mencapai sebesar Rp8.672,83 miliar. Pada tahun ini terdapat komponen investasi dalam bentuk penempatan pada instrumen reksa dana, yang pada tahun sebelumnya tidak ada.

Komposisi portofolio investasi Perseroan pada akhir tahun 2018 meliputi deposito berjangka sebesar 70,93%, instrumen pendapatan tetap atau obligasi sebesar 29,04%, dan investasi pada reksa dana sebesar 0,03%.

Cash and Cash Equivalents

Up to the end of the year 2018, cash and cash equivalents position amounted to Rp1,699.18 billion, growing by 17.75% compared to 2017. The portion of cash and cash equivalents component in assets reached 16.00%.

The growth in cash and cash equivalents component was influenced by the receipt of interest income on time deposits, bonds, and guarantee fees that exceeded the Company's routine operational expenses.

Investment

The Company's investment portfolio up to the end of the 2018 fiscal year amounted to Rp8,673.17 billion, not much different from the position in the previous year, which amounted to Rp8,672.83 billion. The increase was due to placement in mutual fund investment instruments, which did not exist in the previous year.

Overall, the composition of the Company's investment portfolio at the end of 2018 consists of time deposits by 70.93%, investments in fixed income or bonds by 29.04%, and investments in mutual funds by 0.03%.



Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Review

LIABILITAS

Hingga berakhirnya tahun buku 2018, posisi liabilitas Perseroan mencapai Rp140,25 miliar, lebih tinggi 28,42% dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp109,21 miliar. Kontribusi terbesar dalam komponen liabilitas adalah pinjaman dari Pemerintah yang bersumber dari pinjaman penerusan atas dana pinjaman dari World Bank.

Tabel Liabilitas

Table of Liabilities

(dalam Rp Miliar) | (in Rp Billion)

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Utang usaha Account payables	7,48	3,34	4,14	123,95
Utang pajak Taxes payables	4,82	3,48	1,34	38,51
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain Accrued expenses, provisions, and other payables	42,91	28,73	14,18	49,36
Pendapatan tangguhan Unearned revenues	8,51	8,09	0,42	5,19
Pinjaman penerusan Two-step loans	55,13	45,28	9,85	21,75
Liabilitas imbalan kerja Employee benefit obligation	21,40	20,29	1,11	5,47
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	140,25	109,21	31,04	28,42

Komponen liabilitas yang mengalami kenaikan terbesar adalah utang usaha mencapai 123,95%, dibanding pada tahun 2017 sebesar Rp3,34 miliar menjadi Rp7,48 miliar di tahun 2018. Pada umumnya, seluruh komponen liabilitas mengalami pertumbuhan positif.

Sedangkan pinjaman penerusan yang merupakan komponen terbesar dalam liabilitas, mengalami kenaikan 21,75%. Pinjaman penerusan ini menggunakan SUN Benchmark dengan tenor 20 tahun sebagai acuan tingkat suku bunga.

EKUITAS

Hingga berakhirnya tahun buku 2018, posisi ekuitas Perseroan mencapai Rp10.480,67 miliar, tumbuh 16,18% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp10.251,44 miliar. Komponen terbesar dari ekuitas adalah modal saham yang mencapai Rp8.000,00 miliar atau 76,33% dari total ekuitas.

LIABILITIES

Up to the end of the 2018 fiscal year, the Company's liabilities amounted to Rp140.25 billion, 28.42% higher compared to 2017, which amounted to Rp109.21 billion. The largest contribution in the liability component is loan from the Government originating from two-step loan from the World Bank.

The liability component with the largest increase in 2018 was account payables, which reached 123.95%, from Rp3.34 billion in 2017 to Rp7.48 billion in 2018. In general, all liability components had positive growth.

While the two-step loan, the largest component in the liability, increased by 21.75%. The two-step loan uses the SUN Benchmark with a tenor of 20 years as the benchmark interest rates.

EQUITY

Up to the end of the 2018 fiscal year, the Company's equity amounted to Rp10,480.67 billion, growing by 16.18% compared to 2017, which amounted to Rp10,251.44 billion. The largest component of equity is share capital, which amounted to Rp8,000.00 billion or 76.33% of total equity.

**Tabel Ekuitas**

Table of Equity

(dalam Rp Miliar) | (in Rp Billion)

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Modal saham Share Capital	8.000,00	8.000,00	-	-
Rugi belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan tersedia untuk dijual Unrealized loss from available-for-sale financial assets	(111,38)	32,36	(143,74)	(444,19)
Rugi aktuarial Loss from actuarial	0,84	(2,19)	3,03	(138,36)
Saldo laba Retained earnings				
- Ditentukan penggunaannya Appropriated	116,45	92,92	23,53	25,32
- Tidak ditentukan penggunaannya Unappropriated	2.474,76	2.128,35	346,41	16,28
Jumlah Ekuitas Total Equity	10.480,67	10.251,44	229,45	2,24

KINERJA LABA RUGI KOMPREHENSIF

Hingga berakhirnya tahun buku 2018, total laba komprehensif Perseroan mencapai Rp330,38 miliar, melemah 37,46% dibandingkan tahun 2017 yang mencapai sebesar Rp528,23 miliar. Rincian kinerja laba/rugi komprehensif dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Up to the end of the 2018 fiscal year, the Company's total comprehensive income amounted to Rp330.38 billion, decreasing by 37.46% compared to 2017, which amounted to Rp528.23 billion. Details on the statement of comprehensive income can be viewed in the following table.

Tabel Laba Rugi Komprehensif

Comprehensive Income Table

(dalam Rp Miliar) | (in Rp Billion)

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Revenues	834,25	765,96	68,29	8,92
Beban usaha Operating expenses	(356,79)	(313,82)	(42,97)	13,69
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	477,46	452,14	25,32	5,60
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan Income Tax Benefit (Expense)	(6,38)	18,33	(24,71)	(134,81)
Laba tahun berjalan Profit for the year	471,08	470,47	0,61	0,13
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun berjalan Comprehensive Income (Loss) For the Year	(140,70)	57,76	(198,46)	(343,59)
Jumlah Penghasilan komprehensif tahun berjalan Total Comprehensive Income for the Year	330,38	528,23	(197,85)	(37,46)



Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Review

PENDAPATAN

Pada tahun buku 2018, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp834,25 miliar, naik Rp68,29 miliar atau 8,92% terhadap pendapatan yang dibukukan pada tahun 2017 yang mencapai Rp765,96 miliar. Pendapatan pada 2018 meningkat karena kegiatan usaha penjaminan proyek dan pendampingan transaksi serta penjaminan Non-KPBU.

Pada tahun 2018 Perseroan juga membukukan pendapatan penjaminan dari beberapa proyek yang telah dijamin dari sektor ketenagalistrikan, telekomunikasi, penyedia air minum, jalan tol dan pariwisata. Selain itu, Perseroan juga membukukan pendapatan dari kegiatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (*Project Development Facility*/PDF) di tahun 2018.

BEBAN USAHA

Beban usaha Perseroan terdiri atas beban penjaminan, beban penyiapan proyek dan pendampingan transaksi/PDF, beban administrasi dan umum, beban pengembangan usaha dan beban lainnya. Pada tahun buku 2018, total beban usaha mencapai Rp356,79 miliar, meningkat 13,69% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp313,82 miliar.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya komponen beban penyiapan proyek dan pendampingan transaksi/PDF yang baru dilaksanakan pada tahun 2018 yang mencapai Rp33,27 miliar, yang merupakan biaya dalam pelaksanaan penugasan yang diterima pada tahun 2018.

Komponen terbesar dari beban usaha adalah beban pajak final yang mencapai 39,20% dari total beban. Komponen ini naik 2,53%, dari Rp136,42 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp139,87 miliar di tahun 2018.

REVENUES

In the 2018 fiscal year, the Company posted revenues of Rp834.25 billion, an increase of Rp68.29 billion or 8.92% compared to the revenues posted in 2017, which reached Rp765.96 billion. Increased income in 2018 was derived from project guarantee activities, transaction advisory services and non-PPP project guarantee.

In 2018 the Company also posted guarantee revenues from several guaranteed projects in the electricity, telecommunications, drinking water, toll road, and tourism sectors. In addition, the Company also posted Project Development Facility (PDF) revenues in 2018.

OPERATING EXPENSES

The Company's expenses consist of guarantee expenses, project development facility (PDF), general and administrative expenses, business development expenses and other expenses in greater amounts. In the 2018 fiscal year, total operating expenses amounted to Rp356.79 billion, an increase of 13.69% compared to 2017, which amounted to Rp313.82 billion.

This increase was mainly due to the project development facility/PDF component that was introduced in 2018, which amounted to Rp33.27 billion. This component was introduced in 2018, which is the cost incurred in the implementation of assignments received in 2018.

The largest component of operating expenses is the final tax expense, which reached 39.20% of total expenses. This component increased by 2.53%, from Rp136.42 billion in 2017 to Rp139.87 billion in 2018.



Komponen terbesar kedua adalah beban administrasi dan umum yang porsinya mencapai 30,39% dari total beban usaha. Beban dari komponen ini naik 23,47% menjadi sebesar Rp108,42 miliar pada tahun 2018. Peningkatan beban administrasi dan umum salah satunya disebabkan karena adanya beban penambahan luas area kerja Perseroan, beban karyawan yang semakin bertambah, dan pembiayaan dalam rangka keikutsertaan Perseroan dalam *event* besar di tahun 2018 yaitu *International Monetary Fund-World Bank Group Annual Meeting*.

Beban pengembangan usaha juga naik 19,16%, menjadi Rp7,65 miliar pada tahun 2018. Kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan kegiatan IIGF Institute dalam mendukung kemajuan pelaksanaan penjaminan melalui *Capacity Building*.

The second largest component is the general and administrative expenses, with a portion reaching 30.39% of the total operating expenses. The cost of this component increased by 23.47% to Rp108.42 billion in 2018. The increases in administrative and general expenses was due to an increase in the Company's work area, increasing employee expenses, and financing for the Company's participation in a large event in 2018, namely the International Monetary Fund - World Bank Group Annual Meeting.

Business development expenses also increased by 19.16%, to Rp7.65 billion in 2018. The increase was due to an increase in IIGF Institute activities to support the progress of guarantee implementation through Capacity Building.

Tabel Beban Usaha

Operating Expenses Table

(dalam Rp Miliar) | (in Rp Billion)

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Beban pajak final Final tax expense	139,87	136,42	3,45	2,53
Penjaminan Guarantee expenses	60,04	74,68	(14,64)	(19,60)
Penyiapan proyek dan Pendampingan Transaksi Project development facility	33,27	-	33,27	100,00
Administrasi dan umum General and administrative expenses	108,42	87,81	20,61	23,47
Pengembangan usaha Business development expenses	7,65	6,42	1,23	19,16
Penyusutan Depreciation	6,49	6,03	0,46	7,63
Amortisasi Amortization	0,56	1,11	(0,55)	(49,55)
Beban bunga pinjaman Interest rate expenses	4,19	2,98	1,21	40,60
Penghasilan keuangan, kotor Finance income, gross	(2,63)	(0,93)	(1,70)	182,80
Keuntungan/(kerugian) kurs, bersih Net foreign exchange gain/(loss)	(0,99)	(0,87)	(0,12)	13,79
Lain-lain Others	(0,08)	0,17	(0,25)	(147,06)
Jumlah beban usaha Total operating expenses	356,79	313,82	42,97	13,69



Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Review

LABA TAHUN BERJALAN

Perusahaan membukukan Laba Tahun Berjalan pada 2018 sebesar Rp471,08 miliar, naik sebesar Rp0,61 miliar, atau 0,13% lebih tinggi dibandingkan perolehan tahun 2017 yang Rp470,47 miliar. Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan dari pengelolaan dana dan pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi/PDF.

Tabel Laba

Table of Profit

(dalam Rp Miliar) | (in Rp Billion)

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Laba tahun berjalan Profit for the year	471,08	470,47	0,61	0,13
Jumlah Laba Komprehensif tahun berjalan Total Comprehensive Income for the year	330,38	528,23	(197,85)	(37,46)

PROFIT FOR THE YEAR

In 2017, the Company posted a profit for the year of Rp471.08 billion, an increase of Rp0.61 billion or 0.13% higher than 2017, which amounted to Rp470.47 billion. The increase was driven by increases in revenues from fund management and project preparation and transaction advisory (PDF).

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pada tahun 2018, realisasi laba komprehensif tahun berjalan adalah Rp330,38 miliar, menurun Rp197,85 miliar atau sebesar 37,46% terhadap realisasi tahun 2017 yang sebesar Rp528,23 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai pasar atas investasi pada kepemilikan aset keuangan tersedia untuk dijual.

COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

In 2018, the realization of comprehensive income for the year amounted to Rp330.38 billion, a decrease of Rp197.85 billion or 37.46% compared to the realization in 2017, which amounted to Rp528.23 billion. The decrease was mainly due to a decrease in market value of investments in available-for-sale financial assets.

KINERJA ARUS KAS

Posisi Kas dan setara kas hingga berakhirnya tahun buku 2018 mencapai Rp1.699,18 miliar, meningkat 17,75% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp1.443,05 miliar. Pertumbuhan ini, terutama didorong oleh menurunnya arus kas dari aktivitas pendanaan yang mencapai Rp 1.000,71 miliar.

STATEMENT OF CASH FLOWS

The position of cash and cash equivalents up the end of the 2018 fiscal year amounted to Rp1,699.18 billion, an increase of 17.75% compared to 2017, which amounted to Rp1,443.05 billion. The growth was mainly driven by the decrease in cash flows from financing activities, which amounted to Rp1,000.71 billion.

Laporan Arus Kas

Statement of Cash Flows

(dalam Rp Miliar) | (in Rp Billion)

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Arus kas dari aktivitas operasi Cash flows from operating activities	502,15	467,59	34,56	7,39
Arus kas dari aktivitas Investasi Cash flows from investing activities	(153,70)	(2.828,47)	2.674,77	(94,57)
Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flows from financing activities	(92,32)	908,39	(1.000,71)	(110,16)



Laporan Arus Kas

Statement of Cash Flows

(dalam Rp Miliar) | (in Rp Billion)

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas Net increase/(decline) in cash and cash equivalents	256,13	(1.452,49)	1.708,62	(117,63)
Kas dan setara kas awal tahun Cash and cash equivalents at beginning of year	1.443,05	2.895,54	(1.452,49)	(50,16)
Kas dan setara kas akhir tahun Cash and cash equivalents at end of year	1.699,18	1.443,05	256,13	17,75

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2018 sebesar Rp502,15 miliar, meningkat 7,39% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp467,59 miliar. Kenaikan ini merupakan akibat dari adanya kenaikan atas perubahan modal kerja secara keseluruhan.

Cash Flows from Operating Activities

In 2018, the Company's net cash flows generated from operating activities amounted to Rp502.15 billion, an increase of 7.39% compared to 2017, which amounted to Rp467.59 billion. The increase was due to the increase in changes to the overall working capital.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flows from Operating Activities

(dalam Rp Miliar) | (in Rp Billion)

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	477,47	452,13	25,34	5,60
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas Addition of items not affecting cash flows				
- Beban penyusutan Depreciation	6,49	6,03	(0,46)	(7,63)
- Beban amortisasi Amortization	0,56	1,10	(0,54)	(49,09)
- Beban penyesuaian imbalan kerja Provision for employee benefits obligation	5,36	5,35	0,01	0,19
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities	489,88	464,61	25,27	5,44
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja Operating cash flows before changes in working capital				
Penurunan/(kenaikan) aset operasi Decrease/(increase) in operating assets				
- Piutang usaha Account receivables	(5,15)	(6,15)	1,00	(16,26)
- Piutang lainnya Other receivables	(2,00)	(3,03)	1,03	(33,99)
- Biaya dibayar di muka dan uang muka Prepaid expenses and advances	(0,39)	2,26	(2,65)	(117,26)
- Beban tangguhan Deferred expenses	(1,69)	16,28	(17,97)	(110,38)
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi Increase/(decrease) in operating liabilities				
- Utang usaha Account payables	4,14	(1,61)	5,75	(357,14)



Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Review

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flows from Operating Activities

(dalam Rp Miliar) | (in Rp Billion)

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
- Utang pajak Taxes payable	1,33	1,00	0,33	33,00
- Biaya masih harus dibayar dan utang lain-lain Accrued expenses and other payables	15,06	(8,45)	23,51	(278,22)
- Pembayaran manfaat imbalan kerja Payment of employee benefits	(0,22)	(0,02)	(0,20)	1.000,00
- Pendapatan tangguhan Unearned income	0,43	2,70	(2,27)	(84,07)
- Aset tangguhan - Front End Fee Deferred assets - Front End Fee	0,76	-	0,76	100,00
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flows provided from operating activities	502,15	467,59	34,56	7,39

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2018 mencapai Rp153,70 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar Rp2.828,47 miliar, telah terjadi kenaikan 94,57%.

Perubahan ini disebabkan oleh menurunnya arus kas yang digunakan untuk investasi pengelolaan di banding tahun sebelumnya yang mendapatkan PMN sebesar Rp 1 triliun.

Cash Flows from Investing Activities

In 2018, net cash flows used in investing activities amounted to Rp153.70 billion. Compared to 2017, which amounted to Rp2,828.47 billion, there was an increase of 94.57%.

The change was due to the decrease in cash flows used for management investment compared to the previous year, which received Government Investment (PMN) in the amount of Rp1 trillion.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flows from Investing Activities

(dalam Rp Miliar) | (in Rp Billion)

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Penempatan investasi Placement for investments	(143,93)	(2.828,86)	2.684,93	94,91
Pembelian aset tetap dan aset tak berwujud Acquisition of fixed assets and intangible assets	(9,77)	(2,05)	(7,72)	376,59
Penempatan uang jaminan yang dapat dikembalikan Refundable deposits	-	2,44	(2,44)	(100,00)
Arus kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi Net cash flows provided from/(used for) investing activities	(153,70)	(2.828,47)	2.674,77	94,57



Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Hingga berakhirnya tahun buku 2018, arus kas bersih Perseroan dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar 110,16% dibandingkan tahun 2017, yaitu dari Rp908,39 miliar menjadi minus Rp92,32 miliar. Hal ini terjadi karena pada tahun 2018 Perseroan tidak menerima PMN. Sedangkan pada tahun 2017, Perseroan menerima sebesar Rp1 triliun.

Cash Flows from Financing Activities

In 2018, the Company's net cash flows from financing activities decreased by 110.16% compared to 2017, namely from Rp908.39 billion to minus Rp92.32 billion. This is because the Company did not receive Government Investment (PMN) in 2018. While in 2018, the Company received Rp1 trillion.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flows from Financing Activities

(dalam Rp Miliar) | (in Rp Billion)

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Penerimaan modal saham Share capital received	0,00	1.000,00	(1.000,00)	(100,00)
Pembayaran program kemitraan dan bina lingkungan Payment for corporate social responsibility program	(1,02)	(0,43)	(0,59)	(137,21)
Penerimaan dari pinjaman penerusan Proceeds from two-steps loans	9,85	9,47	0,38	4,01
Pembayaran deviden Dividend payments	(101,15)	(100,65)	(0,50)	0,50
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Net cash flows provided from financing activities	(92,32)	908,39	(1.000,71)	(110,16)



Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya

Other Financial Information Review

Selain modal ditempatkan, per akhir tahun 2018 Perseroan memiliki saldo penghasilan komprehensif lainnya dan saldo laba ditahan dengan total sebesar Rp2,48 triliun sebagai bagian dari ekuitas.

In addition to the issued capital, as of the end of 2018 the Company recorded other comprehensive income balances and retained earnings totaling Rp2.48 trillion as part of equity.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG PERUSAHAAN

Kemampuan Membayar Utang

Sampai akhir tahun 2018, Perseroan tidak memiliki utang jangka panjang yang substansial untuk mendukung kepemilikan aset. Saldo utang jangka panjang Perseroan berupa pinjaman penerusan senilai Rp55,13 miliar yang dipergunakan untuk peningkatan

THE COMPANY'S SOLVENCY AND RECEIVABLES COLLECTABILITY LEVEL

Solvency

As of the end of 2018, the Company has no substantial longterm debt to support its asset ownership. The Company's long term debt is in the form of two-steps loans amounted to Rp55.13 billion, which was used for the improvement and development of the Company's





dan pengembangan kapasitas dan teknis operasi Perusahaan melalui dukungan Bank Dunia (World Bank). Selebihnya adalah liabilitas imbalan kerja sebesar Rp21,40 miliar.

Pokok pinjaman akan dilunasi dengan angsuran semesteran setelah masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2029. Selebihnya seluruh kegiatan untuk kepemilikan aset masih dibiayai oleh modal Perseroan.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Sampai akhir tahun 2018, piutang Perseroan berasal dari piutang bunga yang berasal dari investasi dalam deposito maupun obligasi, piutang penjaminan, dan piutang atas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Piutang Perseroan didominasi oleh piutang terkait bunga yang berasal dari investasi dalam deposito dan obligasi yang mencakup 71,45% dari total piutang, di mana Perseroan menempatkan deposito dengan mekanisme tender dan penempatan obligasi dengan memperhatikan standar yang diperbolehkan dalam *Operating Manual* Perseroan. Dengan demikian, Perseroan tidak mengalami dinamika pada tingkat kolektibilitasnya.

operational capacity and technical through World Bank support. The rest was employee benefits obligation of Rp21.40 billion.

The principal loan will be repaid in semi-annual installments after the grace period of 9 (nine) years and will mature on various dates until 2029. For the rest of asset ownership activities are still financed by the Company's capital.

Receivables Collectability Ratio

As of the end of 2018, the Company's receivables are mainly derived from interest receivables from investments in deposits and bonds, guarantee receivables, and receivables for project development facility. The Company's receivables are dominated by accounts receivable related to interest from investments in deposits and bonds, which account for 71.45% of the total receivables, whereby the Company placed deposits through the bidding mechanism and bonds placement with due regard to the Company's applicable Operating Manual standard resulting in high collectability ratio. As such, the Company does not experience dynamics at its collectability level.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKANNYA

Kebijakan Struktur Modal

Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan pinjaman atau liabilitas, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Untuk itulah, Perseroan mengelola permodalan dengan tujuan melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Dengan demikian, Perseroan dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Struktur Modal

Aset Perseroan saat ini sebagian besar didanai dari ekuitas Perseroan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Pemerintah. Berdasarkan hasil keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris

CAPITAL STRUCTURE AND ITS POLICY

Capital Structure Policy

The capital structure is a balance between the use of equity capital and loan consisting of short-term liabilities and long-term liabilities. Therefore, the Company manages the capital to protect its capability in maintaining business continuity. Therefore, the Company can continue to generate returns and benefits to shareholders and other stakeholders as well as to maintain optimal capital structure in order to reduce the cost of capital.

Capital Structure

Currently, the Company's financial assets mainly financed by its equity, which in the form of State Capital Participation (PMN). Based on the resolution of shareholders as outlined in the Notarial Deed of



Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya

Other Financial Information Review

Aryanti Artisari, Sh, MKn no. 145 tanggal 30 Agustus 2012, Pemerintah selaku pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp9,00 triliun (nilai penuh).

Pemerintah kemudian melakukan penambahan PMN beberapa kali hingga tanggal 28 Desember 2017, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan sebesar Rp1 triliun, sehingga pada posisi 31 Desember 2017, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan tercatat sebesar Rp 8 triliun. Selain modal ditempatkan, per akhir tahun 2018 Perseroan memiliki saldo penghasilan komprehensif lainnya dan saldo laba ditahan dengan total sebesar Rp 2,48 triliun sebagai bagian dari ekuitas.

Aryanti Artisari, SH., MKn, No.145 dated 30 August 2012, the Government as shareholder agreed to increase the Company's authorized capital to IDR9 trillion (full amount).

The Government then provided several additional PMN up to 28 December 2017, based on Government Regulation No. 57 of 2017 on Additional State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Company's capital amounted to Rp1 trillion, hence as of 31 December 2017, the Company's issued and fully paid-in capital was posted at Rp8 trillion. Other than issued capital, as of the end of 2018, the Company has other comprehensive income as well as retained earnings balances totaling IDR2.48 trillion as part of the Company's equity.

Tabel Struktur Modal

Table Capital Structure

(dalam miliar Rupiah) | (in IDR billion)

Uraian	2017		2018	
	Nominal	Prosentase	Nominal	Prosentase
Liabilitas Liability	109,21	1,05%	140,25	1,32%
Ekuitas Equity	10.251,44	98,95%	10.480,67	98,68%
Total	10.360,65	100,00%	10.620,92	100,00%

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI 2018 SERTA TARGET DAN PROYEKSI 2019

Target dan Realisasi

PT PII telah menyusun target pencapaian kegiatan usaha yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) di awal tahun. Berdasarkan RKAP 2018, Perusahaan menargetkan pendapatan sebesar Rp964,16 miliar, namun realisasinya mencapai Rp834,25 miliar atau 86,53% dari target.

Pencapaian tersebut ikut mempengaruhi laba tahun berjalan Perseroan. Pada tahun 2018, laba operasi dan laba bersih yang ditargetkan masing-masing sebesar Rp629,23 miliar dan Rp531,64 miliar. Sedangkan realisasi laba operasi adalah Rp447,46 miliar dan laba bersih sebesar Rp471,08 miliar. Dengan demikian, pencapaian target terhadap realisasi masing-masing adalah 75,88% dan 88,61%.

COMPARISON OF 2018 TARGET AND REALIZATION AS WELL AS 2019 TARGET AND PROJECTION

Target and Realization

PT PII has established the achievement targets for business activities as outlined in the Company's Work Plan and Budget (WPB) at the beginning of the year. Based on the 2018 WPB, the Company targets revenues of Rp964.16 billion, however the realization amounted to Rp834.25 billion or 86.53% of the target.

This achievement also affected the Company's profit for the year. In 2018, operating profit and net profit were targeted at Rp629.23 billion and Rp531.64 billion, respectively. While the realization of operating profit amounted to Rp447.46 billion and net profit amounted to Rp471.08. Thus, the achievement of targets towards realization were 75.88% and 88.61% respectively.



Sedangkan dari sisi struktur modal, target yang ditetapkan pada awal tahun adalah Rp10.699,91 miliar dan realisasinya mencapai Rp10.480,67 miliar atau 97,95% dari target.

Proyeksi 2019

Target dan proyeksi Perseroan untuk tahun depan telah ditetapkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019. Pada tahun depan, kinerja usaha PT PII masih akan dititikberatkan pada besaran proyek yang akan dijamin dan pemrosesan proyek.

Melanjutkan pemrosesan proyek penjaminan dari tahun sebelumnya, Perseroan menargetkan pada tahun 2019 terdapat dua proyek baru dan empat proyek lanjutan yang dapat mencapai tahapan penandatanganan perjanjian penjaminan serta pengakuan pendapatan *upfront fee* di tahun yang sama. Dari enam proyek tersebut, diproyeksikan lima di antaranya mencapai efektif penjaminan, sehingga *recurring fee* penjaminan juga telah dapat diakui, sedangkan satu sisanya baru mencapai tahapan efektif penjaminan di tahun 2020.

Terkait dengan penjaminan Non-KPBU, diharapkan terdapat satu proyek yang dapat diproses dan diproyeksikan mencapai tahapan penandatanganan perjanjian penjaminan. Untuk penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, terdapat empat proyek yang merupakan kelanjutan pemrosesan proyek penjaminan dari tahun sebelumnya, dan diharapkan terdapat 4 (empat) proyek baru yang diterima penugasannya.

Sedangkan target pendapatan pengelolaan dana dapat mencapai tingkat pengembalian rata-rata sebesar 200 bps di atas BI *7-day repo rate* yang diasumsikan sebesar 5,75% di tahun 2019. Perseroan juga akan mempertahankan komposisi portofolio dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan pasar obligasi walaupun tingkat pengembalian investasi pada obligasi yang secara relatif memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi, serta tetap mempertimbangkan kebutuhan likuiditas. Besaran penempatan obligasi akan dipertahankan sekitar 30% atau setara dengan posisi di tahun 2018.

In terms of capital structure, the target set at the beginning of the year was Rp10.699.91 billion and the realization reaches Rp10,480.67 billion or 97.95% of the target.

2019 Projection

The Company's targets and projections for next year have been determined through the 2019 Corporate Work Plan and Budget (WPB). Next year, the business performance of PT PII will remain focused on the amount of projects to be guaranteed and the processing of projects.

Continuing the processing of the guarantee project from the previous year, in 2019, the Company is targeting to obtain two new projects and four continuing projects to reach the guarantee agreement signing stage as well as recognition of upfront fee income in the same year. Of the six projects, five of them are projected to have reached effectiveness of the guarantees, therefore the recurring fee guarantee has also been recognized, while the remaining will reach the effectiveness of the guarantees stage in 2020.

Regarding Non-PPP guarantees, one project is expected to be processed and projected to reach the stage of signing the guarantee agreement. For project development facility, there are four projects that are a continuation of the guarantee project processing from the previous year, and 4 (four) new assignment projects are expected to be received.

While the target of fund management revenue is to reach an average rate of return of 200 bps above the assumed BI *7-day repo rate* of 5.75% in 2019. The company will also maintain the portfolio composition while taking into account the conditions of bond market availability despite the relatively higher rate of return on bonds investment, as well as considering the liquidity needs. The amount of bond placement will be maintained at around 30% or equivalent to the position in 2018.



Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya

Other Financial Information Review

Berdasarkan realisasi 2018, proyeksi keuangan untuk 2019 adalah sebagai berikut:

Based on the 2018 realization, the financial projections for 2019 are as follows:

Uraian Description	Proyeksi 2019 2019 Projection	Realisasi 2018 (dalam juta Rp) 2018 Realization (in million Rp)
Aset Assets	10.958,68	10.620,92
Pendapatan Revenues	1.040,62	834,25
Beban Usaha Operating Expenses	516,47	356,79
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	524,15	477,46
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	504,78	471,08
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	469,95	330,38

Untuk proyeksi rasio keuangan, rasio yang relevan untuk bisnis penjaminan menggunakan Margin Laba Bersih dan BOPO. Adapun target yang dituju pada tahun 2019 adalah Margin Laba Bersih 49% dan BOPO 35%. PT PII juga mengalokasikan pembagian dividen kepada pemegang saham, maksimum 20% dari estimasi Laba Bersih Tahun Buku 2018 atau senilai maksimal Rp95.160.000.000 pada tahun 2019.

For financial ratio projections, the relevant ratios for the guarantee business uses Net Profit and BOPO margins. The targets to be achieved in 2019 are 49% Net Profit Margin and 35% BOPO. PT PII also allocate dividend distribution to the shareholders, a maximum of 20% of the estimated 2018 Net Profit for the Year or a maximum of Rp95,160,000,000 in 2019.

PROSPEK USAHA

Dalam menyusun prospek usaha Perseroan ke depan, PT PII selalu mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang berpotensi mempengaruhi pencapaian kinerja usaha Perseroan. Untuk faktor eksternal, terutama yang menjadi bahan pertimbangan adalah asumsi yang telah dibuat pemerintah, seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan APBN 2019 yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR, asumsi kurs rupiah adalah Rp15.000 per dolar AS. Sedangkan suku bunga 5,3% dan inflasi 3,5%.

Penggunaan asumsi makro ekonomi dan keuangan yang relevan pada kegiatan usaha PT PII tersebut, berkisar pada nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga dan inflasi. Nilai tukar mata uang menjadi relevan dikarenakan sebagian penggunaan jasa profesional maupun konsultan internasional yang

BUSINESS PROSPECT

In preparing the Company's business prospects, PT PII always considers external and internal conditions that have the potential to affect the Company's business performance. For external factors, the main considerations are the assumptions that have been made by the government, as stated in the State Budget (APBN).

Based on the 2019 State Budget that has been set by the government and the House of Representative (DPR), the assumption of the rupiah exchange rate is Rp15,000 per US dollar. While interest rate is 5.3% and inflation is 3.5%.

The use of relevant macroeconomic and financial assumptions in PT PII's business activities revolves around currency exchange rates, interest rates, and inflation. Currency exchange rates are relevant due in part to the use of professional services and international consultants that are an important part of the



merupakan bagian penting dalam proses operasional menggunakan mata uang dolar AS. Beban operasional lainnya diasumsikan mengalami kenaikan atau penyesuaian berdasarkan tingkat inflasi.

Dari segi pendapatan penjaminan PT PII juga terekspos pengaruh nilai tukar karena terdapat proyek yang didenominasi dalam dolar AS. Sedangkan dari sisi pendapatan pengelolaan dana, asumsi tingkat suku bunga menjadi faktor penentu dasar target tingkat pengembalian.

Asumsi-asumsi eksternal ini mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian nasional akan stabil. Bahkan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi akan lebih baik dibandingkan tahun 2018, yaitu menjadi 5,3%.

Salah satu pendorong utama pertumbuhan tersebut adalah pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah, seperti tertuang dalam APBN, untuk mendukung peningkatan investasi.

Sedangkan dari sisi internal, PT PII menyusun asumsi dasar dari sisi proyek maupun pendanaannya. Dari sisi pendapatan usaha, Perseroan akan memiliki 3 jenis pendapatan yang bersumber dari kegiatan penjaminan proyek infrastruktur, pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, serta pendapatan pengelolaan dana.

Kegiatan usaha Perseroan ini akan memiliki prospek yang sangat baik, mengingat pembangunan infrastruktur masih akan menjadi prioritas pemerintah di tahun-tahun mendatang. Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, disebutkan ada 246 proyek yang akan dibangun. Pada umumnya, proyek-proyek tersebut merupakan proyek infrastruktur.

Untuk periode 2015-2019, kebutuhan pembiayaan Infrastruktur Indonesia adalah sebesar Rp4.796,2 triliun sementara kemampuan APBN dan APBD hanya sebesar Rp1.978,6 triliun atau 41,3% dari total kebutuhan. Dengan demikian, kekurangan pendanaan tersebut diharapkan dapat ditutup dengan sumber pembiayaan lain, sehingga membuat peran PT PII semakin besar.

operational process using US dollars. Other operating expenses are assumed to increase or adjusted based on the inflation rate.

In terms of guarantee revenues, PT PII is also exposed to the influence of exchange rates because there are projects that are denominated in US dollars. While in terms of fund management revenues, the interest rate assumption is the basic determinant of the target rate of return.

These external assumptions indicates that the national economic condition will be stable. The government is even targeting the economic growth to be better than in 2018, namely to 5.3%.

One of the main drivers of growth is infrastructure development. This policy is taken by the government, as stated in the State Budget, to support increased investment.

From the internal side, PT PII prepares the basic assumptions in terms of the project and its funding. In terms of business revenues, the Company will have 3 types of revenues derived from infrastructure project guarantee activities, project development facility revenues, as well as fund management income.

The Company's business activities will have excellent prospects, considering that infrastructure development will still be the government's priority in the coming years. As stated in the Presidential Regulation No. 58 of 2017 on the Amendments to Presidential Regulation No. 3 of 2016 on the Acceleration of the Implementation of National Strategic Projects, there are 246 projects to be developed. In general, these projects are infrastructure projects.

For the period of 2015-2019, the financing needs of Indonesian Infrastructure amounted to Rp4,796.2 trillion while the ability of the State Budget and the Regional Budget only amounted to Rp1,978.6 trillion or 41.3% of the total needs. Thus, the lack of funding are expected to be covered with other funding sources, subsequently increasing the role of PT PII.



Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya

Other Financial Information Review

Sebab sesuai dengan mandat yang diterima Perseroan, dua fungsi utama PT PII adalah sebagai *fiscal tools* pemerintah dan Perseroan Terbatas. Karena itulah, mengacu pada asumsi-asumsi tersebut, Perseroan memandang bahwa prospek usaha ke depan kegiatan usaha PT PII akan sangat baik.

Because according to the mandate received by the Company, the two main functions of PT PII are as a fiscal tool for the government and as a Limited Liability Company. Therefore, referring to these assumptions, the Company considers the business prospects of PII's future business activities will be very encouraging.

ASPEK PEMASARAN

Sejak tahun 2018, kegiatan usaha PT PII mandat yang diterima oleh PT PII semakin luas. Berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009, Perseroan tidak hanya menjamin proyek KPBU, tetapi juga non KPBU.

Perluasan mandat tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2018, PT PII juga mendapatkan mandat untuk penugasan dari Kementerian Keuangan dalam melakukan pendampingan atas penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan tidak lagi terbatas pada penjaminan, tetapi juga melakukan pendampingan, baik dari tahap penyiapan hingga pelaksanaan transaksi.

Strategi Pemasaran

Pada tahun 2018, strategi pemasaran yang digunakan oleh PT PII lebih fokus dalam bentuk *below the line*. Misalnya, dalam bentuk sosialisasi dan pemberian pemahaman terkait skema KPBU dan peran PT PII dalam Penjaminan Infrastruktur dengan menggunakan skema tersebut. Selain itu, Perseroan juga membantu penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) dalam melakukan *scanning* dan *screening* proyek yang akan di bangun dengan skema KPBU sehingga dapat memastikan *pipeline* proyek berpotensi untuk dijamin.

MARKETING ASPECT

Since 2018, the mandate received by PT PII has expanded. Based on Government Regulation No. 50 of 2016 on the Amendments to Government Regulation No. 35 of 2009, in addition to PPP projects, the Company also provides guarantees for non-PPP projects.

The expansion of the mandate was followed up with the issuance of Minister of Finance Regulation No. 101 of 2018 on the Procedures for Giving and Implementing Joint Government Guarantees or Through Infrastructure Guarantee Business Entities for Risks of Failure to Pay for Loans and/or Issuance of Bonds to Finance the Provision of Infrastructure.

In addition, based on the Minister of Finance Regulation No. 73 of 2018, PT PII also receives a mandate for assignment from the Ministry of Finance for project development facility for infrastructure projects under the PPP scheme. Therefore, the scope of the Company's business activities is no longer limited to guarantees, but also to provide assistance, from the preparation stage up to the implementation of transactions.

Marketing Strategy

In 2018, the marketing strategy used by PT PII is more focused in the form of below the line. For example, in the form of socialization and provision of understanding regarding the PPP scheme and the role of PT PII in Infrastructure Guarantee under that scheme. In addition, the Company also assists the Contracting Agency (CA) in scanning and screening projects that will be developed under the PPP scheme therefore ensuring project pipeline for guarantee.



Karena itulah, menjadi bagian dari strategi pemasaran tersebut, PT PII berusaha memahami kebutuhan PJPK terkait dengan penjaminan infrastruktur. Bersamaan dengan itu, Perseroan juga melakukan analisis pasar, khususnya terkait dengan karakteristik pasar penjaminan, sesuai dengan bidang usaha yang dijalani Perseroan.

PT PII juga melakukan analisis persaingan kompetisi jasa penjaminan yang dihadapi untuk mendukung kesinambungan kinerja usaha. Dengan pemetaan dari hasil analisis tersebut, Perseroan mendefinisikan struktur *marketing mix*, sampai pada akhirnya menempatkan posisi Perseroan dalam pasar penjaminan.

Strategi pemasaran tersebut juga didukung anggaran yang memadai. Perseroan memformulasikan strategi alokasi sumber daya dan anggaran yang efisien hingga akhirnya mengimplementasikan rencana yang telah terstruktur dengan baik.

Pelaksanaan Kegiatan 2018

Pada tahun 2018, Perseroan telah merealisasikan kegiatan pemasaran, baik dalam bentuk *above the line* maupun *below the line*. Untuk kegiatan *above the line*, Perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan *engagement* menggunakan media promosi umum berkoordinasi dengan divisi terkait, yaitu Divisi Corporate Secretary and Communication.

Kegiatan yang direalisasikan, antara lain: membuat *media promotion* melalui *Private Public Partnership (PPP) event* dan *media placement* terkait perkembangan proyek dan peran fasilitasi PT PII.

Sedangkan untuk kegiatan *below the line*, bentuknya adalah sosialisasi dan *engagement* untuk seluruh *stakeholders* dengan beragam tujuan yang dapat dibedakan berdasarkan tipenya. Realisasinya, antara lain: sosialisasi KPBU beserta penjaminan, pelaksanaan program *capacity building*, *Focus Group Discussion* dan *workshop*.

Therefore, being part of the marketing strategy, PT PII seeks to understand the needs of the Contracting Agency related to infrastructure guarantees. At the same time, the Company also conducts market analysis, specifically related to the characteristics of the guarantee market, in accordance with the line of business undertaken by the Company.

PT PII also conducts competition analysis for guarantee services to support the sustainability of business performance. Through the mapping of the analysis results analysis, the Company defines the structure of the marketing mix, finally placing the Company's position in the guarantee market.

The marketing strategy is also supported by an adequate budget. The company formulates efficient resource and budget allocation strategies to finally implement a well-structured plan.

Implementation of Activities in 2018

In 2018, the Company has realized the marketing activities, both in the form of above the line and below the line. For above the line activities, the Company conducted engagement activities through the general promotional media, in coordination with the related division, namely the Corporate Secretary and Communication Division.

The realized activities include: media promotion through a Private Public Partnership (PPP) events and media placement related to project development and facilitating roles of PT PII.

Whereas for below the line activities, the forms are socialization and engagement for all stakeholders with various objectives that can be distinguished based on their type. The realization includes: socialization of PPPs along with guarantees, implementation of capacity building, Focus Group Discussions and workshop programs.



Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya

Other Financial Information Review

DIVIDEN

Kebijakan Dividen

Keputusan tentang jumlah dividen yang dibagikan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan besarnya adalah 20% dari laba bersih pada tahun buku.

Realisasi Pembayaran

Realisasi pembayaran dividen kepada pemegang saham dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel Pembayaran Dividen

Table of Dividend Payment

Uraian Description	Tahun Buku 2017 Fiscal 2017	Tahun Buku 2016 Fiscal 2016
Total Dividen Dibagikan Total Dividen Distribution	Rp101.151.000	Rp100.650.000
Tanggal Pengumuman Dividend Announcement Date	23 Mei May 2018	26 Mei May 2017
Tanggal Pembayaran Dividend Payment Date	22 Juni June 2018	16 Juni June 2017

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN MANAJEMEN

Hingga saat ini, seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Perseroan tidak memberlakukan kebijakan tentang kepemilikan saham oleh manajemen dan karyawan.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

PT PII melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7, tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi yang dimaksud, antara lain:

1. Perusahaan di bawah pengendalian Perusahaan;
2. Perusahaan asosiasi;
3. Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
4. perusahaan di bawah pengendalian investor yang memiliki hak suara
5. Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
6. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

DIVIDEND

Dividend Policy

The General Meeting of Shareholder (GMS) decides on the amount of dividend distribution, at 20% of the net income for the fiscal year.

Actual Dividend Payment

Actual dividend payment to the shareholder is described in the following table.

EMPLOYEE AND MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM

Until now, all of the Company's shares are owned by the Government of Indonesia. The Company does not impose a policy on share ownership by management and employees.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS WITH CONFLICT OF INTEREST AND/OR WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

PT PII conducts transactions with related parties as defined in Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 7, on "Disclosure of Related Parties".

Related Parties

Such related parties include, among others:

1. Companies under the control of PT PII;
2. Associated companies;
3. Investors with voting rights, which give the investor significant influence;
4. Companies under the control of investors with voting rights;
5. Key employees and their family members; and
6. Entities that are controlled by, under the joint control of, or significantly influenced by, the Government.



Sifat Hubungan Berelasi

1. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan.
2. Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahannya dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perusahaan.
3. Bank dan Badan Usaha Milik Negara merupakan entitas sepengendali dimana Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito dan obligasi.

Nilai Transaksi dan Saldo dari Transaksi dengan Pihak Berelasi

PT PII menempatkan dana dalam bentuk deposito dan obligasi dari pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disepakati. Rincian pendapatan pengelolaan dana kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Saldo dari Transaksi dengan Pihak Berelasi

Balances of Transactions with Related Parties

(dalam ribuan Rupiah) | (in IDR thousand)

Uraian Description	2018	2017
Kas dan Setara Kas Cash and cash Equivalent	968.485.000	1.442.380.760
Investasi Investments	4.616.898.175	5.335.950.016
Piutang Usaha Trade Receivables	65.533.091	64.696.060
Pinjaman Penerusan Channeling Loans	55.126.686	45.276.380
Total	5.706.042.952	6.888.303.216
Persentase terhadap Jumlah Aset Percentage to Total Assets	53,72%	66,49%

Pendapatan

Income

(dalam ribuan Rupiah) | (in IDR thousand)

Uraian Description	2018	2017
Pemerintah Republik Indonesia	176.760.668	152.017.526
PT Bank Tabungan Negara	114.526.031	32.885.008
PT Bank Tabungan Negara Syariah	58.647.559	274.309
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga	58.181.702	5.938.201
PT Bank Mandiri Taspen Pos	25.311.064	536.301
PT Bank Rakyat Indonesia	18.582.109	17.601.467
PT Bank Mandiri	18.179.869	-
PT Pegadaian	15.234.078	3.699.800
PT Sarana Multi Infrastruktur	14.695.194	6.020.718
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Bank Exim)	12.115.056	5.950.783



Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya

Other Financial Information Review

Pendapatan

Income

(dalam ribuan Rupiah) | (in IDR thousand)

Uraian Description	2018	2017
PT Telekomunikasi Indonesia	9.184.388	8.971.282
PT Sarana Multigriya Finansial	7.537.361	2.611.557
PT Pupuk Indonesia	7.506.250	773.840
PT Pelindo	7.122.500	279.851
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat	6.710.338	73.907.420
PT Pembangkit Listrik Negara	5.617.865	5.646.409
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	5.000.000	-
PT Adhi Karya	3.802.211	5.852.992
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.802.016	4.778.067
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	3.196.202	22.224.402
PT Angkasa Pura	2.150.000	1.997.304
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	1.906.787	33.683.258
PT Jasa Marga	1.886.352	2.814.622
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	1.863.356	7.486.971
PT Kereta Api Indonesia	1.840.625	128.299
PT Utama Karya	1.754.783	3.318.711
PT Waskita Karya	1.665.000	1.576.427
PT Marga Lingkar Jakarta	1.469.306	102.499
PT Garuda Indonesia	1.188.368	2.164.879
PT Pembangunan Perumahan	1.159.167	4.980.602
PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar	1.133.622	19.794.589
PT Bank Nagari	607.066	14.568.822
PT Aneka Tambang	474.086	511.860
Total	590.811.979	443.161.776
Persentase terhadap Jumlah Pendapatan Percentage to Total Revenue	70,82%	57,86%

Kewajaran Transaksi Pihak Berelasi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak- pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan, telah sesuai dengan standar PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Fairness of Transactions with Related Parties

The fairness of transactions with related parties, as conducted under the same terms and conditions as with third parties or otherwise, is disclosed in the financial statements and has complied with SFAS 7: Disclosure of Related Parties.



Mekanisme Review dan Pemenuhan Peraturan Transaksi Pihak Berelasi

Mekanisme *review* atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor. Salah satu tujuan pengungkapan transaksi pihak berelasi adalah upaya pemenuhan PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018 sebagai berikut:

1. PSAK 111 "Akuntansi Wa'd";
2. Amendemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan";
3. Amendemen PSAK 13 "Properti Investasi, tentang Pengalihan Properti Investasi";
4. Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap";
5. Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi";
6. Amendemen PSAK 53 "Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham";
7. Amendemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"; dan
8. Amendemen PSAK 67 "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi pada Perseroan, serta tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Review Mechanism and Compliance of Transactions with Related Parties

The review mechanism for transactions with related parties involves an audit process by internal as well as external auditors. In an effort to ensure the fairness of such transactions and their compliance with generally accepted accounting standards in Indonesia, related party transactions have been audited by Auditor. One of the objectives of disclosure of related party transactions is to comply with SFAS 7: Disclosure of Related Parties.

ACCOUNTING POLICIES

The Financial Statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) were prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. The Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting (DSAK-IAI) has issued new standards, amendments and interpretations which are effective as of 1 January 2018, as follow:

1. SFAS 111 "Wa'd Accounting";
2. Amendment to SFAS 2 "Cash Flows Report, on Disclosure Initiative";
3. Amendment to SFAS 13 "Investment Property, on Transfer of Investment Property";
4. Amendment to SFAS 16 "Property, Plant and Equipment";
5. Amendment to SFAS 46 "Income Tax, on Recognition of Deferred Tax Asset on Unrealized Loss";
6. Amendment to SFAS 53 "Share Based payment, on Clasification and Measurement of Share Based Payment Transaction";
7. Amendment to SFAS 15 "Investment in Associates and Joint Ventures"; and
8. Amendment to SFAS 67 "Disclosure of Interests in Other Entities".

The implementation of the above standards does not result in changes to the Company's accounting policies, and had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior years.



Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya

Other Financial Information Review

PERUBAHAN PERATURAN YANG DAMPAKNYA SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

Penjelasan tentang perubahan peraturan yang berdampak secara signifikan bagi PT PII diuraikan dalam tabel di bawah ini:

CHANGES OF REGULATIONS WITH SIGNIFICANT IMPACT ON THE COMPANY

Changes of regulations with significant impact to PT PII are described in the following table:

No.	Nama Peraturan Regulation	Isi Description	Dampak dari Peraturan Impact of Regulation
1	Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur Minister of Finance Regulation Number 101/PMK.08/2018 on the Procedures for Granting and Implementing Government Guarantees With or Through Infrastructure Guarantee Fund on Default Risk of State-Owned Enterprises which Conducting Loans and/or Issue Bonds to Finance Infrastructure Provision	Merupakan tindak lanjut dari perluasan mandat PT PII dalam PP No. 50 Tahun 2016 dan PMK No. 95 Tahun 2017 yang mengatur mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau melalui BUPI (PT PII) terhadap risiko gagal bayar dari BUMN yang melakukan pinjaman dan/atau penerbitan obligasi untuk membiayai penyediaan infrastruktur. A follow-up to the expansion of PT PII's mandate in the Government Regulation Number 50 of 2016 and PMK Number 95 of 2017 regarding the procedures for granting and implementing Joint Government Guarantee or through the Infrastructure Guarantee Entity (PT PII) against the risk of default from SOEs that have loans and/or bonds issuance to finance infrastructure provision.	Menjadi acuan lebih lanjut pelaksanaan penjaminan atas pinjaman dan obligasi yang dilakukan untuk penyelenggaraan infrastruktur, yang mana pelaksanaan penjaminan ini merupakan perluasan mandat PT PII. A further reference to the performance guarantees on loans and bonds that are carried out for the infrastructure development, in which this performance guarantee is an extension of PT PII's mandate.
2	Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur The Minister of Finance Regulation Number 73/PMK.08/2018 regarding Facilities for the Preparation and Implementation of Government Cooperation Projects Transactions with Business Entities in Infrastructure Provision	PMK tersebut mengatur mengenai fasilitas untuk penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek KPBU dalam penyediaan infrastruktur. The Minister of Finance Regulation regulates facilities for preparing and implementing the Public Private Partnership project transactions in the infrastructure provision.	Merupakan pengganti dari PMK No. 265/PMK.08/2015 juncto PMK No. 129/PMK.08/2016 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. A substitute for the Minister of Finance Regulation Number 265/PMK.08/2015 related to the Minister of Finance Regulation Number 129/PMK.08/2016 revoked and declared invalid.
3	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Pelaporan, Perubahan, dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan The Minister of Finance Regulation Number 182/PMK.06/2018 regarding Procedures for Reporting, Amendment and Monitoring of Additional Use of State Capital Participation in Limited Liability Company Companies under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance	PMK tersebut mengatur mengenai tata cara pelaporan, perubahan dan pemantauan penggunaan tambahan penyertaan modal negara pada BUMN di bawah Kementerian Keuangan. The Minister of Finance Regulation regulates the reporting, changes and monitoring of additional state equity placement in SOEs under the Ministry of Finance.	Menjadi acuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyertaan modal negara yang akan dilakukan oleh PT PII selanjutnya. To become the reference for further state equity placement planned for PT PII in the future.



No.	Nama Peraturan Regulation	Isi Description	Dampak dari Peraturan Impact of Regulation
4	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.06/ 2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan The Regulation of the Minister of Finance Number 200/PMK.06/2018 regarding Guidelines for Determining the Income of Directors and Board of Commissioners of Company Companies under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance	PMK tersebut mengatur mengenai pedoman untuk penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris pada BUMN dibawah Kementerian Keuangan. The Minister of Finance Regulation regulates the guidelines for the determination of remuneration for Board of Directors and Commissioners of SOEs under the Ministry of Finance.	Menjadi pedoman bagi PT PII dalam menetapkan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT PII. Serves as a guideline for PT PII in determining the remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of PT PII.
5	Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan The Minister of Finance Regulation Number 201/PMK.06/2018 regarding Procedures for the Elimination and Transfer of Fixed Assets in SOEs under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance	PMK tersebut mengatur mengenai tata cara penghapusan dan pemindahtanganan aset tetap pada BUMN di bawah Kementerian Keuangan. The Minister of Finance Regulation regulates the procedures for the removal and transfer of fixed assets in SOEs under the Ministry of Finance.	PMK No. 201/PMK.06 memberikan amanat kepada BUMN di bawah Kementerian Keuangan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap ketentuan dalam PMK ini. Pada saat PMK ini mulai berlaku, PMK No. 89/KMK.013/1991 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. The Minister of Finance Regulation Number 201/PMK.06 gives a mandate to SOEs under the Ministry of Finance to adjust the articles of association to the provisions in this regulation. When this Regulation is effective, the Regulation Number 89/KMK.013/1991 is revoked and declared invalid.



06

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

196	Pendahuluan Introduction	265	Komite Audit Audit Committee
212	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	279	Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Function of Nomination and Remuneration Committee
220	Dewan Komisaris Board of Commissioners	279	Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee
232	Komisaris Independen Independent Commissioner	287	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
233	Direksi Board of Directors	291	Audit Internal Internal Audit
239	Penilaian terhadap Dewan Komisaris dan Direksi Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors	296	Akuntan Publik Public Accountant
245	Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors	298	Manajemen Risiko Risk Management
246	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors	316	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
256	Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi Affiliation of the Board of Commissioners and the Board of Directors	323	Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan Significant Cases Faced by the Company
257	Informasi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Information on Concurrent Position of the Board of Commissioners and Board of Directors	324	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Corporate Information and Data
259	Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Policy On Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors	325	Benturan Kepentingan Conflict of Interest
261	Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs of the Board of Commissioners	325	Kode Etik Code of Conduct
262	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary to the Board of Commissioners	328	Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan Statement of Corporate Culture
		330	Komitmen GCG dalam Pengendalian Gratifikasi GCG Commitment in Gratuity Control
		333	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Report of State Officials Assets
		334	Whistleblowing System Whistleblowing System
		339	Praktik Bad Corporate Governance Bad Corporate Governance Practices



Pendahuluan

Introduction

Kinerja penerapan GCG di lingkungan PT PII semakin baik, yang ditunjukkan melalui penghargaan sebagai perusahaan yang dipercaya publik pada Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2018 oleh Indonesia Institute for Corporate Governance.

The implementation of GCG at PT PII has shown an increasingly good performance, as evidenced by the award received as a company trusted by the public during the 2018 Corporate Governance Perception Index (CGPI) organized by the Indonesia Institute for Corporate Governance.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha sangat dibutuhkan untuk dapat mewujudkan Perusahaan yang dipercaya oleh Pemangku Kepentingan, sehingga berkinerja unggul, serta tumbuh secara berkelanjutan. Untuk itulah, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Implementing Good Corporate Governance (GCG) principles in all of the Company's business activities is very much needed in order to become a company that is trusted by stakeholders, showing excellent performance and thrive continuously. For this reason, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) is fully committed to implementing GCG in every





berkomitmen secara penuh untuk menerapkan GCG dalam setiap praktik bisnisnya. Dengan berpegang pada komitmen tersebut, PT PII senantiasa mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik yang berlaku di tingkat nasional, regional, maupun internasional yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya.

DASAR-DASAR PELAKSANAAN GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di PT PII didasarkan pada standar yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Selain itu, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan, penerapan GCG di PT PII mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Penerapan GCG tersebut dimaksudkan untuk menjadikan GCG sebagai dasar operasional Perseroan, seperti yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN bahwa Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, dan tanggung jawab.

Pengembangan dan penerapan GCG yang mengacu pada *best-practice standard* di lingkungan kerja PT PII diharapkan dapat memenuhi kepentingan segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara seimbang, selain itu juga membuka peluang bagi pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan bagi Perseroan. PT PII telah menyusun Pedoman GCG (*Code of GCG*) sebagai panduan implementasi yang komprehensif atas penerapan GCG Perseroan, antara lain:

business practice. By adhering to this commitment, PT PII always follows the development of the best governance practices applied in the national, regional and international levels that are relevant and pursuant to the Company's needs.

LEGAL BASIS FOR GCG IMPLEMENTATION

The implementation of GCG principles in the Company is based on the applicable standards, both national and international standards. The Company as a State-Owned Enterprise (SOE) under the development and supervision of the Minister of Finance, implements GCG by referring to the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 88/PMK.06/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in Limited Liability Company (Persero) under the Development and Supervision of the Minister of Finance.

The implementation of GCG is aimed to establish GCG as the Company's operational basis, as stated in Law No. 19/2003 concerning SOEs, which stated that the Board of Directors and Board of Commissioners in performing their duties shall apply the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, and responsibility.

The development and implementation of GCG that refers to the best-practice standard in the work environment of PT PII is expected to meet the interests of all stakeholders in a balanced manner, while also opening the opportunities for sustainable long-term growth for the Company. PT PII has developed GCG Guidelines (*Code of GCG*) as a comprehensive guideline for implementation of GCG of the Company, among others:



Pendahuluan

Introduction

Pedoman Guideline	Dasar Penetapan Regulatory Framework	Isi Content
Pedoman Tata Kelola Perusahaan	a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.06/2013 g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2016 j. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Kebijakan dan prosedur sebagai landasan operasional penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) oleh segenap Organ Perusahaan dan Insan Perusahaan, meliputi: • BAB I Pendahuluan • BAB II Organ Perusahaan • BAB III Manajemen Risiko • BAB IV Tata Kelola Pengendalian Internal • BAB V Tata Kelola Informasi • BAB VI Tata Kelola Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Perusahaan • BAB VII Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan • BAB VIII Pengukuran dan Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik • BAB IX Penutup
Code of Corporate Governance	a. Law of Republik Indonesia Number 17/2003 b. Law of Republik Indonesia Number 19/2003 c. Law of Republik Indonesia Number 40/2007 d. Government Regulation Number 45/2005 e. Government Regulation Number 50/2016 f. Minister of Finance Regulation Number 28/PMK.06/2013 g. Minister of Finance Regulation Number 88/PMK.06/2015 h. Minister of Finance Regulation Number 78/PMK.06/2015 i. Minister of Finance Regulation Number 59/PMK.06/2016 j. Articles of Association of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	The policy and procedure as the operational framework in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles by all of the Company's Organs and Personnel, include: • CHAPTER I Introduction • CHAPTER II The Company's Organs • CHAPTER III Risk Management • CHAPTER IV Internal Control Governance • CHAPTER V Information Governance • CHAPTER VI Stakeholders Relation Governance • CHAPTER VII The Company's Long-Term Plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKAP) • CHAPTER VIII Good Corporate Governance (GCG) Assessment and Reporting • CHAPTER IX Closing
Board Manual	a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 e. PMK No. 88/PMK.06/2015 f. PMK No. 28/PMK.06/2013 g. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Tata laksana kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur mengenai pelaksanaan hubungan kerja antar Dewan Komisaris dan Direksi beserta organ di bawahnya masing-masing, meliputi: • BAB I Pendahuluan • BAB II Dewan Komisaris • BAB III Direksi • BAB IV Tata Hubungan Kerja Antar Organ Perusahaan
Board Manual	a. Law of Republik Indonesia Number 19/2003 b. Law of Republik Indonesia Number 40/2007 c. Government Regulation Number 45/2005 d. Government Regulation Number 35/2009 e. Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015 f. Minister of Finance Regulation No. 28/PMK.06/2013 g. Articles of Association of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	The working procedures for the Board of Commissioners and the Board of Directors which regulate the implementation of working relationships between the Board of Commissioners and the Board of Directors along with their respective organs, include: • CHAPTER I Introduction • CHAPTER II Board of Commissioners • CHAPTER III Board of Directors • CHAPTER IV Working Relation Mechanism Between Corporate Structures



Pedoman Guideline	Dasar Penetapan Regulatory Framework	Isi Content
Pedoman Kode Etik	a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 b. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) c. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Pedoman GCG) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Tata aturan hubungan internal Perusahaan (organ perusahaan dan pegawai) dan hubungan dengan pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>) dalam menjalankan bisnis di Perusahaan. Adapun isinya meliputi: • BAB I Pendahuluan • BAB II: Pernyataan Nilai Perusahaan • BAB III: Pedoman Perilaku Dan Etika Bisnis Perusahaan • BAB IV: Petunjuk Pelaksanaan • BAB V: Pelaporan dan Sanksi Pelanggaran • BAB VI: Penutup
Code of Conduct	a. Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015 b. Articles of Association of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). c. Guidelines for Good Corporate Governance (GCG Guidelines) of Indonesia Infrastructure Guarantee Corporation (Persero)	Procedure for the Company's internal relations (the Company's organs and employees) and relations with the Stakeholders in running the Company's business. The contents include the following: • CHAPTER I: Introduction • CHAPTER II: Statement of Corporate Values • CHAPTER III: Code of Conducts and Business Ethics • CHAPTER IV: Instruction for Implementation • CHAPTER V: Reporting and Sanction for Violations • CHAPTER VI: Closing
Piagam Komite Audit	a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan f. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit PT PII dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang meliputi: • BAB I Pendahuluan • BAB II Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang • BAB III Pola Hubungan Kerja, Keanggotaan dan Masa Jabatan • BAB IV Tata Kerja dan Prosedur Kerja • BAB V Penganggaran dan Pembiayaan • BAB VI Penutup
Audit Committee Charter	a. Law of the Republic Indonesia Number 17 Of 2003 on State Financial b. Law of the Republic Indonesia Number 19 Of 2003 on SOE c. Law of the Republic Indonesia Number 40 Of 2007 on Limited Liabilities Company d. Government Regulation No. 45 Of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervisory and Dismissal of State-Owned Enterprise e. Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 88/PMK.06/2015 concerning Implementation of Good Corporate Governance in Limited Liability Company (Persero) under the Development and Supervision of Minister of Finance f. Articles of Association of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Work reference and guideline for the Company's Audit Committee in carrying out its duties and authorities are as follows: • CHAPTER I: Introduction • CHAPTER II: Duties, Responsibilities, and Authorities • CHAPTER III: Structure, Membership Requirements, and Term Of Office • CHAPTER IV Working Mechanism and Procedure • CHAPTER V Budgeting and Financing • CHAPTER VI Closing



Pendahuluan

Introduction

Pedoman Guideline	Dasar Penetapan Regulatory Framework	Isi Content
Piagam Komite Pemantau Risiko	a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Penjaminan Infrastruktur e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan f. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Acuan dan pedoman kerja bagi Komite Pemantau Risiko PT PII dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang meliputi: • BAB I Pendahuluan • BAB II Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang • BAB III Pola Hubungan Kerja, Keanggotaan dan Masa Jabatan • BAB IV Tata Kerja dan Prosedur Kerja • BAB V Penganggaran dan Pembiayaan • BAB VI Penutup
Charter of Risk Monitoring Committee	a. Law of the Republic Indonesia Number 19 Of 2003 concerning State-Owned Enterprises. b. Law of the Republic Indonesia Number 40 Of 2007 about Limited Liability Companies. c. Government Regulation Number 45 Of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises d. Government Regulation Number 35 Of 2009 as amended by Government Regulation Number 50 of 2016 concerning amendment on Government Regulation Number 35 of 2009 Concerning State Equity Participation (PMN) for the Establishment of Limited Liability Company (Persero) in Infrastructure Guarantee e. Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 88/PMK.06/2015 concerning Implementation of Good Corporate Governance in Limited Liability Company (Persero) under the Development and Supervision of Minister of Finance f. Articles of Association of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Work reference and guideline for the Company's Risk Monitoring Committee in carrying out its duties and authorities, which includes: • CHAPTER I Introduction • CHAPTER II Duties, Responsibilities, and Authorities • CHAPTER III Pattern of Job Relations, Membership and Term of Office • CHAPTER IV Work Procedure • CHAPTER V Budgeting and Financing • CHAPTER VI Closing
Piagam Audit Internal	a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Penjaminan Infrastruktur b. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) c. Surat Keputusan Direksi Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor SK-002/DIR/GEN/08/2010 tentang Operating Manual PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Prosedur operasi Audit Internal dalam menjalankan fungsinya melakukan penelaahan dan pengujian operasional PT PII sebagai organisasi bisnis, yang secara garis besar mencakup: • BAB I : Pendahuluan • BAB II : Struktur dan Persyaratan Keanggotaan • BAB III : Cakupan, Kewenangan dan Tanggung Jawab, serta Hubungan dengan Auditee • BAB IV : Kehati-hatian Profesional • BAB V : Kode Etik Audit Internal • BAB VI : Pertanggungjawaban • BAB VII : Penutup
Internal Audit Charter	a. Government Regulation Number 35 of 2009 concerning State Equity Participation (PMN) for the Establishment of Limited Liability Company (Persero) in Infrastructure Guarantee b. Articles of Association of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). c. Decree of the Company's Board of Directors No. SK-002/DIR/GEN/08/2010 concerning the Operating Manual of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Internal Audit's operational procedure in carrying out its function to review and examine the Company's operations as business organization, which in general covers: • CHAPTER I: Introduction • CHAPTER II: Membership Structure and Requirements • CHAPTER III : Coverage, Authority and Responsibility, and Relations with the Auditee • CHAPTER IV : Professional Prudence • CHAPTER V : Code of Ethics for Internal Audit • CHAPTER VI : Responsibility • CHAPTER VII : Closing



Pedoman Guideline	Dasar Penetapan Regulatory Framework	Isi Content
Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2016; e. Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2008; f. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) g. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Pedoman GCG) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Merupakan pedoman yang mengatur mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran yang disampaikan terhadap PT PII. Isi dari Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagai berikut: • BAB I : Pendahuluan • BAB II : Pelaporan Pelanggaran • BAB II: Penanganan Pelaporan Pelanggaran • BAB IV : Perlindungan Pelapor • BAB V: Sosialisasi dan Penegakan
Whistleblowing System Policy	a. Law of the Republic of Indonesia No. 31/1999 concerning the Eradication of Corruption and has been amended by Law of the Republic of Indonesia No. 20/2001; b. Law of the Republic of Indonesia No. 13/2006 concerning Protection of Witness and Victim; c. Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 concerning Limited Liability Company (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 No. 106, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4756); d. Government Regulation No. 35/2009 concerning State Equity Participation (PMN) for the Establishment of Limited Liability Company (Persero) in Infrastructure Guarantee as amended by Government Regulation No. 50/2016; e. Guideline for Violations Reporting System (<i>Whistleblowing System</i>) of the Governance Policy National Committee Of 2008; f. Article of Association of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); g. Guidelines for Good Corporate Governance (GCG Guidelines) of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Guideline that regulates the mechanism for violations reporting addressed to the Company. The contents of the Guideline for Whistleblowing System are as follows: • CHAPTER I Introduction • CHAPTER II: Violations Reporting • CHAPTER III: Violations Reporting Management • CHAPTER IV: Protection of Whistleblowers • CHAPTER V: Socialization and Enforcement



Pendahuluan

Introduction

Pedoman Guideline	Dasar Penetapan Regulatory Framework	Isi Content
Pedoman Gratifikasi	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2016. e. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. f. Akta Pendirian Nomor 29 tertanggal 30 Desember 2009. g. Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) h. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) i. Pedoman Kode Etik PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Pedoman ini terkait dengan penerimaan dan pemberian segala bentuk gratifikasi, batasan, serta pelaporan penerimaan dan pemberian yang berlaku bagi Insan Perusahaan dan seluruh <i>stakeholders</i>. Isi dari pedoman sebagai berikut: • BAB I: Pendahuluan • BAB II: Ketentuan Umum Gratifikasi • BAB III: Penutup
Gratification Policy	a. Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption Crimes, as updated with Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2001 on Amendment to Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption Crimes. b. Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2002 on Commission for the Eradication of Corruption Crimes. c. Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company. d. Government Regulation Number 35 Year 2009 on State Equity Participation for the Establishment of State Company in Infrastructure Guarantee, as subsequently amended with Government Regulation Number 50 Year 2016. e. Minister of Finance Regulation Number 7/PMK.09/2017 on Guidelines for Gratuity Control within the Ministry of Finance. f. Deed of Establishment Number 29 dated 30 December 2009. g. Corporate Governance Guidelines of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) h. Guidelines of Whistleblowing System of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) i. Code of Conduct of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	This guideline refers to the acceptance and giving of all forms of gratuities, limitations, as well as reporting of gratuity acceptance and giving, that apply to all personnel of the Company and its stakeholders. The contents of the guideline are as follow: • CHAPTER I: Introduction • CHAPTER II: General Provisions of Gratuity • CHAPTER III: End



TUJUAN PENERAPAN GCG

PT PII memandang bahwa penerapan GCG bukan sekadar mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Lebih dari itu, ada sejumlah tujuan penting dalam implementasi GCG, yaitu:

1. Mendorong agar organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kesinambungan perusahaan yang memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan pendirian Perseroan, peningkatan nilai bagi Pemegang Saham, pegawai dan Pemangku Kepentingan.
3. Meningkatkan legitimasi Perseroan yang dikelola secara terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Mengakui dan melindungi hak para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan
5. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.
6. Meningkatkan tata kelola terhadap Perseroan dalam mewujudkan mandat yang diberikan Pemerintah.

PENGELOLAAN GCG

Perseroan berkomitmen untuk membangun dan menerapkan GCG di lingkungan perusahaan. Hal tersebut diawali oleh kesadaran untuk menata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang sehat. PT PII terus mendorong peningkatan implementasi GCG dan berupaya menciptakan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.

PT PII juga telah menetapkan strategi dan meningkatkan cakupan implementasi GCG yang melibatkan seluruh karyawan di setiap tingkatan dan jenjang organisasi. Optimalisasi penerapan GCG terus dilakukan melalui penguatan infrastruktur serta penyesuaian sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang semakin efektif.

PURPOSE OF GCG IMPLEMENTATION

PT PII considers that the implementation of GCG is not merely complying with the provisions set by the regulator. More than that, there are important goals to be achieved in GCG implementation, namely:

1. Encourage the Company's organs to make decisions and carry out actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of the Company's social responsibility towards stakeholders and the preservation of the surrounding environment.
2. Increasing the efficiency, effectiveness and sustainability of the company that supports the achievement of the Company's objectives, increasing value for Shareholders, employees and Stakeholders.
3. Increasing the legitimacy of the Company which is managed in an open, fair and accountable manner.
4. Recognize and protect the rights of Shareholders and Stakeholders
5. Increasing the Company's contribution to the national economy.
6. Improve corporate governance in realizing the mandate given by the Government.

MANAGEMENT OF GCG

The Company is committed in developing and implementing GCG within the Company. This is preceded by the awareness to manage the Company in accordance with sound corporate governance principles. The Company continues to promote the improvement of GCG implementation and strives to create work culture that upholds integrity, professionalism and compliance with the applicable rules in line with GCG principles.

The Company has established strategies and increased its coverage of GCG implementation involving all employees at all levels of the organization. The Company continues to optimize GCG implementation through infrastructure strengthening, as well as system and procedures necessary adjustments to enable a more effective GCG implementation.



Pendahuluan

Introduction

KOMITMEN PENERAPAN GCG

Konsep penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT PII berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan Perseroan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi salah satu langkah penting bagi PT PII untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perusahaan, mendorong pengelolaan bisnis yang profesional, transparan, dan efisien.

Bagi PT PII, komitmen terhadap penerapan GCG tidak hanya mewakili kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga diyakini sebagai kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja bisnis PT PII yang efektif, efisien, serta berkelanjutan. Langkah implementasi kebijakan penerapan GCG, adalah dengan menjalankan budaya Perseroan yang tercermin pada sikap dan tingkah laku sehari-hari di seluruh jajaran manajemen dan karyawan.

PT PII juga melakukan komunikasi dan sosialisasi, pelatihan, serta memetakan akuntabilitas dan tanggungjawab sesuai perubahan bisnis dan organisasi dalam Perseroan. Selain itu, Perseroan juga senantiasa mematuhi peraturan dan menjunjung tinggi kebijakan serta nilai-nilai yang terkandung dalam praktik Tata Kelola Perusahaan.

Komitmen lainnya atas implementasi GCG di antaranya:

1. PT PII bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan yang memadai sehingga memastikan keandalan pelaporan keuangan Perseroan dan persiapan penerbitan laporan keuangan yang selaras dengan PSAK.
2. Manajemen bertanggung jawab terhadap pembuatan, pemeliharaan, evaluasi, dan kesesuaian atas informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan.

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan. Komitmen tersebut didukung dengan adanya:

1. Visi, Misi, dan Tata Nilai Perseroan yang jelas dan realistis yang dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Pedoman GCG Perseroan;
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-komite;

COMMITMENT TO IMPLEMENTING GCG

The concept of implementing GCG principles in the Company is based on a commitment to create a transparent, accountable, and trustworthy Company through an accountable business management. The implementation of GCG principles is an important step for the Company to improve and maximize its values, encourage a professional, transparent and efficient business management.

For the Company, its commitment to GCG implementation does not only represent its obligation to comply with the applicable regulations, but is also assumed to be the key in achieving an effective, efficient, and sustainable business performance of the Company. The step in applying the GCG implementation policy is to implement Corporate Culture, which is reflected in the day-to-day attitude and behavior across the Company's management and employees.

PT PII also conducts communication and socialization, training, and mapping accountability and responsibilities according to changes in the Company's business and organization. In addition, the Company also continues to comply with the regulations and to highly raise the policies and values embodied in Good Corporate Governance practices.

Other commitments on GCG implementation include:

1. The Company is responsible for the implementation and maintenance of internal control system towards sufficient financial reporting in order to ensure the reliability of the Company's financial statements and preparation for publishing the Company's financial statements consistent with SFAS.
2. The management is responsible for the establishment, maintenance, evaluation and conformity of the information disclosed in the financial statements.

The Company is committed to continuously implementing as well as system. This commitment is supported by:

1. Clear and realistic Company Vision, Mission and Values that are regularly evaluated by the Board of Commissioners and Directors;
2. Company GCG Guidelines;
3. Board of Commissioners, Board of Directors and Committee Charter.



4. Penerapan kode etik yang dilaksanakan secara konsisten dan membudaya;
5. Sistem Pengendalian Internal yang kuat
6. Implementasi mekanisme *check and balances* yang proporsional;
7. Penerapan sistem pelaporan pelanggaran;
8. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN GCG

Dalam implelementasi GCG, Perseroan mewajibkan beberapa hal yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas penerapannya di lingkungan bisnis Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas dilakukannya pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan yang memadai untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan PT PII dan persiapan penerbitan laporan keuangan yang selaras dengan standar akuntansi yang berlaku. Sejauh ini, Perseroan telah berkomitmen untuk melakukan kajian dan audit menyeluruh untuk menjamin rancangan dan implementasi Konvergensi IFRS yang efektif dan terintegrasi dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Bertanggung jawab terhadap pembuatan, pemeliharaan dan evaluasi terhadap efektivitas prosedur dan pengendalian pengungkapan untuk memastikan kesesuaian informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan dan telah dicatat, diproses, dirangkum, dan dilaporkan dalam periode waktu yang tersedia untuk kemudian diakumulasikan dan dikomunikasikan kepada Direksi Perseroan, untuk kepentingan pengambilan keputusan terkait dengan pengungkapan yang diperlukan.

Selain itu, dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG, PT PII juga melakukan kerja sama dengan penilai independen untuk melakukan *assessment* GCG.

FOKUS PENERAPAN GCG 2018

Pada tahun 2018, fokus penerapan GCG di lingkungan Perseroan, antara lain melakukan evaluasi atas *soft structure* GCG sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis Perseroan. PT PII juga melakukan upaya peningkatan komitmen dalam

4. Implementation of Code of Conduct which practiced consistently and culturally;
5. Strong Internal Control System
6. Implementation of proportional check and balances mechanisms;
7. Implementation of a violation reporting system;
8. Sustainable environmental and social responsibility programs.

QUALITY IMPROVEMENT OF GCG IMPLEMENTATION

In implementing GCG, the Company requires several things aimed at improving the quality of its application in the Company's business environment, including the following:

1. Responsible for adequate internal control of PT PII financial reporting to ensure its reliability and to prepare the issuance of financial statements that are in line with applicable accounting standards. So far, the Company has committed to conduct comprehensive studies and audits to ensure the design and implementation of IFRS Convergence that is effective and integrated in the Company's financial statements.
2. Responsible for making, maintaining and evaluating the effectiveness of procedures and controlling disclosure to ensure the suitability of information disclosed in the Financial Statements and has been recorded, processed, summarized and reported within the available time period to be accumulated and communicated to the Company's Board of Directors, for the purpose of making decisions related to the disclosure required.

In addition, in improving the quality of GCG implementation, PT PII also cooperates with independent appraisers to conduct GCG assessments.

FOCUS OF IMPLEMENTING GCG IN 2018

In 2018, the focus of GCG implementation in the Company, among others, is to evaluate the GCG soft structure in accordance with the needs and development of the Company's business. PT PII also made efforts to increase commitment in the prevention



Pendahuluan

Introduction

pencegahan tindak pidana korupsi, di antaranya melalui penyusunan pedoman gratifikasi dan menyusun rencana pengendalian gratifikasi. Pedoman ini merupakan upaya peningkatan komitmen dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Selain itu, untuk menghasilkan tata kelola perusahaan yang baik, PT PII terus melakukan pembaharuan kebijakan internal terkait penerapan GCG serta melakukan penandatanganan komitmen kepatuhan tahunan seluruh Insan Perusahaan.

Untuk meningkatkan *awareness* Insan Perusahaan, pada tahun 2018, Perseroan melakukan sosialisasi pada bulan September 2018, dengan mengundang BPKP dan Prof. Hikmahanto Juwana untuk memberikan workshop terkait “Risiko Hukum Direksi BUMN” yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Kuasa Pemegang Saham PT PII, Direktorat lainnya dalam Kementerian Keuangan, Dewan Komisaris dan Direksi PT PII beserta seluruh Direksi BUMN di bawah Kementerian Keuangan.

of corruption, including through the formulation of guidelines for gratuity and developing plans for gratuity control. This guideline is an effort to increase commitment in preventing corruption.

In addition, to produce good corporate governance, PT PII continues to update its internal policies related to the implementation of GCG, and to sign an annual compliance commitment by all employees of the Company.

To increase awareness of the Company’s employees, the Company conducted a socialization in September 2018, by inviting BPKP and Prof. Hikmahanto Juwana in the workshop regarding “Legal Risk of SOE Board of Directors”, which was attended by the Directorate General of State Assets, as the PT PII Shareholders Authority, other Directorates in the Ministry of Finance, the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company and all Board of Directors of SOE under the Ministry of Finance.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

Pada tahun 2018, PT PII menargetkan implementasi sejumlah pedoman terkait dengan prinsip-prinsip GCG, antara lain Pedoman Gratifikasi. Selain itu, penandatanganan komitmen Kode Etik juga dilaksanakan setiap tahun beserta pelaksanaan sosialisasi GCG kepada seluruh Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris beserta Organ Dewan Komisaris.

Semua rencana yang ditargetkan tersebut telah berjalan dengan baik. Dengan demikian, pedoman pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan semakin kuat serta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada serta praktik bisnis terbaik Perseroan.

Perseroan melaksanakan pengukuran implementasi tata kelola perusahaan yang baik secara berkala setiap tahun. Selain memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015, pelaksanaan pengukuran tersebut bertujuan untuk:

1. Menguji dan menilai penerapan GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan.

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

In 2018, PT PII targets the implementation of a number of guidelines related to the principles of GCG, including the Gratification Policy. In addition, the signing of the commitment to the Code of Conduct carried out every year as well as GCG dissemination to all Employees, Directors, Board of Commissioners and the Board of Commissioners’ Organ.

All of the targeted plans are going well. Thus, the implementation of GCG in the Company’s environment is now getting better and has been implemented in accordance with applicable regulatory provisions, as well as best business practices.

The Company regularly measures the implementation of good corporate governance every year. In addition to fulfilling the provisions stipulated in Minister of Finance Regulation Number 88/PMK.06/2015, the implementation of these measurements aims to:

1. Test and assess the implementation of GCG through elaboration of the conditions of GCG implementation and comparison with predetermined indicators and parameters.



2. Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan GCG, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian.
3. Memantau konsistensi penerapan GCG di lingkungan organisasi Perseroan, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG.
4. Mendorong pengelolaan Perseroan yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan.

2. Providing an overview of measurement results through the value of GCG implementation, along with recommendations for improvements proposed, in order to reduce the gap between the level of practice and indicators and test parameters.
3. Monitor the consistency of GCG implementation in the Company's organizational environment, as well as to obtain input for the improvement and development of GCG policies.
4. Encouraging the management of the Company that is increasingly professional, transparent and efficient, as well as empowering functions and increasing the independence of the Company's Organ.

Hasil Assessment GCG Tahun 2018

Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 72 PMK 88/PMK.06/2015, Perseroan harus melakukan *assessment* Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) secara berkala setiap 1 (satu) tahun. *Assessment* GCG tahun 2018 dilaksanakan oleh penilai independen, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil *assessment* penerapan GCG di PT PII tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Results of the 2018 GCG Assessment

Referring to the provisions stipulated in Article 72 of PMK 88/PMK.06/2015, the Company must conduct a Good Corporate Governance (GCG) assessment periodically every 1 (one) year. The 2018 GCG assessment was carried out by an independent appraiser, namely the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). The results of the assessment of GCG implementation at PT PII in 2018 are as follows:

Aspek Pengujian/Indikator Testing/Indicator Aspect		Bobot Weight	Capaian Tahun 2018 2018 Achievement		Klasifikasi Classification
			Skor Score	% Capaian Achievement (%)	
I	Komitmen Commitment	7,000	5,879	83,99	Baik Good
II	Pemegang Saham Shareholders	9,000	8,113	90,14	Sangat Baik Very Good
III	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,000	32,002	91,43	Sangat Baik Very Good
IV	Direksi Board of Directors	35,000	32,975	94,21	Sangat Baik Very Good
V	Pengungkapan Disclosure	9,000	7,740	86,00	Sangat Baik Very Good
VI	Aspek Lainnya Other Aspects	0,000	0		
			86,709		Sangat Baik Very Good



Pendahuluan

Introduction

Rekomendasi

Recommendation

No.	Usulan Rekomendasi Proposed Recommendations	Pihak Terkait Tindak Lanjut Parties Related to Follow-up		
		RUPS GMS	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
ASPEK KOMITMEN ASPECT OF COMMITMENT				
1	Agar perusahaan melakukan pembahasan atau kajian atas kebutuhan pemutakhiran pedoman GCG. The Company must conduct discussions or studies on the needs for updating GCG guidelines.			√
2	Agar perusahaan segera membuat program untuk penguatan untuk penerapan COC. The Company must immediately prepare a program for strengthening the application of COC.			√
3	Agar perusahaan segera mengesahkan pedoman terhadap Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. The Company must immediately ratify the guidelines for State Administrators who have not submitted their LHKPN in accordance with the applicable laws and regulations.			√
4	Agar perusahaan membuat ketentuan untuk melakukan peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung The Company must prepare the provisions to carry out periodic reviews and improvements on supporting devices			√
5	Agar perusahaan untuk melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>) secara berkala. The Company must carry out evaluations and reports on the implementation of reporting on alleged irregularities in the company (whistle blowing system) periodically.			√
ASPEK PEMEGANG SAHAM ASPECT OF SHAREHOLDERS				
1	Segera mengesahkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris. Immediately ratify the guidelines for the appointment and dismissal of the Board of Commissioners.	√		
2	Agar Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal agar mencari usulan calon anggota Dewan Komisaris. Shareholders/GMS/Capital Owners to seek proposals for prospective members of the Board of Commissioners.	√		
3	Agar proses penilaian calon Dewan Komisaris dilakukan sesuai pedoman. The assessment process for candidates for the Board of Commissioners must be carried out according to the guidelines.	√		
4	Agar Dewan yang terpilih agar berdasarkan hasil akhir penilaian. The Board of Commissioners is selected based on the final results of the assessment.	√		
5	Pengangkatan Dewan Komisaris yang baru dilantik agar disertai dengan berita acara. Appointment of the newly appointed Board of Commissioners must be accompanied by minutes.	√		
6	Agar membuat aturan secara eksplisit menetapkan maksimal jumlah jabatan komisaris yang dapat dipegang oleh seorang komisaris. Must make rules explicitly which stipulates the maximum number of positions that can be held by a commissioner.	√		
7	Agar menetapkan sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Must establish a reporting receipt system for trend in declining performance of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.	√		
ASPEK DEWAN KOMISARIS ASPECT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS				
1	Menetapkan standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan atau pemberian persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi. Determine the standard time for the level of immediacy of decision making or the approval of the Board of Commissioners on the Board of Directors' proposals.		√	
2	Segera menyusun <i>Job descriptbion</i> untuk setiap jabatan sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Prepare immediately Job descriptbion for each position in accordance with the existing organizational structure.			



Rekomendasi

Recommendation

No.	Usulan Rekomendasi Proposed Recommendations	Pihak Terkait Tindak Lanjut Parties Related to Follow-up		
		RUPS GMS	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
3	Menelaah kebijakan/pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan memberikan arahan kepada Direksi atas pengadaan barang dan jasa. Reviewing the policies/implementation of procurement of goods and services and providing direction to the Board of Directors on the procurement of goods and services.		√	
4	Menandatangani laporan manajemen triwulanan maupun semesteran. Sign quarterly and semesterly management reports		√	
5	Mencantumkan besar biaya anggaran biaya audit eksternal dalam RKAT Dewan Komisaris. List the costs of the external audit budget in the Board of Commissioners' RKAT.		√	
6	Membuat laporan dan evaluasi khusus kepada Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan. Prepare special reports and evaluations to Shareholders if the company shows signs of decreasing performance.		√	
7	Menginstruksikan Direksi agar membuat Laporan Mengenai Penilaian IKU secara individual kepada Dewan Komisaris dan melaporkan hasil penilaian kinerja Direksi tersebut dalam Laporan Dewan Komisaris kepada Pemilik Modal. The Board of Directors to prepare a Report on the Assessment of IKU individually to the Board of Commissioners to include the results of the Board of Directors' performance appraisal in the Board of Commissioners' Report to the Shareholders.		√	
8	Agar risalah rapat Dewan Komisaris mencantumkan alasan ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam risalah rapat. Minutes of the Board of Commissioners meeting must state the reasons for the absence of the Board of Commissioners in the minutes of the meeting.		√	
9	Memuat Perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan dalam laporan triwulan dan laporan tahunan Komite Dewan Komisaris. Comparison of the realization of activities with the annual work program included in quarterly reports and annual reports of the Board of Commissioners.		√	
10	Agar didalam RKAP perusahaan, anggaran untuk pelatihan anggota Dewan Komisaris dibuat secara terpisah dari anggaran pelatihan Karyawan dan membuat laporan atas pelatihan yang diikutinya. RKAP of the Company must include the training budget of the members of the Board of Commissioners separately from the Employee training budget, and make a report on the training it follows.		√	
ASPEK DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ASPECT				
1	Agar segera mengesahkan kebijakan pelatihan bagi anggota Direksi, agar rencana kerja dan anggaran untuk pelatihan bagi anggota Direksi dipisahkan dari anggaran untuk pelatihan bagi karyawan, dan agar membuat laporan hasil pelatihan anggota Direksi untuk tiap kegiatan dan mencantumkan uraian kegiatan, biaya kegiatan, manfaat program pelatihan dan lain-lain. Immediately ratify training policies for members of the Board of Directors, work plans and training budgets for members of the Board of Directors must be separated from the budget for training for employees, and must report on training of members of the Board of Directors for each activity and include activity descriptions, activity costs, training program benefits etc.			√
2	Agar dibuatkan ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani. Must prepare the provisions regarding immediacy to communicate it to the level of the organization under the Board of Directors related to the decision, a maximum of 7 (seven) days from being ratified/signed.			√
3	Agar Direksi segera mengisi jabatan kosong dalam level jabatan dalam struktur organisasi, yaitu SVP ENS yang dirangkap SVP <i>underwriting</i> di bawah Direktur Eksekutif Bisnis. The Board of Directors must immediately fill vacant positions at the position level in the organizational structure, namely the SVP ENS which is held by SVP underwriting under the Business Executive Director.			√



Pendahuluan

Introduction

Rekomendasi

Recommendation

No.	Usulan Rekomendasi Proposed Recommendations	Pihak Terkait Tindak Lanjut Parties Related to Follow-up		
		RUPS CMS	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
4	Agar menggunakan aplikasi komputer untuk mendukung sistem pengukuran kinerja. Use computer applications to support performance measurement systems.			
5	Agar tingkat pencapaian target kinerja anggota Direksi secara individu direalisasikan. The level of achievement of individual performance targets of members of the Board of Directors must be realized.			√
6	Agar SPI/Fungsi Audit Internal melakukan penilaian/reviu (<i>assessment</i>) internal secara berkala atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal secara menyeluruh. The SPI/Internal Audit Function must carry out periodic internal assessments of the quality assurance program and overall improvement of the internal audit function.			√
7	Agar Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. The Corporate Secretary must prepare, maintain and store the List of Shareholders and Special Lists.			√
ASPEK PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI ASPECT OF INFORMATION DISCLOSURE AND TRANSPARENCY				
1	Agar membuat laporan keuangan dalam hal ini perusahaan penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan agar mencantumkan masa berlaku penghargaan. Must prepare financial statements in this case the company awards and certifications received by the company to include the validity period of the award.			√
2	Agar menyusun laporan keuangan yang menguraikan tanggal serta jumlah dividen kas per Saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Must prepare financial statements to describe the date and amount of cash dividends per Share and the amount of dividends per year announced or paid for the last 2 (two) financial years.			√
3	Agar menyusun laporan tahunan yang memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan menguraikan Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen Must prepare an annual report that contains good corporate governance practices by outlining the Establishment of a Consumer Complaint Center			√
4	Agar menyusun laporan tahunan yang memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan menguraikan mitra usaha binaan perusahaan. Must prepare an annual report that contains good corporate governance practices by outlining business partners built by the company.			√

PENGHARGAAN PENERAPAN GCG

Penghargaan CGPI Award 2018

Pada tahun 2018, PT PII memperoleh penghargaan sebagai perusahaan yang dipercaya publik pada Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2018 oleh Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG). Perseroan dinilai telah melakukan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

AWARDS ON THE IMPLEMENTATION OF GCG

2018 CGPI Award

In 2018, PT PII was awarded as a public trusted company in the 2018 Corporate Governance Perception Index (CGPI) by the Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG). The Company is considered to have carried out good corporate governance accordance with GCG principles, namely: transparency, accountability, responsibility, independency and fairness.



Juara ASEAN Risk Awards 2018

PT PII meraih penghargaan dalam ajang ASEAN Risk Award 2018 dari Enterprise Risk Management Academy (ERMA) untuk kategori Public Initiatives. Penghargaan ini merupakan yang kedua kalinya diraih PT PII, setelah pada tahun 2017 PT PII meraih penghargaan dengan kategori yang sama.

Penghargaan ini diraih karena PT PII dianggap sukses dalam menciptakan solusi kreatif yang dapat melayani kepentingan publik.

Winner of the 2018 ASEAN Risk Awards

PT PII received an award in ASEAN Risk Award 2018 from Enterprise Risk Management Academy (ERMA) in the Public Initiatives category. This was the second of such award received by PT PII, following the award in the same category given to PT PII in 2017.

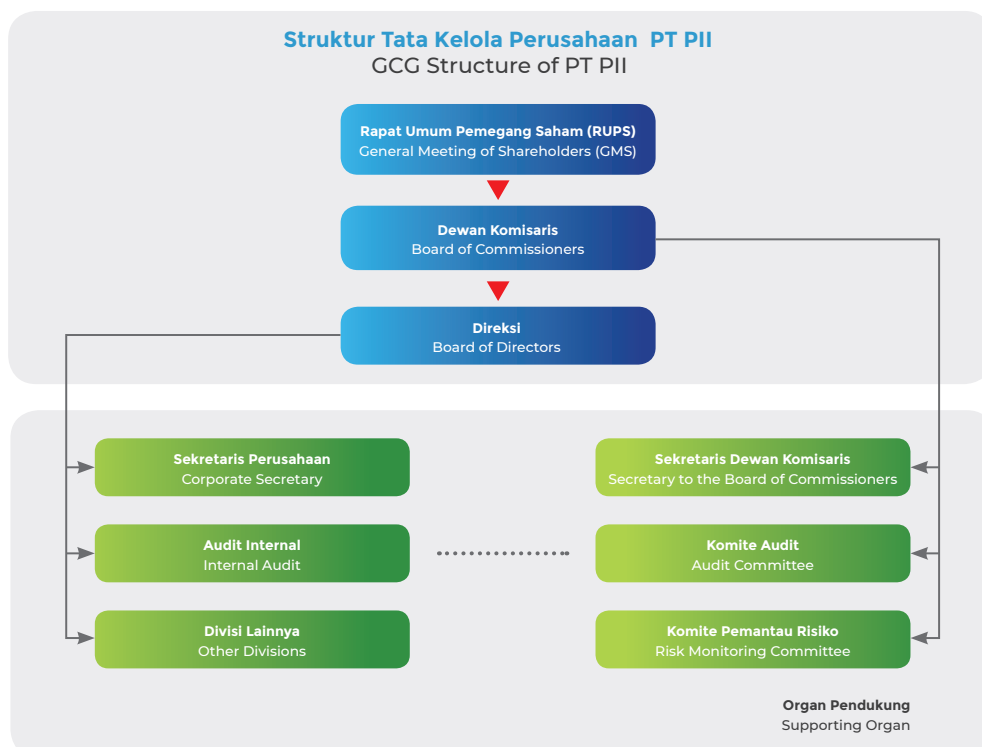
The award was given as PT PII was deemed successful in creating an innovative solution to serve the public interest.

STRUKTUR HUBUNGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam membangun struktur GCG, PT PII memperhatikan pemetaan fungsi atau kegiatan usaha dengan standar etika bisnis serta memastikan mekanisme *check and balance* dapat bekerja secara efektif. Struktur tata kelola di lingkungan Perseroan meliputi struktur organ dan kebijakan Perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, serta Organ-organ pendukung lainnya, seperti Sekretaris Perusahaan, pengendalian internal, manajemen risiko, serta ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

GCG STRUCTURE

In developing the GCG structure, the Company considers the mapping of functions or business activities based on business ethics standards and ensures check and balance mechanisms can work effectively. The Company's governance structure includes the Company's organ structure and policy, namely General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, Board of Directors, and other Supporting Organizations, such as Corporate Secretary, internal control, risk management and compliance with the applicable regulations.





Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham perusahaan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Pemegang saham utama dan pengendali PT PII adalah Negara Republik Indonesia yang memegang 100% saham dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwakilkan kepada Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan selaku RUPS dapat memberikan kuasa kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan untuk bertindak selaku RUPS atau Pemegang Saham.

Kewenangan RUPS

1. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Menyetujui dan mengesahkan atau menolak Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang disusun oleh Direksi setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris.
5. Menetapkan besaran honorarium dan fasilitas bagi Dewan Komisaris serta gaji dan fasilitas lain bagi Direksi.
6. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.
7. Menyetujui atau menolak transaksi-transaksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan kekayaan Perusahaan sebagai jaminan utang yang bernilai sebesar sama dan/atau lebih dari 50% jumlah ekuitas atau kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, seperti:

INFORMATION ON THE MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDER

Shareholder refers to individual or legal entity that legally owns the Company's shares. The shareholders shall not intervene on the functions, duties and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The major and controlling shareholder of the Company is the Republic of Indonesia, which owns 100% of the Company's shares, and in accordance with the applicable laws and regulations represented to the Minister of Finance.

The Minister of Finance as the GMS may authorize the Director General of State Assets on behalf of the Minister of Finance to act as a GMS or Shareholder.

Authorities of GMS:

1. Stipulating amendment on Articles of Association;
2. Appointing and dismissing member(s) of the Board of Directors and Board of Commissioners;
3. Providing resolutions that are required to maintain the Company's long-term and short-term business interests in accordance with the law and regulations as well as Articles of Association;
4. Approving and ratifying or rejecting the Company's Annual Report and Financial Statements prepared by the Board of Directors, after have been examined by the Board of Commissioners;
5. Determining the amount of salary and facilities for the Board of Commissioners as well as salary and other facilities for the Board of Directors;
6. Appointing Public Accounting Firm to conduct audit on the Company's Annual Financial Statements;
7. Approving or rejecting transactions to transfer assets or place the Company's assets as guarantee for loans of which amount is equal and/or more than 50% of the Company's total equity or net assets in 1 (one) transaction or more, either related to each other or not, as regulated in the Articles of Association, among others:



- a. Mengagunkan atau menjaminkan aktiva tetap Perusahaan untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang.
 - b. Penyertaan dan/atau pelepasan penyertaan modal pada perusahaan lain, Perusahaan anak, Perusahaan patungan.
 - c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan/atau pembubaran Perusahaan anak/patungan.
8. Menyetujui atau menolak tindakan kerja sama Perusahaan dengan Badan Usaha atau entitas/pihak lain berupa penjaminan, kontrak penjaminan, kontrak manajemen, kerja sama lisensi, penyewaan aset atau kerja sama lainnya yang bernilai sama atau melebihi 50% dari nilai ekuitas Perusahaan.
 9. Menyetujui aksi korporasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 10. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
 11. Melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- a. Use of the Company's fixed assets as collateral or guarantee to withdraw medium/long-term loans;
 - b. Placement and/or release of capital investment in other companies, Subsidiary, Joint Venture;
 - c. Merger, consolidation, take over, spin-off and/or dismissal of subsidiary/joint venture;
8. Approving or rejecting partnership between the Company with the Project Company or other entities/parties in the form of guarantee, guarantee agreement, management contract, assets rental, license partnership or other partnerships with equal or more than 50% value of the Company's total equity;
 9. Approving corporate action according to the applicable laws and regulations;
 10. Taking decision under transparent and fair as well as accountable process;
 11. Implementing good corporate governance according to respective authorities and responsibilities.

Penerbitan Publikasi RUPS

Perseroan tidak melakukan publikasi informasi pada umum mengenai RUPS karena Perseroan bukan merupakan perusahaan publik.

Jenis RUPS di Perusahaan

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan diadakan tiap tahun, meliputi:

1. RUPS mengenai persetujuan Laporan Tahunan.

RUPS tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. Dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:

- a. Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris.
- b. Usulan penggunaan laba bersih Perusahaan.
- c. Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perusahaan.

Issuance of GMS Publication

The Company does not publish information on the Company's GMS to the general public since the Company is not a Public Company.

Types of GMS conducted in the Company

Annual GMS

Annual GMS is conducted every year, which includes:

1. GMS concerning the Approval on the Company's Annual Report.

Annual GMS to approve the Company's Annual Report is conducted at the latest 6 (six) months after the closing of the fiscal year. At the said meeting, the Board of Directors shall submit:

- a. Annual Report that has been signed by all members of the Board of Directors as well as the Board of Commissioners.
- b. Proposal on the use of the Company's net income.
- c. Other matters which need to be approved by the General Meeting of Shareholders for the interests of the Company



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

2. RUPS mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

RUPS tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan), dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:

- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, termasuk Proyeksi Laporan Keuangan.
- b. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perusahaan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja.

Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal Panggilan RUPS tahunan.

RUPS Lainnya (RUPS Luar Biasa)

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

Tempat RUPS

Ruang Rapat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 10
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta

Pemanggilan & Pengumuman RUPS

PT PII hanya melakukan pemanggilan RUPS yang dilakukan 14 hari sebelum pelaksanaan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS.

Tata Tertib

Perseroan mengacu tata tertib pelaksanaan RUPS berdasarkan Akta Pendirian PT PII Nomor 29 tahun 2009. Rincian yang tertuang dalam akta tersebut adalah:

Tata Tertib Umum

1. RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir.
2. Seluruh risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang dtunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
3. Risalah RUPS yang dibuat dengan Akta Notaris, tanda tangan dimaksud tidak diperlukan.

2. GMS concerning the approval on the Company's Work Plan and Budget.

The Annual General Meeting of Shareholders to approve the Company's Work Plan and Budget shall be held no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year (the budget year of the Company's Work Plan and Budget), and in the meeting the Board of Directors submits:

- a. Work Plan and Corporate Budget, including Financial Statement Projection.
- b. Other matters which need to be approved by the General Meeting of Shareholders for the interests of the Company that have not been included in the Work Plan Draft.

The Annual General Meeting of Shareholders may also include proposals submitted by the Board of Commissioners and/or Stakeholders provided that the proposals concerned must have been received by the Board of Directors prior to the date of calling of the Annual GMS.

Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

Extraordinary GMS may be held at any time as required for the interests of the Company.

Venue

Meeting Room of the Directorate General of State Assets
Syafrudin Prawiranegara Building, Fl. 10
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta

GMS Invitation and Announcement

The GMS invitations are conducted by PT PII within 14 days before the GMS, without taking into account the date of the call and the date of the GMS.

Work Procedure

For procedures for the implementation of the GMS, the Company refers to the Establishment Deed PT PII Number 29 of 2009 with the following details:

General Procedure

1. The GMS is chaired by the shareholders present.
2. All minutes of the GMS must be made and signed by the Chair of the Meeting and at least 1 (one) shareholder appointed from and by the participants of the GMS.
3. Minutes of the GMS made with a Notary Deed, the said signature is not required.



Tata Tertib Pengambilan Keputusan

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.
3. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
4. RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Ketentuan Kuorum

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 51% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar menentukan lain.
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
4. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 50% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

Decision Making Procedure

1. GMS decisions are based on deliberation to reach consensus.
2. In the event that a decision based on deliberation and consensus as referred to in paragraph (1) is not reached, the decision is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the valid votes issued unless Articles of Association stipulate otherwise.
3. A GMS is lawful to amend the Articles of Association can be held if the GMS is attended by shareholders or proxies representing at least 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights.
4. The GMS is lawful to approve Mergers, Smelters, Acquisitions, or Separation and Changes of Legal Entity if the GMS is attended by at least 3/4 (three quarters) of the total shares issued by the Company with valid voting rights and the decision is approved by at least 3/4 (three quarters) of the votes.

Quorum Provisions

1. The GMS can be held if during the GMS at least 51% of the total shares with voting rights are present or represented, unless the law and/or Articles of Association stipulate otherwise.
2. In the event that the quorum as referred to in paragraph (1) is not reached, a second GMS can be held.
3. In holding the second GMS, it must be stated that the first one was held and failed to reach the quorum.
4. The second GMS as referred to in paragraph (2) is valid and has the right to make a decision if during the GMS at least 50% of the total shares with voting rights are present or represented, unless the Articles of Association stipulate otherwise.
5. In the event that the second GMS quorum as referred to in paragraph (4) is not reached, then the Company may request the Chairman of the District Court, whose jurisdiction includes the Company's domicile, to set a quorum for the third GMS at the request of the Company.



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

- Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- The summons of the third GMS must state that the second GMS has been held and has not reached a quorum and the third GMS will be held with the quorum set by the Chairman of the District Court
- Decision made by the Chairman of the District Court regarding the quorum of the GMS as referred to in paragraph (5) is final and has permanent legal force.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Attendance of BOD and BOC

No.	Nama Name	Kehadiran Attendance	
		Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
1	Ayu Sukorini, Komisaris Utama President Commissioner	√	-
2	M. Rahman Ritza, Komisaris Commissioner	√	-
3	Iskandar, Komisaris Commissioner	√	-
Direksi Board of Directors			
4	Armand Hermawan, Direktur Utama President Director	√	-
5	Salusra Satria, Direktur Director	√	-
6	Muhammad Wahid Sutopo, Direktur Director	√	-

Pelaksanaan RUPS Tahun 2018 dan Realisasinya

Pada tahun 2018, PT PII menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa, yaitu:

1. RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017

Implementation of the 2018 GMS and its Realization

In 2018, PT PII held 2 (two) Annual GMS and 1 (one) Extraordinary GMS, namely:

1. Annual GMS Approval of the 2017 Annual Report

No.	Agenda dan Keputusan RUPS GMS Agenda and Resolution	Tanggal RUPS Date of GMS	Realisasi Keputusan Realization of GMS Resolution
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 yang mencakup: - Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 - Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 - Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016 Approval of the 2017 Annual Report of the Company which includes: - Ratification of the Company's Financial Report for the Fiscal Year 2017 - Ratification of the 2017 Year Partnership and Community Development Program Report - Granting full release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to all members of the Board of Commissioners and Directors of the Company for the supervision and management actions carried out during the 2016 Financial Year.	23 Mei 2018 23 May 2018	Telah terealisasi Has been realized



No.	Agenda dan Keputusan RUPS GMS Agenda and Resolution	Tanggal RUPS Date of GMS	Realisasi Keputusan Realization of GMS Resolution
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 Determination of the Appropriation of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2017.		Telah terealisasi Has been realized
3	Penetapan keputusan gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Dewan Komisaris/Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 serta pembayaran tantiem berdasarkan kinerja tahun 2017 Determination of salary/honorarium and allowances/facilities for the Board of Commissioners/Directors of the Company for the 2018 Fiscal Year and tantiem payments based on 2017 performance		Telah terealisasi Has been realized

2. RUPS Tahunan RKAP 2019

2. Annual GMS on The 2019 Work Plan and Budget

No.	Agenda dan Keputusan RUPS GMS Agenda and Resolution	Tanggal RUPS Date of GMS	Realisasi Keputusan Realization of GMS Resolution
1	Pembahasan dan Persetujuan/Pengesahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun Buku 2019 serta Pembahasan dan Persetujuan/Pengesahan Kontrak Kinerja Direksi dan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun Buku 2019 Discussion and Approval/Ratification of PT PII Corporate Work Plan and Budget for Fiscal Year 2019 and Discussion and Approval/Ratification of Board of Directors' Performance Contracts and Board of Commissioners Performance Contracts PT PII for 2019	20 Desember 2018 20 December 2018	Telah terealisasi Has been realized

3. RUPS Luar Biasa Perubahan RKAP 2018

3. Extraordinary GMS for Revision of The 2018 Work Plan and Budget

No.	Agenda dan Keputusan RUPS GMS Agenda and Resolution	Tanggal RUPS Date of GMS	Realisasi Keputusan Realization of GMS Resolution
1	Persetujuan dan pengesahan atas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Tahun Buku 2018 Approval and ratification of revision to the Company's Corporate Work Plan and Budget for the 2018 Fiscal Year	23 Mei 2018 23 May 2018	Telah terealisasi Has been realized



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Pelaksanaan RUPS Tahun 2017 dan Realisasinya

Pada tahun 2017, PT PII menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa, yaitu:

1. RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2016

Implementation of the 2017 GMS and its Realization

In 2017, PT PII held 2 (two) Annual GMS and 1 (one) Extraordinary GMS, namely:

1. Annual GMS Approval of the 2016 Annual Report

No.	Agenda dan Keputusan RUPS GMS Agenda and Resolution	Tanggal RUPS Date of GMS	Realisasi Keputusan Realization of GMS Resolution
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 yang mencakup: • Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 • Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 • Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016 Approval of the 2016 Annual Report of the Company which includes: • Ratification of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2016 • Ratification of the 2016 Partnership and Community Development Program Report • Provision of full release and decharge (<i>acquit et de charge</i>) to all members of the Board of Commissioners and Directors of the Company for supervision and management actions that have been carried out during the 2016 Financial Year	26 Mei 2017 26 May 2017	Telah Direalisasikan Has been realized
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 Determination of Use of the Company's Net Profit for the 2016 Financial Year		Telah Direalisasikan Has been realized
3	Pembayaran Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Berdasarkan Kinerja Tahun Buku 2016 serta Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2017 Payment of the Board of Commissioners and Board of Directors' Tantiem Based on 2016 Fiscal Year Performance as well as Determination of the Company's 2017 Board of Commissioners and Directors Remuneration		Telah Direalisasikan Has been realized
4	Penetapan Kantor Akuntan Publik yang mencakup: a. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan dan melakukan proses penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 b. Penetapan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang diusulkan oleh Dewan Komisaris sesuai pendelegasian wewenang yang diberikan sebagaimana dimaksud pada poin 4a. Appointment of a Public Accountant Office which includes: a. Delegation of authority to the Board of Commissioners to propose and conduct the appointment process of the Public Accounting Firm in order to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2017 b. Determination of the appointment of the Public Accountant Office proposed by the Board of Commissioners in accordance with the delegation of authority granted as referred to in point 4a.		Telah Direalisasikan Has been realized



2. RUPS Tahunan RKAP 2018

2. Annual GMS on the 2018 Work Plan and Budget

No.	Agenda dan Keputusan RUPS GMS Agenda and Resolution	Tanggal RUPS Date of GMS	Realisasi Keputusan Realization of GMS Resolution
1	Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2018; Approval of the 2018 Corporate Work Plan and Budget;	27 Desember 2017	Telah Direalisasikan Has been realized
2	Persetujuan Kontrak Kinerja Manajemen PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2018; dan Management Performance Contract Agreement of PT PII in 2018; and		Telah Direalisasikan Has been realized
3	Persetujuan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Tahun 2018. Approval of the Performance Contract of the Board of Commissioners of PT PII in 2018.		Telah Direalisasikan Has been realized

3. RUPS Luar Biasa RJPP Tahun 2018-2022

3. Extraordinary GMS on Corporate Long Term Plan Year 2018-2022

No.	Agenda dan Keputusan RUPS GMS Agenda and Resolution	Tanggal RUPS Date of GMS	Realisasi Keputusan Realization of GMS Resolution
1	Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2018 sampai dengan 2022 Approval of Company Long-Term Plans from 2018 to 2022	27 Desember 2017 27 December 2017	Telah Direalisasikan Has been realized

Pelaksanaan Hasil Keputusan RUPS

Seluruh Keputusan RUPS telah dijalankan sepenuhnya oleh PT PII. Tidak terdapat Keputusan RUPS yang belum dilaksanakan.

Implementation of GMS' Decision

All resolutions from the GMS have been fully implemented by PT PII. There is no GMS Decree that has not been implemented.



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen.

Dewan Komisaris berperan aktif untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan. Setiap tahun, Dewan Komisaris menunjuk penilai independen untuk melakukan penilaian atas penerapan GCG pada Perseroan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris sebagai suatu *board* memiliki kompetensi inti yang dibutuhkan untuk memastikan efektivitas Dewan Komisaris. Kompetensi tersebut meliputi bidang akuntansi, keuangan, kemampuan strategis, pemahaman bisnis, pengalaman dan kedalaman manajerial, pengetahuan industri asuransi, pemahaman regulasi serta manajemen dan pengendalian risiko.

Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Anggota Dewan Komisaris juga wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya dan hubungan keuangan dan keluarganya dengan Komisaris lain anggota Direksi dan Pemegang Saham, serta dilarang mengambil keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh RUPS.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajemen perusahaan, Dewan Komisaris PT PII dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Fungsi pengawasan dan penasihat ini dilaksanakan melalui pertemuan rutin yang diadakan dengan Direksi serta melalui pendelegasian tugas dan kewenangan kepada masing-masing Komite terkait.

The Board of Commissioners is Company's organ whose duty is to carry out the supervision function in general and/or specifically, in accordance with the Articles of Association and to provide advice to the Directors. The Board of Commissioners also has the duty to ensure the implementation of GCG principles in every business activity at all levels of the organization. The Board of Commissioners carries out its duties and functions independently.

The Board of Commissioners shall play an active role in ensuring the implementation of GCG principles in every business activity at all levels of the Company's organization. Every year, the Board of Commissioners appoints an independent appraiser to evaluate the implementation of GCG in the Company.

All members of the Board of Commissioners have the core competencies needed to ensure the effectiveness of the Board of Commissioners. These competencies include accounting, finance, strategic ability, business understanding, managerial experience and depth, knowledge of the insurance industry, understanding in regulations as well as management and risk control.

Members of the Board of Commissioners must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally. Members of the Board of Commissioners are also required to disclose their share ownership and financial relationships and their families with other Commissioners, the Board of Directors and Shareholders, and are prohibited from taking personal advantage from the Company, other than the remuneration and facilities stipulated by the GMS.

In implementing the supervisory and advisory functions for company management, PT PII Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee. This oversight and advisory function is carried out through regular meetings held with the Board of Directors and through delegation of duties and authorities to each of the relevant Committees.



Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menelaah laporan keuangan perusahaan sebelum dilaporkan ke Pemegang Saham dan *stakeholder* lainnya serta melakukan pengkajian atas laporan penilaian internal Perseroan.

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan *monitoring* pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan GCG pada Perseroan. Komite Pemantau Risiko juga menelaah kecukupan, kelengkapan dan efektivitas pelaksanaan prosedur manajemen risiko Perseroan serta merekomendasikan arah kebijakan jika diperlukan.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki uraian pekerjaan yang dituangkan dalam Tata Laksana Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang terakhir kali diperbarui pada Maret 2016 serta Pedoman Dewan Komisaris yang terakhir kali diperbarui pada bulan Desember 2017. Dokumen-dokumen tersebut merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dan menjelaskan hubungan, komunikasi, dan aktivitas antara organ Perusahaan tersebut secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten. Pedoman tersebut dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham, serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG.

Isi *Board Manual* yang berhubungan dengan Dewan Komisaris adalah:

BAB II DEWAN KOMISARIS

- 2.1. Organisasi
- 2.2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in reviewing the Company's financial statements before being reported to Shareholders and stakeholders as well as reviewing the Company's internal valuation reports.

The Risk Monitoring Committee assists the Board of Commissioners in monitoring the implementation of risk management and the implementation of GCG in the Company. The Risk Monitoring Committee also reviews the adequacy, completeness and effectiveness of the implementation of the Company's risk management procedures and recommends policy directions if needed.

BOARD OF COMMISSIONERS WORK GUIDELINES

The Board of Commissioners has a job description set forth in the Work Procedure for the Board of Commissioners and Directors (*Board Manual*) which was last updated in March 2016 and the Board of Commissioners Guidelines which was last updated in December 2017. These documents are a guide for the Board of Commissioners and explain the relationship, communication, and activity between the Company's organs in a structured, systematic, easy to understand and can be implemented consistently. The said guidelines are the reference for the Board of Commissioners in carrying out their respective duties to achieve the Company's vision and mission, so that working standards are expected high in harmony with the principles of GCG.

The Board Manual is prepared based on the principles of corporate law, the provisions of the Articles of Association, applicable regulations and statutory provisions, Shareholder directives, and GCG best practices.

The contents of the Board Manual that are relevant to the Board of Commissioners are:

CHAPTER II BOARD OF COMMISSIONERS

- 2.1. Organization
- 2.2. Duties, Authorities and Obligations of the Board of Commissioners



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

- 2.3. Pedoman Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- 2.4. Pedoman Kebijakan Pengawasan Dewan Komisaris
- 2.5. Rapat Dewan Komisaris
- 2.5.1 Pengertian
- 2.5.2 Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris
- 2.6. Pedoman Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris
- 2.7. Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
- 2.8. Organ Pendukung Dewan Komisaris
- 2.8.1 Komite Audit
- 2.8.2 Komite Pemantau Risiko

Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Berikut ini rincian tugas dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana di atur dalam *Board Manual* Perseroan.

- 2.3. Guidelines for Division of Duties, Authorities and Responsibilities of the Board of Commissioners
- 2.4. Supervisory Policy Guidelines for the Board of Commissioners
- 2.5. Board of Commissioners Meeting
- 2.5.1 Definition
- 2.5.2 Implementation of the Board of Commissioners Meeting
- 2.6. Board of Commissioners Decision Making Guidelines
- 2.7. Guidelines for Evaluating the Performance of the Board of Commissioners
- 2.8. Supporting Organs of the Board of Commissioners
- 2.8.1 Audit Committee
- 2.8.2 Risk Monitoring Committee

Description of the Board of Commissioners' Duties, Authorities and Responsibilities

The Board of Commissioners has the duty to supervise management policies, the management of both the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors, and provide advice to the Board of Directors, including supervision of the implementation of the Company's Long Term Plan, Corporate Work Plan and Budget, as well as the Articles of Association and GMS decisions, applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

The following are details of the duties and authorities of the Board of Commissioners as set out in the Company's Manual Board.

Tugas Duties	1. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. 2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai prinsip-prinsip dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis. 5. Memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak pada Perusahaan secara tepat waktu dan efisien. 6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan/atau hasil pemeriksaan tertentu oleh lembaga pemeriksa lainnya. 7. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada RUPS secara triwulanan dan/atau sewaktu waktu apabila diminta oleh RUPS. 8. Melaporkan kepada Menteri selaku RUPS setiap perkembangan pelaksanaan mandat yang diberikan kepada Perusahaan.	1. Implement Good Corporate Governance in accordance with the authority and responsibility. 2. Ensure the implementation of Good Corporate Governance in accordance with the principles and levels of the Company's business activities at all levels and levels of the organization. 3. Carry out supervision on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, as well as provide advice to the Directors. 4. Direct, monitor and evaluate the implementation of basic and strategic policies. 5. Provide direction on important matters regarding changes in the business environment that are expected to have an impact on the Company in a timely and efficient manner. 6. Ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from internal auditors, external auditors, the results of supervision of the Board of Commissioners and/or certain audit results by other inspection institutions. 7. Report the implementation of duties and responsibilities to the GMS quarterly and/or at any time if requested by the GMS. 8. Report to the Minister, as the GMS, about any developments in the implementation of the mandate given to the Company.



	9. Menyusun pedoman pengambilan keputusan, kebijakan pengawasan, penilaian kinerja, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta melaksanakannya. 10. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 11. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utamanya, jabatan anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan. 12. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. 13. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 14. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.	9. Develop guidelines for decision making, supervision policies, performance appraisal, division of tasks, authority, and responsibilities, and implement them. 10. Prepare the annual work plan and budget of the Board of Commissioners which is an integral part of the Company's Work Plan and Budget. 11. Ensure that the Company's Annual Report contains information on identity, main work, position of members of the Board of Commissioners in other companies, including meetings conducted in one financial year (internal meetings or joint meetings with the Board of Directors), as well as honorariums, facilities, and/or other benefits received from the Company. 12. Has in place binding guidelines and work rules for each member of the Board of Commissioners. 13. Provide sufficient time to carry out duties and responsibilities optimally. 14. Carry out other oversight authorities insofar as they do not conflict with laws and regulations, Articles of Association, and/or Decisions of the General Meeting of Shareholders.
Wewenang Authority	1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan. 2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan. 3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan. 4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi. 5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris. 6. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu. 7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. 9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu. 10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. 12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.	1. Inspect books, letters, and other documents, check cash for verification purposes and other securities and check Company assets. 2. Enter the yard, building and office used by the Company. 3. Request explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all matters relating to the management of the Company. 4. Knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors. 5. Requests the Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend Board of Commissioners meetings. 6. Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary. 7. Temporarily dismiss members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association. 8. Establish committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the Company's capabilities. 9. Use experts for certain matters and within a certain period of time at the Company's expense, if deemed necessary. 10. Perform management actions of the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association. 11. Attending Board of Directors meeting and providing views on the matters discussed. 12. Implement other supervisory authorities insofar as they do not conflict with laws and regulations, Articles of Association, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders.

Kriteria Pengangkatan Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham, pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS, dan waktunya tidak bersamaan dengan pengangkatan anggota Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami

Criteria for Appointment of the Board of Commissioners

1. Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS from the candidates proposed by the Shareholders, the nomination is binding on the GMS, and not at the same time as the appointment of members of the Board of Directors.
2. Members of the Board of Commissioners are appointed by considering their integrity, dedication,



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

3. Komposisi Dewan Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Persyaratan ini harus dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan Perseroan.

Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Pada tahun 2018, terjadi 2 kali perubahan susunan anggota Dewan Komisaris. Pada bulan Juni 2018, terjadi perubahan susunan anggota Dewan Komisaris yakni pengangkatan Sdr. Langgeng Subur (Alm.) sebagai anggota Dewan Komisaris menggantikan Sdr. Iskandar. Kemudian, pada bulan Desember 2018, Sdri. Mariatul Aini diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris menggantikan Sdr. Langgeng Subur (Alm.).

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

ability to understand company management problems relating to one of the management functions, having adequate knowledge in the Company's business fields, and being able to provide sufficient time to carry out their duties.

3. The composition of the Board of Commissioners must be determined in such a way as to enable decision making to be carried out effectively, precisely and quickly, and can act independently.
4. The term of office of members of the Board of Commissioners is determined to be 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office.
5. Those who can be appointed as members of the Board of Commissioners are individuals who are capable of carrying out legal actions, except within 5 (five) years before their appointment:
 - a. declared bankrupt by the Court;
 - b. become a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners found guilty of causing a Company to be declared bankrupt; or
 - c. convicted of committing a criminal offense which is detrimental to the State's finance and/or related to the financial sector.

This requirement must be proven by a statement signed by the prospective member of the Board of Commissioners and the letter is kept by the Company.

Amount, Composition and Appointment of the Board of Commissioners

In 2018, there were two changes to the composition of the members of the Board of Commissioners. In June 2018, there was a change in the composition of the Board of Commissioners with the appointment of the Late Mr. Langgeng Subur as member of the Board of Commissioners replacing Mr. Iskandar. Then, in December 2018, Ms. Mariatul Aini was appointed as member of the Board of Commissioners replacing the Late Mr. Langgeng Subur.

As such, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2018 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	Nomor KMK Number of KMK	Diangkat Appointed in
Ayu Sukorini	Komisaris Utama President Commissioner	Jakarta	KMK Nomor 402/KMK.06/2017	2017
M. Rahman Ritza	Komisaris Commissioner	Jakarta	KMK Nomor 402/KMK.06/2017	2017
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	Jakarta	KMK Nomor 861/KMK.06/2018	2018



Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Pembagian tugas Dewan Komisaris PT PII sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-11/KOM/PII/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebagai berikut:

Division of Duties of the Board of Commissioners

The division of duties of PT PII Board of Commissioners is in accordance with the Board of Commissioners Decree Number KEP-11/KOM/PII/12/2018 dated 28 December 2018 as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Uraian Tugas Job Description
Ayu Sukorini	Komisaris Utama President Commissioner	1. Mengkoordinasikan seluruh tugas Dewan Komisaris. 2. Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi. 1. Coordinating all duties of the Board of Commissioners. 2. Carry out duties related to remuneration and nomination policies.
M. Rahman Ritza	Komisaris Commissioner	1. Sebagai Ketua Komite Audit; 2. Bidang yang menjadi tugas dan kewenangan Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek; 3. Bidang Audit Internal, Legal and Compliance, Corporate Secretary and Communion, dan IIGF Institute; dan 4. Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi. 1. As Chair of the Audit Committee; 2. Matters which are the duties and authorities of the Executive Director of Finance and Project Assessment; 3. Internal Audit, Legal and Compliance, Corporate Secretary and Communion, and IIGF Institute; and 4. Carry out duties related to remuneration and nomination policies.
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	1. Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko; 2. Bidang yang menjadi tugas dan kewenangan Direktur Eksekutif Bisnis; 3. Bidang Risk Management dan Inisiasi bisnis; dan 4. Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi. 1. As Chair of the Risk Monitoring Committee; 2. Matters that are the duties and authorities of the Business Executive Director; 3. Risk Management and business initiation; and 4. Carry out duties related to remuneration and nomination policies.

Program Pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Program Pengenalan diadakan bagi anggota Dewan Komisaris baru, yaitu agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris dengan sebaik-baiknya.

Program Pengenalan bagi Dewan Komisaris meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan.
2. Gambaran mengenai PT PII, berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
3. Pemahaman tentang kewenangan yang didelegasikan, Audit Internal dan Eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
4. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Introduction Program for New Board of Commissioners

The Introduction Program is held for new members of the Board of Commissioners, so that the parties concerned can carry out their duties and responsibilities optimally as members of BOCs

The Introduction Program for the Board of Commissioners includes:

1. Implementation of GCG principles by the Company.
2. An overview of PT PII, relating to the objectives, nature and scope of activities, financial performance and operations, strategies, short-term and long-term plans, competitive positions, risks and other strategic issues.
3. Understanding of delegated authority, Internal and External Audit, systems and internal control policies, including the Audit Committee.
4. Understanding of duties and responsibilities as members of the Board of Commissioners, and Directors as well as matters that are not allowed.



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Pada tanggal 2 Juli 2018, Sekretaris Perusahaan telah mengadakan program pengenalan Perseroan kepada Langgeng Subur (Alm.), yang diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.

Pada tanggal 4 Januari 2019, Sekretaris Perseroan telah mengadakan Program Pengenalan Perseroan kepada Mariatul Aini, yang diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris pada bulan Desember 2018.

Rencana Kerja dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2018

Program Kerja Dewan Komisaris dapat dijabarkan sebagai berikut:

On July 2, 2018, the Corporate Secretary held a Company introduction program to Mr. Langgeng Subur (the late), who was appointed as a member of the Board of Commissioners.

On January 4, 2019, the Corporate Secretary held a Company Introduction Program to Mariatul Aini, who was appointed as a member of the Board of Commissioners in December 2018.

Board of Commissioners' Work Plan and Implementation in 2018

The Board of Commissioners' Work Program can be described as follows:

No	Kegiatan Activities	Waktu Pelaksanaan Period	Output
1	Penyusunan dan penetapan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2019	September s.d. Oktober 2018	RKA Dewan Komisaris Tahun 2019
	Preparation and determination of the proposed Board of Commissioners' Work Plan and Budget (RKA) in 2019	September - October 2018	Board of Commissioners' RKA 2019
2	Penyusunan dan penetapan usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2019	Oktober s.d. November 2018	Usulan IKU Dewan Komisaris Tahun 2019 kepada RUPS
	Preparation and determination of the proposed Board of Commissioners Performance Contract (IKU) in 2019	October - November 2018	Propose the 2019 Board of Commissioners IKU to the GMS
3	Penelaahan dan persetujuan atas usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) PT PII Tahun 2019	September s.d. Oktober 2018	Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan RKAP Tahun 2019
	Review and approval of the proposed PT PII Corporate Work Plan and Budget (RKAP) in 2019	September - October 2018	The Board of Commissioners' response to the 2019 RKAP proposal



No	Kegiatan Activities	Waktu Pelaksanaan Period	Output
4	Pemberian tanggapan/persetujuan Dewan Komisaris kepada Direksi/RUPS	Tahun 2018	1. Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi Perseroan. 2. Persetujuan Dewan Komisaris atas Permohonan Penetapan Pedoman-Pedoman Perseroan. 3. Persetujuan Dewan Komisaris atas Permohonan Penetapan Pedoman whistle Blowing System (WBS). 4. Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan perubahan RKAP Tahun 2018. 5. Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan pembentukan Wadah Asosiasi Persatuan Isteri Karyawan Perseroan. 6. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017. 7. Persetujuan Dewan Komisaris atas usulan penetapan IKU individual Direksi Tahun 2018. 8. Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Penjaminan Proyek KPBU Satelit Multifungsi. 9. Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan rancangan RKAP Tahun 2019. 10. Penetapan IKU Direktur Utama Perseroan Tahun 2018. 11. Penetapan IKU Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek Perseroan Tahun 2018. 12. Penetapan IKU Direktur Eksekutif Bisnis Perseroan Tahun 2018. 13. Persetujuan Dewan Komisaris atas usulan penjaminan proyek KPBU jalan tol Semarang-Demak. 14. Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan perubahan Logo Perseroan.
	Giving response/approval from the Board of Commissioners to BOD/GMS	Year 2018	1. Approval of the Board of Commissioners for Proposed Changes in the Company's Organizational Structure. 2. Approval of the Board of Commissioners on the Application for Determination of Company Guidelines. 3. Approval of the Board of Commissioners on the Application for the Establishment of a Whistle Blowing System (WBS) Guidelines. 4. The response of the Board of Commissioners to the proposed changes in the RKAP in 2018. 5. The response of the Board of Commissioners to the proposed establishment of the Association of Employees' Unity Association. 6. The response of the Board of Commissioners to the Company's Annual Report 2017. 7. Approval of the Board of Commissioners on the proposed determination of individual KPIs for Directors in 2018. 8. The response of the Board of Commissioners to the Proposed Guarantee of Multifunctional Satellite PPP Projects. 9. The response of the Board of Commissioners to the proposed draft RKAP in 2019. 10. Determination of the Company's Main Director IKU in 2018. 11. Determination of IKU Financial Director and Corporate Project Assessment in 2018. 12. IKU Determination of the Company's Business Executive Director in 2018. 13. Approval of the Board of Commissioners on the proposed PPP project for the Semarang-Demak toll road. 14. The response of the Board of Commissioners to the proposed changes to the Company's Logo.
5	Pelaksanaan rapat rutin bulanan Dewan Komisaris	Tahun 2018	Administrasi kelengkapan Rapat Dewan Komisaris
	Implementation of BOC monthly meeting	Year 2018	Administration of the Completeness of BOC Meeting.



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

No	Kegiatan Activities	Waktu Pelaksanaan Period	Output
6	Pemberian arahan/nasihat kepada Direksi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris Providing direction/advice to the Board of Directors as the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners		1. Pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Per-UU-an dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga. 2. Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal. 3. Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan SDM dan pelaksanaannya. 4. Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. 5. Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan TI dan pelaksanaannya. 6. Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya. 7. Pengawasan atas efektivitas audit eksternal dan internal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan terkait Perseroan. 8. Pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta pelaksanaannya. 9. Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya. 10. Pengawasan atas gejala penurunan kinerja. 11. Pengawasan atas kegiatan IIGF Institute. 12. Pemantauan pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris. 13. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR). 1. Supervision of the Board of Directors' compliance with the Laws and Agreement with Third Parties. 2. Supervision/advice on policies and implementation of internal control systems. 3. Supervision/provision of advice on HR policies and their implementation. 4. Supervision/provision of advice on procurement and implementation policies. 5. Supervision/provision of advice on IT policies and their implementation. 6. Supervision/provision of advice on quality policies and services and implementation. 7. Supervision of the effectiveness of external audits and internal as well as review of complaints related to the Company. 8. Supervision of accounting policies and preparation of financial statements and their implementation. 9. Supervision/provision of advice on risk management policies and their implementation. 10. Supervision of symptoms of performance degradation. 11. Supervision of IIGF Institute activities. 12. Monitoring complaints relating to SOEs received by the Board of Commissioners. 13. Supervision of the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) activities.
7	Evaluasi atas pelaksanaan RKAP Evaluation of the implementation of the RKAP	Tahun 2018 (Semesteran) Year 2018 (Semesterly)	Laporan Pengawasan atas Pelaksanaan RKAP Tahun 2018 Report of the Supervision on Implementation of the 2018 RKAP
8.	Penelaahan dan pengusulan remunerasi Direksi Reviewing and proposing remuneration for BOD	Mei 2018 May 2018	Usulan atas perhitungan tantiem tahun 2017 dan penyesuaian remunerasi tahun 2018 Proposal for calculation of bonus for 2017 and adjustment of remuneration in 2018
9	Monitoring atas proyek yang telah dijamin (<i>site visit</i>) Monitoring of guaranteed projects (<i>site visit</i>)	Tahun 2018 Year 2018	1. <i>Monitoring</i> lapangan proyek jalan tol Pandaan-Malang. 2. <i>Monitoring</i> dan penandatanganan perjanjian penjaminan proyek SPAM Semarang Barat. 1. Field Monitoring of the Pandaan-Malang toll road project. 2. Monitoring and signing of the West Semarang SPAM project guarantee agreement.



No	Kegiatan Activities	Waktu Pelaksanaan Period	Output
10	Penyampaian laporan-laporan Dewan Komisaris kepada RUPS. Submission of reports from the Board of Commissioners to the GMS.	Tahun 2018 (Triwulanan dan Semesteran) Year 2018	1. Laporan Pengawasan atas Pelaksanaan RKAP Tahun 2018. 2. Laporan Realisasi Capaian IKU Dewan Komisaris Tahun 2018. 3. Laporan Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2018. 1. Report of the Supervision on the Implementation of the 2018 RKAP. 2. Report of the Realization of KPI Achievements of the Board of Commissioners in 2018. 3. Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in 2018.
11	Pemantauan atas penerapan <i>area of improvement</i> (AOI) hasil penilaian GCG tahun 2017 Monitoring of the implementation of area of improvement (AOI) results from 2017 GCG assessment	Tahun 2018 Year 2018	Hasil pemantauan atas penerapan AOI GCG Results of monitoring of the implementation of AOI GCG
12	Penilaian atas pelaksanaan penerapan GCG Tahun 2018 oleh Penilaian Independen Assessment of the implementation of GCG in 2018 by Independent Appraisers	Desember 2018 s.d. Januari 2019 December 2018 - January 2019	Hasil penilaian BPKP atas penerapan GCG pada Perseroan Tahun 2018 Assessment results from the BPKP on the implementation of GCG in the Company in 2018
13	Pengadaan KAP Untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2018 Procurement of KAP to Audit of the Company's Financial Statements in 2018	Juli s.d. September 2018 July - September 2018	Usulan penetapan KAP untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2018 kepada RUPS. Proposal for the determination of KAP to audit the Company's Financial Statements in 2018 to the GMS.
14	Peningkatan kompetensi Anggota Dewan Komisaris Competence Enhancement of members of the Board of Commissioners	Tahun 2018 Year 2018	Pelatihan dan Seminar yang diikuti oleh Dewan Komisaris baik di dalam maupun luar negeri Training and Seminars attended by the Board of Commissioners both at home and abroad

Tanggapan dan Arahan Dewan Komisaris 2018

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan, evaluasi dan memberikan masukan dalam penerapan GCG dan selalu menjaga integritas dalam pengelolaan Perseroan. Di samping pengawasan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAP 2018, beberapa kegiatan yang menjadi fokus pengawasan Dewan Komisaris, mencakup antara lain penerapan manajemen risiko serta peningkatan kualitas pelaksanaan GCG.

Dalam Pelaksanaan GCG, Dewan Komisaris berpandangan bahwa peningkatan kualitas penerapan GCG merupakan wujud komitmen Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan

Responses and Direction from Board of Commissioners in 2018

The Board of Commissioners always supervises, evaluates and provides input regarding the implementation of GCG and always maintains integrity in the management of the Company. In addition to overseeing the implementation and accountability of the 2018 Company's work plan and budget, several activities has come into focus of supervision by the Board of Commissioners, including the implementation of risk management and improvement of the quality of GCG implementation.

In the implementation of GCG, the Board of Commissioners is assured that improving the quality of GCG implementation is a manifestation of the Company's commitment to increase the Company's



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

akuntabilitasnya. Pada tahun 2018, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku penilai independen telah melakukan penilaian atas implementasi GCG pada Perseroan. *Score* GCG yang dapat dicapai adalah sebesar 86,7 atau kategori Sangat Baik. *Score* ini lebih tinggi dibandingkan dengan *score* yang diperoleh pada tahun 2017, yaitu sebesar 80,6. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari seluruh insan Perseroan untuk terus memperbaiki diri dalam menerapkan GCG dalam setiap lini kegiatan Perseroan.

Untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG setiap tahunnya, Dewan Komisaris telah memberikan arahan untuk mencermati dan memperhatikan beberapa area yang direkomendasikan untuk dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga diharapkan implementasi GCG dapat semakin membaik setiap tahunnya. Penerapan GCG yang semakin baik ini, juga diharapkan dapat makin meningkatkan kinerja dan kiprah PT PII di dalam pembangunan infrastruktur.

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas implementasi GCG, pada tahun 2018 Perseroan juga telah menyusun, menyosialisasikan serta mengimplementasikan Pedoman *Whistle Blowing System* (WBS). Sesuai dengan Pedoman tersebut Perseroan juga telah menyiapkan saluran pengaduan yang langsung dan menjamin kerahasiaan pelapor.

Perseroan juga telah mendedikasikan Tim Kerja yang khusus untuk mengelola pengaduan yang diterima. Dewan Komisaris secara aktif terlibat dalam penyiapan infrastruktur WBS tersebut baik secara langsung maupun melalui Komite Audit. Sesuai Pedoman, Dewan Komisaris juga akan terlibat aktif untuk menangani pengaduan bila informasi pelanggaran yang disampaikan menyangkut anggota Direksi atau Komite dan Anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan akhir tahun 2018 Perseroan belum menerima pengaduan sehingga belum ada informasi dari WBS yang bisa ditindaklanjuti.

business success and accountability. In 2018, the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) as an independent appraiser has conducted an assessment of the GCG implementation in the Company. The achieved score is 86.7 or in the Very Good category. This score is higher than the one obtained in 2017, which was 80.6. This shows the high commitment from the Company to continuously improving the implementation of GCG in each line of the Company's activities.

To continue improving the quality of GCG implementation every year, the Board of Commissioners has provided direction to observe and pay attention to several recommended areas for improvements, so that GCG implementation can be expected to improve every year. The better implementation of GCG is also expected to be able to further enhance PT PII performance and progress in infrastructure development.

In line with efforts to improve the quality of GCG implementation, in 2018 the Company has also prepared, socialized and implemented the Guidelines for the Whistle Blowing System (WBS). In accordance with these Guidelines the Company has also prepared a direct complaints channel and guarantee the confidentiality of the reporter.

The Company has also established a dedicated Team specifically for managing complaints received. The Board of Commissioners is actively involved in preparing the WBS infrastructure both directly and through the Audit Committee. In accordance with the Guidelines, the Board of Commissioners will also be actively involved in handling complaints if information on violations submitted concerns members of the Board of Directors or Committees and Members of the Board of Commissioners.

As of the end of 2018, the Company has not received complaints so that there is no information from the WBS that can be followed up.



Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Organ Dewan Komisaris yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Pada tahun 2018 Perseroan mempunyai 2(dua) Komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris menilai kinerja kedua Komite tersebut sangat baik. Seluruh anggota Komite selalu terlibat aktif untuk membantu dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dari hasil reviu/telaahan sesuai bidang tugasnya. Komite secara aktif menjalin komunikasi dengan organ Direksi untuk melakukan pembahasan level teknis terkait seluruh aspek kegiatan Perseroan.

Pada setiap rapat rutin bulanan, Komite selalu aktif memberikan masukan bahan kepada Dewan Komisaris berupa bahan-bahan yang perlu dibahas atau diberikan arahan kepada Direksi. Demikian pula dalam setiap rapat yang diagendakan secara khusus dan permohonan persetujuan tertulis dari Direksi kepada Dewan Komisaris, Komite-komite aktif memberikan hasil telaahan dan masukan kepada Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris dapat memutuskan dengan tepat atas permohonan yang diajukan oleh Direksi.

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT PII tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham. Pada dasarnya semua Anggota Dewan Komisaris PT PII bersifat independen, dalam pengertian mereka mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan Perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

Performance Evaluation Committee Under the Board of Commissioners

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Organ of the Board of Commissioners consisting of the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee.

In 2018 the Company has 2 (two) Committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee. The Board of Commissioners considers that both Committees displayed a commendable performance. All Committee members are always actively involved in assisting in the implementation of supervision and evaluation, as well as providing input to the Board of Commissioners based on the results of review, according to their respective field of work. The Committee actively establishes communication with the organs of the Board of Directors to discuss technical levels related to all aspects of the Company's activities.

During each monthly meeting, the Committee always actively provides input to the Board of Commissioners in the form of materials that need to be discussed or provide the Board of Directors with direction. Likewise, in each meeting specifically scheduled and based on written approval request from the Board of Directors to the Board of Commissioners, the Committees actively provide results of the review and provide input to the Board of Commissioners to help the Board decide appropriately on the application submitted by the Board of Directors.

Independence of the Board of Commissioners

All members of the Board of Commissioners of PT PII do not have family relations and financial relationships with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Shareholders. Basically all PT PII Board of Commissioners members are independent, in the sense that they are able to carry out their duties independently, solely in the interests of the Company, and apart from the influence of various parties who have interests that can conflict with the interests of the Company.



Komisaris Independen

Independent Commissioner

KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Perseroan.

Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip GCG di lingkungan perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Selama tahun 2018, Pemegang Saham PT PII belum mensyaratkan adanya Komisaris Independen.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Dikarenakan belum terdapat Komisaris Independen, maka PT PII belum dapat menampilkan Pernyataan Independensi Komisaris Independen.

CRITERIA FOR INDEPENDENT COMMISSIONERS

The Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who is not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and Controlling Shareholders, and is free from business relationships or other relationships that can affect his ability to act independently or act solely in the interest of the Company.

The Independent Commissioner has the main responsibility to encourage the implementation of GCG principles in the corporate environment through the empowerment of the Board of Commissioners to be able to carry out supervisory duties and provide advice to the Board of Directors effectively and provide added value to the Company. During 2018, the Shareholders did not require PT PII to have Independent Commissioner.

INDEPENDENCE STATEMENT OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

Because there is no Independent Commissioner yet, PT PII has not been able to display the Independent Commissioner's Independence Statement.



Direksi

Board of Directors

Direksi berfungsi sebagai Organ Perseroan yang melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh secara kolegal dalam mengelola kepengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, yakni memaksimalkan nilai perusahaan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham. Proses pemilihan dan pengangkatan Direksi didahului dengan proses *fit and proper test*.

Pedoman Kerja Direksi (*Board Manual*)

Direksi telah memiliki Pedoman Kerja yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Nomor SK001/BOD/CSR/0316 dan Nomor Kep-01/KOM/P11/03/2016 antara Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pengesahan Tata Laksana Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Board Manual adalah panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien. *Board Manual* disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar, dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Tujuan penyusunan dan pelaksanaan *Board Manual* adalah:

1. Terciptanya satu pola hubungan kerja yang harmonis antar Organ Persero dalam mengelola Perusahaan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
2. Memudahkan organ-organ Direksi dan organ-organ Dewan Komisaris untuk memahami tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris maupun hubungan tugas antara organ-organ

The Board of Directors functions as an Organ of the Company that manages the Company for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and to represent the Company, both inside and outside the court, as stipulated in the Articles of Association. The Directors are in charge and responsible in a collegial manner in managing the management for the interests of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company, namely maximizing the value of the company by using all of its resources optimally. Directors are appointed and dismissed by the Shareholders. The process of selecting and appointing Directors is preceded by a fit and proper test process.

Board of Directors Work Guidelines (*Board Manual*)

The Board of Directors has in place a Work Charter that has been determined by the Joint Decree of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Number SK001/BOD/CSR/0316 Number and Kep-01/KOM/P11/03/2016 between the Board of Directors and the Board of Commissioners concerning Ratification of Work Procedures for the Board of Commissioners and Directors (*Board Manual*).

The Board Manual is a guide for the Board of Directors and the Board of Commissioners in carrying out their duties in order to create professional, transparent and efficient management. The Board Manual is prepared based on the principles of corporate law, applicable legislation, provisions of the Articles of Association, and the principles of Good Corporate Governance, namely transparency, accountability, responsibility, independency and fairness. The objectives of the preparation and implementation of the Manual Board are:

1. The creation of a harmonious working relationship between the Company's Organs in professionally managing the Company in accordance with the principles of Good Corporate Governance;
2. Facilitate the organs of the Board of Directors and the organs of the Board of Commissioners to understand the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners



Direksi

Board of Directors

tersebut. Aspek Direksi yang diatur dalam *Board Manual* tersebut adalah:

BAB III DIREKSI

- 3.1. Organisasi
- 3.2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
- 3.3. Pembagian Kerja dan Organ Pendukung Direksi
- 3.4. Rapat Direksi
- 3.5. Pengambilan Keputusan Direksi
- 3.6. Penilaian Kinerja Direksi
- 3.7. Organ Pendukung Direksi
- 3.8. Pengelolaan Risiko
- 3.9. Sistem Pengendalian Internal
- 3.10. Pelaporan
- 3.11. Penilaian, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan *Board Manual* merupakan salah satu bentuk komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, dengan harapan akan tercipta suatu pola hubungan kerja yang harmonis dalam upaya mencapai Visi dan Misi PT PII.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau pembatasan-pembatasan atau arahan-arahan lebih lanjut yang disepakati oleh Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta memastikan agar Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

as well as the relations between these organs. The Board of Directors aspects regulated in the Board Manual are:

CHAPTER III BOARD OF DIRECTORS

- 3.1. Organization
- 3.2. Duties, Authorities and Obligations of the Directors
- 3.3. Division of Work and Supporting Organs of the Directors
- 3.4. Board of Directors Meeting
- 3.5. Decision Making of Directors
- 3.6. Directors Performance Assessment
- 3.7. Organ Supporting Directors
- 3.8. Risk Management
- 3.9. Internal Control System
- 3.10. Reporting
- 3.11. Assessment, Evaluation, and Reporting of Corporate Governance Implementation

The Board Manual is a form of commitment from the Board of Commissioners and the Board of Directors in order to implement GCG principles, with the hope that a harmonious working relationship pattern will be created in an effort to achieve PT PII's Vision and Mission.

Duties, Authorities and Obligations of the Directors

1. The Board of Directors is tasked with carrying out all actions relating to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company as well as representing the Company both inside and outside the Court regarding all matters and events with restrictions as stipulated in laws and regulations. Articles of Association and/or restrictions or further directives agreed upon by the Shareholders based on the Decision of the General Meeting of Shareholders.
2. The Board of Directors must carry out its duties in good faith for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company, as well as ensure that the Company carries out its social responsibilities and pays attention to the interests of various Stakeholders in accordance with the provisions of the law.



3. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat intern maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan Perusahaan yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. The Board of Directors must submit information regarding identity, main works, positions as the Board of Commissioners in subsidiaries/joint ventures and/or other companies, including meetings conducted in one financial year (internal meetings or joint meetings with the Board of Commissioners), as well as salaries, facilities, and/or other benefits received from the Company concerned and its subsidiaries/joint venture companies, to be included in the Company's Annual Report.

Authority of the Board of Directors

In carrying out this task, the Board of Directors is authorized to:

1. Establish Company management policies;
2. Arrange the delegation of the Board of Directors' power to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Company inside and outside the court;
3. Arrange the delegation of the Board of Directors' power to one or several employees, either individually or jointly, or to others, to represent the Company inside and outside the court;
4. Prepare provisions on Company employment including stipulation of salaries, pensions or old age benefits and other income for Company employees, based on applicable laws and regulations, with provisions for stipulating salaries, pensions or old age benefits and other income for workers who exceed obligations stipulated by legislation, prior approval must be obtained from the General Meeting of Shareholders;
5. To appoint and dismiss Company employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations;
6. To appoint and dismiss the Corporate Secretary;
7. Conduct all actions and other actions regarding the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company inside and outside the court regarding all matters and events, with restrictions as regulated in legislation, Articles of Association and/or Decisions of the General Meeting of Shareholders.



Direksi

Board of Directors

Kewajiban Direksi

Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi wajib mengungkapkan:

1. Kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri beserta perubahannya; dan/atau
2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana diatur dalam peraturan terkait.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung jawab Masing-masing Direksi

Pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Obligations of the Directors

The Directors are obliged to:

1. Manage and ensure the implementation of the the Company's business and activities in accordance with the business goals, objectives and activities.
2. Prepare the Company's Long Term Plan, Corporate Work Plan and Budget, as well as its changes and submit it to the Board of Commissioners and Shareholders to obtain ratification of the General Meeting of Shareholders.

Directors must disclose:

1. Their and/or their families ownership of shares in the Company and other companies, both domestic and abroad including the changes; and/or
2. Financial relationships and/or family relations with other members of the Board of Directors in the Good Corporate Governance Report as stipulated in related regulations.

Scope of Work and Responsibilities of Each Director

The division of duties and responsibilities of the Directors is as follows:

Jabatan Position	Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung jawab Scope of Work and Responsibility
Direktur Utama	Fokus Utama adalah pencapaian tujuan Organisasi: 1. Memastikan kelangsungan bisnis (proyek-proyek PDF) dalam jangka waktu panjang dan memastikan dukungan dalam hal transaksional yang optimal 2. Mengembangkan program <i>Capacity Building</i> untuk pihak eksternal dalam mendukung terciptanya proyek-proyek penjaminan 3. Menjamin terciptanya kepatuhan Hukum atas proyek-proyek yang dijaminakan Perusahaan Fokus kerja lainnya: 1. Memimpin terciptanya sinergi internal dan eksternal 2. Memimpin pencapaian Visi dan Misi Organisasi 3. Menciptakan tujuan-tujuan strategis
President Director	The main focus is achieving the objectives of the Organization: 1. Ensuring business continuity (PDF projects) over a long period of time and ensuring optimal transactional support 2. Develop a Capacity Building program for external parties to support the creation of guarantee projects 3. Ensure compliance with the Law on projects guaranteed by the Company Other work focus: 1. Lead the creation of internal and external synergies 2. Leading the achievement of the Organization's Vision and Mission 3. Creating strategic goals

Jabatan Position	Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung jawab Scope of Work and Responsibility
Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek Executive Director of Finance and Project Assessment	Fokus Utama adalah optimalisasi penilaian proyek, manajemen klaim dan tata kelola keuangan Fokus kerja lainnya: 1. Mengembangkan sistem dan metodologi dalam hal penilaian dan pengawasan proyek 2. Memimpin pencapaian target-target, kepatuhan dan pencatatan Keuangan yang disiplin 3. Menciptakan unit kerja pendukung yang optimal dalam mendorong pencapaian target-target organisasi 4. Memastikan terciptanya budaya kerja dan kualitas SDM yang positif dan kompetitif The main focus is optimization of project appraisal, claim management and financial management Other work focus: 1. Develop systems and methodologies in terms of project evaluation and supervision 2. Leading the achievement of targets, compliance and discipline financial records 3. Creating a support work unit that is optimal in driving the achievement of targets of the organization 4. Ensure the creation of a work culture as well as positive and competitive HR quality
Direktur Eksekutif Bisnis Executive Director of Business	Fokus Utama adalah penyusunan <i>pipeline</i> yang <i>sustainable</i> Fokus kerja lainnya: 1. Mengembangkan dan memimpin perencanaan dan implementasi program kerja pada tahapan awal persiapan dan skema penjaminan proyek 2. Mengembangkan dan memimpin kerja sama sama <i>financial</i> dengan <i>stakeholder</i> 3. Memimpin proses integrasi organisasi terkait teknologi informasi dan <i>Knowledge Management</i> The main focus is the preparation of a sustainable pipeline Other work focus: 1. Develop and lead the planning and implementation of work programs at the initial stages of preparation and project guarantee schemes 2. Develop and lead collaboration with financial stakeholders 3. Lead the process of organizational integration related to information technology and Knowledge Management

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Per 31 Desember 2018, jumlah anggota Direksi PT PII adalah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur utama dan 2 (dua) Direktur. Seluruh anggota Direksi PT PII telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan. Seluruh anggota Direksi PT PII berdomisili di Indonesia. Masa jabatan anggota Direksi dalam 1 periode adalah 5 (lima) tahun.

Pada tahun 2018, tidak ada perubahan komposisi Direksi sehingga komposisi Direksi PT PII per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Amount and Composition of Directors

As of December 31, 2018, PT PII Board of Directors consists 3 (three) Director, namely 1 (one) President Director and 2 (two) Directors. All of the Directors of PT PII have passed the Fit and Proper Test and have obtained approval from the Ministry of Finance. All members of PT PII Board of Directors are domiciled in Indonesia. The term of office of members of the Board of Directors in 1 period is 5 (five) years.

In 2018, there was no change in the composition of the Board of Directors so that the composition of PT PII Directors as of December 31, 2018 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Nomor SK Decree Number
Armand Hermawan	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885/kmk.06/2017 Minister of Finance Decree Number 885/kmk.06/2017
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Director	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885/kmk.06/2017 Minister of Finance Decree Number 885/kmk.06/2017
Salusra Satria	Direktur Director	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885/kmk.06/2017 Minister of Finance Decree Number 885/kmk.06/2017



Direksi

Board of Directors

Program Pengenalan bagi Anggota Direksi Baru

Program pengenalan diadakan bagi anggota Direksi baru, agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya. Kepada anggota Direksi yang baru diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan yang meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.

Untuk tahun 2018, tidak ada perubahan komposisi Direksi sehingga tidak ada pelaksanaan program pengenalan Persero pada anggota Direksi baru.

Independensi Direksi

Direksi menjalankan tugasnya secara independen dan tidak terdapat campur tangan pihak-pihak lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan keluarga langsung, maupun hubungan keluarga karena pernikahan.

Introduction Program for New Appointed Directors

The introductory program is held for new members of the Board of Directors, so that the new appointed Directors can carry out their duties and responsibilities as Board of Directors as well as possible. Members of the Board of Directors who have just been appointed for the first time must be given an introduction program which includes:

1. Implementation of GCG principles by the Company;
2. An overview of the Company relating to the purpose, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short and long-term work plans, competitive positions, risks and other strategic issues;
3. Information relating to delegated authority, internal and external audits, systems and internal control policies, including the Audit Committee;
4. Information about the duties and responsibilities of members of the Board of Directors and other matters that are not allowed.

For 2018, there is no change in the composition of the Board of Directors so that there is no implementation introduction program conducted for new members of the Board of Directors.

Independence of the Directors

The Board of Directors carries out its duties independently without interference from other parties that are contrary to the laws and regulations. Between members of the Board of Directors and between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners there is no family relationship, either direct family relations, or family relationships due to marriage.

Penilaian terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan setiap tahun oleh RUPS berdasarkan kontrak kinerja yang ditetapkan bersamaan dengan penetapan RKAP Perseroan. Kontrak kinerja Dewan Komisaris secara garis besar merupakan penjabaran target-target yang memberikan kontribusi dan dukungan dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Perseroan dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Perseroan, serta melakukan *monitoring* untuk tercipta dan berkembangnya *Good Corporate Governance* di PT PII dengan terlebih dahulu:

1. Dewan Komisaris wajib mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) kepada RUPS untuk ditetapkan
2. Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasehat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
3. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada Pemegang Saham.
4. Realisasi Indikator Pencapaian Kinerja tahunan Dewan Komisaris di audit oleh Kantor Akuntan Publik dan hasilnya dilaporkan kepada Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan Pengesahan Laporan Tahunan.

Indikator Penilaian

Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris sebagaimana termuat dalam Kontrak Kerja Dewan Komisaris tahun 2018, terdiri dari:

Perspektif Pengawasan

Supervision Perspective

Sasaran Strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Bobot Perspektif Perspective Weight	Target Target	Satuan Unit
SI Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Implementation of Good Corporate Governance (GCG)	1 Hasil penilaian atas penerapan GCG PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) The results of assessment on the implementation of GCG in PT PII	24,0%	>82%	GCG score

ASSESSMENT ON THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE

The assessment on the performance of the Board of Commissioners is carried out annually by the GMS based on a performance contract that is set together with the determination of the Company's work plan and budget. In general, the performance contract of the Board of Commissioners is the elaboration of targets that contribute and support the implementation of the Company's Vision and Mission in the work program of the current year, by adhering to the Company's values, as well as monitoring and creating and developing Good Corporate Governance at PT PII, by first:

1. The Board of Commissioners must propose a Performance Achievement Indicators (*Key Performance Indicators*) to the GMS to be determined
2. Performance Achievement Indicators are the parameter for a successful implementation of duties and responsibilities of providing supervision and advisory services in accordance with the provisions of legislation and/or articles of association.
3. The Board of Commissioners must submit quarterly reports on the progress of realization of the Performance Achievement Indicators to Shareholders.
4. The realization of the Board of Commissioners' Annual Performance Achievement Indicators is audited by the Public Accountant Office and the results are reported to the Shareholders at the Annual GMS of the Annual Report.

Assessment Indicator

The Board of Commissioners Key Performance Indicator (KPI) as contained in the 2018 Board of Commissioners' Work Contract, consists of:



Penilaian terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors

Perspektif Pengawasan

Supervision Perspective

Sasaran Strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Bobot Perspektif Perspective Weight	Target Target	Satuan Unit
S2 Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris yang efektif Effective supervision and implementation of the duties of the Board of Commissioners	1 Persentase arahan Dewan Komisaris yang ditindaklanjuti oleh Direksi Percentage of directives from the Board of Commissioners followed up by the Board of Directors	18,0%	90%	Persentase Percentage
	2 Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal Percentage of completion of recommendations from audit results by internal auditors and external auditors	7,2%	95%	Persentase Percentage
	3 Persentase pemberian tanggapan (<i>response</i>) atas permohonan persetujuan/rekomendasi dari Direksi yang tepat waktu Percentage of giving on time responses to BOD requests for approval/recommendations	10,8%	95%	Persentase Percentage
Total Bobot Perspektif Total Perspective Weight		60,0%		

Perspektif Pelaporan

Reporting Perspective

Sasaran Strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Bobot Perspektif Perspective Weight	Target Target	Satuan Unit
R1 Laporan Dekom kepada RUPS yang Berkualitas Quality Report from BOC to the GMS	1 Persentase penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang tepat waktu Percentage of timely submission of reports on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners	12,0%	100%	Persentase Percentage
	2 Persentase penyampaian laporan pengawasan atas pelaksanaan RKAP yang tepat waktu Percentage of timely delivery of supervision reports on the implementation of the RKAP	12,0%	100%	Persentase Percentage
	3 Persentase penyampaian laporan capaian IKU Dewan Komisaris yang tepat waktu Percentage of timely delivery of IKU Board of Commissioners' achievement reports	8,0%	100%	Persentase Percentage
	4 Laporan hasil penelaahan atas RJP dan/atau RKAP beserta perubahannya (jika ada) Report on review of RJP and/or RKAP along with changes (if any)	8,0%	95%	Persentase Percentage
Total Bobot Perspektif Total Perspective Weight		40,0%		

Pihak yang melakukan Penilaian

Dewan Komisaris melakukan *self assesment* atas capaian realisasi KPI Dewan Komisaris. Selanjutnya, sesuai ketentuan PMK No.106/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, realisasi capaian KPI Dewan Komisaris akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan dilaporkan hasilnya dalam RUPS Tahunan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 untuk mendapatkan pengesahan dari RUPS. Pada tahun 2018, capaian KPI Dewan Komisaris di audit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (PricewaterhouseCoopers).

Hasil Penilaian

Realisasi KPI Dewan Komisaris PT PII Tahun 2018 sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Assessor

The Board of Commissioners conducts self-assessment of the achievement of the Board of Commissioners' KPI realization. Furthermore, in accordance with the provisions of PMK No.10/PMK.06/2017 concerning the Management of the Performance of Board of Directors and Board of Commissioners in Limited Liability Company (Persero) under the Development and Supervision of the Minister of Finance, the realization of the Board of Commissioners' KPI achievements will be audited by the Public Accounting Firm and results will be reported in Annual GMS Approval of the Company's Annual Report 2018 to obtain ratification from the GMS. In 2018, the Board of Commissioners' KPI achievements were audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, and Partners (PricewaterhouseCoopers).

Score

The Board of Commissioners' KPI Realization in 2018 as described in the table below.

Kategori Performansi Performance Category	Sasaran Strategis Strategic target	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Target Target	Realisasi Realization [A]	Capaian Achievement	Bobot Capaian Achievement Weight [A.1]
A Pengawasan (Bobot 60%) Supervision (Weight 60%)	S1 Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Implementation of Good Corporate Governance (GCG)	1 Hasil penilaian atas penerapan GCG PT PII The results of the assessment on the application of PT PII's GCG	> 82%	87%	105,73%	25.38%
	S2 Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris yang efektif Effective supervision and implementation of the duties of the Board of Commissioners	1 Persentase arahan Dewan Komisaris yang ditindaklanjuti oleh Direksi Percentage of direction from the Board of Commissioners followed up by the Board of Directors	90%	100%	111,11%	20.00%
		2 Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal The percentage of completion of recommendations from the results of audits by both internal auditors and external auditors	95%	96%	101,05%	7.28%
		3 Persentase pemberian tanggapan (respons) atas permohonan persetujuan/rekomendasi dari Direksi yang tepat waktu Percentage of timely responding to requests for approval/recommendations from the Board of Directors	95%	100%	105,26%	11.37%



Penilaian terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors

Kategori Performansi Performance Category	Sasaran Strategis Strategic target	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Target Target	Realisasi Realization [A]	Capaian Achievement	Bobot Capaian Achievement Weight [A.1]
B Pelaporan (Bobot 40%) Reporting (Weight 40%)	R1 Penyampaian Laporan Dewan Komisaris kepada RUPS Tepat Waktu Timely Submission of the Board of Commissioners' Report to the GMS	1 Persentase penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang tepat waktu Percentage of timely submission of reports on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners	100%	105%	105,00%	12.60%
		2 Persentase penyampaian laporan pengawasan atas pelaksanaan RKAP yang tepat waktu Percentage of timely submission of supervision reports on the implementation of RKAP	100%	105%	105,00%	12.60%
		3 Persentase penyampaian laporan capaian IKU Dewan Komisaris yang tepat waktu Percentage of timely delivery of reports of KPI achievement of the Board of Commissioners	100%	100%	100,00%	8.00%
		4 Laporan hasil penelaahan atas RJP dan/atau RKAP beserta perubahannnya (jika ada) Report on review of RJP and/ or RKAP along with changes (if any)	100%	110%	110,00%	8.80%
						106,03%

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG PADA DEWAN KOMISARIS

Penjelasan penerapan yang telah diimplementasikan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

APPLICATION OF GCG PRINCIPLES AT BOC

The application of the GCG Principles to BOC is as follows:

Prinsip-prinsip GCG Principles of GCG	Pelaksanaan pada Dewan Komisaris Implementation on the Board of Commissioners
Transparansi Transparency	- Dewan Komisaris dalam melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan mekanisme rapat. - Dewan Komisaris harus memastikan bahwa dalam Laporan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima. - Dewan Komisaris harus memberikan penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS dalam hal metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan.

Prinsip-prinsip GCG Principles of GCG	Pelaksanaan pada Dewan Komisaris Implementation on the Board of Commissioners
Akuntabilitas Accountability	- Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. - Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJP, RKAP, Laporan Tahunan, dan Laporan Manajemen yang disampaikan oleh Direksi. - Dewan Komisaris memberikan arahan dan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. - Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan.
Pertanggungjawaban Responsibility	- Dewan Komisaris harus mempunyai komitmen untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas jabatannya. - Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham. - Dewan Komisaris turut bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan keuangan yang diajukan Direksi kepada Pemegang Saham. - Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dan pembelajaran secara berkelanjutan.
Kemandirian Independence	- Dewan Komisaris memberikan pertimbangan yang objektif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Perusahaan yang mungkin mengandung potensi terjadinya benturan kepentingan. - Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.
Kewajaran Fairness	Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegiat) dan mengusulkan tawaran/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi The Board of Commissioners plays a role in nominating members of the Board of Directors, evaluating the performance of BOD (individual and collegial) and proposing incentive/performance incentives in accordance with applicable regulations and considering BOD performance

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG PADA DIREKSI

Penerapan Prinsip-prinsip GCG pada Direksi adalah sebagai berikut:

APPLICATION OF GCG PRINCIPLES TO BOD

The application of GCG Principles to BOD is as follows:

Prinsip-prinsip GCG Principles of GCG	Penerapan Prinsip-prinsip GCG pada Direksi Application of GCG Principles to the Directors
Transparansi Transparency	- Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan dan anak perusahaan/perusahaan patungan untuk dimuat dalam Laporan Tahunan. - Direksi wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada perusahaan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya. - Direksi menyediakan bagi <i>stakeholders</i> akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.



Penilaian terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors

Prinsip-prinsip GCG Principles of GCG	Penerapan Prinsip-prinsip GCG pada Direksi Application of GCG Principles to the Directors	
Akuntabilitas Accountability	- Direksi wajib membuat RJP, RKAP, Laporan Tahunan, Dokumen Keuangan Perusahaan dan Laporan Manajemen, serta menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan. - Direksi wajib membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi. - Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi Perusahaan serta menyampaikan laporan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris. - Direksi membangun dan menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif sehingga dapat mengamankan investasi dan aset Perusahaan. - Direksi harus memastikan bahwa SPI, Auditor Eksternal, Komite Audit dan komite lainnya (jika ada), memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang dan informasi mengenai Perusahaan sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. - Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan perusahaan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.	- The Board of Directors is required to make RJP, RKAP, Annual Report on Corporate Financial Documents and Management Reports, and submit it to parties with interests. - Directors must prepare a List of Shareholders, Special Lists, Minutes of GMS, and Minutes of Directors' Meetings. - The Board of Directors must maintain and evaluate the quality of the Company's information technology governance functions and submit periodic information technology governance reports to the Board of Commissioners. - The Board of Directors develops and establishes an effective Internal Control System so that it can secure the investment and assets of the Company. - The Board of Directors must ensure that SPI, External Auditor, Audit Committee and other committees (if any), have access to accounting records, supporting data and information about the Company as long as necessary to carry out their duties. - The Board of Directors is prohibited from taking actions that have a conflict of interest, and taking personal advantage, both directly and indirectly from the decisions and activities of the company concerned other than legitimate income.
Pertanggungjawaban Responsibility	- Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta memastikan agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern dan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif. - Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	- The Board of Directors must carry out its duties in good faith for the interests of the company and in accordance with the aims and objectives of the company, and ensure that the company carries out its social responsibilities and pays attention to the interests of various Stakeholders in accordance with the provisions of legislation. - The Board of Directors discloses important information in the Annual Report and Financial Statements in accordance with the laws and regulations. - The Board of Directors must provide quality and effective internal supervision and functions of the Corporate Secretary. - The Board of Directors holds annual GMS and other GMS in accordance with the laws and regulations.
Kemandirian Independence	Direksi tidak melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan perusahaan selain penghasilan yang sah.	The Board of Directors does not take actions that have a conflict of interest, and take personal advantage, either directly or indirectly, from decision making and company activities, other than legitimate income.

Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.06/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Jumlah gaji dan tunjangan, bonus/tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Determination of remuneration for the Board of Commissioners and Directors refers to the provisions of the Minister of Finance Regulation Number 200/PMK.06/2018 concerning Guidelines for Determining the Income of the Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) under the Development and Supervision of the Minister of Finance.

The total salary and allowances, bonuses/bonuses for the Board of Commissioners and Directors in 2018 are as follows:

(dalam Rupiah) | (in IDR)

Keterangan Description	Nominal
Dewan Komisaris Board of Commissioners	4.357.396.690
Direksi Board of Directors	12.152.991.707
Jumlah Total	16.510.388.397



Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat internal dan rapat koordinasi dengan Direksi yang disebut dengan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris tentang kinerja PT PII secara menyeluruh. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan melalui rapat formal. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018

Board of Commissioners Meeting Agenda for 2018

No	Tanggal Date	Agenda	Tingkat Kehadiran Attendance			
			AS	I	RR	LS
1	10 Januari 2018 (BOC)	1. Pembahasan rencana kerja Dewan Komisaris tahun 2018 2. Pembahasan pembagian tugas Dewan Komisaris tahun 2018 3. Pembahasan <i>pending matters</i> Dewan Komisaris	Hadir	Hadir	Hadir	-
	10 January 2018 (BOC)	1. Discussion of the Board of Commissioners' work plan for 2018 2. Discussion on the division of duties of the Board of Commissioners in 2018 3. Discussion on pending matters of the Board of Commissioners	Present	Present	Present	
2	30 Januari 2018 (BOC-BOD)	1. <i>Update performance</i> 2017 PT PII 2. Pembahasan laporan manajemen PT PII periode Desember 2017 3. Laporan <i>monitoring</i> proyek yang dijamin PT PII 4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut	Hadir	Hadir	Hadir	-
	30 January 2018 (BOC-BOD)	1. Update of the 2017 performance of PT PII 2. Discussion of the PT PII management report for the December 2017 period 3. Report of monitoring on projects guaranteed by PT PII 4. Conclusions and Follow Ups	Present	Present	Present	

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

The Board of Commissioners periodically holds internal meetings and coordination meetings with the Board of Directors, called the Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners, regarding the overall performance of PT PII.

The decision of the Board of Commissioners meeting is taken based on deliberation to reach consensus. In the event that a consensus agreement is not reached, the decision is taken based on the majority of votes.

The Board of Commissioners may also make legitimate and binding decisions without convening a Meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have given their consent to the proposal submitted in writing and signed the agreement. Decisions taken have the same strength as decisions through formal meetings. All decisions taken at the Board of Commissioners meeting are binding. Dissenting opinions that occur in a Board of Commissioners meeting must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for dissent.



Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018

Board of Commissioners Meeting Agenda for 2018

No	Tanggal Date	Agenda	Tingkat Kehadiran Attendance			
			AS	I	RR	LS
3	26 Februari 2018 (BOC)	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> /Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris Sebelumnya. 2. Penyampaian Hasil Rapat Teknis Rencana Revisi RKAP PT PII Tahun 2018. 3. Pembahasan Laporan-laporan Dewan Komisaris. 4. Penyampaian Hasil Kunjungan Lapangan Proyek Tol Pandaan-Malang	Hadir	Hadir	Hadir	-
	26 February 2018 (BOC)	1. Discussion of Pending Matters or Follow-Up from the previous Board of Commissioners Meeting. 2. Submission of Results of the Technical Meeting on the Revised Plan for PT PII's RKAP in 2018. 3. Discussion of the Board of Commissioners' Reports. 4. Submission of Results of Field Visits to the Pandaan-Malang Toll Project	Present	Present	Present	
4	27 Februari 2018 (BOC-BOD)	1. Pembahasan Laporan Manajemen PT PII Periode Januari 2018 2. Pembahasan Rencana Revisi RKAP PT PII Tahun 2018	Hadir	Hadir	Hadir	-
	27 February 2018 (BOC-BOD)	1. Discussion of PT PII Management Report of the January 2018 Period 2. Discussion on the Plan of Revision of PT PII's RKAP in 2018	Present	Present	Present	
5	23 Maret 2018 (BOC)	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> /Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris Sebelumnya 2. <i>Update</i> Proses Penilaian GCG	Hadir	Hadir	Hadir	-
	23 March 2018 (BOC)	1. Discussion of Pending Matters or Follow-Up from Previous Board of Commissioners' Meetings 2. Update the GCG Assessment Process	Present	Present	Present	
6	23 Maret 2018 (BOC-BOD)	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> /Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Manajemen PT PII Periode Februari 2018 3. <i>Update</i> Laporan <i>Monitoring</i> Proyek yang Dijamin PT PII 4. Agenda Lain-Lain	Hadir	Hadir	Hadir	-
	23 March 2018 (BOC-BOD)	1. Discussion of Pending Matters or Follow Up of Previous Meetings 2. Discussion of Management Report from PT PII for the February 2018 Period 3. Update of Report on Monitoring of Projects Guaranteed by PT PII 4. Other Agenda	Present	Present	Present	
7	6-7 April 2018 (BOC)	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> 2. Perhitungan IKU Dekom Triwulan I Tahun 2018 3. Evaluasi Penilaian GCG Tahun 2017	Hadir	Hadir	Hadir	-
	6-7 April 2018 (BOC)	1. Discussion of Pending Matters 2. Calculation of KPI for BOC, First Quarter of 2018 3. Evaluation of 2017 GCG Assessment	Present	Present	Present	
8	26 April 2018 (BOC-BOD)	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> /Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Isu-Isu Strategis Bisnis Perseroan 3. Laporan Manajemen PT PII Periode Maret 2018 4. Pembahasan IKU Individu Direksi	Tidak Hadir	Hadir	Hadir	-
	26 April 2018 (BOC-BOD)	1. Discussion of Pending Matters or Follow Up of Previous Meetings 2. Discussion of the Company's Strategic Business Issues 3. Management Report of PT PII for the Period of March 2018 4. Discussion of the Individual KPI of Directors	Not Present	Present	Present	
9	14 Mei 2018 (BOC-BOD)	1. Persiapan RUPS Laporan Tahunan PT PII Tahun 2017 2. Persiapan RUPS Luar Biasa Perubahan RKAP PT PII Tahun 2018	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	-
	14 May 2018 (BOC-BOD)	1. Preparation for GMS on PT PII Annual Report 2017 2. Preparation for the Extraordinary GMS on Amendments to the PT PII RKAP in 2018	Present	Present	Not Present	



Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018

Board of Commissioners Meeting Agenda for 2018

No	Tanggal Date	Agenda	Tingkat Kehadiran Attendance			
			AS	I	RR	LS
10	30 Mei 2018 (BOC)	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> /Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Laporan Manajemen PT PII Periode April 2018 3. Arahan/Kesimpulan/Tindak Lanjut	Hadir	-	Hadir	-
	30 May 2018 (BOC)	1. Discussion of Pending Matters or Follow Up of Previous Meetings 2. PT PII Management Report for April 2018 Period 3. Direction/Conclusion/Follow-Up	Present		Present	
11	30 Mei 2018 (BOC-BOD)	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> /Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Laporan Manajemen PT PII Periode April 2018	Hadir	-	Hadir	-
	30 May 2018 (BOC-BOD)	1. Discussion of Pending Matters or Follow Up of Previous Meetings 2. PT PII Management Report for April 2018 Period	Present		Present	
12	22 Juni 2018 (BOC)	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> /Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Laporan Manajemen PT PII Periode Mei 2018 3. Arahan/Kesimpulan/Tindak Lanjut	Hadir	-	Hadir	Hadir
	22 June 2018 (BOC)	1. Discussion of Pending Matters or Follow Up of Previous Meetings 2. PT PII Management Report for May 2018 Period 3. Direction/Conclusion/Follow-Up	Present		Present	Present
13	29 Juni 2018 (BOC-BOD)	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> /Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Laporan Manajemen PT PII Periode Mei 2018	Hadir	-	Tidak Hadir	Hadir
	29 June 2018 (BOC-BOD)	1. Discussion of Pending Matters 2. Management Report of PT PII Period May 2018	Present		Not Present	Present
14	10 Juli 2018 (BOC)	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i>	Hadir	-	Hadir	Hadir
	10 July 2018 (BOC)	1. Discussion of Pending Matters	Present		Present	Present
15	23 Juli 2018 (BOC)	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> 2. Pembahasan Laporan Manajemen Periode Juni 2018	Hadir	-	Hadir	Tidak Hadir
	23 July 2018 (BOC)	1. Discussion of Pending Matters 2. Discussion of Management Reports for the June 2018 Period	Present		Present	Not Present
16	25 Juli 2018 (BOC-BOD)	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> /Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Laporan Manajemen PT PII Periode Juni 2018 3. Pembahasan <i>Roadmap IT</i>	Tidak Hadir	-	Hadir	Hadir
	25 July 2018 (BOC-BOD)	1. Discussion of Pending Matters or Follow Up of Previous Meetings 2. PT PII Management Report for June 2018 Period 3. Discussion of the IT Roadmap	Not Present		Present	Present
17	23 Agustus 2018 (BOC)	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> 2. Pembahasan Laporan Manajemen Periode Juli 2018	Hadir	-	Hadir	Hadir
	23 August 2018 (BOC)	1. Discussion of Pending Matters 2. Discussion of Management Reports for the July 2018 Period	Present		Present	Present
18	24 Agustus 2018 (BOC-BOD)	1. Pembahasan Laporan Manajemen PT PII Periode Juli 2018; 2. Pembahasan <i>Walk Through Claim</i> .	Hadir	-	Hadir	Hadir
	24 August 2018 (BOC-BOD)	1. Discussion of PT PII Management Reports for July 2018; 2. Discussion of Walk-Through Claims.	Present		Present	Present
19	27 September 2018 (BOC)	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> 2. Pembahasan Laporan Manajemen Periode Agustus 2018	Hadir	-	Hadir	Tidak Hadir
	27 September 2018 (BOC)	1. Discussion of Pending Matters 2. Discussion of Management Reports for the August 2018 Period	Present		Present	Not Present



Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018

Board of Commissioners Meeting Agenda for 2018

No	Tanggal Date	Agenda	Tingkat Kehadiran Attendance			
			AS	I	RR	LS
20	27 September 2018 (BOC-BOD)	1. Laporan Manajemen Periode Agustus 2018 2. Pembahasan Rancangan RKAP	Hadir	-	Hadir	Hadir
	27 September 2018 (BOC-BOD)	1. Management Report for the August 2018 Period 2. Discussion of the draft RKAP	Present		Present	Present
21	29 Oktober 2018 (BOC)	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> Dewan Komisaris 2. Pembahasan Laporan Manajemen Periode September 2018 3. Pembahasan <i>Update</i> Rancangan RKAP Tahun 2019	Hadir	-	Hadir	-
	29 October 2018 (BOC)	1. Discussion of the Board of Commissioners' Pending Matters 2. Discussion of Management Reports for the September 2018 Period 3. Discussion on the Update of the 2019 RKAP Draft	Present		Present	
22	30 Oktober 2018 (BOC-BOD)	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> 2. Pembahasan Laporan Manajemen PT PII Periode September 2018 3. Pembahasan RKAP PT PII Tahun 2019	Hadir	-	Hadir	-
	30 October 2018 (BOC-BOD)	1. Discussion of Pending Matters 2. Discussion of PT PII Management Reports for September 2018 3. Discussion of the PT PII RKAP in 2019	Present		Present	
23	21 November 2018 (BOC-BOD)	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> 2. Pembahasan Laporan Manajemen PT PII Periode Oktober 2018	Hadir	-	Hadir	-
	21 November 2018 (BOC-BOD)	1. Discussion of Pending Matters 2. Discussion of the PT PII Management Report for the October 2018 Period	Present		Present	
24	4 Desember 2018 (BOC)	1. Tindak lanjut rapat teknis organ & Direksi PT PII perihal persetujuan Dekom terhadap Penjaminan Proyek KPBU tol Semarang - Demak	Hadir	-	Hadir	-
	4 December 2018 (BOC)	1. Follow-up of PT PII organ & directors' technical meetings regarding Dekom's approval of the Semarang-Demak PPP Project Guarantee	Present		Present	
25	10 Desember 2018 (BOC-BOD)	1. Persiapan RUPS RKAP PT PII Tahun 2019	Hadir	-	Hadir	-
	10 December 2018 (BOC-BOD)	1. Preparation of the AGM on PT PII 2019 Work Plan and Budget	Present		Present	
Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Attendance Level of the Board of Commissioners			92%	100%	92%	78%

Keterangan | Note:

AS: Ayu SUkorini

I: Iskandar

RR: M. Rahman Ritza

LS: Langgeng Subur

Sdri. Mariatul Aini diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris pada tanggal 21 Desember 2018 dan mulai efektif mengikuti rapat Dewan Komisaris pada bulan Januari 2019

Mrs. Mariatul Aini was appointed as a member of the Board of Commissioners on December 21, 2018 and began attending the Board of Commissioners meeting in January 2019



Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi telah diatur di dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* yaitu paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. Selama tahun 2018, Direksi telah menyelenggarakan 34 kali Rapat Direksi.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Agenda Rapat dan Frekuensi Kehadiran Direksi Tahun 2018

Meeting Agenda and Frequency of Attendance of Directors in 2018

No.	Tanggal Date	Agenda	Tingkat Kehadiran Attendance		
			ARH	SS	MWS
1	4 Januari 2018	1. Arahan Direksi terkait Hasil Rapat Umum Pemegang Saham 2. Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Periode 2018-2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018	Hadir	Hadir	Hadir
	4 January 2018	1. BOD Direction on General Meeting of Shareholders Resolution 2. Approval of the Company's 2018-2022 Long-Term Plan and 2018 Company Budget and Work Plan	Present	Present	Present
2	30 Januari 2018	Pembahasan Laporan Manajemen Desember 2017	Hadir	Hadir	Hadir
	30 January 2018	Discussion on Management Reports for December 2017	Present	Present	Present
3	5 Februari 2018	Persiapan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek SPAM Kota Bandar Lampung	Hadir	Hadir	Hadir
	5 February 2018	Preparation for the Signing of the Guarantee Agreement and Recourse Agreement on the Bandar Lampung SPAM Project	Present	Present	Present
4	27 Februari 2018	Pemaparan Rencana Revisi RKAP terkait Aktivitas Penyiapan dan Pendampingan Proyek	Hadir	Hadir	Hadir
	27 February 2018	Presentation of the RKAP Revision Plan regarding Project Preparation and Assistance Activities	Present	Present	Present
5	27 Februari 2018	Pembahasan Laporan Manajemen Januari 2018 dan Analisis Dampak Moratorium Pekerjaan Konstruksi Layang terhadap Penjaminan PT PII	Hadir	Hadir	Hadir
	27 February 2018	Discussion of Management Report for January 2018 and Analysis of the Impact of Moratorium on Fly Over Construction Work on PT PII Guarantee	Present	Present	Present
6	12 Maret 2018	Update Aspek Operasi, Amandemen V PKS SPAM Umbulan dan Acuan Alokasi Risiko 2018	Hadir	Hadir	Hadir
	12 March 2018	Update on Operating Aspects, Amendment V to the Cooperation Agreement of Umbulan SPAM and Risk Allocation Reference 2018	Present	Present	Present
7	20 Maret 2018	Update Status Proyek KPBU dan Non-KPBU	Hadir	Hadir	Hadir
	20 March 2018	Update on the Status of PPP and Non-PPP Projects	Present	Present	Present

BOARD OF DIRECTORS MEETING

As stipulated in the Articles of Association and Board Manual, Board of Directors Meetings are held at least 1 (one) time every month. During 2018, the Board of Directors held 34 Board of Directors meetings.

Decision making is done by deliberation to reach consensus. In the event that there is no consensus, the decision is made based on the majority of votes. All decisions taken at the Board of Directors meeting are binding. Dissenting opinions that occur in a Board of Directors meeting must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for dissent.



Agenda Rapat dan Frekuensi Kehadiran Direksi Tahun 2018

Meeting Agenda and Frequency of Attendance of Directors in 2018

No.	Tanggal Date	Agenda	Tingkat Kehadiran Attendance		
			ARH	SS	MWS
8	27 Maret 2018	Update Proyek SPAM Semarang Barat dan Pemaparan Pelelangan Dua Tahap LKPP	Hadir	Hadir	Hadir
	27 March 2018	Update on the West Semarang SPAM Project and Presentation of LKPP's Two-Stage Auction	Present	Present	Present
9	17 April 2018	Appraisal Penjaminan Proyek SPAM Semarang Barat dan Update Amandemen V PKS SPAM Umbulan	Hadir	Hadir	Hadir
	17 April 2018	Appraisal on Guarantee of the West Semarang SPAM Project and Update on Amendments V to Cooperation Agreement of Umbulan SPAM	Present	Present	Present
10	24 April 2018	Laporan Manajemen dan Update Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah	Hadir	Hadir	Hadir
	24 April 2018	Management Report and Update on Government Multifunctional Satellite Projects	Present	Present	Present
11	2 Mei 2018	Pemaparan SWOT Analysis Pendampingan Penjaminan PSN	Hadir	Hadir	Hadir
	2 May 2018	Presentation of SWOT Analysis on Assistance in PSN Guarantee	Present	Present	Present
12	7 Mei 2018	Penerbitan Rancangan Perjanjian Penjaminan Proyek SPAM Semarang Barat	Hadir	Hadir	Hadir
	7 May 2018	Issuance of Draft of West Semarang SPAM Project Guarantee Agreement	Present	Present	Present
13	18 Mei 2018	Pembahasan SOP Klaim	Hadir	Hadir	Hadir
	18 May 2018	Discussion of Claim SOP	Present	Present	Present
14	30 Mei 2018	1. Kajian Eksposur dan Cakupan Penjaminan Risiko Terminasi Dini Proyek SPAM Semarang Barat; 2. Penerbitan CTP Proyek KA Makassar-Parepare; 3. Penerbitan CTP Proyek Jalan Nasional Non-Tol Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera Ruas Sumatera Selatan	Hadir	Hadir	Tidak Hadir
	30 May 2018	1. Study on Exposure and Guarantee Coverage for Risk of Early Termination of West Semarang SPAM Project; 2. Issuance of CTP of the Makassar-Parepare Railway Project; 3. Issuance of CTP of the Sumatra Non-Toll Road East Road Project (Jalintim) South Sumatra Section	Present	Present	Not Present
15	1 Juni 2018	Tindak Lanjut Proyek SPAM Semarang-Barat	Hadir	Hadir	Hadir
	1 June 2018	Follow-up of the Semarang-West SPAM Project	Present	Present	Present
16	25 Juni 2018	Satelit Multifungsi Pemerintah	Hadir	Hadir	Hadir
	25 June 2018	Government Multifunctional Satellite	Present	Present	Present
17	25 Juni 2018	Penerbitan IPA SPAM Semarang Barat	Hadir	Hadir	Hadir
	25 June 2018	Issuance of West Semarang SPAM IPA	Present	Present	Present
18	9 Juli 2018	Update Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah dan Jalan Tol Semarang- Demak	Hadir	Hadir	Hadir
	9 July 2018	Update on the Government Multifunctional Satellite Project and Semarang-Demak Toll Road	Present	Present	Present
19	25 Juli 2018	Appraisal Proyek RSUD Krian Sidoarjo	Hadir	Hadir	Hadir
	25 July 2018	Appraisal of RSUD Krian Sidoarjo Project	Present	Present	Present
20	7 Agustus 2018	Update Kegiatan Penjaminan Non-KPBU	Hadir	Hadir	Hadir
	7 August 2018	Update on the Non-PPP Guarantee Activities	Present	Present	Present



Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Agenda Rapat dan Frekuensi Kehadiran Direksi Tahun 2018

Meeting Agenda and Frequency of Attendance of Directors in 2018

No.	Tanggal Date	Agenda	Tingkat Kehadiran Attendance		
			ARH	SS	MWS
21	8 Agustus 2018	Update Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah dan Jalan Tol Semarang- Demak	Hadir	Hadir	Hadir
	8 August 2018	Update on the Government Multifunctional Satellite Project and Semarang-Demak Toll Road	Present	Present	Present
22	24 Agustus 2018	1. Update Appraisal Proyek KA Makasar-Parepare; 2. Simulasi Klaim; 3. Update Proses Penjaminan Proyek dan Draft Perjanjian Regres Proyek SPAM Semarang-Barat.	Hadir	Hadir	Hadir
	24 August 2018	1. Update on the Appraisal of the Makassar-Parepare Train Project; 2. Claim Simulation; 3. Update on the Process of Project Guarantee and the Draft of Recourse Agreement on Semarang-West SPAM Project.	Present	Present	Present
23	29 Agustus 2018	Pemaparan Hasil Appraisal Proyek KA Makasar-Parepare	Hadir	Hadir	Hadir
	29 August 2018	Presentation of the Results of Appraisal on the Makassar-Parepare Train Project	Present	Present	Present
24	10 September 2018	1. Update Draft Perjanjian Regres Proyek SPAM Semarang-Barat; 2. Pembahasan Hasil Appraisal Penjaminan Proyek KPBU SPAM Jatiluhur; 3. Update Proses Penjaminan Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah.	Hadir	Hadir	Hadir
	10 September 2018	1. Update on the Draft of Recourse Agreement on Semarang-West SPAM Project; 2. Discussion on Results from the Appraisal of the Guarantee of KPBU SPAM Jatiluhur Project; 3. Update on the Process of the Guarantee of Government Multifunctional Satellite Project.	Present	Present	Present
25	17 September 2018	Pemaparan Hasil Appraisal Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah	Hadir	Hadir	Hadir
	17 September 2018	Presentation of the Results of Appraisal on the Government Multifunctional Satellite Project.	Present	Present	Present
26	18 September 2018	Penerbitan IPA Proyek KA Makasar-Parepare	Hadir	Hadir	Hadir
	18 September 2018	Issuance of the IPA of Makassar-Parepare Train Project	Present	Present	Present
27	27 September 2018	Pembahasan Rancangan RKAP Tahun 2019	Hadir	Hadir	Hadir
	27 September 2018	Discussion on the Draft of the 2019 Work Plan and Budget	Present	Present	Present
28	4 Oktober 2018	Update Proyek KPBU Satelit Multifungsi Pemerintah	Hadir	Hadir	Hadir
	4 October 2018	Update on the Government Multifunctional Satellite KBPU Project.	Present	Present	Present
29	31 Oktober 2018	Penerbitan Draft GA SPAM Jatiluhur	Hadir	Hadir	Hadir
	31 Oktober 2018	Issuance of the Draft of GA for SPAM Jatiluhur	Present	Present	Present
30	5 November 2018	Penerbitan Draft GA Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah	Hadir	Hadir	Hadir
	5 November 2018	Issuance of the Draft of GA for the Government Multifunctional Satellite KBPU Project.	Present	Present	Present
31	12 November 2018	Update Rencana Penjaminan Pinjaman Proyek KEK Mandalika	Hadir	Hadir	Hadir
	12 November 2018	Update on the Plan for Loan Guarantee for the KEK Mandalika Project	Present	Present	Present
32	13 November 2018	Update Proyek Jalan Tol Semarang-Demak	Hadir	Hadir	Hadir
	13 November 2018	Update on Semarang-Demak Toll Road Project	Present	Present	Present



Agenda Rapat dan Frekuensi Kehadiran Direksi Tahun 2018

Meeting Agenda and Frequency of Attendance of Directors in 2018

No.	Tanggal Date	Agenda	Tingkat Kehadiran Attendance		
			ARH	SS	MWS
33	14 Desember 2018	1. Penerbitan IPA Jalan Tol Semarang-Demak; 2. Penerbitan IPA Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah; dan 3. <i>Update</i> Proyek KA Makasar-Parepare	Hadir	Hadir	Hadir
	14 December 2018	1. Issuance of IPA Semarang-Demak Toll Road; 2. Issuance of IPA Government Multifunctional Satellite Project; and 3. Update on the Makassar-Parepare Railway Project	Present	Present	Present
34	18 Desember 2018	Pembahasan Perjanjian Regres Proyek RSUD Sidoarjo	Hadir	Hadir	Hadir
	18 December 2018	Discussion on Recourse Agreement for the RSUD Sidoarjo Project	Present	Present	Present
Jumlah Rapat Number of Meetings			34	34	34
Jumlah Kehadiran Number of Attendance			34	34	33
Persentase Kehadiran Percentage of Attendance			100%	100%	97%
Keterangan Note: ARH: Armand Hermawan SS: Salusra Satria MWS: M. Wahid Sutopo					

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETING

Agenda dan Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Selama Tahun 2018

Agenda and Frequency of Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2018

No.	Tanggal Date	Tempat Rapat Venue	Agenda	Tingkat Kehadiran Attendance						
				Dewan Komisaris Board of Commissioners				Direksi Board of Directors		
				AS	I	RR	LS	ARH	SS	WS
1	30 Januari 2018	Capital Place Lt.8	1. <i>Update performance</i> 2017 PT PII 2. Pembahasan laporan manajemen PT PII periode Desember 2017 3. Laporan monitoring proyek yang dijamin PT PII 4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut	Hadir	Hadir	Hadir	Belum Aktif	Hadir	Hadir	Tidak Hadir
	30 January 2018		1. Update of the PT PII's 2017 performance 2. Discussion of PT PII management report for the December 2017 period 3. Report on monitoring projects guaranteed by PT PII. 4. Conclusions and Follow Ups	Present	Present	Present	Not Yet Active	Present	Present	Not Present



Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Agenda dan Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Selama Tahun 2018

Agenda and Frequency of Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2018

No.	Tanggal Date	Tempat Rapat Venue	Agenda	Tingkat Kehadiran Attendance						
				Dewan Komisaris Board of Commissioners				Direksi Board of Directors		
				AS	I	RR	LS	ARH	SS	WS
2	27 Februari 2018	Capital Place Lt.8	1. Pembahasan Laporan Manajemen PT PII Periode Januari 2018 2. Pembahasan Rencana Revisi RKAP PT PII Tahun 2018	Hadir	Hadir	Hadir	Belum Aktif	Hadir	Hadir	Hadir
	27 February 2018		1. Discussion of PT PII Management Reports for January 2018 2. Discussion of the Revised Plan of Work Plan and Budget of PT PII in 2018	Present	Present	Present	Not Yet Active	Present	Present	Present
3	23 Maret 2018	Gd. Radius Prawiro Lt.6	1. Pembahasan <i>Pending Matters/</i> Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Manajemen PT PII Periode Februari 2018 3. <i>Update</i> Laporan <i>Monitoring</i> Proyek yang Dijamin PT PII 4. Agenda Lain-Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Belum Aktif	Hadir	Hadir	Hadir
	23 March 2018		1. Discussion about Pending Matters/ Follow Up on Previous Meetings 2. Discussion of PT PII Management Report of the February 2018 Period 3. Update on Monitoring Report of Projects Guaranteed by PT PII 4. Other Agenda	Present	Present	Present	Not Yet Active	Present	Present	Present
4	26 April 2018	Capital Place Lt.8	1. Pembahasan <i>Pending Matters/</i> Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Isu-Isu Strategis Bisnia Perseroan 3. Laporan Manajemen PT PII Periode Maret 2018 4. Pembahasan IKU Individu Direksi	Tidak Hadir	Hadir	Hadir	Belum Aktif	Hadir	Hadir	Hadir
	26 April 2018		1. Discussion of Pending Matters & Follow-Up to Previous Meetings 2. Discussion of the Strategic Issues of the Company's Business 3. Management Report of PT PII for the Period of March 2018 4. Discussion of IKU Individual Directors	Not Present	Present	Present	Not Yet Active	Present	Present	Present
5	14 Mei 2018	Gd. Radius Prawiro Lt.6	1. Persiapan RUPS Laporan Tahunan PT PII Tahun 2017 2. Persiapan RUPS Luar Biasa Perubahan RKAP PT PII Tahun 2018	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Belum Aktif	Hadir	Hadir	Hadir
	14 May 2018		1. Preparation for the GMS Annual Report PT PII 2017 2. Preparations for the Extraordinary GMS on Amendments to the PT PII RKAP in 2018	Present	Present	Not Present	Not Yet Active	Present	Present	Present
6	30 Mei 2018	Capital Place Lt.8	1. Pembahasan <i>Pending Matters/</i> Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Laporan Manajemen PT PII Periode April 2018	Hadir	Tidak Aktif	Hadir	Belum Aktif	Hadir	Hadir	Hadir
	30 May 2018		1. Discussion of Pending Matters/ Follow-up on Previous Meetings 2. PT PII Management Report for April 2018	Present	Not Active	Present	Not Yet Active	Present	Present	Present

Agenda dan Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Selama Tahun 2018

Agenda and Frequency of Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2018

No.	Tanggal Date	Tempat Rapat Venue	Agenda	Tingkat Kehadiran Attendance						
				Dewan Komisaris Board of Commissioners				Direksi Board of Directors		
				AS	I	RR	LS	ARH	SS	WS
7	29 Juni 2018	Capital Place Lt.8	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> / Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Laporan Manajemen PT PII Periode Mei 2018	Hadir	Tidak Aktif	Tidak Hadir	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir
	29 June 2018		1. Discussion of Pending Matters and Follow-Up Meetings Previously 2. Management Report of PT PII for May 2018 Period	Present	Not Active	Not Present	Present	Present	Not Present	Present
8	25 Juli 2018	Capital Place Lt.8	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> / Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Laporan Manajemen PT PII Periode Juni 2018 3. Pembahasan <i>Roadmap IT</i>	Tidak Hadir	Tidak Aktif	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
	25 July 2018		1. Discussion of Pending Matters and Follow Up of Previous Meetings 2. PT PII Management Report for June 2018 Period 3. Discussion of the IT Roadmap	Not Present	Not Active	Present	Present	Present	Present	Present
9	24 Agustus 2018	Capital Place Lt.8	1. Pembahasan Laporan Manajemen PT PII Periode Juli 2018; 2. Pembahasan <i>Walk Through Claim</i> .	Hadir	Tidak Aktif	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
	24 August 2018		1. Discussion of Management Report of PT PII Period for July 2018; 2. Discussion of Claim Walk Through.	Present	Not Active	Present	Present	Present	Present	Present
10	27 September 2018	Capital Place Lt.8	1. Laporan Manajemen Periode Agustus 2018 2. Pembahasan Rancangan RKAP	Hadir	Tidak Aktif	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
	27 September 2018		1. Management Report for the August 2018 Period 2. Discussion of the draft RKAP	Present	Not Active	Present	Present	Present	Present	Present
11	30 Oktober 2018	Capital Place Lt.8	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> 2. Pembahasan Laporan Manajemen PT PII Periode September 2018 3. Pembahasan RKAP PT PII Tahun 2019	Hadir	Tidak Aktif	Hadir	Tidak Aktif	Hadir	Hadir	Hadir
	30 October 2018		1. Discussion of Pending Matters 2. Discussion of Management Reports of PT PII for September 2018 3. Discussion of PT PII's 2019 RKAP	Present	Not Active	Present	Not Active	Present	Present	Present
12	21 November 2018	Capital Place Lt.8	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> 2. Pembahasan Laporan Manajemen PT PII Periode Oktober 2018	Hadir	Tidak Aktif	Hadir	Tidak Aktif	Hadir	Hadir	Hadir
	21 November 2018		1. Discussion of Pending Matters 2. Discussion of Management Reports of PT PII for October 2018	Present	Not Active	Present	Not Active	Present	Present	Present
13	10 Desember 2018	Gd. Radius Prawiro Lt.6	1. Persiapan RUPS RKAP PT PII Tahun 2019	Hadir	Tidak Aktif	Hadir	Tidak Aktif	Tidak Hadir	Hadir	Hadir
	10 December 2018		1. Preparation for GMS on PT PII's 2019 RKAP	Present	Not Active	Present	Not Active	Not Present	Present	Present
Persentase Kehadiran Percentage of Attendance				85%	100%	85%	100%	92%	92%	92%



Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

Affiliation of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Anggota Dewan Komisaris, masing-masing tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis vertikal maupun horizontal terhadap sesama anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, maupun Pemegang Saham.

Members of the Board of Commissioners, each shall have no financial or familial relationship up to the third degree, either by vertical or horizontal lines against fellow members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, as well as the Shareholder.

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan Financial relationship with						Hubungan keluarga dengan Family relationship with						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Ya Yes	Tidak No
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No		
Ayu Sukorini	Komisaris Utama President Commissioner	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
M. Rahman Ritza	Komisaris Commissioner	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Iskandar	Komisaris Commissioner	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Langgeng Subur	Komisaris Commissioner	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Armand Hermawan	Direktur Utama President Director	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Eksekutif Bisnis Business Executive Director	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Salusra Satria	Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek Finance and Project Assessment Executive Director	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Informasi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Information on Concurrent Position of the Board of Commissioners and Board of Directors

RANGKAP JABATAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Rangkap jabatan Dewan Komisaris PT PII dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan Lain Position in Other Company	Nama Perusahaan/Instansi Lain Name of Other Company/Institution
Ayu Sukorini	Komisaris Utama President Commissioner	x	x
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	x	x
M. Rahman Ritza	Komisaris Commissioner	x	x

CONCURRENT POSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with the Company's Articles of Association, members of the Board of Commissioners are prohibited from having concurrent positions as:

1. Members of the Board of Directors in State-Owned Enterprises, Regionally-Owned Enterprises, Private-Owned Enterprises.
2. Other positions in accordance with the provisions of the legislation, board members of political parties and/or legislative candidates and/or members and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head.
3. Other positions that may cause conflicts of interest.

Concurrent position of the Board of Commissioners of PT PII can be viewed in the following table:

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah.

CONCURRENT POSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent position as:

1. Members of the Board of Directors in State-Owned Enterprises, Regionally-Owned Enterprises, Private-Owned Enterprises.
2. Members of the Board of Commissioners, Supervisory Board of State Owned Enterprises.
3. Other structural and functional positions at the central and/or regional government agencies/institutions.



Informasi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Information on Concurrent Position of the Board of Commissioners and Board of Directors

4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Rangkap jabatan Direksi PT PII dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

4. Other positions in accordance with the provisions of the legislation, board members of political parties and/or legislative candidates and/or members and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head.
5. Other positions that may cause conflicts of interest.

Concurrent position of the Board of Directors of PII can be viewed in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan Lain Position in Other Company	Nama Perusahaan/Instansi Lain Name of Other Company/Institution
Armand Hermawan	Direktur Utama President Director	x	x
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Eksekutif Bisnis Business Executive Director	x	x
Salusra Satria	Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek Finance and Project Assessment Executive Director	x	x

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Policy on Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors

Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, PT PII telah mengikuti persyaratan dan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait.

In order to accomplish transparent, accountable and reliable process of selection and replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors, the Company has complied with the requirements and procedures governed by the relevant laws and regulations.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris PT PII telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/pendidikan, serta pengalaman kerja. Seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.

Berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, dalam penetapan komposisi Dewan Komisaris telah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas PT PII termasuk memperhatikan unsur Keberagaman sebagaimana pada tabel berikut:

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The composition of PT PII Board of Commissioners has fulfilled the element of diversity, which are combination of independence, expertise/education, as well as work experience. All members of the Board of Commissioners have good integrity, competency, and reputation.

Based on the Shareholders policy, the determination of the composition of the Board of Commissioners has been done by taking into account the Company's needs and complexity, including considering the diversity element as shown in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (years)	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Keahlian Expertise
Ayu Sukorini	Komisaris Utama President Commissioner	51	Perempuan Female	Master di Bidang Ekonomi Masters in Economics	Ilmu Ekonomi dan Fiskal Economics and Fiscal
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	55	Perempuan Female	Master di Bidang Administrasi Bisnis Masters in Business Administration	Regulasi, Pengembangan SDM, Remunerasi dan Keuangan Regulation, HR Development, Remuneration and Finance
M. Rahman Ritza	Komisaris Commissioner	59	Laki Male	Master di Bidang Administrasi Bisnis Masters in Business Administration	Akuntansi dan Audit Accounting and Audit



Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Policy on Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Keberagaman komposisi Direksi diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang semakin kompleks dihadapi Perseroan. Keberagaman tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik setelah mempertimbangkan berbagai alternatif keputusan.

Berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, penetapan komposisi Direksi telah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis PT PII termasuk memperhatikan unsur keberagaman sebagaimana tercermin pada tabel berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (years)	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Keahlian Expertise
Armand Hermawan	Direktur Utama President Director	50	Laki Male	Doktor di Bidang Keuangan Doctorate in Finance	Manajemen Perusahaan, Perdagangan dan Keuangan Corporate Management, Commerce and Finance
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Eksekutif Bisnis Business Executive Director	49	Laki Male	Magister di Bidang Manajemen Masters in Management	Teknik dan Manajemen Bisnis Engineering and Business Management
Salusra Satria	Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek Finance and Project Assessment Executive Director	53	Laki Male	Magister di Bidang Keuangan Masters in Finance	Manajemen dan Strategi Bisnis Management and Business Strategy

PT PII tidak menentukan secara spesifik target yang harus dicapai dalam keragaman gender di dalam struktur keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan meyakini bahwa keragaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang pendidikan sangat diperlukan untuk efektivitas pelayanan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan tugas pengurusan Perseroan bagi Direksi serta tidak mengenal perbedaan gender.

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Diversity in the composition of the Board of Directors is expected to provide an alternative solution to the increasingly complex issues faced by the Company. This diversity is expected to lead to the best decisions following due considerations of various alternative decisions.

Based on the Shareholder policy, the determination of the composition of the Board of Directors has been conducted by taking into account the Company's business needs, including considering the diversity element as shown in the following table:

The Company does not specify targets to be achieved in gender diversity within the membership structure of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Company believes that the diversity in expertise, experience, and educational background are indispensable for the effectiveness of the supervisory duties of the Board of Commissioners and the Company's management duties of the Board of Directors, the Company does not recognize gender differences.



Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of the Board of Commissioners

Untuk memaksimalkan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk organ pendukung, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

To maximize the functions, duties, and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners has established supporting organs, which are Secretary to the Board of Commissioners, the Audit Committee and Risk Monitoring Committee.



Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary to the Board of Commissioners

Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam hal administratif dan kesekretariatan, Dewan Komisaris membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu oleh Staf Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris PT PII diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-07/KOM/PII/08/2017 yang mempunyai tugas pokok untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Dirkesi dalam kaitannya dengan pengelolaan Perseroan.

Pada tahun 2018, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Sdr. Afwan Fauzi.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris, meliputi:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefingsheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris;
6. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
7. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
8. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
9. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain;

To facilitate the implementation of duties of the Board of Commissioners in terms of administrative and secretarial matters, the Board of Commissioners established the Secretary to the Board of Commissioners, led by a Secretary to the Board Commissioner and assisted by the staffs of the Secretary to the Board of Commissioners. Secretary to the Company's Board of Commissioners is appointed based on the Decree of the Board of Commissioners Number KEP-07/KOM/PII/08/2017, which has the main function of providing support to the Board of Commissioners in facilitating the Board of Commissioners to perform its function as the Company's Organ that assists the Shareholders to provide advice as well as supervision in relation to the Company's management carried out by the Board of Directors.

In 2018, the position of Secretary to the Board of Commissioners is held by Mr. Afwan Fauzi.

Duties of the Secretary to the Board of Commissioners

Duties of the Secretary to the Board of Commissioners includes:

1. Preparing meetings, including meeting materials (briefing sheets) of the Board of Commissioners;
2. Preparing the minutes of the Board of Commissioners meetings in accordance with the provisions in the Articles of Association of the Company;
3. Administering the Board of Commissioners' documents, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings, and other documents;
4. Preparing the draft of the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
5. Preparing the draft of the Board of Commissioners reports;
6. Ensuring that the Board of Commissioners complies with the laws and regulations as well as implementing the GCG principles;
7. Providing information required by the Board of Commissioners regularly and/or at any time as requested;
8. Coordinating the Committee members, if necessary, to facilitate the duties of the Board of Commissioners;
9. As liaison officer between the Board of Commissioners and other parties;



10. Memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perusahaan;
11. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Sekretaris Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perusahaan.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris



10. Ensuring that the documents for the implementation of the Board of Commissioners activities are properly stored in the Company;
11. Perform other duties from the Board of Commissioners.

In the framework of orderly administration and implementation of Good Corporate Governance, Secretary to the Board of Commissioners shall ensure documentations of activities of the Board of Commissioners are well preserved in the Company.

Profile of the Secretary to the Board of Commissioners

Afwan Fauzi

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

52 tahun, Kewarganegaraan Indonesia
52 years old, Citizenship Indonesian

Warga Negara Indonesia lahir di Jombang tanggal 28 Maret 1967. Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris pada tanggal 24 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-07/KOM/PII/08/2017. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan III, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejak tahun 2014.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka pada tahun 1996.

Mengawali karir dengan bekerja di Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Anggaran, tahun 1990. Pada tahun 2003-2007 beliau bekerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, dengan sejumlah jabatan yang pernah diemban antara lain, Kepala Seksi Barang Milik Negara IIA-1, Direktorat BMN II, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2007-2011), Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan

Indonesian citizen, born in Jombang on 28 March 1967. Appointed as Secretary to the Board of Commissioners on 24 August 2017 based on the Decree of the Board of Commissioners Number KEP-07/KOM/PII/08/2017. Currently, he also serves as the Head of Sub-Directorate of Separated State Assets (KND) III, Directorate of KND, Directorate General of State Assets since 2014.

He earned a Bachelor's Degree in Economics from Universitas Terbuka in 1996.

Started his career by working at the Ministry of Finance at the Directorate General of Budget, 1990. In 2003-2007 he worked at the Directorate General of Treasury, Ministry of Finance, holding a number of positions, among others: Head of Section of State Property IIA-1, Directorate of BMN II, Directorate General of State Assets (2007-2011), Head of State Assets Management, Regional Office of the Directorate of State Assets,



Sekretaris Dewan Komisaris Secretary to the Board of Commissioners

Negara, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan (2012-2013), Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara I, Direktorat PKNSI, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2013-2014).

Medan (2012-2013), Head of Sub-Directorate of State Assets Management I, Directorate of PKNSI, Directorate General of State Assets (2013-2014).

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris 2018

Duty Implementation of the Secretary to the Board of Commissioners in 2018

No	Kegiatan Activity	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Output
1	Penyusunan Rencana Kerja Sesdekomp Tahun 2019 Preparation of the 2019 Work Plan of the Secretary to the Board of Commissioners	Agustus 2018 August 2018	Rencana Kerja Sesdekomp Tahun 2019 2019 Work Plan of the Secretary to the Board of Commissioners
2	Penyusunan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta IKU Dewan Komisaris Tahun 2019 Preparation of materials for the 2019 Work Plan and Budget (WPB) as well as KPI of the Board of Commissioners	Agustus s.d. September 2018 August to September 2018	Rancangan RKA dan IKU Dewan Komisaris Tahun 2019 The 2019 WPB and KPI of the Board of Commissioners
3	Penelaahan atas usulan RKAP PT PII Tahun 2019 Review on the proposal of the 2019 WPB of PT PII	Oktober 2018 October 2018	Hasil penelaahan atas usulan RKAP PT PII Tahun 2019 Review results on the proposal of the 2019 WPB of PT PII
4	Pelaksanaan BOC Meeting Implementation of the BOC Meeting	2018	Dokumentasi kelengkapan rapat Dewan Komisaris Documentation of completeness of the Board of Commissioners meeting
5	Pelaksanaan BOC-BOD Meeting Implementation of the BOC-BOD Meeting	2018	Dokumentasi kelengkapan rapat Dewan Komisaris Documentation of completeness of the Board of Commissioners meeting
6	Evaluasi atas pelaksanaan RKAP Evaluation on the implementation of the WPB	Tahun 2018 (Triwulanan) 2018 (Quarterly)	Hasil evaluasi atas pelaksanaan RKAP Results of the evaluation on the implementation of the WPB
7	Penelaahan terkait transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS Review on transactions or actions within the scope of authorities of the Board of Commissioners/GMS	2018	Memo hasil penelaahan atas usulan transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS Result memo of the review on transactions or actions within the scope of authorities of the Board of Commissioners/GMS
8	Penyusunan laporan-laporan Dewan Komisaris Preparation of the Board of Commissioners' reports	Tahun 2018 (Triwulanan) 2018 (Quarterly)	1. Konsep Laporan Pengawasan atas Pelaksanaan RKAP Tahun 2018. 2. Konsep Laporan Realisasi Capaian IKU Dewan Komisaris Tahun 2018. 3. Konsep Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2018. 1. Concept of Supervision Report on the Implementation of the 2018 WPB. 2. Concept of the Board of Commissioners' 2018 KPI Realization Achievement Report. 3. Concept of Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in 2018.
10	Penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris Preparation of activity of the Secretary to the Board of Commissioners report	Tahun 2018 (Triwulanan) 2018 (Quarterly)	Laporan Kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris Report of the Secretariate to the Board of Commissioners Activity
11	Penyampaian tanggapan atas Laporan Tahunan 2017 Submission of responses to the 2017 Annual Report	April 2018	Konsep Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 Concept of the Board of Commissioners' response to the 2017 Annual Report of the Company

Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit adalah Organ Dewan Komisaris yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Komite Audit bekerja secara independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit. Piagam yang disahkan pada tahun 2018 adalah edisi kedua, yang merupakan pembaruan dari edisi pertama (2017).

Piagam Komite Audit ini mencakup isi:

1. Pendahuluan: Latar Belakang, Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit, Maksud dan Tujuan Penetapan Piagam Komite Audit;
2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang;
3. Pola Hubungan Kerja, Keanggotaan dan Masa Jabatan;
4. Tata Kerja dan Prosedur Kerja;
5. Penganggaran dan Pembiayaan;
6. Penutup.

KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Komite Audit PT PII beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen yang memenuhi kriteria integritas, kompetensi, akhlak, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Per 31 Desember 2018, komposisi Komite Audit adalah sebagai berikut:

No	Nama Name	Jabatan Position
1	M. Rahman Ritza	Ketua Komite Audit Head of the Audit Committee
2	Ahmad Ghufon	Anggota Member
3	Ferry Irawan	Anggota Member

The Audit Committee is an organ of the Board of Commissioners established by the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in performing its supervisory duties. The Audit Committee works independently and is responsible to the Board of Commissioners.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

The Company has established the Audit Committee Charter that has been signed by all members of the Audit Committee. The charter ratified in 2018 is the second edition, which is an amendment from the first edition (2017).

The Audit Committee Charter contains:

1. Introduction: Background, Legal Basis of Establishment of the Audit Committee, Purpose and Objectives of the Establishment of the Audit Committee Charter;
2. Duties, Responsibilities and Authorities;
3. Work Relation Pattern, Membership and Term of Office;
4. Working Mechanism and Procedure;
5. Budgeting and Financing;
6. Closing.

MEMBERSHIP OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee of PT PII consists of 3 (three) members, consisting of the Head of Audit Committee who is a member of the Board Commissioners and 2 (two) members who are all Independent Parties that meet the criteria: integrity, competency, characters, morals, and the applicable laws and regulations.

As of 31 December 2018, the following is the composition of the Audit Committee:



Komite Audit

Audit Committee

PROFIL KOMITE AUDIT

M. Rahman Ritza, Ketua Komite Audit

Profil lengkap disajikan pada bagian Profil Perusahaan.

Ahmad Ghuftron, Anggota

Menjabat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 1 Oktober 2017, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-09/KOM/PII/09/2017. Beliau lahir di Pekalongan tanggal 15 April 1971. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Beliau memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan manajemen dan memperoleh gelar Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia. Pada tahun 2006 beliau mendapat sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) dari Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dan pada tahun 2017 Beliau memperoleh sertifikasi Certified Risk Management Professional (CRMP) dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko.

Sepanjang karirnya, selain bidang audit internal beliau berpengalaman untuk bidang penerapan *risk management*, *internal control*, *governance*, manajemen kinerja, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen perubahan. Dalam bidang akademis, beliau juga tercatat sebagai dosen paruh waktu di Politeknik Keuangan Negara STAN untuk bidang audit internal dan bidang audit investigasi dan akuntansi forensik.

Ferry Irawan, Anggota

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 1 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-13/KOM/PII/11/2017. Beliau lahir di Depok pada tanggal 2 Februari 1975, dan saat ini bertugas sebagai Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelumnya bertugas di Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dan menangani beberapa isu antara lain Analisis Fiskal, Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan/Neraca Pembayaran juga pernah bertugas pada Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal yang menangani isu-isu risiko fiskal serta pengelolaannya.

PROFILE OF THE AUDIT COMMITTEE

M. Rahman Ritza, Head of the Audit Committee

The complete profile is presented in the Company Profile section.

Ahmad Ghuftron, Member

Serving as member of the Audit Committee on 1 October 2017, based on the Decree of the Board of Commissioners Number KEP-09/KO/PII/09/2017. He was born in Pekalongan on 15 April 1971. Currently, he also serves as Section Head of Organization and Analysis of Supervision Results, Inspectorate General of the Ministry of Finance.

He has a background in accounting and management education and earned his Masters in Accounting from the University of Indonesia. In 2006, he was certified as Fraud Examiner (CFE) from the Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) and in 2017, he also obtained the Certified Risk Management Professional (CRMP) from the Risk Management Professional Certification (LPSMR).

Throughout his career, in addition to internal audit, he is also experienced in the implementation of risk management, internal control, governance, performance management, procurement of goods and services, and change management. Academically, he is also listed as a part-time lecturer at the State Polytechnic of Finance (STAN) for internal audit, investigation audit and forensic accounting.

Ferry Irawan, Member

Appointed as Member of Audit Committee since 1 December 2017 based on the Decree of the Board of Commissioners Number KEP-13/KOM/PII/11/2017. He was born in Depok on 2 February 1975, and currently serves as Assistant Deputy of Regional Economic Development and Real Sector, Coordinating Ministry for Economic Affairs. Previously served in the Fiscal Policy Institution, the Ministry of Finance and handled several issues, such as Fiscal Analysis, Monetary Analysis, and Financial Institution/Balance Sheet Payment. He has also been assigned to the Fiscal Risk Management Center that addresses fiscal risk issues and its management.



Beliau menyelesaikan Program S-1 pada Jurusan Manajemen Keuangan, S-2 dan Doktoralnya di dalam bidang Ekonomi Moneter pada tahun 2006, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Beliau juga menjadi salah satu pengajar di Program Pasca Sarjana/Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

He earned his Bachelor's Degree majoring in Financial Management, Master's Degree and Doctorate Degree majoring in Monetary Economics in 2006, Graduate Program of Faculty of Economics, University of Indonesia.

He is also one of the lecturers in the Post Graduate Program/Masters Program for Public Policy Planning, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia.

PERIODE JABATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

TERM OF OFFICE OF MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE

The term of office of a member of the Audit Committee who is not a member of the Board of Commissioners at maximum is 3 (three) years, which may be reappointed once for 2 (two) years of term of office, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time.

INDEPENDENSI DAN PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

INDEPENDENCY AND REQUIREMENTS OF MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE

All members of the Audit Committee are independent parties, namely have no financial, management relationship, share ownership and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Shareholder that may affect their ability to act independently.

No	Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship With			Hubungan Keluarga dengan Family Relationship With		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
		Ya Yes	tidak No	Ya Yes	tidak No	Ya Yes	tidak No
1	M.Rahman Ritza	Anggota Dewan Komisaris Member of the Board of Commissioners					
			x	x	x	x	x
2	Ahmad Ghufon	x	x	x	x	x	x
3	Ferry Irawan	x	x	x	x	x	x



Komite Audit

Audit Committee

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Persyaratan Independensi

1. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak pernah terikat dalam pekerjaan atau penugasan yang memberikan jasa audit, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan;
2. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak pernah terikat dalam kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan perusahaan;
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan;
4. Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan;
5. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham;
6. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris/Staf Sekretaris Dewan Komisaris pada BUMN/Perusahaan lain;
7. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit, anggota Komite Lain pada perusahaan dan/atau anggota Komite pada BUMN/perusahaan lain.

Persyaratan Kompetensi

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
2. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;
3. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memahami industri/bisnis perusahaan dan pengetahuan yang cukup di bidang sistem dan teknologi informasi;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan terutama yang menyangkut BUMN dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan;
5. Mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

Membership Requirements of the Audit Committee

Independence Requirements

1. In the last 12 (twelve) months prior to appointment by the Board of Commissioners, he/she has never involved in employment or assignment providing audit services, legal consultancy services, other consulting services to the Company;
2. In the last 12 (twelve) months prior to the appointment by the Board of Commissioners, he/she has never been bound by authority and responsibility for planning, leading, or controlling the Company's activities;
3. Has no business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities;
4. Has no personal interests/attachments that may have negative impact and conflict of interest towards the Company;
5. Has no family relationship up to third degree either by vertical or horizontal lines against fellow members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, as well as the Shareholder;
6. Has no concurrent position as member of the Board of Commissioners, Secretary/Staff Secretary of the Board of Commissioners in other SOEs/Companies;
7. Has no concurrent position as member of the Audit Committee, member of other Committees in the Company and/or member of Committee in other SOEs/Companies.

Competency Requirements

1. Has good integrity and knowledge as well as sufficient work experience in supervision/audit;
2. One of the members of the Audit Committee shall have educational background or expertise in accounting or finance;
3. One of the members of the Audit Committee shall understand the Company's industry/business as well as sufficient knowledge in information systems and technology;
4. Has sufficient knowledge regarding the laws and regulations, particularly concerning SOEs and the laws and regulations concerning the Company's operations;
5. Able to communicate effectively and provide sufficient time to complete its duties.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit PT PII diatur sebagai berikut:

a. Tugas

1. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal dan editor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur Penelaahan yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.
6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas Komisaris berupa namun tidak terbatas pada:
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan tahunan, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
 - b. Melakukan penelaahan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
 - c. Melakukan penelaahan atas Ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
 - d. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
 - e. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.

b. Tugas terkait dengan Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Pelaporan Keuangan

1. Terkait dengan auditor internal, Komite Audit bertugas untuk:
 - a. Melakukan penelaahan dan memberikan masukan atas rencana audit tahunan yang disusun oleh auditor internal sebelum di mulainya tahun anggaran.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

Duties, responsibilities, and authorities of the Audit Committee of PII are regulated as follows:

a. Duties

1. Ensure the effectiveness of internal control system as well as the implementation of duties of external auditors and internal auditors.
2. Assess the implementation of activities and audit results conducted by internal auditors and external editors.
3. Provided recommendations on the improvement of management control system and its implementation.
4. Ensure there is a satisfactory Review procedure for any information published by the Company.
5. To identify matters requiring the attention of the Board of Commissioners.
6. Perform other duties given by the Board of Commissioners in the implementation of duties of the Board of Commissioners, including but not limited to:
 - a. Reviewing the financial information that will be issued by the Company, such as financial statements, projections, and annual reports, as well as other reports relating to the Company's financial information.
 - b. Conduct a review on the Company's Long Term Plan and Work Plan and Budget.
 - c. Reviewing the Company's compliance with the laws and regulations related to the Company's activities.
 - d. Reviewing the implementation of risk management activities conducted by the Board of Directors.
 - e. Reviewing complaints relating to the Company.

b. Duties related to Internal Auditors, External Auditors, and Financial Reporting

1. In relation to internal auditors, the Audit Committee has the following duties:
 - a. Review and provide feedback on the annual audit plan prepared by internal auditors prior to the beginning of fiscal year.



Komite Audit

Audit Committee

- b. Menelaah dan merekomendasikan prosedur pemeriksaan internal dan menelaah Piagam Auditor Internal.
 - c. Melakukan penelaahan atas laporan hasil audit dari auditor internal.
 - d. Membahas temuan auditor internal dan/atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi keuangan.
 - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan audit oleh auditor internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
2. Terkait dengan auditor eksternal, Komite Audit bertugas untuk:
- a. Menyusun kerangka acuan kerja (*term of reference*) yang selanjutnya menjadi dasar panitia pengadaan auditor eksternal dalam melakukan proses pengadaan auditor eksternal.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan eksternal auditor yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan honorarium untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Melakukan pengawasan atas proses audit yang dilakukan auditor eksternal mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan.
 - d. Menilai kinerja dan kualitas hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal.
 - e. Memantau pelaksanaan tindak lanjut temuan dan rekomendasi auditor eksternal yang dilakukan oleh Direksi.
 - f. Mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor eksternal dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor eksternal tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik.
- b. Review and recommend internal audit procedures and review the Internal Auditor Charter.
 - c. Conduct review on audit reports from internal auditors.
 - d. Discuss the findings of internal auditors and/or other matters containing indications regarding the weaknesses of internal control, including the inaccuracy on the implementation of financial accounting standards.
 - e. Review the implementation of audits by internal auditors as well as the follow-up implementation by the Board of Directors on the findings of internal auditors.
2. In relation to external auditors, the Audit Committee has the following duties:
- a. Establish the terms of reference, which is then used as the basis of external auditor procurement committee in conducting the procurement process of external auditor.
 - b. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of external auditors based on the independency, scope of assignment, and honorarium, to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
 - c. Conduct supervision on the audit process conducted by external auditors starting from the planning stage up to the reporting stage.
 - d. Assess the performance and quality of audit results conducted by external auditors.
 - e. Monitoring the implementation of the follow-up on findings and recommendations of external auditors, which is conducted by the Board of Directors.
 - f. Propose work termination with external auditor to the Board of Commissioners in the event of strong indications that the independency of external auditors may be disrupted or proven that external auditor has not conducted the audit in accordance with the audit standards of public accountant.



3. Terkait dengan pelaporan keuangan, Komite Audit bertugas untuk:
 - a. Menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang digunakan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
 - b. Melakukan penelaahan atas proses penyusunan laporan keuangan dengan penekanan pada kepatuhan terhadap kebijakan, standar dan sistem akuntansi yang berlaku.
 - c. Meyakinkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen telah menyajikan secara wajar tentang kondisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
 - d. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan dan kesesuaiannya dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta rencana jangka panjang perusahaan.
 - e. Melakukan penelaahan dan penilaian atas laporan keuangan interim dan tahunan.
 - f. Melakukan penelaahan dan penilaian atas laporan manajemen periodik.

c. Tanggung Jawab

1. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
2. Melaksanakan tugas Komite Audit secara jujur, amanah dan profesional.
3. Menyediakan waktu yang cukup untuk pelaksanaan tugasnya.

d. Wewenang

1. Mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, aset, hutang, modal, dana dan sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Meminta keterangan dari pejabat dan pegawai Perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
3. Melakukan komunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan audit eksternal serta manajemen risiko.

3. In relation to financial reporting, the Audit Committee has the following duties:
 - a. Assess the conformity of accounting policies used with the applicable financial accounting standards.
 - b. Review the process of preparing financial statements with the emphasis on compliance with the applicable accounting policies, standards and systems.
 - c. Ensure that the financial statements prepared by the management have been presented fairly regarding the Company's financial condition and its operating results are in accordance with the applicable financial accounting standards.
 - d. Assess the Company's financial condition and operating results and its conformity with the Company's work plan and budget as well as its long-term plan.
 - e. Review and assess the interim and annual financial statements.
 - f. Review and assess the periodic management reports.

c. Responsibilities

1. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information from both internal and external parties and shall only be used for the purpose of performing its duties.
2. Conduct the duties of the Audit Committee in an honest, trustworthy and professional manner.
3. Provide sufficient time for the implementation of its duties.

d. Authorities

1. Full, free, and unlimited access to documents, data, and information regarding employees, assets, debt, capital, funds and other related resources of the Company related to the implementation of its duties.
2. Request information from the Company's officers and employees in implementing its duties.
3. Conduct direct or indirect communication with employees and parties performing the functions of internal audit and external audit as well as risk management.



Komite Audit

Audit Committee

4. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4. Involve independent parties outside the members of the Audit Committee required to assist in the implementation of its duties (if required).
5. To exercise other authorities granted by the Board of Commissioners.

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT TAHUN 2018

Program Kerja Komite Audit untuk tahun 2018 sebagai berikut:

WORK PROGRAMS AND DUTY IMPLEMENTATION OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2018

The 2018 Audit Committee Work Program is as follows:

No	Kegiatan Activity	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Output
1	Penyusunan Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2019	Agustus 2018	Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2019
	Preparation of the 2019 Audit Committee Work Plan	August 2018	2019 Audit Committee Work Plan
2	Penyusunan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta IKU Dewan Komisaris Tahun 2019	Agustus s.d. September 2018	Rancangan RKA dan IKU Dewan Komisaris Tahun 2019
	Preparation of materials for the 2019 Board of Commissioners' Work Plan and Budget (WPB) and KPI	August to September 2018	Draft of the 2019 Board of Commissioners' WPB and KPI
3.	Penelaahan atas usulan RKAP PT PII Tahun 2019	Oktober 2018	Memo Hasil penelaahan atas usulan RKAP PT PII Tahun 2019
	Review on the 2019 WPB proposal of PT PII	October 2018	Memo on the Review Results on the 2019 WPB proposal of PT PII
4	Penyiapan bahan tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP Tahun 2019 yang disusun oleh Direksi	Oktober s.d. November 2018	Konsep Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Rancangan RKAP Tahun 2019
	Preparation of material for the Board of Commissioners' response to the GMS on the 2019 WPB draft prepared by the Board of Directors	October to November 2018	Concept of the Board of Commissioners response to the 2019 WPB Draft Proposal
5	Penelaahan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Audit Internal	Desember 2018	Memo Hasil penelaahan atas PKAT Audit Internal
	Review of Internal Audit's Annual Audit Work Program (PKAT)	December 2018	Memo on the Review Results of Internal Audit's Annual Audit Work Program (PKAT)
6	Reviu atas laporan hasil Audit Internal	Tahun 2018 (Triwulanan)	Memo Hasil reviu atas laporan Audit Internal
	Review on reports of Internal Audit results	Tahun 2018 (Quarterly)	Memo of Review results on Internal Audit reports
7	Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit internal dan eksternal	Tahun 2018 (Triwulanan)	Memo hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit internal dan eksternal
	Monitoring of follow-up recommendations from internal and external audit results	2018 (Quarterly)	Monitoring results memo on the follow-up recommendations from internal and external audit results



No	Kegiatan Activity	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Output
8	Penelaahan level teknis atas kegiatan-kegiatan yang menjadi program kerja Dewan Komisaris Review on the technical level of activities that become the work program of the Board of Commissioners	2018	- Hasil penelaahan atas pengaduan terkait perusahaan. - Hasil penelaahan atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta pelaksanaannya. - Penelaahan atas kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga. - Hasil evaluasi atas kegiatan CSR. - Hasil penelaahan atas kebijakan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal. - Hasil penelaahan atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. - Hasil penelaahan atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. - Hasil penelaahan atas gejala penurunan kinerja. - Hasil penelaahan atas kegiatan IIGF Institute. - Review results on complaints related to the Company. - Review results on accounting policies and preparation of financial statements as well as the implementation. - Review on the compliance of the Board of Directors to the Laws and Regulations and Agreements with Third Parties. - Evaluation results of CSR activities. - Review results of policies and implementation of the internal control system. - Review results on the procurement policy and its implementation. - Review results on the procurement policy and its implementation. - Review results on symptoms of performance degradation. - Review results on the activities of IIGF Institute.
9.	Evaluasi atas pelaksanaan RKAP Evaluation on WPB implementation	Tahun 2018 (Triwulanan) 2018 (Quarterly)	Hasil evaluasi atas pelaksanaan RKAP Results of the evaluation on WPB implementation
10.	Penelaahan terkait transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS Review on transactions or actions within the scope of authorities of the Board of Commissioners/GMS	2018	Memo hasil penelaahan atas usulan transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS Memo results of review on proposed transactions or actions within the scope of authorities of the Board of Commissioners/GMS
11	Penelaahan atas Laporan Bulanan Manajemen ke Dewan Komisaris/ Pemantauan kinerja Direksi Review of the Management Monthly Report to the Board of Commissioners/Monitoring the performance of the Board of Directors	Tahun 2018 (Bulanan) 2018 (Monthly)	Laporan Bulanan Komite Audit Audit Committee Monthly Report
12	Penelaahan atas Laporan Manajemen Triwulanan ke RUPS Review on the Quarterly Management Report to the GMS	Tahun 2018 (Bulanan) 2018 (Quarterly)	Laporan Komite Audit Audit Committee Report
13	Penyampaian tanggapan atas Laporan Tahunan 2017 Submission of response to the 2017 Annual Report	April 2018 April 2018	Konsep tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 Response concept of the Board of Commissioners on the Company's 2017 Annual Report



Komite Audit

Audit Committee

No	Kegiatan Activity	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Output
14	Pemantauan atas penerapan <i>area of improvement</i> (AOI) hasil penilaian GCG tahun 2017	Februari 2018	Hasil penelaahan atas penerapan AOI GCG tahun 2017
	Monitoring on the implementation of area of improvement (AOI), results of the 2017 GCG assessment	February 2018	Review results on the implementation of the 2017 GCG AOI
15	Pemantauan atas pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2018 oleh BPKP	Desember 2018 s.d. Januari 2019	Scoring penilaian GCG Tahun 2018
	Review on the implementation of the 2018 GCG application assessment by BPKP	December 2018 to January 2019	2018 GCG assessment scoring
16	Pemantauan atas kemajuan pelaksanaan audit LK Tahun 2017 oleh KAP	Januari s.d. Februari 2018	Rapat/Audiensi dengan KAP
	Monitoring on the progress of the 2017 Financial Institution (LK) audit implementation by KAP	January to February 2018	Meeting/Audience with the KAP
17	Penelaahan atas laporan hasil audit LK Tahun 2017 dari KAP	Februari 2018	Clearance Meeting dengan KAP
	Review on the 2017 LK audit results report from the KAP	February 2018	Clearance Meeting with the KAP
18	Pengadaan KAP Untuk Audit LK Th 2018	Juli s.d. Agustus 2018	Memo laporan hasil pengadaan KAP untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2018
	KAP procurement for the 2018 LK Audit	July to August 2018	Report memo of the KAP procurement results for the 2018 Financial Statements audit
19	Pengusulan penetapan KAP untuk audit LK Th 2018 kepada RUPS	September 2018	Konsep surat Dewan Komisaris kepada RUPS untuk penetapan KAP yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2018
	KAP determination proposal for the 2018 LK audit to the GMS	September 2018	Concept of the Board of Commissioners' letter to the GMS for the KAP determination that will perform the audit on the Company's 2018 Financial Statements
20	Penelaahan rencana audit LK Tahun 2018 oleh KAP	November 2018	Memo hasil laporan penelaahan rencana audit Laporan Keuangan Tahun 2018 oleh KAP
	Review on the 2018 LK audit by the KAP	November 2018	Report memo of review results on the 2018 Financial Statements audit plan by the KAP
21	Peningkatan kompetensi Anggota Komite Audit	Oktober 2018	Mengikuti <i>SECIIA Conference (European Confederation of Institutes of Internal Auditing)</i> Tahun 2018
	Competency improvement of Members of the Audit Committee	October 2018	Participate in the 2018 SECIIA Conference (European Confederation of Institutes of Internal Auditing)

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan yang dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit. Selama tahun 2018, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali. Dalam setiap rapat Komite Audit, dituangkan dalam risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Audit, agenda rapat, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

Audit Committee Meetings

The Audit Committee conducts a meeting at least once a month, led by the Head of Audit Committee or the most senior member of the Audit Committee, in the event the Head of Audit Committee is not present, as set forth in the Audit Committee Charter. During 2018, the Audit Committee has held 15 (fifteen) meetings. In each meeting of the Audit Committee, the minutes of meetings shall include the date of meeting, attendance of members of the Audit Committee, the meeting agenda, which then signed by all members of the Audit Committee present.

Frekuensi Rapat Anggota Komite Audit dan tingkat kehadiran Anggota Komite Audit selama tahun 2018 sebagai berikut:

Frequency of Audit Committee Meetings and Attendance of Members of the Audit Committee throughout 2018 is as follows:

No.	Tanggal Date	Tempat Rapat Meeting Venue	Agenda	Kehadiran Komite Audit Attendance of the Audit Committee		
				RR	AG	FI
1	29 Januari 2018	PT PII	Pembahasan Laporan Audit Internal PT PII Periode Triwulan IV Tahun 2017	Hadir	Hadir	Hadir
	29 January 2018		Discussion on Internal Audit Report of PT PII for the 4 th Quarter Period of 2017	Present	Present	Present
2	26 Februari 2018	Gd. Djuanda II	Pembahasan Laporan Manajemen PT PII Periode Januari 2018	Hadir	Hadir	Tidak Hadir
	26 February 2018		Discussion on Management Report of PT PII for the January 2018 Period	Present	Present	Not Present
3	5 Maret 2018	PT PII	Penyampaian Hasil Audit Laporan keuangan PT PII Tahun 2017	Hadir	Hadir	Tidak Hadir
	5 March 2018		Submission of Audit Results of PT PII's 2017 Financial Statements	Present	Present	Not Present
4	20 April 2018	PT PII	1. Pembahasan kebijakan akuntansi & cost accounting 2. pemantauan tindak lanjut rekomendasi Audit Internal & Eksternal 3. Penyampaian hasil audit atas fungsi IIGF Institute	Tidak Hadir	Hadir	Hadir
	20 April 2018		1. Discussion on accounting policies & cost accounting 2. monitoring on Internal & External Audit's recommendation follow-ups 3. Submission of audit results on the functions of the IIGF Institute	Not Present	Present	Present
5	25 April 2018	Gd. Djuanda II	Pembahasan laporan manajemen PT PII Periode Maret 2018	Hadir	Hadir	Hadir
	25 April 2018		Discussion of PT PII's management report for March 2018 Period	Present	Present	Present
6	25 Mei 2018	PT PII	Pembahasan laporan manajemen PT PII Periode April 2019	Hadir	Hadir	Hadir
	25 May 2018		Discussion of PT PII's management report for April 2019 Period	Present	Present	Present
7	22 Juni 2018	Gd. Djuanda II	Pembahasan laporan manajemen PT PII Periode Mei 2019	Hadir	Hadir	Hadir
	22 June 2018		Discussion of PT PII's management report for May 2019 Period	Present	Present	Present
8	31 Juli 2018	Gd. Djuanda II	1. Pembahasan Pemantauan Rekomendasi Audit Internal & eksternal triwulan II 2018 2. Penyampaian laporan audit Proyek Jalan Tol Probawangi	Hadir	Hadir	Hadir
	31 July 2018		1. Discussion on Monitoring of Internal & External Audit Recommendations in Quarter II of 2018 2. Submission of Probawangi Toll Road Project audit report	Present	Present	Present



Komite Audit

Audit Committee

No.	Tanggal Date	Tempat Rapat Meeting Venue	Agenda	Kehadiran Komite Audit Attendance of the Audit Committee		
				RR	AC	FI
9	20 Agustus 2018	Gd. Djuanda II	Pembahasan Laporan Menejemen PT PII Periode Juli 2018	Hadir	Hadir	Hadir
	20 August 2018		Discussion of Management Report from PT PII for the July 2018 Period	Present	Present	Present
10	19 September 2018	Gd. Djuanda II	Pembahasan Laporan Menejemen PT PII Periode Agustus 2018	Hadir	Hadir	Hadir
	19 September 2018		Discussion of Management Report from PT PII for the August 2018 Period	Present	Present	Present
11	26 Oktober2018	Gd. Djuanda II	1. Pembahasan tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal & Eksternal 2. Pembahasan <i>Walk Through Claim</i> .	Tidak Hadir	Hadir	Hadir
	26 October2018		1. Discussion of the Follow-Up recommendations on the Internal & External Audits. 2. Discussion of the Walk Through Claim.	Not Present	Present	Present
12	21 November 2018	PT PII	<i>Kick Off meeting - Audit plan for the year ending 31 Des 2018 dengan Tim PwC</i>	Hadir	Hadir	Hadir
	21 November 2018		Kick Off meeting - Audit plan for the year ending 31 Dec 2018 with the PwC Team	Present	Present	Present
13	20 Desember 2018	Gd. Djuanda II	Pembahasan Teknis terkait Penelaahan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Audit Internal, Progres Tindak Lanjut Triwulan, dan Progres IKU	Hadir	Hadir	Hadir
	20 December 2018		Technical Discussion related to the Review on the Annual Audit Work Program (PKAT) of Internal Audit, Quarterly Follow-Up Progress, and KPI Progress	Present	Present	Present
				82%	100%	91%

Keterangan | Note:

RR: M. Rahman Ritza

AG: Ahmad Ghufro

FI: Ferry Irawan

Selain itu, Komite Audit juga mengikuti rapat-rapat Dewan Komisaris, baik yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sendiri atau gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Rapat-rapat tersebut adalah sebagai berikut:

In addition, the Audit Committee also attends Board of Commissioners meetings, organized by the Board of Commissioners or joint Board of Commissioners and Board of Directors. The meetings are as follows:

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Nomor	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Anggota Komite Audit Attendance of Audit Committee Members
1	30 Januari 2018	Ris-02/PII/DK/0118	1. <i>Update Performance</i> 2017 PT PII 2. <i>Pebahasan Laporan Manajemen</i> PT PII periode Desember 2017 3. <i>Laporan Monitoring</i> Proyek yang Dijamin PT PII 4. <i>Kesimpulan dan Tindak Lanjut</i>	100%
	30 January 2018		1. PT PII 2017 Update Performance 2. Discussion of PT PII's Management Report for the December 2017 period 3. Report on Project Monitoring Guaranteed by PT PII 4. Conclusion and Follow-up	



No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Nomor	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Anggota Komite Audit Attendance of Audit Committee Members
2	27 Februari 2018 27 February 2018	Ris-04/PII/DK/0218	1. Pembahasan Laporan Manajemen PT PII Periode Januari 2018 2. Pembahasan Rencana Revisi RKAP PT PII Tahun 2018 1. Discussion of PT PII's Management Report for the January 2018 Period 2. Discussion on PT PII's 2018 WPB Revision Plan	100%
3	23 Maret 2018 23 March 2018	Ris-06/PII/DK/0318	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i>/Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Manajemen PT PII Periode Februari 2018 3. <i>Update</i> Laporan <i>Monitoring</i> Proyek yang Dijamin PT PII 4. Agenda Lain-Lain 1. Discussion on Pending Matters/Follow-up of Previous Meeting 2. Discussion of PT PII's Management Report for the February 2018 Period 3. Update of Monitoring Report on Projects guaranteed by PT PII 4. Other Agenda	100%
4	26 April 2018 26 April 2018	Ris-08/PII/DK/0418	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i>/Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Isu-Isu Strategis Bisnia Perseroan 3. Laporan Manajemen PT PII Periode Maret 2018 4. Pembahasan IKU Individu Direksi 1. Discussion on Pending Matters/Follow-up of Previous Meeting 2. Discussion on Strategic Issues of the Company's Business 3. PT PII Management Report for the March 2018 Period 4. Discussion on Individual KPI of the Board of Directors	100%
5	14 Mei 2018 14 May 2018	Ris-09/PII/DK/0518	1. Persiapan RUPS Laporan Tahunan PT PII Tahun 2017 2. Persiapan RUPS Luar Biasa Perubahan RKAP PT PII Tahun 2018 1. GMS Preparation for PT PII's 2017 Annual Report 2. Extraordinary GMS Preparation for Amendment to PT PII's 2018 WPB	100%
6	30 Mei 2018 30 May 2018	Ris-10/PII/DK/0518	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i>/Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Laporan Manajemen PT PII Periode April 2018 1. Discussion on Pending Matters/Follow-up of Previous Meeting 2. PT PII Management Report for the April 2018 Period	100%
7	29 Juni 2018 29 June 2018	Ris-12/PII/DK/0618	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i>/Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Laporan Manajemen PT PII Periode Mei 2018 1. Discussion on Pending Matters/Follow-up of Previous Meeting 2. PT PII Management Report for the May 2018 Period	100%
8	25 Juli 2018 25 July 2018	Ris-15/PII/DK/0718	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i>/Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Laporan Manajemen PT PII Periode Juni 2018 3. Pembahasan <i>Roadmap</i> IT 1. Discussion on Pending Matters/Follow-up of Previous Meeting 2. PT PII Management Report for the June 2018 Period 3. IT Roadmap Discussion	100%



Komite Audit

Audit Committee

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Nomor	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Anggota Komite Audit Attendance of Audit Committee Members
9	24 Agustus 2018	Ris-17/PII/DK/0818	1. Pembahasan Laporan Manajemen PT PII Periode Juli 2018 2. Pembahasan <i>Walk Through Claim</i>	100%
	24 August 2018		1. Discussion on PT PII Management Report for the June 2018 Period 2. Discussion on Walk Through Claim	
10	27 September 2018	Ris-19/PII/DK/0918	1. Laporan Manajemen Periode Agustus 2018 2. Pembahasan Rancangan RKAP	100%
	27 September 2018		1. Management Report for the August 2018 Period 2. Discussion on the WPB Draft	
11	30 Oktober 2018		1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> 2. Pembahasan Laporan Manajemen PT PII Periode September 2018 3. Pembahasan RKAP PT PII Tahun 2019	100%
	30 October 2018		1. Discussion on Pending Matters 2. Discussion on PT PII Management Report for the September 2018 Period 3. Discussion on the 2019 PT PII's WPB	
12	21 November 2018		1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> 2. Pembahasan Laporan Manajemen PT PII Periode Oktober 2018	100%
	21 November 2018		1. Discussion on Pending Matters 2. Pembahasan Laporan Manajemen PT PII Periode Oktober 2018	
13	10 Desember 2018		Persiapan RUPS RKAP PT PII Tahun 2019	100%
	10 December 2018		Preparation for PT PII's 2019 WPB GMS	



Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

Function of Nomination and Remuneration Committee

PT PII tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun demikian, fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan mengenai Suksesi Direksi

PT PII menyadari bahwa estafet kepemimpinan dalam organisasi perlu dibangun untuk memastikan keberlanjutan Perseroan. Untuk itu, diperlukan suksesi Direksi yang dapat terus melanjutkan kepemimpinan perusahaan. PT PII memberikan kesempatan kepada pejabat satu level di bawah Direksi untuk mengikuti proses *fit and proper test* yang dilaksanakan dengan keputusan akhir berada di Pemegang Saham/RUPS.

PT PII has not established the Nomination and Remuneration Committee. However, the function of the Nomination and Remuneration Committee is executed by all members of the Board of Commissioners.

Succession Policy of the Board of Directors

PT PII is aware that leadership continuity within the organization needs to be established to ensure the Company's sustainability. Therefore, succession of the Board of Directors is necessary to continue the Company's leadership. The Company provides the opportunity for officers one level under the Board of Directors to participate in the fit and proper test with the final decision made by the Shareholder/GMS.

Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko merupakan Organ yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk memantau dan mengevaluasi penerapan tata kelola Perseroan yang baik khususnya yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko.

The Risk Monitoring Committee is an organ that assists the Board of Commissioners in carrying out the duties and functions of the Board of Commissioners to monitor and evaluate the implementation of good corporate governance, especially in relations to the application of risk management.

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan untuk pertama kali pada tanggal 15 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-03/PII/KOM/03/2018 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko PT PII yang antara lain memuat latar belakang dan dasar pembentukan, tugas, tanggung jawab dan wewenang, struktur dan persyaratan keanggotaan, rapat, pola kerja, rapat, pelaporan, serta masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko.

RISK MONITORING COMMITTEE CHARTER

The Risk Monitoring Committee Charter was established for the first time on 15 March 2018 based on the Decree of the Board of Commissioners Number KEP-03/PII/KOM/03/2018 on the Charter of PT PII Risk Monitoring Committee which contains, among others, background and basis of establishment, responsibility and authority, membership structure and requirements, meetings, work patterns, meetings, reporting, as well as term of office of members of the Risk Monitoring Committee.



Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee

KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-01/KOM/PII/01/2018 tanggal 27 Januari 2018. Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua dan 2 (dua) orang pihak independen.

Pada tahun 2018 terjadi 2 (dua) kali penggantian Ketua Pemantau Risiko, yaitu pada bulan Mei 2018, Sdr. Iskandar diganti oleh Sdr. Langgeng Subur (Alm.) serta Sdri. Mariatul Aini menggantikan Sdr. Langgeng Subur (Alm.) pada bulan Desember 2018.

Per 31 Desember 2018, komposisi Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Mariatul Aini	Ketua Chairwoman
2	Iqbal Islami	Anggota Member
3	Imam Wahyudi	Anggota Member

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

Mariatul Aini, Ketua Komite Pemantau Risiko

Profil lengkap disajikan pada bagian Profil Perseroan

Iqbal Islami, Anggota

Iqbal Islami mulai bertugas sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018. Selain itu, saat ini Beliau juga menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko, Beliau pernah bertugas sebagai anggota Komite Audit di PT PII selama lima tahun sejak 1 November 2012 sampai dengan 30 Oktober 2017. Sebelum bertugas sebagai anggota Komite Audit di PT PII, beliau juga telah pernah bertugas sebagai anggota Komite Audit pada dua BUMN dan satu Perseroan terbuka. Dalam bidang akademis, beliau juga tercatat sebagai dosen

MEMBERSHIP OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee was established based on the Board of Commissioners Decree Number KEP-01/KOM/PII/01/2018 dated 27 January 2018. The Risk Monitoring Committee consists of 3 (three) members, consisting of 1 (one) member of the Board of Commissioners as the Chairperson and 2 (two) independent parties.

In 2018 there were 2 (two) replacements of the Chairman of the Risk Monitoring Committee, namely in May 2018, Mr. Iskandar was replaced by Mr. Langgeng Subur (Dec.) and Ms. Mariatul Aini replaces Mr. Langgeng Subur (Dec.) in December 2018.

As of 31 December 2018, the composition of the Risk Monitoring Committee is as follows:

PROFILES OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

Mariatul Aini, Chairwoman of the Risk Monitoring Committee

The full profile is presented in the Company Profile section

Iqbal Islami, Anggota

Iqbal Islami began serving as a Member of the Risk Monitoring Committee effectively since 1 February 2018. In addition, currently, he is also serving as the Head of Budget and Treasury Training Center, Education and Training Agency, Ministry of Finance.

Prior to serving as a Member of the Risk Monitoring Committee, he had served as a member of the Audit Committee at PT PII for five years from 1 November 2012 to 30 October 2017. Prior to serving as member of the Audit Committee of the Company, he has also served as member of Audit Committee in two SOEs and one listed company. Academically, he is also a Lecturer at Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)



di Politeknik Keuangan Negara STAN sejak tahun 1991. Manajemen strategik, *finance*, *corporate governance*, manajemen risiko dan keuangan negara adalah bidang-bidang yang menjadi keahliannya.

Beliau memperoleh gelar akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan gelar Master of Business Administration dalam bidang *finance* dari Case Western Reserve University, Ohio, USA.

Imam Wahyudi, Anggota

Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-01/KOM/PII/01/2018. Beliau lahir di Kebumen pada tanggal 23 Agustus 1976. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Kepala Seksi Barang Milik Negara III A, Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejak tahun 2018.

Beliau merupakan pejabat karir di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya, Beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IC, (2016-2018), Kepala Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIB (2011-2016), Kepala Barang Milik Negara II C-2 (2009-2011) serta Kepala Seksi Hukum dan Informasi, KPKNL Jakarta I.

Beliau menamatkan pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2002.

PERIODE JABATAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

INDEPENDENSI DAN PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen dalam melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya hanya kepada Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak

since 1991. Strategic Management, Finance, Corporate Governance and State Budget are his specialty.

He holds an accounting degree from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) and a Masters Degree in Business Administration in finance from Case Western Reserve University, Ohio, USA.

Imam Wahyudi, Anggota

Serves as a Member of the Risk Monitoring Committee effectively since 1 February 2018 based on the Board of Commissioners' Decree No. KEP-01/KOM/PII/01/2018. He was born in Kebumen on 23 August 1976. Currently he also serves as the Head of State Assets III A, Directorate of State Assets, Directorate General of State Assets since 2018.

He is a career officer in the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Previously, he served as Section Head of State Assets Separated IC (2016-2018), Section Head of State Assets Separated IIIB (2011-2016), Head of State Assets II C-2 (2009-2011), and Section Head of Legal and Information, KPKNL Jakarta I.

He graduated from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara in 2002.

TERM OF OFFICE OF MEMBERS OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

The term of office of a member of the Risk Monitoring Committee who is not a member of the Board of Commissioners at maximum is 3 (three) years, which may be reappointed once for 2 (two) years of term of office, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time.

INDEPENDENCY AND REQUIREMENTS OF MEMBERS OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee acts independently in carrying out its duties and reports its work only to the Board of Commissioners. All members of the Risk Monitoring Committee are independent parties,



Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee

independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham.

namely have no financial, management relationship, share ownership and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Shareholder.

No	Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Family Relationship With			Hubungan Keluarga dengan Family Relationship With		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1	Mariatul Aini	Anggota Dewan Komisaris Member of the Board of Commissioners			x	x	x
2	Iqbal Islami	x	x	x	x	x	x
3	Imam Wahyudi	x	x	x	x	x	x

Persyaratan Anggota Komite Pemantau Risiko

- Memiliki integritas yang baik, kompetensi, dan pengalaman kerja yang cukup di bidang pemantauan manajemen risiko.
- Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan pelaksanaan manajemen risiko dan laporan keuangan.
- Mampu berkomunikasi secara efektif.
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari luar Perseroan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat tiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- Bukan merupakan orang yang bekerja pada Perseroan dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan manajemen risiko Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- Tidak mempunyai kepentingan dan hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

Membership Requirements of the Risk Monitoring Committee

- Has good integrity, competency, as well as sufficient work experience in risk management monitoring.
- Has sufficient knowledge to read and understand reports on the implementation of risk management and financial statements.
- Able to communicate effectively.
- Provide sufficient time to implement its duties.
- Members of the Risk Monitoring Committee from outside the Company shall have no family or seminal relationship up to the third degree, either by vertical or horizontal lines against fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.
- Not a person who works for the Company and has the authority and responsibility to plan, lead, or control as well as oversee the Company's risk management activities in the last 6 (six) months.
- Has no business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.
- Has no other interests and relationships that may affect its ability to act independently as a member of the Risk Monitoring Committee.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Pemantau Risiko PT PII diatur sebagai berikut:

1. Tugas:

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk memantau dan mengevaluasi penerapan tata kelola Perseroan yang baik khususnya yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko serta memberikan pendapat berupa saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan namun tidak terbatas pada:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas unit kerja Perseroan yang membidangi manajemen risiko.
3. Melakukan *review* dan evaluasi atas laporan pelaksanaan manajemen risiko yang dibuat oleh Perseroan.
4. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Perseroan.
5. Melakukan evaluasi atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan manajemen risiko.
6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2. Tanggung Jawab:

1. Melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab dengan menjunjung tinggi integritas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.
2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
3. Menyediakan waktu yang cukup untuk pelaksanaan tugasnya.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

The duties, responsibilities, and authorities of the Risk Monitoring Committee of PT PII are regulated as follows:

1. Duties:

The Risk Monitoring Committee has the task of assisting the Board of Commissioners in carrying out the duties and functions of the Board of Commissioners to monitor and evaluate the implementation of good corporate governance, especially in relations to the implementation of risk management as well as to provide opinions and recommendations relating to but not limited to:

1. Evaluate the conformity of risk management policies with the implementation of the policy.
2. Monitoring and evaluating the implementation of duties of the Company's work units in charge of risk management.
3. Review and evaluate reports on the implementation of risk management conducted by the Company.
4. Monitor the adequacy of the risk management identification, assesment, monitoring, control, and information systems carried out by the Company.
5. Evaluate the Company's compliance with the applicable laws and regulations related to risk management.
6. Perform other duties given by the Board of Commissioners.

2. Responsibilities:

1. Perform its duties in a professional and responsible manner by upholding integrity in every work performed.
2. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information from both internal and external parties, and shall only be used for the purpose of performing its duties.
3. Provide sufficient time for the implementation of its duties.



Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee

3. Wewenang :

1. Mencari dan memperoleh berbagai informasi termasuk dokumen yang diperlukan dari dalam Perseroan atau pihak lainnya.
2. Meminta keterangan dan melakukan komunikasi dengan para pejabat dan pegawai Perseroan.
3. Mendapatkan masukan dan/atau saran pihak independen dari luar Perseroan, jika diperlukan.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3. Authorities :

1. Search and obtain various information including documents required from within the Company or other parties.
2. Request information and communicate with the Company's officers and employees.
3. Acquire input and/or advice from independent parties outside the Company, if needed.
4. To exercise other authorities granted by the Board of Commissioners.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2018

Work Program and Duty Implementation of the Risk Monitoring Committee in 2018

No	Kegiatan Activity	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Output
1.	Penelaahan atas Laporan Manajemen Risiko. Review on the Risk Management Report.	Triwulanan Quarterly	1. Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko 2018
2.	Penelaahan Laporan Manajemen Triwulanan dengan fokus aspek manajemen risiko. Review on the Quarterly Management Report focusing on the risk management aspect.	Triwulanan Quarterly	2. Laporan Komite Pemantau Risiko Triwulan I 2018
3.	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya. Supervision/provision of advice on risk management policies and the implementation.	Semesteran	3. Laporan Komite Pemantau Risiko Triwulan II 2018
4.	Penelaahan atas <i>monitoring</i> proyek. Review of project monitoring.	Triwulanan Quarterly	4. Laporan Komite Pemantau Risiko Triwulan III 2018
5.	Penelaahan atas kebijakan TI dan pelaksanaannya. Review of IT policy and its implementation.	September 2018 September 2018	5. Laporan Komite Pemantau Risiko Triwulan IV 2018
6.	Memberi masukan aspek manajemen risiko dalam tanggapan Dewan Komisaris atas rancangan RKAP yang disusun Direksi. Provide input on risk management aspects in the response of the Board of Directors to the WPB draft prepared by the Board of Directors.	September-Oktober 2018 September-October 2018	6. Memo hasil penelaahan atas usulan transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS
7.	Monitoring atas kegiatan IIGF Institute Monitoring on IIGF Institute activities	Oktober 2018 October 2018	1. Work Plan of Risk Monitoring Committee for 2018
			2. Risk Monitoring Committee Report - Quarter I 2018
			3. Risk Monitoring Committee Report - Quarter II 2018
			4. Risk Monitoring Committee Report - Quarter III 2018
			5. Risk Monitoring Committee Report - Quarter IV 2018
			6. Memo on review results of proposed transactions or activities within the authority of the Board of Commissioners/GMS

Laporan Hasil Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2018

Sesuai dengan Program Kerja, selama tahun 2018 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi, kajian, memberikan rekomendasi serta menyiapkan konsep surat tanggapan atas rencana penjaminan serta arahan Dewan Komisaris terhadap Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Satelit Multifungsi.
2. Melakukan evaluasi, kajian, memberikan rekomendasi serta menyiapkan konsep surat tanggapan atas rencana penjaminan serta arahan Dewan Komisaris terhadap Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Jalan Tol Semarang – Demak.
3. Melakukan pembahasan dan evaluasi pelaksanaan tugas unit kerja Persero yang membidangi Manajemen Risiko terutama atas rumusan kebijakan dan SOP klaim.
4. Melakukan pembahasan dan evaluasi pelaksanaan tugas unit kerja Persero yang membidangi monitoring proyek mengenai proyek-proyek yang telah dijamin dan potensi terjadinya klaim.
5. Bersama dengan Organ Komisaris yang lain, melakukan *review* dan evaluasi:
 - a. Kebijakan dan *roadmap* TI dan pelaksanaannya.
 - b. Kegiatan IIGF Institute.
 - c. Pelaksanaan kegiatan CSR Perseroan.
 - d. Melakukan pembahasan atas usulan RKAP dan IKU tahun 2018.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 10 kali, baik bersama Organ Komisaris lain maupun dengan divisi-divisi Perseroan dengan agenda sebagai berikut:

Results Report on Activities of the Risk Monitoring Committee in 2018

In accordance with the Work Program, during 2018 the Risk Monitoring Committee has conducted the following activities:

1. Evaluate, review, provide recommendations and prepare the draft response letters for guarantee plans as well as the directives of the Board of Commissioners on Guarantee of Cooperation Project of Government Business Entity Multifunctions Satellite.
2. Evaluate, review, provide recommendations and prepare the draft response letters for the guarantee plans as well as directives of the Board of Commissioners on the Guarantee of Cooperation Project of the Government Business Entity Semarang - Demak Toll Road.
3. Discuss and evaluate the implementation of duties of the Company's work unit in charge of Risk Management, particularly on policy formulation and claim SOP.
4. Discuss and evaluate the implementation of duties of the Company's work units in charge of project monitoring regarding guaranteed projects and potential claims.
5. Together with the other Organs of the Board of Commissioners, conduct reviews and evaluations on:
 - a. IT policies and roadmap and the implementation.
 - b. IIGF Institute activities.
 - c. Implementation of the Company's CSR activities.
 - d. Discuss the proposed 2018 WPB and KPI.

Risk Monitoring Committee Meeting

During 2018, the Risk Monitoring Committee has implemented 10 meetings, both with other Organs of the Board of Commissioner and with the company's divisions with the following agenda:

Nama/Jabatan Name/Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Mariatul Aini	Pengangkatan sebagai ketua KPR (sesuai Kep Dekom No KEP-10/KOM/PII/12/2018) tanggal 28 Desember 2018. Mulai efektif mengikuti kegiatan Komite Pemantau Risiko pada bulan Januari 2019. Appointment as chairwoman of the Risk Monitoring Committee (in accordance with the Board of Commissioners Decree No. KEP-10/KOM/PII/12/2018) dated 28 December 2018. Effectively participating in the activities of the Risk Monitoring Committee in January		
Iqbal Islami	10	10	100%
Imam Wahyudi	10	7	70%



Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran KPR Risk Monitoring Committee Attendance			
			I	LS	II	IW
1	14 Februari 2018	Paparan Pengelolaan Risiko PT PII	Hadir	-	Hadir	Tidak Hadir
	14 February 2018	Description of Risk Management of PT PII	Present		Present	Not Present
2	28 Februari 2018	1. Pembahasan Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2018 2. Pembahasan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko	Hadir	-	Hadir	Hadir
	28 February 2018	1. Discussion on the 2018 Risk Monitoring Committee Work Program 2. Discussion on the Risk Monitoring Committee Work Guidelines	Present		Present	Present
3	14 Maret 2018	Finalisasi Piagam Komite Pemantau Risiko	Hadir	-	Hadir	Tidak Hadir
	14 March 2018	Finalization of the Risk Monitoring Committee Charter	Present		Present	Not Present
4	25 April 2018	Pembahasan Sistem <i>Monitoring</i> Proyek PT PII	Hadir	-	Hadir	Hadir
	25 April 2018	Discussion on the Monitoring System of PT PII Project	Present		Present	Present
5	20 Juli 2018	Pembahasan Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Semester II	-	Hadir	Hadir	Hadir
	20 July 2018	Discussion on the Semester II Risk Monitoring Committee Work Plan		Present	Present	Present
6	16 Agustus 2018	1. Paparan Pelaksanaan Kegiatan dan Risiko pada Divisi Pengembangan Bisnis 2. Tanya Jawab	-	Hadir	Hadir	Hadir
	16 August 2018	1. Description of the Implementation of Activity and Risks in the Business Development Division 2. Q&A		Present	Present	Present
7	16 Oktober 2018	1. Pembahasan <i>Risk Management</i> 2. Pembahasan Pelaksanaan PDF dan Penjaminan Proyek KA Makassar - Parepare 3. Pembahasan Pelaksanaan PDF dan Penjaminan RS Kanker Dharmais	-	Hadir	Hadir	Hadir
	16 October 2018	1. Risk Management Discussion 2. Discussion on Implementation of PDF and Project Guarantee of the Makassar - Parepare Railway 3. Discussion on the Implementation of PDF and Guarantee of Dharmais Cancer Hospital		Present	Present	Present
8	16 November 2018	1. <i>Monitoring</i> proyek yang telah dijamin oleh PT PII 2. <i>Monitoring</i> kegiatan IIGF Institute		-	Hadir	Tidak Hadir
	16 November 2018	1. Monitoring of projects guaranteed by PT PII 2. Monitoring of IIGF Institute activities			Present	Not Present
9	28 November 2018	Pembahasan Rapat Teknis Jalan Tol Semarang-Demak		-	Hadir	Hadir
	28 November 2018	Discussion of the Semarang-Demak Toll Road Technical Meeting			Present	Present
10	26 Desember 2018	1. <i>Review</i> Proyek yang telah dijamin PT PII 2. Persiapan pembayaran klaim dan proses regres 3. Rencana kerja divisi manajemen risiko	-	-	Hadir	Hadir
	26 December 2018	1. Review on Projects guaranteed by PII 2. Prepration of claim payment and regres process 3. Work plan of the risk management division			Present	Present
Persentase kehadiran Attendance percentage					100%	70%



Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan PT PII mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

The implementation of PT PII's Corporate Secretary functions refers to the Minister of Finance Regulation Number 88/PMK.06/2015 on the Implementation of Good Corporate Governance in Limited Liability Company under the Development and Supervision of the Minister of Finance.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN



PROFILE OF CORPORATE SECRETARY

Indra Pradana Singawinata

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

44 tahun, Kewarganegaraan Indonesia
44 years old, Citizenship Indonesian

Berdomisili di Jakarta. Ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 1 Januari 2017 berdasarkan SK Direksi tanggal 27 Desember 2016.

Domiciled in Jakarta. Appointed as the Company's Corporate Secretary since 1 January 2017 based on the Decree of the Board of Directors dated 27 December 2016.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1997, meraih gelar Magister di bidang Manajemen Audit dari Universitas Indonesia pada tahun 2001 dan meraih gelar Doktor Political Economic and Development Sociology dari Asia Pasific University (APU), Beppu-Jepang pada tahun 2007.

Obtained a Bachelors Degree in Economics from Trisakti University in 1997, earned a Masters Degree in Audit Management from the University of Indonesia in 2001 and earned a Doctorate Degree in Political Economic and Development Sociology from the Asia Pacific University (APU), Beppu-Japan in 2007.

Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Agustus tahun 2015. Sebelum menjabat sebagai SVP Corporate Secretary, beliau merupakan SVP Business Development and Communication.

He joined PT PII in August 2015. Prior to serving as SVP Corporate Secretary, he served as SVP of Business Development and Communication.



Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

KEDUDUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi kesekretariatan Perusahaan, Direksi mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung antara Direksi dengan Manajemen, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham serta wakil Perusahaan dalam berhubungan dengan Pemangku Kepentingan yang berkaitan dengan Perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
3. Sebagai penghubung antara Direksi dengan Manajemen, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham serta wakil Perusahaan dalam berhubungan dengan *Stakeholders* yang berkaitan dengan Perusahaan.
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, antara lain Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
5. Mengadakan program pengenalan mengenai Perusahaan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya. Program pengenalan yang dimaksud meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola oleh Perusahaan;
 - b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan

POSITION OF THE CORPORATE SECRETARY

In order to conduct the Company's secretarial function, the Board of Directors appoints a Corporate Secretary. The Corporate Secretary is the liaison between the Board of Directors with the Management, Board of Commissioners, and Shareholders as well as the Company's representative in dealing with Stakeholders related to the Company.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is in charge of and responsible for:

1. Ensure that the Company complies with the regulations regarding the requirement for disclosure in line with the implementation of Good Corporate Governance principles.
2. Provide information required by the Board of Directors and Board of Commissioners on a regular basis and/or at any time if requested.
3. As a liaison between the Board of Directors with the Management, Board of Commissioners, and Shareholders and as the Company's representative in dealing with Stakeholders related to the Company.
4. Administer and maintain the Company's documents, including List of Shareholders, Special List, and Minutes of Board of Directors Meeting, Board of Commissioners Meeting and the GMS.
5. Conduct introduction program of the Company to the first-time appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners. The introduction program includes:
 - a. Implementation of GCG principles by the Company;
 - b. Overview about the Company related with the objectives, nature, scope of activity, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plan, competitive position, risks, and other strategic issues;
 - c. Information on the delegated authorities, internal and external audits, internal control system and policy, including the Audit Committee; and



- d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

- d. Information on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as prohibited aspects.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas yang rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah ini.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF CORPORATE SECRETARY

During 2018, the Corporate Secretary has performed its duties with details presented in the following table.

Materi Material	Pelaksanaan Tugas Impelementation of Duties
Corporate Governance	a. Mengikuti rapat-rapat Dewan Komisaris, Direksi serta rapatgabungan Dewan Komisaris dan Direksi, yang antara lain membahas: • Laporan <i>monitoring</i> proyek • Laporan manajemen bulanan • Pembahasan RKAP b. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga melakukan rapat teknis dengan sejumlah pihak, yaitu: • Organ Dewan komisaris • Tim KND Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan c. Penelaahan Peraturan Peryundang-undangan, yang antar alian terkait dengan: • Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur • Peraturan lain d. Penilaian Penerapan GCG • Pelaksanaan penilaian penerapan GCG oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan skor 80,553 (kategori "Baik")
Corporate Governance	a. Attend the Board of Commissioners meetings, Board of Directors meetings, and joint meetings of the Board of Commissioners and Directors, which discussed, among others: • Project monitoring report • Monthly management report • WPB discussion b. In addition, the Corporate Secretary also conducts technical meetings with a number of parties, namely: • Organs of the Board of Commisioners • KND Team of the Directorate General of State Assets, Ministry of Finance c. Review of legislation, which among others related to: • Government Regulation Number 57 of 2017 on Addition of Investment by the Government of the Republic of Indonesia to the Capital of the Company PT Penjamin Infrastruktur Indonesia • Minister of Finance Regulation Number 73/PMK.08/2018 on Facilities for the Preparation and Implementation of Transactions of Government Cooperation Projects with Business Entities in the Provision of Infrastructure • Other regulations d. GCG Implementation Assessment • The implementation of GCG assessment by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) with a score of 80,553 (category "Good")



Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Materi Material	Pelaksanaan Tugas Impelementation of Duties
Corporate Event	Melaksanakan kegiatan-kegiatan Perseroan, yang antara lain: • <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan <i>Non KPBU</i>, Februari 2018 • Pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Regres dan Perjanjian Penjaminan pada Proyek SPAM Lampung, Februari 2018 • <i>Stakeholder Gathering</i> dengan Sekretariat Kementerian Keuangan
Corporate Event	Carry out the Company's activities, among others: • Focus Group Discussion (FGD) Provision and Implementation of Non PPP Guarantee, February 2018 • The signing of the Cooperation Agreement, Regres Agreement and Guarantee Agreement of the Lampung SPAM Project, February 2018 • Stakeholder Gathering with the Ministry of Finance Secretariat
Stakeholder Relations	Membina hubungan dengan para pemangku kepentingan Perseroan. Realisasi kegiatannya, antara lain" • Malam apresiasi bersama Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan • <i>Media briefing</i> dan <i>media gathering</i>
Stakeholder Relations	Establish relationships with the Company's stakeholders. The realization of activities were, among others" • Appreciation Night with the Minister of PUPR and the Minister of Transportation • Media briefing and media gathering
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, yang antara lain kegiatannya adalah: • Penyaluran beasiswa untuk mahasiswa berprestasi bersama Yayasan Karya Salemba Empat, Februari 2018
Corporate Social Responsibility	Conduct corporate social responsibility activities, which includes: • Delivery of scholarships for outstanding students with the Karya Salemba Empat Foundation, February 2018



Audit Internal

Internal Audit

Audit Internal merupakan salah satu unsur dari Sistem Pengendalian Internal (SPI), yaitu sebagai *third line of defense* yang memiliki peran penting untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha PT PII, serta bertanggung jawab untuk mengawal pencapaian visi dan misi Perseroan. Pelaksanaan fungsi audit internal di PT PII merupakan tugas dari Audit Internal.

Audit Internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *internal control*, *risk management* dan *governance process*.

PROFIL KEPALA AUDIT INTERNAL

Harlina Hunaida

Plt SVP Audit Internal

Wanita kelahiran 35 tahun yang lalu ini telah bergabung dengan PT PII sejak 3 Desember 2012. Sebelumnya Beliau telah berkarya sebagai akuntan publik profesional selama 6 tahun di salah satu Kantor Akuntan Publik Empat Besar (*Big Four*) di Jakarta, yaitu *PricewaterhouseCoopers*.

Latar belakang pendidikan Beliau adalah S1 Akuntansi di Universitas Tarumanegara tahun 2006, kemudian Beliau melanjutkan studi pendidikan profesi akuntansi di Universitas Indonesia dan telah memperoleh Sertifikasi Akuntan Publik (*Certification of Public Accountant/CPA*) di tahun 2009. Selain itu, Beliau terdaftar sebagai *Indonesian Chartered Accountant* (ICA) di tahun 2014 dan memperoleh sertifikasi Enterprise Risk Management Certified Profesional (ERMCP) pada tahun 2018.

Internal Audit is one of elements of Internal Control System, namely as the third line of defense with an important role to protect and secure the Company's business activities, as well as being responsible to safeguard the Company's achievement of its vision and mission. Implementation of internal audit function at the Company is the duty of Internal Audit.

Internal Audit supports the organization to achieve its objectives through systematic and well-ordered approach to evaluate and improve the effectiveness of internal control, risk management and governance process.

PROFILE OF HEAD OF INTERNAL AUDIT

Harlina Hunaida

Internal Audit SVP Ad-Interim

Harlina Hunaida born 35 years ago and has joined PT PII since 3 December 2012. Previously, she has worked as a professional public accountant for 6 years in one of the Big Four Public Accounting Firm in Jakarta, namely *PricewaterhouseCoopers*.

She earned Bachelor's Degree in Accounting at Tarumanegara University in 2006, and then continued her accounting studies at the University of Indonesia and had obtained a Certification of Public Accountant (CPA) in 2009. In addition, she was registered as Indonesian Chartered Accountant (ICA) in 2014 and obtained the Enterprise Risk Management Certified Profesional (ERMCP) certification in 2018.



Audit Internal

Internal Audit

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKANNYA

Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

PARTIES APPOINTING AND DISMISSING

The Head of the Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Jumlah Auditor Audit Internal per 31 Desember 2018 Number of Internal Audit Auditors as of 31 December 2018

No	Jabatan Position	Jumlah Total
1	Plt Senior Vice President Audit Internal Internal Audit Senior Vice President Ad-Interim	1
2	Assistant Vice President Audit Internal Internal Audit Assistant Vice President	1
3	Senior Manager Audit Internal Internal Audit Senior Manager	1
4	Staf Audit Internal Internal Audit Staff	1

Jumlah Auditor Audit Internal yang telah Bersertifikasi per Desember 2018 Number of Certified Auditors of Internal Audit as of December 2018

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Jumlah Total	Penyelenggara Issuer
Certification for Public Accountant (CPA) Certification for Public Accountant (CPA)	1	Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Indonesian Institute of Certified Public Accountant
Indonesian Chartered Accountant (ICA) Indonesian Chartered Accountant (ICA)	1	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Institute of Indonesia Chartered Accountants
Enterprise Risk Management Certified Profesional (ERMCP) Enterprise Risk Management Certified Profesional (ERMCP)	1	Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Enterprise Risk Management Academy (ERMA)

PERNYATAAN BAHWA TELAH MEMILIKI PEDOMAN ATAU PIAGAM (CHARTER/MANUAL) UNIT AUDIT INTERNAL

Sejak 16 Agustus 2011, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang kemudian diperbaharui pada 14 Agustus 2017. Piagam Audit Internal merupakan dokumen resmi yang menjelaskan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab kegiatan audit internal.

STATEMENT THAT THE INTERNAL AUDIT UNIT HAS ESTABLISHED THE MANUAL OR CHARTER

Since 16 August 2011, the Company has established the Internal Audit Charter, which was updated on 14 August 2017. The Internal Audit Charter is an official document that explains the objectives, authorities and responsibilities of internal audit activities.

Piagam Audit Internal menetapkan posisi kegiatan Audit Internal dalam organisasi, termasuk sifat hubungan pelaporan fungsional Kepala Audit Internal kepada Dewan; memberikan kewenangan untuk mengakses catatan, personil, dan properti fisik yang berkaitan dengan pelaksanaan penugasan dan mendefinisikan ruang lingkup aktivitas audit internal.

The Internal Audit Charter sets the position of Internal Audit activities within the organization, including the nature of relationship between the Head of Internal Audit functional reporting to the Board; provide authority to access records, personnel and physical property relating to the implementation of assignments; and defining the scope of internal audit activities.



STRUKTUR DAN KEDUDUKAN AUDIT INTERNAL

Divisi Audit Internal dipimpin oleh Kepala Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Audit Internal mendapatkan masukan dan petunjuk dari Komite Audit.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERNAL

Berdasarkan Audit Internal *Charter*, tugas dan tanggung jawab Audit Internal adalah:

1. Melakukan pengujian atas kewajaran dan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan kewajiban manajemen.
2. Memberikan pertimbangan yang memadai terhadap kepatuhan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis Perusahaan, termasuk dampak dari kebijakan, prinsip, aturan dan pedoman yang diterbitkan oleh lembaga eksternal.
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan audit internal dengan penekanan pada bidang/kegiatan yang mempunyai risiko tinggi serta menguji sistem pengendalian yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan Perusahaan dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
4. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi, melaporkan, dan menyampaikan saran/kesimpulan atas kecurangan (*fraud*) kepada manajemen.
5. Memberikan saran atas hasil audit dan memantau tindak lanjut hasil kegiatan audit internal.
6. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
7. Melakukan koordinasi dengan audit eksternal dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya, agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.

METODE AUDIT INTERNAL

Berdasarkan Pedoman Administrasi Audit Internal, pelaksanaan audit dapat dilakukan melalui beberapa metode pemeriksaan, di antaranya:

- Diskusi dengan manajemen dan karyawan;
- Penelaahan dokumen;

STRUCTURE AND POSITION OF INTERNAL AUDIT

Internal Audit is supervised by the Head of Internal Audit who is appointed and dismissed the by President Director. In its daily activities, the Internal Audit receives input and instructions from the Audit Committee.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT

Based on the Internal Audit Charter, duties and responsibilities of Internal Audit are as follows:

1. Testing the fairness and effectiveness of internal control system and the implementation of management obligations.
2. Provide sufficient consideration on the compliance with laws and regulations governing the Company's business, including the impact of policies, principles, rules and guidelines published by external institutions.
3. Plan and carry out internal audit activities with emphasis on areas/activities with high risks, and test the existing control system to gain confidence that the Company's objectives can be achieved optimally and sustainably.
4. Implement actions in order to investigate information, report, and submit suggestions/conclusions on fraud to the management.
5. Provide suggestions on audit results and monitor the follow-up of the results of internal audit activities.
6. Work closely with the Audit Committee in carrying out supervisory functions.
7. Coordinate with external audits and other assurance provider units/functions, in order to achieve comprehensive and optimal audit results.

INTERNAL AUDIT METHODS

Based on the Internal Audit Administration Guidelines, audit implementation can be conducted through several inspection methods, among others:

- Discussions with the management and employees;
- Document review;



Audit Internal

Internal Audit

- Observasi;
- Pengujian prosedur kerja dan pengendalian;
- Uji kepatuhan dan uji substantif.

- Observation;
- Work procedures and controls testing;
- Compliance test and substantive tests.

URAIAN PELAKSANAAN TUGAS 2018

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Internal Tahunan, pada periode tahun 2018, Audit Internal telah melaksanakan 6 (enam) kegiatan audit dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan atas pengelolaan fungsi IIGF Institute.
2. Pemeriksaan atas penjaminan Proyek Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi.
3. Pemeriksaan atas pengelolaan fungsi Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social*).
4. Pemeriksaan atas pengelolaan fungsi Pengadaan Barang dan jasa (*Procurement*).
5. Pemeriksaan atas pengelolaan fungsi Penilaian Proyek (*Appraisal*).
6. Pemeriksaan atas penjaminan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat.

Selain tugas di atas, sepanjang tahun 2018 Audit Internal juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pelaksanaan evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Tingkat Entitas Tahun 2018.
2. Pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Tahun 2018, Pemutakhiran Database Entitas Pemeriksaan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017.
3. Pendampingan dalam pelaksanaan *review* atas progres pemanfaatan Penanaman Modal Negara (PMN) Tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
4. Penerbitan Pedoman Sistem Pengendalian Internal PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan Instruksi Kerja Perencanaan Penugasan Audit.
5. Melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi audit internal maupun eksternal.
6. Berperan aktif mendukung tim Sekretaris Perusahaan dalam meyakinkan kelancaran pelaksanaan evaluasi *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

DESCRIPTION OF 2018 DUTY IMPLEMENTATION

In accordance with the Annual Work Plan of Internal Audit, throughout 2018, Internal Audit has carried out 6 (six) audit activities with the following details:

1. Audit on the management of the IIGF Institute function.
2. Audit on the Probolinggo Banyuwangi Toll Road Project guarantee.
3. Audit on the management of the Environmental and Social function.
4. Audit on the management of the procurement of goods and services.
5. Audit on the management of the Project Appraisal function.
6. Audit on the guarantee for the West Semarang Drinking Water Supply System (SPAM) Project.

In addition to the above duties, throughout 2018, Internal Audit has also been involved in the following activities:

1. Evaluation on the 2018 Implementation of the Entity Level Internal Control System.
2. Assistance to the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) in monitoring the Settlement of State Losses in 2018, Updating Database of Audited Entity, and Evaluation on the Financial Statements Audit for the 2017 Fiscal Year.
3. Assistance in the implementation of a review on the progress of State Investment (PMN) utilization in 2018 by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).
4. Issuance of the Internal Control Systems Guidelines of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) and Audit Assignment Planning Work Instructions.
5. Conduct monitoring on follow-up activities on internal and external audit recommendations.
6. Actively supporting the Corporate Secretary team in ensuring the smooth implementation of the Good Corporate Governance (GCG) evaluation by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).

7. Berperan aktif mendukung tim Sekretaris Perusahaan dalam meyakinkan kelancaran pelaksanaan penilaian *Corporate Governance Perception Index* 2018.

7. Actively supporting the Corporate Secretary team in ensuring the smooth implementation of the 2018 Corporate Governance Perception Index.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN YANG DIKUTI KETUA AUDIT INTERNAL

Rincian tentang pelaksanaan program pengembangan kompetensi disampaikan pada bab Profil Perusahaan yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

EDUCATION AND/OR TRAINING ATTENDED BY THE HEAD OF INTERNAL AUDIT

Details regarding the implementation of competency development program are presented in the Company Profile chapter contained in this Annual Report.

PELAKSANAAN AUDIT

Realisasi Pelaksanaan Audit tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut:

AUDIT IMPLEMENTATION

Realization of the 2017 and 2018 Audit Implementation is as follows:

Uraian Description	Tahun Year					
	2017			2018		
	PKPT	REAL	%	PKPT	REAL	%
Laporan hasil penugasan audit/ Audit assignment report	6	6	100	6	6	100

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

Sampai dengan posisi 31 Desember 2018, IA telah menyelesaikan 17 kegiatan audit dengan jumlah rekomendasi sebanyak 87 rekomendasi yang mana 84 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti (97%) dan sisanya merupakan rekomendasi yang ditargetkan untuk diselesaikan di tahun 2019.

MONITORING OF FOLLOW-UP ON INTERNAL AUDIT RECOMMENDATIONS

As of 31 December 2018, Internal Audit has completed 17 audit activities with 87 recommendations of which 84 recommendations follow-up have been completed (97%), while the rest are recommendations targeted to be completed by 2019.



Akuntan Publik

Public Accountant

Audit atas Laporan Keuangan PT PII untuk tahun buku 2018 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

PENETAPAN AKUNTAN PUBLIK

Menindaklanjuti pelimpahan wewenang dari RUPS kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan KAP yang akan ditunjuk untuk melakukan audit umum atas laporan keuangan PT PII tahun buku 2018 dan sesuai juga dengan ketentuan Pasal 56 Ayat 1 dan 2 PMK Nomor 88 Tahun 2016, maka Dewan Komisaris menugaskan Direksi bersama-sama Komite Audit untuk melakukan proses pengadaan KAP.

Direksi dan Komite Audit telah melaksanakan proses pengadaan dan menetapkan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT PII tahun buku 2018.

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) ditetapkan melalui Keputusan Sirkuler Nomor : KMK-227/KM.6/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2018.

The audit on the Financial Statements of PT PII for the 2018 fiscal year has been conducted by independent, competent, professional and objective public accountants in accordance with the Professional Standards of Public Accountants, as well as the work agreements and the defined scope of audit.

APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTANT

Following-up the authority delegation from the GMS to the Board of Commissioners to propose Public Accounting Firm to be appointed to conduct general audit on PT PII's financial statements for the 2018 fiscal year and in accordance with Article 56 Paragraph 1 and 2 of the Minister of Finance Regulation Number 88/2016, the Board of Commissioners assigned the Board of Directors together with the Audit Committee to perform procurement process of Public Accounting Firm.

The Board of Directors and Audit Committee have conducted the procurement process and stipulated Public Accounting Firm Tanudiredja Wibisana Rintis & Partners(PwC) to audit the PT PII's Financial Statements for the 2018 fiscal year.

Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) is determined through Circular Number : KMK-227/KM.6/2018 Date 22 Oktober 2018 Decision of the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia regarding the Determination of Public Accounting Firm to Conduct General Audits on the 2018 Financial Statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

PERIODE LAPORAN KEUANGAN YANG DIAUDIT

Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian". KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) melakukan audit laporan keuangan tahunan Perusahaan sebanyak 9 periode. Tabel di bawah menginformasikan Akuntan dan Kantor Akuntan Publik yang memberikan Audit Keuangan untuk Perusahaan selama lima tahun serta biaya audit yang dikeluarkan:

PERIOD OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

Financial Statements for year ended on 31 December 2018 has been audited by Public Accounting Firm Tanudiredja Wibisana Rintis & Partners, with "Unqualified Opinion". Public Accounting Firm Tanudiredja Wibisana Rintis & Partners (PwC) has audited the Company's Financial Statements for 9 periods. The following table presents information of the Accountant and Public Accounting Firm that have provided Financial Audit services for the Company during the last five years along with the audit fees incurred:

Tahun	Nama Kantor Akuntan Publik Name of Public Accounting Firm	Nama Akuntan (Partner Penanggung jawab) Name of Accountant (Partner In Charge)	Fee (sebelum PPN) Fee (before VAT)
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	Rp800.000.000
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	Rp674.960.000
2016	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan/PwC	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	Rp649.000.000
2015	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan/PwC	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	Rp570.000.000
2014	Tanudiredja, Wibisana dan Rekan/PwC	Drs. Haryanto Sahari, CPA	US \$40,900

JASA LAIN SELAIN AUDIT KEUANGAN

Selama tahun 2018, selain memberikan Jasa Audit atas Laporan Keuangan kepada PT PII, Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) juga memberikan jasa Audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan *internal control* (PSA 62) serta jasa perikatan asuransi selain audit atau *review* atas informasi keuangan historis ("Perikatan Asuransi") atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") atas Perseroan, IKU oleh Dewan Komisaris, dan IKU oleh Direksi.

OTHER NON-FINANCIAL AUDIT SERVICES

During 2018, in addition to providing Audit Services on the Financial Statements to PT PII, the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) also provided compliance audit services in accordance with the regulations and internal control (PSA 62) as well as insurance engagement services other than audits or review of historical financial information ("Assurance Agreement") on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, KPI by the Board of Commissioners, and KPI by the Board of Directors.

Manajemen Risiko

Risk Management

Pada tahun 2018, tingkat risiko PT PII semakin turun. Hal itu merupakan hasil dari strategi kinerja pengelolaan risiko yang lebih baik, terintegrasi dan komitmen berbagai pihak di lingkungan Perseroan.

Dalam menjalankan fungsi sebagai penyedia dukungan fiskal kontingen untuk proyek infrastruktur, pengelolaan risiko sangat penting bagi kelangsungan kegiatan usaha PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan keberhasilan proyek infrastruktur. Seiring dengan berkembangnya usaha Perseroan, yaitu tidak terbatas pada penjaminan, melainkan juga pendampingan proyek yang dilaksanakan melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pengelolaan risiko sangat diperlukan sebagai upaya mitigasi.

In 2018, there was a decrease in the level of risk of PT PII as a result of a better, integrated risk management performance strategy and commitment from various parties within the Company.

Risk management is vitally important for the continuity of the business activities of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) as a provider of contingent fiscal support for infrastructure projects, and for the successful development of infrastructure projects. As the Company expanded beyond the provision of guarantee to also provide assistance for infrastructure projects developed using the Public Private Partnership (PPP) scheme, risk management has become even more important as a mitigation measure.





Dalam menstruktur proyek infrastruktur dengan skema KPBU, penyusunan Acuan Alokasi Risiko sangat penting. Hal itu dapat menjadi acuan Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dalam menyusun rencana mitigasi risiko dalam rangka penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dasar Kebijakan Pengelolaan Manajemen Risiko

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) telah memiliki standar acuan dalam penerapan manajemen risiko. Kebijakan Perseroan terkait manajemen risiko dimaksud mengacu kepada:

- *Operation Manual* PT PII;
- *Enterprise Risk Management Framework* PT PII;
- *Standard Operating Procedure (SOP) Risk Management Exercise*;
- Internasional Organization for Standardization (ISO) 31000:2009.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Manajemen Risiko

Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diadopsi oleh Perseroan dapat digambarkan melalui penjelasan sebagai berikut:

- Manajemen Risiko merupakan bagian integral dari semua proses organisasi, yang harus tertanam dalam semua aktivitas, proses dan sistem, dan dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan;
- Manajemen Risiko adalah dinamis, berulang, responsif terhadap perubahan, dan disesuaikan sejalan dengan pencapaian tujuan Perusahaan;
- Manajemen Risiko adalah proses yang digerakkan manusia yang menciptakan tanggung jawab bersama dari seluruh personel; dan
- Manajemen Risiko adalah penggerak untuk menciptakan organisasi yang mampu beradaptasi dan berkelanjutan.

In structuring an infrastructure project to use a PPP scheme, the Risk Allocation Manual is important to serve as a reference for the Contracting Agency (CA) in the formulation of risk mitigation plans to provide infrastructure suitable with the public needs.

Basis of Risk Management Policies

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) has developed reference standards for the implementation of risk management. The risk management reference standards are based:

- PT PII Operation Manual;
- PT PII Enterprise Risk Management Framework;
- Risk Management Exercise Standard Operating Procedure (SOP);
- Internasional Organization for Standardization (ISO) 31000:2009.

Principles of Risk Management

The Company has adopted the following principles of risk management:

- Risk Management is an integral part of all processes in the organization, embedded in all activities, processes and systems, and considered in all decision-making processes;
- Risk Management is dynamic, repetitive, responsive to changes, and adjustable in line with the achievement of Company's objectives;
- Risk Management is a people-driven process, and thus is the shared responsibility of all personnel; and
- Risk Management is the driver in the creation of an adaptive and sustainable organization.

Manajemen Risiko
Risk Management

Struktur Pengelola Manajemen Risiko

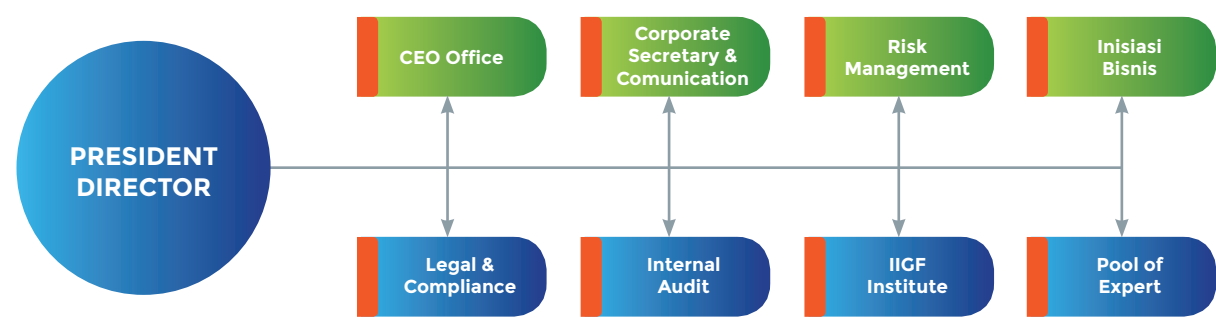
Dalam fungsi pengelolaan risiko korporat, PT PII membentuk Divisi Risk Management (Divisi RM) di bawah Direktur Utama yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan sosialisasi dan implementasi pengelolaan risiko tersebut di lingkungan Perusahaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi ini telah mengembangkan suatu Kerangka Pengelolaan Risiko PT PII (*Enterprise Risk Management/ERM Framework*) menggunakan acuan utama ISO 31000:2009. Struktur Divisi RM dapat dilihat berikut:

Risk Management Organization Structure

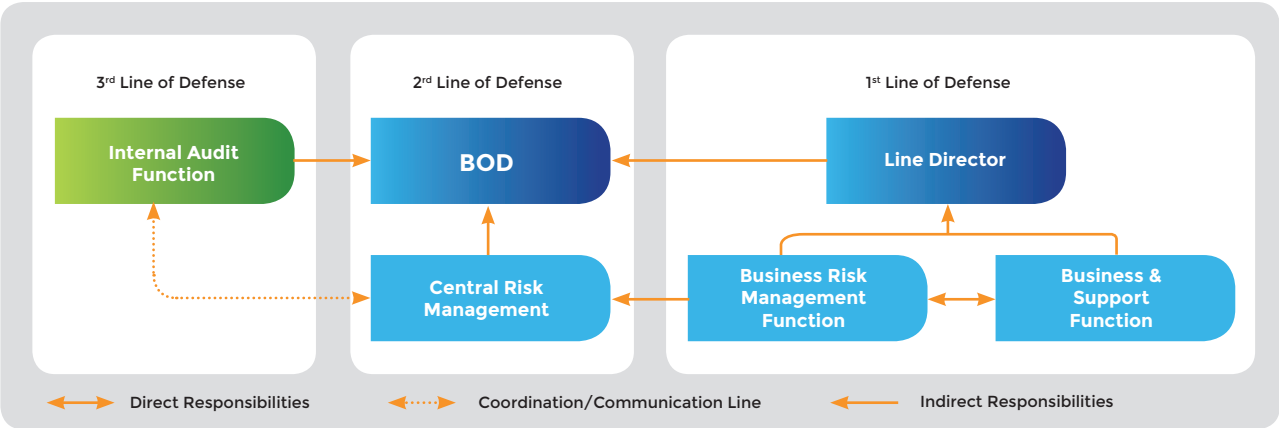
In the enterprise risk management function, PT PII established the Risk Management Division (RM Division) under the President Director, responsible for the formulation of risk management policies, framework, implementation guidelines and infrastructure, and for the socialization and implementation of risk management within the Company.

In the execution of its function, the RM Division has established the PT PII Enterprise Risk Management (ERM) Framework using ISO 31000:2009 as the main references. The structure of the RM Division is presented below:



Proses manajemen risiko Perseroan menganut konsep *three lines of defense* dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Direksi, Audit Internal, fungsi Risk Management, serta para karyawan yang berada di divisi masing-masing. Tujuan keterlibatan semua pihak ini adalah timbulnya pemahaman dan kepemilikan (*ownership*) atas risiko yang dihadapi Perseroan serta sebagai bentuk dari tahapan implementasi manajemen risiko.

The Company's risk management process adheres to the three lines of defense concept involving various parties, from the Board of Directors, Audit Internal, Risk Management function, and employees in their respective divisions. The purpose of the involvement of all these parties is to promote understanding and ownership of risks faced by the Company, as well as a form of the phases of risk management implementation.





Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi efektivitas pelaksanaan pengelolaan risiko PT PII dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, di antaranya memasukkan aspek Manajemen Risiko dalam *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi, audit Manajemen Risiko, *review* implementasi dan pemantauan dan pelaporan kepada pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaannya, Divisi RM secara berkala melakukan evaluasi efektivitas sistem Manajemen Risiko korporat dengan memantau pergerakan tingkat risiko dalam profil risiko Perseroan. Hasil pemantauan tersebut akan dilihat lebih dalam lagi dengan menganalisis efektivitas rencana pengelolaan risiko yang sudah diformulasikan dan diterapkan. Hasil laporan profil risiko ini disampaikan kepada Direksi dan Komisaris secara berkala.

KPI yang telah ditetapkan oleh Manajemen terkait dengan Manajemen Risiko, memiliki target penurunan risiko sejumlah 10% (sepuluh persen) di tahun 2018. Pada tahun 2018 penurunan jumlah risiko telah mencapai target tersebut. Beberapa risiko mengalami penurunan tingkat risiko dikarenakan telah adanya kemajuan dari status pelaksanaan mitigasi risiko. Pemantauan kegiatan mitigasi risiko yang telah dilakukan akan terus dilanjutkan untuk memastikan bahwa tingkat risikonya tidak meningkat atau membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

Pengawasan Aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi

Terkait dengan penerapan manajemen risiko, di setiap semester, Divisi RM memberikan Laporan Manajemen Risiko dan Monitoring perkembangan mitigasi risiko kepada Direktur Utama selaku Direksi yang membawahi Divisi RM. Secara periodik PT PII menyampaikan Laporan Manajemen kepada Dewan Komisaris yang salah satu bagiannya memuat tentang manajemen risiko.

Pada bagian tersebut disampaikan *progres* dari kegiatan manajemen risiko, terutama terkait dengan status tindak lanjut pelaksanaan mitigasi. Dengan demikian, didapatkan gambaran komitmen dari PT PII untuk menurunkan tingkat risiko Perusahaan.

Dewan Komisaris juga telah membentuk komite di bawahnya yaitu Komite Pemantau Risiko di tahun 2018 yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris

Evaluation of Risk Management System Effectiveness

Evaluation of the effectiveness of risk management implementation at PT PII is performed using a variety of mechanism, including by entering aspects of Risk Management as Key Performance Indicator (KPI) for the Board of Directors, performing a Risk Management audit, and reviews of implementation, monitoring and reporting to stakeholders.

In its implementation, the RM Division periodically evaluates the effectiveness of the Enterprise Risk Management system by monitoring risk level movements in the Company's risk profile. The results of the monitoring will be seen more deeply by analyzing the effectiveness of the risk management plan that has been formulated and implemented. The results of this risk profile report are submitted periodically to the Board of Directors and Board of Commissioners.

With regards to Risk Management, the KPI set by Management for 2018 has a target of reducing risks by 10% (ten percent). In 2018, the reduction in the number of risks has fulfilled that target. A number of risk factors showed a decline in risk level due to progress in the status of implementing risk mitigation. Monitoring of risk mitigation activities that have been carried out will continue to ensure that the risk level does not increase or endanger the sustainability of the Company's business.

Active Supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners

With regards to risk management implementation, the RM Division submits half-yearly Risk Management Report and Risk Mitigation Monitoring Report to the President Director, as the Director in charge of the RM Division. Periodically, PT PII submits a Management Report to the Board of Commissioners, which also contain a section on risk management.

The section contains a progress report on risk management activities, especially those related to follow-up actions of mitigation measures. This is a reflection of PT PII's commitment to reduce its enterprise risk level.

In 2018, the Board of Commissioners has also formed the Risk Monitoring Committee, a committee under the Board of Commissioners that assists the Board of



Manajemen Risiko

Risk Management

dalam memantau penerapan manajemen risiko di Perusahaan. Divisi RM secara berkala melakukan rapat dan diskusi bersama dengan Komite Pemantau Risiko untuk membahas penerapan dan program kerja terkait manajemen risiko dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan.

Unit Kerja Terkait Penerapan Manajemen Risiko Korporat

Dalam penerapan Manajemen Risiko Korporat (*Enterprise Risk Management*/"ERM"), unit kerja yang terkait di antaranya adalah:

1. Direksi

Peran dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan ERM adalah:

- Mengelola dan mengendalikan semua risiko Perusahaan;
- Menentukan kebijakan Manajemen Risiko;
- Memantau dan mengarahkan manajemen dalam implementasi Manajemen Risiko dan juga menjamin kecukupan alat, sistem, dan sumber daya untuk mendukung implementasi Manajemen Risiko;
- Meninjau dan menyetujui tujuan, strategi, kerangka kerja, visi dan misi, struktur organisasi, *risk appetite*, *risk tolerance*, budaya risiko, dan alokasi sumber daya untuk Manajemen Risiko secara berkala;
- Memantau dan mengevaluasi implementasi Manajemen Risiko;
- Memfasilitasi proses mitigasi risiko;
- Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; dan
- Memastikan *review* independen yang komprehensif tentang pelaksanaan Manajemen Risiko.

2. Audit Internal

Direksi menetapkan fungsi Audit Internal atau Audit Internal (IA) yang bertugas memastikan penerapan ERM berjalan dengan lancar. IA bertindak sebagai *independent assurance function*. Peran dan tanggung jawab Audit Internal adalah:

- Bekerja sama dengan manajemen senior dan/atau Dewan mengenai kinerja dan implementasi Manajemen Risiko;
- Merasionalisasi dan mensistemasi penilaian risiko dan pelaporan atas tata kelola;
- Memberikan pengawasan pada konten/proses Manajemen Risiko, diikuti oleh garis pertahanan kedua (*second line of defense*);

Commissioners in monitoring the implementation of risk management in the Company. Periodically, the RM Division met with the Risk Monitoring Committee to discuss the implementation of risk management-related work programs and to follow-up on input received.

Work Units Related to Enterprise Risk Management Implementation

The following work units are involved in the implementation of Enterprise Risk Management (ERM):

1. Board of Directors

The roles and responsibilities of the Board of Directors in the implementation of ERM are:

- To manage and control the risks of the Company;
- To establish the Risk Management policies;
- To monitor and direct the management in the implementation of Risk Management, and to ensure the adequacy of tools, systems and resources in support of Risk Management implementation;
- Periodically, to review and approve risk management objectives, strategy, framework, vision and mission, organization structure, risk appetite, risk tolerance, risk culture, and resources allocation for risk management;
- To monitor and evaluate the implementation of risk management;
- To facilitate risk mitigation processes;
- To evaluate risk management policies; and
- To ensure comprehensive, independent reviews on the implementation of risk management.

2. Internal Audit

The Board of Directors established the functions of Internal Audit (IA) tasked with ensuring the smooth functioning of ERM implementation. IA acts as an independent assurance function. The roles and responsibilities of Internal Audit are:

- To cooperate with senior management and/or the boards related to Risk Management implementation and performance;
- To rationalize and systemize measures for risk assessment and governance reporting;
- To provide supervision on the contents/processes of Risk Management, to be followed by the second line of defense;



- d. Memberikan keyakinan bahwa proses Manajemen Risiko yang memadai, sesuai dan memenuhi peraturan yang relevan; dan
- e. Memanfaatkan hasil proses Manajemen risiko dalam menjalankan audit yang berbasis risiko secara luas.

3. Fungsi *Risk Management* saat ini berada di bawah Divisi RM, mempunyai peran khusus di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka kerja dan strategi Manajemen Risiko yang komprehensif;
- b. Meninjau dan memberikan masukan kepada Direksi terhadap kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
- c. Mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang proses Manajemen Risiko untuk menjamin kegiatan bisnis Perusahaan yang selaras dengan strategi Manajemen Risiko melalui pelatihan dan sesi komunikasi yang memadai;
- d. Memastikan bahwa semua divisi yang terkait secara aktif terlibat dan didukung dengan implementasi Manajemen Risiko, selaras dengan kerangka kerja dan kebijakan yang ditetapkan dengan mengoordinasikan dan memfasilitasi proses Manajemen Risiko di semua divisi;
- e. Memfasilitasi dan memantau proses pelaporan Manajemen Risiko dari semua divisi/fungsi;
- f. Membangun budaya Manajemen Risiko di semua tingkatan dalam Perusahaan, termasuk komunikasi yang memadai tentang kerangka kerja Manajemen Risiko;
- g. Memfasilitasi proses Manajemen Risiko secara keseluruhan;
- h. Kaitan strategi dalam hal risiko untuk Perusahaan dengan memantau profil risiko yang terkonsolidasi sebagai Perusahaan secara keseluruhan;
- i. Memastikan Manajemen mengembangkan rencana mitigasi risiko yang memadai; dan
- j. Menilai risiko pada proyek ketika dibutuhkan.

4. Unit Bisnis

Risiko, berdasarkan sifatnya, tertanam dalam setiap kegiatan di seluruh organisasi. Sebagai pemilik utama dari risiko, unit bisnis bertanggung jawab atas manajemen sehari-hari dari risiko yang timbul dari kegiatan mereka. Tugas dan tanggung jawab khusus mereka adalah:

- a. Memastikan implementasi dan pelaksanaan kerangka kerja ERM dalam fungsinya masing-masing;

- d. To provide assurances that Risk Management processes are adequate, appropriate and in compliance with relevant regulations; and
- e. To utilize the results of Risk Management processes in the implementation of comprehensive risk-based audit.

3. The Risk Management function, currently under the RM Division, have the following roles:

- a. To develop a comprehensive Risk Management framework and strategy;
- b. To review and provide input to the Board of Directors on Risk Management policies and strategy;
- c. To promote awareness and comprehension about Risk Management processes through training and communication sessions, so as to ensure that the Company's business activities are aligned with Risk Management strategy;
- d. To ensure the active involvement and support of all divisions in the implementation of Risk Management in line with established framework and policies, by coordinating and facilitating the processes of Risk Management in all divisions;
- e. To facilitate and to monitor the risk management reporting process from all divisions/functions;
- f. To develop a risk management culture at all levels of the organization, including adequate communication about the risk management framework;
- g. To facilitate the overall risk management process;
- h. To relate with Company's strategies in terms of risks through the monitoring of the Company's overall consolidated risk profile;
- i. To ensure that the Management has developed an adequate risk mitigation plan; and
- j. To perform risk assessment on projects as needed.

4. Business Units

Risk, by its nature, is embedded in all activities at all levels of the organization. As the primary risk owner, business units are responsible for the management of risks arising from their daily activities. Their special duties and responsibilities are:

- a. To ensure the implementation and execution of ERM framework within their respective functions;



Manajemen Risiko

Risk Management

- b. Menyelaraskan rencana bisnis dan strategi untuk kerangka kerja ERM secara keseluruhan;
- c. Menciptakan kesadaran risiko dan kontrol dalam fungsi masing-masing;
- d. Memastikan kecukupan dan efektivitas kontrol;
- e. Mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko dalam kegiatan sehari-hari dalam fungsinya masing-masing;
- f. Mengirimkan laporan kepada Fungsi Manajemen Risiko Pusat;
- g. Kepatuhan terhadap kerangka kerja ERM, kebijakan dan prosedur; dan
- h. Koordinasi dengan Fungsi Manajemen Risiko Pusat untuk mengidentifikasi dan memantau setiap perubahan pada lingkungan bisnis, proses atau kontrol yang mungkin berdampak terhadap eksposur risiko.

- b. To align the business plans and strategy with the overall ERM framework;
- c. To nurture risk and control awareness within their respective functions;
- d. To ensure the adequacy and effectiveness of control;
- e. To identify, assess and manage various risks in the daily activities of their respective functions;
- f. To submit reports to the Central Risk Management Function;
- g. To ensure compliance with ERM framework, policies and procedures; and
- h. To coordinate with the Central Risk Management Function in identifying and monitoring changes in the business environment, processes or control that might have an impact on risk exposure.

Tujuan dan Kerangka Kerja Penerapan ERM

Tujuan

Penerapan ERM bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengembangkan PT PII menjadi organisasi yang tangguh menghadapi risiko dalam mencapai visi dan misi korporasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap risiko yang melekat dalam semua aktivitas bisnis PT PII;
- Untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko oleh manajemen dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat dengan mempertimbangkan profil risiko/pengembalian (*risk/return*) yang ditetapkan;
- Untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan menciptakan strategi dan proses yang bijaksana; dan
- Untuk meningkatkan reputasi PT PII di mata pemegang saham.

Pernyataan misi Manajemen Risiko menetapkan “tone at the top” yang membimbing kegiatan Manajemen Risiko di seluruh organisasi. Pernyataan misi berfungsi untuk mengomunikasikan visi, prinsip-prinsip dan mandat PT PII.

Misi dalam penerapan ERM adalah “Untuk memahami risiko utama yang dihadapi organisasi dan untuk memfasilitasi proses Manajemen Risiko dengan menyediakan alat dan metodologi yang tepat dalam mengelola risiko secara eksplisit. Hal ini akan mencapai pendekatan yang konsisten dalam pengelolaan risiko dalam organisasi.”

Objectives and Framework of ERM Implementation

Objectives

The implementation of ERM has the following objectives:

- To develop PT PII into a strong and resilient organization in the face of risks in the achievement of its vision and mission statements, through a comprehensive evaluation of risks inherent in all business activities of PT PII;
- To support risk-based decision making by Management to achieve healthy business growth with consideration of the established risk/return profile;
- To comply with the principles of good corporate governance through the creation of sound strategy and processes; and
- To improve PT PII reputation in the eyes of shareholders.

The Risk Management mission statement established the “tone at the top” as a guide for Risk Management activities throughout the organization. The mission statement communicated the vision, principles and mandate of PT PII.

The stated mission in ERM implementation is “To comprehend the major risks facing the organization and to facilitate Risk Management processes through the provision of the proper tools and methodologies to explicitly manage risks. This will provide a consistent approach to risk management within the organization.”



Untuk mendukung pernyataan misi manajemen risiko, ERM harus mewujudkan organisasi sadar risiko melalui:

1. Pembentukan sistem manajemen berbasis risiko, yang mengelola semua risiko utama melalui praktik Manajemen Risiko yang terpasang dan melekat dalam semua kegiatan bisnis dan pengambilan keputusan;
2. Pengelolaan risiko di semua tingkat dalam organisasi;
3. Akuntabilitas yang jelas dan independensi dalam menjalankan tinjauan kepatuhan dan pemantauan seluruh kegiatan (semua pemilik proses bisnis); dan
4. Adopsi standar internasional yang diterima secara luas.

Kerangka

Kebijakan Perusahaan terkait manajemen risiko mengacu kepada Kerangka Manajemen Risiko dengan referensi utama yaitu ISO 31000:2009. Dokumen tersebut mendefinisikan kerangka Manajemen Risiko Korporasi PT PII, yang meliputi:

- Pembentukan prinsip dan standar umum bagi praktik Manajemen Risiko untuk memungkinkan pemahaman umum atas Manajemen Risiko;
- Selera dan toleransi risiko (*risk appetite and tolerance*) yang disepakati oleh manajemen dalam menentukan ukuran tingkat risiko;
- Mengadopsi kerangka manajemen risiko yang mendefinisikan prasyarat bisnis umum untuk proses Manajemen Risiko; dan
- Akuntabilitas dan tanggung jawab dalam implementasi Manajemen Risiko.

Kategori Risiko

PT PII mengkategorikan risiko ke dalam kategori sebagai berikut:

- Risiko Strategis, mencakup semua risiko yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan strategi.
- Risiko Finansial, mencakup semua risiko yang terkait dengan risiko pasar dan risiko likuiditas.
- Risiko Operasional, mencakup semua risiko yang timbul dari pelaksanaan fungsi bisnis Perusahaan.

In support of the risk management mission statement, ERM strives to build a risk-conscious organization through:

1. Establishment of risk-based management systems to manage all major risks through Risk Management practices that are embedded and attached to all business and decision-making activities;
2. Risk management at all levels of the organization;
3. Clear accountability and independency in performing compliance reviews and monitoring of all activities (by business process owners); and
4. The adoption of universally-accepted international standards.

Framework

The Company's risk management-related policies are based on the Risk Management Framework that refer mainly to ISO 31000:2009 standard. The document defined the framework for Enterprise Risk Management at PT PII, comprising:

- The establishment of general principles and standards for Risk Management to facilitate Establishment of general principles and standards for Risk Management practices to enable a general understanding of Risk Management;
- Risk appetite and tolerance as agreed on by the management to determine the measures of risk levels;
- Adoption of a risk management framework that define the general pre-requisites of business for Risk Management processes; and
- Accountability and responsibility in the implementation of Risk Management.

Risk Categories

PT PII categorizes risks into the following:

- Strategic Risk, covering all risks related to strategy planning, execution and monitoring.
- Financial Risk, covering all risks related to market risk and liquidity risk.
- Operational Risk, covering all risks arising from the execution of the Company's business function.

Manajemen Risiko

Risk Management



Taksonomi risiko (menunjukkan rincian dari sumber risiko yang mungkin terjadi) dan definisi risiko bertujuan untuk memberikan definisi risiko yang jelas dan yang tercakup dalam kerangka ERM ini adalah sebagai berikut:

1. Kategori Risiko Strategis

Risiko yang timbul dari ketidakakuratan penentuan dan pelaksanaan strategi bisnis PT PII, ketidakakuratan keputusan bisnis, atau ketidakmampuan menanggapi perubahan eksternal.

a. Strategi dan Perencanaan

Risiko yang timbul dari lemahnya konteks strategi dan isu perencanaan dari PT PII yang mungkin berdampak kepada nilai-nilai strategis PT PII dan performa sebagai sebuah organisasi.

2. Kategori Risiko Keuangan

Kategori ini mengklasifikasikan risiko yang biasanya timbul karena ketidakmampuan PT PII untuk mencapai target pendapatannya, kerugian dari penempatan dana investasi, dan ketidakmampuan PT PII untuk mendapatkan pendanaan baru, baik dari kreditur atau dari pemegang saham.

a. Pasar (e.g. tingkat bunga, kurs)

Poin ini menggabungkan risiko yang dihasilkan dari pergerakan yang merugikan dari faktor pasar yang meliputi suku bunga dan selisih kurs serta harga ekuitas.

b. Likuiditas dan Kredit

Risiko keuangan dalam kelompok ini berhubungan dengan isu likuiditas dan kredit yang terkait dengan aset dan pendapatan PT PII.

The risk taxonomy (detailing the possible sources of risks) and risk definition provide a clear definition of the various risks involved within the ERM framework as described below:

1. Strategic Risk Category

Risks arising from inaccuracies in the determination and execution of business strategies at PT PII, inaccuracies of business decisions, or incapability in responding to external changes.

a. Strategy and Planning

Risks arising from the weak context of PT PII strategy and planning issues that might have an impact on PT PII's strategic values and performance as an organization.

2. Financial Risk Category

In this category are risks classified as arising from the inability of PT PII to reach its revenue targets, losses incurred from fund investments, and inability of PT PII to source new funding from either creditors or the shareholder.

a. Market (e.g. interest rate, currency exchange rate)

Risk arising from adverse movements of market factors such as interest rate, currency exchange rate and stock prices.

b. Liquidity and Credit

Financial risks related to liquidity and credit issues in connection with PT PII assets and revenues.



3. Kategori Risiko Operasional

Kategori ini umumnya timbul dari pelaksanaan fungsi bisnis PT PII. Risiko ini fokus pada risiko yang timbul dari orang, sistem dan proses di mana Perusahaan beroperasi (termasuk aktivitas penyediaan penjaminan sebagai bisnis utama PT PII)

a. Operasional Umum

Risiko operasional umum, umumnya terkait dengan ketidakmampuan PT PII untuk mengoperasikan fungsi bisnisnya secara efisien, yang menyebabkan kerugian operasional dari kegiatan di luar penyediaan penjaminan.

b. Penyediaan Penjaminan

Kelompok risiko ini mengklasifikasikan risiko operasional yang terkait dengan peran PT PII sebagai BUPI.

c. Hukum dan Kepatuhan

Kelompok risiko ini terkait dengan ketidakpatuhan PT PII sebagai korporasi terhadap standar hukum atau regulasi yang dapat berdampak pada nilai-nilai strategis dan kinerja PT PII sebagai sebuah organisasi.

Prosedur Manajemen Risiko yang Berlaku Di Perusahaan

PT PII memiliki rangkaian prosedur atau proses Manajemen Risiko yang secara umum bisa dijelaskan seperti berikut ini:

1. Identifikasi Risiko

Proses Manajemen Risiko dimulai dengan identifikasi risiko. Tujuan dari proses identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi risiko potensial yang mungkin berdampak terhadap pencapaian tujuan Perusahaan. Identifikasi Risiko dari risiko pada tingkat korporasi harus dilakukan setidaknya setiap tahun atau setiap kali ada perubahan yang signifikan terhadap lingkungan bisnis PT PII.

2. Evaluasi Risiko

Tahap selanjutnya adalah untuk mengevaluasi risiko yang telah teridentifikasi untuk mengetahui tingkat risiko dalam hal konsekuensi, kemungkinan terjadinya risiko, kecukupan pengendalian dan penyebab terjadinya risiko.

3. Penanganan Risiko

Tujuan dari penanganan risiko adalah untuk menentukan tindakan yang tepat yang dapat memberikan manfaat paling optimal bagi PT PII dalam menghadapi risiko yang teridentifikasi.

3. Operational Risk Category

Risks in this category usually arise from the execution of PT PII business function. These risks focus on risks arising from people, system or process involved in the Company's operations (including in the provision of guarantee as PT PII core business)

a. General Operations

General operations risks are usually related to the inability of PT PII to operate an efficient business function, leading thus to operational losses from activities other than the provision of guarantee services.

b. Provision of Guarantee

The risk category contains operational risks related to the role of PT PII as a BUPI.

c. Legal and Compliance

The risk category is related to the inability of PT PII as a corporate body to comply with legal or regulation standards that might have an adverse impact on the strategic values or performance of PT PII as an organization.

Risk Management Procedures at the Company

PT PII has a set of Risk Management procedures or policies that can be explained in broad terms as follow:

1. Risk Identification

The Risk Management process starts with risk identification. The objective of risk identification process is to identify potential risks that may affect the achievement of Company's objectives. Risk identification at the enterprise-level should be conducted at least once annually or each time there is a significant change in PT PII business environment.

2. Risk Evaluation

The next step is to evaluate the identified risk in order to determine the risk level in terms of consequences, possibility of risk, adequacy of controls, and the causes of risk.

3. Risk Management

The objective of risk management is to determine the appropriate actions that can result in optimum benefits for PT PII in dealing with the identified risk.



Manajemen Risiko

Risk Management

4. Pemantauan Risiko

Tujuan pemantauan risiko adalah untuk memantau tingkat risiko terkini dari risiko yang teridentifikasi dan perkembangan terkini dalam pelaksanaan penanganan risiko. Pemantauan risiko harus dilakukan setidaknya setiap semester.

5. Pelaporan Risiko

Tujuan dari pelaporan risiko adalah untuk melaporkan hasil dari aktivitas Manajemen Risiko.

Penetapan Tingkat Risiko

Tingkat risiko sedang berarti bahwa risiko mungkin dapat diterima dengan beberapa pertimbangan tambahan mengenai manfaat yang akan diperoleh. Di bawah ini merupakan matriks tingkat risiko yang akan digunakan dalam evaluasi risiko.

Kemungkinan Risiko Potential Risk	Dampak Risiko dalam hal Materialisasi Risiko Impact in the Event of Risk Materializing				
	Tidak Signifikan Not Significant	Minor Minor	Sedang Moderate	Mayor Major	Berbahaya Catastrophic
Sangat Rendah Very Low	Rendah Low	Rendah Low	Rendah Low	Rendah Low	Sedang Moderate
Rendah Low	Rendah Low	Rendah Low	Sedang Moderate	Sedang Moderate	Sedang Moderate
Sedang Moderate	Rendah Low	Sedang Moderate	Sedang Moderate	Tinggi High	Tinggi High
Tinggi High	Sedang Moderate	Sedang Moderate	Tinggi High	Tinggi High	Tinggi High
Sangat Tinggi Very High	Sedang Moderate	Tinggi High	Tinggi High	Tinggi High	Tinggi High

Pedoman Penanganan Risiko

Penanganan Risiko merupakan kegiatan penting dalam manajemen risiko yang menentukan aktivitas selanjutnya dalam menghadapi risiko. Penentuan penanganan risiko harus dilakukan sejalan dengan selera risiko yang diterjemahkan dalam matriks tingkat risiko. Di bawah ini merupakan pedoman penanganan risiko untuk setiap tingkat risiko yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menentukan tanggapan terhadap risiko yang teridentifikasi.

Tingkat Risiko Risk Level	Penanganan Risiko Risk Management
Rendah Low	- Menerima risiko dengan pemantauan yang konstan Accept the risk with constant monitoring - Minimal, kontrol detektif dapat ditentukan untuk risiko tersebut At the minimum, detection control could be determined for the risk - Penanganan risiko dilaksanakan dalam waktu 6 bulan, bila memungkinkan Risk management conducted within 6 (six) months, if possible

4. Risk Monitoring

Risk monitoring is conducted to monitor the latest risk level of identified risks, and the latest developments in the related risk management implementation. Risk monitoring is conducted at least half-yearly.

5. Risk Reporting

The purpose of risk reporting is to report on the results of Risk Management activities.

Determination of Risk Level

A medium risk level means that risk is possibly acceptable with further considerations on the benefits that may be had. Below is presented the risk level matrix to be used in risk evaluation.

Guidelines on Risk Management

Risk management is an important step in the overall risk management that determines the next activities to perform in the face of risk. Risk management should be aligned with risk appetite as translated in the risk level matrix. Following is the guidelines for risk management to be used in determining the proper response to an identified risk.



Tingkat Risiko Risk Level	Penanganan Risiko Risk Management
Sedang Medium	- Mengurangi tingkat risiko, bila dimungkinkan Reduce the risk level, if possible - Kontrol pencegahan dapat ditentukan untuk risiko tersebut Prevention control could be determined for the risk - Jika biaya dari penanganan risiko lebih dari manfaatnya, maka terima risiko tersebut If the costs of risk management exceed the benefit, accept the risk - Penanganan risiko sepenuhnya dilaksanakan dalam waktu 3 bulan, bila memungkinkan Risk management conducted within 3 (three) months, if possible
Tinggi High	- Mengurangi tingkat risiko, bila memungkinkan Reduce the risk level, if possible - Jika biaya dari penanganan risiko lebih dari manfaatnya, maka terima risiko tersebut If the costs of risk management exceed the benefit, accept the risk - Kontrol pencegahan dapat ditentukan untuk risiko tersebut Prevention control could be determined for the risk - Penanganan risiko sepenuhnya dilaksanakan secepatnya, bila memungkinkan Risk management to be conducted as soon as possible - Mensyaratkan pemantauan risiko secara bulanan Monthly risk monitoring required

Risiko yang Dihadapi dan Upaya Mitigasi Risiko

Risiko Keuangan

Risiko keuangan terutama timbul sebagai akibat ketidakmampuan PT PII mencapai sasaran pendapatan hasil usaha, kerugian dari penempatan dana investasi, serta ketidakmampuan PT PII memperoleh pendanaan baru dari pihak kreditor maupun Pemegang Saham. Mitigasi atas risiko tersebut diupayakan dengan:

1. Mengamankan serta memastikan sumber-sumber pendapatan PT PII.
2. Memilih investasi portofolio secara berhati-hati dengan faktor risiko yang minimal.
3. Menjalin hubungan baik dengan berbagai lembaga keuangan, termasuk lembaga multilateral baik sebagai pihak kreditor maupun sebagai mitra dalam meningkatkan kapasitas penjaminan.

Risiko Kecukupan Modal

Risiko di mana PT PII tidak memiliki cadangan modal yang cukup untuk mengoperasikan bisnisnya atau untuk memenuhi kewajiban yang muncul dari klaim penjaminan, risiko investasi atau risiko operasional. Mitigasi atas risiko tersebut diupayakan dengan:

1. Memperkuat kerja sama dengan lembaga penjaminan lain dan memperkuat hubungan dengan Kementerian Keuangan.
2. Melakukan analisis kapasitas penjaminan mulai dari tahap *screening* proyek dengan menerapkan sistem *Risk Based Capital* sebagai alat bantu analisis untuk pengambilan keputusan penjaminan.
3. Memperluas skema penjaminan bersama.

Risk and Risk Mitigation

Financial Risk

Financial risk primarily arise as the impact of PT PII inability to achieve business revenue target, loss from investment funds placement, and inability to secure new funding from creditor or Shareholders. Risk mitigation efforts include:

1. Safeguarding and ensuring sources of revenues for PT PII.
2. Prudent selection of investment portfolio with minimum risk factor.
3. Maintaining harmonious relationship with financial institutions, including multilateral institutions, as either creditor or strategic partner in increasing the guarantee capacity.

Capital Adequacy Risk

The risk where PT PII does not have adequate capital reserves to operate its business or to fulfill its obligations arising from guarantee claims, investment risk or operational risk. Risk mitigation efforts include:

1. Strengthening cooperation with other guarantee institutions and strengthening relationship with the Ministry of Finance.
2. Conducting guarantee analysis starting from the project screening stage by implementing Risk Based Capital system as an analytical tool for guarantee decision making.
3. Expanding the joint guarantee scheme.



Manajemen Risiko

Risk Management

Risiko Lingkungan Bisnis

Risiko munculnya regulasi/kebijakan pemerintah baru yang membuka peluang bagi instansi lain untuk melakukan penjaminan yang sama dengan penjaminan Perusahaan ataupun tidak mendukung bisnis Perusahaan dalam penjaminan proyek infrastruktur dengan skema KPBU.

Upaya mitigasi terhadap risiko ini adalah:

1. Melakukan pemantauan terkait arah regulasi/kebijakan pemerintah dan menjaga komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) utama untuk memastikan adanya dukungan yang kondusif bagi bisnis Perusahaan.
2. Melakukan penjajakan atas lingkup bisnis di luar skema KPBU.

Penilaian Risiko

Penilaian risiko dilakukan terhadap keseluruhan risiko PT PII yang telah teridentifikasi sebelumnya sebagai bagian dari pengelolaan risiko. Penjaminan infrastruktur oleh PT PII menjamin kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja (PJPK) dalam suatu perjanjian KPBU, di mana kewajiban ini timbul akibat risiko yang disebabkan oleh peristiwa penyebab (*triggering events*) berikut:

1. Tindakan atau tiadanya tindakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK dalam hal-hal yang menurut hukum atau peraturan perundangan PJPK atau Pemerintah selain PJPK memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan tersebut;
2. Kebijakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK;
3. Keputusan sepihak dari PJPK atau Pemerintah selain PJPK; dan
4. Ketidakmampuan PJPK dalam melaksanakan satu kewajiban yang ditentukan kepadanya oleh Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Kerja sama (*breach of contract*).

Sesuai struktur organisasi PT PII, Divisi RM adalah divisi yang salah satu tugasnya memonitor pelaksanaan ERM Perusahaan. Sebagai pemilik kerangka pengelolaan risiko di PT PII, terhadap risiko penjaminan proyek, Divisi RM memberikan masukan dari sudut pandang yang independen terhadap dampak dari risiko proyek dan potensi klaim penjaminan terhadap Perusahaan sebagai perusahaan.

Secara khusus, Divisi RM akan melakukan tinjauan independen terhadap kepatuhan proses penilaian dan memberikan komentar independen dari perspektif risiko institusi (baik batas-batas tertentu dilampaui,

Business Environment Risk

The risk of new government regulations/policies that open up opportunities for other agencies to offer similar guarantee as those provided by the Company, or that are not conducive to the Company's business in infrastructure project guarantee under the PPP scheme.

Efforts to mitigate this risk include:

1. Conducting monitoring related to the direction of government regulations/policies and maintaining good communication with key stakeholders to ensure continuing support for the Company's business.
2. Exploring other scope of business outside the PPP scheme.

Risk Assessment

Risk assessment is conducted towards the entire risk factors at PT PII identified before as part of the risk management process. The Company's infrastructure guarantee covers the financial obligation of CA in a PPP contract, where the obligation occurs due to risks caused by certain triggering events, as follows:

1. An action or lack of action by CA or Non-CA Government, with regard to issues that the CA or Non-CA Government have the authority to execute such action under the prevailing laws or regulations;
2. Policies of CA or Non-CA Government;
3. Unilateral decision by CA or Non-CA Government; and
4. Inability of CA of carrying out an obligation mandated by the Project Company based on the Cooperation Agreement (*breach of contract*).

In PT PII organization structure, the RM Division is tasked with, among other things, monitoring the implementation of ERM at the Company. As owner of the risk management framework at PT PII with regards to project guarantee risks, the RM Division provides input from an independent perspective regarding the impact of potential project risk and guarantee claim to PT PII as a business entity.

Specifically, the RM Division will perform an independent review on the compliance of assessment processes and provide independent opinion from the institutional risk perspective (exceedance of certain



atau jika ada masalah institusi yang tidak ditangani, dan sebagainya) yang berasal dari tahap evaluasi proyek (*appraisal*) dan tahap penstrukturan penjaminan (*structuring*).

Mekanisme pemantauan penjaminan proyek harus dijalankan untuk mengidentifikasi seluruh eksposur risiko, jika ada sebelum mereka berubah menjadi klaim. Dalam hal ini, PT PII melalui Divisi *Project Monitoring and Claim Management* (PMCM) akan memantau profil eksposur penjaminan secara periodik melalui pemantauan terhadap upaya Penanggung Jawab Proyek Kerja (PJPK) dalam melakukan mitigasi risiko dalam implementasi proyek. Dengan demikian, mekanisme pemantauan akan membantu PT PII untuk mengambil tindakan perbaikan dan membatasi terjadinya klaim.

PT PII sebagai sebuah institusi perlu memantau eksposur peristiwa risiko operasional, antara lain:

1. Risiko personil utama;
2. Risiko regulasi;
3. Kecurangan internal/eksternal;
4. Risiko proyek *pipeline*;
5. Risiko pengadaan;
6. Gangguan usaha;
7. Pengelolaan eksekusi, penyelesaian dan proses; dan
8. Keselamatan kerja

Terhadap risiko keuangan Perusahaan yang terkait dengan ketidakpastian pasar, PT PII melalui Divisi *Treasury and Investment* (TRI) menerapkan kebijakan investasi yang bijaksana untuk pengelolaan dana dan untuk mencapai hasil optimal. Investasi dana yang belum dicadangkan untuk penjaminan proyek akan mengikuti norma-norma yang diatur dalam kebijakan internal Perusahaan. Norma-norma tersebut dirumuskan untuk memberikan fleksibilitas yang cukup untuk mengoptimalkan pengembalian investasi tanpa mengambil risiko yang berlebihan.

Penilaian Risiko untuk Penjaminan

Keputusan PT PII dalam penyediaan penjaminan risiko infrastruktur dalam suatu proyek KPBU dibuat setelah mengevaluasi, antara lain, kesesuaian *draft* perjanjian KPBU dengan prinsip alokasi risiko, seperti digambarkan dalam diagram berikut:

limits, or certain un-attended institutional issues, or others) arising during the project appraisal stage and the guarantee structuring stage.

The project guarantee monitoring mechanism should be performed to identify all risk exposures, if any, before they turned into claims. In this case, PT PII through the Project Monitoring and Claim Management (PMCM) Division will monitor the guarantee exposure profile periodically by supervising the Contracting Agency (CA) efforts at risk mitigation in the implementation of the project. In this way, the monitoring mechanism will help PT PII to initiate improvement measures and limit the occurrence of claims.

As an institution, PT PII monitors exposure to operational risk events, including:

1. Key personnel risk;
2. Regulation risk;
3. Internal/external fraud risk;
4. Project pipeline risk;
5. Procurement risk;
6. Business disruption risk;
7. Risk on management of execution, settlement and process; and
8. Occupational health and safety risk.

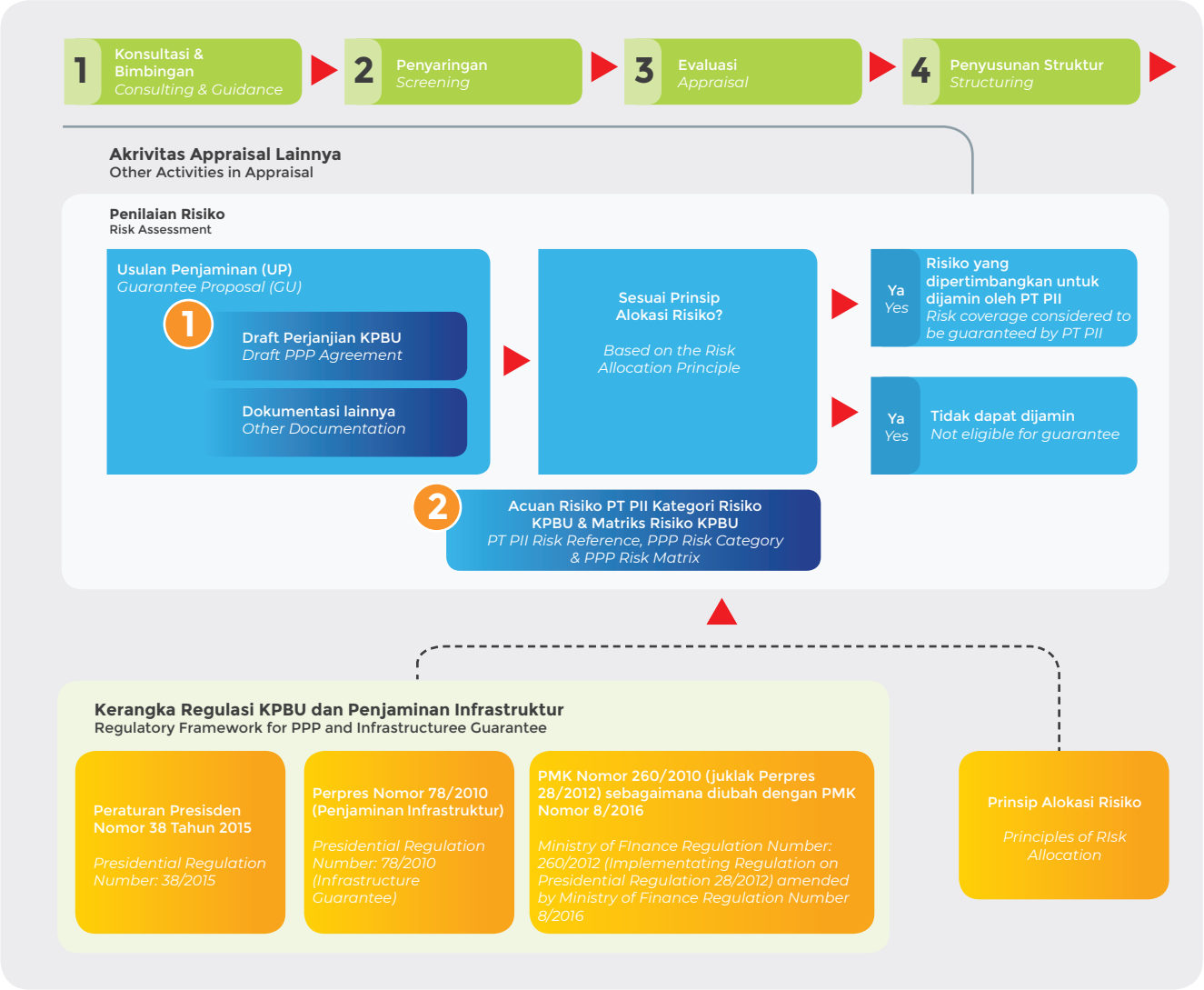
With regards to the Company's financial risk related to market uncertainty, PT PII through the Treasury and Investment Division has implemented a prudent investment policy to manage funds and achieve optimum investment results. The investment of funds as yet unreserved for project guarantee shall comply with norms stipulated in the Company's internal policies. These norms have been formulated so as to provide adequate flexibility to optimize returns on the investment without taking excessive risks.

Risk Assessment on Infrastructure Guarantee

The Company's decision to provide infrastructure guarantee for a PPP project is made following evaluation of, among other things, the consistency between PPP agreement draft and the risk allocation principle, as illustrated below:

Manajemen Risiko

Risk Management



Sistem Informasi Manajemen Risiko

Penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan Manajemen Risiko menggunakan aplikasi komputer berbasis *web* yang disebut *i-RISK*. Aplikasi ini digunakan untuk mengotomatisasi keseluruhan proses manajemen risiko serta menampilkan *dashboard* untuk keperluan analisis dan *monitoring* risiko. Seluruh karyawan dapat memberikan input risiko pada aplikasi ini sehingga dapat mempermudah identifikasi risiko dan formulasi rencana pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Divisi serta Perusahaan.

Fungsi Kepatuhan Prosedur

Selain fungsi Manajemen Risiko, Divisi Risk Management PT PII juga mengelola Fungsi Kepatuhan Prosedur sebagai bagian dari implementasi GCG dan internal kontrol.

Risk Management Information System

In the implementation of Risk Management, information technology is applied in the form of a web-based computer application called the *i-RISK*. The application is used to automate the entire risk management processes and to display a dashboard for purposes of analysis and risk monitoring. Employees can provide risk input to the application, therefore facilitating the risk identification process and formulation of risk mitigation plans by divisions and the Company.

Procedure Compliance Function

In addition to Risk Management function, the RM Division at PT PII is also responsible for the Procedure Compliance function as part of GCG and internal control implementation.



Standar operasional prosedur yang berbasis risiko dibangun untuk mengelola risiko dalam operasional PT PII. Kajian atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal dilakukan untuk mengawasi dan mengelola aspek kepatuhan dalam organisasi, serta memastikan bahwa Perusahaan dan karyawannya mematuhi kebijakan dan prosedur internal yang ada. Kajian ini dilakukan secara independen untuk memastikan bahwa aspek kepatuhan dalam organisasi dievaluasi dan ditindaklanjuti secara tepat.

Berbeda dengan fungsi audit internal yang ditempatkan setelah transaksi, kajian atas kepatuhan (*compliance review*) dirancang sebagai salah satu alat pengelolaan risiko sebelum transaksi. Fungsi Kepatuhan memberikan peringatan awal kepada manajemen dalam pengawasan aspek kepatuhan.

Tinjauan Tahun 2018

Di tahun 2018, Divisi *Risk Management* (Divisi RM) telah menjalankan beberapa program kerja dalam rangka membangun PT PII menjadi organisasi yang mampu mengelola risiko yang melekat pada semua kegiatan bisnis dalam mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan serta mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko oleh Manajemen.

Divisi RM memfokuskan kegiatannya di tahun 2018 untuk memberikan dukungan kepada pemilik risiko (*Risk Owner*) dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko dengan tujuan menurunkan tingkat risiko. Hal ini berbuah hasil dengan semakin terlihatnya pergerakan tingkat risiko ke arah yang lebih rendah

Risk-based operational procedures are developed to manage risks in the operations of PT PII. Reviews on compliance with internal policies and procedures are conducted to supervise and manage compliance issues in the organization, and to ensure that the Company and its employees have complied with existing internal policies and procedures. These reviews are conducted independently to ensure that compliance issues in the organization are properly evaluated and followed-up.

Unlike the internal audit function that was assigned after the transaction, a compliance review is designed as a risk management tool prior to the transaction. The Compliance function thus provides early warning capability to the Management in the oversight of compliance issues.

2018 Review

In 2018, the RM Division implemented a number of work programs to help develop PT PII into an organization capable of managing the inherent risk in all of its business activities toward the achievement of the Company's vision, mission and objectives, as well as in support of risk-based decision making by the Management.

The RM Division concentrated its activities in 2018 to support the various risk owners in the implementation of risk management activities toward reducing the risk level. Positive results have been in evidence, with risk levels moving to lower levels, signifying improved performance in risk management as well as integrated



Manajemen Risiko

Risk Management

yang menunjukkan kinerja pengelolaan risiko yang lebih baik, terintegrasi dan komitmen berbagai pihak di Perusahaan.

Selain itu, pada tahun 2018 terdapat beberapa aktivitas utama manajemen risiko yaitu:

- Melakukan pengkinian atas Acuan Alokasi Risiko dengan beberapa tambahan di antaranya adanya beberapa sektor baru. Acuan ini digunakan sebagai pedoman dan panduan dalam melakukan alokasi atas risiko dalam Proyek Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU);
- Melakukan penyusunan *Risk Impact Analysis* sebagai bagian dari proses *In-Principle Approval* (IPA) Proyek KPBU yang akan dijaminakan;
- Berpartisipasi dalam ASEAN Risk Awards 2018 untuk selalu menumbuhkan kepercayaan *stakeholders* bahwa PT PII senantiasa mengelola risiko dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan ini, PT PII berhasil meraih penghargaan puncak pada kategori *Public Initiative*; dan
- Melakukan kegiatan untuk meningkatkan *awareness* akan manajemen risiko secara berkelanjutan kepada seluruh karyawan dengan menyelenggarakan seminar Manajemen Risiko "*Governance, Risk and Compliance*".

Upaya yang Dilakukan

Sepanjang tahun 2018, sejumlah potensi risiko dihadapi oleh PT PII. Dari risiko perencanaan strategis dan anggaran, regulasi, *stakeholders*, reputasi, maupun proyek *pipeline*. Untuk mengelola tersebut, beberapa hal telah dilakukan untuk menurunkan tingkat risikonya di antaranya:

1. Menyediakan laporan atas status proyek sebagai alat PT PII untuk memantau risiko yang mungkin muncul di proyek secara berkala;
2. Konsultasi secara intensif dengan pemegang saham dan *stakeholder* terkait untuk membangun rencana strategis yang jelas, khususnya yang terkait dengan perluasan mandat;
3. Membangun rencana kapasitas penjaminan dan likuiditas yang kuat untuk memenuhi kebutuhan di masa depan, memperluas penjaminan bersama, menetapkan strategi ekspansi modal, meninjau kebutuhan akan penanaman modal negara dan lain-lain;

efforts and commitment of various parties within the Company.

In addition, 2018 also saw a number of key initiatives in risk management, namely:

- The updating of Risk Allocation Reference with additional items, including a number of new sectors. The reference is used as guidelines and manual in the allocation of risks in PPP projects;
- Formulation of a Risk Impact Analysis as part of the In-Principle Approval (IPA) process for the guarantee of potential PPP projects;
- Participation in the 2018 ASEAN Risk Awards to maintain the trust of stakeholders that in PT PII, risks are managed properly at all times. In this event, PT PII was awarded top place in the Public Initiative category; and
- Conducting activities to improve employee awareness on risk management on a continuing basis by organizing a seminar on Risk Management with the theme "Governance, Risk and Compliance".

Initiatives

Throughout 2018, PT PII was confronted with a number of potential risks, from budget and strategic planning risk, regulation, stakeholder, reputation risk, and up to project pipeline risk. To manage these risks, the Company implemented a number of initiatives to mitigate the risk level, including:

1. Provide project status reports as a tool for PT PII to regularly monitor risks that might arise in infrastructure projects;
2. Intensive consultation with shareholder and related stakeholders to develop a clear strategic plan, especially related to the expanded mandate of IGGF;
3. Develop plans to acquire robust guarantee capacity and liquidity for future needs, expansion of joint guarantee, capital expansion strategy, needs for state equity participation and others;



4. Terus meningkatkan kesadaran *stakeholder* akan model bisnis PT PII dan KPBU dan membangun hubungan yang baik dengan menyelenggarakan *capacity building* atau aktivitas lainnya; dan
5. Menjalankan strategi komunikasi yang telah direncanakan dengan tujuan untuk membangun komunikasi yang intensif.

Rencana Strategis 2019

Selain beberapa kegiatan rutin yang akan dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya seperti melakukan pengkinian atas acuan alokasi risiko, penyusunan *risk impact analysis*, berpartisipasi dalam ASEAN Risk Awards, melakukan *risk management awareness* secara berkelanjutan, pada tahun 2019 Divisi RM melakukan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis Perusahaan antara lain:

1. Pemutakhiran aplikasi Manajemen Risiko (i-RISK) untuk dapat mengakomodasi perkembangan proses manajemen risiko dan memberikan tampilan yang lebih baik; dan
2. Penyempurnaan Kerangka Manajemen Risiko untuk memenuhi kebutuhan dinamika bisnis baru PT PII.

4. Consistently improving awareness among stakeholders concerning PT PII and PPP business model and to nurture harmonious relationship through capacity building and similar activities; and
5. Executing the planned communication strategy with the objective of developing an intensive communication.

2019 Strategic Plans

In addition to routine activities similar to those conducted in previous years such as the updating of the risk allocation reference, the formulation of risk impact analysis, participation in ASEAN Risk Awards, and continuing initiatives to build risk management awareness, the RM Division in 2019 will engage in activities according to the Company's evolving needs and business development, including:

1. Updating of the Risk Management application (i-RISK) to accommodate recent developments in risk management processes and to improve the screen display; and
2. Enhancement to the Risk Management Framework to accommodate the dynamics of new businesses at PT PII.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses pengendalian yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh Insan Perusahaan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai:

- Efektivitas dan efisiensi operasional;
- Keandalan pelaporan; dan
- Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia telah memiliki Pedoman Sistem Pengendalian Internal yang di dalamnya mengatur secara rinci mengenai 5 (lima) komponen sistem pengendalian Internal Perusahaan yakni: Lingkungan Pengendalian (Control Environment), Penilaian Risiko (Risk Assessment), Aktivitas pengendalian (Control Activity), Informasi dan Komunikasi (Information & Communication), Pemantauan (Monitoring). Secara umum, tujuan sistem pengendalian internal Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan (Compliance)

Penerapan sistem Pengendalian Internal dapat membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha Perusahaan dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan oleh Perusahaan.

b. Informasi

Penerapan sistem pengendalian internal dapat membantu dalam menyediakan laporan atau informasi yang andal, lengkap, relevan dan tepat waktu dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Operasional

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya Perusahaan dalam proses pencapaian tujuan Perusahaan.

d. Pencegahan Kecurangan (fraud)

Penerapan sistem pengendalian internal dapat membantu dalam pencegahan terjadinya kecurangan/fraud di Perusahaan.

The Internal Control System is a process of control that is carried out continuously by the Company's Personnels that is designed to provide adequate assurance regarding:

- Operational effectiveness and efficiency;
- Reliability of reporting; and
- Compliance with the applicable laws and regulations

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia has established an Internal Control System Guidelines that regulates in detail the 5 (five) components of the Company's internal control system, namely: Control Environment, Risk Assessment, Control Activity, Information and Communication, Monitoring. In general, the objectives of the Company's internal control system are as follows:

a. Compliance

The implementation of the Internal Control system will assist to provide adequate confidence that the Company's business activities are carried out in accordance with the applicable laws and regulations, both the provisions issued by the Government as well as internal policies and procedures established by the Company.

b. information

The implementation of internal control system facilitates the provision of reliable, complete, relevant, and timely reports or information in the context of appropriate and accountable decision making.

c. Operational

Increasing the effectiveness and efficiency in utilizing the Company's assets and resources in the process of achieving the Company's goals.

d. Fraud Prevention

The implementation of the internal control system can assist in fraud prevention in the Company.



Aktivitas pengendalian Perusahaan dilakukan melalui, antara lain:

- a. *Review* atas kinerja Perusahaan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik aset;
- e. Pemisahan fungsi;
- f. Pelaksanaan atau otorisasi atas kejadian dan transaksi;
- g. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian dan transaksi;
- h. Pembatasan akses dan akuntabilitas atas sumber daya yang dimiliki;
- i. Dokumentasi yang baik atas kejadian dan transaksi pengendalian.

PERAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Sistem Pengendalian Internal terletak pada kemampuannya menciptakan budaya organisasi yang sehat melalui kepemimpinan, arah dan tujuan organisasi serta penetapan standar perilaku etis yang harus diteladani oleh seluruh jajaran organisasi. Perilaku dimaksud hanya dapat efektif dan dicontoh oleh seluruh insan perusahaan apabila terdapat keteladanan (*role model*) yang jelas dari manajemen perusahaan. Penyimpangan maupun inkonsistensi keteladanan yang dilakukan pada level Dewan Komisaris dan Direksi bukan saja akan mengganggu pelaksanaan transaksi perusahaan namun juga dapat merusak seluruh sistem pengendalian internal baik di level *governance* maupun level operasional yang telah dibangun.

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Direksi berwenang menetapkan kebijakan dan prosedur operasional di perusahaan berupa:

1. Rencana strategis dan operasional dalam mencapai tujuan dan target-target perusahaan.
2. Kebijakan mengatur sumber daya perusahaan, baik SDM, aset, keuangan maupun teknologi melalui penetapan standar-standar proses dan hasil kerja serta pendelegasian tanggung jawab serta kewenangan dan distribusi informasi yang mendukungnya.

The Company's control activities are conducted through, among others:

- a. Review of the Company's performance;
- b. Human resources development;
- c. Control over information system management;
- d. Physical control of assets;
- e. Separation of functions;
- f. Implementation or authorization of events and transactions;
- g. Accurate and timely recording of events and transactions;
- h. Restriction of access and accountability of resources;
- i. Proper documentation of control events and transactions.

ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS IN INTERNAL CONTROL SYSTEM

Role of the Board of Commissioners and the Board of Directors in Internal Control System lies in its ability to create sound organizational culture through leadership, direction, and objectives of the organization, as well as establishment of standard ethical conducts that must be followed by all levels of the organization. The conduct can only be effective and exemplified by all personnel in the Company when there is a clear role model of the Company's management. The deviation and inconsistency of exemplars conducted at the level of the Board of Commissioners and the Board of Directors will not only disrupt the implementation of corporate transactions but can also damage all internal control systems both at the level of governance and operational that have been developed.

The Board of Directors shall be responsible for carrying out all actions related to the management for the Company's interests and in accordance with the purpose and objective of the Company. The Board of Directors is authorized to determine the Company's operational policies and procedures in the form of:

1. Strategic and operational plan in achieving the Company's goals and targets.
2. Policy to manage the Company's resources, human resources, assets, finance and technology, through the stipulation of process standards and work result as well as delegation of responsibility as well as authority and distribution of supporting information.



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

3. Kebijakan menggerakkan sumber daya perusahaan melalui penetapan target kinerja, pembentukan budaya organisasi dan pemberian instruksi operasional.

Kumpulan kebijakan manajemen perusahaan merupakan dokumentasi atas strategi dan cara melaksanakan proses bisnis di perusahaan yang paling baik, paling efektif, paling mudah, paling aman, paling cepat, paling efisien, paling murah maupun paling dapat diaplikasikan pada saat ini. Dalam kapasitas ini manajemen harus memastikan adanya mekanisme penyempurnaan yang berkesinambungan atas berbagai kebijakan dan prosedur yang berlaku di perusahaan.

Direksi memiliki tugas utama mengelola, mengarahkan dan menggerakkan serta mengontrol seluruh sumber daya perusahaan untuk melaksanakan seluruh proses bisnis yang ada di perusahaan sebagai upaya mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja perusahaan. Langkah ini dimulai dengan mengidentifikasi sasaran yang harus dilalui untuk mencapai tujuan perusahaan, diikuti dengan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja serta mengatur dan menggerakkan seluruh sumber daya perusahaan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun tersebut.

Dalam menjalankan seluruh mekanisme pengendalian perusahaan tersebut, terdapat 4 (empat) fungsi utama yang melekat dalam pelaksanaan tugas Direksi, yaitu:

1. Merencanakan (*planning*) yaitu menetapkan rencana strategis dan rencana kerja perusahaan dalam mencapai tujuannya;
2. Mengorganisasikan (*organizing*) yaitu mengatur dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan;
3. Menggerakkan (*actuating*) yaitu menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan rencana tindak yang telah ditetapkan; serta
4. Mengendalikan (*controlling*) yaitu memastikan kesesuaian pelaksanaan rencana tindak oleh seluruh jajaran di perusahaan.

Dalam pelaksanaan sehari-hari, seluruh sumber daya yang dimiliki saling berinteraksi menjalankan proses bisnis perusahaan. Proses bisnis merupakan kumpulan aktivitas yang saling berintegrasi satu sama lain untuk menghasilkan keluaran tertentu yang

3. The policy of driving corporate resources through the setting of performance targets, the establishment of organizational culture, and the provision of operational instructions.

A compilation of the Company's management policies is a documentation of the best and most effective, easiest, safest, fastest, most efficient, most cost-effective, and most applicable business process in the Company at the moment. In this capacity, the management shall ensure continuous improvement mechanisms for various policies and procedures applicable in the Company.

The Board of Directors has the main duties of managing, directing, and driving as well as controlling all of the Company's resources to conduct all business processes that exist in the Company as an effort to achieve the goals and targets set in the Company's work plan. This step is started by identifying the targets in order to achieve the Company's objectives, followed by the preparation of strategic plan and work plan, as well as organizing and mobilizing all of the Company's resources to implement the plans that have been developed.

In carrying out all of the Company's control mechanisms, there are 4 (four) main functions inherent in the implementation of the duties of the Board of Directors, namely:

1. Planning, which is to determine the Company's strategic plan and work plan in achieving its objectives;
2. Organizing, which is to organize and optimize the use of resources owned by the Company;
3. Actuating, which is to drive all of the Company's resources to implement the action plan that has been set; and
4. Controlling, which is to ensure the conformity of the implementation of action plan by all levels in the Company.

In daily implementation, all of the Company's resources interact with each other to implement the Company's business process. Business process is a compilation of activities that integrate with each other to generate specific output that supports the strategic goals and



mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi. Perubahan yang terjadi pada lingkungan internal dan eksternal perusahaan serta deviasi dari asumsi yang digunakan dalam rencana kerja seringkali menimbulkan kebutuhan untuk mengubah kebijakan strategis, rencana kerja maupun prosedur kerja di perusahaan. Melalui mekanisme pengelolaan risiko dan penyempurnaan kebijakan prosedur organisasi, perubahan ini terus dipantau dan diantisipasi dalam tindakan korektif berupa perubahan kebijakan, rencana kerja maupun prosedur kerja di perusahaan.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) DENGAN COSO (INTERNAL CONTROL FRAMEWORK)

PT PII telah memiliki Pedoman Sistem Pengendalian Internal yang dapat memberikan panduan dan pemahaman yang komprehensif bagi seluruh Insan Perusahaan maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan mengenai kerangka sistem pengendalian internal Perusahaan. Pedoman ini disusun dengan mengacu kepada COSO *Internal Control-Integrated Framework* (2013) yang salah satunya terkait komponen sistem pengendalian internal yang meliputi 5 (lima) komponen pengendalian, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*);
2. Penilaian risiko (*risk assessment*);
3. Aktivitas pengendalian (*control activity*);
4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*); dan
5. Pemantauan (*monitoring*).

Kelima komponen pengendalian tersebut harus dibangun secara utuh dan terintegrasi. Masing-masing komponen tersebut meliputi beberapa komponen pengendalian yang dirancang dan dilaksanakan agar dapat mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasi keuangan maupun non keuangan yang mengarah pada pencapaian tujuan Perusahaan.

Implementasi Sistem Pengendalian Intern PT PII yang mengacu pada COSO sebagai berikut:

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam perusahaan yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Lingkungan pengendalian mempengaruhi kesadaran akan pentingnya pengendalian oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya.

objectives of the organization. Changes in the internal and external environment of the Company and the deviation from the assumptions used in the work plan often resulted in the need to change the Company's strategic policies, work plans and work procedures. Through the risk management mechanism and improvement of the organization's policy procedures, these changes are continuously monitored and anticipated in corrective action in the form of changes to the policy, work plans and work procedures at the Company.

CONFORMITY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM (SPI) WITH COSO (INTERNAL CONTROL FRAMEWORK)

PT PII has established an Internal Control System Guidelines that can provide comprehensive guidance and understanding for all Company Personnels and other interested parties regarding the Company's internal control system framework. The guideline is prepared with reference to the COSO *Internal Control-Integrated Framework* (2013), one of which is related to the components of the internal control system, which includes 5 (five) control components, namely:

1. Control environment;
2. Risk assessment;
3. Control activity;
4. Information and communication; and
5. Monitoring.

The five control components must be developed in a comprehensive and integrated manner. Each of these components includes several control components that are designed and implemented in order to direct the implementation of financial and non-financial operations that lead to the achievement of the Company's objectives.

The implementation of PT PII's Internal Control System that refers to COSO is as follows:

Control Environment

Control Environment is a condition within the Company that affects the effectiveness of internal control. The control environment influences the awareness regarding the importance of control by the people involved.



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Manajemen wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dan manajemen yang sehat dalam lingkungan kerjanya, diwujudkan melalui:

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Kepemimpinan yang kondusif.
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
7. Perwujudan peran aparat pengawasan internal perusahaan yang efektif.

Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, mengenali, menelaah dan menilai pengelolaan risiko yang terkait dengan usaha dan bisnis Perusahaan. Penilaian risiko dilakukan untuk menentukan dampak dari risiko yang teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan sebagai acuan dalam mengembangkan kegiatan pengendalian yang diperlukan dalam meminimalkan risiko. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan perusahaan yang jelas dan konsisten, mengidentifikasi secara efisien dan efektif terhadap risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar perusahaan dan terakhir melakukan analisis untuk mengetahui dampak dari risiko serta pengendalian yang diperlukan.

Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang ketiga. Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.

Kebijakan dibuat untuk mengarahkan apa yang seharusnya dikerjakan dan berfungsi sebagai dasar bagi penyusunan prosedur. Prosedur adalah rangkaian urutan tindakan, dilakukan satu atau beberapa orang dengan peralatan dan waktu tertentu dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Kegiatan Pengendalian diselenggarakan sesuai dengan ukuran,

Management shall establish and maintain control environment that generates positive and favorable behavior for the implementation of Internal Control System and sound management in its working environment, which is realized through:

1. Enforcement of Integrity and Ethics Values.
2. Commitment to competency.
3. Conducive leadership.
4. Establishment of organizational structure according to the needs.
5. Proper delegation of authorities and responsibilities.
6. Preparation and implementation of sound policies regarding human resource development.
7. Realization of the role of the Company's effective internal supervisory apparatus.

Risk Assessment

Risk assessment is a process to identify, recognize, review, and assess risk management related to the Company's business and operations. Risk assessment is conducted to determine the impact of identified risks towards the achievement of the Company's objectives and targets as reference in developing the control activities necessary to minimize risks. Risk assessment begins with clear and consistent determination of the Company's purpose and objectives, efficient and effective identification of risks that may hamper the achievement of the Company's objectives, both internal and external, and analysis in order to assess the impact of risks and the required control.

Control Activities

Control activity is the third internal control element. Control activities are policies and procedures that may help ensure the direction of leadership to mitigate risks identified during the risk assessment process.

Policies are made to direct on what should be done and serve as the basis for the preparation of procedure. Procedure is a series of action sequences, performed by one or number of people using certain tools and time period in carrying out certain activities. Control Activities shall be organized in accordance with the size, complexity, and nature of the duties and functions



kompleksitas, sifat dari tugas dan fungsi perusahaan, sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Diutamakan pada kegiatan pokok perusahaan.
2. Harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus perusahaan atau bisnis inti perusahaan.
4. Seluruh kegiatan memiliki kebijakan dan prosedur yang ditetapkan secara tertulis.
5. Kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan.

Kegiatan pengendalian harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan, kegiatan pengendalian terdiri atas:

1. *Review* atas kinerja perusahaan.
2. Pembinaan sumber daya manusia.
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
4. Pengendalian fisik aset.
5. Penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja.
6. Pemisahan fungsi.
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
8. Pencapaian yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting.

Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perusahaan. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Sistem informasi dan komunikasi merupakan suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa internal serta eksternal. Informasi tersebut

of the Company, which at least shall have the following characteristics:

1. Preferably on the Company's main activities.
2. Shall be linked to the risk assessment process.
3. Selected control activities shall be adjusted to the specific nature of the Company or its core business.
4. All activities have written policies and procedures.
5. The established policies and procedures shall be implemented.

Control activities shall be regularly evaluated to ensure that they are appropriate and functioning as expected, control activities consist of:

1. Review of the Company's performance.
2. Development of human resources.
3. Control over the management of information system.
4. Physical control of assets.
5. Determination and review of performance indicators and measures.
6. Separation of functions.
7. Authorization of important transactions and events.
8. Accurate and timely achievement of transactions and events.
9. Restrictions on access to resources and records.
10. Accountability to resources and records.
11. Proper documentation of internal control system as well as important transactions and events.

Information and Communication

Information is data that has been processed and used for decision-making in the implementation of the Company's duties and functions. Communication is the process of delivering messages or information by using a particular symbol or sign, both directly and indirectly, in order to obtain feedback.

Information and communication system is a process of presenting reports on operational, financial activities and compliance with the provisions of the laws and regulations.

The Company shall have relevant and reliable information on both financial and non-financial information, which relates to internal and external events. Such information shall be recorded and



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan perusahaan dan lainnya di seluruh perusahaan yang memerlukan dalam bentuk yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian internal dan tanggung jawab operasional.

Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan (*monitoring*) adalah proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal Perusahaan, termasuk fungsi audit internal pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, komparasi, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Internal dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, *reviu*, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan dilakukan dengan mempertimbangkan lingkup dan frekuensi evaluasi, metodologi, dan sumber daya.

Hasil *Review*/Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Penilaian (evaluasi) terhadap sistem pengendalian internal tingkat entitas (*Entity Level Control*) Perusahaan dijalankan oleh Audit Internal mulai 12 September 2018 sampai dengan 6 November 2018, dengan ruang lingkup penilaian mencakup seluruh proses pengendalian tingkat entitas (*Entity Level Control*) yang terdapat di dalam lingkungan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) selama periode tahun 2018.

Metodologi yang digunakan dalam melakukan penilaian (evaluasi) atas penerapan sistem pengendalian internal tingkat entitas adalah sebagai berikut:

- Penelaahan dokumen dan data;
- Observasi dan wawancara dengan manajemen dan karyawan;
- Survei penerapan dengan manajemen dan karyawan;

communicated to the leadership and others throughout the Company in need, in the form that enable such individual to implement internal control and operational responsibility.

Monitoring

Monitoring is the process of assessing the quality of the Company's internal control system, including the internal audit function at each level and unit within the organizational structure. Monitoring is conducted through ongoing monitoring, separate evaluation, and follow-up recommendations of audit results and other reviews.

Ongoing monitoring is conducted through routine management, supervision, comparison, reconciliation and other related actions in the implementation of duties. A separate evaluation is an assessment of the quality of Internal Control System's performance with specific scope and frequency based on the risk assessment and effectiveness of ongoing monitoring procedures. Separate evaluation is conducted through self-assessment, review and testing towards the effectiveness of Internal Control System and is conducted by taking into account the scope and frequency of evaluation, methodology, and resources.

Review/Evaluation Results on the Effectiveness of the Internal Control System

The evaluation on the Company's internal control system (*Entity Level Control*) is carried out by the Internal Audit from 12 September 2018 to 6 November 2018, with the scope of the assessment covering all *Entity Level Control* processes contained within the environment PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) during the 2018 period.

The methodology used in conducting the evaluation on the implementation of the entity level internal control system is as follows:

- Document and data review;
- Observation and interviews with the management and employees;
- Implementation survey with management and employees;



Berdasarkan hasil penilaian (evaluasi) tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan mencapai predikat baik. Selain itu, berdasarkan audit yang dilaksanakan sepanjang tahun 2018, tidak ditemukan adanya kelemahan signifikan dalam pengendalian internal entitas.

Based on the evaluation results, it was concluded that the implementation of the Company's internal control system achieved a good predicate. In addition, based on the audit conducted throughout 2018, there were no significant weaknesses in the entity's internal control.

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Significant Cases Faced by the Company

Pada periode tahun 2018, PT PII, anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak terlibat dalam perkara hukum apa pun, baik berstatus sebagai pelapor maupun terlapor. Dengan demikian PT PII tidak memiliki risiko apapun dalam masalah hukum.

In 2018, PII, members of the Board of Commissioners and Board of Directors were not involved in any legal case either as prosecutor or defendant. Therefore, PII does not have any risk in legal matters.

SANKSI ADMINISTRATIF

Sepanjang tahun 2018, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang menerima sanksi administratif apapun dari otoritas terkait.

ADMINISTRATIVE SANCTION

During 2018, Company, Board of Commissioners and Directors received no administrative sanctions from the relevant authorities.



Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Corporate Information and Data

Dalam rangka mendukung komitmen penerapan keterbukaan informasi, PT PII menyediakan berbagai akses informasi mengenai Perusahaan melalui Laporan Tahunan Perusahaan, *website* Perusahaan, media cetak dan siaran pers. Selain itu, informasi tentang Perusahaan dapat diakses secara langsung melalui telepon, faksimili dan *email*.

1. Laporan Tahunan

PT PII telah mengungkapkan informasi keuangan, informasi penting maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan termasuk juga pelaksanaan pencapaian dan kegiatan usaha Perusahaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Tahunan tersebut dapat diunduh pada *website* Perusahaan.

2. Website dan Alamat Kontak Perusahaan

Melalui *website* Perusahaan www.ptpii.co.id, pemangku kepentingan dan masyarakat umum juga dapat mengakses berbagai publikasi mengenai Perusahaan, termasuk Profil Perusahaan, Laporan Tahunan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Publik juga dapat mengakses informasi langsung melalui:

Telepon : 021-5795-0550
Faksimili : 021-5795-0040
E-mail : info@iigf.co.id

3. Media Cetak

PT PII juga menyiapkan informasi dalam bentuk media cetak yang disalurkan melalui beberapa media yaitu di antaranya melalui surat kabar nasional, *company profile* dan brosur.

In order to support the commitment of disclosure of information, the Company provides access to Corporate information through various media, including Annual Report, the Company's website, print media and press releases. In addition, direct information, can be obtained via telephone, fax and email.

1. Annual Report

The Company has disclosed its financial information, important information as well as other matters related to the Company in its Annual Report and Financial Statements, including the implementation and achievement of the Company's business activities within 1 (one) year. The Company's Annual Report can be downloaded through the Company's website.

2. Website and Contact Information of the Company

Through the Company's website www.ptpii.co.id, stakeholders and the general public may access various documents related to the Company, including Company Profile, Annual Report, and other official documents. The public can also access the information directly through:

Telephone : 021-5795-0550
Fax : 021-5795-0040
E-mail : info@iigf.co.id

3. Print Media

PT PII also provides information in various print media, including national newspapers, Company profiles and brochures.



Benturan Kepentingan

Conflict of Interest

Dalam menjalankan bisnisnya PT PII senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel, serta berkomitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT PII telah memiliki kebijakan internal yang mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi membuat pernyataan tidak memiliki Benturan Kepentingan yang diperbarui setiap tahun.

In carrying out its business, the Company is always required to implement a trustworthy, transparent and accountable manner and also committed to handle all transactions containing conflict of interest by complying with the applicable laws and regulations. The Company has an internal policy that requires all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors to establish a statement of not having Conflict of Interest, which is updated every year.

Kode Etik

Code of Conduct

Keberlangsungan PT PII sangat tergantung kepada kepercayaan seluruh *stakeholders*. Menyadari tanggung jawab kepada *stakeholders* merupakan hal yang sangat penting, maka Manajemen berupaya dengan optimal untuk dapat memenuhi harapan *stakeholders* dan berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan.

Untuk implementasi komitmen tersebut, berbagai inisiatif telah dilakukan. Salah satunya dengan pengembangan dan penyempurnaan Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*). Pedoman Kode Etik adalah Pedoman internal Perseroan yang memuat Sistem Nilai, Etika usaha dan Etika Kerja. Pedoman ini sebagai upaya untuk menunjukkan arah yang benar dan diharapkan mampu meningkatkan motivasi, memandu sikap dan tindakan Insan PT PII, serta membentuk budaya kerja yang menjadi ciri khas Perseroan.

The Company's continuity is highly dependent on the confidence of all stakeholders. Realizing its responsibility towards the stakeholders is very important, the Management strives to optimally meet the expectations of the stakeholders and is committed to implement Good Corporate Governance principles in conducting the Company's business activities.

In implementing this commitment, various initiatives have been undertaken. One of which is through the development and improvement of the Code of Conduct. The Code of Conduct is the internal Code of the Company that contains the Value System, Business Ethics and Work Ethics. This guideline is an effort to show the right direction and is expected to improve the motivation, guide the attitude and actions of the Company's personnel, and establish a work culture that characterizes the Company.



Kode Etik

Code of Conduct

Pedoman Kode Etik PT PII telah diperbarui dan ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2018. Pedoman ini telah disampaikan kepada seluruh unit kerja yang berada di lingkungan PT PII.

The Company's Code of Conduct has been updated and stipulated on 27 February 2018. This guideline has been submitted to all working units within PT PII.

TUJUAN KODE ETIK

Menjadi acuan perilaku Insan PT PII dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing maupun saat berinteraksi dengan *stakeholders*. Kewajiban melaksanakan Pedoman Kode Etik PT PII berlaku bagi seluruh Insan PT PII.

OBJECTIVE OF THE CODE OF CONDUCT

As the reference for the Company's personnel behavior in carrying out their respective duties and responsibilities and when interacting with stakeholders. The obligation to implement the Company's Code of Conduct is applicable for all personnel within PT PII.

KOMITMEN PT PII TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN

PT PII senantiasa membangun suasana yang kondusif dalam berinteraksi dengan stakeholders untuk mendapatkan nilai tambah bagi Perusahaan dengan dilandasi itikad baik, saling percaya, konsekuen, transparan, akuntabel, kesetaraan/kewajaran, saling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

THE COMMITMENT OF PT PII TO THE STAKEHOLDERS

PT PII consistently develops a favorable atmosphere in interacting with the stakeholders to obtain added value for the Company based on good faith, mutual trust, consequence, transparency, accountability, equality, mutual benefit and not contradict to the Company regulations as well as the applicable laws and regulations.

ISI KODE ETIK

Pedoman Kode Etik Perusahaan PT PII terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu:

1. Pendahuluan;
2. Pernyataan Nilai Perusahaan;
3. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Perusahaan;
4. Petunjuk Pelaksanaan;
5. Pelaporan dan Sanksi Pelanggaran.

Intisari atau pokok-pokok isi kode etik Perusahaan adalah tentang:

1. Pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Integritas;
3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Perundangan;
4. Benturan Kepentingan;
5. Etika Profesional dalam Bekerja;
6. Etika dalam Berhubungan dengan Pemangku Kepentingan;
7. Keterlibatan dalam aktivitas politik;
8. Komitmen terhadap Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;

CONTENTS OF THE CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct of PT PII consists of 5 (five) sections, namely:

1. Introduction;
2. Statement of Corporate Values;
3. Guideline of the Company's Code of Conduct and Business Ethics;
4. Implementation Guidelines;
5. Reporting and Sanction of Violations.

The essence or principles of the Company's code of conduct is as follows:

1. Statement of commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners;
2. Integrity;
3. Compliance to the Laws and Regulations;
4. Conflicts of Interest;
5. Professional Ethics in Working;
6. Ethics in Engaging with the Stakeholders;
7. Involvement in political activity;
8. Commitment to the Environment, Occupational Health and Safety;



9. Pelaporan keuangan;
10. Pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian donasi;
11. Komitmen terhadap Perlindungan Aset Perusahaan;
12. Mekanisme penegakan Pedoman Kode Etik Perusahaan termasuk pelaporan dan sanksi atas pelanggaran.

PENGUNGKAPAN KODE ETIK KEPADA SELURUH LEVEL ORGANISASI

Kode Etik Perusahaan berlaku bagi setiap Insan Perusahaan tanpa pengecualian. Untuk karyawan yang baru direkrut akan memperoleh dokumen Kode Etik Perusahaan dan menandatangani pernyataan untuk mentaati seluruh isi Kode Etik Perusahaan.

SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

Insan PT PII yang melanggar Pedoman Kode Etik akan diberikan sanksi dengan menetapkan tingkat pelanggaran, sanksi pelanggaran dan pihak yang berwenang mengeksekusi sanksi, yang sesuai dengan peraturan perusahaan atau ketentuan yang berlaku.

PELAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK

Setiap pihak dapat menyampaikan laporan mengenai pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Insan PT PII melalui Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3). Sepanjang tahun 2018 tidak ada pelanggaran kode etik.

Hal ini mencerminkan PT PII telah membentuk budaya perilaku jujur sejalan dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan.

9. Financial reporting;
10. Giving and receiving gifts, entertainment and donations;
11. Commitment to the Protection of the Company's Assets;
12. The enforcement mechanism of the Company's Code of Conduct, including reporting and sanctions of violations.

DISCLOSURE OF THE CODE OF CONDUCT ACROSS ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION

The Code of Conduct is applicable for all Company Personnels without exception. Every newly recruited employee shall receive the Code of Conduct document and sign the statement to comply with the contents of the Code of Conduct.

SANCTION TO CODE OF CONDUCT VIOLATION

Personnel of PT PII who violates the code of conduct shall be penalized by determining the level of violations, sanction of violations and the authorities that shall execute the sanction, in accordance with the Company's rules or applicable regulations.

REPORTING OF VIOLATIONS TO THE CODE OF CONDUCT

Each party may submit report on violations to the Code of Conduct performed by the Company's personnel through the Violations Reporting Management Team (TP3). Throughout 2018, there were no violations to the Code of Conduct.

This reflects that PT PII has established a culture of honest behavior in line with ethical values and laws and regulations.



Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan

Statement of Corporate Culture

PT PII dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi budaya yang hidup dalam organisasi PT PII. Saat ini PT PII telah memiliki nilai-nilai budaya yang dikenal sebagai InTIME, yakni Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust dan Excellence.

The Company is expected to implement principles that are believed to be good and correct in exercising its roles and responsibilities. The principles shall be internalized as culture in the Company's organization. Currently, the Company has formulated the corporate culture values known as InTIME, namely Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust and Excellence.

NILAI-NILAI UTAMA: IN TIME

Integrity/Integritas

1. Bekerja dengan standar etika tertinggi.
2. Jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam segala urusan.
3. Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, golongan dan/atau pihak-pihak lain.
4. Menjaga komitmen dalam melaksanakan tugas.
5. Mentaati aturan Perusahaan.
6. Bertanggung jawab dalam seluruh tindakan.

Teamwork/Kerja Sama

1. Beroperasi sebagai sebuah tim.
2. Memberi kontribusi keterampilan dan pengetahuan demi kepentingan tim.
3. Mengutamakan kepentingan tim untuk mencapai tujuan Perusahaan.

Think Big/Berpikiran Luas

1. Memiliki pemikiran luas dan mutakhir.
2. Mempertimbangkan berbagai alternatif untuk hasil yang lebih baik bagi Perusahaan dan bagi pemangku kepentingan.
3. Menggali secara terus menerus ide-ide baru untuk perkembangan Perusahaan.
4. Terbuka terhadap berbagai perkembangan yang ada di lingkungan demi hasil terbaik tanpa meninggalkan prinsip tata kelola yang baik.

CORE VALUES: IN TIME

Integrity

1. To work with the highest standard of ethics.
2. To be honest with oneself or other persons in all matters.
3. To uphold the interest of the Company above the interest of individual, group and/or other parties.
4. To maintain the commitment in executing duties.
5. To always comply with the Company's regulations.
6. To always be responsible in all actions.

Teamwork

1. To operate as a team.
2. To contribute in skills and knowledge in the interest of the team.
3. To uphold the interest of the team in striving for the Company's objectives.

Think Big

1. To be broad-minded and cognizant of the latest issues.
2. To consider alternatives that can lead to improved results for the benefit of the company and stakeholders.
3. To continuously strive for innovation towards the Company's development.
4. To be receptive to various developments in the work environment that can lead to the best results while adhering to the principles of good governance.



Mutual Trust/Saling Percaya

1. Memegang teguh etika bisnis bersama seluruh komponen internal Perusahaan maupun dengan mitra Perusahaan.
2. Konsisten memenuhi standar layanan yang dijanjikan.
3. Mempercayai dan menghormati satu sama lain dengan itikad baik untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan kerja dan mitra bisnis.

Excellence/Keunggulan

1. Berkomitmen untuk menjadi yang terunggul dalam melaksanakan apapun yang dilakukan.
2. Berusaha untuk melakukan perbaikan yang terus menerus.
3. Memiliki pengetahuan mendalam guna mendukung kegiatan dan mendapatkan hasil yang melebihi harapan.

Mutual Trust

1. To uphold the highest of business ethics with all components within the Company as well as with business partners.
2. To consistently fulfil the agreed service level standard.
3. To trust and respect one another in good faith in order to earn the confidence of co-workers and business partners.

Excellence

1. To commit to be the best in all of one's endeavor.
2. To strive for continuous improvement.
3. To develop comprehensive and thorough knowledge that can support one's work and deliver results that exceed expectation.

Komitmen GCG dalam Pengendalian Gratifikasi

GCG Commitment in Gratuity Control

Dalam pengelolaan bisnis, PT PII mengutamakan pengelolaan dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Terkait dengan hubungan bisnis, hal yang sering terjadi dan tidak dapat dihindari adalah adanya Gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Oleh sebab itu, untuk menjaga hubungan bisnis tetap berada pada koridor etika dan prinsip-prinsip GCG serta guna mewujudkan pengelolaan bisnis Perseroan yang bersih, sehat dan benar, maka Perseroan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap pengendalian gratifikasi. Untuk itu, Direksi dan Dewan Komisaris telah menetapkan ketentuan mengenai gratifikasi yang diatur dalam Kode Etik Perseroan.

Perseroan juga telah memiliki Pedoman Gratifikasi yang dijadikan acuan dalam pengendalian dan pengelolaan gratifikasi.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pedoman gratifikasi adalah:

- Sebagai pedoman bagi Insan Perusahaan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi gratifikasi di lingkungan PT PII;
- Sebagai bentuk tanggung jawab PT PII dalam mewujudkan pola bisnis yang sehat dan terpercaya, dengan berdasar pada pengelolaan perusahaan yang menuh amanah, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- Menghindari benturan kepentingan dari pihak tertentu yang diwujudkan melalui kebijakan formal; dan
- Mewujudkan pengelolaan perusahaan yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman merupakan hal-hal yang terkait dengan penerimaan dan pemberian segala bentuk gratifikasi, klasifikasi tindakan gratifikasi,

In the business management, the Company prioritizes the management with full mandate, transparency and accountability free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and guided by the principles of Good Corporate Governance. Regarding to business relationships, things that often happen and difficult to avoid is the existence of gratuity from one party to the other.

Therefore, in order to keep its business relationship in the corridor of Good Corporate Governance ethics and principles as well as to realize a clean, sound and proper business management, the Company realizes the importance of a firm position towards gratuity control. Hence, the Board of Directors and the Board of Commissioners have stipulated the provisions concerning gratuity as specified in the Company's Code of Conduct.

The Company also has Gratuity Guidelines which are used as references in controlling and managing gratuities.

Purpose and Objectives

The purpose and objectives of the gratuity guidelines are:

- As a guidance for Company personnel to understand, prevent and control the practice of gratuities within PT PII;
- As a form of PT PII's responsibility in realizing a sound and trustworthy business activities, based on the trustworthy, transparent and accountable management of the Company in accordance with the principles of good corporate governance;
- To avoid conflict of interest with certain parties being manifested in company policies; and
- To create a management of the Company devoid of all forms of corruption, collusion and nepotism (KKN)

Scope

The scope of the guideline concerns issues related to the acceptance and granting of all forms of gratuity, classification of acts of gratuity, limitations, and



batasan, serta pelaporan penerimaan dan pemberian yang berlaku bagi Insan Perusahaan dan seluruh *stakeholders*.

Prinsip Dasar

Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penyusunan pedoman didasarkan oleh prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi

Prinsip keterbukaan ini tercermin dengan adanya mekanisme pelaporan atas penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingkungan PT PII. Mekanisme pelaporan tersebut merupakan sarana bagi Insan Perusahaan untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan yang diperoleh dalam kaitan dengan jabatannya selaku Insan Perusahaan.

2. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas diimplementasikan sebagai bentuk kewajiban dari Insan Perusahaan yang telah diberikan amanah untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam jabatan yang diembannya, untuk tidak menerima pemberian yang tidak wajar dalam bentuk apapun terkait dengan jabatannya dan melaporkannya kepada fungsi yang diberikan kewenangan untuk mengelola laporan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.

3. Independensi

Bagi penerima gratifikasi yang melaporkan hasil penerimaan gratifikasi, prinsip independensi ini ditunjukkan dengan sikap menolak pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.

4. Perlindungan Pelapor

Pelapor pelanggaran gratifikasi dapat dikualifikasikan sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf (a) UU No. 30/2002. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, diwajibkan adanya perlindungan terhadap pelapor gratifikasi dan memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor.

reporting of receipts and gifts that apply to Company Personnel and all stakeholders.

Basic Principles

As a manifestation of the Company's commitment in implementing the principles of good corporate governance, the preparation of the guidelines is based on the following principles:

1. Transparency

The transparency principle is reflected in the mechanism for reporting the acceptance and giving of gratuities within PT PII. The reporting mechanism is a means for Company Personnel to test and guarantee the validity of gifts received in relation to their position as Company Personnel.

2. Accountability

The accountability principle is implemented as a form of obligation of Company Personnel who have been given the mandate to carry out their duties and authorities in their assigned positions, not to accept improper gifts in any form related to their positions and to report such gifts to the authorized functions that manage reports of receipt of gratuities that are considered as bribery.

3. Independency

For recipients of gratuities who report the results of gratuity acceptance, the principle of independency is indicated by the attitude of refusing any form of gifts related to his position or reporting the receipt of gratuities that are considered as bribery.

4. Whistleblower Protection

The reporting of a gratuity violation can be classified as a whistleblower act as defined under Article 15 point (a) Law Number 30 Year 2002. As such, protection to the whistleblower is mandatory, as well as ensuring that there would be no intimidation and discrimination with respect to aspect of employment for the whistleblower.



Komitmen GCG dalam Pengendalian Gratifikasi

GCG Commitment in Gratuity Control

MEDIA PELAPORAN GRATIFIKASI

Untuk pelaporan gratifikasi, PT PII menyediakan saluran pelaporan melalui:

1. Website PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
2. Melalui surat, dengan alamat sebagai berikut:
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Gedung Capital Place, Lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12710;
3. E-mail: pelaporan@iigf.co.id.

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat laporan gratifikasi yang diterima PT PII. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Laporan Gratifikasi Types of Gratuity Report	Jumlah Laporan Number of Report
1	Laporan Penerimaan Gratifikasi Gratuity Receipt Report	0
2	Laporan Penolakan Gratifikasi Gratuity Refusal Report	0
3	Laporan Pemberian Gratifikasi Gratuity Distribution Report	0
4	Laporan Pemberian atas Permintaan Gratifikasi Distribution on Gratuity Request Report	0

Hal ini mencerminkan PT PII telah membentuk budaya perilaku jujur sejalan dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian gratifikasi yang telah ada diharapkan dapat menegah potensi terjadinya pelanggaran di lingkungan Perseroan.

SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kebijakan pengendalian gratifikasi ini telah disosialisasikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan melalui portal internet dan website perusahaan. Tujuan dari sosialisasi adalah memberikan *awareness* kepada seluruh Insan Perusahaan atas peneapan Pedoman Gratifikasi yang disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Bersama Nomor SK-005/BOD/CSC/1018 dan Nomor KEP-10/KOM/PII/10/2018 tentang Pedoman Gratifikasi.

GRATUITY REPORTING MEDIA

For gratuity reporting, PT PII provides reporting channels through:

1. Website of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
2. Correspondence (letter), with the following address:
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Gedung Capital Place, 7th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12710;
3. E-mail: pelaporan@iigf.co.id.

GRATUITY CONTROL REPORT

Throughout 2018, there were no gratuity report received by the Company. With the following details:

This reflects that PT PII has established a culture of honest behavior in line with ethical values and laws and regulations. The existing gratuity control system is expected to be able to mitigate the potential for violations within the Company.

SOSIALIZATION OF GRATUITY CONTROL

The gratuity control policy has been disseminated to the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees through company's internet portals and websites. The purpose of dissemination is to provide awareness to all Company Personnels for the adoption of the Gratuity Guidelines ratified by the Board of Directors and the Board of Commissioners through a Joint Decree No. SK-005/BOD/CSC/1018 and Number KEP-10/KOM/PII/10/2018 on Gratuity Guidelines.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Report of State Officials Assets

Perseroan telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diatur melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-024/DIR/COS/HR/0817 tanggal 2 Agustus tahun 2017 tentang Penetapan Kebijakan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

The Company has established the guidelines in the implementation of the state officials assets report (LHKPN), which is regulated by the Board of Directors Decree No. SK-024/DIR/COS/HR/0817 dated 2 August 2017 on the Determination of Policy for Management of State Officials Assets Report (LHKPN) of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

PENGELOLA LHKPN

Pengelola pelaksanaan LHKPN di lingkungan PT PII adalah Unit Pengelola LHKPN atau disebut sebagai UPL (Unit Pengelola LHKPN). Koordinator UPL adalah Senior Vice President Corporate Service

Sedangkan Tugas Koordinator UPL adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN para wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan LHKPN.
2. Mengingatkan wajib lapor untuk mematuhi kewajiban penyampaian pengelolaan data wajib lapor.
3. Memberikan atau melaksanakan koordinasi terkait pendampingan pengisian LHKPN bagi wajib lapor.
4. Mengusulkan pemberian sanksi hukuman disiplin bagi wajib lapor yang tidak menyampaikan LHKPN atau terlambat menyampaikan LHKPN.

LHKPN ADMINISTRATOR

The LHKPN implementation manager within PT PII is the LHKPN Management Unit or referred to as the UPL (LHKPN Management Unit). The UPL Coordinator is the Senior Vice President of Corporate Service

The Duties of the UPL Coordinator are:

1. Coordinating with the Corruption Eradication Commission (KPK) related to the monitoring and evaluation of compliance with the fulfillment of the obligation to submit LHKPN for LHKPN subjects in reporting and announcing the LHKPN.
2. Reminded the subject to comply with the obligation for the mandatory submission of the LHKPN subjects data.
3. Provide or implement coordination regarding LHKPN filling assistance for the LHKPN subject.
4. Propose the sanction of disciplinary punishment for the LHKPN subjects who did not submit the LHKPN or late in the submission of the LHKPN.

Pelaksanaan LHKPN LHKPN Implementation

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Lapor Reporting Date
Ayu Sukorini	Komisaris Utama President Commissioner	31 Maret 2018 231 March 2018
M. Rahman Ritza	Komisaris Commissioner	22 Maret 2018 22 March 2018
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	27 Maret 2018 27 March 2018
Armand Hermawan	Direktur Utama President Director	21 Maret 2018 21 March 2018
M. Wahid Sutopo	Direktur Director	30 Maret 2018 30 March 2018
Salusra Satria	Direktur Director	31 Maret 2018 31 March 2018

Whistleblowing System

Whistleblowing System

Pada tahun 2018, tingkat risiko PT PII semakin turun. Hal itu merupakan hasil dari strategi kinerja pengelolaan risiko yang lebih baik, terintegrasi dan komitmen berbagai pihak di lingkungan Perseroan.

In 2018, there was a decrease in the level of risk of PT PII as a result of a better, integrated risk management performance strategy and commitment from various parties within the Company.

Sebagai rangkaian kebijakan Perusahaan dalam memberantas terjadinya praktik korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya, serta sebagai wujud komitmen manajemen terhadap implementasi tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan telah menyusun dan menetapkan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System* - WBS).

As a series of the Company policies in eradicating corruption, bribery, and other fraudulent practices, and as a realization of the management commitment towards the implementation of good corporate governance, the Company has established Guideline for Whistleblowing System (WBS).





Pedoman tersebut memuat aturan dan kaidah-kaidah *Whistleblowing System* yang sesuai dengan peraturan dan perundangan. WBS adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik *good governance*.

PT PII telah memiliki Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran yang disahkan oleh Direksi pada tanggal 28 Desember 2017.

Maksud dan Tujuan

1. Sebagai pedoman pelaksanaan dalam menangani pelaporan pelanggaran dari Pemangku Kepentingan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai.
2. Mendorong setiap Insan Perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan/melaporkan tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan kode etik, hukum, standar prosedur operasi, kebijakan manajemen dan hal-hal lainnya yang dipandang dapat merugikan/membahayakan Perusahaan.
3. Meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan kepada setiap Insan Perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya mengenai adanya perlindungan dari hukuman, tindakan balasan dan atau perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil kepada Pelapor apabila yang bersangkutan mengungkapkan pelanggaran, dengan berdasarkan itikad baik dan bukti memadai.
5. Mendukung terwujudnya budaya keterbukaan, akuntabilitas dan integritas
6. Meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal dan kinerja pegawai maupun organisasi.

The guideline contains the rules and norms of Whistleblowing System in accordance with the laws and regulations. The Whistleblowing System is part of the internal control system in preventing the practice of irregularities and fraud as well as strengthening the implementation of good governance practices.

PII has established the Guideline for Violations Reporting System authorized by the Board of Directors on 28 December 2017.

Purpose and Objectives

1. As an implementation guideline in handling the reporting of violations from Stakeholders to ensure effective mechanisms for violations reporting settlement within a reasonable period of time.
2. Encourage all personnel of the Company and other stakeholders to submit/report on violations and/or deviations of code of conduct, laws, standard operating procedures, management policies and other matters deemed to be detrimental/harmful to the Company.
3. Minimize the possibility of risks that may harm the Company.
4. Increase the confidence of every personnel of the Company and other stakeholders regarding the protection against penalties, countermeasures and/or inappropriate and unfair treatment to the Whistleblower in the event the individual disclose the violations, based on good faith and with sufficient evidence.
5. Supports the realization of the transparency, accountability, and integrity culture
6. Improving the effectiveness of good corporate governance, internal control, and performance of the employees and the organization.



Whistleblowing System

Whistleblowing System

Prinsip Dasar Pelaporan

Penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Integritas dan Profesionalisme

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran manajemen Perusahaan harus berkomitmen dan mendukung sepenuhnya penerapan kebijakan Perusahaan mengenai sistem pelaporan pelanggaran, sehingga tidak ada kesempatan bagi Insan Perusahaan untuk melakukan pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas suatu keputusan/jabatan.

2. Kerahasiaan Data dan Asas Praduga Tak Bersalah

Perusahaan harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pelaporan dari masyarakat dan karyawan terkait dengan pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lingkungan Perusahaan sehingga terdapat kerahasiaan informasi dan seseorang dianggap tidak bersalah sampai terdapat bukti-bukti yang mendukung kesalahan tersebut.

3. Keadilan

Perusahaan harus sedapat mungkin bertanggung jawab dan bersikap adil terhadap pelaporan pelanggaran dan penyimpangan yang diterima oleh Perusahaan, baik menyangkut karyawan, Direksi maupun Dewan Komisaris.

4. Itikad Baik

Pengungkapan/pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu (grievance) ataupun didasari pada kehendak buruk/fitnah.

Mekanisme Penyampaian Laporan

Pelapor menyampaikan dugaan Pelanggaran secara tertulis melalui saluran pelaporan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan yang dikelola Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3).

Apabila pelapor menarik kembali Pelaporan yang telah dilakukan, maka Pelapor wajib memberikan alasan terkait pembatalan pelaporan tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pelapor anonim (tanpa identitas).

Basic Principles of Reporting

Submission of alleged violations report performed by the whistleblower shall be based on the following principles:

1. Integrity and Professionalism

The Board of Commissioners, the Board of Directors, and the entire management of the Company must commit and fully support the implementation of the Company's policy on the whistleblowing reporting system, hence there is no opportunity for the Company's personnel to commit violations, irregularities, and misuse of authority over a decision/position.

2. Data Confidentiality and Presumption of Innocence Principle

The Company shall prepare the mechanisms and procedures for reports submitted by the public as well as employees related to the violations, irregularities, and abuse of authority occurring within the Company, hence confidentiality of information shall exist and an individual shall be deemed innocent until there is evidence to support such violations.

3. Justice

The Company shall be responsible and fair to the reporting of violations and irregularities received by the Company, either involving employees, the Board of Directors, and Board of Commissioners.

4. Good Faith

Disclosure/reporting should be done in good faith and not as a personal complaint against a particular policy of the Company (grievance) or based on bad faith/slander.

Report Submission Mechanism

The Whistleblower shall submit the alleged violations report in writing through the reporting channel established by the Company, and managed by the Whistleblowing System Management Team (TP3).

In the event the whistleblower withdraws the report, the whistleblower shall provide reasons for the cancellation of reporting. This provision does not apply to anonymous (without identity) whistleblowers.



Saluran Pelaporan Pelanggaran

Perusahaan menyediakan fasilitas saluran pelaporan pelanggaran melalui:

1. *Website* di alamat : www.ptpii.co.id;
2. Surat yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dengan alamat sebagai berikut:
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Gedung Capital Place Lantai 7
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 18,
Jakarta 12170, Indonesia;
3. E-mail: pelaporan@iigf.co.id.

Penanganan Pelaporan

Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) akan dipilah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan syarat 3W1H (*What, When, Who* dan *How*).

Perlindungan bagi Pelapor dan Terlapor

Dalam melaksanakan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, Perusahaan menetapkan kebijakan perlindungan bagi pelapor berupa:

1. Jaminan kerahasiaan terhadap identitas terlapor dan isi laporan selama dugaan pelanggaran belum terbukti;
2. Jaminan keamanan bagi pelapor dari internal Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan, diskriminasi, tekanan dan/atau intimidasi dalam segala bentuk serta catatan yang merugikan dalam file pribadi.

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada pelapor yang beritikad baik dan Perusahaan mematuhi segala peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan pelapor.

Tim Pengelola Whistleblowing System

Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) adalah tim yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem Pelaporan Pelanggaran dan pelaksanaan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran ini. TP3 paling sedikit beranggotakan 1 (satu) orang perwakilan Divisi Audit Internal, 1 (satu) orang perwakilan Komite Audit dan 1 (satu) orang perwakilan Divisi Corporate Secretary (CSR) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris.

Channels for Reporting Violations

The Company provides the channel facilities for reporting violations through:

1. Website at the address : www.ptpii.co.id;
2. Letters addressed to authorized officers with the following address:
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Gedung Capital Place 7th Floor
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 18,
Jakarta 12170, Indonesia;
3. E-mail: pelaporan@iigf.co.id.

Handling of Reports

Reports of alleged violations received by the Whistleblowing System Management Team (TP3) will be sorted according to the applicable provisions by prioritizing the 3W1H (*What, When, Who* and *How*) requirements.

Protection for Whistleblower and Reported Parties

In implementing the alleged violations reporting mechanism, the Company established a protection policy for the whistleblower in the form of:

1. Confidentiality guarantee of the whistleblower's identity and the contents of the report as long as the alleged violations have not been proven;
2. Security guarantee for the whistleblower from the Company's internal personnel against harmful treatment such as unfair dismissal, demotion or rank, harassment, discrimination, pressure and/or intimidation in all forms as well as adverse notes in personal file.

The Company is committed to provide protection to whistleblower that has good faith and the Company complies with all applicable laws and regulations in the protection of the whistleblower.

Whistleblowing System Management Team

The Whistleblowing System Management Team (TP3) is an independent team, established by the Board of Directors and the Board of Commissioners in charge of the whistleblowing system management and the implementation of the Guidelines for the Whistleblowing System. TP3 shall consist of at least 1 (one) representative of the Internal Audit Division, 1 (one) representative of the Audit Committee and 1 (one) representative of the Corporate Secretary Division (CSR) who are appointed by the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners.



Whistleblowing System

Whistleblowing System

Sosialisasi WBS

Dalam rangka memberikan pemahaman tentang sistem pelaporan pelanggaran (WBS) yang dikelola secara independen, Perseroan telah melakukan sosialisasi kepada Insan Perusahaan dan para pemangku kepentingan. Sosialisasi dilakukan melalui portal internal dan *website* Perseroan.

Jumlah Laporan Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat pelaporan atas dugaan pelanggaran yang masuk dalam kategori perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/standar terkait dan peraturan internal perusahaan yang meliputi hal-hal sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran PT PII.

Mengingat tidak adanya pelaporan atas dugaan pelanggaran yang disampaikan, maka tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

WBS Dissemination

In order to provide an understanding on the violation reporting system (WBS) that is managed in an independent manner, the Company has performed socialization to the Company Personnel and stakeholders. The socialization is carried out through the Company's internal portal and website.

Number of Reports in 2018

Throughout 2018, there were no reports of alleged violations included in the category of acts violating the laws and regulations, related rules/standards, and the company's internal regulations covering matters stipulated in the Violation Reporting Guidelines of PT PII.

Given that there were no reporting on alleged violations submitted, there is nothing that needs to be followed up.



Praktik *Bad Corporate Governance*

Bad Corporate Governance Practices

Sepanjang tahun 2018, PT PII tidak melakukan praktik tata kelola perusahaan yang tidak patut. Rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah ini:

Throughout 2018, PT PII did not conduct any inappropriate corporate governance practices. The details are presented in the following table:

No.	Kriteria Criteria	Realisasi Realization
1.	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan Reports stating as a company that pollutes the environment	Tidak ada None
2.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan Important legal cases currently being faced by company, subsidiaries, members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners currently serving that are not disclosed in the Annual Report	Tidak ada None
3.	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Non-compliance in fulfilling tax obligations	Tidak ada None
4.	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan Non-conformity of annual reports and financial reports presentation with the applicable regulations and Financial Accounting Standard	Tidak ada None
5.	Kasus terkait dengan buruh dan karyawan Legal cases related to workers and employees	Tidak ada None
6.	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan listed There were no disclosures on operating segments in listed companies	Tidak ada None
7.	Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan hardcopy dengan Laporan Tahunan softcopy Discrepancies between the hardcopy and the softcopy of the Annual Report	Tidak ada. Semuanya telah sesuai None. Everything is in conformity



The background of the entire page is a photograph showing the silhouettes of two construction workers wearing hard hats and standing on a high-rise building under construction. They are looking at a large set of plans. The sky is a mix of blue and orange, suggesting a sunset or sunrise. The building's steel framework is visible against the sky.

07

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

- 342 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**
Corporate Social Responsibility
- 346 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Lingkungan Hidup**
Corporate Social Responsibility to the Environment
- 348 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja**
Corporate Social Responsibility in Employment, Occupational Health And Safety
- 352 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Bidang Sosial Kemasyarakatan**
Corporate Social Responsibility In Community Social Development
- 353 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen**
Corporate Social Responsibility To Customers

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

PT PII melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan melalui tiga pendekatan: kedekatan, keterikatan dan manfaat.

PT PII implements a corporate social responsibility program through three approaches: closeness, attachment and benefits.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) memandang bahwa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) merupakan bentuk kepedulian secara berkelanjutan terhadap lingkungan hidup, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kewajiban untuk menyediakan tempat yang nyaman dan hubungan kerja yang baik dengan karyawan, mengutamakan terjaganya kesehatan dan keselamatan kerja dan ikut serta mengembangkan ekonomi dan komunitas lokal.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) considers that Corporate Social Responsibility (CSR) activities are an embodiment of the continuing concern for the environment, respect for human rights, an obligation to provide a comfortable workplace and maintain good relationship with employees, prioritizing occupational health and safety, as well as participating in developing the economy and local community.





Karena itulah, pelaksanaan program CSR ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban, melainkan bentuk komitmen Perseroan untuk menciptakan harmoni dengan masyarakat dan lingkungan sekitar serta terlibat dalam pembangunan berkelanjutan.

PT PII menginginkan agar keberadaannya dapat membawa dampak positif yang berkesinambungan bagi masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesuai dengan visi Perseroan, untuk menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, PT PII berharap kehadirannya dapat berkontribusi terhadap bangsa dan negara Indonesia.

PT PII meyakini implementasi CSR dalam jangka panjang akan memberikan banyak manfaat bagi PT PII, terutama pada aspek tumbuhnya kepercayaan, terciptanya keharmonisan dan meningkatkan reputasi yang pada akhirnya memiliki implikasi pada penciptaan nilai tambah yang mendorong kelancaran kestabilan dan pertumbuhan usaha Perusahaan.

Landasan Pelaksanaan

Kegiatan CSR Perseroan dilaksanakan atas dasar landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; dan
3. Surat Keputusan Direksi Nomor SK: SK-004/BOD/CSR/2015 tentang Besaran Dana Penyaluran Sponsorship, Donasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Anggaran dan Lingkup Kegiatan

Dalam menjalankan kegiatan CSR, PT PII berfokus pada Empat Pilar Utama yang menjadi target penting dalam aktivitas CSR Perseroan, yaitu: Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Sosial dan Budaya, serta Lingkungan.

Therefore, the implementation of CSR programs is not only a fulfillment of an obligation, but rather the embodiment of the Company's commitment to create harmonious relationship with the community and surrounding environment, as well as to participate in sustainable development.

PT PII aspires for an existence that bring sustainable long-term positive impact, both directly and indirectly, for people in Indonesia. In line with its vision to become the key SOE driver in accelerating sustainable infrastructure development to improve the living standard of the Indonesian people, the Company expects that its presence may contribute to the nation and people of Indonesia.

The Company believes that the implementation of CSR will provide many benefits for the Company in the long term, mainly on aspects such as growing trust, creating harmony and enhancing reputation, which ultimately has implication for value creation that promote efficiency and stability of its business growth.

Implementation Basis

The Company's CSR activities is implemented in accordance with the following legal basis:

1. Law No.40/2007 concerning Limited Liability Company.
2. Government Regulation No.47/2012 concerning the Corporate Social and Environmental Responsibility; and
3. Decree of the Company's Board of Directors No. SK-004/BOD/CSR/2015 concerning the Amount of Sponsorship Funds, Donation, and the Corporate Social and Environmental Responsibility.

Budget and Scope of Activity

In carrying out CSR activities, PT PII focuses on four main pillars as key targets of the Company's CSR activities, namely: Education, Community Economic Empowerment, Social and Culture, as well as Environment.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Selain di luar Empat Pilar Utama tersebut, PT PII juga melaksanakan program-program CSR lain seperti donasi dan partisipasi *sponsorship*. Hal ini merupakan wujud komitmen Perseroan dalam menjaga *relation* dan *engagement* dengan masyarakat, lingkungan maupun para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2018, Perseroan secara kumulatif mengalokasikan dana sebesar Rp1,150 miliar, dengan alokasi penyaluran dana sebagai berikut:

Program Program	Besaran Anggaran Budget
Kegiatan CSR 4 Pilar Utama Activities of 4 Main Pillars	Rp805.000.000
Kegiatan CSR Lain Other CSR Activities	Rp345.000.000
Total Other CSR Activities	Rp1.150.000.000

In addition to the Four Main Pillars, PT PII also carried out other CSR programs, such as donation and sponsorship. This is part of the Company's commitment in maintaining relationship and engagement with the community, environment, as well as stakeholders.

In 2018, the Company cumulatively allocated funds amounting to Rp1.150 billion, with details as follows:

Alokasi dan Penggunaan Dana CSR

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor SK-003/BOD/CSC/0518 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dalam perencanaan program CSR dan penyaluran anggaran dana CSR, agar mempertimbangkan 3 (tiga) prinsip dasar sebagai berikut:

1. Kedekatan (*Proximity*)

Pelaksanaan program CSR dilaksanakan mendekati domisili Perusahaan maupun di sekitar wilayah Perusahaan melaksanakan aktivitas usahanya.

2. Keterikatan

Program CSR tersebut mendukung aktivitas bisnis Perusahaan, meningkatkan *brand awereness* dan sebagai upaya mitigasi risiko Perusahaan terhadap aktivitas bisnisnya yang memberi manfaat pada lingkungan dan sosial.

3. Manfaat

Program CSR dapat memberikan efek positif kepada masyarakat terutama kepada *stakeholder*.

Selain itu, perencanaan program CSR dan penyaluran anggaran dana CSR dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK: SK-004/BOD/CSR/2015 tentang Besaran Penyaluran *Sponsorship*, Donasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

CSR Budget Allocation And Disbursement

In accordance with the Decree of the Company's Board of Directors No. SK-003/BOD/CSC/0518 concerning the Implementation Guideline of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund's Corporate Social and Environmental Responsibility, in the implementation of CSR program and the disbursement of CSR budget, the following 3 (three) basic principles shall be considered:

1. Proximity

The implementation of CSR program is carried out close to the Company's location as well as surrounding the Company's areas of business operations.

2. Relevance

The CSR program supports the Company's business activities, in improving brand awareness as well as its risk mitigation effort towards business activities that are beneficial for the social and environment.

3. Magnitude

The CSR program gives positive impact to the society, particularly to the stakeholders.

On top of that, the implementation of CSR program and the disbursement of CSR budget is carried out in accordance with the Decree of the Company's Board of Directors No. SK-004/BOD/CSR/2015 concerning the Amount of Sponsorship Funds, Donation, and the Corporate Social and Environmental Responsibility.



Pemanfaatan alokasi dana CSR yang dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan prioritas yang mengacu pada standar prosedur operasional (SOP) adalah sebagai berikut:

The utilisation of CSR budget disbursement carried out by the Company is in line with the priority that refers to the standar operating procedure (SOP):

No.	Program	Besaran Anggaran Allocation
1	Pendidikan (Peningkatan kapasitas pengetahuan, sarana dan prasarana pendidikan) Education (knowledge capacity building, education facilities and infrastructure)	45%
2	Bantuan tanggap darurat bencana Natural disaster relief	10%
3	Kesehatan Health	10%
4	Keagamaan Religious	5%
5	Sosial dan Budaya Social and Culture	5%
6	Pemuda dan Olahraga Youth and Sport	5%
7	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Community Economic Empowerment	5%
8	Pelestarian/penghijauan lingkungan Environmental Preservation/Conservation	5%
9	Donasi dan <i>Sponsorship</i> Donation and Sponsorship	5%
10	Lain-lain Others	5%

Organisasi Pelaksana

Tanggung jawab pengelolaan program CSR di PT PII dilakukan oleh Divisi *Corporate Secretary* yang berada di bawah pengawasan Direksi. Divisi *Corporate Secretary* menyusun program CSR yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan mitra kerja pihak ketiga, yaitu akademik, instansi pemerintah, lembaga kemanusiaan nasional dan lembaga sosial lokal sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas program.

Adapun terkait dengan aspek ketenagakerjaan dan tanggung jawab terhadap konsumen, dalam hal ini dikoordinasi oleh unit SDM dan divisi terkait lainnya.

Implementing Organization

The responsibility of CSR program management at the Company is held by the Corporate Secretary Division, which is under the supervision of the Board of Directors. The Corporate Secretary Division develops CSR programs, which in its implementation, the Company works together with third party partners, namely academics, government agencies, national humanitarian agencies, and local social institutions as required, by taking the efficiency and effectiveness of the program into account.

Meanwhile, in relations to the employment and responsibility to consumers aspects, it shall be coordinated with the HR Unit and other relevant divisions.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Lingkungan Hidup

Corporate Social Responsibility to the Environment

Kebijakan

PT PII meyakini bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang keberlangsungan bisnis Perseroan. Untuk itu, PT PII berkomitmen untuk mendukung upaya pelestarian alam dan ekosistem yang terkandung di dalamnya untuk menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari upaya untuk memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan usaha.

Meskipun dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan relatif kecil, hal tersebut tak mengurangi komitmen Perseroan untuk ikut terlibat pada upaya pemeliharaan kelestarian lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, PT PII senantiasa memastikan kalau dalam setiap kegiatan bisnis yang dilakukan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Kebijakan Perseroan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup dimulai dari internal PT PII. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk himbauan, maklumat dan Peraturan Perusahaan dalam rangka meminimalisir dampak operasional Perusahaan terhadap lingkungan hidup.

Selain itu, PT PII juga telah menyusun kebijakan perlindungan dan pelestarian lingkungan yang berkaitan dengan pihak eksternal, dalam hal ini pengembang infrastruktur yang akan memanfaatkan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Perseroan. Untuk memastikan para pengembang menjaga kelestarian lingkungan, Perseroan telah menyusun Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF) sejak April 2012.

Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2018, PT PII menyelenggarakan program kegiatan CSR di bidang lingkungan hidup melalui beragam kegiatan, antara lain:

1. Program Hemat Kertas dengan Memaksimalkan Penggunaan e-mail (*Soft Copy*)

PT PII mengurangi intensitas penggunaan kertas dengan memaksimalkan penggunaan e-mail (*soft*

Policy

PT PII believes that environment is one of main factors in supporting the Company's business sustainability. Therefore, the Company has strong commitment in supporting efforts at nature and ecosystem conservation in order to maintain the balance of nature as part of efforts to ensure the sustainability of Company's business.

Despite the fact that its business activities has only minor direct impact towards the environment, the Company never cease to commit to participate in the environmental conservation efforts, both directly and indirectly. Therefore, in each of its business activities, the Company always ensures that its operations do not generate negative impact on the environment.

The Company's policy in environmental preservation and conservation starts from within. This is embodied in the form of appeals, edicts, and Company Regulation in order to minimize the impact of the Company's operations on the environment.

In addition, PT PII has also formulated environmental preservation and conservation policies related to external parties, namely the infrastructure developers, which will utilize the guarantee facilities provided by the Company. In order to ensure the preservation of environment by these developers, the Company has prepared the Environment and Social Management Framework (ESMF) since April 2012.

Implementation of CSR Activities

In 2018, the Company held various CSR activities on the environmental aspect, details are as follows:

1. Paper Saving Program by maximizing the use of email (*soft copy*)

PT PII reduced paper use by maximizing the use of email (*soft copy*) in all forms of communication



copy) dalam setiap bentuk komunikasi antar unit kerja di lingkungan Perseroan. Dengan program ini, diharapkan tercipta budaya *paperless* di lingkungan Perseroan.

2. Penggunaan Kertas Bekas ataupun Melaksanakan *Print Bolak-balik*

Dengan program ini diharapkan dapat meminimalisir kegiatan untuk melakukan pencetakan. Pencetakan menggunakan kertas hanya dilakukan bila hal tersebut sudah dianggap final, sementara hal-hal yang masih bersifat *draft*, pencetakan dilakukan menggunakan *print bolak-balik*.

3. Penghematan Listrik dan Air

PT PII mengimbau untuk melakukan penghematan listrik dengan melakukan sosialisasi dan anjuran untuk mematikan lampu dan listrik apabila tidak terpakai. Begitu pun dengan pemakaian air diharapkan untuk tidak boros dalam penggunaannya.

4. Untuk mengurangi penggunaan masalah plastik

Sejak tahun 2017 hingga saat ini, PT PII secara berkelanjutan meneruskan kebiasaan baik yaitu mengganti botol air minum dalam kemasan yang sebelumnya dibagikan ke meja karyawan dengan beralih menggunakan botol *tumbler*.

5. Untuk menumbuhkan kesadaran peduli dan mencintai kebersihan

PT PII memberikan pelatihan kepada guru dan murid tentang pentingnya membuang sampah sembarangan di SDN 017 Samboja yang terletak dekat dengan pembangunan jalan tol. Selain itu PT PII juga melakukan penanaman bibit pohon yang berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman.

means between work units at the Company. The program is expected to create a paperless culture within the Company.

2. Re-use of used paper or duplex printing

The program is expected to minimize printing activities. Printing with paper is only done for final document. For documents that are still in draft, printing is done with duplex print mode.

3. Electricity and Water Savings

The Company encourages electricity and water saving by carrying out socialisation and campaign to turn off the lights and electricity when not in use. Similarly with water usage, which is expected to be used efficiently.

4 To reduce the use of plastics

since 2017 to date the Company has continuously encouraged the replacement of bottled drinking water that was previously distributed to each employee's desk, with the tumbler bottle.

5. To foster awareness and concern for cleanliness

IIFG provides training for teacher and students regarding the importance of not littering at SDN 017 Samboja, which is located nearby the toll road construction. The Company also planted tree seedlings in order to create a comfortable environment.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Corporate Social Responsibility in Employment, Occupational Health and Safety

BIDANG KETENAGAKERJAAN

Kebijakan

PT PII meyakini bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu pilar penting dalam mencapai kinerja dan tujuan perusahaan. Untuk itu, PT PII juga selalu memperhatikan kompetensi dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas serta profesionalisme setiap karyawan.

Dalam menunjang performa karyawan, Perseroan juga bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, serta kesejahteraan setiap karyawannya. Hal itu dipenuhi melalui berbagai program dan keselamatan.

Dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan mengacu pada sejumlah regulasi. Misalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan serikat karyawan.

Seluruh kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan Perseroan adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Termasuk di dalamnya, sebagai upaya meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hubungan kerja.

EMPLOYMENT

Policy

PT PII strongly believes that human resources (HR) is one of the important pillars towards achieving the Company's objectives and performance target. For this reason, the Company also takes into account the competencies by organising educational and training activities that aims to improve the quality as well as the professionalism of each employee.

In supporting employees performance, the Company is also responsible for the occupational health and safety aspect, as well as the well-being of each of its employees. This is realised through various programs and safety.

In implementing the CSR activities on the employment, occupational health and safety, the Company refers to some regulations. For example, Law No. 13/2003 concerning Manpower, Law No. 2/2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, Law No. 1/1970 concerning Occupational Safety and Collective Labor Agreement (PKB) between management and labor union.

The Company's employment policies ensure compliance with applicable laws and regulations, as well as to minimize the occurrence of violation of human rights in a work relationship.



Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2018, PT PII menyelenggarakan program dan kegiatan CSR dalam bidang ketenagakerjaan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kompetensi Karyawan

PT PII merealisasikan program pengembangan kompetensi dengan kesempatan yang terbuka bagi seluruh karyawan. Penguatan kompetensi SDM dilakukan dengan kegiatan Pelatihan dan Pendidikan (Diklat) yang bersifat perubahan kompetensi dan pengembangan kompetensi, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap strategi bisnis dan operasional. Pelatihan untuk perubahan kompetensi bertujuan untuk menyiapkan kompetensi karyawan agar mampu menyikapi perubahan. Sementara itu, pelatihan untuk pengembangan kompetensi bertujuan untuk menyiapkan karyawan dengan kompetensi tertentu guna mendukung portofolio bisnis PT PII.

Selama tahun 2018 telah diselenggarakan sejumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh karyawan, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pelatihan Types of training	Jumlah Training Number of training	Total Peserta (orang) Number of participants	Rata-Rata Peserta (orang) Number of participants in average (person)
Inhouse Training	8	166	21
Knowledge Sharing	12	508	42
Public Training	92	144	2

2. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Hingga akhir tahun 2018, PT PII memiliki karyawan berjumlah 128 orang. Dari jumlah karyawan tersebut, sebanyak 69 orang merupakan karyawan laki-laki, dan sebanyak 59 orang karyawan perempuan. Demografi karyawan berdasarkan *gender* tersebut menunjukkan bahwa sistem rekrutmen yang diselenggarakan telah menjunjung tinggi asas kesetaraan dan kesempatan kerja dengan tidak membedakan pria dan wanita.

Implementation of CSR Activities

In 2018, the Company held various CSR activities on the employment aspect, details are as follows:

1. Employee Competency Development

The Company organized competency development programs that are open for all employees. HR competency improvement is conducted through training and education activities consisting of competency change and competency development, either directly or indirectly related to the Company's business and operational strategy. Training for competency change aims to prepare employee competencies in adapting with changes. Meanwhile, training for competency development aims to prepare employees with certain competencies to support the Company's business portfolio.

Throughout 2018, the Company has held numerous training activities for its employee, with details as follows:

2. Gender Equality and Employment Opportunities

Until the end of 2018, PT PII total employees reached 128 people, consisting of 69 male and 59 female employees. The gender-based demography implies that the recruitment system held by the Company is in line with the principle of gender equality and employment opportunities, without discriminating between female and male.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Corporate Social Responsibility in Employment, Occupational Health and Safety

PT PII juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan termasuk hak untuk memperoleh promosi pengembangan karir, pendidikan dan hak-hak karyawan lainnya yang tercantum dalam perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu pun dengan remunerasi dan hak-hak karyawan. Perseroan senantiasa memberikan imbal jasa yang sesuai dengan atas hasil kerja seluruh karyawan yang sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan tidak membedakan *gender*, suku, agama, ras dan antar golongan. Perbedaan hanya terjadi apabila terdapat perbedaan atas kinerja kompetensi atau pengalaman kerja.

3. Tingkat *Turnover* Karyawan

Pada tahun 2018, tingkat *turnover* mencapai 8,5% lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 7%.

4. Hubungan Industrial

PT PII berupaya memastikan terjalinnya hubungan yang saling menghormati dan mampu menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban, melalui komunikasi intensif dan keterlibatan antara PT PII dan karyawan dalam mencapai target Perseroan. PT PII mendayagunakan hubungan konstruktif dengan karyawan dengan menyelenggarakan pertemuan berkala guna mensosialisasikan kebijakan dan program manajemen serta untuk penyelesaian permasalahan hubungan industrial maupun penyelesaian keluhan karyawan.

5. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

Untuk meningkatkan motivasi kerja serta loyalitas terhadap Perseroan, PT PII senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Perseroan memberikan remunerasi kepada para karyawannya berupa gaji pokok, insentif prestasi, tunjangan dan fasilitas lainnya berdasarkan jenjang jabatan, masa kerja, dan penilaian kinerja individu yang dicapai karyawan tanpa adanya unsur diskriminasi.

Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perseroan berkomitmen untuk melakukan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang difokuskan untuk mencapai tingkat kecelakaan nihil atau *zero accident*. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT PII mengacu pada

The Company also provides equal opportunities for all employee including the right to obtain career development promotion, education and employee rights stipulated in the collective labour agreement and applicable regulations.

Likewise with employee remuneration and employee rights. The Company always provides compensation in accordance with the working performance of all employees with reference to applicable regulations and standards, and without discriminating gender, race, ethnicity, religion, and between groups. The differences only occur if there are differences in terms of competency performance or work experiences.

3. Employee Turnover Rate

In 2018, employee turnover rate reached 8.5%, higher than the previous year at 7%.

4. Industrial Relations

The Company strives to ensure a mutual respect as well as maintain the balance between the fulfillment of rights and implementation of obligations, through an intensive communication as well as engagement between the Company and employees in achieving the Company's target. The Company empowers a constructive relationship with employees by conducting regular meetings to socialize management policies and programs as well as to resolve any issues related to industrial relations and complaints from employees.

5. Improvement of Employees' Welfare

The Company strive continuously to improve employees welfare in order to improve employee work motivation and loyalty. The Company provides remuneration to its employees in the form of basic salary, performance incentive, allowances, and other facilities based on the position level, working period, and individual performance assessment achieved by employees, without any discrimination.

Occupational Health and Safety

The Company is committed to the implementation of occupational health and safety (K3) management, which is focused on achieving zero accident rate. The implementation of Occupational Health and Safety Management System (SMK3) in the Company



Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai sistem manajemen perusahaan dalam pengendalian risiko kegiatan kerja, termasuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Peraturan ini diharapkan membantu terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Kesehatan dan Keselamatan kerja merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi prioritas utama dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, oleh karena itu penting bagi seluruh karyawan untuk memahami risiko dan bagaimana mengantisipasi potensi bahaya. Panitia K3 PT PII bersama panitia K3 pengelola gedung Capital Place bekerja sama dalam penyelenggaraan latihan evakuasi kebakaran/*Fire Drill* pada 9 November 2018. Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 tersebut melibatkan seluruh karyawan PT PII dengan catatan waktu 10 menit 54 detik.

PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, kerap kali menerima tamu dari pemerintah daerah, maupun kementerian lain. Pada November 2018, PT PII membuat video *safety induction* yang selalu diputar sebelum acara korporat dimulai seperti *capacity building*, dan rapat, sehingga seluruh peserta dapat mengantisipasi jika keadaan darurat terjadi.

Dampak Kegiatan

Pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan secara konsisten di lingkungan Perseroan membuahkan hasil. Sepanjang tahun 2018, tidak ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja maupun terjangkit penyakit serius di tempat kerja.

refers to the Minister of Manpower Regulation No.5/1996 concerning Occupational Health and Safety Management System, as subsequently refined through Government Regulation NO.50/2012 concerning Occupational Health and Safety Management System (SMK3).

The regulation governs the Company's management system in controlling the risks of work activities, including prevention of work accident and occupational diseases. The regulation is expected to help create a safe, efficient, and productive workplace.

Occupational Health and Safety is a very important factor and top priority in carrying out daily activities. Thus, it is important for all employees to clearly understand the risk and how to anticipate the potential hazard. The Company's K3 Committee with the K3 Committee of Capital Place building management worked together in the Fire Drill held on November 9th, 2018. The activity which began at 10.00 involved all PT PII employees with a time of 10 minutes 54 seconds.

PT PII as an Infrastructure Guarantee Institution, often received guests from the local government officials and other ministries. In November 2018, PT PII created an safety induction video which was showed before the start of corporate events, such as capacity building and meetings, so that all participants can anticipate any possible emergencies situation.

Impact of Activities

The result of management of occupational health and safety consistently carried out within the Company's area has been satisfactory. Throughout 2018, there has been no employees of the Company who experienced work accident or contracted serious disease/illness in the workplace.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Bidang Sosial Kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility In Community Social Development



Kebijakan

PT PII sangat menyadari bahwa keberadaannya merupakan bagian dari masyarakat, di mana pertumbuhan usaha yang diraih Perusahaan juga tak lepas dari peran serta masyarakat. Untuk itu, Perusahaan pun memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan CSR yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat. PT PII merealisasikan pengembangan sosial dan kemasyarakatan melalui pelaksanaan Program CSR yang berfokus pada 5 (lima) kegiatan, yakni bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan masyarakat, keagamaan, dan bantuan korban bencana alam.

Policy

PT PII is fully aware of its existence as part of the community, where the community has a role in the Company's business growth. Therefore, the Company is deeply concerned with community social development, as embodied through various form of CSR activities related to the community social and cultural development. PT PII undertook community social development through the implementation of CSR programs focusing on 5 (five) activities: education, economy, community health, religious, and natural disaster reliefs for the victim.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen

Corporate Social Responsibility To Customers



Kebijakan

PT PII menempatkan kepuasan pelanggan sebagai bentuk pelayanan yang fundamental dan penting. Hal ini didasari keyakinan bahwa pelanggan adalah salah satu pemangku kepentingan yang mempunyai peran sentral dalam menjamin keberlangsungan usaha, sehingga merupakan *partner* utama dalam mengembangkan usaha di masa depan.

Dalam rangka memastikan pemenuhan standar pelayanan kepada pelanggan, kami memiliki kebijakan untuk memastikan hal tersebut dijalankan melalui berbagai standar operasi dan prosedur yang terkait dengan pelanggan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan.

Policy

The Company places customer satisfaction as a fundamental and important form of service. This is based on the belief that customer is one of the stakeholders who plays a central role in ensuring business continuity, thus becoming the Company's main partner in developing the business in the future.

In order to ensure the fulfillment of service standards to its customers, the Company applies a policy to ensure that the fulfillment is conducted through various standards of operations and procedures related to customer. This is done by the Company solely to give the best to its customers.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen

Corporate Social Responsibility To Customers

Pelaksanaan Kegiatan

Selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, konsumen PT PII adalah pemerintah (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah) dan BUMN yang ditugaskan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dari proyek infrastruktur yang dikembangkan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

PT PII secara rutin melaksanakan program peningkatan kapasitas dalam bentuk kunjungan, pelatihan dan sosialisasi kepada segenap pemangku kepentingan utama dari pemerintah dan BUMN yang ditugaskan bekerja sama dengan IIGF *Institute*, sebagai pusat pengetahuan yang dibentuk untuk mendorong pengembangan skema KPBU dan infrastruktur nasional.

Implementation of Activities

As an Infrastructure Guarantee Institution, the Company's customers include the government (Ministry/Institution, Local Government) and SOEs assigned as Contracting Agency (PJPK) of infrastructure projects developed under the Public-Private Partnership (PPP) scheme.

The Company regularly conducts capacity building programs in the form of visits, training and socialisation to all key stakeholders of the government and SOEs assigned to work with the IIGF Institute, as a knowledge center established to encourage the development of PPP and national infrastructure schemes.



Informasi Keuangan Audited

Audited Financial Information



**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(PERSERO)**

**LAPORAN KEUANGAN/
*FINANCIAL STATEMENTS***

31 DESEMBER/*DECEMBER* 2018



**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(PERSERO)**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SERTA UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Armand Hermawan
Alamat Kantor : Capital Place Office Tower,
Lantai 7 dan 8, Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Alamat Rumah : Jl. Pancoran Timur IX/11B
005/008 Pengadegan
Pancoran Jakarta
Nomor Telepon : 021- 5795 0550
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Salusra Satria
Alamat Kantor : Capital Place Office Tower,
Lantai 7 dan 8, Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Alamat Rumah : Jl. Bacang II No.11
RT 005 RW 001
Kebayoran Baru Jakarta
Nomor Telepon : 021- 5795 0550
Jabatan : Direktur Eksekutif Keuangan
dan Penilaian Proyek

menyatakan bahwa:

1. kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
2. laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. semua informasi dalam laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(PERSERO)**

**DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2018 AND FOR
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018**

We, the undersigned:

1. Name : Armand Hermawan
Office address : Capital Place Office Tower,
7th & 8th Floor Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Residential address: Jl. Pancoran Timur IX/11B
005/008 Pengadegan
Pancoran Jakarta
Telephone : 021- 5795 0550
Title : President Director
2. Name : Salusra Satria
Office address : Capital Place Office Tower,
7th & 8th Floor Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Residential address: Jl. Bacang II No.11
RT 005 RW 001
Kebayoran Baru Jakarta
Telephone : 021- 5795 0550
Title : Executive Director of Finance
and Project Valuation

declare that:

1. we are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
2. the financial statements of the PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. all information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
b. the financial statements of the PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
4. we are responsible for the internal control system of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 28 Februari/February 2019

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and on behalf of the Board of Directors

Armand Hermawan
Direktur Utama/
President Director

Salusra Satria
Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek/
Executive Director of Finance and Project Valuation



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2018, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia,
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00188/2.1025/AU.1/09/0222-4/1/1/2019

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) as of 31 December 2018, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA

28 Februari/February 2019



Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA

Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1124

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 1 - Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

31 DECEMBER 2018

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2018</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2017</u>	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	1,699,179,176	5	1,443,047,907	Cash and cash equivalents
Investasi	8,673,173,668	6	8,672,825,978	Investments
Piutang usaha	79,986,175	7	74,836,378	Account receivables
Piutang lainnya	8,978,218		6,978,641	Other receivables
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	2,447,948		2,423,393	Prepaid expenses and advances
Aset tetap	18,775,630	8	16,266,514	Fixed assets
Aset tak berwujud	1,194,708	9	992,308	Intangible assets
Beban tangguhan	43,360,044	10	41,665,221	Deferred expenses
Pajak dibayar dimuka	367,577	12a	-	Prepaid income tax
Aset pajak tangguhan	88,106,326	12d	95,500,861	Deferred tax asset
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	5,346,039		5,346,039	Refundable deposits
Beban <i>front-end</i>	-		763,384	Front-end fee
JUMLAH ASET	<u>10,620,915,509</u>		<u>10,360,646,624</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang usaha	7,481,344	11	3,341,838	Account payables
Utang pajak	4,816,449	12b	3,484,242	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	42,912,741	13	28,721,527	Accrued expenses, provisions and other payables
Pendapatan tangguhan	8,509,750	14	8,085,333	Unearned income
Pinjaman penerusan	55,126,686	15	45,276,380	Two-step loans
Liabilitas imbalan kerja	21,397,862	16	20,293,430	Employee benefits obligation
JUMLAH LIABILITAS	<u>140,244,832</u>		<u>109,202,750</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - modal dasar, 9.000.000 lembar - ditempatkan dan disetor penuh 8.000.000 lembar (2017: 8.000.000 lembar), dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	8,000,000,000	17	8,000,000,000	Share capital - authorised, 9,000,000 shares - issued and paid 8,000,000 shares (2017: 8,000,000 shares), with par value of Rp 1,000,000 (full amount) per share
(Rugi)/laba belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan tersedia untuk dijual	(111,375,416)		32,356,057	Unrealised (loss)/gain from available-for-sale financial assets
Kerugian aktuarial, setelah pajak	842,648		(2,186,452)	Loss from actuarial, net of tax
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya - cadangan wajib	116,446,338	19	92,922,338	Appropriated - statutory reserve
Belum ditentukan penggunaannya	2,474,757,107		2,128,351,931	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	<u>10,480,670,677</u>		<u>10,251,443,874</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>10,620,915,509</u>		<u>10,360,646,624</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 2 - Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2018</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2017</u>	
Pendapatan				Revenues
Pendapatan penjaminan	46,623,783	20	60,730,433	Revenue from guarantee
Pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	32,716,363	20	-	Revenue from project preparation and transaction advisory
Pendapatan pengelolaan dana	<u>754,911,821</u>	20	<u>705,228,556</u>	Income from investments
Jumlah pendapatan	<u>834,251,967</u>		<u>765,958,989</u>	Total revenues
Beban usaha				Operating expenses
Beban pajak final	(139,868,101)	12c	(136,422,306)	Final tax expense
Penjaminan	(60,044,438)	21	(74,684,255)	Guarantee
Administrasi dan umum	(108,417,029)	21	(87,812,832)	General and administrative
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	(33,272,365)	21	-	Project preparation and transaction advisory
Pengembangan usaha	(7,654,438)	21	(6,419,946)	Business development
Penyusutan	(6,493,044)	8	(6,032,863)	Depreciation
Amortisasi	(561,923)	9	(1,103,969)	Amortisation
Beban bunga pinjaman	(4,191,603)		(2,977,372)	Interest expense
Penghasilan keuangan, kotor	2,632,192		929,533	Finance income, gross
Keuntungan kurs, bersih	999,746		869,331	Foreign exchange gain, net
Lain-lain	<u>84,047</u>		<u>(169,339)</u>	Others
Jumlah beban usaha	<u>(356,786,956)</u>		<u>(313,824,018)</u>	Total operating expenses
Laba sebelum pajak penghasilan	477,465,011		452,134,971	Profit before income tax
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	<u>(6,384,835)</u>	12c	<u>18,333,536</u>	Income tax (expenses)/benefit
Laba tahun berjalan	471,080,176		470,468,507	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:				Other comprehensive income for the year:
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: (Kerugian)/keuntungan aset keuangan tersedia untuk dijual tahun berjalan	<u>(143,731,473)</u>		<u>58,234,484</u>	Items that will be reclassified subsequently to profit and loss: Available for sales financial asset (loss)/gain for the year
	<u>(143,731,473)</u>		<u>58,234,484</u>	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified subsequently to profit and loss
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja	4,038,800		(630,132)	Remeasurement from post-employment benefits obligation
Pajak penghasilan terkait	<u>(1,009,700)</u>		<u>157,533</u>	Related income tax
	<u>3,029,100</u>		<u>(472,599)</u>	
(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	<u>(140,702,373)</u>		<u>57,761,885</u>	Other comprehensive (loss)/income for the year, net of tax
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	<u>330,377,803</u>		<u>528,230,392</u>	Total comprehensive income for the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 3 - Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2018**
(Expressed in thousand of Rupiah, unless
otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Laba/(rugi) belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan tersedia untuk dijual/ Unrealised gain/(loss) from available- for-sale financial assets	Kerugian aktuarial, setelah pajak/ Actuarial loss, net of tax	Saldo laba/Retained earnings		Jumlah/ Total	Balance at 1 January 2017
				Ditentukan penggunaannya - cadangan wajib/ Appropriated - statutory reserve	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo 1 Januari 2017	7.000.000.000	(25.878.427)	(1.713.853)	67.800.000	1.783.655.762	8.823.863.482	
Penambahan modal	17	-	-	-	-	1.000.000.000	Additional capital
Pencadangan saldo laba	19	-	-	25.122.338	(25.122.338)	-	Appropriation of retained earnings
Penghasilan komprehensif tahun berjalan:							Comprehensive income for the year:
- Laba tahun berjalan	18	-	-	-	470.468.507	470.468.507	Profit for the year -
- Dividen		-	-	-	(100.650.000)	(100.650.000)	Dividend -
- Penghasilan komprehensif lain:							Other comprehensive income:
- Aset keuangan tersedia untuk dijual		58.234.484	-	-	-	58.234.484	Available-for-sale financial assets -
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja, setelah pajak		-	(472.599)	-	-	(472.599)	Remeasurement of post-employment benefit liabilities, net of tax
Saldo 31 Desember 2017	8.000.000.000	32.356.057	(2.186.452)	92.922.338	2.128.351.931	10.251.443.874	Balance at 31 December 2017
Pencadangan saldo laba	19	-	-	23.524.000	(23.524.000)	-	Appropriation of retained earnings
Penghasilan komprehensif tahun berjalan:							Comprehensive income for the year:
- Laba tahun berjalan	18	-	-	-	471.080.176	471.080.176	Profit for the year -
- Dividen		-	-	-	(101.151.000)	(101.151.000)	Dividend -
- Penghasilan komprehensif lain:							Other comprehensive income:
- Aset keuangan tersedia untuk dijual		(143.731.473)	-	-	-	(143.731.473)	Available-for-sale financial assets -
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja, setelah pajak		-	3.029.100	-	-	3.029.100	Remeasurement of post-employment benefit liabilities, net of tax
Saldo 31 Desember 2018	8.000.000.000	(111.375.416)	842.648	116.446.338	2.474.757.107	10.480.670.677	Balance at 31 December 2018

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part
of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 4 - Schedule

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Laba sebelum pajak penghasilan	477,465,011	452,134,971	<i>Profit before income tax</i>
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas:			<i>Add items not affecting cash flows:</i>
- Beban penyusutan	6,493,044	6,032,863	<i>Depreciation -</i>
- Beban amortisasi	561,923	1,103,969	<i>Amortisation -</i>
- Beban penyesuaian imbalan kerja	5,358,574	5,347,889	<i>Provision for employee benefits obligation -</i>
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	<u>489,878,552</u>	<u>464,619,692</u>	<i>Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities</i>
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			<i>Changes in operating assets and liabilities</i>
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:			<i>(Increase)/decrease in operating assets:</i>
- Piutang usaha	(5,149,797)	(6,147,657)	<i>Account receivables -</i>
- Piutang lainnya	(1,999,577)	(3,042,364)	<i>Other receivables -</i>
- Biaya dibayar dimuka dan uang muka	(392,132)	2,261,890	<i>Prepaid expenses and advances -</i>
- Beban tangguhan	(1,694,823)	16,275,510	<i>Deferred expenses -</i>
(Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi:			<i>(Decrease)/increase in operating liabilities:</i>
- Utang usaha	4,139,506	(1,618,435)	<i>Account payables -</i>
- Utang pajak	1,332,207	1,001,569	<i>Taxes payable -</i>
- Biaya masih harus dibayar, penyesuaian dan utang lain-lain	15,062,874	(8,445,357)	<i>Accrued expenses, provisions and other payables -</i>
- Pembayaran manfaat imbalan kerja	(215,342)	(20,000)	<i>Payment of employee benefit -</i>
- Beban <i>front-end</i>	763,384	-	<i>Front-end fee -</i>
- Pendapatan tangguhan	424,417	2,700,666	<i>Unearned income -</i>
	<u>12,270,717</u>	<u>2,965,822</u>	
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>502,149,269</u>	<u>467,585,514</u>	Net cash flow provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Penempatan investasi	(143,929,806)	(2,828,860,339)	<i>Placement for investments</i>
Pembelian aset tetap dan aset tak berwujud	(9,766,483)	(2,055,224)	<i>Acquisition of fixed assets and intangible assets</i>
Penempatan uang jaminan yang dapat dikembalikan	-	2,442,888	<i>Refundable deposit</i>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(153,696,289)</u>	<u>(2,828,472,675)</u>	Net cash flow used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan modal saham	-	1,000,000,000	<i>Share capital received</i>
Pembayaran program kemitraan dan bina lingkungan	(1,021,017)	(430,500)	<i>Payment for corporate social responsibility programme</i>
Penerimaan dari pinjaman penerusan	9,850,306	9,470,917	<i>Proceeds from two-step loans</i>
Pembayaran dividen	(101,151,000)	(100,650,000)	<i>Dividend payment</i>
Arus kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>(92,321,711)</u>	<u>908,390,417</u>	Net cash flow (used in)/provided from financing activities
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	256,131,269	(1,452,496,744)	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	<u>1,443,047,907</u>	<u>2,895,544,651</u>	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas dan setara kas akhir tahun	<u>1,699,179,176</u>	<u>1,443,047,907</u>	Cash and cash equivalents at end of year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/1 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM No. 29 tanggal 30 Desember 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Notaris Arry Supratno, S.H. No.107 tanggal 29 Desember 2016 yang memuat mengenai perubahan maksud dan tujuan Perusahaan. Selanjutnya, Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0002415.AH.01.02 Tahun 2017 pada tanggal 30 Januari 2017.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan adalah memberikan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur.

Perusahaan adalah Badan Usaha Penjamin Infrastruktur (BUPI) yang beroperasi sebagai suatu entitas "single window" dalam melakukan proses, penilaian (*appraisal*) dan penyusunan struktur (*structuring*) untuk semua penjaminan yang diberikan Pemerintah Indonesia pada proyek infrastruktur yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK"). Perusahaan dapat menerapkan berbagai jenis dan struktur penjaminan – yang disokong (*backstop*) oleh, bila diperlukan, neraca Perusahaan, Pemerintah Republik Indonesia, lembaga keuangan multilateral, atau kombinasinya – untuk mewujudkan fleksibilitas operasional yang lebih baik dalam penyediaan penjaminan infrastruktur.

Tujuan utama dari Perusahaan adalah untuk memberikan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur. Dalam mencapai tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan, antara lain:

- a) Memberikan penjaminan terhadap kewajiban finansial Pemerintah dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ("KPBU") di bidang infrastruktur yang mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan kewajiban kontijensi Pemerintah dan meningkatkan kelayakan kredit dari proyek infrastruktur.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company") was established based on Notarial Deed of Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM No. 29 dated 30 December 2009. The Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010, dated 27 January 2010.

The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment was in accordance with Notarial Deed of Arry Supratno, S.H. No.107 dated 29 December 2016 concerning change of the purposes and objective of the Company. Subsequently, The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republik of Indonesia through his decree No. AHU-0002415.AH.01.02 Year 2017 dated 30 January 2017.

In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the Company's objective is to provide the Government guarantees in the infrastructure sector.

The Company is BUPI that operates as a "single window" entity for the processing, appraisal and structuring of all guarantees provided by the Government of Indonesia for infrastructure projects proposed by the Government's Contracting Agencies ("GCA"). The Company employs various types and structures of guarantees – back-stopped, as necessary, by the Company balance sheet, the Government of Indonesia ("GOI") balance sheet, a multilateral financing agency or a combination thereof – for greater operational flexibility in providing guarantees for infrastructure projects.

The primary objective of the Company is to provide Government guarantee in infrastructure sector. In achieving its objective, the Company may do, among others:

- a) To provide guarantee for the Government's financial obligation in the Public Private Partnership (PPP) cooperation agreement in infrastructure sectors which is able to realise the accountability of managing Government's contingent obligations and improving the creditworthiness of the respective infrastructure projects.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

Tujuan utama dari Perusahaan adalah untuk memberikan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur. Dalam mencapai tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan, antara lain: (lanjutan)

- b) Memberikan penjaminan terhadap kewajiban pembayaran Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dan/atau afiliasinya terkait penyediaan infrastruktur dalam hal pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan dan penerbitan obligasi dan/atau instrumen keuangan lainnya.
- c) Memberikan penjaminan terhadap kewajiban finansial dari pihak lain selain butir a) dan b) diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Memberikan dukungan fasilitasi persiapan proyek infrastruktur, penilaian kelayakan, dan pemantauan risiko serta hal lain terkait penyediaan penjaminan pemerintah dan jasa konsultasi terkait.
- e) Kerjasama dengan pihak lain termasuk lembaga keuangan multilateral dalam rangka pelaksanaan pemberian penjaminan.
- f) Kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan.

Perusahaan berdomisili di Indonesia, berkedudukan di Capital Place Office Tower, Lantai 7 dan 8, Jl. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2010.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2018
Komisaris Utama	Ayu Sukorini
Komisaris	Mariatul Aini ¹⁾ M. Rahman Ritza
Direktur Utama	Armand Hermawan
Direktur	Salusra Satria Muhammad Wahid Sutopo

1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 861/KMK.06/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengangkat Mariatul Aini sebagai Komisaris mulai tanggal 21 Desember 2018 menggantikan Alm. Langgeng Subur yang sebelumnya diangkat menggantikan Iskandar per tanggal 23 Mei 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan memiliki 128 pegawai (2017: 107 pegawai) (tidak diaudit).

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

The primary objective of the Company is to provide Government guarantee in infrastructure sector. In achieving its objective, the Company may do, among others: (continued)

- b) To provide guarantee from payment obligations of State Owned Enterprises ("SOEs") and/or its affiliates related infrastructure sector in term of execution loan agreement with financial institution and issuance of bonds and/or other financial instruments.
- c) To provide guarantee of other party's financial obligation other than point a) and b) above, in accordance with the laws and regulation.
- d) To provide facilitation support of project preparation, feasibility assessment, and risk monitoring and other matters related to provision of government guarantee and the related project consultancy services.
- e) To collaborate with other parties including multilateral financial institution in the context of implementing the guarantee.
- f) Other activities in achieving the Company's objective in accordance with the law and regulations.

The Company is domiciled in Indonesia, its office is located at Capital Place Office Tower, 7th and 8th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta. The Company started its commercial operations in 2010.

As at 31 December 2018 and 2017, the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors were as follows:

	2017	
	Ayu Sukorini	President Commissioner
	Iskandar	Commissioners
	M. Rahman Ritza	
	Armand Hermawan	President Director
	Salusra Satria	Directors
	Muhammad Wahid Sutopo	

1) Based on Ministry of Finance decree No. 861/KMK.06/2018 regarding dismissal and appointment of member of the Company's Board of Commissioners, the Company through General Meeting of Shareholders appointed Mariatul Aini as Commissioner starting date 21 December 2018 replacing Late Langgeng Subur that previously replacing Iskandar since 23 May 2018.

As at 31 December 2018, the Company has 128 employees (2017: 107 employees) (unaudited).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan Perusahaan diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 28 Februari 2019.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam ribuan Rupiah yang terdekat. Seluruh angka dalam mata uang selain Rupiah dinyatakan dalam jumlah penuh.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 4.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of the Company were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 28 February 2019.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the Company's financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared under the accrual basis. The financial statements are prepared under the historical cost convention, as modified for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The cash flows statement is prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investments with original maturities of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

Figures in the financial statements are rounded to and stated in thousands of Rupiah, unless otherwise stated. Amounts in currencies other than Rupiah are stated in full amount.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018 sebagai berikut:

- PSAK 111 "Akuntansi Wa'd";
- Amendemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan";
- Amendemen PSAK 13 "Properti Investasi, tentang Pengalihan Properti Investasi";
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap";
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi";
- Amendemen PSAK 53 "Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham";
- Amendemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"; dan
- Amendemen PSAK 67 "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi pada Perseroan, serta tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**a. Basis of preparation of the financial statements (continued)**

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended 31 December 2017, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations which were effective on or after 1 January 2018 as follows:

- SFAS 111 "Accounting Wa'd";
- Amendment to SFAS 2 "Statements of Cash Flows about Disclosure Initiative";
- Amendment to SFAS 13 "Investment Property about Transfers of Investment Property";
- Amendment to SFAS 16 "Property, Plant and Equipment";
- Amendment to SFAS 46 "Income Tax about Deferred Tax Assets Recognition for Unrealised Loss";
- Amendment to SFAS 53 "Shared Based Payments about Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions";
- Amendment to SFAS 15 "Investments in Associates and Joint Ventures"; and
- Amendment to SFAS 67 "Disclosures of Interests in Other Entities".

The implementation of the above standards did not result in changes to the Company accounting policies and had no significant impact on the amounts reported for current or prior financial years.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**b. Penjabaran mata uang asing****a. Mata uang fungsional dan penyajian**

Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah ("Rp") yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

b. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi.

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

d. Aset dan liabilitas keuangan**Aset keuangan**

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori sebagai berikut: diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, atau yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan ini pada saat awal pengakuannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**b. Foreign currency translation****a. Functional and presentation currency**

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (the "functional currency").

The financial statements are presented in Rupiah ("Rp"), which is the functional and presentation currency of the Company.

b. Transactions and balances

Transactions denominated in foreign currency are converted into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the reporting date, foreign currency monetary assets and liabilities are translated using the closing exchange rate prevailing at that date. Exchange rate used as benchmark is the rate which is issued by Bank Indonesia. Foreign exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the profit or loss.

c. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents includes cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investments with original maturities of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

d. Financial assets and liabilities**Financial assets**

The Company classifies its financial assets in the following categories: at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for sale. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****Aset keuangan (lanjutan)**

- (i) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

- (ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman yang diberikan dan piutang Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, investasi dalam deposito berjangka, piutang usaha dan uang jaminan yang dapat dikembalikan.

- (iii) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditentukan pada kategori ini atau tidak diklasifikasikan pada kategori yang lain. Setelah pengukuran awal, aset keuangan ini diukur pada nilai wajar dan keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan perubahan ekuitas hingga dihentikan pengakuannya. Investasi Perusahaan pada obligasi tertentu diklasifikasikan dalam kategori ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****Financial assets (continued)**

- (i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading, which is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term. The Company has no financial assets at fair value through profit or loss.

- (ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The Company's loans and receivables comprise of cash and cash equivalents, investment in time deposits, account receivables and refundable deposits.

- (iii) Available-for-Sale ("AFS") financial assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated in this category or not classified in any other categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealised gains or losses recognised in stockholders' equity until the financial assets are derecognised. The Company's investments in certain bonds are classified in this category.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****Aset keuangan (lanjutan)**

- (iv) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Investasi Perusahaan pada obligasi tertentu diklasifikasikan dalam kategori ini.

Liabilitas keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan klasifikasi liabilitas keuangan ini tidak diungkapkan.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****Financial assets (continued)**

- (iv) Held-to-Maturity ("HTM") investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that management has the positive intention and ability to hold them to maturity. These financial assets are initially recognised at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortised cost, using the effective interest method. The Company's investment in certain bonds is classified in this category.

Financial liabilities

The Company classifies its financial liabilities in the category of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortised cost.

At the reporting date, there are no financial liabilities classified as financial liabilities at fair value through profit or loss. Therefore, the accounting policies related to this classification are not disclosed.

Financial liabilities measured at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as at fair value through profit or loss fall into this category and are measured at amortised cost.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****Liabilitas keuangan (lanjutan)**Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya dikurangi biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain, dan pinjaman penerusan diklasifikasikan dalam kategori ini.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service* atau *regulatory agency*), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****Financial liabilities (continued)**Financial liabilities measured at amortised cost (continued)

Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at fair value minus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Account payables, accrued expenses, provisions and other payables, and two-step loans are classified in this category.

Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)****d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****Penentuan nilai wajar (lanjutan)**

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perusahaan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang sejenis atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggihkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diamortisasi dan diakui dalam laba rugi sepanjang umur dari instrumen tersebut.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut.

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan input (sebagai contoh *LIBOR yield curve*, nilai tukar mata uang asing, volatilitas, dan *counterparty spreads*) yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)****d. Financial assets and liabilities (continued)****Determination of fair value (continued)**

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Company determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is amortised and recognised in profit or loss on over the life of the instrument.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

*For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair values are estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques, using inputs (for example, *LIBOR yield curve*, foreign exchange rates, volatilities and counterparty spreads) existing at the dates of the statement of financial position.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****Saling hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

Kontrak jaminan keuangan dan tagihan komitmen lainnya

Kontrak jaminan keuangan yang dimiliki Perusahaan baik penjaminan KPBU maupun penjaminan kewajiban pembayaran BUMN (Non-KPBU) adalah dalam bentuk Perjanjian Penjaminan, yang mengharuskan Perusahaan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban finansial sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama (untuk KPBU) maupun Perjanjian Pinjaman (untuk Non-KPBU), yang tidak dapat dipenuhi oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK") kepada Badan Usaha (untuk KPBU) atau yang tidak dapat dipenuhi oleh BUMN terjamin kepada pemberi pinjaman (untuk Non-KPBU).

Pendapatan premi dari kontrak jaminan keuangan yang diperoleh (*recurring fee*), diamortisasi selama jangka waktu penjaminan dengan menggunakan metode garis lurus.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kontrak jaminan keuangan yang memiliki risiko kredit dihitung berdasarkan analisa spesifik untuk masing-masing risiko dalam perjanjian penjaminan.

Perusahaan memiliki perjanjian regres dengan PJPK terkait dengan penjaminan KPBU, yang akan memberikan hak tagih kepada PJPK atas pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Badan Usaha akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJPK kepada Badan Usaha.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****Offsetting**

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

Financial guarantee contracts and other commitment receivables

Financial guarantee contracts that the Company has both PPP guarantees and guarantees for SOEs payment obligation (Non-PPP) is in form of guarantee agreements, which requires the Company to make payments to the Investors when Government's Contracting Agencies ("GCA") is unable to fulfill its financial obligation in accordance with the terms in a Cooperation Agreements (for PPP) or requires the Company to make payments to the lenders when SOEs is unable to fulfill its financial obligation, in accordance with the terms in a Loan Agreements (for Non-PPP).

The guarantee fee income earned from financial guarantee contracts (*recurring fee*), is amortised over the period of guarantee using the straight line method.

Allowance for impairment on financial guarantee contracts with credit risk are assessed based on each specific risk under the guarantee agreement.

The Company has recourse agreement with GCA related to PPP's guarantee, which will give the Company the rights to claim or recourse back to GCA for any payment that have been made by the Company to the Investors, due to inability of GCA in fulfilling its financial obligations to the Investors.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/11 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Kontrak jaminan keuangan dan tagihan komitmen lainnya (lanjutan)

Perusahaan juga memiliki perjanjian regres dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan penjaminan atas gagal bayar dari BUMN yang melakukan pinjaman dan/atau penerbitan obligasi untuk membiayai penyediaan infrastruktur, yang akan memberikan hak tagih kepada BUMN atas pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Pemberi Pinjaman akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban pembayaran BUMN kepada Pemberi Pinjaman.

e. Investasi

Investasi terdiri dari deposito berjangka, obligasi korporasi yang diperdagangkan di pasar uang dan di bursa efek serta Obligasi Pemerintah, dan reksa dana.

Obligasi Pemerintah adalah surat hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dibeli dari pasar.

Bank telah mengklasifikasikan investasi pada sukuk sebagai diukur pada nilai biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan PSAK No.110 "Akuntansi Sukuk".

Investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode jatuh tempo dengan menggunakan metode garis lurus.

f. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Prasarana kantor	4
Peralatan komputer	4
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	4

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Financial guarantee contracts and other commitment receivables (continued)

The Company also has recourse agreement with State-Owned Enterprise (SOE) related to guarantees of SOE's loan and/or bond issuance payment defaults in financing infrastructure developments, which will give the Company the rights to claim or recourse back to SOE for any payment that have been made by the Company to the Lenders, due to inability of SOE in fulfilling its financial obligations to the Lenders.

e. Investments

Investments consist of time deposits, corporate bonds traded in the money market and at the stock exchange and Government Bonds, and mutual funds.

Government bonds represent bonds issued by the Government of the Republic of Indonesia purchased from the market.

The Bank has classified all investment in sukuk as amortised cost in accordance with SFAS No.110 "Accounting for Sukuk".

At cost measurement, investment in sukuk are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity based on straight line method.

f. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is computed using the straight-line method over the following estimated useful lives:

Leasehold improvement
Computer equipments
Office equipments, furnitures and fixtures

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**f. Aset tetap (lanjutan)**

Nilai sisa aset dan masa manfaat aset tetap ditelaah, dan disesuaikan bila perlu, pada setiap akhir periode pelaporan.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Jika aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutan yang berhubungan dengan aset tersebut dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

g. Aset tak berwujud

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan diakui sebagai aset tak berwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**f. Fixed assets (continued)**

The assets residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the profit or loss.

g. Intangible assets

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company are recognised as intangible assets.

Directly attributable costs are capitalised as part of the software product.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**g. Aset tak berwujud (lanjutan)**

Aset tak berwujud diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi amortisasinya. Amortisasi aset tak berwujud dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

h. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas. Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak di masa yang akan datang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dimanfaatkan.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**g. Intangible assets (continued)**

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of 4 years.

h. Taxation

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity. The current income tax is calculated using tax rates that have been enacted at the reporting date.

Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantively enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax assets is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretations. Where appropriate, it established provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**i. Liabilitas imbalan kerja****Imbalan kerja jangka pendek**

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pensiun

Perusahaan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU No. 13/2003, yang merupakan kewajiban imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 lebih besar dari program pensiun yang ada, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Liabilitas imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini liabilitas pasti pada tanggal pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program yang berasal dari program pensiun yang ada. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah jangka panjang pada tanggal pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran program pensiun baik karena diwajibkan, berdasarkan kontrak atau sukarela. Namun karena Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 mengharuskan Perusahaan membayar jumlah tertentu kepada para karyawan yang telah memasuki usia pensiun yang ditentukan berdasarkan masa kerja, Perusahaan rentan terhadap kemungkinan untuk membayar kekurangan apabila iuran kumulatif kurang dari jumlah tertentu. Sebagai akibatnya untuk tujuan pelaporan keuangan, program iuran pasti secara efektif diberlakukan seolah-olah sebagai program imbalan pasti.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**i. Employee benefits obligation****Short-term employee benefits**

Short-term employee benefits are recognised when they are accrued to the employees.

Pension benefits

The Company is required to provide a minimum pension benefit as stipulated in Law No.13/2003, which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Law No. 13/2003 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the fair value of plan assets. The defined benefits obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of reporting date of Government Bonds that are denominated in the Rupiah currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

For defined contribution plans, the Company pays contributions to pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Labour Law No. 13 of 2003 requires an entity to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on, the worker's length of service, the Company is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount in particular when the cumulative contributions are less than that amount. Consequently for financial reporting purposes, defined contribution plans are effectively treated as if they were defined benefit plans.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**i. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)****Imbalan pensiun (lanjutan)**

Biaya jasa kini dibebankan pada saat terjadinya.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, kecuali untuk pengukuran kembali yang diakui pada laba rugi.

j. Utang usaha dan lain-lain

Utang usaha dan lain-lain merupakan liabilitas keuangan. Utang usaha dan lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

k. Penyisihan

Provisi diakui saat Perusahaan memiliki kewajiban (hukum atau konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya, dan jumlah liabilitas tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**i. Employee benefits obligation (continued)****Pension benefits (continued)**

Current service costs are expensed in the prevailing period.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Past service costs arising from amendment of curtailment programs are recognised as expense in profit or loss when incurred.

Other long-term benefits

Other long-term employee benefits such as long service leave is calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. These benefits are accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan, except for remeasurements which are recognised in profit or loss.

j. Account and other payables

Account and other payables are financial liabilities. Account and other payable is recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

k. Provisions

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Provisions are not recognised for future operating losses.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)****I. Pendapatan dan beban**

Pendapatan dari penjaminan terdiri dari pendapatan premi, dan pendapatan provisi dan komisi.

Pendapatan premi terdiri dari *guarantee fee* dan *processing fee*. Pendapatan dari *guarantee fee* diakui berdasarkan jangka waktu dari periode penjaminan tergantung dari pengaturan dalam kontrak. Pendapatan dari *processing fee* diakui pada saat pendapatan diperoleh.

- (i) *Guarantee fee* merupakan pendapatan yang diterima atas jaminan yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan jaminan *exposure* oleh Perusahaan.
- (ii) *Processing fee* merupakan pendapatan yang diterima atas adanya aktivitas pemrosesan yang dilakukan jika klaim disampaikan kepada pihak penjamin.

Pendapatan provisi dan komisi terdiri dari *arranging fee*, *ceded commission*, *upfront fee* dan pendapatan provisi dan komisi lainnya.

- (i) *Arranging fee* terdiri dari bagian yang dapat dikembalikan dan bagian yang tidak dapat dikembalikan. Pendapatan dari bagian yang tidak dapat dikembalikan dari *arranging fee* diakui pada saat kontrak penjaminan ditandatangani, sementara pendapatan dari bagian yang dapat dikembalikan dari *arranging fee* diakui pada saat penjaminan telah efektif, sesuai dengan kesepakatan dalam surat imbal jasa, terlepas dari kelangsungan penjaminan proyek itu sendiri di masa yang akan datang.
- (ii) *Ceded commission* adalah pendapatan dari peningkatan struktur penjaminan yang dilakukan dengan pihak penjamin lain. Pendapatan dari *ceded commission* diakui pada saat diperoleh.
- (iii) *Upfront fee* adalah pendapatan yang diterima pada saat kontrak penjaminan ditandatangani dan/atau pada saat penjaminan telah efektif, sesuai dengan kesepakatan dalam surat imbal jasa, dan tidak dapat dikembalikan.
- (iv) Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat diperoleh.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)****I. Revenue and expenses**

Revenue from guarantee consists of premium income, and fees and commissions.

Premium income consists of guarantee fee and processing fee. Revenue from guarantee fee is recognised based on the duration of guarantee period depending on the arrangement in the contract. Revenue from processing fee is recognised when earned.

- (i) *Guarantee fee* is earned for guarantee provided to the beneficiaries on the basis of guarantee exposure of the Company.
- (ii) *Processing fee* is earned for services process if there is a claim submitted to the guarantor.

Fees and commissions consist of arranging fee, ceded commission, upfront fee and other fees and commissions.

- (i) *Arranging fee* consists of a refundable and non-refundable fee portion. Revenue from a non-refundable portion of arranging fee is recognised upon signing of the guarantee contract, while revenue from a refundable portion of arranging fee is recognised upon the effectiveness of guarantee, in accordance with fee letter, regardless the continuance of the guarantee projects itself in the future.
- (ii) *Ceded commission* is revenue earned from the enhancement of guarantee structure with other guarantor/insurance parties. Revenue from ceded commission is recognised as incurred.
- (iii) *Upfront fee* is recognised upon signing of guarantee contract and/or the effectiveness of guarantee, in accordance with fee letter, and non-refundable.
- (iv) *Other fees and commission* is recognised as incurred.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**I. Pendapatan dan beban (lanjutan)**

Pendapatan jasa dari penyiapan proyek dan pendampingan transaksi diakui ketika jasa telah dilaksanakan, kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan biaya-biaya yang terjadi dapat diukur secara handal. Pendapatan diakui sebesar biaya-biaya yang terjadi ditambah margin yang diakui untuk semua penyelesaian tahapan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pendapatan dari pendapatan bunga deposito dan investasi pendapatan tetap diakui dengan menggunakan metode bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan proses penjaminan, ditangguhkan terlebih dahulu dan disajikan sebagai beban tangguhan. Biaya tersebut akan dibebankan pada laporan laba rugi Perusahaan, ketika Perusahaan mengakui pendapatan penjaminan.

m. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7, tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" yang didefinisikan antara lain:

- i. perusahaan di bawah pengendalian Perusahaan;
- ii. perusahaan asosiasi;
- iii. investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
- iv. perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam catatan III di atas;
- v. karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
- vi. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan pada Catatan 22.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**I. Revenue and expenses (continued)**

Revenue from project preparation and transaction advisory is recognised when services have been rendered, where it is probable that economic benefits will flow to the Company, and expenses incurred can be reliably measured. Revenue is recognised from costs incurred plus recognised margin for all the work in process up to the stage completion as agreed.

Revenue from interest income of time deposits and investment in fixed income are recognised using the effective interest method.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Costs that are directly related to the guarantee process will be deferred and presented as deferred charges. The costs will be expensed to the Company's profit or loss, when Company recognised revenue from guarantee.

m. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7, "Related Party Disclosures" which are defined, among others, as:

- i. entities under the control of the Company;
- ii. associated companies;
- iii. investors with an interest in the voting that gives them significant influence;
- iv. entities controlled by investors under note III above;
- v. key employees and family members; and
- vi. entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government.

All significant transactions with related parties have been disclosed in Note 22.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**n. Biaya pinjaman**

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atas seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**n. Borrowing fees**

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment and amortised over the period of the facility to which it relates.

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**a. Faktor risiko keuangan**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan menetapkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

(1) Risiko pasar**(i) Risiko nilai tukar mata uang asing**

Perusahaan tidak mempunyai risiko yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang asing karena transaksi utama Perusahaan dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dalam jumlah yang material. Oleh karena itu perubahan nilai tukar dari mata uang asing terhadap mata uang fungsional pada tanggal pelaporan tidak akan berdampak signifikan terhadap laba rugi setelah pajak Perusahaan untuk tahun berjalan.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**a. Financial risk factors**

The main risks arising from the Company's financial instruments are market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Management reviews and agrees policies for managing each of these risks. The Company applies the financial risk management policies to minimise the impact of the unpredictability of financial markets on the Company's financial performance. The summary of the financial risk management policies are as follows:

(1) Market risk**(i) Foreign currency exchange rate risk**

The Company has no significant foreign exchange risks since the Company's transactions are performed using the Company's functional currency. As at 31 December 2018 and 2017, the Company has no material financial assets and financial liabilities denominated in foreign currencies. Therefore, changes in foreign exchange against the Company's functional currency will not significantly impact to the Company's current year profit after tax.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(1) Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas atau nilai wajar di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Aset Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah investasi. Investasi Perusahaan terutama terdiri dari deposito dan investasi dengan pendapatan tetap. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi pendapatan bunga Perusahaan, oleh karena deposito Perusahaan memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun (jangka pendek), sementara pengelolaan dana investasi lainnya terutama merupakan investasi dengan pendapatan tetap (*fixed income*).

Lebih lanjut, perubahan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi Perusahaan karena investasi Perusahaan dikategorikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo.

Liabilitas Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah pinjaman penerusan dengan suku bunga variabel yang menggunakan SUN Benchmark dengan tenor 20 tahun. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi beban bunga Perusahaan.

(2) Risiko kredit

Perusahaan memitigasi risiko kredit dengan menetapkan kebijakan investasi yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta mengatur mandat investasi untuk jenis, batasan alokasi, serta kriteria *counterparty* yang selektif.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financial risk factors (continued)

(1) Market risk (continued)

(ii) Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Company's financial assets which are exposed to interest rate risk are investments. The Company's investments mostly consist of time deposit and fixed income investment. The changes due to higher or lower interest rate in market will not significantly impact the Company's interest income, since the time deposit will mature within one year (short term), while most of the other investment are fixed rate investment.

Moreover, the changes in interest rate will not impact the Company's profit and loss due to the financial assets are classified as available-for-sale investments and held-to-maturity investments.

The Company's financial liabilities which are exposed to interest rate risk are two-step loans with variable interest rate using SUN Benchmark with 20 years tenor. The changes due to higher or lower interest rate in market will not significantly impact the Company's interest expense.

(2) Credit risk

The Company mitigates its credit risk by setting a prudent investment policy, including investment mandates for type of investment, portfolio, allocation as well as selective criteria for counterparty.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)****(2) Risiko kredit (lanjutan)**

Deposito dan kas di bank ditempatkan pada bank-bank domestik yang memiliki reputasi yang tinggi sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
AAA	2,559,489,468	2,521,009,262
AA+	3,011,430,000	-
AA	1,801,130,638	3,342,561,913
A	-	1,329,407,000
	<u>7,372,050,106</u>	<u>7,192,978,175</u>

Untuk investasi yang ditempatkan pada efek hutang dengan pendapatan tetap, Perusahaan menempatkan investasinya pada surat berharga hutang di luar Pemerintah dengan peringkat investasi minimal AA paling rendah.

Sedangkan untuk Investasi yang ditempatkan pada reksadana, Perusahaan menempatkan investasinya melalui Manajer Investasi yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kas dan setara kas	1,698,666,922	1,442,671,175
Investasi	8,673,173,668	8,672,825,978
Piutang usaha	79,986,175	74,836,378
Piutang lainnya	8,978,218	6,978,641
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	<u>5,346,039</u>	<u>5,346,039</u>
	<u>10,466,151,022</u>	<u>10,202,658,211</u>

Semua aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai sehingga Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**a. Financial risk factors (continued)****(2) Credit risk (continued)**

Time deposits classified as cash and cash equivalents and investments are placed with highly reputable domestic banks as follows:

AAA	2,521,009,262	AAA
AA+	-	AA+
AA	3,342,561,913	AA
A	1,329,407,000	A

For placement of investment in fixed income debt securities, the Company places its investments on debt securities outside Government with investment grade at the lowest of AA.

For placement of investment in mutual funds, the Company places its investments on Investment Manager registered in Financial Services Authority (OJK).

The maximum credit risk on the Company's financial assets as at 31 December 2018 and 2017 are as follows:

Cash and cash equivalents	1,442,671,175
Investments	8,672,825,978
Account receivables	74,836,378
Other receivables	6,978,641
Refundable deposits	5,346,039

All of the Company's financial assets as at 31 December 2018 and 2017 are neither past due nor impaired. Therefore, the Company has provided no allowances for impairment losses.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)****(3) Risiko likuiditas**

Perusahaan tidak mempunyai risiko likuiditas yang signifikan. Risiko likuiditas timbul ketika Perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen pengelolaan risiko likuiditas termasuk di dalamnya menjaga kecukupan kas dan setara kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memantau arus kas perkiraan dan aktual dan menyesuaikan profil tanggal jatuh tempo dari aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain dan pinjaman penerusan yang jumlahnya tidak material terhadap aset likuid Perusahaan. Perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi dalam bentuk kas dan setara kas dan investasi.

b. Manajemen risiko modal

Tujuan Perusahaan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

Perusahaan menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perusahaan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menggunakan pendanaan internal untuk mengurangi utang.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**a. Financial risk factors (continued)****(3) Liquidity risk**

The Company has no significant liquidity risk. Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

As at 31 December 2018 and 2017, the Company's financial liabilities consist of account payables, accrued expenses and other payables and two-step loans which are immaterial to the total Company's liquid assets. The Company is highly liquid as it has financial instruments in form of cash and cash equivalents and investments.

b. Capital risk management

The Company's objective when managing capital is to safeguard its ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

The Company periodically reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Company, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may use internal funding to reduce debt.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**c. Estimasi nilai wajar**

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- **Tingkat 1**
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- **Tingkat 2**
Input diluar harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- **Tingkat 3**
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas Perusahaan yang diukur sebesar nilai wajar pada 31 Desember 2018 dan 2017.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**c. Fair value estimation**

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- **Level 1**
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- **Level 2**
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities; either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices); and
- **Level 3**
Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The following table presents the Company's asset and liabilities that are measured at fair value at 31 December 2018 and 2017.

31 Desember/December 2018					
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan tersedia untuk dijual					Available-for-sale financial assets
Investasi pada instrumen utang	2,334,006,794	2,334,006,794	-	-	2,334,006,794
Reksa dana	2.999,243	2.999,243	-	-	2.999,243
Jumlah	2,337,006,037	2,337,006,037	-	-	2,337,006,037
					<i>Debt investments</i>
					<i>Mutual funds</i>
					<i>Total</i>
31 Desember/December 2017					
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan tersedia untuk dijual					Available-for-sale financial assets
Investasi pada instrumen utang	1,327,705,299	1,327,705,299	-	-	1,327,705,299
Jumlah	1,327,705,299	1,327,705,299	-	-	1,327,705,299
					<i>Debt investments</i>
					<i>Total</i>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar

- (i) Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya dan uang jaminan yang dapat dikembalikan

Nilai wajar dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya dan uang jaminan yang dapat dikembalikan ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun, nilai tercatat dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar (level 2 – hirarki nilai wajar).

- (ii) Investasi pada instrumen utang

Nilai wajar dari investasi pada instrumen utang ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa (level 2 – hirarki nilai wajar).

- (iii) Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain

Nilai wajar dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain diperkirakan adalah sebesar nilai tercatatnya dikarenakan sisa jatuh tempo di bawah satu tahun (level 2 – hirarki nilai wajar).

- (iv) Pinjaman penerusan

Nilai wajar dari pinjaman penerusan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif yang dikenakan pada pemakaian terakhir diperkirakan adalah sebesar nilai tercatatnya (level 2 – hirarki nilai wajar).

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Fair value estimation (continued)

Financial instrument not measured at fair values

- (i) Cash and cash equivalents, account receivables, other receivables and refundable deposits

The fair value of cash and cash equivalents, account receivables, other receivables and refundable deposits were based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is below one year, the carrying amounts of cash and cash equivalents, account receivables and other receivables were a reasonable approximation of its fair value (level 2 – fair value hierarchy).

- (ii) Debt investments

The fair value of debt investments are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity (level 2 – fair value hierarchy).

- (iii) Account payables, accrued expenses and other liabilities

The fair value of account payables, accrued expenses and other liabilities are approximating their carrying amounts since the maturity is below one year (level 2 – fair value hierarchy).

- (iv) Two-step loans

The fair value of two-step loans are estimated using discounted cash flows based on the effective interest rate charged by the lenders for the latest utilisation are approximating their carrying amounts (level 2 – fair value hierarchy).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

Liabilitas imbalan kerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar karyawan dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Penyisihan atas kewajiban terkait perjanjian penjaminan

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan menelaah kewajibannya, baik dalam bentuk potensi klaim dan/atau klaim atas risiko-risiko yang ditanggung Perusahaan dalam perjanjian penjaminan, untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. Perusahaan juga memiliki hak *recourse* kepada PJPK terkait segala pembayaran klaim yang akan dilakukan Perusahaan, akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJPK kepada Badan Usaha.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Actual results may differ from these estimates. The estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are disclosed below.

Employee benefits obligation

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

The Company determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of Government Bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

For the rate of future salary increases, the Company collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

Claim provision related to guarantee agreement

At each reporting date the Company assess its obligations, in form of potential claim and/or claim on risks covered by the Company under guarantee agreements, to determine whether such liabilities should be recognised in the financial statements. The Company also has recourse to GCA in relation with any payments that would be made by the Company, due to inability of GCA in fulfilling its financial obligations to the Investors.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/25 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Beban tangguhan dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi keseluruhan bukti obyektif bahwa proyek-proyek yang dibentuk dan memiliki beban tangguhan masih dapat direalisasikan sebagai pendapatan penjaminan pada setiap akhir periode pelaporan. Perusahaan menggunakan pertimbangan dalam menentukan apakah proyek-proyek yang sedang berlangsung dapat mencapai penandatanganan perjanjian, utamanya berdasarkan kondisi terkini dan informasi resmi mengenai kelanjutan proyek yang bersumber dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelelangan proyek pada akhir tiap periode pelaporan.

Penyisihan penurunan nilai sebesar nilai penuh beban tangguhan ke laba rugi dibentuk ketika Perusahaan mendapatkan informasi dan konfirmasi mengenai realisasi proyek tidak dapat terjadi.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer dan akumulasi kerugian. Estimasi dan justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan proyeksi terbaik dari tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana bisnis ke depan.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Deferred charges and allowance for impairment losses

The Company continually evaluates objective evidences of projects that had deferred charges could be recognised as revenues as at the end of each reporting period. The Company uses its judgement to assess whether the project will achieve financial close that are mainly based on latest conditions and existing official information about the continuity of project issued by the stakeholders in regards to the tender process at the end of each reporting period.

Provision for impairment losses in full amount on deferred charges to profit and loss is recorded when the Company obtained informations and confirmations on project realisation can not be occurred.

Deferred tax asset

Deferred tax assets are recognised for the future recoverable taxable income arising from temporary difference and accumulated tax losses. Management's estimates and judgement required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and best estimates on level of future taxable profits together with future business planning strategies.

5. KAS DAN SETARA KAS

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kas	512,254	376,732
Bank	51,236,922	442,671,175
Deposito	<u>1,647,430,000</u>	<u>1,000,000,000</u>
	<u>1,699,179,176</u>	<u>1,443,047,907</u>

Deposito dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga 7,52% - 8,25% per tahun di 2018 (2017: 6,75%).

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 22.

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash on hand
Cash in banks
Time deposits

Time deposits with original maturities of three months or less earned interest rates 7.52% - 8.25% per annum in 2018 (2017: 6.75%).

Information in respect of related parties is disclosed in Note 22.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/26 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

6. INVESTASI

6. INVESTMENTS

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Deposito berjangka	5,673,383,184	5,750,307,000	<i>Time deposits</i>
Investasi dengan pendapatan tetap			<i>Fixed income investments</i>
- Investasi tersedia untuk dijual	2,334,006,794	1,327,705,299	<i>Available-for-sale investments -</i>
- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo	560,051,994	1,564,178,475	<i>Held-to-maturity investments -</i>
- Investasi diukur pada biaya perolehan	102,732,453	30,635,204	<i>Investments at cost -</i>
Reksa dana			<i>Mutual funds</i>
- Investasi tersedia untuk dijual	<u>2,999,243</u>	<u>-</u>	<i>Available-for-sale investments -</i>
	<u>8,673,173,668</u>	<u>8,672,825,978</u>	

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 22.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 22.

a) Deposito berjangka

a) Time deposits

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Swasta	4,009,383,184	5,750,307,000	<i>Private banks</i>
Pemerintah	<u>1,664,000,000</u>	<u>-</u>	<i>State-Owned banks</i>
	<u>5,673,383,184</u>	<u>5,750,307,000</u>	

Deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari tiga bulan sampai dengan satu tahun menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 6,5% - 9% per tahun di 2018 (2017: 6,25% - 8,75%).

Time deposits with original maturities more than three months and up to one year period earned interest rates ranging between 6.5% - 9% per annum in 2018 (2017: 6.25% - 8.75%).

b) Investasi dengan pendapatan tetap

b) Fixed income investments

- Investasi tersedia untuk dijual

- Available-for-sale investments

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	1,244,254,200	616,426,781	<i>State-Owned Enterprise bonds</i>
Obligasi Pemerintah	1,078,101,944	681,589,414	<i>Government bonds</i>
Obligasi korporasi	<u>11,650,650</u>	<u>29,689,104</u>	<i>Corporate bonds</i>
	<u>2,334,006,794</u>	<u>1,327,705,299</u>	

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

- Held-to-maturity investments

Investasi pada obligasi dengan periode jatuh tempo 1 - 5 tahun dan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 7,9% - 12,55% per tahun (2017: 7,9% - 12,55%).

Investments in bonds with 1 - 5 years maturities and earned interest rates ranging between 7.9% - 12.55% per annum (2017: 7.9% - 12.55%).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/27 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

6. INVESTASI (lanjutan)

6. INVESTMENTS (continued)

b) Investasi dengan pendapatan tetap (lanjutan)

b) Fixed income investments (continued)

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

- Held-to-maturity investments

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Obligasi BUMN	400,480,016	484,846,609	State-Owned Enterprise bonds
Obligasi Pemerintah	127,329,563	1,001,745,007	Government bonds
Obligasi korporasi	<u>32,242,415</u>	<u>77,586,859</u>	Corporate bonds
	<u>560,051,994</u>	<u>1,564,178,475</u>	

- Investasi diukur pada biaya perolehan

- Investments at cost

Investasi diukur pada biaya perolehan merupakan investasi pada obligasi Sukuk yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk".

Investments at cost represents investments in Sukuk bonds which is recorded in accordance with SFAS 110 "Accounting for Sukuk".

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Obligasi BUMN	92,181,000	20,000,000	State-Owned Enterprise bonds
Obligasi Pemerintah	<u>10,551,453</u>	<u>10,635,204</u>	Government bonds
	<u>102,732,453</u>	<u>30,635,204</u>	

c) Investasi reksa dana

c) Mutual funds investments

- Investasi tersedia untuk dijual

- Available-for-sale investments

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Reksa dana	2,999,243	-	Mutual funds

Manajemen berkeyakinan bahwa semua investasi dapat dipulihkan, dan tidak ada cadangan kerugian yang diperlukan atas penurunan nilai investasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Management believes that all investments are recoverable, and no provision for impairment of investments is necessary as at 31 December 2018 and 2017.

7. PIUTANG USAHA

7. ACCOUNT RECEIVABLES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Bunga yang belum diterima	57,148,678	74,836,378	Interest receivables
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	14,337,497	-	Project preparation and transaction advisory
Penjaminan	<u>8,500,000</u>	<u>-</u>	Guarantee
	<u>79,986,175</u>	<u>74,836,378</u>	

Manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang usaha dapat dipulihkan, dan tidak ada cadangan kerugian yang diperlukan atas penawaran nilai piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 22.

Management believes that all account receivables are recoverable, and no provision for impairment of investments is necessary as at 31 December 2018 and 2017. Information in respect of related parties is disclosed in Note 22.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/28 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP

8. FIXED ASSETS

2018						
Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>		
Aset kepemilikan langsung:					Direct ownership assets:	
Harga perolehan:					Acquisition cost:	
Aset dalam penyelesaian	-	7,647,306	-	(7,510,906)	136,400	Construction in progress
Prasarana kantor	13,448,712	411,493	-	6,192,900	20,053,105	Leasehold improvement
Peralatan komputer	4,404,585	663,076	-	230,994	5,298,655	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	8,065,664	280,285	-	1,087,012	9,432,961	Office equipments, furnitures and fixtures
	25,918,961	9,002,160	-	-	34,921,121	
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:	
Prasarana kantor	(4,197,899)	(3,648,707)	-	-	(7,846,606)	Leasehold improvement
Peralatan komputer	(2,695,371)	(845,398)	-	-	(3,540,769)	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	(2,759,177)	(1,998,939)	-	-	(4,758,116)	Office equipments, furnitures and fixtures
	(9,652,447)	(6,493,044)	-	-	(16,145,491)	
Nilai buku	16,266,514				18,775,630	Net book value

2017						
Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>		
Aset kepemilikan langsung:					Direct ownership assets:	
Harga perolehan:					Acquisition cost:	
Aset dalam penyelesaian	32,560	285,420	-	(317,980)	-	Construction in progress
Prasarana kantor	25,495,084	443,696	(7,334,696)	(5,155,372)	13,448,712	Leasehold improvement
Peralatan komputer	3,848,216	630,365	(717,477)	643,481	4,404,585	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	3,140,579	289,650	(194,436)	4,829,871	8,065,664	Office equipments, furnitures and fixtures
	32,516,439	1,649,131	(8,246,609)	-	25,918,961	
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:	
Prasarana kantor	(8,469,721)	(3,321,594)	7,334,696	258,720	(4,197,899)	Leasehold improvement
Peralatan komputer	(2,675,140)	(779,650)	717,477	41,942	(2,695,371)	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	(721,332)	(1,931,619)	194,436	(300,662)	(2,759,177)	Office equipments, furnitures and fixtures
	(11,866,193)	(6,032,863)	8,246,609	-	(9,652,447)	
Nilai buku	20,650,246				16,266,514	Net book value

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Management believes that no impairment in fixed assets value as at 31 December 2018 and 2017.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/29 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TAK BERWUJUD

9. INTANGIBLE ASSETS

2018					
Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Harga perolehan:					Acquisition cost:
Aset dalam penyelesaian	-	488,330	-	(153,288)	Construction in progress
Piranti lunak	4,946,450	275,993	-	153,288	Software
	4,946,450	764,323	-	-	5,710,773
Akumulasi amortisasi:					Accumulated amortisation:
Piranti lunak	(3,954,142)	(561,923)	-	-	Software
	(3,954,142)	(561,923)	-	-	(4,516,065)
Nilai buku	992,308			1,194,708	Net book value
2017					
Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Harga perolehan:					Acquisition cost:
Aset dalam penyelesaian	132,339	272,245	-	(404,584)	Construction in progress
Piranti lunak	4,408,018	133,848	-	404,584	Software
	4,540,357	406,093	-	-	4,946,450
Akumulasi amortisasi:					Accumulated amortisation:
Piranti lunak	(2,850,173)	(1,103,969)	-	-	Software
	(2,850,173)	(1,103,969)	-	-	(3,954,142)
Nilai buku	1,690,184			992,308	Net book value

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Management believes that no impairment in intangible assets value as at 31 December 2018 and 2017.

10. BEBAN TANGGUHAN

10. DEFERRED EXPENSES

	2018	2017	
Beban tangguhan	56,746,426	55,051,603	Deferred expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	(13,386,382)	(13,386,382)	Allowance for impairment losses
	43,360,044	41,665,221	

Beban tangguhan terutama merupakan biaya *advisory* yang terkait langsung dengan kegiatan pemrosesan dan pengaturan penjaminan jangka panjang dan akan dibebankan pada saat pendapatan dari penjaminan tersebut diakui.

Deferred expenses mainly represent advisory costs which directly attributable to the processing and arranging activities in providing long-term guarantees and will be expensed upon the recognition of such fees.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

10. BEBAN TANGGUHAN (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa proyek-proyek terkait dan memiliki saldo beban tangguhan, akan dapat mencapai penandatanganan perjanjian penjaminan. Oleh karena itu beban tangguhan terus diakui di laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

10. DEFERRED EXPENSES (continued)

Management believes that outstanding projects, related to deferred expenses, could achieve the signing of guarantee of the project. Therefore, the deferred expenses continue to be recognised in the Company's statement of financial position as at 31 December 2018 dan 2017.

Management believes that the provision for impairment losses on deferred expenses is adequate.

11. UTANG USAHA

Utang usaha terutama merupakan pembayaran yang belum dilakukan untuk jasa konsultasi terkait dengan penyediaan penjaminan dan renovasi gedung kantor Perusahaan.

11. ACCOUNT PAYABLES

Account payables mainly represent payables for advisory related to the guarantee provision and renovation of the Company's office building.

12. PERPAJAKAN**12. TAXATION****a. Pajak dibayar dimuka****a. Prepaid income tax**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Lebih bayar pajak penghasilan badan	367,577	-	Overpayment of corporate income tax
	<u>367,577</u>	<u>-</u>	

b. Utang pajak**b. Taxes payable**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Pajak lain-lain:			Other taxes:
- Pasal 21	3,934,731	3,319,172	Article 21 -
- Lainnya	881,718	165,070	Others -
	<u>4,816,449</u>	<u>3,484,242</u>	

c. (Beban)/manfaat pajak penghasilan**c. Income tax (expenses)/benefits**

(Beban)/manfaat pajak Perusahaan terdiri dari sebagai berikut:

Tax (expenses)/benefits of the Company consist of the following:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Pajak tangguhan	(6,384,835)	18,333,536	Deferred tax
	<u>(6,384,835)</u>	<u>18,333,536</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/31 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

c. (Beban)/manfaat pajak penghasilan (lanjutan)			c. Income tax (continued)	(expenses)/benefits

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the tax expense and the amounts computed by applying the prevailing tax rates to profit before income tax is as follows:

	2018	2017	
Laba sebelum pajak penghasilan	477,465,011	452,134,971	Profit before income tax
Beban pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	(119,366,253)	(113,033,742)	Tax calculated at applicable tax rate
Pengaruh atas:			Effects of:
- Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	189,386,003	176,539,522	Revenues subjected to - final income tax
- Rugi pajak yang tidak bisa dikompensasi tahun berjalan	(34,751,962)	(5,837,203)	Tax loss expired in current year -
- Beban yang tidak dapat diperhitungkan	(41,652,623)	(39,335,041)	Non-deductible expenses -
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	(6,384,835)	18,333,536	Income tax (expenses)/benefits

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dan laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before income tax and the Company's taxable income is as follows:

	2018	2017	
Laba sebelum pajak penghasilan	477,465,011	452,134,971	Profit before income tax
Beda waktu	7,768,776	8,896,484	Timing differences
Beda tetap	166,610,494	157,340,163	Permanent differences
Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	(757,544,012)	(706,158,089)	Revenues subjected to final income tax
Laba/(rugi) pajak berjalan	(105,699,731)	(87,786,471)	Current tax income/(loss)
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	(319,146,706)	(254,709,048)	Tax loss carry forward
Rugi pajak yang tidak bisa dikompensasi tahun berjalan	139,007,845	23,348,813	Tax loss expired in current year
Akumulasi kerugian pajak	(285,838,592)	(319,146,706)	Accumulated tax losses

Berikut ini adalah rincian akumulasi kerugian fiskal:

Below are details of accumulated fiscal losses:

	2018	2017	
Tahun fiskal:			Fiscal year:
2018	(105,699,731)	-	2018
2017	(87,786,471)	(87,786,471)	2017
2015	(92,352,390)	(92,352,390)	2015
2014	-	(85,990,646)	2014
2013	-	(53,017,199)	2013
	(285,838,592)	(319,146,706)	

Termasuk di dalam koreksi fiskal beda tetap adalah beban pajak sebesar Rp 139.868.101 (2017: Rp. 136.422.306) yang dibayarkan atas penerimaan bunga dari obligasi deposito berjangka dan giro.

Included in the fiscal correction of the fixed difference is the tax expense of Rp 139,868,101 (2017: Rp. 136,422,306) paid for interest income from time deposits and demand deposits.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/32 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

c. (Beban)/manfaat pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax (expenses)/benefits (continued)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

The above corporate income tax calculation for the year ended 31 December 2018 was a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company lodges its Annual Corporate Tax Return ("SPT").

Perhitungan perpajakan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 sesuai dengan SPT tahunan Perusahaan.

The calculations of income tax for the year ended 31 December 2017 conform to the Company's annual tax return ("SPT").

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax asset

2018					
	1 Januari/ January 2018	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to statements of profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	31 Desember/ December 2018	
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	79,786,677	(8,327,029)	-	71,459,648	Tax loss carry forward
Penyisihan gaji dan bonus	4,623,026	(15,248)	-	4,607,778	Provision for salaries and bonus
Beban penyisihan imbalan kerja	5,073,358	1,285,809	(1,009,700)	5,349,467	Provision for employee benefits obligation
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	649,871	565,529	-	1,215,400	Differences between accounting and tax fixed assets net book value
Pendapatan tangguhan penjaminan	2,021,333	106,104	-	2,127,437	Guarantee unearned revenue
Penyisihan penurunan nilai	3,346,596	-	-	3,346,596	Provision for impairment losses
	<u>95,500,861</u>	<u>(6,384,835)</u>	<u>(1,009,700)</u>	<u>88,106,326</u>	
2017					
	1 Januari/ January 2017	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to statements of profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	31 Desember/ December 2017	
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	63,677,262	16,109,415	-	79,786,677	Tax loss carry forward
Penyisihan gaji dan bonus	4,342,555	280,471	-	4,623,026	Provision for salaries and bonus
Beban penyisihan imbalan kerja	3,583,852	1,331,973	157,533	5,073,358	Provision for employee benefits obligation
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	1,050,860	(400,989)	-	649,871	Differences between accounting and tax fixed assets net book value
Pendapatan tangguhan penjaminan	1,008,667	1,012,666	-	2,021,333	Guarantee unearned revenue
Penyisihan penurunan nilai	3,346,596	-	-	3,346,596	Provision for impairment losses
	<u>77,009,792</u>	<u>18,333,536</u>	<u>157,533</u>	<u>95,500,861</u>	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)**d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)**

Aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2018 telah memperhitungkan tarif pajak yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan mempunyai akumulasi kerugian dari tahun-tahun pajak 2015-2018 senilai Rp 285.838.592 (2017: Rp 319.146.706) dan diakui sebagai aset pajak tangguhan.

Berdasarkan rencana bisnis yang telah disetujui, Manajemen berkeyakinan bahwa kemungkinan besar bahwa aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi pajak dan perbedaan temporer dapat dikompensasi dengan penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

12. TAXATION (continued)**d. Deferred tax asset (continued)**

Deferred tax assets as at 31 December 2018 has been calculated taking into account tax rates applicable as at 31 December 2018, the Company has an accumulated tax losses from 2015-2018 fiscal years amounting to Rp 285,838,592 (2017: Rp 319,146,706) and recognised as deferred tax assets.

On the basis of the approved business plans, the Company's management believes it is highly probable that the deferred tax arising from tax loss carry forward and temporary differences can be offset against future taxable profits.

13. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR, PENYISIHAN DAN UTANG LAIN-LAIN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Beban <i>advisory</i>	23,406,263	8,013,475
Bonus dan gaji	18,431,112	18,492,103
Program kemitraan dan bina lingkungan	-	871,660
Lainnya	<u>1,075,366</u>	<u>1,344,289</u>
	<u>42,912,741</u>	<u>28,721,527</u>

13. ACCRUED EXPENSES, PROVISIONS AND OTHER PAYABLES

Advisory fees
Bonus and salary
Corporate social responsibility programme
Others

14. PENDAPATAN TANGGUHAN

Pendapatan tangguhan merupakan pendapatan premi *recurring* yang diterima dimuka dan akan diakui setiap bulannya sepanjang masa pertanggungan.

14. UNEARNED INCOME

Unearned income represents guarantee recurring income received in advance and will be recognised on monthly basis along the guarantee period.

15. PINJAMAN PENERUSAN

Pada tanggal 27 Mei 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian penerusan pinjaman dengan Pemerintah atas dana pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development*.

Pinjaman penerusan adalah pinjaman yang diperoleh Pemerintah dari bank luar negeri yaitu Bank Dunia, yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman.

15. TWO-STEP LOANS

On 27 May 2013, the Company entered into a two-step loans agreement with the Government in regards to the fund provided by the International Bank for Reconstruction and Development.

Two-step loans are loans obtained by the Government from international bank which is World Bank, which are then re-loaned to the Company. The loans were recorded and payable in Rupiah based on the exchange rate at the date of drawdown.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PINJAMAN PENERUSAN (lanjutan)

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai peningkatan kapasitas penjaminan Perusahaan dan pengadaan konsultan jasa atas proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ("KPBU") di bidang infrastruktur. Pokok pinjaman akan dilunasi dengan angsuran semesteran setelah masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2029.

Pada tanggal 22 Februari 2016, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat No. S-1504/MK.5/2016 sebagai amandemen atas perjanjian penerusan pinjaman No. SLA-1251/DSMI/2013 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan, dengan perubahan pada tingkat suku bunga, yaitu menggunakan *SUN Benchmark* dengan tenor 20 tahun. Batas penarikan pinjaman penerusan akan berakhir pada tanggal 30 April 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah akumulasi penarikan pinjaman penerusan adalah Rp 55.126.686 (2017: Rp 45.276.380). Pinjaman penerusan ini menggunakan *SUN Benchmark* sebagai acuan tingkat suku bunga.

PT PII telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 22.

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaria PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dan PT Towers Watson Purbajaga untuk masing-masing untuk tahun 2018 dan 2017 tertanggal 22 Februari 2019 dan 2 Maret 2018 untuk penyisihan imbalan kerja Perusahaan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*", masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

15. TWO-STEP LOANS (continued)

The loans are intended for the development of underwriting capacity of the Company and procurement of service consultants on Public Private Partnership ("PPP") in infrastructure projects. The loan principal are payable in semi-annual installments after grace period of 9 (nine) years and are due up to 2029.

On 22 February 2016, Ministry of Finance Republic of Indonesia issued a letter No. S-1504/MK.5/2016 as an amendment of loan agreement No. SLA-1251/DSMI/2013 between the Government of Indonesia and the Company, with the amendment of interest rate using SUN Benchmark with 20 years tenor. The loans drawdown will expire on 30 April 2019.

As at 31 December 2018, the withdrawal of accumulated two-step loans are amounting to Rp 55,126,686 (2017: Rp 45,276,380). This loan used SUN Benchmark as reference of interest rate.

PT PII has complied with the covenants in the borrowing agreements above.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 22.

16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

The Company provides employee benefits based on the provisions of Labor Law No. 13/2003 dated 25 March 2003.

The following are the key matters disclosed in the actuarial report of PT Dayamandiri Dharmakonsilindo and PT Towers Watson Purbajaga for the Company's provisions year ended 2018 and 2017 dated 22 February 2019 and 2 March 2018 for employee benefit using the "Projected Unit Credit" method, as at 31 December 2018 and 2017, respectively:

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/35 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)	16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)	
Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya (lanjutan)	Pension and other post-employment benefits (continued)	
Liabilitas imbalan kerja diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:	Employee benefits obligations recognised in the statements of financial position are as follows:	
	2018	2017
Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	14,312,277	13,879,152
Imbalan jangka panjang lainnya	7,085,585	6,414,278
	<u>21,397,862</u>	<u>20,293,430</u>
Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:	Net expense recognised in the profit or loss is as follows:	
	2018	2017
Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	4,590,047	3,624,530
Imbalan jangka panjang lainnya	768,527	1,723,359
	<u>5,358,574</u>	<u>5,347,889</u>
Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan kewajiban imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:	The principal assumptions used in determining the post-employment benefits obligation as at 31 December 2018 and 2017 are as follows:	
	2018	2017
Usia pensiun normal	56	56
Tingkat diskonto	8.40%	7.00%
Tingkat mortalita	TMI '11	TMI '11
Tingkat kenaikan gaji	10.00%	10.00%
Tingkat pengunduran diri	5% dari usia sebelum 25 tahun dan menurun secara bertahap menjadi 0% pada usia 56 tahun/ 5% from age before 25 and reduced to 0% at age 56	5% dari usia sebelum 25 tahun dan menurun secara bertahap menjadi 0% pada usia 56 tahun/ 5% from age before 25 and reduced to 0% at age 56
Liabilitas imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:	Pension and other post-employment benefits recognised in the statements of financial position are as follows:	
	2018	2017
Liabilitas imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	14,312,277	13,879,152

Pension and other post-employment benefits
Other long-term benefits

Pension and other post-employment benefits
Other long-term benefits

Retirement age
Discount rate
Mortality rate
Salary increment rate
Resignation rate

Pension and other post-employment benefits obligation

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/36 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

**Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya
(lanjutan)**

**Pension and other post-employment benefits
(continued)**

Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expense recognised in the profit or loss is as follows:

	2018	2017	
Biaya jasa kini	3,535,472	2,856,239	Current service cost
Beban bunga	968,192	768,291	Interest cost
Biaya jasa lalu	86,383	-	Past service cost
	<u>4,590,047</u>	<u>3,624,530</u>	

Mutasi Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya adalah sebagai berikut:

The movement in the pension and other post-employment benefits is as follows:

	2018	2017	
Saldo awal tahun	13,879,152	9,644,490	Balance at the beginning of the year
Beban tahun berjalan	4,590,047	3,624,530	Employee benefit expense charged in the current year
Pengukuran kembali: (Keuntungan)/Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(4,038,800)	630,132	Remeasurement: (Gain)/loss from changes in financial assumptions
Pembayaran imbalan kerja	(118,122)	(20,000)	Benefit paid
	<u>14,312,277</u>	<u>13,879,152</u>	

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan pada imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in significant actuarial assumptions on pension and post-employment benefits obligation are as follow:

31 Desember/December 2018			
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1.00%	(1,363,779)	1,590,793
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	2,275,515	(1,957,009)
			Discount rate Rate of salary increase in the future
31 Desember/December 2017			
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1.00%	(1,519,867)	1,800,513
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	2,269,230	(1,942,066)
			Discount rate Rate of salary increase in the future

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/37 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)

Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya
(lanjutan)

Pension and other post-employment benefits
(continued)

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 16 tahun (2017: 16 tahun).

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation at 31 December 2018 is 16 years (2017: 16 years).

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits is as follow:

	2018	2017	
Kurang dari 1 tahun	1,656,604	111,041	Less than a year
1 sampai 2 tahun	1,207,671	154,077	Between 1 - 2 years
2 sampai 5 tahun	1,937,818	3,228,651	Between 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	226,352,458	217,896,273	Over then 5 years

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term benefits

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Other long-term benefits obligations recognised in the statements of financial position are as follows:

	2018	2017	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya	7,085,585	6,414,278	Other long-term benefits obligation

Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expense recognised in the profit or loss is as follows:

	2018	2017	
Biaya jasa kini	1,850,402	1,522,795	Current service cost
Biaya jasa lalu	67,936		Past service cost
Beban bunga	421,456	360,105	Interest cost
Keuntungan aktuarial	(1,571,267)	(159,541)	Actuarial gains
	<u>768,527</u>	<u>1,723,359</u>	

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The movement in the employee benefits obligation is as follows:

	2018	2017	
Saldo awal tahun	6,414,278	4,690,919	Balance at the beginning of the year
Beban tahun berjalan	768,527	1,723,359	Employee benefit expense charged in the current year
Pembayaran imbalan kerja	(97,220)	-	Benefit paid
	<u>7,085,585</u>	<u>6,414,278</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/38 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan pada imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

**16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

Other long-term benefits (continued)

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in significant actuarial assumptions on other long-term benefits obligation are as follow:

31 Desember/December 2018				
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation				
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption		
Tingkat diskonto	1.00%	(413,711)	462,840	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	484,003	(440,373)	Rate of salary increase in the future
31 Desember/December 2017				
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation				
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption		
Tingkat diskonto	1.00%	(392,749)	443,149	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	470,759	(426,133)	Rate of salary increase in the future

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted after other long-term benefits is as follow:

	2018	2017	
Kurang dari 1 tahun	670,977	844,709	Less than a year
1 sampai 2 tahun	1,458,150	796,930	Between 1 - 2 years
2 sampai 5 tahun	6,260,319	4,160,084	Between 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	43,629,640	61,296,816	Over then 5 years

17. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

17. SHARE CAPITAL

The composition of Company's shareholder as at 31 December 2018 and 2017 is as follows:

	2018 dan/and 2017			
	Jumlah saham/ Number of shares	Kepemilikan/ Ownership (%)	Nilai/ Value	
Pemerintah Republik Indonesia	8,000,000	100	8,000,000,000	Government of the Republic of Indonesia

Pada tanggal 28 Desember 2017, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan, telah disetorkan tambahan modal saham sebesar Rp 1.000.000.000 yang telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 30 Desember 2017.

On 28 December 2017, in accordance with Government Regulation No. 57 Year 2017 regarding addition of investment on the Company's capital by Government of Indonesia, the payment for issuance of share capital amounting to Rp 1,000,000,000 had been received by the Company on 30 December 2017.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

18. DIVIDEN

Pada tahun 2018, berdasarkan akta notaris Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., MKn. No. 11 tanggal 23 Mei 2018, Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2017 sejumlah Rp 101.151.000 yang telah dibayarkan pada tanggal 22 Juni 2018.

Pada tahun 2017, berdasarkan akta notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MKn. No. 35 tanggal 26 Mei 2017, Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan telah menyetujui pembagian total dividen untuk tahun 2016 sejumlah Rp 100.650.000 yang telah dibayarkan pada tanggal 16 Juni 2017.

18. DIVIDEND

In 2018, based on notarial deed No. 11 of Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., MKn. dated 23 May 2018, Shareholder through Annual General Meeting of Shareholders approved amount of dividend for 2017 amounting Rp 101,151,000 that has been paid on 22 June 2018.

In 2017, based on notarial deed No. 35 of Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MKn. dated 26 May 2017, Shareholder through Annual General Meeting of Shareholders approved amount of dividend for 2016 amounting Rp 100,650,000 that has been paid on 16 June 2017.

**19. SALDO LABA YANG DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA - CADANGAN WAJIB**

Berdasarkan Undang-undang Perusahaan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Pada tahun 2018, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 23.524.000, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 116.446.338. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., MKn. No. 11 tanggal 23 Mei 2018.

Pada tahun 2017, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 25.122.338, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 92.922.338. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MKn. No. 35 tanggal 26 Mei 2017.

Manajemen bermaksud untuk meningkatkan cadangan tersebut di masa datang.

**19. APPROPRIATED RETAINED EARNING -
STATUTORY RESERVE**

Based on Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007, the Company shall appropriate a certain amount of its profit in each year for general reserve if there are available retained earnings, until the general reserve has reached at least 20% of the issued and paid-up capital.

In 2018, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 23,524,000, as the reserve balance became Rp 116,446,338. This general reserve was approved in the Circular Decision General meeting of Shareholders as covered by notarial deed Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., MKn. No. 11 dated 23 May 2018.

In 2017, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 25,122,338, as the reserve balance became Rp 92,922,338. This general reserve was approved in the Circular Decision General meeting of Shareholders as covered by notarial deed Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MKn. No. 35 dated 26 May 2017.

Management plans to increase the general reserve in the future.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/40 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

20. PENDAPATAN

20. REVENUES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Pendapatan penjaminan			<i>Revenue from guarantee</i>
- Pendapatan provisi dan komisi	19,400,000	38,600,000	<i>Fees and commission -</i>
- Pendapatan premi	<u>27,223,783</u>	<u>22,130,433</u>	<i>Premium income -</i>
	<u>46,623,783</u>	<u>60,730,433</u>	
Pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	<u>32,716,363</u>	<u>-</u>	<i>Revenue from project preparation and transaction advisory</i>
Pendapatan pengelolaan dana:			<i>Income from investments:</i>
- Deposito	486,085,684	470,102,109	<i>Time deposits -</i>
- Investasi dengan pendapatan tetap:			<i>Fixed income:</i>
- Pendapatan bunga	267,411,045	235,126,447	<i>Interest income -</i>
- Laba atas penjualan obligasi	<u>1,415,092</u>	<u>-</u>	<i>Gain on sale of bonds -</i>
	<u>754,911,821</u>	<u>705,228,556</u>	
	<u>834,251,967</u>	<u>765,958,989</u>	
Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 22.			<i>Information in respect of related parties is disclosed in Note 22.</i>

21. BEBAN USAHA

21. OPERATING EXPENSES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Penjaminan:			Guarantee:
- Pegawai	41,323,342	43,680,597	<i>Employee cost -</i>
- Konsultan	14,023,539	26,779,504	<i>Consultancy -</i>
- Loka-karya	2,109,033	1,220,921	<i>Workshop -</i>
- Perjalanan dinas	1,743,686	2,004,895	<i>Travelling -</i>
- Rapat dan konferensi	<u>844,838</u>	<u>998,338</u>	<i>Meeting and conference -</i>
	<u>60,044,438</u>	<u>74,684,255</u>	
Administrasi dan umum:			General and administrative:
- Pegawai	52,615,561	40,068,576	<i>Employee cost -</i>
- Sewa	24,987,647	18,494,512	<i>Rent -</i>
- Jasa profesional	9,968,107	7,828,391	<i>Professional fees -</i>
- Rapat dan konferensi	4,104,741	2,917,332	<i>Meeting and conference -</i>
- Perjalanan dinas	3,823,258	4,126,503	<i>Travelling -</i>
- Outsourcing	3,168,730	3,280,260	<i>Outsourcing -</i>
- Beban bina karyawan	3,093,587	3,320,216	<i>Employee development -</i>
- Pelatihan	2,756,800	3,189,527	<i>Training -</i>
- Perlengkapan kantor	1,209,189	1,875,713	<i>Office equipment -</i>
- Transportasi	1,007,679	816,064	<i>Transportation -</i>
- Pemeliharaan	848,047	839,123	<i>Maintenance -</i>
- Air dan Listrik	415,449	509,875	<i>Water & Electricity -</i>
- Komunikasi	240,090	247,126	<i>Communication -</i>
- Lainnya	<u>178,144</u>	<u>299,614</u>	<i>Others -</i>
	<u>108,417,029</u>	<u>87,812,832</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/41 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

21. BEBAN USAHA (lanjutan)

21. OPERATING EXPENSES (continued)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi:			Project preparation and transaction advisory:
- Konsultan	25,955,015	-	Consultancy -
- Pegawai	4,856,475	-	Employee cost -
- Rapat dan konferensi	1,736,788	-	Meeting and conference -
- Loka-karya	581,238	-	Workshop -
- Perjalanan dinas	142,849	-	Travelling -
	<u>33,272,365</u>	<u>-</u>	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Pengembangan usaha:			Business development:
- IIGF Institute	3,414,161	2,175,437	IIGF Institute -
- Loka-karya	1,189,756	1,428,082	Workshop -
- Iklan dan promosi	1,147,689	1,413,369	Advertising and promotion -
- Sumbangan sosial	1,083,470	892,148	Social contribution -
- Representasi	819,362	510,910	Representation -
	<u>7,654,438</u>	<u>6,419,946</u>	

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 22.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 22.

22. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN

22. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION

Sifat pihak berelasi

Nature of relationship

- Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan.
- Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perusahaan.
- Bank dan Badan Usaha Milik Negara merupakan entitas sepengendali dimana Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito dan obligasi.

- The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of the Company.
- The directors are persons who have authority and responsibility for planning, directing and controlling the Company's activities.
- Banks and State-Owned Enterprise are entities under common controls where the Company places its investments in time deposits and bonds.

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with related parties, including the following:

- Perusahaan menempatkan dana dalam bentuk deposito dan obligasi dari pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disepakati. Rincian pendapatan pengelolaan dana kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- The Company invested their funds in time deposit and bonds from related parties which were made according to agreed terms and conditions. The details of investments income from related parties is as follows:

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/42 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

22. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sifat pihak berelasi (lanjutan)

- a. Perusahaan menempatkan dana dalam bentuk deposito dan obligasi dari pihak pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disepakati. Rincian pendapatan pengelolaan dana kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi

	2018	2017
Kas dan setara kas	968,485,000	1,442,380,760
Investasi	4,616,898,175	5,335,950,016
Piutang usaha	65,533,091	64,696,060
Pinjaman penerusan	55,126,686	45,276,380
	<u>5,706,042,952</u>	<u>6,888,303,216</u>
Persentase terhadap jumlah aset	<u>53.72%</u>	<u>66.49%</u>

22. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Nature of relationship (continued)

- a. The Company invested their funds in time deposit and bonds from related parties which were made according to agreed terms and conditions. The details of investments income from related parties is as follows: (continued)

Balances arising from related parties transactions

	2018	2017
Cash and cash equivalents	968,485,000	1,442,380,760
Investments	4,616,898,175	5,335,950,016
Account receivables	65,533,091	64,696,060
Two-step loans	55,126,686	45,276,380
	<u>5,706,042,952</u>	<u>6,888,303,216</u>
Percentage of total assets	<u>53.72%</u>	<u>66.49%</u>

Pendapatan

	2018	2017
- Pemerintah Republik Indonesia	176,760,668	152,071,526
- PT Bank Tabungan Negara	114,526,031	32,885,008
- PT Bank Tabungan Negara Syariah	58,647,559	274,309
- PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga	58,181,702	5,938,201
- PT Bank Mandiri Taspen Pos	25,311,064	536,301
- PT Bank Rakyat Indonesia	18,582,109	17,610,467
- PT Bank Mandiri	18,179,869	-
- PT Pegadaian	15,234,078	3,699,800
- PT Sarana Multi Infrastruktur	14,695,194	6,020,718
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Bank Exim)	12,115,056	5,950,783
- PT Telekomunikasi Indonesia	9,184,388	8,971,282
- PT Sarana Multigriya Finansial	7,537,361	2,611,557
- PT Pupuk Indonesia	7,506,250	773,840
- PT Pelindo	7,122,500	279,851
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat	6,710,338	73,907,420
- PT Pembangkit Listrik Negara	5,617,865	5,646,409
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	5,000,000	-
- PT Adhi Karya	3,802,211	5,852,992
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3,802,016	4,778,067

Revenues

Government of the Republic of Indonesia -
PT Bank Tabungan Negara -
PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Bank Rakyat Indonesia -
Agroniaga
PT Bank Mandiri Taspen Pos -
PT Bank Rakyat Indonesia -
PT Bank Mandiri -
PT Pegadaian -
PT Sarana Multi Infrastruktur -
Lembaga Pembiayaan Ekspor -
Indonesia (Bank Exim)
PT Telekomunikasi Indonesia -
PT Sarana Multigriya Finansial -
PT Pupuk Indonesia -
PT Pelindo -
PT Bank Pembangunan Daerah -
Jawa Barat
PT Pembangkit Listrik Negara -
Indonesia Tourism -
Development Corporation
PT Adhi Karya -
PT Bank Negara Indonesia -
(Persero) Tbk

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/43 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

22. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

22. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Sifat pihak berelasi (lanjutan)

Nature of relationship (continued)

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Balances arising from related parties transactions (continued)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Pendapatan (lanjutan)			Revenues (continued)
- PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	3,196,202	22,224,402	PT Bank Pembangunan Daerah - Riau Kepri
- PT Angkasa Pura	2,150,000	1,997,304	PT Angkasa Pura -
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	1,906,787	33,683,258	PT Bank Pembangunan Daerah - Jawa Tengah
- PT Jasamarga	1,886,352	2,814,622	PT Jasamarga -
- PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	1,863,356	7,486,971	PT Bank Pembangunan Daerah - Sulawesi Utara
- PT Kereta Api Indonesia	1,840,625	128,299	PT Kereta Api Indonesia -
- PT Hutama Karya	1,754,783	3,318,711	PT Hutama Karya -
- PT Waskita Karya	1,665,000	1,576,427	PT Waskita Karya -
- PT Marga Lingkar Jakarta	1,469,306	102,499	PT Marga Lingkar Jakarta -
- PT Garuda Indonesia	1,188,368	2,164,879	PT Garuda Indonesia -
- PT Pembangunan Perumahan	1,159,167	4,980,602	PT Pembangunan Perumahan -
- PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar	1,133,622	19,794,589	PT Bank Pembangunan Daerah - Sulselbar
- PT Bank Nagari	607,066	14,568,822	PT Bank Nagari -
- PT Aneka Tambang	475,086	511,860	PT Aneka Tambang -
	<u>590,811,979</u>	<u>443,161,776</u>	
Persentase terhadap jumlah pendapatan	<u>70.82%</u>	<u>57.86%</u>	Percentage of total revenue

b. Perusahaan memberikan remunerasi dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan Direksi. Jumlah gaji dan tunjangan, bonus/tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

b. The Company provides remuneration and facilities to support the operational duties of their Board of Commissioners and Directors. The total of salary and allowance, bonus/tantiem for Board of Commissioners and Directors for the years ended 31 December 2018 and 2017 are as follows:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
- Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	4,357,397	4,767,121	Salary and short term - employee benefit
Dewan Direksi			Board of Directors
- Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	12,152,992	11,623,943	Salary and short term - employee benefit
	<u>16,510,389</u>	<u>16,391,064</u>	
Persentase terhadap jumlah beban usaha	<u>4.63%</u>	<u>5.22%</u>	Percentage of total operating expenses

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING**Perjanjian Penjaminan**

Hal-hal berikut adalah Perjanjian Penjaminan yang telah ditandatangani oleh Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2018:

1. Proyek PLTU Batang Jawa Tengah (CJPP)

Pada tanggal 6 Oktober 2011, Perusahaan bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Bhimasena Power Indonesia ("Bhimasena") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Bhimasena berupa *arranging fee* dan *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan perolehan pembiayaan, sedangkan *processing fee* dan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 21 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya perjanjian kerja sama ("PKS") antara Badan Usaha ("BU") dan PJPK.

Pada tanggal 6 Juni 2016, penandatangan perolehan pembiayaan proyek dilakukan antara pemberi pinjaman dan Bhimasena. Pada saat yang bersamaan, penjaminan proyek sudah efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sebesar Rp 300 miliar (nilai penuh) kerugian pertama yang meliputi risiko politik dan terminasi.

2. Proyek Palapa Ring Barat

Pada tanggal 29 Februari 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Palapa Ring Barat ("Palapa Barat") selaku Badan Usaha.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS**Guarantee Agreement**

The following are the Guarantee Agreement entered by the Company as of 31 December 2018:

1. Batang East Java Power Plant Project (CJPP)

On 6 October 2011, the Company together with the Government of the Republic of Indonesia (the "Government") entered into a Guarantee Agreement with PT Bhimasena Power Indonesia ("Bhimasena") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Bhimasena in form of arranging fee and upfront fee at the signing date and financial close date, while processing fee and guarantee are received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 21 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA ("Government's Contracting Agencies") is expired.

On 6 June 2016, signing of financial close was held between lender and Bhimasena. At the same time, guarantee of the project has been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to the first loss of Rp 300 billion (full amount) covering political risk and termination.

2. Western Package Palapa Ring Project

On 29 February 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Palapa Ring Barat ("Palapa Barat") as the Investor.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Perjanjian Penjaminan (lanjutan)****2. Proyek Palapa Ring Barat (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Palapa Barat berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 10 November 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 310 miliar (nilai penuh) yang merupakan kewajiban finansial atas *Availability Payment*, dan 80% dari Biaya Pengakhiran yang ditanggung yang disepakati oleh Palapa Barat dan PJPK.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 2 Maret 2018.

3. Proyek Palapa Ring Tengah

Pada tanggal 4 Maret 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT LEN Telekomunikasi Indonesia ("LTI") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari LTI berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Guarantee Agreement (continued)****2. Western Package Palapa Ring Project (continued)**

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Palapa Barat in form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 10 November 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 310 billion (full amount) covering the financial liability of Availability Payment, and 80% from termination cost approved by Palapa Barat and GCA.

The project operates starting on 2 March 2018.

3. Central Package Palapa Ring Project

On 4 March 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT LEN Telekomunikasi Indonesia ("LTI") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from LTI in form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Perjanjian Penjaminan (lanjutan)****3. Proyek Palapa Ring Tengah (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Desember 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 336 miliar (nilai penuh) yang merupakan kewajiban finansial atas *Availability Payment*, dan 80% dari Biaya Pengakhiran yang ditanggung yang disepakati oleh LTI dan PJPk.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 21 Desember 2018.

4. Proyek Palapa Ring Timur

Pada tanggal 29 September 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Palapa Timur Telematika ("Palapa Timur") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Palapa Timur berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 29 Maret 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 826 miliar (nilai penuh untuk sub-paket 1) dan Rp 570 miliar (nilai penuh untuk sub-paket 2) yang merupakan kewajiban finansial atas *Availability Payment*, dan 80% dari Biaya Pengakhiran yang ditanggung yang disepakati oleh Palapa Timur dan PJPk.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Guarantee Agreement (continued)****3. Central Package Palapa Ring Project (continued)**

On 30 December 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 336 billion (full amount) covering the financial liability of *Availability Payment*, and 80% from termination cost approved by LTI and GCA.

The project operates starting on 21 December 2018.

4. Eastern Package Palapa Ring Project

On 29 September 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Palapa Timur Telematika ("Palapa Timur") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Palapa Timur in form of *upfront fee* at the signing date and effective date of guarantees, while *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 29 March 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 826 billion (full amount for sub-package 1) and Rp 570 billion (full amount for sub-package 2) covering the financial liability of *Availability Payment*, and 80% from termination cost approved by Palapa Timur and GCA.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/47 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

5. Proyek Tol Batang - Semarang

Pada tanggal 27 April 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Semarang Batang ("Jasamarga Semarang Batang") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Semarang Batang berupa *upfront fee* pada saat tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 20 Juni 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.450 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dan dana talangan tanah.

6. Proyek Tol Pandaan - Malang

Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Pandaan Malang ("Jasamarga Pandaan Malang") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Pandaan Malang berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

5. Batang - Semarang Toll Road Project

On 27 April 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Semarang Batang ("Jasamarga Semarang Batang") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Jasamarga Semarang Batang in form of *upfront fee* at the effective date of guarantees, while *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 20 June 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,450 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

6. Pandaan - Malang Toll Road Project

On 9 June 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Pandaan Malang ("Jasamarga Pandaan Malang") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Jasamarga Pandaan Malang in form of *upfront fee* at the effective date of guarantees, while *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Perjanjian Penjaminan (lanjutan)****6. Proyek Tol Pandaan - Malang (lanjutan)**

Pada tanggal 3 Oktober 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 5,6 triliun (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah, dana likuiditas terbatas dan pengakhiran akibat keadaan kahar.

7. Proyek Tol Manado - Bitung

Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Manado Bitung ("Jasamarga Manado Bitung") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Manado Bitung berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 6 Oktober 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 3,4 triliun (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah, dana likuiditas terbatas dan pengakhiran akibat keadaan kahar.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Guarantee Agreement (continued)****6. Pandaan - Malang Toll Road Project (continued)**

On 3 October 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 5.6 trillion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund, limited liquidity fund and termination due to force majeure.

7. Manado - Bitung Toll Road Project

On 9 June 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Manado Bitung ("Jasamarga Manado Bitung") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Jasamarga Manado Bitung in form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 6 October 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 3.4 trillion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund, limited liquidity fund and termination due to force majeure.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/49 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

8. Proyek Tol Balikpapan - Samarinda

Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Balikpapan Samarinda ("Jasamarga Balikpapan Samarinda") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Balikpapan Samarinda berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 2 Desember 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 6,1 triliun (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah, dana likuiditas terbatas dan pengakhiran akibat keadaan kahar.

9. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum ("SPAM") Umbulan

Pada tanggal 21 Juli 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan ("Meta") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Meta berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

8. Balikpapan - Samarinda Toll Road Project

On 9 June 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Balikpapan Samarinda ("Jasamarga Balikpapan Samarinda") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Jasamarga Balikpapan Samarinda in form of *upfront fee* at the effective date of guarantees, while *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 2 December 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 6.1 trillion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund, limited liquidity fund and termination due to force majeure.

9. Water Supply System Umbulan Project

On 21 July 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Meta Adhya Tirta Umbulan ("Meta") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Meta in form of *upfront fee* at the signing date and effective date of guarantees, while *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Perjanjian Penjaminan (lanjutan)****9. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum ("SPAM") Umbulan (lanjutan)**

Pada tanggal 10 Februari 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 180 miliar (nilai penuh) yang meliputi cidera janji pembayaran bulanan dan 80% atas harga pembelian proyek yang wajib dibayar oleh PJPK ke BU sesuai PKS.

10. Proyek Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek ("Jasamarga Jakarta-Cikampek Elevated") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Jakarta-Cikampek Elevated berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian penjaminan dan surat imbal jasa penjaminan. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 8 Mei 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 600 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif dan risiko politik.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Guarantee Agreement (continued)****9. Water Supply System Umbulan Project (continued)**

On 10 February 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 180 billion (full amount) covering the breach of monthly payment promise and 80% of project purchase price to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

10. Jakarta – Cikampek II Elevated Tol Road Project

On 22 February 2017, the Company entered into a Jalan Layang Cikampek ("Jasamarga Jakarta-Cikampek Elevated") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Jakarta-Cikampek Elevated in form of upfront fee at the signing date of guarantee agreement and fee letter. Meanwhile, guarantee fee at the effective date of guarantee until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 8 May 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 600 billion (full amount) covering tariff adjustment and political risk.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/51 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

11. Proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Citra Karya Jabar Tol ("Citra Karya") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Citra Karya berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan surat imbal jasa penjaminan, serta Perusahaan telah menerima dan menyampaikan secara tertulis persetujuan atas Berita Acara Pengadaan Tanah. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 1.430 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dan dana talangan tanah.

12. Proyek Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Waskita Bumi Wira ("Waskita Bumi") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Waskita Bumi berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan surat imbal jasa penjaminan, serta Perusahaan telah menerima dan menyampaikan secara tertulis persetujuan atas Berita Acara Pengadaan Tanah. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 7 Desember 2017, penjaminan proyek telah efektif untuk ruas Krian-Legundi-Bunder dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan. Untuk ruas Bunder-Manyar masih menunggu terpenuhinya syarat efektivitas penjaminan.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

11. Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road Project

On 22 February 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Citra Karya Jabar Tol ("Citra Karya") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Citra Karya in form of upfront fee at the signing date of guarantee agreement and fee letter, and also the Company has received and submitted approval of minutes of land acquisition. Meanwhile, guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 1,430 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

12. Krian-Legundi-Bunder-Manyar Toll Road Project

On 22 February 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Waskita Bumi Wira ("Waskita Bumi") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Waskita Bumi in form of upfront fee at the signing date of guarantee agreement and fee letter, and also the Company has received and submitted approval of minutes of land acquisition. Meanwhile, guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 7 December 2017, the guarantee of the project has been effective for Krian-Legundi-Bunder segment road since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled. For Bunder-Manyar segment road still waiting fulfillment all the requirements in the Guarantee Agreement.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Perjanjian Penjaminan (lanjutan)****12. Proyek Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (lanjutan)**

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 649 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik dan keterlambatan pengadaan tanah.

13. Proyek Tol Serang - Panimbang

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Wijaya Karya Serang Panimbang ("Wika Sepang") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Wika Sepang berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan surat imbal jasa penjaminan, serta Perusahaan telah menerima dan menyampaikan secara tertulis persetujuan atas Berita Acara Pengadaan Tanah. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 17 November 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 1.443 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dan dana talangan tanah.

Pada bulan Oktober 2018, dilakukan amandemen atas nilai tambahan maksimum penjaminan dana talangan tanah sehingga estimasi maksimum nilai penjaminan proyek ini menjadi Rp 2.053 miliar (nilai penuh).

14. Proyek Tol Probolinggo - Banyuwangi

Pada tanggal 29 Desember 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi ("Jasamarga Probowangi") selaku Badan Usaha.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Guarantee Agreement (continued)****12. Krian-Legundi-Bunder-Manyar Toll Road Project (continued)**

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 649 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk and delay in land acquisition.

13. Serang - Panimbang Toll Road Project

On 22 February 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Wijaya Karya Serang Panimbang ("Wika Sepang") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Wika Sepang in form of *upfront fee* at the signing date of guarantee agreement and fee letter, and also the Company has received and submitted approval of minutes of land acquisition. Meanwhile, *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 17 November 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 1,443 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

In October 2018, there was an amendment of additional of land bailout fund maximum guarantee therefore the estimated maximum guarantee of the project is Rp 2,053 billion (full amount).

14. Probolinggo - Banyuwangi Toll Road Project

On 29 December 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi ("Jasamarga Probowangi") as the Investor.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/53 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

14. Proyek Tol Probolinggo - Banyuwangi (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Probawangi berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.281 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dan dana talangan tanah.

15. Proyek Tol Jakarta - Cikampek II Selatan

Pada tanggal 29 Desember 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Japek Selatan ("Jasamarga Japek Selatan") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Japek Selatan berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.280 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dan dana talangan tanah.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

14. Probolinggo - Banyuwangi Toll Road Project (continued)

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Citra Karya in form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As of the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,281 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

15. Jakarta - Cikampek II South Toll Road Project

On 29 December 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Japek Selatan ("Jasamarga Japek Selatan") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Jasamarga Japek Selatan in form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As of the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,280 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Perjanjian Penjaminan (lanjutan)****16. Proyek SPAM Lampung**

Pada tanggal 14 Februari 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Adhya Tirta Lampung ("ATL") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari ATL berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 14 Agustus 2018, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 150 miliar (nilai penuh) yang meliputi cedera janji pembayaran bulanan dan 80% atas harga pembelian proyek yang wajib dibayar oleh PJPK ke BU sesuai PKS.

17. Proyek SPAM Semarang Barat

Pada tanggal 23 November 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Air Semarang Barat ("ASB") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari ASB berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 169 miliar (nilai penuh) yang merupakan biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung (termasuk bunga keterlambatan pembayaran) dan biaya pengakhiran yang ditanggung sesuai dengan perjanjian penjaminan.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Guarantee Agreement (continued)****16. Water Supply System Lampung Project**

On 14 February 2018, the Company entered into a guarantee agreement with PT Adhya Tirta Lampung ("ATL") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from ATL in form of *upfront fee* at the signing date and effective date of guarantees, while *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 14 August 2018, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 150 billion (full amount) covering the breach of monthly payment promise and 80% of project purchase price to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

17. Water Supply System West Semarang Project

On 23 November 2018, the Company entered into a guarantee agreement with PT Air Semarang Barat ("ASB") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from ASB in form of *upfront fee* that payable at the signing date, while *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As of the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 169 billion (full amount) that is non-termination costs (including late payment interest) and termination costs in accordance with the guarantee agreement.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/55 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

18. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan pinjaman proyek pembangunan fasilitas infrastruktur pariwisata KEK Mandalika dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ *Indonesia Tourism Development Corporation* ("ITDC") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari ITDC berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 35 tahun.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan pinjaman belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sampai dengan 15,5% dari nilai pinjaman sebesar USD 248.400.000 (nilai penuh) beserta biaya bunga dan biaya lainnya.

Terkait risiko keterlambatan pengadaan tanah, batas akhir serah terima tanah untuk beberapa proyek jalan tol yang dijamin Perusahaan telah terlewati. Dalam hal adanya kompensasi tunai atas keterlambatan penyerahan tanah tersebut dapat diajukan oleh Badan Usaha (BU) kepada PJP 7 hari setelah diterbitkannya SLO. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, hanya 1 dari 5 proyek tersebut yang telah terbit SLO, yaitu pada bulan Desember 2018. Dalam hal PJP tidak memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi tersebut sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam perjanjian kerjasama, maka BU dapat mengajukan klaim kepada PT PII. Estimasi potensi klaim yang dapat diajukan kepada PT PII untuk keseluruhan proyek adalah sebesar Rp 306 miliar (nilai penuh) dengan asumsi keterlambatan pengadaan tanah adalah maksimal 6 bulan (tidak diaudit).

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

18. Special Economic Zone (SEZ) Mandalika

On 31 December 2018, the Company entered into a loan guarantee agreement for the construction of SEZ Mandalika tourism infrastructure facilities with *Indonesia Tourism Development Corporation* ("ITDC") as the Investor.

Based on the loan guarantee implementation agreement that signed on 28 December 2018, the Company is entitled to received fees from ITDC in form of *upfront fee* that payable at the signing date with payment stage in accordance to the agreement, while *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee for 35 years.

As of the reporting date, the guarantee of the loan has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting up to 15.5% of the principal loan amounting to USD 248,400,000 (full amount) plus interests and other charges.

Regarding the risk of delay in land acquisition, the due date of land acquisition for few toll road project that guaranteed by Company have passed. In case of any cash compensation incurred due to delay in these land acquisition could be submitted by the Investor to CA 7 days after the issuance of the LOC. As of 31 December 2018, only 1 of 5 project that LOC has issued, which was in December 2018. If the GCA did not fulfill the obligation to pay cash compensation in accordance with the time limit stipulated in the cooperation agreement, the investor could submit a claim to the Company. The estimated potential claims for all guaranteed projects that could be submitted to the Company is Rp 306 billion (full amount), assuming the delay reaches maximum limit of 6 months (unaudited).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Perjanjian Penjaminan (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah menelaah kewajibannya, baik dalam bentuk potensi klaim dan/atau klaim aktual atas risiko-risiko yang ditanggung Perusahaan dalam perjanjian penjaminan, untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. Atas penilaian tersebut, pada tanggal 31 Desember 2018 tidak ada penyisihan atas klaim yang dibentuk oleh Perusahaan.

Atas semua perjanjian penjaminan yang dimiliki diatas, Perusahaan juga menandatangani perjanjian dengan para PJPK (KPBU) atau BUMN Terjamin (Non-KPBU) masing-masing proyek yang mengatur tata cara pengembalian hak regres pada saat pembayaran klaim dilakukan.

Perjanjian sewa kantor dengan PT Mahkota Prima Properti

Pada tanggal 22 Agustus 2016 Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Mahkota Prima Properti. Periode sewa adalah untuk empat (4) tahun dimulai dari 1 September 2016 dan berakhir pada 31 Agustus 2020.

Perjanjian sewa ini meliputi area yang digunakan untuk ruangan kantor. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sewa, jasa pemeliharaan dan biaya lainnya terkait sewa ke PT Mahkota Prima Properti. Pembayaran untuk seluruh jumlah sewa dan jasa pemeliharaan dibayarkan setiap bulan. Sebagai tambahan, Perusahaan juga membayar dimuka atas deposit sekuriti yang ditahan oleh PT Mahkota Prima Properti tanpa kewajiban untuk membayar bunga kepada Perusahaan. Seluruh deposit tersebut akan dikembalikan pada waktu berakhirnya perjanjian sewa ini, jika Perusahaan tidak berniat untuk melanjutkan sewa.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Guarantee Agreement (continued)**

As at 31 December 2018, the Company has reviewed its obligation, whether in the form of potential claims and/or actual claims over the risks borne by the Company as stipulated in the guarantee agreement, to assess whether any provision required to be recognized in the financial statements. Based on the assessment, on 31 December 2018, there was no provision of claims deemed necessary to be made by the Company.

Upon the signing of guarantee agreements above, the Company also signed agreement with GCA (PPP) or SOE (Non-PPP) of each projects which stipulates term and conditions of recourse right when the Company make any claim payment.

Rent office agreement with PT Mahkota Prima Properti

On 22 August 2016, the Company entered into a lease agreement with PT Mahkota Prima Properti. The lease period is for four (4) years starting from 1 September 2016 and expires on 31 August 2020.

This lease agreement covers an area that is used for office space. Based on this agreement, the Company has an obligation to pay rent, service charges and other charges to PT Mahkota Prima Properti. Payment for the full amount of rent and service charges was charged monthly. In addition, the Company also paid in advance for security deposit, which is held by the PT Mahkota Prima Properti without liability to the Company for interest. All deposits will be refunded on the expiration of this lease, if the Company does not intend to continue the lease.

24. LIABILITAS KONTINJENSI DAN KOMITMEN**Komitmen sewa**

Perusahaan menandatangani perjanjian sewa ruang kantor dengan masa sewa sampai dengan empat tahun yang tidak dapat dibatalkan. Jumlah pembayaran sewa minimum di masa depan dalam perjanjian sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

	2018
Tidak lebih dari 1 tahun	21,337,676
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 4 tahun	14,225,117
	<u>35,562,793</u>

24. CONTINGENT LIABILITIES AND CAPITAL COMMITMENTS**Rental commitment**

The Company signed office space lease agreements with non-cancellable lease period up to four years. The future aggregate minimum lease payments under non-cancellable leases agreement are as follows:

	2017	
	21,337,676	No later than 1 year
	35,562,793	More than 1 year and no later than 4 years
	<u>56,900,469</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/57 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**24. LIABILITAS KONTINJENSI DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

Komitmen sewa (lanjutan)

Kecuali atas komitmen sewa di atas dan perjanjian penjaminan (lihat Catatan 23), Perusahaan tidak memiliki liabilitas kontinjensi dan komitmen yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

24. CONTINGENT LIABILITIES AND CAPITAL COMMITMENTS (continued)

Rental commitment (continued)

Except for the rental commitment above and the guarantee contracts (refer to Note 23), the Company has no significant contingent liabilities and capital commitments as at 31 December 2018 and 2017.

25. TRANSAKSI NON-KAS

Transaksi non-kas yang penting adalah sebagai berikut:

25. NON-CASH TRANSACTIONS

The principal non-cash transactions are as follows:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Pencadangan saldo laba	23,524,000	25,122,338	Appropriation retained earnings
Perubahan nilai pasar atas aset keuangan tersedia untuk dijual	(143,731,473)	58,234,485	Changes in fair value of financial assets available for sale

26. STANDAR AKUNTANSI BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2018 sebagai berikut :

- ISAK 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka";
- ISAK 34 "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan";
- Amendemen PSAK 24 "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program";
- Penyesuaian Tahunan 2018 PSAK 22 "Kombinasi Bisnis";
- Penyesuaian Tahunan 2018 PSAK 26 "Biaya Pinjaman";
- Penyesuaian Tahunan 2018 PSAK 46 "Pajak Penghasilan";
- Penyesuaian Tahunan 2018 PSAK 66 "Pengaturan Bersama".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2019.

26. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2018 as follows :

- ISFAS 33 "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration";
- ISFAS 34 "Uncertainty over Income Tax Treatment";
- The amendments to SFAS 24 "Employee Benefit: Plan Amendment, Curtailment or Settlement";
- Annual Improvement 2018 SFAS 22 "Business Combinations";
- Annual Improvement 2018 SFAS 26 "Borrowing Costs";
- Annual Improvement 2018 SFAS 46 "Income Taxes";
- Annual Improvement 2018 SFAS 66 "Joint Arrangements".

The above standards will be effective on 1 January 2019.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**26. STANDAR AKUNTANSI BARU YANG TELAH
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73 "Sewa";
- Amendemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amendemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan"; dan
- Amendemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

- PSAK 112 "Akuntansi Wakaf".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

**26. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

- SFAS 71 "Financial Instruments";
- SFAS 72 "Revenue from Contract with Customers";
- SFAS 73 "Leases";
- The amendments to SFAS 15 "Investments in Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures";
- The amendments to SFAS 62 "Insurance Contract - Implementation of SFAS 71: Financial Instruments"; and
- The amendments to SFAS 71 "Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation".

The above standards will be effective on 1 January 2020.

- SFAS 112 "Accounting for Endowments".

The above standards will be effective on 1 January 2021.

As at the authorisation date of these financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Company's financial statements.

**27. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
NERACA****Perjanjian Penjaminan****Proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan**

Pada tanggal 22 Februari 2019, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan.

Informasi terkait perjanjian penjaminan Proyek Tol Cileunyi-Sumadang-Dawuan pada Catatan 23 No. 11.

27. SUBSEQUENT EVENTS**Guarantee Agreement****Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road Project**

On 22 February 2019, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Information in respect of guarantee agreement is disclosed in Note 23 No. 11.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

2018

Laporan Tahunan
Annual Report

**“Dengan PII,
Infrastruktur Jadi Teratur”**

PII, for a Well-Structured Infrastructure

“Dengan PII, Infrastruktur Jadi Teratur”
PII, for a Well-Structured Infrastructure



PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Capital Place, Lt 7 & 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710 -Indonesia
Tel : 021-5795 0550
Fax : 021-5795 0040
Website : www.ptpii.co.id

